BCA syariah

Optimizing Acceleration

Laporan Tahunan
2023




BCAsyariah
Assalamu'alaikum, Hamba Allah
Pembelian
Pembayaran
Cardless
Jadwal Sholat
MUDHARABAH

Penjelasan Tema

2023

Optimizing Acceleration

Berbagai tantangan di tahun 2023 mendorong PT Bank BCA Syariah (BCAS) untuk dapat beradaptasi terhadap perubahan dengan terus berinovasi. Untuk mencapai kinerja yang berkualitas dan berkelanjutan, BCAS mengimplementasikan berbagai strategi dengan melakukan percepatan di segala bidang seperti peningkatan *customer base*, penyaluran pembiayaan, serta adopsi Teknologi Informasi.

Pada tahun 2023, BCAS meluncurkan fitur pembukaan rekening *online* pada BCA Syariah *Mobile* yang mendorong percepatan pertumbuhan nasabah baru. BCAS pun memastikan kenyamanan dan keamanan nasabah dalam bertransaksi dengan melakukan modernisasi infrastruktur Teknologi Informasi serta memastikan Sistem Manajemen Keamanan Informasi kami telah sesuai dengan standar global.

Komitmen kami dalam melakukan percepatan dan memperkuat pertumbuhan dapat memaksimalisasi nilai tambah bagi semua *stakeholder* terutama dalam memberikan produk dan layanan prima bagi nasabah.

Keberlanjutan Tema



2022

Move Faster, Grow Stronger

Setelah 2 tahun pandemi COVID-19, 2022 dimulai dengan harapan baru untuk pemulihan ekonomi Indonesia dan dunia. Namun, gejolak geopolitik global, terutama dari konflik Rusia-Ukraina, membuat tahun tersebut tetap menantang dengan inflasi yang meningkat. Meski demikian, Pemerintah Indonesia berhasil menjaga kinerja ekonomi di tengah volatilitas global, sementara BCAS terus mendukung perekonomian dengan mewujudkan kinerja yang membanggakan.

Sebagai Bank Syariah, BCAS hadir untuk memberikan solusi bagi nasabah dan mendukung perekonomian bangsa. Seiring dengan pemulihan ekonomi, BCAS berkomitmen menjadi mitra yang solid bagi semua nasabah, termasuk yang terdampak pandemi, dengan tetap memegang prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Di tahun 2022, BCAS menyempurnakan aplikasi BCA Syariah *Mobile* dengan tambahan fitur untuk pengalaman pelanggan yang lebih baik. BCAS pun fokus untuk menyederhanakan proses pembiayaan dengan menerapkan teknologi Robotic Process Automation (RPA). BCAS juga meningkatkan literasi keuangan dan mendukung UMKM perempuan melalui program WEpreneur. Inisiatif keuangan berkelanjutan diperkuat untuk mendukung usaha berwawasan lingkungan. Tahun 2022 menjadi momentum bagi BCAS untuk bergerak dengan lebih cepat dan bertumbuh dengan lebih kuat sehingga mencapai nilai tinggi bagi nasabah dan pemangku kepentingan.



2021

Strengthening Synergy and Maintaining Sustainable Growth

Setelah tahun 2020 yang penuh tantangan akibat pandemi COVID-19, Indonesia memasuki 2021 dengan optimisme namun tetap waspada. Pandemi mulai mereda di awal 2021 berkat penanganan pemerintah dan percepatan vaksinasi, namun varian Delta menimbulkan tantangan baru di pertengahan tahun, termasuk bagi ekonomi dan kemanusiaan. Hingga kemudian, kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat memengaruhi dunia usaha dan industri keuangan.

BCAS menyadari pentingnya memahami dan mengantisipasi kebutuhan nasabah, terutama terkait transaksi digital yang semakin meningkat. Selama 2021, BCAS memperkuat sinergi dengan BCA dan mitra strategis untuk mengembangkan infrastruktur teknologi dan layanan terdepan. Dalam penyaluran pembiayaan, BCAS fokus pada solusi terbaik sesuai kondisi nasabah dan konsisten menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudent banking practice*) serta pengelolaan risiko yang baik. Memperkuat sinergi dan kepentingan nasabah serta pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci sukses BCAS dalam menjaga pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan untuk pengembangan bisnis jangka panjang.



2020

Committed to be A Reliable Partner During The Uncertainties

COVID-19 melemahkan sektor ekonomi dan menciptakan ketidakpastian bagi industri perbankan, termasuk BCAS. Menghadapi tantangan ini, BCAS tetap mengutamakan kemitraan dengan nasabah, memahami kebutuhan mereka dalam menghadapi perlambatan ekonomi.

BCAS merancang dan menerapkan langkah-langkah strategis secara *prudent* sepanjang tahun 2020. Secara eksternal, BCAS memperhatikan kondisi ekonomi dan peluang bisnis, membangun sinergi dengan mitra. Secara internal, BCAS meningkatkan kapasitas internal, membangun infrastruktur yang andal, dan mengelola risiko. Komitmen kami untuk menjadi mitra yang dapat diandalkan dalam menghadapi ketidakpastian perekonomian merupakan kunci sukses BCAS dalam mencapai pertumbuhan berkualitas dan berkelanjutan.



2019

Mempertahankan Kualitas dan Pertumbuhan yang Berkesinambungan

Tahun 2019, memberikan tantangan dan sekaligus peluang bagi industri perbankan Indonesia dan BCAS khususnya. Bank dituntut untuk menunjukkan performa terbaiknya agar dapat memberikan nilai tambah bagi seluruh *stakeholder* tapi di saat yang sama Bank juga harus tetap berhati-hati demi menjaga keberlangsungan usaha.

BCAS senantiasa mengimplementasikan kebijakan strategis secara hati-hati yang diarahkan pada upaya mempertahankan portofolio pembiayaan dan dana yang berkualitas, menjaga permodalan yang kuat dan mengelola posisi likuiditas yang sehat. Semua upaya yang dilakukan BCAS bertujuan menjaga momentum pertumbuhan yang berkualitas dan pengembangan bisnis Bank dalam jangka panjang.

Peristiwa Penting dan Apresiasi

Peristiwa Penting

Januari



25 JANUARI 2023

BCAS meraih 9 penghargaan pada Infobank 6th Satisfaction Loyalty Engagement Awards 2023

Maret



21 MARET 2023

BCAS meraih penghargaan sebagai Bank Penyedia Layanan Pembayaran Zakat Terbaik BAZNAS RI



21 MARET 2023

BCAS mengumumkan hasil kinerja perusahan 2022 yang tumbuh positif dari segi Aset, Dana Pihak Ketiga dan Laba

April



30 MARET 2023

BCAS mendapatkan penghargaan sebagai *The Most Innovative Sharia Bank for The Providing Reliable Digital Banking Solutions, (Category: Sharia Bank)* dalam ajang Warta Ekonomi Indonesia Digital Innovation Award



21 APRIL 2023

BCAS mendapatkan 5 penghargaan dalam Infobank Banking Service Excellence Awards 2022

Juni



6 JUNI 2023

BCAS meluncurkan fitur Pembukaan Rekening *Online* di BCA Syariah Syariah *Mobile*

Agustus



7 AGUSTUS 2023

BCAS melaporkan pencapaian kinerja positif perusahaan untuk Semester 1- 2023



10 AGUSTUS 2023

BCAS perluas jaringan cabang di Surabaya melalui relokasi KC Surabaya dan pembukaan Kantor Cabang Pembantu Sungkono



21 AGUSTUS 2023

BCAS meraih penghargaan sebagai "Bank Implementasi KEJAR Terbaik" di kategori Bank Syariah dari Otoritas Jasa Keuangan

September



25 AGUSTUS 2023

BCAS Raih *Excellent Financial Performance Bank in 10 Consecutive Years* (2013-2022) dalam 26th Infobank Award 2023



12 SEPTEMBER 2023

BCAS raih sertifikat ISO 27001:2013

Oktober



16 OKTOBER 2023

BCAS raih peringkat idAA+/Stable Outlook dari Pefindo



23 OKTOBER 2023

BCAS raih penghargaan sebagai Top 3 *Best* Halal Financial Support Indonesia Halal Industry Award



27 OKTOBER 2023

BCAS menandatangani kerja sama Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SIPA) dengan 3 Bank Syariah

November



2 NOVEMBER 2023

BCAS melaksanakan penandatanganan kemitraan Transaksi Wakalah Bi Al-Istitsmar Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan



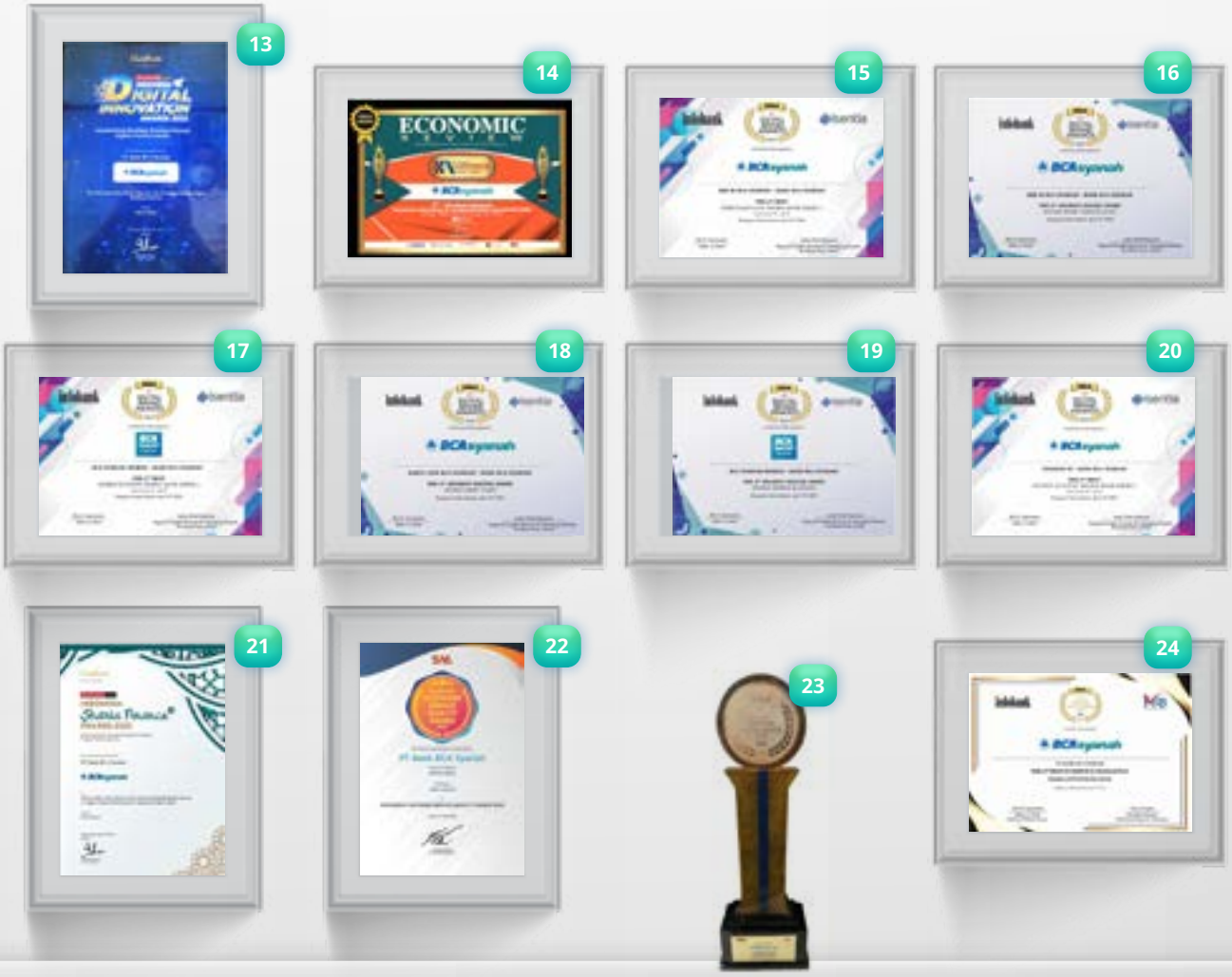
16 NOVEMBER 2023

BCAS buka Kantor Cabang Pembantu di Metro Lampung

Penghargaan dan Sertifikasi



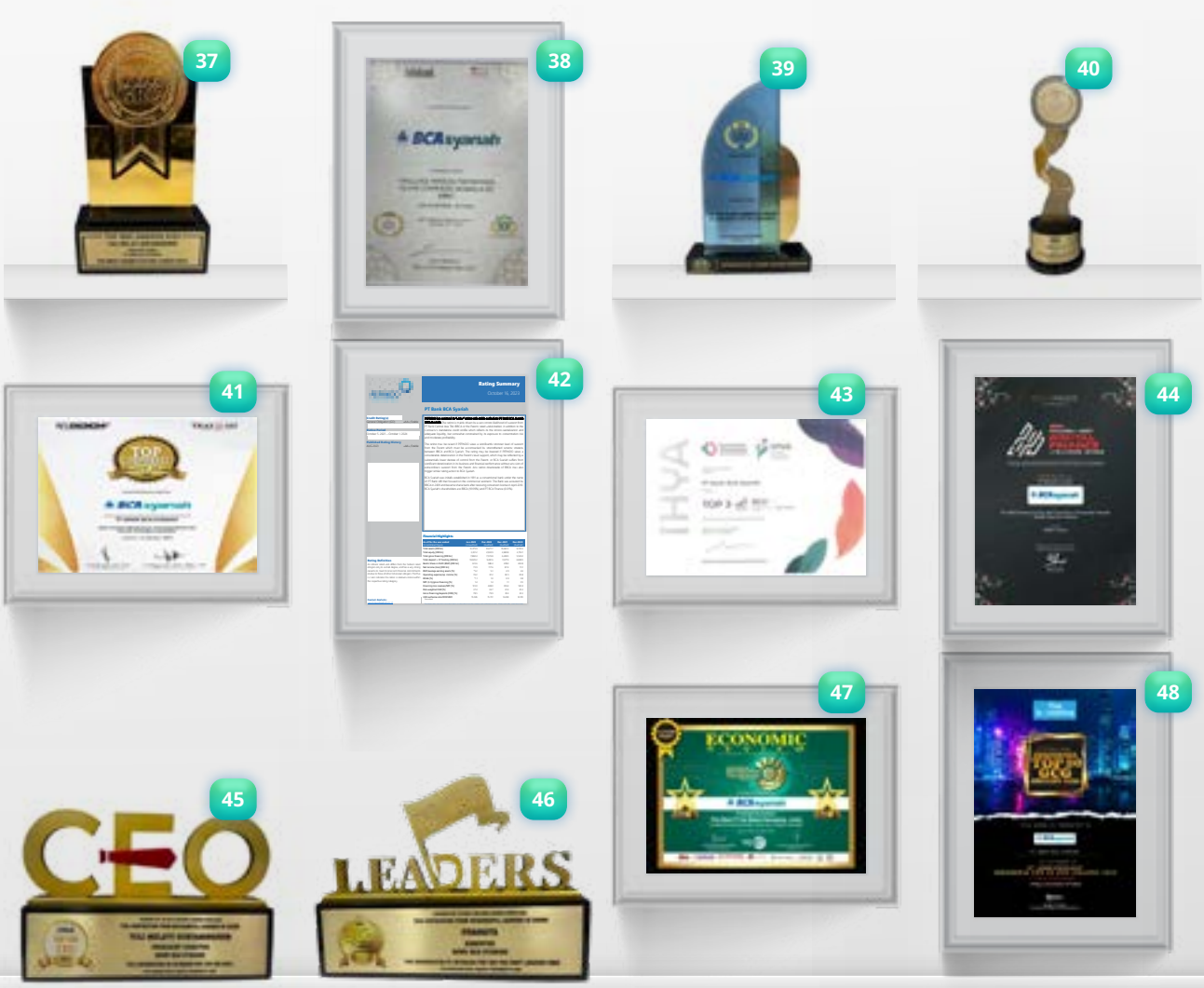
No.	Tanggal	Penyelenggara	Penghargaan
1	25 Januari 2023	Infobank	Peringkat III Loyalty Award Bank Umum Syariah
2	25 Januari 2023	Infobank	Peringkat II Marketing Engagement Bank Umum Syariah
3	25 Januari 2023	Infobank	The Best Sharia Banking In Customer Satisfaction
4	25 Januari 2023	Infobank	Peringkat III Satisfaction (Customer Service) Bank Umum Syariah
5	25 Januari 2023	Infobank	Peringkat II Satisfaction (Teller) Bank Umum Syariah
6	25 Januari 2023	Infobank	Peringkat II Satisfaction (Kantor Cabang) Bank Umum Syariah
7	25 Januari 2023	Infobank	Peringkat II Satisfaction (ATM) Bank Umum Syariah
8	25 Januari 2023	Infobank	Peringkat II Satisfaction (Mobile Banking) Bank Umum Syariah
9	25 Januari 2023	Infobank	The 3rd Rank Sharia Bank In Satisfaction, Loyalty & Engagement 2023
10	17 Februari 2023	Iconomics	Top Sharia Business Unit KBMI 1
11	17 Februari 2023	Iconomics	Most Popular Leader in Sharia Financial
12	21 Maret 2023	BAZNAS	Bank Penyedia Layanan Pembayaran Zakat Terbaik BAZNAS RI



No.	Tanggal	Penyelenggara	Penghargaan
13	30 Maret 2023	Warta Ekonomi	The Most Innovative Sharia Bank for The Providing Reliable Digital Banking Solutions, (Category: Sharia Bank)
14	5 April 2023	Economic Review	1st The Best Corporate Secretary & Communication Award VIII 2023
15	12 April 2023	Infobank	KPR iB - 2nd Best Mortgage Loan Sharia Bank- KBMI1
16	12 April 2023	Infobank	KKB iB - 3rd Highest Digital Index Sharia Bank Vehicle Loan - KBMI 1
17	12 April 2023	Infobank	BCA Syariah Mobile - 2nd Best Mobile Banking Sharia - KBMI 1
18	12 April 2023	Infobank	Kartu ATM BCA Syariah - 3rd Highest Digital Index Sharia Debit Card
19	12 April 2023	Infobank	BCA Syariah Mobile - 3rd Highest Digital Index Sharia Mobile Banking
20	12 April 2023	Infobank	Tahapan iB - 2nd Best Savings Account Sharia Bank - KBMI 1
21	10 Mei 2023	Warta Ekonomi	Indonesia Best Sharia Finance 2023 With Oustanding Banking Programs to Support Financial Inclusion dan Community Empowerment
22	30 Mei 2023	SWA	Very Good, Kategori Bank Syariah
23	20 Juni 2023	Infobank	Golden Recognition – 5 Consecutive years in Service Excellence, Rank: Golden, Sharia Commercial Bank
24	20 Juni 2023	Infobank	The 2nd Best In Service Excellence, Rank: 2nd Sharia Commercial Bank



No.	Tanggal	Penyelenggara	Penghargaan
25	20 Juni 2023	Infobank	The 1st Best Customer Service in Service Excellence, Rank: 1st Sharia Commercial Bank
26	20 Juni 2023	Infobank	The 1st Best Teller in Service Excellence, Rank: 1st Sharia Commercial Bank
27	20 Juni 2023	Infobank	The 1st Best Walk-in Channel, Rank: 1st Sharia Commercial Bank
28	20 Juni 2023	Infobank	The 2nd BEST WALK-IN CHANNEL & DIGITAL CHANNEL IN SERVICE EXCELLENCE, Rank: 2nd Sharia Commercial Bank
29	20 Juni 2023	Infobank	The 1st Best– E-mail, Rank: 1st Sharia Commercial Bank
30	20 Juni 2023	Infobank	The 2nd Best - Internet Banking, Rank: 2nd Sharia Commercial Bank
31	28 Juli 2023	Warta Ekonomi	Indonesia Best Bank 2023 for The Inclusive Sharia Banking Services
32	5 Agustus 2023	Peluang	Bank Berpredikat 'Sangat Prima', kategori Modal Inti s/d Rp6 Triliun (KBMI 1)
33	20 Agustus 2023	OJK	Bank Implementasi Kejar Terbaik Kategori Bank Umum Syariah
34	25 Agustus 2023	Infobank	Excellent Financial Performance Bank in 2022
35	25 Agustus 2023	Infobank	Excellent Financial Performance Bank in 10 Consecutive Years (2013-2022)
36	6 September 2023	Majalah Top Business	Top GRC Awards 2023 #4 Stars



No.	Tanggal	Penyelenggara	Penghargaan
37	6 September 2023	Majalah Top Business	The Most Committed GRC Leader 2023
38	27 September 2023	Infobank	Excellence Financial Performance Islamic Commercial Banking in 2022 KBMI 1 (Asset Class IDR 10 Trillion -< IDR 25 Trillion)
39	27 September 2023	Infobank	The Best Islamic Commercial Banking in Governance, Risk and Compliance
40	27 September 2023	Infobank	Excellence Financial Performance Islamic Banking in 5 Consecutive Year (2018-2022)
41	18 Oktober 2023	InfoEkonomi.ID	Top Corporate Finance Award Kategori Banking
42	6 Oktober 2023	Pefindo	Peringkat idAA+ dengan prospek stabil
43	23 Oktober 2023	Kementerian Perindustrian Republik Indonesia	Top 3 Best Halal Financial Support
44	29 November 2023	Warta Ekonomi	Best Digital Finance for Ease and Convenience of Transactions Through Reliable Electronic Channels
45	5 Desember 2023	Infobank	The Recognition of Infobank Top 100 CEO 2023
46	5 Desember 2023	Infobank	The Recognition of Infobank Top 200 The Next Leaders 2023
47	8 Desember 2023	Economic Review	The Best IT for Bank Company 2023 Category Sharia Bank
48	15 Desember 2023	Iconomics	Indonesia TOP GCG Award 2023, Sharia Bank Category

Daftar Isi

3 Tema
4 Keberlanjutan Tema
6 Peristiwa Penting dan Apresiasi
8 Penghargaan dan Sertifikasi

14 Ikhtisar Utama

20 Ikhtisar Kinerja Posisi Keuangan
22 Ikhtisar Kinerja Laba Rugi Komprehensif
23 Ikhtisar Kinerja Rasio Keuangan
26 Ikhtisar Operasional Nonkeuangan
26 Informasi Saham, Obligasi, Sukuk, atau Obligasi Konversi dan Aksi Korporasi

28 Laporan Manajemen

30 Laporan Dewan Komisaris
36 Laporan Dewan Pengawas Syariah
40 Laporan Direksi
48 Lembar Tanda Tangan Dewan Komisaris & Direksi

52 Profil Perusahaan

54 Informasi Umum Perusahaan
56 Riwayat Singkat BCAS
56 Visi, Misi & Tata Nilai Perusahaan
58 Jejak Langkah
60 Bidang Usaha
61 Produk, Jasa, dan Layanan
62 Peta Wilayah Usaha dan Alamat Jaringan
64 Struktur Organisasi
66 Profil Dewan Komisaris
69 Profil Direksi
74 Perubahan Komposisi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi
75 Profil Dewan Pengawas Syariah
77 Profil Pejabat Eksekutif
78 Pengelolaan Sumber Daya Manusia
81 Komposisi Pemegang Saham BCAS
83 Struktur Grup Perusahaan
83 Entitas Anak dan Asosiasi
83 Lembaga dan Profesi Penunjang Perusahaan
84 Keanggotaan Asosiasi
85 Akses pada Informasi Perusahaan
85 Informasi Lainnya

86 Analisis dan Pembahasan Manajemen

88 Tinjauan Ekonomi Global
88 Tinjauan Ekonomi Nasional
88 Tinjauan Industri Perbankan
89 Tinjauan Operasi per Segmen Usaha
89 Tinjauan Kinerja Keuangan
108 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023 serta Proyeksi Tahun 2024
110 Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal
111 Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal
111 Investasi Barang Modal
111 Informasi dan Fakta Material setelah Tanggal Laporan Akuntan
112 Kebijakan Dividen
112 Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen
112 Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
112 Informasi Material
113 Informasi Material Lainnya
113 Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi
115 Perubahan Peraturan dan/atau Perundang-Undangan
116 Perubahan Kebijakan Akuntansi

116 Pendukung Bisnis
120 Praktik Manajemen Risiko
160 Aspek Pemasaran & Pangsa Pasar
162 Prospek Usaha Tahun 2024
163 Informasi Kelangsungan Usaha

164 Tata Kelola Perusahaan

167 Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
170 Rapat Umum Pemegang Saham
173 Dewan Komisaris
180 Komisaris Independen
181 Direksi
188 Dewan Pengawas Syariah
194 Rapat Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, dan Rapat Gabungan
198 Hubungan Afiliasi
198 Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi
200 Kebijakan Remunerasi
204 Komite-Komite di Bawah Komisaris
218 Komite-Komite Eksekutif Direksi
229 Sekretaris Perusahaan
235 Fungsi Audit Internal
240 Akuntan Publik (Audit Eksternal)
241 Konsultan dan/atau Penasihat
242 Fungsi Kepatuhan
245 Penerapan Manajemen Risiko
249 Sistem Pengendalian Internal
251 Penerapan Strategi *Anti-fraud*
253 *Whistleblowing System*
256 Kebijakan Antikorupsi dan Pengendalian Gratifikasi
257 Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan
258 Permasalahan Hukum
258 Perkara Penting dan Sanksi Administratif
259 Kode Etik
260 Budaya Perusahaan
261 Aksi Korporasi
261 Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*)
262 Rencana Strategis
263 Transparansi Kondisi Keuangan dan Nonkeuangan yang belum Diungkapkan di Laporan Lainnya
264 Pendapatan Non-halal dan Penggunaannya
264 Penerapan Tata Kelola Terintegrasi
266 Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Penilaian Tata Kelola

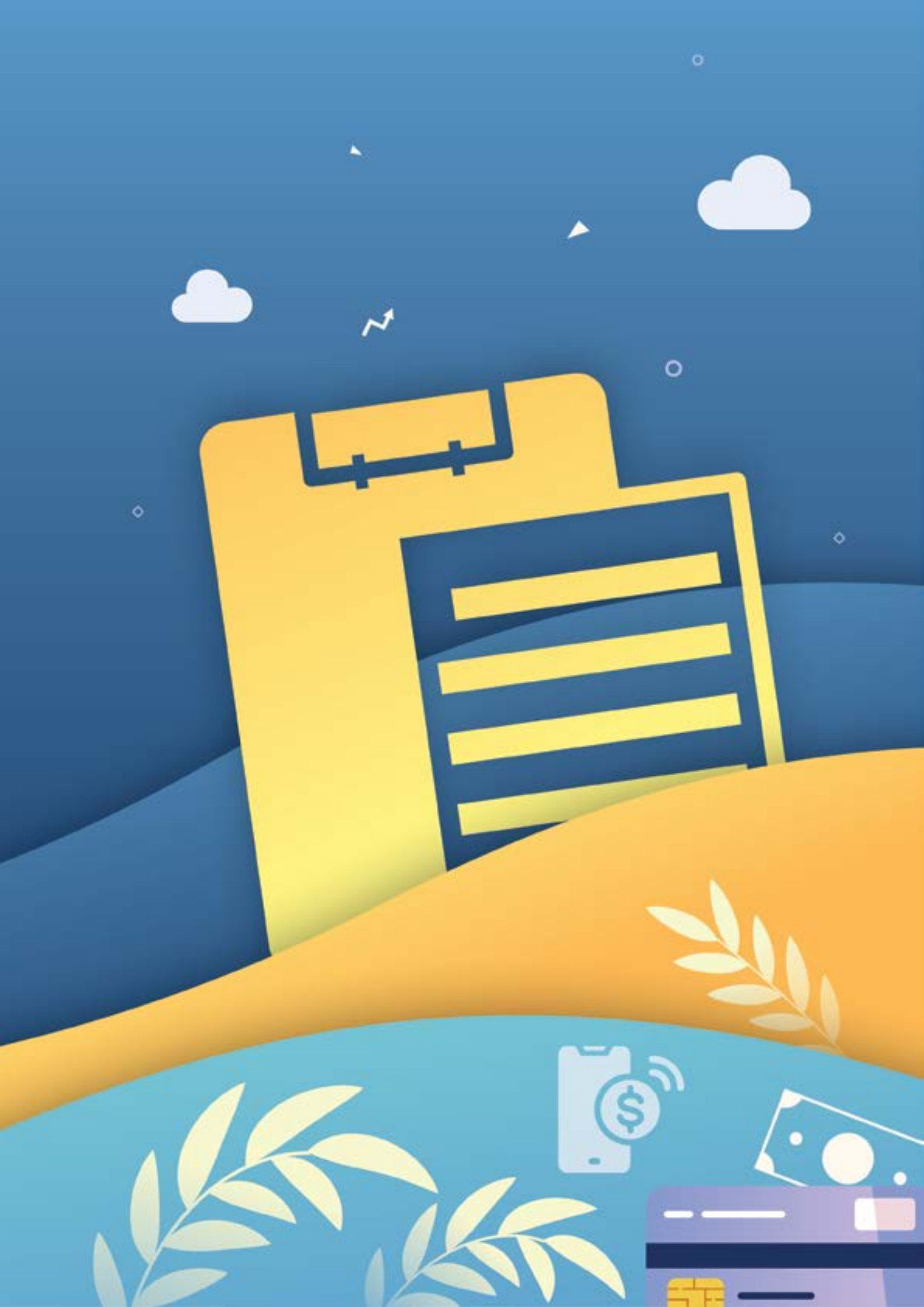
276 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

278 Indeks Laporan Tahunan Berdasarkan SEOJK No.10/SEOJK.03/2020
284 Indeks Pemenuhan Rekomendasi Tata Kelola
285 Alamat Jaringan Cabang

292 Laporan Keuangan

Ikhtisar Utama





Pembiayaan Berkualitas

Pertumbuhan Pembiayaan di Semua Segmen

Portofolio pembiayaan

Rp 9.013,6 miliar

▲ 18,8% YoY

RPIM (Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial)

28,7%

Pembiayaan Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KUB)

Rp 2.712,0 miliar

▲ 4,7% YoY

30,1% dari total pembiayaan

Pemulihan kualitas aset

Financing at Risk

6,3%

Membaik dari 13,0% di 2022

NPF

1,04%

▼ (0,38%) YoY

(1,42% di 2022)

Permodalan dan Likuiditas Solid

Rasio Kecukupan Modal (CAR)

34,8%

Rasio Pembiayaan terhadap DPK (FDR)

82,3%

Transaksi Digital Andal

Pengembangan Fitur Pembukaan Rekening *Online*

268.062

pembukaan rekening *online* baru

Pertumbuhan *User Mobile Banking*

373.753 ***users***

267,6% YoY

Transaksi *Mobile Banking*

9,9 Juta transaksi

67,6% YoY

66%

transaksi nasabah melalui *Mobile & Internet banking*

Nominal Transaksi *Mobile Banking*

Rp 15.529,9 miliar

32,3% YoY

Capaian Kinerja 2023

Total Aset

Rp14.471,7

miliar

▲ **14,2**% YoY

Laba Bersih

Rp153,8

miliar

▲ **30,8**% YoY

Ekuitas

Rp3.082,5

miliar

▲ **Rp151,7** miliar (5,2% YoY)

Dana Pihak Ketiga

Rp10.949,5

miliar

▲ **15,5**% YoY

Pertumbuhan jumlah nasabah

170,1% YoY

CASA

38,1%


100
+ 1000
– 950

Ikhtisar Kinerja Posisi Keuangan

dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain

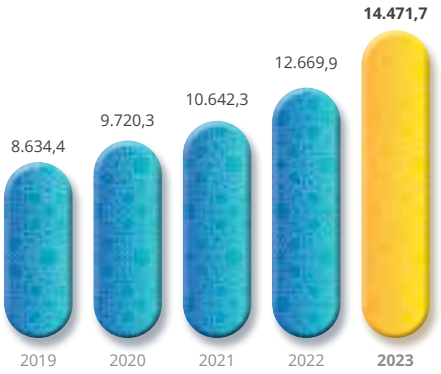
Uraian	2023	2022	2021	2020	2019	Pertumbuhan 2022-2023
Total aset	**14.471,7**	**12.669,9***	**10.642,3**	**9.720,3**	**8.634,4**	**14,2%**
Total aset produktif	14.434,8	12.679,1*	10.269,3	9.342,0	8.010,0	13,8%
Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia	1.056,6	935,4	1.138,2	2.436,9	1.537,8	80,1%
Surat-surat berharga	4.288,9	4.110,9	3.103,5	1.229,6	966,9	4,3%
Pembiayaan	9.013,6	7.585,9*	6.248,5	5.569,2	5.645,4	18,8%
Total liabilitas	**11.389,2**	**9.739,0***	**7.801,5**	**6.968,1**	**6.306,1**	**16,9%**
Dana Pihak Ketiga	10.949,5	9.481,6	7.677,9	6.848,5	6.204,9	15,5%
Giro	2.076,1	2.104,0	1.209,5	1.013,0	1.094,3	(1,3%)
Tabungan	2.096,6	1.556,1	1.373,0	880,1	657,3	34,7%
Deposito	6.776,8	5.821,6	5.095,3	4.955,4	4.453,4	16,4%
Pembiayaan yang diterima	-	-	-	-	-	-
Total ekuitas	**3.082,5**	**2.930,9**	**2.840,8**	**2.752,1**	**2.328,3**	**5,2%**

Keterangan:
*) *Restatement* karena adanya perubahan perlakuan akuntansi di tahun 2023

Total Aset

dalam miliar Rupiah

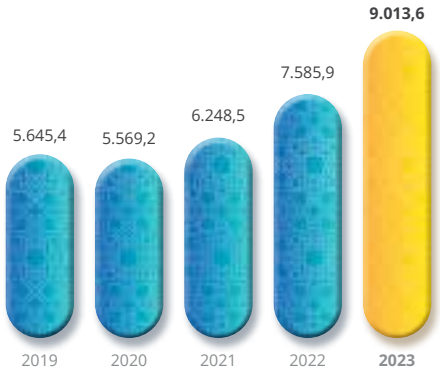
YoY 2022-2023 **14,2%**



Total Pembiayaan

dalam miliar Rupiah

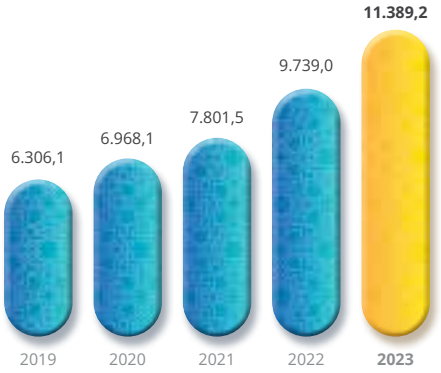
YoY 2022-2023 **18,8%**



Total Liabilitas

dalam miliar Rupiah

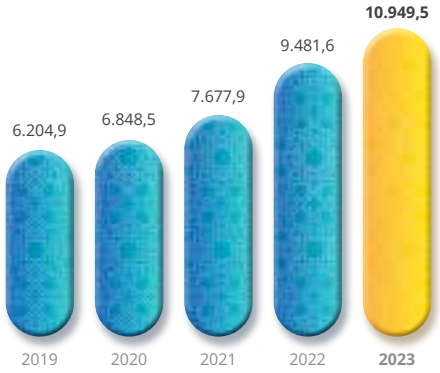
YoY 2022-2023 **16,9%**



Total Dana Pihak Ketiga

dalam miliar Rupiah

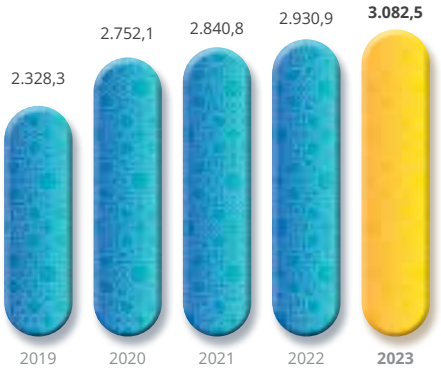
YoY 2022-2023 **15,5%**



Total Ekuitas

dalam miliar Rupiah

YoY 2022-2023 **5,2%**



Ikhtisar Kinerja Posisi Keuangan

Laba Rugi Komprehensif

dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain

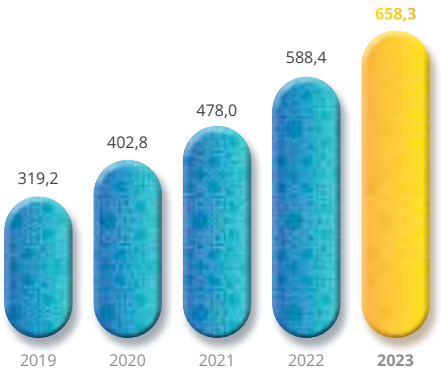
Uraian	2023	2022	2021	2020	2019	Pertumbuhan 2022-2023
Hak bagi hasil milik bank/ Pendapatan operasional	658,3	588,4	478,0	402,8	319,2	11,9%
Pendapatan setelah distribusi bagi hasil, imbalan dan bonus	613,8	563,3	454,3	368,2	326,3	9,0%
Pendapatan operasional/ usaha lainnya	70,7	54,6	44,7	29,0	53,2	29,4%
Beban operasional/usaha	410,6	254,2	212,5	189,1	188,5	61,5%
PPA/CKPN	57,9	212,2	169,5	109,4	66,6	(72,7%)
Laba operasional/usaha	216,0	151,4	117,0	98,7	85,4	42,6%
Laba sebelum pajak	191,4	146,2	107,5	92,6	83,3	30,9%
Laba bersih	153,8	117,6	87,4	73,1	67,2	30,8%
Penghasilan (beban) komprehensif	(2,1)	(27,5)	1,2	21,3	(0,2)	92,3%
Laba (rugi) komprehensif	151,7	90,1	88,6	94,4	67,0	68,3%
Laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	151,7	90,1	87,4	73,1	67,2	68,3%
Laba operasional sebelum beban CKPN	249,3	358,5	277,0	202,0	152,0	(30,5%)
Laba komprehensif diatribusikan kepada pemilik entitas induk	151,7	90,1	88,6	94,4	67,0	68,3%
Jumlah Lembar Saham Beredar (dalam jumlah penuh)	2.255.183.207,0	2.255.183.207,0	2.255.183.207,0	2.255.183.207,0	1.996.300,0	-
Laba (rugi) per saham (dalam Rupiah penuh)*	68,2	52,1	38,8	32,4	33,7	30,8%

*) Pada tahun 2020, BCAS melakukan pemecahan saham (*stock split*) dan mengeluarkan saham baru dalam rangka penggabungan usaha sehingga nilai nominal saham yang semula Rp1.000.000 per lembar saham menjadi Rp1.000 per lembar saham. Data yang disajikan pada bagian ini adalah nilai Laba (rugi) per saham dengan nilai nominal saham Rp1000 per lembar saham.

Pendapatan Operasional

dalam miliar Rupiah

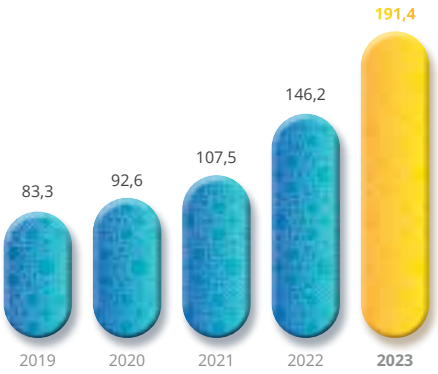
YoY 2022-2023 **11,9%**



Laba Sebelum Pajak

dalam miliar Rupiah

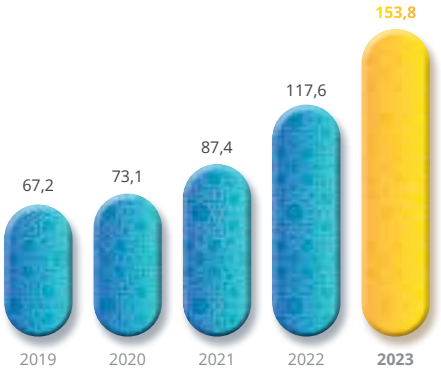
YoY 2022-2023 **30,9%**



Laba Bersih

dalam miliar Rupiah

YoY 2022-2023 **30,8%**



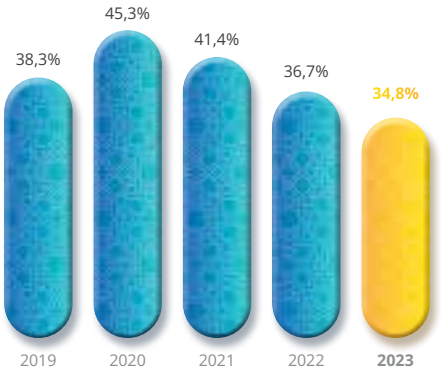
Rasio Keuangan

Uraian	2023	2022	2021	2020	2019	Pertumbuhan 2022-2023
Permodalan						
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR)	34,8%	36,7%	41,4%	45,3%	38,3%	(1,9%)
Aset tetap terhadap modal	9,3%	7,7%	7,5%	6,6%	7,4%	1,6%
Kualitas Aset						
Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	0,8%	1,7%	1,4%	0,4%	0,8%	0,1%
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	0,7%	0,9%	0,7%	0,3%	0,4%	(0,2%)
CKPN aset keuangan terhadap aset produktif	3,3%	3,9%	2,5%	1,9%	2,0%	(0,7%)
NPF *Gross*	1,04%	1,42%	1,13%	0,50%	0,58%	(0,38%)
NPF *Net*	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,26%	(0,01%)

Uraian	2023	2022	2021	2020	2019	Pertumbuhan 2022-2023
Profitabilitas						
Return on Asset (ROA)	1,5%	1,3%	1,1%	1,1%	1,2%	0,2%
Return on Equity (ROE)	5,2%	4,1%	3,2%	3,1%	4,0%	1,0%
Net Imbalan (NI)	4,7%	5,1%	4,9%	4,6%	4,3%	(0,4%)
Net Operating Margin (NOM)	1,7%	1,4%	1,2%	1,2%	1,2%	0,3%
Rasio Efisiensi Biaya (BOPO)	78,6%	81,6%	84,8%	86,3%	87,6%	(3,0%)
Cost to Income Ratio (CIR)	60,0%	41,2%	42,8%	69,0%	56,4%	18,9%
Laba/rugi terhadap pendapatan	20,5%	19,5%	16,2%	16,9%	18,0%	1,0%
Likuiditas						
Pembiayaan bagi hasil terhadap total pembiayaan	74,9%	76,5%	73,0%	66,7%	62,0%	(1,7%)
Rasio Pembiayaan terhadap DPK (FDR)	82,3%	80,0%	81,4%	81,3%	91,0%	2,4%
Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM)	87,7%	95,0%	88,4%	91,1%	92,3%	(7,3%)
Rasio aset lancar terhadap kewajiban lancar	32,7%	62,9%	73,7%	67,6%	49,2%	(30,2%)
Rasio liabilitas terhadap ekuitas	369,5%	332,3%	274,6%	253,2%	270,8%	37,2%
Rasio liabilitas terhadap aset	78,7%	76,9%	73,3%	71,7%	73,0%	1,8%
Kepatuhan						
Persentase Pelanggaran BMPD						
• Pihak Terkait	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
• Pihak Tidak Terkait	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Persentase Pelampauan BMPD						
• Pihak Terkait	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
• Pihak Tidak Terkait	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
GWM						
• GWM Rupiah	4,0%	6,5%	3,6%	3,1%	4,6%	(2,6%)
• GWM Valuta Asing	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

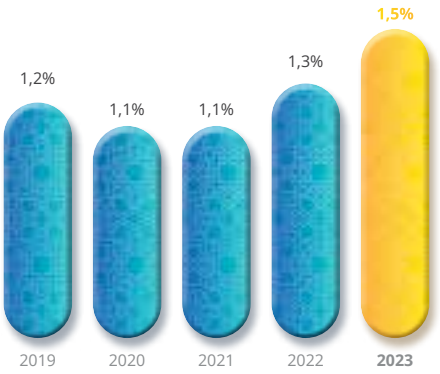
CAR

dalam persen (%)



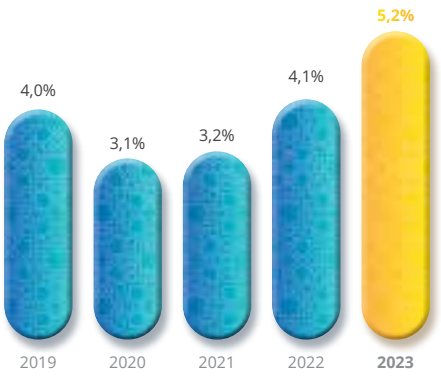
ROA

dalam persen (%)



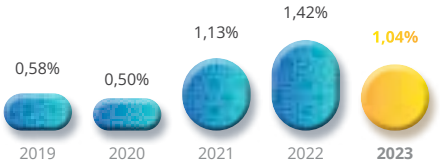
ROE

dalam persen (%)



NPF *Gross*

dalam persen (%)



NPF *Net*

dalam persen (%)



Ikhtisar Operasional Nonkeuangan

Uraian	2023	2022	2021	2020	2019	Pertumbuhan 2022-2023
Jaringan Kantor	76	73	73	69	67	4,1%
Pegawai (di Luar Pengurus)	944	823	757	755	723	14,7%
• Pegawai Tetap	618	519	496	495	446	19,1%
• Pegawai Kontrak	153	143	119	86	108	7,0%
• Pegawai Alih Daya	173	161	142	174	169	7,5%
Jumlah Nasabah Pendanaan	530.839	196.531	144.244	106.356	87.843	170,1%
Jumlah Nasabah Pembiayaan	11.492	10.378	10.945	12.334	14.095	10,6%

Para nasabah juga memiliki kesempatan untuk menikmati layanan syariah, terutama Layanan Penerimaan Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (LPS BPIH), yang dapat diakses melalui 100 Layanan Syariah Bank Umum (LSBU) di cabang BCA yang tersebar di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Informasi Saham, Obligasi, Sukuk, atau Obligasi Konversi dan Aksi Korporasi

Hingga 31 Desember 2023, BCAS masih merupakan perusahaan tertutup yang belum melakukan penawaran saham publik di Bursa Efek Indonesia maupun bursa lainnya sejak pendiriannya. Oleh karena itu tidak ada pengungkapan informasi mengenai:
1. Jumlah saham tercatat;
2. Kapitalisasi pasar;
3. Harga saham tertinggi, terendah, penutupan;
4. Volume perdagangan.

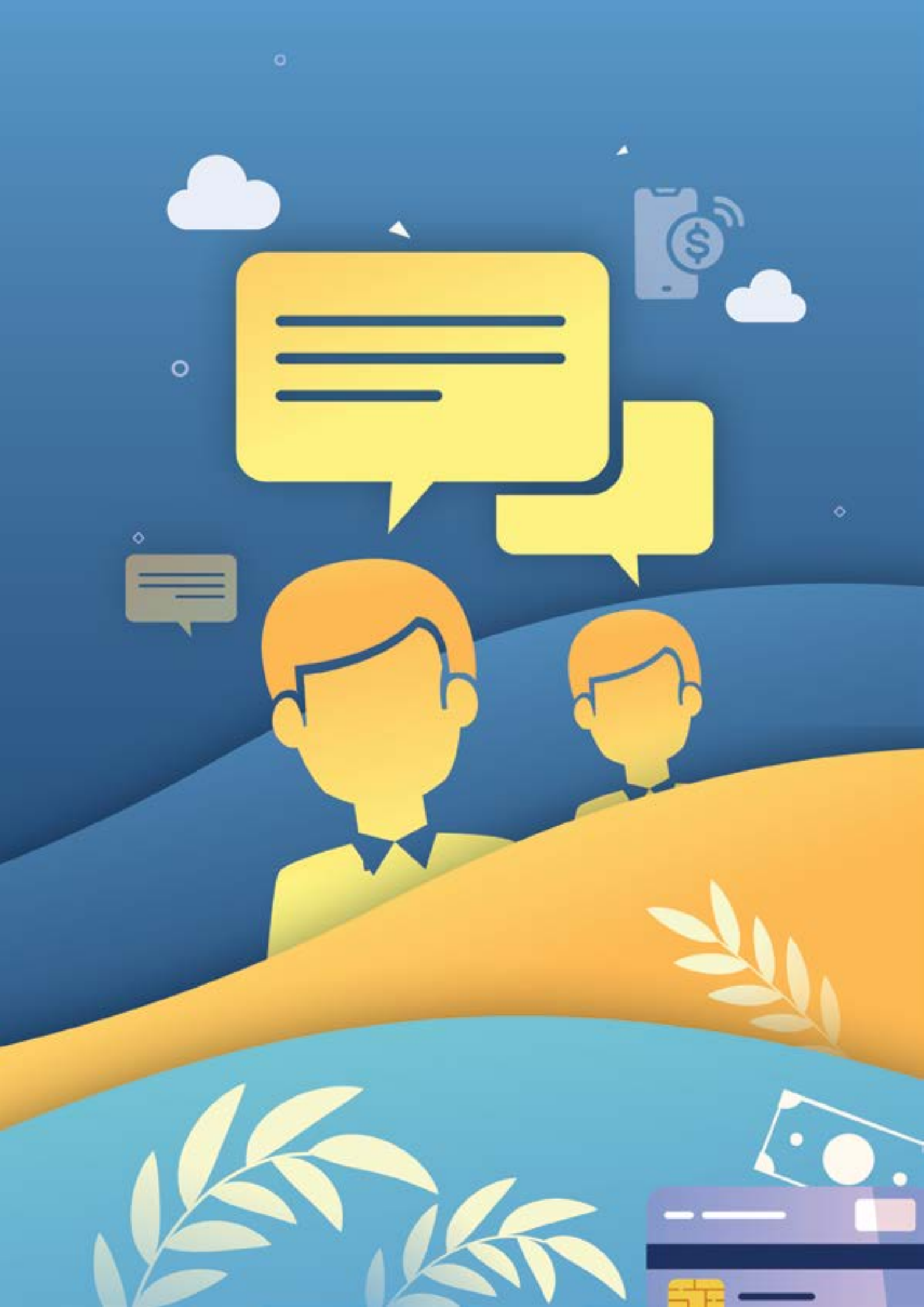
Demikian pula di 2023 BCAS tidak melakukan aksi korporasi, seperti penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pembelian kembali saham (*buy back shares*), pembelian kembali obligasi (*buyback obligasi*), dan/atau pemecahan saham (*stock split*).

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, BCAS tidak memiliki obligasi, sukuk, atau obligasi konversi yang diterbitkan di pasar modal, sehingga tidak ada kewajiban pengungkapan informasi terkait:
1. Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (*outstanding*).
2. Tingkat bunga/imbalan.
3. Tanggal jatuh tempo.
4. Peringkat obligasi/sukuk.


Rp.

Laporan Manajemen





Laporan Dewan Komisaris



Ratna Yanti
Presiden Komisaris Independen

> Tidak hanya pencapaian target dan kinerja positif yang menjadi perhatian BCAS, tapi keberlangsungan usaha yang selaras dengan pengelolaan aspek lingkungan, sosial, tata kelola (*environment, social, governance*/ESG), penerapan praktik perbankan yang hati-hati, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, dan pemenuhan terhadap prinsip syariah juga senantiasa menjadi prioritas kami.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Para pemangku kepentingan yang terhormat,
Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas karunia, rahmat, dan perlindungan-Nya yang telah dilimpahkan kepada BCA Syariah (selanjutnya disebut "BCAS" atau "kami"), sehingga memungkinkan BCAS menyelesaikan tahun 2023 dengan mempertahankan kinerja yang baik dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Ijinkan Dewan Komisaris menyampaikan laporan pengawasan terhadap pengelolaan BCAS yang telah dilakukan oleh Direksi sepanjang tahun 2023.

Tinjauan Ekonomi Makro dan Perbankan Indonesia

Tahun 2023 masih ditandai dengan tingginya volatilitas dalam sektor ekonomi dan geopolitik global. Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund*/IMF) memproyeksikan ekonomi global masih melambat yang berada di angka 3% pada tahun 2023 dan 2,9% tahun depan. Sementara itu, proyeksi IMF untuk ekonomi Indonesia yaitu tumbuh stabil di angka 5% pada 2023 dan 2024, jauh lebih baik dibandingkan perkiraan IMF untuk global. Sementara itu, Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 berada di kisaran 4,5% - 5,3%. Sejalan dengan proyeksi IMF dan BI, perekonomian Indonesia terus menunjukkan resiliensi dan penguatan.

Dalam menghadapi berbagai ketidakpastian, Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang tinggi untuk melanjutkan berbagai kebijakan yang pruden namun tetap suportif dalam penguatan pondasi ekonomi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan III 2023 tetap tumbuh kuat sebesar 4,94% secara tahunan (*Year on Year*/YoY), meskipun sedikit melambat dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 5,17% YoY. Pertumbuhan ekonomi nasional ini terutama didorong oleh permintaan domestik, termasuk konsumsi swasta, belanja pemerintah, dan investasi.

Pada sisi industri perbankan, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa kinerja perbankan nasional pada bulan Oktober 2023 menghadapi peningkatan risiko kredit akibat kenaikan suku bunga. Hal ini tercermin dari indikator utama seperti pertumbuhan kredit dan Dana Pihak Ketiga (DPK), yang masing-masing sebesar 9,0% dan 3,4% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sementara itu, *Non Performing Loan* (NPL) mengalami perbaikan menjadi 2,42%.

Perbankan syariah terus mencatat pertumbuhan yang positif, melampaui kinerja perbankan nasional. Menurut data dari OJK, aset, DPK, dan pembiayaan perbankan syariah pada Oktober 2023 secara berturut-turut tumbuh sebesar 12,0%, 9,0%, dan 14,7%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan perbankan nasional yang tercatat sebesar 4,9%, 3,4%, dan 9,0%. Likuiditas perbankan syariah dan kualitas pembiayaan tetap terjaga, tercermin dari tingkat *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) yang berturut-turut mencapai 84,19% dan 2,17%. NPF menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 2,47%.

Penilaian Kinerja Direksi Tahun 2023 dan Dasar Penilaian

Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Direksi sepanjang 2023 berdasarkan Rencana Bisnis Bank (RBB). Berdasarkan evaluasi kami, secara umum Direksi telah melakukan pengelolaan BCAS dengan baik dan telah menunjukkan hasil di atas target 2023 yang telah ditetapkan, sejalan dengan visi, misi, dan arah strategi bisnis BCAS. Direksi telah melaksanakan strategi bisnis dengan efektif dan secara konsisten terus memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip syariah.

Di bawah arahan Direksi, BCAS terus mendorong pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, baik Sumber Daya Manusia (SDM) maupun Teknologi Informasi (TI), dengan fokus pada pencapaian strategi bisnis utama yaitu percepatan peningkatan *customer base* khususnya nasabah-nasabah produk *Current Account Savings Account* (CASA). Percepatan proses adopsi TI dalam proses bisnis dan operasional terbukti mampu mendorong tercapainya sasaran strategis baik dalam hal penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan maupun pencapaian *operational excellence*. Direksi juga terus melakukan pengelolaan Cost of *Fund* (CoF) dengan optimal.

Secara keseluruhan, BCAS mencatat pertumbuhan positif pada semua indikator target kinerja tahun 2023, yang tercermin dari indikator keuangan utama, termasuk aset, DPK, pembiayaan, dan laba bersih. Total aset tercatat Rp14,5 triliun, tumbuh 14,2% YoY. DPK mencapai Rp10,9 triliun, tumbuh 15,5% YoY, dan pembiayaan tercatat sebesar Rp9,0 triliun, tumbuh 18,8% YoY. Sementara itu, laba bersih mencapai Rp153,8 miliar, tumbuh 30,8% YoY. Pertumbuhan kinerja BCAS diimbangi dengan penerapan prinsip *prudential banking* dan manajemen risiko yang baik, tercermin dari NPF yang terjaga pada level yang rendah dan sehat sebesar 1,04% secara *gross* dan 0,00% secara *net*. Kami berpendapat bahwa pencapaian positif pada indikator keuangan utama sebagaimana kami uraikan sebelumnya mencerminkan keberhasilan Direksi dalam menerapkan strategi bisnis dan menjalankan usaha Bank secara efektif.

Pengawasan terhadap Implementasi Strategi Bank

Dewan Komisaris senantiasa memperhatikan strategi dan langkah-langkah yang diambil oleh Direksi untuk memastikan Bank dapat mencatat kinerja yang baik dan berkesinambungan. Kami menilai bahwa Direksi telah mengelola BCAS sesuai dengan rencana bisnis dan kebijakan strategis yang ditetapkan. Direksi juga secara konsisten berkomunikasi dengan Dewan Komisaris dalam merumuskan langkah-langkah strategis, penerapan kebijakan, serta merespon arahan dari regulator. Selain itu, kami juga memandang bahwa Direksi aktif memantau dan mengamati perkembangan perekonomian dan industri perbankan terkini sehingga mampu membawa BCAS tetap relevan dengan perkembangan. Dewan Komisaris memberikan dukungan penuh kepada Direksi dalam pelaksanaan kebijakan strategis yang diterapkan selama tahun 2023.

Dewan Komisaris mendukung dan mengarahkan Direksi untuk terus konsisten menerapkan prinsip *prudential banking* dan manajemen risiko yang efektif dalam menyalurkan pembiayaan. Hal tersebut tercermin dari strategi BCAS dalam proses pembiayaan yang selalu mempertimbangkan sektor usaha yang memiliki potensi, kinerja keuangan, dan risiko yang melekat pada usaha nasabah. BCAS mencatat adanya pertumbuhan pembiayaan signifikan terutama pada pembiayaan konsumer yang mencapai Rp821,9 miliar atau tumbuh sebesar 95,3% YoY. Pembiayaan UMKM mencapai Rp1,8 triliun tumbuh 5,0% YoY dan berkontribusi sebesar 20,2% dari total portofolio pembiayaan. Selain itu, komitmen Direksi dalam mengimplementasikan keuangan berkelanjutan juga tercermin dari keberhasilan BCAS mencatatkan pertumbuhan pembiayaan pada sektor kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KUB). Pembiayaan KUB tercatat sebesar Rp2,7 triliun, tumbuh 4,7% YoY dan memberikan kontribusi sebesar 30,1% terhadap total portofolio pembiayaan. Capaian tersebut sejalan dengan kebijakan regulator terkait penerapan keuangan berkelanjutan.

Dewan Komisaris mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh BCAS dalam mengelola DPK, terutama dalam mengakselerasi pertumbuhan jumlah nasabah dengan teknologi digital. Fitur pembukaan rekening *online* yang diluncurkan pada tahun 2023 mampu meningkatkan pertumbuhan jumlah nasabah secara signifikan hingga 170,1%. Pertumbuhan jumlah nasabah pada akhirnya dapat menjaga komposisi CASA terhadap DPK. Pada tahun 2023, komposisi CASA dapat terjaga pada 38,1% terhadap total DPK.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

BCAS menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*/GCG) dan pemenuhan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan usahanya. Kami memandang, praktik GCG di lingkungan BCAS telah memadai. Kami menilai bahwa Direksi dan organ-organ tata kelola lainnya telah menerapkan GCG dengan optimal guna menjaga keberlangsungan usaha dalam jangka panjang, mempertahankan kesehatan perusahaan, dan menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan. Direksi juga senantiasa mencermati perkembangan regulasi terkini terkait pelaksanaan GCG dan melakukan penyesuaian ketentuan internal agar relevan dengan regulasi yang terbaru. Untuk memastikan kualitas penerapan GCG tetap terjaga, BCAS melakukan *self-assessment* terhadap pelaksanaan GCG secara berkala. Hasil *self-assessment* terhadap penerapan GCG tahun 2023 mendapatkan peringkat komposit dengan predikat 'Sangat Baik'. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan telah diterapkan secara tertib, efektif, dan menyeluruh di setiap lini organisasi. Dewan Komisaris secara konsisten mendukung Direksi untuk terus meningkatkan praktik-praktik GCG di BCAS dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap implementasinya.

Pandangan dan Peran Dewan Komisaris dalam Sistem Pelaporan Pelanggaran

Pelaksanaan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) dalam GCG adalah bagian dari penerapan prinsip transparansi. Selain itu, sistem ini memiliki peran krusial dalam memelihara budaya kepatuhan dan mendukung kebijakan *anti-fraud* di seluruh lini organisasi BCAS. Kami telah menetapkan kebijakan dan prosedur WBS yang memadai agar mampu secara efektif mendeteksi *fraud* atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak internal. Terdapat unit kerja yang mengelola WBS dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur, dan memiliki hubungan komunikasi langsung kepada Dewan Komisaris. Dengan adanya langkah-langkah ini, BCAS menunjukkan komitmen kuat terhadap transparansi, kepatuhan, dan responsif terhadap kemungkinan pelanggaran atau fraud di dalam organisasi.

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dan Pemberian Nasihat kepada Direksi

Pelaksanaan fungsi pengawasan dari Dewan Komisaris terhadap Direksi dilakukan secara aktif melalui melalui rapat rutin, diskusi, dan pemberian nasihat kepada Direksi dalam berbagai kesempatan. Selain itu, Dewan Komisaris juga menjalin komunikasi aktif dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan bahwa pengawasan terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan prinsip syariah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2023, Dewan Komisaris mengadakan rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 11 kali. Rapat gabungan menjadi salah satu media bagi Direksi untuk menyampaikan perkembangan implementasi rencana-rencana strategis kepada Dewan Komisaris dan juga menjadi sarana diskusi dan penyampaian nasihat Dewan Komisaris kepada Direksi meliputi strategi dan pengelolaan bisnis, manajemen risiko, audit dan kepatuhan.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kami menilai bahwa selama tahun 2023, ketiga komite tersebut telah menjalankan tugasnya dengan baik dan memberikan dukungan yang signifikan bagi Dewan Komisaris dalam penerapan standar tata kelola di BCAS.

Komite Audit berperan aktif membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi audit, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Selain itu, Komite Audit juga telah memantau sistem pengendalian internal, implementasi tata kelola perusahaan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan fungsi Komite Audit melibatkan mekanisme rapat, diskusi dengan unit kerja terkait, serta melakukan kajian terhadap laporan-laporan hasil audit. Komite Audit juga memantau tindak lanjut BCAS atas temuan audit baik audit internal maupun eksternal. Sepanjang tahun 2023, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 17 kali. Selain itu, komite juga turut hadir dalam *exit meeting* audit internal di kantor cabang maupun unit kerja kantor pusat.

Komite Pemantau Risiko memiliki peran krusial dalam membantu Dewan Komisaris memastikan bahwa sistem manajemen risiko Bank telah memadai untuk mengidentifikasi, mengukur dan memitigasi seluruh risiko yang dihadapi oleh Bank. Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Pemantau Risiko melakukan rapat, berdiskusi dengan unit kerja terkait, dan memberikan rekomendasi terkait kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan risiko Bank. Selama tahun 2023, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 12 kali. Selain itu, komite juga secara aktif mengkaji laporan-laporan yang seperti Laporan Profil Risiko Bank per triwulan serta laporan keuangan perseroan baik per bulan maupun per triwulan.

Komite Remunerasi dan Nominasi memainkan peran penting dengan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait kebijakan remunerasi Bank secara menyeluruh, serta pencalonan atau nominasi pengurus BCAS maupun pihak independen anggota komite. Proses ini melibatkan mekanisme rapat dan diskusi yang berkontribusi bagi kami dalam pengambilan keputusan. Komite Remunerasi dan Nominasi juga secara berkala memberikan informasi terbaru mengenai topik-topik ketenagakerjaan yang relevan dengan pelaksanaan tugas mereka, ketentuan terbaru seputar ketenagakerjaan, dan perkembangan sumber daya manusia di industri perbankan syariah. Pada tahun 2023, Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan sebanyak 4 kali rapat.

Komposisi Dewan Komisaris

Pada tahun 2023, terjadi perubahan pada komposisi keanggotaan Dewan Komisaris BCAS sebagaimana ditetapkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tertanggal 22 Februari 2023. RUPS memutuskan Ibu Tantri Indrawati telah menyelesaikan masa tugasnya sebagai Presiden Komisaris Independen, Ibu Ina Widjaja menyelesaikan masa tugas sebagai Komisaris, mengangkat Ibu Ratna Yanti sebagai Presiden Komisaris Independen, mengangkat Bapak Rickyadi Widjaja sebagai Komisaris, serta mengangkat Ibu Inge Setiawati sebagai Komisaris Independen. Sesuai dengan keputusan RUPST tersebut, masa susunan Dewan Komisaris BCAS per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Presiden Komisaris Independen	: Ratna Yanti
Komisaris	: Rickyadi Widjaja
Komisaris Independen	: Inge Setiawati

Prospek Usaha

Data Kementerian Keuangan yang disampaikan dalam Seminar Nasional *Outlook* Perekonomian Indonesia 2024 mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 masih bisa terjaga di atas 5%. Meski demikian, Indonesia dihimbau agar tetap waspada menghadapi berbagai dinamika yang terjadi di level global. Dari sisi industri perbankan, beberapa risiko diperkirakan akan mengiringi perbankan global termasuk juga perbankan di Indonesia hingga tahun depan, terutama risiko suku bunga acuan tinggi. Di tengah era suku bunga global yang tinggi, sektor perbankan Indonesia terpantau tetap solid dan resilien, ditopang tingkat permodalan (*capital adequacy ratio*/ CAR) yang tinggi di level 27,41% atau jauh di atas rata-rata CAR negara lain yang berada di bawah 20% per akhir 2023. Melihat kondisi tersebut, Dewan Komisaris mendorong BCAS untuk terus melakukan uji tekanan (*stress test*) pada berbagai skenario untuk menguji resiliensi permodalan, likuiditas, dan profitabilitas sesuai dengan prinsip manajemen risiko yang andal dan teruji.

Dewan Komisaris sependapat dengan proyeksi dari Menteri Keuangan bahwa perekonomian Indonesia dan perbankan nasional masih prospektif dalam jangka panjang, meskipun tantangan literasi yang relatif rendah masih menjadi kendala dalam industri perbankan syariah. Adapun tantangan tersebut masih dapat diimbangi dengan berbagai peluang dan faktor-faktor seperti demografi Indonesia yang memiliki populasi umat Muslim terbesar, potensi pertumbuhan industri halal baik secara global maupun nasional, dan peran signifikan UMKM dalam perekonomian Indonesia menjadi peluang yang dapat dioptimalkan oleh BCAS.

Di sisi lain, OJK menunjukkan komitmennya untuk mendorong terwujudnya literasi dan inklusi keuangan bagi semua pihak tanpa terkecuali literasi dan inklusi keuangan syariah seperti pelaksanaan program KEJAR atau Satu Rekening Satu Pelajar yang dari tahun ke tahun terus konsisten dilaksanakan dan terus ditingkatkan cakupan programnya. Menanggapi hal tersebut, kami mengapresiasi dan mendorong upaya-upaya BCAS untuk meningkatkan literasi keuangan bagi masyarakat luas, melalui kegiatan edukasi dan pelatihan yang dilakukan secara secara berkesinambungan. Di sisi lain, BCAS turut mendorong inklusi melalui pengembangan produk baik dana dan pembiayaan serta memaksimalkan pengembangan infrastruktur digital untuk memudahkan akses masyarakat menjangkau layanan dan produk BCA Syariah. Kondisi ini semakin memperkuat optimisme kami bahwa prospek usaha perbankan syariah ke depan sangat terbuka.

Dewan Komisaris memandang target pertumbuhan yang ditetapkan dalam rencana bisnis yang disusun Direksi relevan dengan perkembangan ekonomi nasional yang moderat dan telah mempertimbangkan berbagai risiko yang mungkin dihadapi di tahun mendatang. Untuk mencapai proyeksi dan target yang telah ditetapkan, Dewan Komisaris menghimbau agar Direksi terus konsisten dalam menjalankan perusahaan sesuai dengan strategi dan rencana yang telah disusun, di antaranya fokus pada peningkatan komposisi CASA dan optimalisasi pengelolaan *Cost of Fund*. Dengan strategi tersebut, diharapkan BCAS dapat menjaga *Net* Imbalan (NI) yang diperoleh dan meningkatkan daya saing dalam penyaluran pembiayaan. BCAS diharapkan dapat terus mengoptimalkan pemanfaatan TI di berbagai bidang dengan senantiasa memperhatikan kapasitas dan kapabilitas infrastruktur TI dan sistem keamanan data, serta mengembangkan inovasi produk dan layanan untuk memberikan solusi dan pengalaman terbaik kepada nasabah. Dengan mengimplementasikan strategi keberlanjutan, BCAS optimis dapat mendukung pertumbuhan perekonomian nasional, mendorong perubahan dalam industri perbankan syariah, serta memberi nilai tambah yang berkelanjutan kepada seluruh pemangku kepentingan.

Apresiasi Bagi Seluruh Pemangku Kepentingan

Dewan Komisaris berterima kasih kepada Pemegang Saham dan seluruh pemangku kepentingan atas kepercayaan serta dukungan yang terus-menerus diberikan kepada BCAS. Kami juga ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Dewan Pengawas Syariah, Direksi, manajemen, dan seluruh karyawan atas dedikasi, kontribusi, dan kerja sama yang dicurahkan sehingga dapat mendorong BCAS untuk terus berkembang dan tumbuh secara berkelanjutan.

Dengan menjaga kerja sama dan kolaborasi yang semakin solid, kami yakin BCAS akan terus mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan dan menjadi pelopor dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Semoga kesuksesan ini membawa kemajuan dan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Aamiin.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, Februari 2024
Atas nama Dewan Komisaris,



Ratna Yanti
Presiden Komisaris Independen

Inge Setiawati
Komisaris Independen

Rickyadi Widjaja
Komisaris

Ratna Yanti
Presiden Komisaris Independen



Laporan Dewan Pengawas Syariah



Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, M.A.
Ketua Dewan Pengawas Syariah

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur *alhamdulillah*, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, petunjuk, dan perlindungan-Nya kepada kita semua. Dengan karunia-Nya, BCAS berhasil melalui tahun 2023 dengan baik, terus memenuhi tanggung jawabnya sebagai bank syariah yang berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi bangsa.

Izinkan saya, mewakili Dewan Pengawas Syariah (DPS) akan menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan terhadap pemenuhan prinsip syariah dalam aktivitas operasional BCAS di 2023.

Pelaksanaan Kegiatan Dewan Pengawas Syariah Tahun 2023

Kami, DPS memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Fungsi pengawasan DPS mencakup, menilai dan memastikan bahwa pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh BCAS telah memenuhi prinsip syariah; mengawasi agar proses pengembangan produk baru BCAS sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI); serta melakukan pengkajian berkala terhadap pemenuhan prinsip syariah dalam mekanisme penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa BCAS.

DPS juga terus mengikuti perkembangan bisnis BCAS, memastikan, dan mengawasi pemenuhan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aktivitas usaha yang dilakukan oleh bank. Realisasi aktivitas pengawasan DPS di sepanjang tahun 2023, di antaranya:

- Mengadakan pertemuan rutin gabungan antara DPS dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan Unit Kerja terkait secara intensif, minimal 1 kali dalam sebulan. Pada tahun 2023, DPS telah menyelenggarakan 29 kali rapat yang terdiri dari rapat gabungan DPS, Dewan Komisaris, dan Direksi, serta rapat bersama unit kerja.
- Memberikan opini/pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan kegiatan jasa bank dalam bentuk Opini DPS. Pada 2023, DPS telah memberikan 33 Opini DPS sebagaimana terinci dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam laporan tahunan ini. DPS juga secara konsisten melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut opini DPS yang telah dikeluarkan.
- Melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk atau aktivitas baru BCAS.
- Menilai kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah melalui mekanisme uji petik.
- Mengkaji laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari Direksi, pelaksana fungsi audit internal, fungsi kepatuhan, dan fungsi menajemen risiko untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana, pelayanan jasa Bank, dan pelaksanaan manajemen risiko.
- Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah dari masing-masing kegiatan. Penetapan jumlah uji petik telah dilakukan melalui mekanisme rapat internal DPS dan kemudian disampaikan secara tertulis kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
- Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik untuk mengetahui pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan internal Bank yang berlaku.
- Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai Bank dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen.
- Melakukan *review* terhadap SOP terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan dimaksud. DPS telah melakukan *review* aspek syariah terhadap prosedur dan ketentuan internal Bank meliputi semua aktivitas utama Bank yaitu penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan dan layanan perbankan, serta prosedur dan ketentuan internal Bank terkait manajemen risiko.
- Meningkatkan pemahaman atas aspek syariah, yaitu melalui sosialisasi/*sharing session* terkait fatwa DSN-MUI, penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan.
- Menyampaikan hasil laporan pengawasan DPS secara semesteran kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang selanjutnya dilaporkan kepada OJK.
- Menghadiri pertemuan yang diadakan oleh DSN-MUI, yaitu *Workshop Pra Ijtima Sanawi* DPS dan *Ijtima Sanawi* DPS.

Dalam rangka pengawasan terhadap proses pengembangan produk/aktivitas baru, DPS juga melakukan aktivitas sebagai berikut:

- Meminta penjelasan dari pejabat Bank yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan.
- Memeriksa apakah terhadap akad yang digunakan dalam produk baru telah terdapat fatwa DSN – MUI
- Mengkaji sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.
- Memberikan pendapat syariah atas produk/aktivitas baru yang akan dikeluarkan.

Pada peluncuran produk/aktivitas baru di 2023, DPS menyimpulkan dari hasil pengawasannya bahwa akad dan prosedur yang digunakan tidak bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI. Selain itu, tidak terdapat permasalahan aspek syariah dalam fitur atau ketentuan produk baru BCAS, serta tidak ada hal-hal lain yang berpotensi melanggar prinsip syariah.

Bagian integral dari tugas dan tanggung jawab DPS adalah mendukung upaya manajemen BCAS dalam meningkatkan pemahaman terhadap aspek-aspek syariah di seluruh lapisan organisasi. Untuk itu, DPS secara berkala melakukan sosialisasi Fatwa DSN-MUI dalam kesempatan rapat maupun diskusi. Kami juga memberikan penyegaran dan pendalaman materi terkait aspek syariah kepada karyawan melalui pelatihan atau sosialisasi maupun turut terlibat dalam penyusunan materi pelatihan kepada insan BCAS. Selain itu, DPS secara aktif menjadi *counterparty* dan memberikan konsultasi kepada unit kerja terkait terkait aspek syariah dalam berbagai kesempatan pertemuan atau diskusi baik secara formal maupun non formal.

Berdasarkan hasil pengawasan sepanjang tahun 2023, DPS menyatakan bahwa dalam seluruh kegiatan BCAS pada periode tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, terutama pada kegiatan yang berkaitan dengan aspek pembiayaan objek/usaha yang dilarang oleh syariah atau haram, serta pendapatan usaha BCAS yang berasal dari bunga atau instrumen keuangan konvensional. Secara keseluruhan, produk, kebijakan, dan kegiatan operasional BCAS dianggap telah mematuhi prinsip-prinsip syariah dan mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, termasuk fatwa

dan perundang-undangan yang berlaku. DPS terus mendorong dan memberikan arahan kepada manajemen BCAS untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan internal Bank guna memastikan keselarasannya dengan ketentuan yang berlaku serta opini yang dikeluarkan oleh DPS.

Hasil pengawasan oleh DPS terhadap Direksi dan Dewan Komisaris BCAS untuk periode tahun buku 2023 telah disampaikan kepada kepada OJK dan DSN-MUI per semester. Di luar menyampaikan laporan rutin tersebut, DPS terlibat aktif dalam upaya penguatan pemahaman dan penerapan prinsip syariah di dalam organisasi Bank, yang terealisasi melalui diskusi dengan unit kerja dan aktivitas sosialisasi Fatwa DSN-MUI untuk memastikan pemahaman yang baik dan konsisten di seluruh lini organisasi.

Dewan Pengawas Syariah sepenuhnya mendukung dan mengapresiasi upaya manajemen dalam menguatkan praktik-praktik GCG. Langkah-langkah ini diarahkan untuk menjadi dasar yang solid bagi kemajuan BCAS di masa depan dan untuk meningkatkan kepercayaan nasabah serta pemangku kepentingan lainnya.

Komposisi Dewan Pengawas Syariah

Pada tahun 2023, tidak terdapat perubahan dalam komposisi Dewan Pengawas Syariah (DPS) sehingga susunan DPS tetap sama sebagaimana yang telah ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 22 Februari 2023.

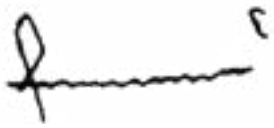
Komposisi DPS per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:
Ketua : Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, M.A.
Anggota : Sutedjo Prihatono

Penutup

Sebagai penutup, kami ingin mengungkapkan apresiasi atas dedikasi dan komitmen dari seluruh tim, manajemen, Direksi, dan Dewan Komisaris BCAS yang terus berusaha memastikan pematuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan kepatuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami berdoa semoga BCAS terus mengalami pertumbuhan dan menjadi bank syariah yang memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia. Aamiin.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, Februari 2024
Atas nama Dewan Pengawas Syariah



Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, M.A.
Ketua Dewan Pengawas Syariah

Sutedjo Prihatono
Anggota Dewan Pengawas Syariah

Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, M.A.
Ketua Dewan Pengawas Syariah



Laporan Direksi



Yuli Melati Suryaningrum
Presiden Direktur

> Berbagai tantangan tidak menyurutkan semangat seluruh insan BCAS untuk melakukan percepatan di segala bidang untuk memberikan performa terbaik. *Alhamdulillah*, BCAS dapat menutup tahun 2023 dengan kinerja positif dan senantiasa mengedepankan nilai-nilai ESG untuk pertumbuhan yang berkelanjutan.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Para pemangku kepentingan yang kami hormati,
Dengan ungkapan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan petunjuk-Nya, kami menutup tahun 2023 dengan pencapaian positif. Tahun 2023 masih menjadi tahun yang penuh dengan tantangan akibat gejolak geopolitik yang memengaruhi ekonomi global. Alhamdulillah, BCAS tetap berhasil mencapai kinerja melebihi target yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini tak lepas dari kepercayaan nasabah dan kerja sama serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Tahun 2023 ditutup dengan total aset BCAS mencapai Rp14,5 triliun, tumbuh 14,2% dibandingkan tahun sebelumnya dan laba bersih sebesar Rp153,8 miliar, mengalami pertumbuhan sebesar 30,8% dibandingkan akhir tahun 2022.

Tinjauan Ekonomi Makro dan Perbankan Indonesia

International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global di 2023 dalam kondisi melambat, yakni sekitar 3% pada tahun 2023 dan 2,9% pada tahun berikutnya karena masih dibayangi oleh tingginya volatilitas dalam sektor ekonomi dan geopolitik global. Di sisi lain, proyeksi IMF untuk ekonomi Indonesia lebih positif dari pada ekonomi global karena menunjukkan pertumbuhan yang stabil, mencapai angka 5% baik pada tahun 2023 maupun 2024. Sejalan dengan prediksi IMF, perekonomian Indonesia terus menunjukkan daya tahan dan penguatan.

Inflasi yang tinggi telah mendorong bank sentral di beberapa negara termasuk Indonesia untuk menerapkan kebijakan moneter yang lebih agresif, termasuk kenaikan suku bunga acuan. Suku bunga acuan Bank Indonesia pada penghujung 2023 dipertahankan pada level 6%. Meskipun mengalami peningkatan pada November 2023, tingkat inflasi di dalam negeri tetap dapat dianggap terkendali. Peningkatan ini dipicu oleh dampak El Nino yang menyebabkan kenaikan harga komoditas pertanian seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah. Kenaikan harga tersebut berlanjut setelah harga beras sebelumnya mengalami kenaikan. Menghadapi berbagai ketidakpastian, Pemerintah Indonesia terus menerapkan serangkaian kebijakan untuk semakin menguatkan pondasi ekonomi.

Berdasarkan data yang disajikan oleh BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2023 tetap menunjukkan kinerja yang solid, mencapai angka 4,94% YoY, walaupun mengalami sedikit perlambatan jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal sebelumnya yang mencapai 5,17% YoY. Sementara Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 berada pada kisaran 4,5%-5,3%. Menyongsong masa depan, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan penguatan yang akan didorong oleh permintaan domestik, terutama melibatkan konsumsi swasta, belanja pemerintah, dan investasi.

Data OJK menunjukkan pertumbuhan aset perbankan nasional pada Oktober 2023 tumbuh sebesar 4,9% YoY. Pertumbuhan DPK tercatat sebesar 3,4% YoY, yang didorong oleh tumbuhnya produk deposito sebesar 5,7% YoY, produk tabungan yang tumbuh 2,6% YoY, dan produk giro yang tumbuh sebesar 1,6% YoY dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu pertumbuhan kredit perbankan nasional di Oktober 2023 adalah sebesar 9,0% YoY, lebih rendah jika dibandingkan pertumbuhan kredit di tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 12,0% YoY. Hal ini disebabkan meningkatnya suku bunga BI 7-day (*Reverse*) *Repo Rate* di tahun 2023 yang mengakibatkan menurunnya permintaan kredit.

Perkembangan industri perbankan syariah di Oktober 2023 secara keseluruhan menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik jika dibandingkan dengan perbankan nasional, dimana pertumbuhan aset perbankan syariah tercatat sebesar 12,0% YoY, DPK tumbuh sebesar 9,0% YoY, dan penyaluran pembiayaan mengalami pertumbuhan sebesar 14,7% YoY. Sementara itu, NPF pada Oktober 2023 tercatat sebesar 2,17%, membaik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 2,47%.

Analisis atas Kinerja dan Aktivitas Utama Bank

Alhamdulillah, kinerja BCAS per 31 Desember 2023 mencatatkan pertumbuhan positif pada seluruh indikator kinerja utama sebagai berikut:

- Total aset BCAS tercatat Rp14,5 triliun, tumbuh 14,2% dari Rp12,7 triliun di tahun sebelumnya. Pertumbuhan aset BCAS ini didorong oleh pertumbuhan DPK dan ekspansi penyaluran pembiayaan.
- DPK mencapai Rp10,9 triliun, tumbuh 15,5% dari Rp9,5 triliun di tahun sebelumnya. Pertumbuhan DPK didorong oleh upaya kami untuk meningkatkan akuisisi *new customer* melalui fitur pembukaan rekening *online* pada BCA Syariah *Mobile* serta aktivitas pemasaran yang semakin masif.

- Pembiayaan mencapai Rp9,0 triliun, tumbuh 18,8% dari Rp7,6 triliun di tahun sebelumnya. Penyaluran pembiayaan senantiasa diiringi dengan upaya-upaya untuk menjaga kualitasnya sehingga NPF *gross* masih dapat dijaga pada tingkat yang rendah dan sehat yaitu 1,04% pada akhir tahun 2022.
- Laba sebelum pajak tercatat Rp191,4 miliar, tumbuh 30,9% dari Rp146,2 miliar pada tahun sebelumnya. Sejalan dengan pertumbuhan laba sebelum pajak, laba bersih juga meningkat menjadi sebesar Rp153,8 miliar, tumbuh 30,8% dari Rp117,6 miliar pada tahun sebelumnya.
- CAR berada pada angka 34,8%, menunjukkan permodalan BCAS yang solid dan masih sangat memadai untuk mendukung ekspansi bisnis dan implementasi inisiatif strategis.
- Rasio FDR berada pada posisi 82,3%, menunjukkan tingkat likuiditas Bank yang optimal dan keseimbangan dalam mengelola aset dan liabilitas Bank.
- Persentase pendapatan penyaluran dana setelah bagi hasil (*Net* Imbalan/NI) sebesar 4,7% mengalami koreksi 0,4% dari tahun sebelumnya yang sebesar 5,1%.

BCAS terus berupaya untuk mempercepat pertumbuhan nasabah baru melalui pengembangan pada *e-channel* salah satunya dengan meluncurkan fitur pembukaan rekening *online* pada BCA Syariah *Mobile*. Kami juga melakukan berbagai aktivitas pemasaran dengan semakin aktif, baik melalui jaringan cabang, *marketing event*, *loyalty program*, pemasaran melalui media digital, maupun kolaborasi dengan mitra. Berkat persistensi dan konsistensi BCAS dalam melaksanakan upaya tersebut, pertumbuhan jumlah nasabah dapat meningkat signifikan 170,1% secara YoY. Sementara komposisi CASA dapat dijaga pada 38,1%.

Pada tahun 2023, kami memperkuat penyaluran pembiayaan pada segmen konsumer dengan menawarkan berbagai pilihan produk dan margin pembiayaan yang menarik sesuai kebutuhan nasabah dan pemasaran yang masif melalui seluruh jaringan cabang. BCAS juga aktif berkolaborasi bersama BCA dalam melakukan *marketing event* seperti BCA Expoversary dan BCA Expo yang *awareness*nya sudah sangat kuat dan telah menjadi pilihan utama masyarakat yang menginginkan hunian atau kendaraan baru.

Dukungan kami terhadap segmen UMKM, kami wujudkan dalam bentuk penyaluran pembiayaan maupun berbagai kegiatan edukasi kepada pelaku UMKM. Pembiayaan UMKM mencapai Rp1,8 triliun memberikan kontribusi 20,2% terhadap total portofolio pembiayaan BCAS. Sementara itu, kegiatan edukasi kepada segmen UMKM aktif kami lakukan di antaranya melalui WEpreneur yang merupakan program lanjutan dari tahun sebelumnya. WEpreneur adalah sebuah inisiatif pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas wirausaha UMKM perempuan dan memperluas jaringan edukasi dalam komunitas perempuan pelaku UMKM. Kami berharap, program ini dapat membantu perkembangan segmen UMKM secara keseluruhan.

Sesuai dengan ketentuan OJK terkait implementasi Keuangan Berkelanjutan, BCAS berkomitmen untuk mengalokasikan pembiayaan kepada proyek-proyek yang tergolong dalam kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KUB). Pada tahun 2023, sejumlah Rp2,7 triliun atau 30,1% dari total pembiayaan yang kami salurkan didedikasikan untuk sektor KUB.

Per akhir 2023, BCAS melayani nasabah melalui 76 kantor yang mencakup 14 Kantor Cabang (KC), 18 Kantor Cabang Pembantu (KCP), dan 44 Unit Layanan Syariah (ULS) yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Selain itu, kami juga menyediakan layanan syariah melalui 100 Layanan Syariah Bank Umum (LSBU) sebagai bagian dari sinergi kami dengan BCA, yang bertujuan untuk memperluas cakupan layanan syariah kepada masyarakat. Khususnya, layanan ini menyediakan fasilitas untuk setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Demi memberikan jangkauan pelayanan yang lebih luas bagi nasabah, pada tahun 2023 kami menambah jaringan cabang dengan membuka KCP Metro Lampung dan KCP ULS Cimahi. Sementara itu, beberapa lokasi cabang juga kami relokasi, seperti KC Surabaya dan KC Bandung agar kami dapat memberikan pelayanan yang semakin nyaman bagi nasabah. Menjadi sebuah penghargaan tersendiri bagi kami apabila kehadiran BCAS di berbagai wilayah Indonesia dapat memberikan solusi kebutuhan keuangan nasabah dan bisa membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

Implementasi Kebijakan Strategis

Direksi telah merumuskan strategi dan kebijakan untuk mencapai rencana bisnis, termasuk menetapkan target usaha, rencana ekspansi, pengembangan teknologi dan sumber daya manusia. Perumusan strategi kami lakukan dengan mempertimbangkan perkembangan perekonomian dan industri perbankan terkini serta memperhatikan ketentuan yang berlaku dan arahan dari regulator.

Kebijakan strategis yang diimplementasi pada tahun buku 2023, mencakup:

Akselerasi penyaluran pembiayaan

BCAS dapat membukukan pembiayaan mencapai Rp9,0 triliun, dengan pertumbuhan yang baik sebesar 18,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini adalah hasil dari pemasaran aktif yang dilakukan oleh fungsi pemasaran di seluruh jaringan cabang serta *customer deepening* sehingga kami dapat melayani nasabah-nasabah baru yang berasal dari ekosistem usaha nasabah *existing*, baik dari rantai pasok maupun grup usaha nasabah. Selain itu, dalam menyalurkan pembiayaan kami juga berkolaborasi dengan BCA sebagai induk usaha serta memanfaatkan ekosistem Grup BCA untuk menangkap peluang kebutuhan pembiayaan syariah dari nasabah Grup BCA. Satu hal lagi yang menjadi kunci sukses penyaluran pembiayaan adalah kualitas layanan dan *engagement* dengan nasabah. Kami memahami bahwa kerjasama pembiayaan harus didasari adanya kepercayaan dari nasabah bahwa BCAS senantiasa dapat diandalkan untuk mendampingi nasabah dalam mencapai pertumbuhan bisnisnya.

Akselerasi peningkatan *customer base*

Customer base yang besar menjadi kekuatan sebuah Bank dan mendukung keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Dengan pemahaman ini, maka upaya-upaya untuk meningkatkan jumlah nasabah khususnya nasabah produk-produk CASA menjadi fokus kami di sepanjang tahun 2023. Upaya ini di antaranya dilakukan dengan meluncurkan pembukaan rekening *online* pada *mobile* banking BCA Syariah *Mobile* dan kolaborasi dengan berbagai institusi seperti pendidikan, keagamaan maupun perkumpulan untuk pembukaan rekening secara kolektif. Upaya ini juga didukung

dengan pemasaran aktif baik melalui jaringan cabang maupun media digital serta program-program promosi. Kami bersyukur, nasabah BCAS senantiasa memberikan masukan kepada BCAS mengenai fitur maupun layanan yang dibutuhkan. Diluncurkannya fitur pembukaan rekening *online* ini merupakan salah satu wujud nyata dari upaya kami dalam mendengar kebutuhan nasabah dan memberikan solusinya.

Touch point antara BCAS dengan nasabah terjadi melalui berbagai *channel* baik *channel* fisik maupun digital. Kami memandang, kepuasan nasabah menjadi salah satu faktor kunci dalam meningkatkan *customer base* karena suara nasabah yang mendapatkan layanan prima dari BCAS menjadi aset bagi kami untuk mempertahankan nasabah *existing* maupun mengakuisisi nasabah baru. Untuk itu, kualitas layanan yang prima baik melalui *channel* fisik maupun digital senantiasa menjadi perhatian kami. *Alhamdulillah*, BCA Syariah dapat meningkatkan kualitas layanan dari waktu ke waktu tercermin dari berbagai indikator kepuasan pelanggan yang diriset oleh berbagai institusi seperti pencapaian BCAS sebagai 3rd Rank Sharia Bank in Satisfaction, Loyalty & Engagement 2023 dari Infobank Satisfaction Loyalty Engagement 2023, 2nd *Best* Mobile Banking Sharia (KBMI 1) dari Infobank Digital Brand Awards 2023 dan Golden Recognition 5 Consecutive Years in Service Excellence dari Infobank Banking Service Excellence 2023.

Akselerasi adopsi Teknologi Informasi

Strategi akselerasi penyaluran pembiayaan dan peningkatan *customer base* harus didukung dengan kapasitas dan kapabilitas infrastruktur Teknologi Informasi (TI). Di sepanjang tahun 2023, BCAS melakukan berbagai inisiatif untuk melakukan modernisasi TI di antaranya meningkatkan kapasitas sistem dan jaringan yang kami miliki agar kecepatan transaksi nasabah tetap terjaga. Kami juga mengembangkan berbagai aplikasi untuk meningkatkan efisiensi proses di antaranya Financing Origination System untuk pemrosesan pembiayaan berbasis data digital dan otomasi secara *end to end*. Dengan solusi ini, proses pembiayaan menjadi lebih efisien, akurat, memiliki rekam jejak yang lebih baik dan meminimalkan kesalahan manusia. Selain efisiensi proses, efisiensi aktivitas *monitoring* juga menjadi perhatian kami sehingga kami mengembangkan *digital dashboard*. Solusi ini memudahkan proses *monitoring performance* dengan menyajikan data secara cepat dan akurat sehingga bisa menjadi dasar pengembangan pengambilan keputusan strategis yang tepat.

Proses yang Diterapkan Direksi untuk Memastikan Implementasi Strategi

Direksi secara aktif dan kontinyu mengkomunikasikan rencana strategis dan target indikator kinerja utama kepada seluruh unit kerja dan kantor cabang baik dalam media rapat dan sosialisasi baik secara formal maupun informal. Hal ini menjadi penting agar seluruh insan BCAS memiliki pemahaman yang sama atas strategi utama bank dan bergerak bersama ke arah dan tujuan yang sama.

Secara berkala, kami melakukan pemantauan terhadap pencapaian indikator kinerja utama dan parameter risiko. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses bisnis BCAS berjalan sesuai dengan arah strategi yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan tujuan bisnis yang ingin dicapai dan menjaga agar risiko yang dihadapi tetap terkendali. Selain itu, kami senantiasa memantau perkembangan perekonomian, tren dalam industri perbankan, perubahan kebijakan dari regulator, dan praktik-praktik perbankan terbaik yang diterapkan di sektor perbankan. Tindakan ini dilakukan untuk menjaga agar BCAS tetap adaptif terhadap dinamika lingkungan bisnis dan industri, serta merespon perubahan tersebut dengan keputusan yang tepat.

Sepanjang tahun 2023, Direksi juga aktif berkomunikasi dengan unit kerja dalam menindaklanjuti temuan audit. Hal ini dilakukan dengan tujuan memastikan bahwa seluruh proses bisnis di BCAS telah memperhatikan isu-isu yang menjadi perhatian, baik dari regulator, auditor eksternal, maupun internal. Dengan adanya komunikasi yang efektif, kami dapat memastikan bahwa langkah-langkah perbaikan dan tindak lanjut terhadap temuan audit dilakukan secara tepat dan efisien. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga kepatuhan, meningkatkan efisiensi operasional, dan memastikan bahwa BCAS tetap beroperasi sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku.

Environment, Social, and Governance (ESG)

Berangkat dari pemahaman bahwa aspek ESG sangat sejalan dengan tujuan diterapkannya prinsip syariah (*maqasid syariah*), kami terus berupaya mempromosikan dan menginternalisasi nilai-nilai ESG dalam operasional dan aktivitas sehari-hari di BCAS. Ditinjau dari aspek bisnis, pengelolaan bisnis yang memperhatikan aspek ESG juga menjadi fondasi untuk keberlangsungan usaha dalam jangka panjang.

Implementasi ESG di BCAS dilakukan melalui tiga pilar kebijakan keuangan berkelanjutan, yaitu:

1. Perbankan Syariah yang Berkelanjutan yang menekankan pada kinerja ekonomi yang unggul dan inovatif dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik.
2. Institusi yang Kontributif dan Bertanggung Jawab yang fokus pada mendukung kelestarian alam dan memberikan dampak positif bagi masyarakat sebagai tanggung jawab bisnis kepada komunitas.
3. Menciptakan SDM Berkualitas dan Sejahtera yang menekankan pentingnya pengembangan SDM yang berkualitas dan sejahtera sebagai bagian integral dari keberlanjutan perusahaan.

Dengan mengintegrasikan ESG ke dalam kebijakan dan praktik bisnis, BCAS berkomitmen untuk tidak hanya mencapai kinerja finansial yang baik, tetapi juga memberikan dampak positif pada lingkungan, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.

Pembiayaan Berkelanjutan

BCAS terus berupaya meningkatkan portofolio pembiayaan berkelanjutan secara kontinyu. Di 2023, pembiayaan BCAS yang masuk dalam kategori KUB mencapai Rp2,7 triliun atau setara dengan 30,4% dari total pembiayaan. Dibandingkan tahun sebelumnya, angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 4,7% (YoY), yang tercatat sebesar Rp2,6 triliun. BCAS dapat memperhatikan kualitas pembiayaan berkelanjutan tercermin dari rasio pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing*/ NPF) tetap terjaga dengan baik, berada pada tingkat 0,6%.

Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat

Kegiatan pelibatan dan pengembangan masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan yang dilaksanakan BCAS. Hal ini direalisasikan di antaranya melalui program BCA Syariah Peduli dan penyaluran dana zakat yang dihimpun dari masyarakat. Kami menjalin kerja sama dengan SheStarts.id untuk meningkatkan kapasitas dan jejaring pelaku UMKM perempuan di Indonesia melalui program yang diberi judul WEpreneur by BCA Syariah. Pada program yang berjalan selama 2022 hingga 2023 tersebut, terdapat 15 mentor UMKM perempuan (Big Sista) yang mengikuti pelatihan serta pendampingan oleh para ahli dan pelaku usaha dengan topik yang beragam. Para Big Sista mendapatkan pengalaman menjadi mentor usaha dengan terlibat langsung di komunitas masing-masing melalui kegiatan *micro-mentoring*. Sebanyak, 421 peserta *micro-mentoring* mendapatkan pengetahuan tentang kewirausahaan.

Menerapkan Budaya Ramah Lingkungan

BCAS berkomitmen untuk menerapkan inisiatif-inisiatif guna memastikan budaya keberlanjutan benar-benar terintegrasi dalam gaya hidup insan BCAS dengan mengkampanyekan program *green lifestyle*. Tujuan program ini adalah menjadikan praktik ramah lingkungan sebagai bagian dari kegiatan operasional sehari-hari di kantor seperti menerapkan sistem *digital signing* dan *digital approval* untuk mengurangi penggunaan kertas, mengkampanyekan penghematan listrik dan air, meniadakan air minum dalam kemasan di lingkungan kantor, serta melakukan pemilahan sampah. Kami juga melakukan pengukuran atas konsumsi sumber daya yang digunakan, khususnya listrik dan air, dan memperluas cakupan pengukurannya dari waktu ke waktu.

Budaya ramah lingkungan juga diaplikasikan dalam perbankan digital melalui pengembangan *e-channel*. Di 2023, jumlah pengguna BCA Syariah *Mobile* mengalami kenaikan sebesar 267,58%, mencapai 373.753 pengguna. Frekuensi transaksi BCA Syariah *Mobile* mencapai 9,9 juta transaksi, mencerminkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Melalui optimalisasi perbankan digital, harapan kami adalah agar BCAS dapat memberikan kontribusi dalam mengurangi emisi karbon dan mewujudkan keuangan yang inklusif.

Penerapan GCG

Kami berkomitmen untuk selalu menerapkan dan menjaga praktik GCG di seluruh rantai nilai organisasi dengan merujuk pada ketentuan yang berlaku. Kami meyakini, GCG yang diimplementasikan dengan konsisten dapat meningkatkan kepercayaan nasabah, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya kepada kami, dan pada akhirnya berdampak positif pada kelangsungan usaha BCAS.

Kami terus mengevaluasi, menyesuaikan, dan melengkapi kebijakan yang berlaku di BCAS, termasuk yang terkait dengan manajemen risiko, tata kelola, dan prosedur kegiatan operasional untuk menyempurnakan penerapan GCG. BCAS senantiasa mengukur kualitas penerapan GCG dengan secara berkala melakukan penilaian diri (*self-assessment*). Pada tahun 2023, hasil *self-assessment* GCG BCAS pada semester 1 maupun 2 mencapai peringkat komposit dengan predikat 'Sangat Baik'.

Sumber Daya Manusia

Seluruh pencapaian kinerja BCAS tidak lepas dari kontribusi insan BCAS. Oleh karenanya, BCAS senantiasa berupaya untuk menciptakan insan yang profesional dan kompeten di perbankan syariah yang juga diimbangi dengan nilai individu yang kuat. Target tersebut didukung oleh pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM), mencakup sistem rekrutmen yang adil, peningkatan kompetensi, kesempatan jenjang karier, hingga menjaga hubungan industrial yang sehat. Rekrutmen menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas SDM yang dimiliki. Pemenuhan kebutuhan SDM pada beberapa fungsi yang spesifik dilakukan melalui program khusus seperti program BCA Syariah Information Technology Program (BSIT) untuk memenuhi kebutuhan SDM untuk bidang TI serta BCA Syariah Development Program (BDP) untuk kami memenuhi kebutuhan SDM pada fungsi pemasaran dan analisis pembiayaan. Sementara untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada, pengembangan kapasitas melalui program-program pelatihan dilakukan secara kontinyu. Kami memastikan 100% insan BCAS pada tahun 2023 telah mendapatkan pelatihan.

Pengelolaan SDM di BCAS juga mencakup upaya dalam menciptakan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan (*work-life balance*) guna menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan penuh kebahagiaan. Fasilitas ibadah dan fasilitas olahraga tersedia bagi seluruh karyawan, dengan tujuan untuk membantu mereka mencapai keseimbangan jasmani dan rohani. Per 31 Desember 2023, BCAS memiliki 771 karyawan yang telah berkontribusi positif bagi pertumbuhan BCAS dari berbagai kelompok usia dan tingkat pendidikan. Informasi mengenai insan BCAS, program pelatihan dan pengembangan SDM kami sajikan secara lengkap dalam bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

Penilaian Kinerja Komite-Komite di Bawah Direksi

Komite-komite di bawah Direksi memiliki peran dalam membantu Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengelolaan Bank. Komite-komite tersebut termasuk Komite Aset dan Liabilitas, Komite Kebijakan Pembiayaan, Komite Pembiayaan, Komite Manajemen Risiko, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Sumber Daya Manusia, dan Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian.

Kami mengungkapkan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh anggota Komite di bawah Direksi atas kinerja dan dukungan yang konsisten diberikan dalam membantu Direksi menjalankan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BCAS sepanjang tahun 2023. Direksi berpendapat bahwa setiap komite telah menunjukkan kinerja yang baik dan memberikan kontribusi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sepanjang 2023. Komite-komite secara berkala mengadakan pertemuan, berpartisipasi aktif dalam diskusi, dan memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai isu-isu terkait pengelolaan bisnis BCAS, pencapaian target, manajemen risiko, perkembangan ekonomi, dan regulasi terkini.

Komposisi Direksi

Pada tahun 2023, terjadi perubahan dalam susunan anggota Direksi. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan 22 Februari 2023, RUPS memutuskan Bapak Rickyadi Widjaja telah menyelesaikan masa tugasnya dan mengangkat Ibu Ina Widjaja sebagai Direktur sampai dengan ditutupnya RUPS tahun 2025. Perubahan susunan anggota Direksi BCAS tersebut adalah bagian dari *strategic direction* BCAS untuk mendukung pertumbuhan skala dan kompleksitas usaha pada tingkat yang lebih tinggi. Dengan demikian, struktur Direksi pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Presiden Direktur	: Yuli Melati Suryaningrum
Direktur	: Ina Widjaja
Direktur	: Pranata
Direktur	: Lukman Hadiwijaya
Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	: Houda Muljanti

Tantangan dan Pencapaian Target 2023

Pada tahun 2023, perekonomian global masih terpengaruh oleh ketidakpastian akibat gejolak geopolitik di Eropa dan Amerika. Sementara itu, sektor perbankan juga dihadapkan pada tuntutan untuk terus mengadopsi perkembangan teknologi dengan cepat serta memenuhi harapan pelanggan akan kecepatan dan kemudahan transaksi. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, BCAS berhasil menunjukkan kinerja yang positif berkat penerapan kebijakan strategis, efektivitas mitigasi risiko, dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang konsisten. Secara keseluruhan, BCAS berhasil mencapai kinerja di atas target yang telah ditetapkan pada awal tahun, yaitu:

- Aset mencapai Rp14,5 triliun tumbuh 14,2% berada di atas target yang ditetapkan yaitu 9-11%;
- DPK mencapai Rp10,9 triliun tumbuh 15,5% berada di atas target yang ditetapkan yaitu 10-12%;
- Pembiayaan mencapai Rp9,0 triliun, tumbuh 18,8% berada di atas target yang ditetapkan yaitu 10-12% dan
- Laba bersih tercatat sebesar Rp153,8 miliar, tumbuh 30,8% berada di atas target yang ditetapkan yaitu 17-19%.

Analisis Prospek Usaha dan Strategi Tahun 2024

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 diproyeksikan masih bisa terjaga di atas 5% menurut Menteri Keuangan. Sementara proyeksi di sektor perbankan, beberapa risiko diperkirakan akan terus menjadi bagian dari tantangan global, termasuk di sektor perbankan Indonesia, hingga tahun mendatang. Salah satu risiko yang utama adalah dampak dari suku bunga acuan yang tinggi. Di tengah risiko tersebut, sektor perbankan Indonesia ditopang oleh tingkat permodalan (*capital adequacy ratio*/CAR) yang tinggi di level 27,41% atau jauh di atas rata-rata CAR negara lain yang berada di bawah 20% per akhir 2023, sehingga terpantau masih dalam tingkat ketahanan yang memadai dan perbankan nasional diindikasikan masih prospektif dalam jangka panjang.

Selain ketidakpastian perekonomian, perbankan syariah juga menghadapi tantangan tingkat literasi perbankan syariah yang masih rendah. Namun kami optimis bahwa tahun 2024 perbankan syariah masih memiliki potensi yang besar. Optimisme ini didukung oleh pangsa pasar perbankan syariah yang terus menunjukkan tren pertumbuhan serta peluang-peluang seperti demografi Indonesia dan potensi industri halal global dan lokal yang terus meningkat. Perbankan syariah juga memiliki layanan dan produk yang menjadi ciri khas perbankan syariah yang jika didukung dengan adopsi teknologi akan menjadi kekuatan bagi perbankan syariah untuk tumbuh dan memenuhi kebutuhan nasabah yang makin kompleks dan spesifik.

Menghadapi tantangan ke depan, BCAS akan terus mempertahankan tingkat pertumbuhan. Fokus strategi kami pada tahun 2024 diarahkan pada peningkatan jumlah nasabah dan komposisi CASA, penyaluran pembiayaan yang ekspansif namun tetap hati-hati, didukung oleh kapasitas dan kapabilitas SDM dan infrastruktur TI yang kuat serta praktik tata kelola perusahaan dengan standar global. Kami juga berkomitmen untuk memperluas akses dan keterjangkauan layanan melalui berbagai solusi digital baik produk dana maupun pembiayaan.

Kami telah merumuskan target pertumbuhan untuk tahun mendatang dengan mempertimbangkan prospek ekonomi ke depan serta strategi bisnis yang akan diterapkan. Beberapa indikator pertumbuhan yang ditetapkan BCAS di tahun 2024 di antaranya:

- Pertumbuhan aset sebesar 9,0-10,0%
- Pertumbuhan DPK sebesar 10,0-12,0%
- Pertumbuhan pembiayaan sebesar 10,0-12,0%
- Pertumbuhan laba bersih sebesar 9,0-11,0%

Apresiasi kepada Seluruh Pemangku Kepentingan

Sebagai penutup, mewakili Direksi BCAS, kami ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh nasabah atas kepercayaan dan loyalitas yang telah diberikan kepada BCAS. Penghargaan tertinggi juga kami sampaikan kepada pemegang saham dan semua pemangku kepentingan, termasuk Bank Indonesia dan OJK, atas dukungan serta kepercayaan yang telah diberikan yang telah membantu kami mencapai kinerja positif di tahun 2023, mempertahankan tingkat pertumbuhan yang berkelanjutan dengan senantiasa memperhatikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Kami juga menghaturkan apresiasi dan penghargaan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang telah melaksanakan fungsi pengawasan dengan baik sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan sehingga BCAS dapat dikelola dengan menerapkan praktik-praktik terbaik di industri perbankan. Tidak lupa, terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada seluruh karyawan yang telah memberikan kontribusi dan performa terbaik dalam suasana kerja yang membahagiakan, sehingga bersama-sama BCAS mampu melalui tahun 2023 dengan kinerja dan prestasi yang membanggakan.

InsyaAllah, dengan petunjuk dan perlindungan Allah SWT, kepercayaan nasabah dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, segala semangat, kerja sama, ketulusan, dan kegembiraan yang dicurahkan dalam membangun BCAS dapat mendorong BCAS untuk terus bergerak dan mengoptimalkan percepatan-percepatan pertumbuhan untuk menunjukkan kinerja yang berkualitas. Pada akhirnya, seluruh upaya kami bertujuan untuk senantiasa dapat memenuhi kebutuhan aktivitas keuangan nasabah dengan layanan prima agar BCAS dapat mewujudkan visi menjadi bank syariah andalan dan pilihan masyarakat.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, Februari 2024
Atas nama Direksi,



Yuli Melati Suryaningrum
Presiden Direktur

Lukman Hadiwijaya
Direktur

Houda Muljanti
Direktur

Pranata
Direktur

Yuli Melati Suryaningrum
Presiden Direktur

Ina Widjaja
Direktur



Lembar Tanda Tangan Dewan Komisaris dan Direksi

Pertanggungjawaban Laporan Tahunan 2023

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bank BCA Syariah Tahun Buku 2023 ini telah dimuat secara lengkap dan kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan. Laporan Tahunan BCAS ini juga memuat Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, Februari 2024

Dewan Komisaris



Ratna Yanti
Presiden Komisaris Independen



Inge Setiawati
Komisaris Independen



Rickyadi Widjaja
Komisaris

Direksi



Yuli Melati Suryaningrum
Presiden Direktur



Ina Widjaja
Direktur



Houda Muljanti
Direktur



Pranata
Direktur



Lukman Hadiwijaya
Direktur



Merangkul Keberlanjutan

Kami mendukung praktik produksi yang bertanggung jawab, penggunaan bahan ramah lingkungan, serta mendorong pemberdayaan pelaku UMKM perempuan untuk menggerakkan perekonomian yang berkelanjutan. Bentuk kepedulian terhadap keberlanjutan ini, kami sajikan melalui tema pakaian yang digunakan pada laporan ini.

Wardrobe by Ageman Ecoprint



Natural Fabric

100% serat alam

ECO Eco Print

Motif dari alam seperti daun kenikir, yerba, jarak, bunga kamboja, daun pinus, akar dan buah anggur

ZERO WASTE Zero Waste

Limbah dimanfaatkan untuk lukisan, kerajinan, atau pupuk organik

Eco Dye

Pewarna alam dari tanaman indigofera dan curcuma domestica (kunyit)



Profil Perusahaan





Informasi Umum Perusahaan

Nama:
PT Bank BCA Syariah

Nama Inisial:
BCAS

Bidang Usaha:
Bank Umum Syariah



Kepemilikan Saham:
PT Bank Central Asia Tbk
99,99995%

PT BCA Finance
0,00005%

Status Perusahaan:
Perusahaan Swasta

Tanggal Pendirian:
2 Maret 2010

Tanggal Beroperasi:
5 April 2010

Dasar Hukum Pendirian:
Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat PT Bank UIB nomor 49 tanggal 16 Desember 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Pudji Rezeki Irawati, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-01929.AH.01.02 tanggal 14 Januari 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 23 tanggal 20 Maret 2012.



Kode Bank:
536

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
Rp2.255.183.207.000

Jumlah Karyawan
771
orang karyawan tetap dan kontrak

Swift Code:
SYCAIDJ1

Modal Dasar:
Rp5.000.000.000.000

Jumlah Jaringan
76
jaringan cabang

> 19.047
ATM BCA

> Ratusan ribu mesin EDC

Kontak:
HaloBCA 1500888
halobcasyariah@bca.co.id

Website:
www.bcasyariah.co.id

Alamat:
PT Bank BCA Syariah
Jl. Jatinegara Timur No.72
Jakarta Timur 13310
(+62 21) 8190072
8505030, 8505035



Riyawat Singkat BCAS

Pada 12 Juni 2009, BCA melakukan konversi akuisisi terhadap PT Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB) melalui Akta Akuisisi No. 72 untuk mendirikan PT Bank BCA Syariah. Kegiatan usaha serta nama Bank UIB kemudian diubah menjadi PT Bank BCA Syariah yang akan melayani solusi perbankan syariah melalui Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 49 pada 16 Desember 2009 yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada 14 Januari 2010. Lebih lanjut, dilakukan penjualan 1 lembar saham kepada PT BCA Finance (BCA Finance), sehingga kepemilikan saham BCAS sebesar 99,996% dimiliki oleh BCA dan 0,004% dimiliki oleh BCA Finance pada saat itu.

Pada 2 Maret 2010, perubahan kegiatan usaha BCAS dari bank konvensional menjadi Bank Umum Syariah telah mendapatkan izin dan dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010. Sejak 5 April 2010, BCAS resmi beroperasi sebagai Bank Umum Syariah. Pada tanggal 10 Desember 2020, dengan tujuan memperkuat struktur permodalan dan mendukung pertumbuhan aset BCAS serta sebagai kontribusi dalam memperkuat arsitektur perbankan nasional melalui konsolidasi perbankan, BCAS melakukan aksi korporasi penggabungan (merger) dengan PT Bank Interim Indonesia, yang sebelumnya dikenal sebagai PT Bank Rabobank International Indonesia ("Bank Interim").

Seiring dengan berkembangnya kegiatan operasi BCAS, per akhir 2023 kami telah memberikan pelayanan kepada sekitar 530.839 nasabah pendanaan dan 11.492 nasabah pembiayaan melalui 76 jaringan cabang, yang melibatkan 14 Kantor Cabang (KC), 18 Kantor Cabang Pembantu (KCP), dan 44 Kantor Cabang Pembantu Unit Layanan Syariah (KCP ULS). Jaringan cabang tersebut tersebar di berbagai wilayah seperti DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Kediri, Pasuruan, Palembang, Lampung, Medan, Banda Aceh, dan Makassar. Selain melalui jaringan cabang, nasabah juga dapat mengakses layanan syariah melalui 100 Layanan Syariah Bank Umum (LSBU) BCA yang tersebar di seluruh Pulau Jawa.

Visi, Misi & Tata Nilai Perusahaan

Menjadi Bank Syariah Andalan dan Pilihan Masyarakat.

Visi



Visi ini mengandung makna:
- Seluruh insan BCAS berkeinginan menjadikan BCAS sebagai bank andalan masyarakat dengan menciptakan produk, layanan, dan sumber daya manusia yang berkualitas dan dapat dipercaya.
- Dengan menjadi bank andalan, maka BCAS akan menjadi pilihan utama masyarakat sehingga dapat mewujudkan cita-cita BCAS untuk berperan dalam perekonomian Indonesia.

Misi



- Mengembangkan SDM dan infrastruktur yang andal sebagai penyedia jasa keuangan syariah dalam rangka memahami kebutuhan dan memberikan layanan yang lebih baik bagi nasabah.
- Membangun institusi keuangan syariah yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran, penghimpunan dana dan pembiayaan bagi nasabah bisnis dan perseorangan.

Visi, Misi, dan Tata Nilai BCAS telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 011/SK/DIR/2017 tanggal 4 April 2017 perihal Kebijakan Visi, Misi, dan Tata Nilai BCA Syariah dan Surat Keputusan Direksi No. 051/SK/DIR/2017 tanggal 3 November 2017 perihal Pengembangan Kebijakan Visi, Misi, dan Tata Nilai BCA Syariah.

Review Visi dan Misi oleh Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam rangka memastikan kesesuaian Visi dan Misi BCAS, Bank senantiasa melakukan *review* terhadap Visi dan Misi perusahaan dan dinyatakan sesuai dengan perkembangan dan tantangan perusahaan ke depan. Visi dan Misi secara konsisten disosialisasikan kembali kepada seluruh jenjang organisasi.

Budaya dan Tata Nilai Perusahaan

BCAS membangun budaya kerja melalui penerapan tata nilai yang telah disusun dengan tujuan memberikan landasan moral dan perilaku bagi setiap insan BCAS. Tata nilai BCAS dikembangkan dari keyakinan bahwa BCAS untuk meraih visi dan misi maka dibutuhkan insan-insan yang menganut serangkaian nilai tertentu. Tata nilai BCAS mengandung empat nilai inti yang disingkat TRIP yaitu: *Teamwork*, *Responsibility, Integrity, Professional*.

Teamwork (Kerja Sama)

Adalah interaksi dan sinergi yang didasari atas pemahaman diri sendiri dan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Nilai *Teamwork* memiliki 3 perilaku kunci yaitu:
- *Understand* (**Memahami**)
- *Interact* (**Berinteraksi**)
- *Synergy* (**Sinergi**)

Integrity (Integritas)

Mengandung pengertian sikap teguh dalam menjunjung tinggi kejujuran, komitmen, dan keterbukaan, yang dilakukan secara konsisten untuk membangun kepercayaan perusahaan bagi nasabah. Nilai *Integrity* memiliki 3 perilaku kunci yaitu
- *Honest* (**Jujur**)
- *Commit* (**Berkomitmen**)
- *Transparent* (**Terbuka**)

Responsibility (Tanggung Jawab)

Mengandung pengertian melaksanakan peran dan tugas dengan penuh perhatian dan kepedulian untuk memenuhi harapan dan kebutuhan nasabah yang spesifik. Nilai *Responsibility* memiliki 3 perilaku kunci yaitu:
- *Act* (**Bertindak**)
- *Aware* (**Peduli**)
- *Serve Sincerely* (**Melayanai dengan Tulus**)

Professional (Profesional)

Mengandung pengertian secara positif menampilkan citra, sikap, dan kompetensi yang secara konsisten ditingkatkan untuk menjadi lebih baik dalam melaksanakan peran dan tugas guna meningkatkan citra perusahaan. Nilai *Professional* memiliki 3 perilaku kunci yaitu:
- *Appearance* (**Citra Positif**)
- *Competence* (**Kompetensi**)
- *Continuous Improvement* (**Perbaikan yang Berkelanjutan**)

Jejak Langkah

2010

April

BCAS memulai kegiatan operasionalnya sebagai Bank Umum Syariah, menyusul keberhasilan akuisisi dan konversi PT Bank Utama Internasional Bank (UIB) menjadi Bank Umum Syariah oleh BCA.

2012

Januari

BCAS membuka layanan untuk menunjang segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

2014

Oktober

BCAS meluncurkan fasilitas *mobile banking* yang diberi nama BCA Syariah *Mobile*.

2015

Maret

BCAS mengembangkan Sistem Inti Perbankan (*Core Banking System*) terkini untuk meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah.

Juli

BCAS ditunjuk sebagai Bank Administrator Rekening Dana Nasabah oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

2016

Januari

BCAS ditetapkan menjadi Bank BUKU II oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2017

Januari

BCAS meresmikan KC Medan sebagai jaringan kantor pertama di Pulau Sumatra.

Maret

BCAS meluncurkan Produk Pembiayaan Multijasa Umrah untuk memfasilitasi kebutuhan biaya perjalanan Umrah nasabah.

April

BCAS memperkenalkan Tahapan Mabrur iB yang merupakan pengembangan fitur produk tabungan untuk mempermudah nasabah dalam mewujudkan rencana ibadah Umrah dan Haji.

September

- BCAS meluncurkan Kartu FLAZZ BCA Syariah sebagai bentuk dukungan terhadap Gerakan Nasional Non Tunai.
- BCAS meresmikan KC Palembang sebagai kantor cabang pertama yang ada di Provinsi Sumatera Selatan

Oktober

BCAS meluncurkan fasilitas *internet banking* yang diberi nama Klik BCA Syariah untuk keamanan dan kenyamanan nasabah bertransaksi.

November

BCAS memperluas jaringan dengan membuka KCP Malang.

2018

Februari

BCAS terpilih sebagai salah satu Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH) untuk periode April 2018 s/d Maret 2021.

2019

April

BCAS hadir di Bandar Lampung untuk memperkuat layanan BCAS di Pulau Sumatera.

Juni

BCAS KC Banda Aceh resmi beroperasi sebagai cabang BCAS pertama di Kota Banda Aceh.

2020

Juli

- BCAS meresmikan KC Panakkukang sebagai kantor cabang pertama yang ada di Pulau Sulawesi.
- Untuk pertama kalinya, nasabah dapat melakukan setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji melalui Layanan Syariah Bank Umum (LSBU) BCA yang merupakan hasil sinergi antara BCAS dan BCA.

Desember

BCAS melakukan aksi korporasi penggabungan (merger) dengan PT Bank Interim Indonesia yang dahulu bernama PT Bank Rabobank International Indonesia ("Bank Interim").

2021

Mei

- Beroperasi penuh di Aceh dengan menambah dua cabang baru di Lhokseumawe dan Bireuen.
- Mengoperasikan 100 LSBU di cabang BCA.

2022

Januari

BCAS meluncurkan layanan BI Fast untuk mendukung perkembangan sistem pembayaran nasional.

Agustus

- BCAS melakukan *revamp* BCA Syariah *Mobile* untuk meningkatkan kenyamanan dan kemudahan transaksi nasabah.
- Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) memberikan peringkat idAA+/ Stable (Double A Plus; Stable Outlook).

Desember

- Percepatan proses Pembiayaan *Murabahah* Emas iB dengan memanfaatkan penggunaan teknologi *Robotic Process Automation* (RPA).
- Fitur Tarik Tunai Tanpa Kartu (*cardless*) di BCA Syariah *Mobile* melalui ATM BCA.

2023

Juni

BCA Syariah meluncurkan fitur Pembukaan Rekening *Online* di BCA Syariah Syariah *Mobile*.

September

BCA Syariah raih sertifikat ISO 27001:2013 meliputi ruang lingkup penyediaan aplikasi program infrastruktur API (*Application Programming Interface*) dan *Host to Host Network*.

Bidang Usaha

Kegiatan usaha BCAS yaitu penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, dan penyediaan jasa perbankan sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan pasal 3 Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat PT Bank UIB nomor 49 tanggal 16 Desember 2009, maksud dan tujuan perseroan adalah melakukan usaha di bidang perbankan berdasarkan prinsip syariah. Adapun ruang lingkup kegiatan usaha BCAS sesuai anggaran dasar antara lain:

1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
4. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
5. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
6. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
7. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
8. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
9. Membeli, menjual dan menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah antara lain seperti akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah, kafalah*, atau *hawalah*.
10. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau BI.
11. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah.
12. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah.
13. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah.
14. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah.
15. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad *wakalah*.
16. Memberikan fasilitas Bank Garansi berdasarkan prinsip syariah
17. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
18. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
19. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik.
20. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan prinsip syariah.

Kegiatan Usaha yang Dijalankan

Berdasarkan Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah, BCAS mulai beroperasi sejak tanggal 5 April 2010 dengan kegiatan usaha:

1. Menghimpun dana berdasarkan prinsip *wadiah* (titipan) dan *mudharabah* (bagi hasil) berupa tabungan, giro, dan deposito;
2. Menyalurkan pembiayaan (langsung dan tidak langsung) dengan prinsip *murabahah* (jual beli), *mudharabah/ musyarakah* (bagi hasil) dan *ijarah muntahiya bittamlik* – IMBT (sewa beli);
3. Menyediakan jasa dan layanan perbankan sesuai dengan prinsip syariah.

Produk, Jasa, dan Layanan

Solusi produk/jasa yang kami berikan dapat dikategorikan menjadi produk simpanan, produk pembiayaan, perbankan elektronik, serta berbagai jasa/layanan perbankan.

Simpanan

- Tahapan iB
- Tahapan Rencana iB
- Tahapan Mabrur iB
- Simpanan Pelajar (SimPel) iB
- Giro iB

Pembiayaan

- KPR iB
- KKB iB
- EMAS iB
- Pembiayaan Umrah iB
- Pembiayaan Modal Kerja iB
- Pembiayaan Investasi iB
- Pembiayaan Rekening Koran Syariah iB
- Pembiayaan Anjak Piutang iB
- Bank Garansi

Perbankan Elektronik

- BCA Syariah *Mobile*
- Klik BCA Syariah
- Kartu Debit BCA Syariah
- Jaringan ATM dan EDC BCA
- Flazz BCA Syariah
- Pembayaran QR
- Pembukaan Rekening *Online*

Jasa dan Layanan Perbankan

- Layanan Penerimaan Setoran BPIH
- Kiriman Uang (Retail dan RTGS)
- Kliring (Lokal dan *Intercity Clearing*)
- Virtual Account
- Safe Deposit Box (SDB)
- Layanan Payroll (Pembayaran Gaji)
- Referensi Bank
- Inkaso

Catatan: Informasi selengkapnya mengenai penjelasan produk dan jasa serta manfaatnya dapat diakses pada www.bcasyariah.co.id

Peta Wilayah Usaha dan Alamat Jaringan



1. KC JATINEGARA
2. KC MANGGA DUA
3. KC SAMANHUDI
4. KC SUNTER
5. KCP KENARI
6. KCP KELAPA GADING
7. KCP ULS TN ABANG
8. KCP ULS METRO PONDOK INDAH
9. KCP ULS PASAR MINGGU
10. KCP ULS TANJUNG PRIOK
11. KCP ULS MELAWAI
12. KCP ULS GUDANG PELURU
13. KCP ULS KEMANG MANSION
14. KCP ULS PURI INDAH
15. KCP ULS PLUIT KENCANA
16. KCP ULS BINTARO UTAMA
17. KCP BEKASI
18. KCP PASAR KRANJI
19. KCP ULS JUANDA BEKASI
20. KCP PONDOK GEDE
21. KCP CIKARANG SELATAN
22. KCP DEPOK
23. KCP ULS MARGONDA DEPOK
24. KCP CILEUNGSI
25. KCP ULS BOGOR
26. KCP ULS CIMANGGIS
27. KCP ULS TANGERANG
28. KCP CILEDUG
29. KCP PASAR ANYAR TANGERANG
30. KCP CIPUTAT (MCP)
31. KCP ULS BINTARO
32. KC BANDUNG
33. KCP ULS ASIA AFRIKA
34. KCP ULS KOTA BARU PARAHYANGAN
35. KCP ULS CIMAHI
36. KCP ULS BUAH BATU BANDUNG
37. KC SEMARANG
38. KCP ULS MAJAPAHIT
39. KCP ULS PEMUDA SEMARANG
40. KC SOLO
41. KCP ULS SOLO SLAMET RIYADI
42. KCP ULS SINGOSAREN SOLO
43. KC YOGYAKARTA
44. KCP ULS SUDIRMAN YOGYAKARTA

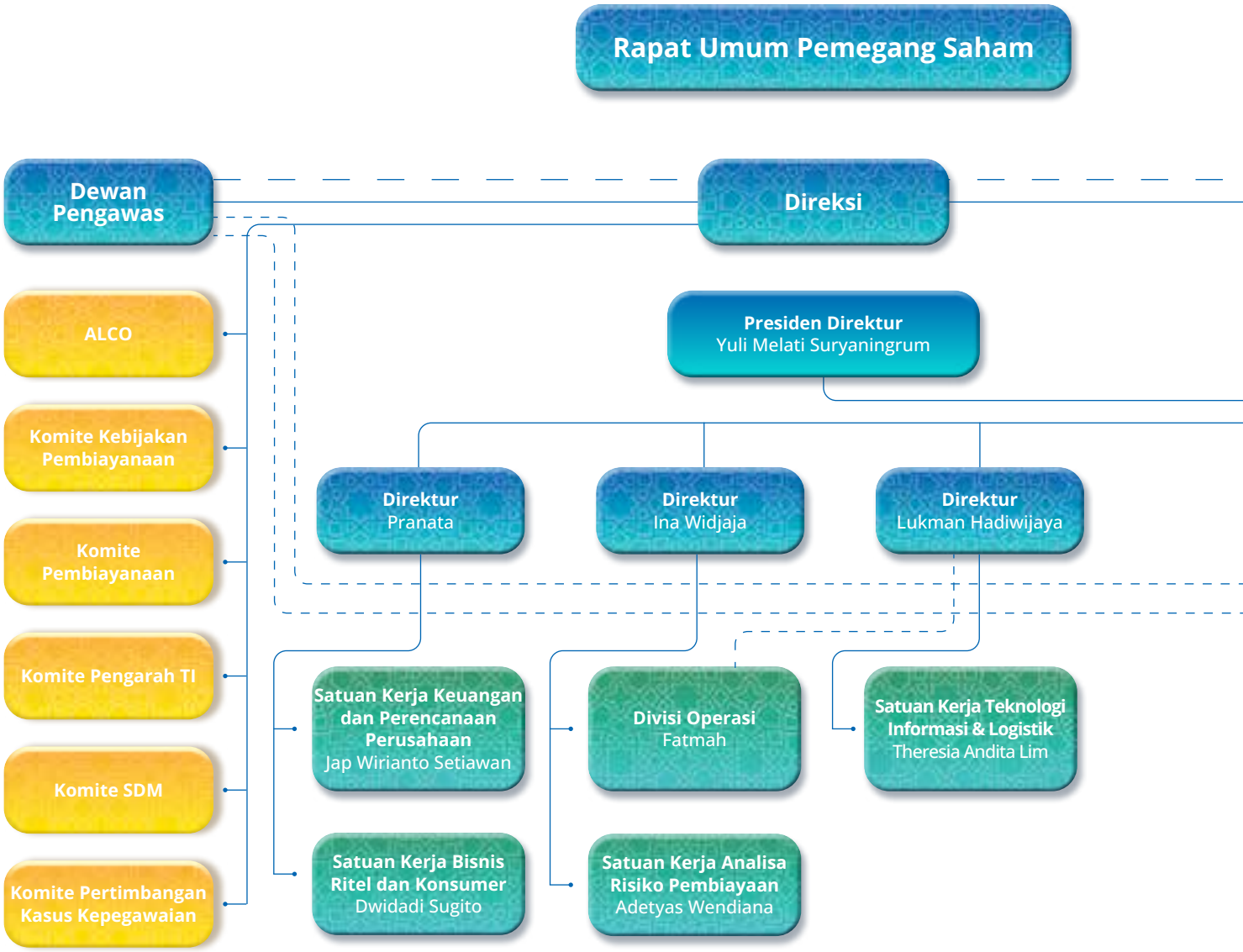


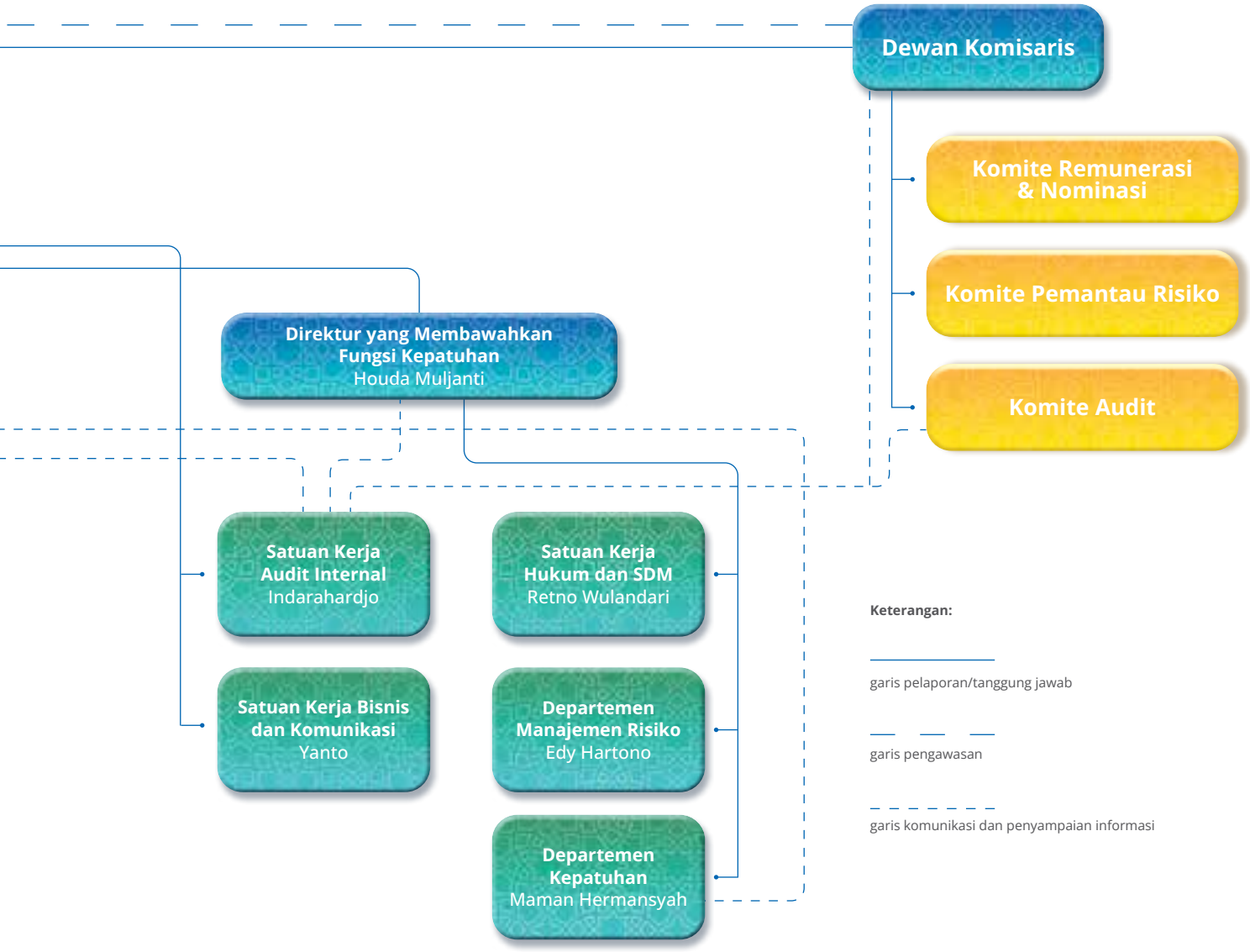
- 45. KCP ULS KUDUS
- 46. KCP ULS SRAGEN SOLO
- 47. KC SURABAYA
- 48. KCP ULS DARMO SURABAYA
- 49. KCP ULS VETERAN
- 50. KCP ULS SIDOARJO
- 51. KCP ULS KAPAS KRAMPUNG
- 52. KCP ULS PONDOK CHANDRA
- 53. KCP ULS SEPANJANG
- 54. KCP ULS PERAK BARAT/ PUCANG ANOM
- 55. KCP ULS GEDANGAN
- 56. KCP ULS GRESIK
- 57. KCP MALANG
- 58. KCP ULS PANDAAN
- 59. KCP ULS MOJOKERTO
- 60. KCP ULS KEPANJEN
- 61. KCP KEDIRI
- 62. KCP PASURUAN
- 63. KCP ULS TAMAN PONDOK INDAH
- 64. KCP SUNGKONO
- 65. KCP BANYUWANGI
- 66. KC BANDA ACEH
- 67. KCP LHOKSEUMAWE
- 68. KCP ULS BIREUEN
- 69. KC MEDAN (MDN)
- 70. KCP ULS SETIABUDI MEDAN
- 71. KC PALEMBANG
- 72. KCP ULS A RIVAI PALEMBANG
- 73. KCP ULS SUDIRMAN PALEMBANG
- 74. KC BANDAR LAMPUNG
- 75. KCP METRO LAMPUNG
- 76. KC PANAKKUKANG

Per 31 Desember 2023, BCAS memiliki 1 Kantor Pusat dan 76 jaringan kantor yang terdiri dari Kantor Cabang (KC), Kantor Cabang Pembantu (KCP), dan Kantor Cabang Pembantu Unit Layanan Syariah (KCP ULS). Informasi lengkap mengenai lokasi kantor pusat dan seluruh kantor cabang dapat dilihat pada lampiran.

Struktur Organisasi

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/SK/KOM/2023 tanggal 22 Februari 2023 perihal Persetujuan Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi serta Kerangka Induk Organisasi PT Bank BCA Syariah maka struktur organisasi BCAS per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:




Dewan Komisaris
Komite Remunerasi & Nominasi
Komite Pemantau Risiko
Komite Audit
Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
Houda Muljanti
Satuan Kerja Audit Internal
Indarahardjo
Satuan Kerja Hukum dan SDM
Retno Wulandari
Satuan Kerja Bisnis dan Komunikasi
Yanto
Departemen Manajemen Risiko
Edy Hartono
Departemen Kepatuhan
Maman Hermansyah
Keterangan:
garis pelaporan/tanggung jawab
garis pengawasan
garis komunikasi dan penyampaian informasi

Profil Dewan Komisaris



Ratna Yanti

Presiden Komisaris Independen

Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
Usia	60 tahun
Domisili	Surabaya

Riwayat Pendidikan

Beliau meraih gelar Sarjana dalam bidang Psikologi dari Universitas Surabaya (1987). Di luar itu, beliau juga telah mengikuti berbagai program pelatihan baik di dalam maupun luar negeri di antaranya Overseas Bankers Training Program-Wachovia USA, Pacific RIMS Banker-Foster School of Business Washington University USA, Strategic Marketing Program-BCA Asian Institute of Management, Strategic Management and Leadership Program-BCA Australian Institute of Management, serta pelatihan-pelatihan lain di bidang Perkreditan, Sumber Daya Manusia, Kepemimpinan, Perbankan Umum, Risk Management, dan Perbankan Syariah.

Dasar Hukum Penunjukan

Ratna Yanti diangkat sebagai Presiden Komisaris Independen BCAS pada RUPST tanggal 22 Februari 2023 untuk periode jabatan sampai dengan RUPST tahun 2025 dan mendapat persetujuan OJK pada tanggal 13 Januari 2023.

Pengalaman Kerja

Sebelum menjabat sebagai Presiden Komisaris Independen, beliau menjabat sebagai Komisaris Independen BCAS (2020-2023). Beliau membangun karier di BCA (1988-2018) dan menempati berbagai posisi strategis di antaranya sebagai Kepala Kantor Wilayah Surabaya (2015-2018), Kepala Kantor Wilayah Semarang (2011-2015), Kepala Kantor Wilayah Balikpapan (2010-2011), dan sebagai Pimpinan di beberapa Kantor Cabang Utama BCA (Veteran, Darmo, dan Indrapura) pada tahun 1997-2010. Beliau juga dipercaya sebagai Kepala Tim Perwakilan BCA pada proses akuisisi Bank Royal Indonesia dan Rabobank International Indonesia (2019-2020).

Rangkap Jabatan

Saat ini beliau tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali.



Rickyadi Widjaja

Komisaris

Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
Usia	60 tahun
Domisili	Jakarta

Riwayat Pendidikan

Beliau meraih gelar Bachelor of Commerce dari Deakin University Melbourne Australia (1989) dan telah mengikuti berbagai program pelatihan baik di dalam maupun luar negeri, antara lain pelatihan di bidang Kepemimpinan, Perbankan Umum, Perbankan Syariah, Risk Management dan Corporate Finance.

Dasar Hukum Penunjukan

Rickyadi Widjaja diangkat sebagai Komisaris BCAS pada RUPST 22 Februari 2023 untuk periode jabatan sampai dengan RUPST 2025 dan mendapat persetujuan OJK pada tanggal 13 Januari 2023.

Pengalaman Kerja

Sebelum menjabat sebagai Komisaris, beliau menjabat sebagai Direktur BCAS (2018-2023). Sebelum bergabung dengan BCAS, beliau membangun karier di BCA (1989-Februari 2018) dengan menempati berbagai posisi manajerial yaitu Kepala Grup Analisa Risiko Kredit, Kepala Sub Divisi Kredit Komersial dan Ritel dan Wakil Kepala Divisi Kredit Komersial.

Rangkap Jabatan

Saat ini, beliau tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali.



Inge Setiawati

Komisaris Independen

Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
Usia	56 tahun
Domisili	Jakarta

Riwayat Pendidikan

Beliau meraih gelar Magister Manajemen dari Universitas Indonesia (2000) dan Insinyur Teknik Arsitektur dari Institut Teknologi Bandung (1990). Berbagai *executive training* telah diikuti di antaranya: Digital Awareness for Executives (2018), Sertifikasi Manajemen Risiko (2015): Asean Global Leadership Development Program, Cheung Kong Graduate School of Business, Beijing (2013), Operational Risk Management, Euromoney, Hongkong (2002), Executive Development Program, Australian Institute, Perth (2001) dan pelatihan-pelatihan lain di bidang kepemimpinan, perbankan umum dan syariah, kredit/pembiayaan serta risk management.

Dasar Hukum Penunjukan

Inge Setiawati diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPST tanggal 22 Februari 2023 untuk periode jabatan sampai dengan RUPST tahun 2025 dan telah mendapatkan persetujuan OJK pada tanggal 7 Februari 2023.

Pengalaman Kerja

Sebelum bergabung sebagai Komisaris Independen BCAS, beliau menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja Corporate Social Responsibility BCA (2016-2022). Sebelumnya beliau menjabat sebagai Corporate Secretary BCA (2011-2016) dan menduduki posisi sebagai Pemimpin Cabang di beberapa Kantor Cabang Utama BCA.

Rangkap Jabatan

Saat ini, beliau tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali.

Profil Direksi



Yuli Melati Suryaningrum

Presiden Direktur

Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
Usia	48 tahun
Domisili	Jakarta

Riwayat Pendidikan

Beliau meraih gelar Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Prasetiya Mulya (2004) dan Sarjana Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (1996). Beliau juga telah mengikuti berbagai *executive training* baik di dalam maupun luar negeri seperti training *Sustainable Finance* Renewable Energy Technology – Jerman; Agile Leadership & Strategic Vision – Jakarta; Change Management – Jakarta, serta pelatihan-pelatihan lain di bidang kepemimpinan, manajemen, pembiayaan, keuangan berkelanjutan, perbankan umum dan syariah, serta manajemen risiko.

Dasar Hukum Penunjukan

Yuli Melati Suryaningrum diangkat sebagai Presiden Direktur BCAS pada RUPSLB tanggal 19 Mei 2021 dan telah mendapat persetujuan OJK pada tanggal 6 Mei 2021. Pengangkatan terakhir pada RUPST tanggal 11 Maret 2022 untuk periode jabatan sampai dengan RUPST tahun 2025.

Pengalaman Kerja

Sebelum bergabung di BCAS, beliau membangun karier di PT BCA Tbk (1996-2021) dan menempati berbagai posisi strategis di antaranya sebagai Kepala Group Corporate Banking & Finance (2018-2021).

Rangkap Jabatan

Saat ini beliau tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali.



Houda Muljanti

Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
Usia	56 tahun
Domisili	Jakarta

Riwayat Pendidikan

Beliau memperoleh gelar Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Prasetiya Mulya (2005) dan Sarjana Hukum Ekonomi dari Universitas Indonesia (1990). Beliau juga telah mengikuti berbagai program pelatihan baik di dalam maupun luar negeri di antaranya GALLUP Accelerated Strengths Coaching Course, Financial Inclusion Summit Asia 2017 dan pelatihan-pelatihan lain di bidang Sumber Daya Manusia, Risk Management, serta Perbankan Syariah yang di antaranya diselenggarakan oleh PT BCA Tbk, Karim Consulting Indonesia, dan Gapura Prima Sejati.

Dasar Hukum Penunjukan

Houda Muljanti diangkat sebagai Direktur BCAS pada RUPST tanggal 15 Maret 2016 dan mendapat persetujuan OJK pada tanggal 24 September 2016. Pengangkatan terakhir pada RUPST tanggal 11 Maret 2022 untuk periode jabatan sampai dengan RUPST tahun 2025.

Pengalaman Kerja

Sebelum bergabung dengan BCAS, beliau membangun karier di BCA dan memangku jabatan manajerial sebagai Kepala Sub Divisi Human Capital Strategy and Solution (2012-2016), Kepala Sub Divisi Manajemen SDM (2006-2012), dan Kepala Biro Pengembangan Kebijakan SDM (2001-2006). Beliau pernah menjabat sebagai Komisaris di PT Sentul Damai Resort (2012-2016), serta di PT SQ Centre Indonesia (1993-2001) dan Japan International Cooperation Agency (1991-1993).

Rangkap Jabatan

Saat ini beliau tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali.



Ina Widjaja

Direktur

Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
Usia	57 tahun
Domisili	Jakarta

Riwayat Pendidikan

Beliau meraih gelar Magister Manajemen dari Universitas Prasetiya Mulya (2007) dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti (1989). Beliau telah mengikuti berbagai *executive training* seperti What is Wrong with Data – Jakarta, Digital Factory – Jakarta; Social Engineering Awareness – Jakarta; serta pelatihan-pelatihan lain di bidang kepemimpinan, perbankan umum dan syariah, kredit/pembiayaan, serta manajemen risiko.

Dasar Hukum Penunjukan

Ina Widjaja diangkat sebagai Direktur BCAS pada RUPST tanggal 22 Februari 2023 untuk periode jabatan sampai dengan RUPST tahun 2025 dan telah mendapat persetujuan OJK pada tanggal 7 Februari 2023.

Pengalaman Kerja

Sebelum menjabat sebagai Direktur, beliau menjabat sebagai Komisaris BCAS (2022-2023). Sebelum bergabung di BCAS, beliau menjabat sebagai Advisor di BCA Digital (Oktober 2021 - Februari 2022) dan berkarier di PT BCA Tbk (1990-2021) dengan menempati berbagai posisi strategis di antaranya sebagai Kepala Grup Analisa Risiko Kredit Komersial dan SME (2018-2021) dan Kepala KCU Asemka (2016-2018).

Rangkap Jabatan

Saat ini beliau tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali.



Pranata

Direktur

Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
Usia	47 tahun
Domisili	Bekasi

Riwayat Pendidikan

Beliau menyelesaikan pendidikannya di bidang Teknik Informatika dari Universitas Persada Indonesia Jakarta (2002) dan Institut Teknologi Bandung (1998). Beliau juga telah mengikuti berbagai program pelatihan antara lain di bidang Perbankan Umum, Perbankan Syariah, Risk Management, Corporate Finance serta pelatihan-pelatihan lain di bidang kepemimpinan.

Dasar Hukum Penunjukan

Pranata diangkat sebagai Direktur BCAS pada RUPST tanggal 6 Maret 2019 dan mendapat persetujuan OJK pada tanggal 24 September 2019. Pengangkatan terakhir pada RUPST tanggal 11 Maret 2022 untuk periode jabatan sampai dengan RUPST tahun 2025.

Pengalaman Kerja

Sebelum menjabat sebagai Direktur, beliau menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja Keuangan dan Perencanaan Perusahaan BCAS dari tahun 2010-2019. Beliau juga pernah meniti karier di Bank Danamon (2002-2010) dengan menduduki berbagai jabatan manajerial antara lain sebagai SAVP Financial and Control Team Leader, Unit Usaha Syariah Bank Danamon (2009-2010), Business Planning Head, SEMM DSP Bank Danamon (2006-2009) dan Portfolio Management Head, CMM DSP Bank Danamon (2004-2006).

Rangkap Jabatan

Saat ini beliau tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali.



Lukman Hadiwijaya

Direktur

Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
Usia	55 tahun
Domisili	Jakarta

Riwayat Pendidikan

Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Kristen Satya Wacana (1992). Beliau telah mengikuti berbagai *executive training*, baik di dalam maupun luar negeri seperti Digital Currency – Jakarta; Digital Factory – Jakarta; Social Engineering Awareness – Jakarta; Mobile World Congress – Spanyol; serta pelatihan-pelatihan lain di bidang kepemimpinan, perbankan umum dan syariah, serta manajemen risiko.

Dasar Hukum Penunjukan

Lukman Hadiwijaya diangkat sebagai Direktur BCAS pada RUPST tanggal 11 Maret 2022 untuk periode jabatan sampai dengan RUPST tahun 2025 dan telah mendapat persetujuan OJK pada tanggal 8 Maret 2022.

Pengalaman Kerja

Sebelum bergabung di BCAS, beliau berkarier di PT BCA Tbk (1992-2022) dan menempati berbagai posisi strategis diantaranya sebagai Kepala Grup Application Management (2020-2022) dan Kepala Satuan Kerja Enterprise Security (2014-2020).

Rangkap Jabatan

Saat ini beliau tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali.

Perubahan Komposisi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris maupun Direksi selama periode pelaporan per akhir 2023. Namun tidak terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan.

Per Akhir 2022		Per Akhir 2023	
Dewan Komisaris			
Presiden Komisaris Independen	: Tantri Indrawati	Presiden Komisaris Independen	: Ratna Yanti
Komisaris Independen	: Ratna Yanti	Komisaris Independen	: Inge Setiawati
Komisaris	: Ina Widjaja	Komisaris	: Rickyadi Widjaja
Direksi			
Presiden Direktur	: Yuli Melati Suryaningrum	Presiden Direktur	: Yuli Melati Suryaningrum
Direktur	: Rickyadi Widjaja	Direktur	: Ina Widjaja
Direktur	: Pranata	Direktur	: Pranata
Direktur	: Lukman Hadiwijaya	Direktur	: Lukman Hadiwijaya
Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	: Houda Muljanti	Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	: Houda Muljanti

Profil Dewan Pengawas Syariah



Fathurrahman Djamil

Ketua Dewan Pengawas Syariah

Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
Usia	63 tahun
Domisili	Tangerang Selatan

Riwayat Pendidikan

Beliau meraih gelar Sarjana dan Master di bidang Ilmu Syariah dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Melanjutkan Program Doktor (Ph.D) dalam bidang Islamic Studies di McGill University, Canada (1992). Meraih gelar Doktor di bidang Teori Hukum Islam dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (1994). Beliau aktif mengikuti berbagai pelatihan/*workshop* dan forum baik yang diadakan oleh BCAS, DSN MUI, maupun International Shariah Research Academy for Islamic Finance.

Dasar Hukum Penunjukan

Fathurrahman Djamil diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) BCAS berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bank UIB tanggal 29 Juli 2009 dan mendapatkan persetujuan Bank Indonesia pada tanggal 2 Maret 2010. Pengangkatan terakhir pada RUPST tanggal 11 Maret 2022 untuk periode jabatan sampai dengan RUPST tahun 2025.

Pengalaman Kerja

Beliau berpengalaman di bidang ilmu Syariah sebagai praktisi maupun akademisi. Menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk periode tahun 2000-sekarang, dosen di beberapa universitas negeri maupun swasta, serta menjadi Dewan Pengawas Syariah pada beberapa lembaga/institusi keuangan.

Rangkap Jabatan

Selain menjadi Ketua DPS di BCAS, beliau juga menjabat sebagai Ketua DPS pada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (perusahaan pembiayaan), Ketua DPS pada PT AIA Financial (asuransi), Ketua DPS pada PT Sun Life Financial Indonesia (asuransi) dan Anggota DPS pada PT Bank CIMB Niaga Tbk (perbankan).

Hubungan Afiliasi

Saat ini beliau tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali.



Sutedjo Prihatono

Ketua Dewan Pengawas Syariah

Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
Usia	54 tahun
Domisili	Tangerang Selatan

Riwayat Pendidikan

Beliau meraih gelar Magister Manajemen dari Binus Business School pada Fakultas Manajemen (2014) dan gelar Sarjana dari Universitas Krisnadwipayana pada Fakultas Ekonomi Manajemen (1993). Beliau juga telah mengikuti berbagai program pelatihan, antara lain di bidang Selling Skill, Service Excellence, Accounting Programme, Financing Analysis, dan General Islamic Banking Programme.

Dasar Hukum Penunjukan

Sutedjo Prihatono diangkat sebagai anggota DPS BCAS pada RUPST tanggal 4 Maret 2015 dan mendapat persetujuan OJK pada tanggal 18 Mei 2015. Pengangkatan terakhir pada RUPST tanggal 11 Maret 2022 untuk periode jabatan sampai dengan RUPST tahun 2025.

Pengalaman Kerja

Sebelum menjadi anggota DPS, beliau menjabat sebagai anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko BCAS sejak tahun 2010. Beliau juga pernah membangun karier di Karim Consulting Indonesia sebagai Non-Consulting Director (2004-2015), Senior Corporate Banking (2001-2004) dan Human Resources Head (1996-2001) di Bank Muamalat Indonesia. Beliau berpengalaman sebagai pengajar dan penanggung jawab berbagai program pelatihan di bidang perbankan syariah.

Rangkap Jabatan

Selain menjadi anggota DPS di BCAS, beliau juga menjabat sebagai Anggota DPS pada BPRS HIK Ciledug (perbankan).

Hubungan Afiliasi

Saat ini beliau tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali.

Profil Pejabat Eksekutif

No	Nama	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1	Adetyas Wendiana	Kepala Satuan Kerja Analisa Risiko Pembiayaan	S2 Ekonomi, Universitas Indonesia
2	Jap Wirianto Setiawan	Kepala Satuan Kerja Keuangan dan Perencanaan Perusahaan	S1 Akuntansi, Universitas Tarumanegara Pendidikan Manajemen Indonesia
3	Dwidadi Sugito	Kepala Satuan Kerja Bisnis Ritel dan Konsumer	S2 Manajemen, Universitas Prasetiya Mulya
4	Edy Hartono	Kepala Departemen Manajemen Risiko	S1 Teknik Sipil, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
5	Fatmah	Kepala Divisi Operasi	S1 Ekonomi, Universitas Jayabaya
6	Indarahardjo	Kepala Satuan Kerja Audit Internal	S1 Ekonomi, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto
7	Maman Hermansyah	Kepala Departemen Kepatuhan	S1 Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran
8	Retno Wulandari	Kepala Satuan Kerja Hukum dan SDM	S1 Ekonomi dan Sumber Daya, Institut Pertanian Bogor
9	Theresia Andita Lim	Kepala Satuan Kerja Teknologi Informasi dan Logistik	S1 Teknik Sipil, Universitas Tarumanegara
10	Yanto	Kepala Satuan Kerja Bisnis dan Komunikasi	S1 Ekonomi, Universitas Persada Indonesia YAI Jakarta
11	Merling Thiosanto	Kepala KC Jatinegara	D3, Akademi Secretary Saint Mary
12	Whira Rahman	Kepala KC Mangga Dua	S1 Ekonomi, Universitas Padjadjaran
13	The Ardian Prabowo	Kepala KC Samanhudi	S1 Ekonomi, Universitas Tarumanegara
14	Ismeijati	Kepala KC Sunter	S1 Hukum Perdata Umum, Universitas Sebelas Maret
15	Chandra Winata	Kepala KC Surabaya	S1 Akuntansi, UPN Surabaya
16	Maria Henni Wati Damanik	Kepala KC Semarang	S1 Hukum Perdata, Universitas Pekalongan
17	Lily Yulianti	Kepala KC Bandung	S1 Ekonomi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun
18	Sabar Purnomo	Kepala KC Solo	S2 Manajemen, Universitas Sebelas Maret
19	Dian Sukmawati	Kepala KC Yogyakarta	S1 Ekonomi dan Pembangunan, Universitas Diponegoro 74
20	Albert Angkasa	Kepala KC Medan	S1 Teknik Fisika, Institut Teknologi Bandung
21	Abadi Nugroho Yanuarkus	Kepala KC Palembang	S1 Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya
22	Heri Hermawan	Kepala KC Banda Aceh	S1 Manajemen, Universitas Amir Hamzah Medan
23	Herlina Widjaja	Kepala KC Panakkukang	S2 Manajemen, Universitas Hasanuddin

Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Jumlah Karyawan

Per 31 Desember 2023, BCAS memiliki karyawan (tetap dan kontrak) sebanyak 771 orang. Jumlah karyawan berdasarkan tingkat organisasi, tingkat pendidikan, status kepegawaian, masa kerja, kelompok usia dan kelompok gender adalah sebagai berikut:

Jumlah Karyawan Berdasarkan Tingkat Organisasi

Tingkat Organisasi	2023		2022		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pejabat Eksekutif	23	3,0%	23	3,5%	23	3,7%
Manajer	24	3,1%	23	3,5%	19	3,1%
Staf	724	93,9%	616	93,0%	180	29,3%
Lain-lain*	-	-	-	-	393	63,9%
Jumlah	**771**	**100,0%**	**662**	**100,0%**	**615**	**100,0%**

*) Sejak tahun 2022 terdapat perubahan klasifikasi jabatan dimana Lain-lain hanya untuk tenaga kerja alih daya

Jumlah Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	2023		2022		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pasca Sarjana	40	5,2%	39	5,9%	28	4,6%
Sarjana	585	75,9%	463	69,9%	421	68,5%
Diploma	72	9,3%	74	11,2%	76	12,4%
Non Akademi	74	9,6%	86	13,0%	90	14,6%
Jumlah	**771**	**100,0%**	**662**	**100,0%**	**615**	**100,0%**

Jumlah Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian

Status Kepegawaian	2023		2022		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tetap	618	80,2%	519	78,4%	496	80,7%
Kontrak	153	19,8%	143	21,6%	119	19,3%
Jumlah	**771**	**100,0%**	**662**	**100,0%**	**615**	**100,0%**

Jumlah Karyawan Berdasarkan Masa Kerja

Masa Kerja	2023		2022		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
<2th	322	41,8%	238	36,0%	159	25,9%
2-5th	141	18,3%	131	19,8%	188	30,6%
5-8th	107	13,9%	119	18,0%	124	20,2%
>8th	201	26,1%	174	26,3%	144	23,4%
Jumlah	**771**	**100%**	**662**	**100,0%**	**615**	**100,0%**

Jumlah Karyawan Berdasarkan Kelompok Usia

Kelompok Usia	2023		2022		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
<25th	88	11,4%	46	6,9%	36	5,9
25-<35th	398	51,6%	344	52,0%	327	53,2
35-<45th	179	23,2%	165	24,9%	146	23,7
45-<55th	57	7,4%	59	8,9%	62	10,1
>55th	49	6,4%	48	7,3%	44	7,2
Jumlah	**771**	**100,0%**	**622**	**100,0%**	**615**	**100,0%**

Jumlah Karyawan Berdasarkan *Gender*

Gender	2023		2022		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Laki-Laki	373	48,4%	317	47,9%	290	49,9
Perempuan	398	51,6%	345	52,1%	291	50,1
Jumlah	**771**	**100,0%**	**662**	**100,0%**	**581**	**100,0%**

Pengembangan Kompetensi

Kebijakan

Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset utama BCAS dan sangat penting untuk keberlangsungan usaha kami dalam jangka panjang. Kami senantiasa mendorong pengembangan kemampuan setiap karyawan (*people development*) antara lain dengan menyelenggarakan berbagai pelatihan pengembangan kompetensi sesuai dengan fungsi dan kapasitas karyawan. BCAS melakukan pelatihan dan pengembangan SDM dengan mengacu kepada kerangka pelatihan dan pengembangan yang mencakup seluruh aspek dan metode pengembangan dan mengedepankan adanya kesetaraan dan peluang yang sama bagi seluruh karyawan kami. Kerangka pelatihan dan pengembangan karyawan disusun dan dikaji sesuai kebutuhan dan strategi perusahaan dari waktu ke waktu.

Realisasi Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Karyawan

Setiap karyawan dapat mengikuti lebih dari satu kali pelatihan sehingga data berikut ini tersaji dalam banyaknya kepesertaan karyawan dalam pelatihan. Sepanjang 2023, BCAS telah melaksanakan 440 kali pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan baik melalui metode *e-learning*, pelatihan daring maupun tatap muka.

Jumlah Pelatihan Berdasarkan Tingkat Organisasi

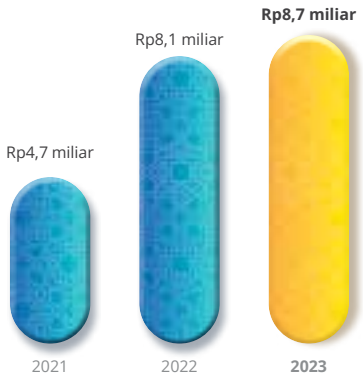
Jabatan	2023		2022		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pejabat Eksekutif	494	4%	445	8%	133	3,9%
Manajer	3.540	30,5%	2.389	42,8%	1.319	38,7%
Staf	7.548	65,1%	2.730	48,9%	1.949	57,3%
Lain-lain	10	0,1%	15	0,3%	3	0,1%
Jumlah	**11.592**	**100**	**5.579**	**100%**	**3.404**	**100%**

Catatan: Tidak termasuk Pengurus dan Komite di Bawah Dewan Komisaris

Informasi mengenai Pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan dan Satuan Kerja Audit Internal dapat dilihat pada Laporan Tahunan ini bagian Tata Kelola Perusahaan.

Biaya Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

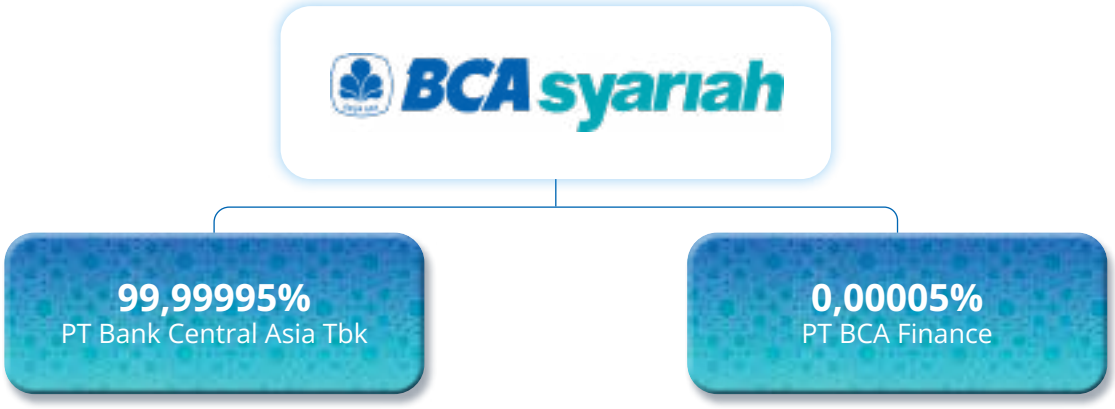
Total biaya yang telah dikeluarkan BCAS untuk pelatihan dan pengembangan kompetensi karyawan di sepanjang tahun 2023 mencapai Rp8,7 miliar atau meningkat sebesar 7,4% dibandingkan tahun 2022. Peningkatan biaya tersebut di antaranya disebabkan oleh program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang meningkat signifikan terkait manajemen perbankan, manajemen risiko, perkreditan/tresuri dan keuangan berkelanjutan dan penggunaan jasa tenaga konsultan untuk melakukan pendampingan dan *transfer knowledge* kepada karyawan kami.



Komposisi Pemegang Saham BCAS

Nama Perusahaan	Jumlah Kepemilikan Saham	Persentase
PT Bank Central Asia Tbk	2.255.182.137	99,99995%
PT BCA Finance	1.070	0,00005%

Catatan: Pemegang Saham BCAS seluruhnya merupakan institusi lokal.



Rincian 20 Pemegang Saham Terbesar

Per 31 Desember 2023, PT Bank Central Asia Tbk merupakan pemegang saham terbesar BCAS.

Rincian Pemegang Saham dengan Kepemilikan Saham Lebih dari 5%

Per 31 Desember 2023, tidak terdapat pemegang saham dengan kepemilikan saham lebih dari 5%, kecuali BCA yang merupakan pemegang saham pengendali BCAS.

Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%

Per 31 Desember 2023, tidak terdapat pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing <5%.

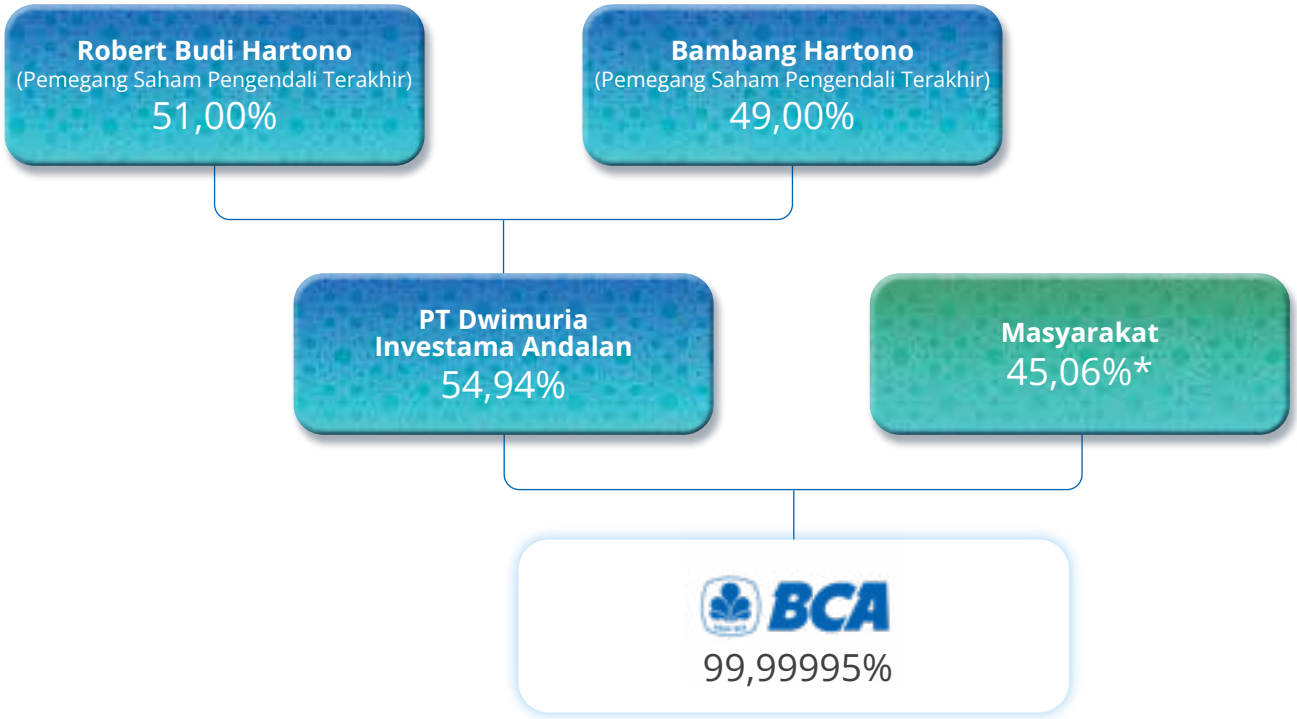
Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi

Per 31 Desember 2023, tidak terdapat kepemilikan saham oleh Dewan Komisaris dan Direksi BCAS.

Komposisi Kepemilikan Saham Domestik dan Asing

Kelompok	Komposisi
Individu	
Lokal	0,0%
Asing	0,0%
Institusi	
Lokal	100,0%
Asing	0,0%

Pemegang Saham Pengendali



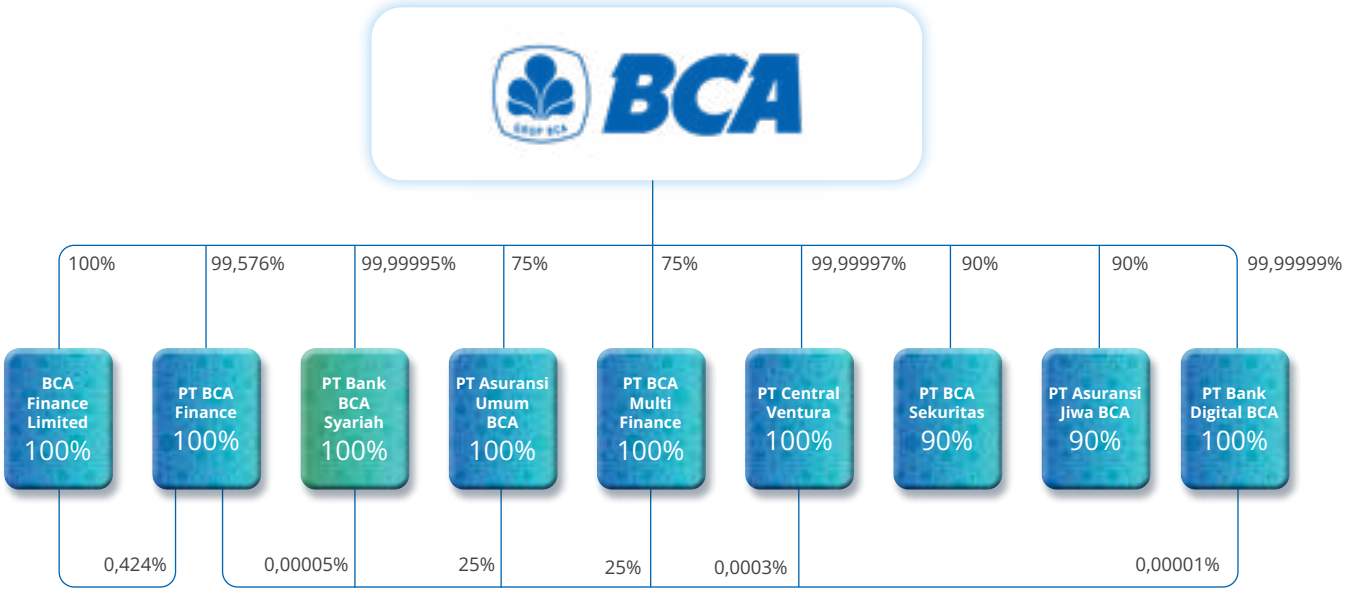
Keterangan:

Pengendali

Jalur Pengendalian

* Pada komposisi saham yang dimiliki masyarakat per 31 Desember 2023, sebesar 2,49% dimiliki oleh pihak yang terafiliasi dengan PT Dwimuria Investama Andalan. Komisaris (tidak termasuk Komisaris Independen) dan Direksi memiliki 0,15% saham BCA.

Struktur Grup Perusahaan



Entitas Anak dan Asosiasi

Per 31 Desember 2023, BCAS tidak mempunyai entitas anak dan/atau entitas asosiasi sehingga tidak ada pengungkapan informasi mengenai: (1) nama entitas anak dan/atau asosiasi; (2) persentase kepemilikan saham; (3) bidang usaha entitas anak dan/atau asosiasi; dan (4) status operasi entitas anak dan/atau asosiasi.

Lembaga dan Profesi Penunjang Perusahaan

Jenis Lembaga	Nama	Periode	Jasa
Kantor Akuntan Publik	KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan	2023	Kaji ulang kinerja Satuan Kerja Audit Intern PT Bank BCA Syariah (kewajiban regulator periodik 3 tahunan
Kantor Akuntan Publik	KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan	2023	Kaji ulang keandalan sistem SCV tahun 2023
Kantor Akuntan Publik	KAP Purwantono,Sungkoro & Surja	2023	Jasa audit Laporan Keuangan 31 Desember 2023
Konsultan aktuaria	Kantor Konsultan Aktuaria Steven M & Mourits	2023	Jasa konsultasi aktuaria

Jenis Lembaga	Nama	Periode	Jasa
Konsultan	Karim Consulting Indonesia	2023	Kajian pengembangan produk BCA Syariah
Konsultan	Trisakti Sustainability Center	2023	Jasa pendampingan implementasi keuangan berkelanjutan
Konsultan hukum	Sidabukke & Partners	2023	Jasa kuasa hukum
Konsultan hukum	Siregar Setiawan Manulu Partnership (SSMP)	2023	Jasa kuasa hukum
Konsultan hukum	Rumah Hukum	2023	Jasa kuasa hukum
Konsultan hukum	Sidabukke Clan & Associates	2023	Jasa kuasa hukum
Konsultan hukum	Abdul Hamid & Rekan	2023	Jasa kuasa hukum
Penilai Independen	PT Cita Negeri Amanah	2023	*Assessment Independent* GCG berdasarkan metode Adjusted ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)

Keanggotaan Asosiasi

Per 31 Desember 2023, BCAS masih aktif menjadi anggota di asosiasi sebagai berikut:

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI)

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI)

Perhimpunan Bank Umum Nasional (Perbanas)

Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo)

Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)

Forum Komunikasi Direktur Operasional Perbankan (FKDOP)

Ikatan Bankir Indonesia (IBI)

Indonesia Islamic Global Market Association (IIGMA)

Akses pada Informasi Perusahaan

BCAS senantiasa memegang komitmen dalam menerapkan prinsip keterbukaan, serta memberikan sarana bagi masyarakat luas untuk dapat memperoleh informasi lebih lanjut mengenai perusahaan melalui situs perusahaan https://www.bcasyariah.co.id. Di dalam situs perusahaan, BCAS menyediakan informasi mengenai solusi produk, layanan perbankan, informasi mengenai BCAS, dan informasi penting lainnya. Adapun informasi menu yang bisa didapatkan di situs. Selain dari informasi, situs BCAS menyediakan fitur Kontak di mana nasabah dapat menyampaikan saran, permintaan informasi, minat pengajuan pembiayaan, dan pengaduan melalui situs BCAS.

BCAS bersinergi dengan Halo BCA untuk mempermudah nasabah dalam mengakses informasi BCA Syariah, mekanisme pelaporan, dan/atau penyelesaian masalah. Nasabah dapat menghubungi Halo BCA melalui:



BCAS pun berupaya membangun interaksi yang solid dengan nasabah dan masyarakat melalui media sosial yang secara konsisten memberikan konten-konten kreatif, informatif, dan edukatif. Adapun akun media sosial resmi yang dimiliki BCAS, yaitu Instagram (@bca syariah.official), Facebook (BCA Syariah), dan YouTube (BCA Syariah Official).

Selain komunikasi terhadap eksternal, BCAS pun secara aktif membuka komunikasi internal yang lancar, intensif, dan efektif dalam menyebarkan informasi BCA Syariah. Hal ini akan mendorong percepatan proses dan mekanisme di semua lini sehingga berpengaruh terhadap pencapaian kinerja BCA Syariah secara keseluruhan. Beberapa media yang tersedia untuk berkomunikasi internal, di antaranya Portal MyBCA Syariah, email, Microsoft Teams, *Internal Event*, dan Instagram internal (@bcasberaniberubah).

Informasi Lainnya

Kronologi Pencatatan Saham

Sebagai Perusahaan Tertutup (*private company*), BCAS belum pernah melakukan aktivitas perdagangan saham apapun sejak pendiriannya, sehingga tidak ada informasi tentang kronologi pencatatan saham pada Bursa Efek.

Kronologi Pencatatan Efek Lainnya

Hingga 31 Desember 2023, BCAS belum pernah melakukan pencatatan atau penerbitan efek lainnya apa pun, sehingga tidak ada pengungkapan informasi tentang kronologi pencatatan efek lainnya.

Aksi Korporasi

Pada tahun 2023 BCAS tidak melakukan aksi korporasi, seperti Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, *buy back shares, buy back* obligasi, dan/atau pemecahan saham (*stock split*).

Analisis dan Pembahasan Manajemen





Tinjauan Ekonomi

Tinjauan Ekonomi Global

Berdasarkan data International Monetary Fund (IMF), perekonomian global masih mengalami perlambatan pada tahun 2023, di mana IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global hanya mencapai 3,1%, menurun dari angka 3,5% pada tahun 2022. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai hal di antaranya, *scaring effect* pascapandemi, peningkatan tekanan inflasi karena ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran, ketegangan geopolitik, dan beragam tantangan struktural yang dihadapi oleh negara-negara ekonomi utama di dunia.

Di 2023, terjadi peningkatan suku bunga acuan di berbagai negara sebagai dampak dari tren inflasi yang tinggi. Inflasi yang tinggi umumnya terjadi sejak paruh kedua tahun 2022 dan mulai mengalami penurunan pada kuartal kedua tahun 2023. Harga komoditas utama juga tercatat mengalami penurunan sepanjang tahun lalu. Secara keseluruhan, terjadi penurunan lebih dari 20% pada komoditas utama dibandingkan dengan harga-harga pada tahun 2022. Penurunan yang signifikan tercatat pada komoditas batubara (-63,78% YoY), gas alam (-43,82% YoY), dan kelapa sawit (-15,75% YoY). Penurunan harga komoditas sepanjang tahun 2023 ini dipicu oleh normalisasi rantai nilai barang dan jasa, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi di AS dan Tiongkok.

Ketegangan geopolitik antara beberapa negara seperti konflik berkelanjutan antara Ukraina dan Rusia, serta konflik baru di Timur Tengah antara Israel dan Hamas masih terus berlanjut. Selain itu, volatilitas dalam hubungan antara AS dan China juga memberikan warna pada kondisi geopolitik di tahun 2023 yang diperkirakan akan terus berlanjut hingga tahun depan.

Di sisi lain, meningkatnya perhatian terhadap isu lingkungan hidup juga menandai kondisi global pada tahun 2023, sejalan dengan terjadinya fenomena El-Nino sejak bulan April 2023. Hal-hal tersebut turut mewarnai dinamika dalam perekonomian global sepanjang 2023.

Tinjauan Ekonomi Nasional

Ekonomi Indonesia tercatat berada pada posisi yang lebih baik dibandingkan dengan negara-negara sejenis. Hingga Triwulan III-2023, pertumbuhan ekonomi nasional menurut Badan Pusat Statistik (BPS) diproyeksikan mencapai 4,94%, sementara Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2023 sebesar 5,05%, angka yang lebih baik jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di negara-negara lain. Pertumbuhan ekonomi domestik terjadi karena didorong oleh konsumsi rumah tangga dan investasi. Pengeluaran pemerintah juga berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara ekspor netto tetap memberikan kontribusi positif meskipun mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan dengan kontribusinya pada tahun 2022.

Dari segi produksi, Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) Indonesia diperkuat oleh sektor-sektor primer dan sekunder, khususnya sektor pertambangan, industri pengolahan, dan konstruksi. Dari segi harga, inflasi nasional mengalami tren normalisasi di mana perlambatan terjadi lebih cepat dari proyeksi. Inflasi pada tahun 2023 berakhir di angka 2,6%, dengan tingkat inflasi inti yang rendah mencapai 1,8%. Risiko inflasi terutama terkonsentrasi pada segmen pangan, yang mencapai 6,1% tahun sebelumnya akibat dampak El-Nino dan kebijakan proteksi dari negara-negara eksportir komoditas, seperti larangan ekspor beras yang diterapkan oleh India.

Meskipun tingkat inflasi rendah, suku bunga acuan BI tetap tinggi, yaitu sebesar 5,75% hingga September 2023 dan meningkat menjadi 6% mulai bulan Oktober 2023. Fokus utama kebijakan BI saat ini adalah menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah ketidakpastian global. Untuk memberikan gambaran, aliran dana asing mencatatkan keluar sebesar US$4,5 miliar dari pasar obligasi dan saham selama periode Agustus-Oktober 2023, menyebabkan depresiasi nilai tukar Rupiah hingga mencapai posisi terlemahnya di Rp15.940 pada Oktober 2023. Meskipun demikian, nilai tukar Rupiah secara bertahap menguat dan mencapai Rp15.397 pada akhir tahun 2023 seiring dengan *outlook* kebijakan moneter yang lebih dovish dari The Fed.

Tinjauan Industri Perbankan

Dalam sektor industri perbankan, pertumbuhan kredit dari bulan Juli hingga Oktober 2023 menunjukkan pertumbuhan yang cukup konsisten, mencapai 10,9% YoY. Meskipun pertumbuhan kredit terjaga, posisi likuiditas, sebagaimana tercermin dari rasio pinjaman terhadap deposit (*loan-to-deposit ratio*), mengalami peningkatan menjadi 83,8% dari posisi awal tahun yang sebesar 79%. Peningkatan ini disebabkan oleh pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tumbuh lebih moderat, yaitu sebesar 3,7% YoY pada Oktober 2023 (dibandingkan dengan awal tahun 2023 yang mencapai 8% YoY). Dilihat dari jenis penggunaan, kredit investasi menjadi jenis kredit yang mencatat pertumbuhan paling tinggi sejak akhir 2022, mencapai 12,3% *Year-to-Date* (YTD) hingga Oktober 2023.

Sementara itu untuk perbankan syariah, OJK mencatat total aset perbankan syariah pada Oktober 2023 tumbuh 11,1% dari periode yang sama tahun lalu dengan pangsa pasar 7,6%. Hal tersebut mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah semakin kuat.

Tinjauan Operasi per Segmen Usaha

Seiring dengan perkembangan positif yang terjadi dalam industri perbankan syariah, BCAS mencatat pertumbuhan yang solid di 2023. BCAS menyalurkan pembiayaan dengan berbagai jenis akad yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, dengan total Rp9.013,6 miliar. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp1.427,6 miliar apabila dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp7.585,9 miliar.

Dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain

Uraian	2023		2022		Pertumbuhan	
	Nominal	Komposisi*	Nominal	Komposisi*	Nominal	%
Pembiayaan *murabahah* (jual beli)	1.654,6	18,4%	1.346,8**	17,8%	307,8	22,9%
Pembiayaan IMBT (sewa beli)	596,5	6,6%	402,8**	5,3%	193,7	48,1%
Perbiayaan *mudharabah* (bagi hasil)	760,3	8,4%	508,1	6,7%	252,2	49,6%
Pembiayaan *musyarakah*	5.988,6	66,4%	5.297,4	69,9%	691,3	13,0%
Pembiayaan *qardh*	13,5	0,1%	30,8	0,4%	(17,4)	(56,3%)
Jumlah pembiayaan	**9.013,6**	**100,0%**	**7.585,9****	**100,0%**	**1.427,6**	**18,8%**

*) Persentase terhadap jumlah pembiayaan
**) *Restatement* karena adanya perubahan perlakuan akuntansi pada pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan IMBT di tahun 2023

Upaya kami untuk memberikan solusi pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah dan untuk mengurangi risiko konsentrasi akad pembiayaan tercermin dalam diversifikasi akad pembiayaan yang kami salurkan. Portofolio akad BCAS per Desember 2023 mencakup pembiayaan dengan berbagai jenis akad, termasuk pembiayaan *murabahah* (jual beli), pembiayaan *ijarah muntahiya bittamlik* (sewa beli), pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil), pembiayaan *musyarakah*, dan pembiayaan *qardh*. Secara khusus, pembiayaan BCAS di 2023 didominasi oleh akad *musyarakah* dengan kontribusi 66,4% dari total pembiayaan dan disusul akad *murabahah* dengan kontribusi 18,4%.

Tinjauan Kinerja Keuangan

Tinjauan Kinerja Keuangan yang dipaparkan mengacu kepada Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 yang disajikan dalam Laporan Tahunan ini. Laporan Keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dan mendapatkan opini wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bank tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

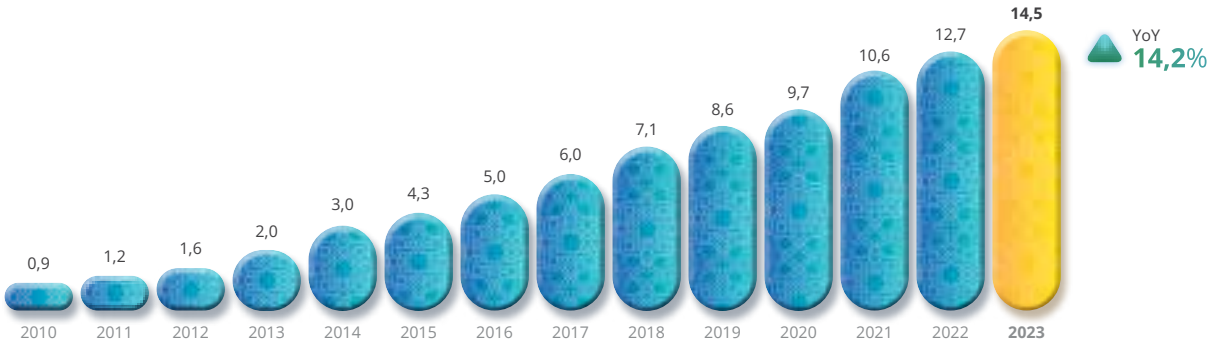
Laporan Posisi Keuangan

Aset

Hingga akhir tahun 2023, aset yang dimiliki oleh BCAS menunjukkan pertumbuhan yang positif dan stabil. Posisi aset per akhir Desember 2023 tercatat sebesar Rp14.471,7 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 14,2% apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp12.669,9 miliar. Sejak awal beroperasi pada tahun 2010, BCAS terus mengalami peningkatan dalam total aset yang dimilikinya. Rata-rata pertumbuhan tahunan aset kami yang dihitung dari tahun 2010 hingga 2023 (CAGR) adalah 24,1%.

Total Aset

Dalam triliun Rupiah



Pertumbuhan aset BCAS terutama berasal dari Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpun, yang selanjutnya kami alokasikan dalam bentuk aset produktif seperti pembiayaan dan surat berharga.

Dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain

Uraian	2023		2022		Pertumbuhan	
	Nominal	Komposisi*	Nominal	Komposisi*	Nominal	%
Aset produktif	**14.434,8**	**99,7%**	**12.679,1*** **	**100,1%**	**1.755,7**	**13,8%**
Penempatan pada bank lain	-	-	-	-	-	-
Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia	1.056,6	7,3%	935,4	7,4%	121,1	12,9%
Surat berharga	4.288,9	29,6%	4.110,9	32,4%	178,1	4,3%
Pembiayaan	9.013,6	62,3%	7.585,9***	59,9%	1.427,6	18,8%
Aset non produktif	**584,7**	**4,0%**	**536,3**	**4,2%**	**48,4**	**9,0%**
Kas	42,8	0,3%	69,2	0,5%	(26,4)	(38,2%)
Penempatan pada bank lain	28,8	0,2%	14,4	0,1%	14,4	99,8%
Giro pada Bank Indonesia**	37,4	0,3%	10,6	0,1%	26,8	253,3%
Aset tetap	198,0	1,4%	156,7	1,2%	41,3	26,3%
Aset pajak tangguhan	58,5	0,4%	35,6	0,3%	23,0	64,6%
Aset lain	219,2	1,5%	249,9	2,0%	(30,6)	(12,3%)
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset keuangan	**(472,0)**	**(3,3%)**	**(498,7)**	**(3,9%)**	**26,7**	**5,3%**
Total aset	**14.471,7**	**100,0%**	**12.669,9**	**100,0%**	**1.801,9**	**14,2%**

*) Persentase terhadap total aset
**) Giro pada Bank Indonesia tahun 2022 dan 2023 merupakan nominal Giro pada BI untuk menunjang layanan BI Fast
***) *Restatement* karena adanya perubahan perlakuan akuntansi di tahun 2023

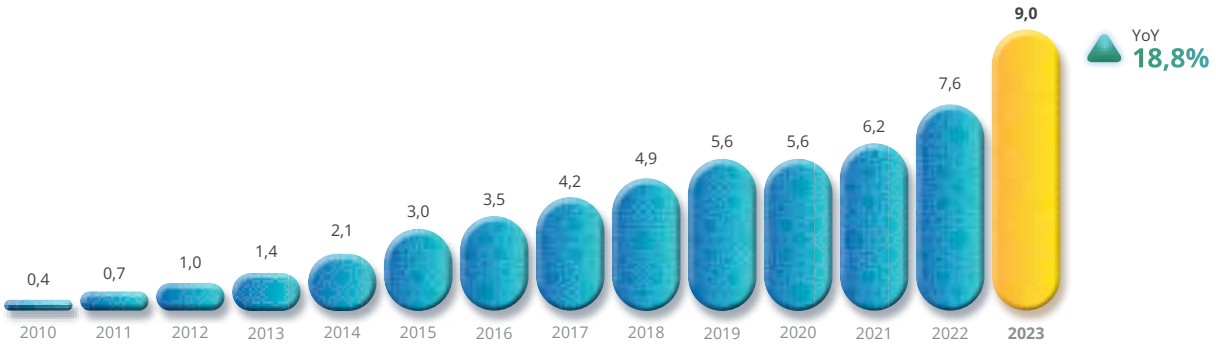
Per 31 Desember 2023, posisi aset produktif BCAS tercatat sebesar Rp14.434,8 miliar. Angka tersebut menunjukkan peningkatan sebesar Rp1.755,7 miliar atau setara dengan 13,8% apabila dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp12.679,1 miliar. Peningkatan ini terutama dikontribusi oleh pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan.

Pembiayaan yang Disalurkan

Portofolio pembiayaan merupakan komponen utama dalam total aset, memberi kontribusi sebesar 62,3%. Jumlah pembiayaan yang telah disalurkan pada tahun 2023 mencapai Rp9.013,6 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp1.427,6 miliar atau setara dengan 18,8% apabila dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp7.585,9 miliar. BCAS terus mencatatkan pertumbuhan pembiayaan setiap tahunnya, yang tercermin dalam rata-rata pertumbuhan tahunan (CAGR) sejak tahun 2010-2023, yang mencapai 26,3%.

Pembiayaan

Dalam triliun Rupiah



Penyaluran pembiayaan BCAS pada tahun 2023 didominasi oleh segmen komersial dengan proporsi pembiayaan sebesar 70,7% terhadap total pembiayaan. Kami menyalurkan pembiayaan untuk segmen komersial sebesar Rp6.373,7 miliar, meningkat Rp939,7 miliar atau 17,3% apabila dibandingkan dengan tahun 2022.

BCAS memberikan perhatian lebih pada segmen UMKM, mengingat sektor UMKM di Indonesia sangat luas mencapai 67 juta pelaku dan menjadi salah satu motor penggerak perekonomian negara. Menurut data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sektor UMKM memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61%, atau senilai dengan Rp9.580 triliun, bahkan kontribusi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja mencapai sebesar 97% dari total tenaga kerja (Data per Agustus 2023).

Pada tahun 2023, total pembiayaan UMKM yang kami salurkan mencapai Rp1.817,9 miliar, mengalami peningkatan Rp86,9 miliar atau 5,0% apabila dibandingkan pada tahun 2022 yang sebesar Rp1.731,0 miliar. Proporsi pembiayaan yang disalurkan kepada UMKM memberikan kontribusi mencapai 20,2% terhadap total pembiayaan .

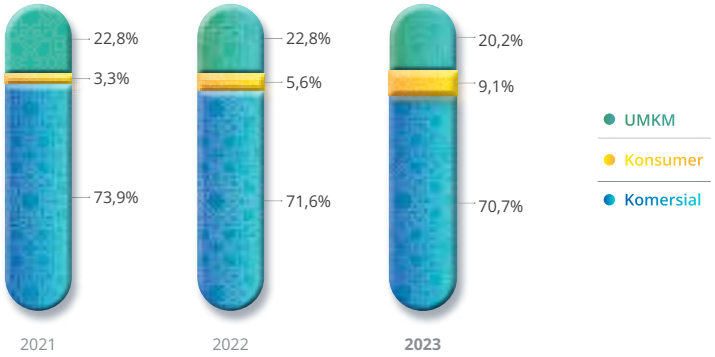
Dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain

Uraian	2023		2022		Pertumbuhan	
	Nominal	Komposisi*	Nominal	Komposisi*	Nominal	%
Komersial	6.373,7	70,7%	5.433,9	71,6%	939,7	17,3%
Konsumer	821,9	9,1%	420,8	5,6%	401,1	95,3%
UMKM:	1.817,9	20,2%	1.731,0	22,8%	86,9	5,0%
Menengah	1.164,7	12,9%	1.427,3	18,8%	(262,5)	(18,4%)
Kecil	401,1	4,5%	85,0	1,1%	316,2	372,1%
Mikro	252,1	2,8%	218,8	2,9%	33,2	15,2%
Total pembiayaan	**9.013,6**	**100,0%**	**7.585,9**	**100,0%**	**1.427,7**	**18,8%**

*) Persentase terhadap total pembiayaan

Segmentasi Pembiayaan

Dalam persentase



Pertumbuhan paling signifikan terjadi pada pembiayaan konsumer yang mencatat pertumbuhan tahunan sebesar 95,3% YoY atau mengalami peningkatan Rp401,1 miliar apabila dibandingkan pada tahun sebelumnya. Hal tersebut berkat ragam produk pembiayaan konsumer yang lengkap, fitur yang menarik, program promosi yang kontinyu serta aktivitas pemasaran yang semakin masif baik melalui jaringan cabang kami maupun melalui kolaborasi *event* bersama BCA seperti BCA Expoversary dan BCA Expo.

Apabila dilihat dari sektor usaha, penyaluran pembiayaan terbesar selama tahun 2023 ditunjukkan pada sektor perdagangan besar dan eceran dengan total pembiayaan sebesar Rp1.841,8 miliar menempati proporsi sebesar 20,4% terhadap total pembiayaan. Selanjutnya, diikuti oleh sektor industri pengolahan yang menempati penyaluran pembiayaan terbesar kedua dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp1.632,8 miliar dengan proporsi 18,1% terhadap total pembiayaan.

Seiring dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan (*Sustainable Finance*) di sektor jasa keuangan, kami memberikan perhatian khusus pada pembiayaan untuk kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KUB). Pada tahun 2023, total pembiayaan yang kami alokasikan untuk sektor KUB mencapai Rp2.712,0 miliar atau sebesar 30,1% dari total pembiayaan. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 4,7% YoY apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp2.589,5 miliar. Informasi terperinci mengenai pembiayaan KUB oleh BCAS dapat ditemukan dalam Laporan Keberlanjutan BCA Syariah tahun 2023.

Dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain

Pembiayaan berdasarkan kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KUB)		2023	2022	Pertumbuhan	
				Nominal	%
1	Energi terbarukan	-	-	-	-
2	Efisiensi energi	367,7	270,6	97,1	35,9%
3	Pencegahan dan pengendalian polusi	10,7	1,0	9,7	1.006,2%
4	Pengelolaan sumber daya hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan	195,5	217,4	(21,9)	(10,1%)
5	Konservasi keanekaragaman hayati darat dan air	-	-	-	-
6	Transportasi ramah lingkungan	2,3	-	2,3	-
7	Pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan	2,5	1,1	1,4	129,4%
8	Adaptasi perubahan iklim	-	-	-	-
9	Produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi (*Eco-efficient*)	315,4	368,4	(53,0)	(14,4%)
10	Bangunan berwawasan lingkungan yang memenuhi standar atau sertifikasi yang diakui secara nasional, regional, atau internasional	-	-	-	-
11	Kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang berwawasan lingkungan lainnya	-	-	-	-
12	Kegiatan UMKM	1.817,9	1.731,0	86,9	5,0%
Total pembiayaan KUB		**2.712,0**	**2.589,5**	**122,5**	**4,7%**
Persentase pembiayaan KUB terhadap total pembiayaan		**30,1%**	**34,1%**	**-**	**(4,0%)**
Total pembiayaan		**9.013,6**	**7.585,9**	**1.436,7**	**19,0%**

Tingkat Kolektibilitas Pembiayaan

BCAS memahami bahwa kualitas pembiayaan menjadi salah satu indikator penting yang menunjukkan bahwa risiko bank dikelola dengan baik. Untuk itu, kami selalu memperhatikan risiko dan menerapkan *prudential banking practice* dalam setiap proses penyaluran pembiayaan. BCAS mampu menjaga kualitas portofolio pembiayaan agar tetap sehat. Dari total pembiayaan yang disalurkan, sebesar Rp8.920,1 miliar atau 99,0% tergolong dalam kategori 'Lancar' dan 'Dalam Perhatian Khusus'. *Non-Performing Financing* (NPF) di 2023 berada di tingkat yang sehat, yaitu mencapai 1,04% secara *gross* dan 0,00% secara net.

Dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain

Uraian	2023		2022	
	Nominal	Komposisi*	Nominal	Komposisi*
Performing financing	**8.920,2**	**99,0%**	**7.478,2**	**98,6%**
Lancar	8.621,0	95,6%	7.036,4	92,8%
Dalam Perhatian Khusus	299,2	3,3%	441,8	5,8%

Uraian	2023		2022	
	Nominal	Komposisi*	Nominal	Komposisi*
Non-Performing Financing	**93,4**	**1,0%**	**107,6**	**1,4%**
Kurang Lancar	2,0	0,0%	1,7	0,0%
Diragukan	0,7	0,0%	0,2	0,0%
Macet	90,7	1,0%	105,7	1,4%
Total Pembiayaan	**9.013,6**	**100,0%**	**7.585,9**	**100,0%**
Rasio NPF - *Gross*		1,04%		1,42%
Rasio NPF - Net		0,00%		0,01%

*) Persentase terhadap total pembiayaan

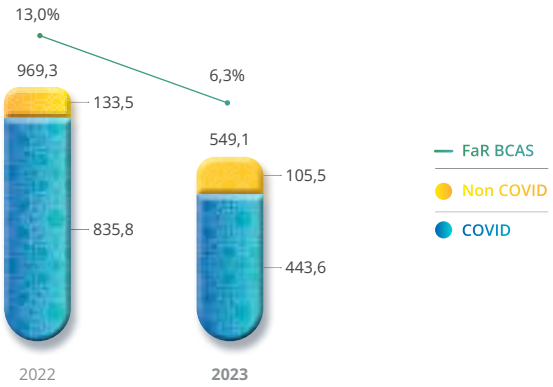
Kami menggunakan indikator rasio *Financing at Risk* (FaR) untuk memantau kualitas portofolio pembiayaan. Rasio FaR adalah hasil penjumlahan pembiayaan yang memiliki kolektibilitas '*Non-Performing Financing*', 'Dalam Perhatian Khusus' dan pembiayaan yang direstrukturisasi dengan kolektibilitas 'Lancar', dibandingkan dengan total portofolio pembiayaan. Dengan menggunakan rasio FaR, kami mendapatkan gambaran cakupan risiko kredit yang lebih luas.

Hingga akhir tahun 2023, BCAS mencatat FaR sebesar 6,3% atau mengalami penurunan sebesar 6,7% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang tercatat sebesar 13,0%. Penurunan ini terjadi seiring dengan seiring dengan membaiknya NPF dari 1,42% tahun 2022 menjadi 1,04% diakhir tahun 2023 serta turunnya komposisi kolektibilitas 2 dari 5,8% tahun 2022 menjadi 3,3% diakhir tahun 2023

Jumlah total pembiayaan yang mengalami restrukturisasi pada tahun 2023 mencapai Rp549,1 miliar, atau setara dengan 6,1% dari total pembiayaan. Dari jumlah tersebut, Rp443,6 miliar adalah nasabah yang terdampak COVID-19, sementara sisanya Rp105,5 miliar, merupakan nasabah yang tidak terdampak COVID-19. Pembiayaan restruktur menurun sebesar Rp420,2 miliar atau 43,3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp969,3 miliar.

Pembiayaan Restruktur dan FaR BCAS

Dalam miliar Rupiah



Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia

Pada tahun 2023, BCAS melakukan penempatan pada Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) sebesar Rp691,9 miliar atau meningkat 75,5% apabila dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp394,3 miliar. BCAS juga mempertahankan posisi dana giro pada Bank Indonesia sesuai dengan kewajiban untuk memenuhi peraturan penempatan giro pada BI serta memanfaatkan insentif dari Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). Pada Desember 2023, posisi Giro BCAS pada BI berada di angka 4% dari DPK.

Investasi pada Surat Berharga

Penempatan BCAS pada surat berharga pada tahun 2023 mencapai Rp4.288,9 miliar, mengalami pertumbuhan sebesar 4,3% atau Rp178,1 miliar apabila dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp4.110,9 juta. Kenaikan investasi pada surat berharga ini terutama disebabkan oleh peningkatan investasi BCAS pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Kas

Per akhir tahun 2023, posisi kas BCAS sebesar Rp42,8 miliar, turun sebesar Rp26,4 miliar dibandingkan dengan Rp69,2 miliar pada tahun 2022. Hal ini dikarenakan BCAS selalu berupaya menempatkan kas yang dimiliki pada instrumen yang lebih produktif dan memberi imbal hasil yang optimal namun pada saat yang bersamaan posisi kas senantiasa dijaga pada tingkat yang memadai untuk memenuhi kebutuhan transaksi tunai nasabah.

Giro pada Bank Indonesia

BCAS memiliki posisi giro pada Bank Indonesia sebesar Rp37,4 miliar pada tahun 2023, yang digunakan sebagai dukungan untuk layanan BI Fast. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp10,6 miliar. Peningkatan ini seiring dengan peningkatan transaksi nasabah melalui layanan BI Fast pada BCA Syariah *Mobile*.

Liabilitas

Per 31 Desember 2023, jumlah liabilitas BCAS tercatat sebesar Rp11.389,2 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp1.650,2 miliar atau setara dengan 16,9% dari tahun 2022 yang sebesar Rp9.740,8 miliar.

Dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain

Uraian	2023		2022		Pertumbuhan	
	Nominal	Komposisi*	Nominal	Komposisi*	Nominal	%
Dana Pihak Ketiga	10.949,5	96,1%	9.481,6	97,4%	1.467,8	15,5%
Giro	2.076,1	18,2%	2.104,0	21,6%	(27,8)	(1,3%)
Tabungan	2.096,6	18,4%	1.556,1	16,0%	540,5	34,7%
Deposito	6.776,8	59,5%	5.821,6	59,8%	955,1	16,4%
Liabilitas kepada Bank Lain	66,4	2,3%	5,9	0,1%	60,5	1.027,9%
Setoran jaminan	0,3	0,0%	0,3	0,0%	0,0	6,4%
Liabilitas lainnya	183,0	1,6%	251,2**	2,6%	(68,2)	(27,1%)
Total liabilitas	**11.389,2**	**100%**	**9.739,0****	**100,0%**	**1.650,2**	**16,9%**

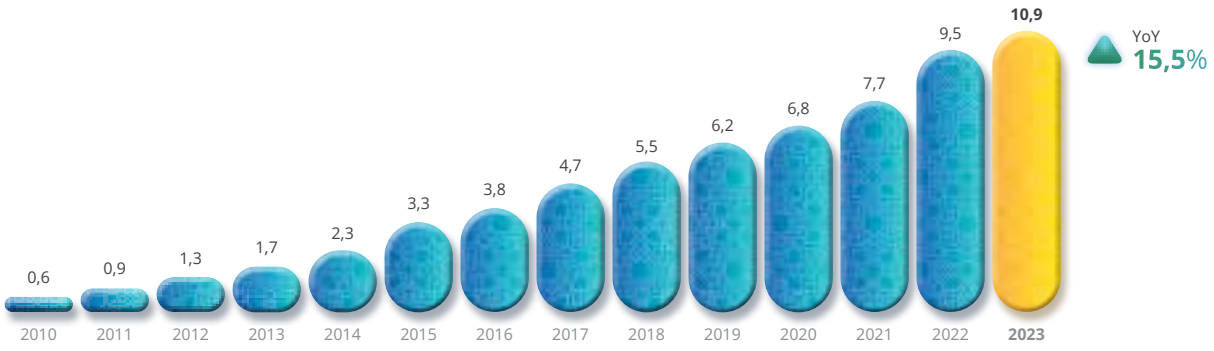
*) Persentase terhadap total pembiayaan
**) Restatement karena adanya perubahan perlakuan akuntansi di tahun 2023

Dana Pihak Ketiga

Penghimpunan DPK dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk giro, tabungan, dan deposito, dengan menerapkan akad *wadiah* (titipan) dan *mudharabah* (bagi hasil). Jumlah DPK yang berhasil kami himpun pada tahun 2023 mencapai Rp10.949,5 miliar mengalami peningkatan sebesar Rp1.467,8 triliun atau setara dengan 15,5% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp9.481,6 miliar. Jika dianalisis sejak tahun 2010, pertumbuhan rata-rata (CAGR) DPK kami pada tahun 2023 mencapai 25,8%.

Dana Pihak Ketiga

Dalam triliun Rupiah

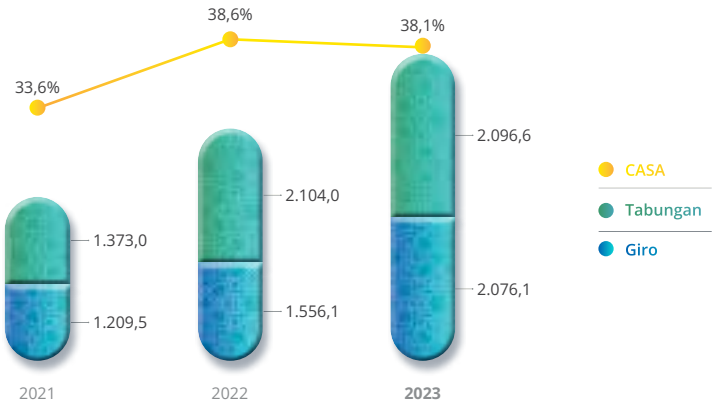


Kami terus berkomitmen untuk menyediakan berbagai kemudahan dan meningkatkan fitur transaksi pada *e-channel*, dengan tujuan agar solusi transaksi yang dinikmati oleh nasabah semakin komprehensif. *Alhamdulillah*, upaya kami mendapat kepercayaan dan loyalitas nasabah sehingga DPK dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan.

Komposisi CASA yang terdiri dari tabungan dan giro menunjukkan kecenderungan peningkatan seiring dengan upaya BCAS dalam menyediakan kemudahan bertransaksi. Pada tahun 2023, CASA BCAS terjaga pada angka 38,1% mengalami koreksi sebesar 0,5% dari tahun sebelumnya yang memberikan kontribusi sebesar 38,6% terhadap total DPK. Dari total DPK yang berhasil dikumpulkan, produk tabungan mencatatkan pertumbuhan terbesar, yakni sebanyak 34,7% atau Rp540,5 miliar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu produk deposito mengalami peningkatan sebesar Rp955,1 miliar atau setara dengan 16,4% pada tahun 2023.

Komposisi CASA

dalam miliar Rupiah dan Persentase

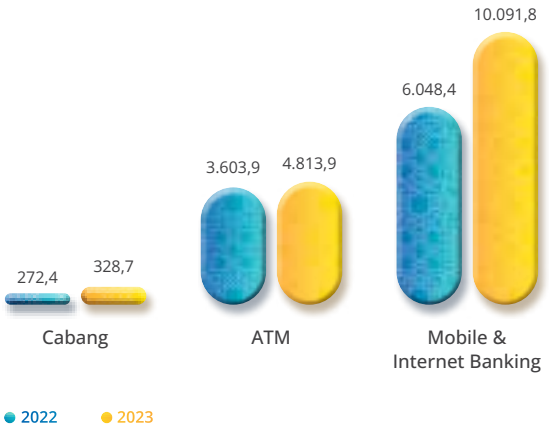


Memperkuat jumlah nasabah (*customer base*) dan meningkatkan komposisi CASA merupakan salah satu fokus strategis kami pada tahun 2023. Kami telah melakukan berbagai langkah diantaranya dengan meluncurkan fitur pembukaan rekening secara *online* pada pertengahan tahun 2023. Fitur ini memungkinkan nasabah untuk dapat melakukan pembukaan rekening melalui ponsel kapan pun di mana pun. *Alhamdulillah*, mendapatkan respon yang baik dari nasabah. Sampai dengan Desember 2023, rekening yang dibuka secara *online* mencapai 268.062 rekening, atau sebesar 48,6% dari seluruh rekening tabungan BCAS. Diluncurkannya fitur pembukaan rekening *online* ini juga merupakan wujud komitmen kami untuk mendengar dan memahami kebutuhan nasabah. Nasabah yang menginginkan pembukaan rekening tapi terkendala dengan jarak atau waktu yang terbatas kini dapat membuka rekening dengan mudah tanpa harus datang ke cabang dengan melakukan pembukaan rekening menggunakan BCA Syariah *Mobile*.

Pada tahun 2023, transaksi nasabah melalui *e-channel* mengalami peningkatan. Data transaksi tahun 2023 menunjukkan bahwa transaksi nasabah BCAS didominasi oleh *channel mobile* dan *internet banking* yaitu 66,2% dari total transaksi atau sebanyak 10,1 juta transaksi.

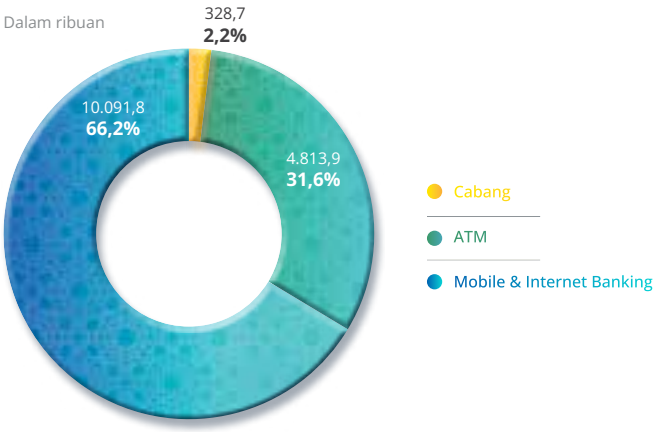
Frekuensi Transaksi Perbankan

Dalam ribuan



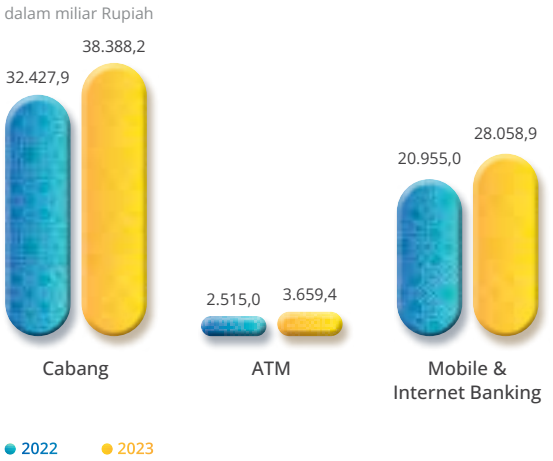
Frekuensi Transaksi Berdasarkan *Channel*

Dalam ribuan

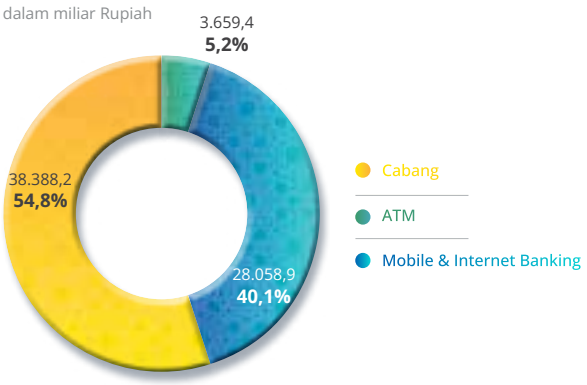


Dari segi nilai transaksi, transaksi dengan nominal besar masih sering dilakukan melalui cabang, dengan komposisi mencapai 54,7% atau setara dengan Rp38.388,2 miliar. Sementara itu, transaksi melalui *mobile* atau *internet banking* memiliki komposisi sebesar 40,1% atau setara dengan Rp28.058,9 miliar. Angka ini menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya yang setara dengan Rp20.955,0 miliar, mencerminkan kepercayaan masyarakat untuk bertransaksi melalui *mobile* dan *internet banking* semakin meningkat.

Nominal Transaksi Perbankan



Nominal Transaksi Berdasarkan *Channel*



Ekuitas

Per 31 Desember 2023, ekuitas BCAS mencapai Rp3.082,5 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp151,7 miliar atau 5,2% jika dibandingkan dengan tahun 2022. Peningkatan ekuitas terutama disebabkan laba yang kami peroleh dari aktivitas usaha. Total laba tahun berjalan tercatat berada di angka Rp153,8 miliar, meningkat Rp36,2 miliar atau 30,8% dibandingkan tahun 2022 yang ada di angka Rp117,6 miliar.

Laporan Laba-Rugi Komprehensif

BCAS berhasil mencapai kinerja yang positif pada tahun 2023. Penguatan kinerja ini tak lepas dari konsistensi dalam mengimplementasikan kebijakan strategis di sepanjang tahun 2023 dengan melakukan percepatan di segala bidang meliputi peningkatan *customer base*, penyaluran pembiayaan serta adopsi TI dalam kegiatan bisnis dan operasional kami.

Dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Pendapatan pengelolaan dana sebagai *mudharib*	933,5	749,7	183,7	24,5%
Pendapatan pembiayaan	634,7	553,7	80,9	14,6%
Pendapatan usaha utama lainnya	298,8	196,0	102,8	52,4%
Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah* temporer	(275,2)	(161,4)	113,9	70,6%
Hak bagi hasil milik bank/ Pendapatan operasional	658,3	588,4	69,9	11,9%
Beban bonus *wadiah*	(44,5)	(25,1)	19,4	77,3%
Pendapatan setelah distribusi bagi hasil, imbalan, dan bonus	613,8	563,3	50,5	9,0%
Pendapatan usaha lainnya	70,7	54,6	16,1	29,4%
Beban operasional/Beban usaha	(410,6)	(254,2)	156,3	61,5%
CKPN	(57,9)	(212,2)	(154,4)	(72,7%)
Laba operasional/Laba usaha	216,0	151,4	64,6	42,6%
Pendapatan (beban) non usaha	(24,6)	(5,2)	19,4	371,1%
Laba sebelum pajak	191,4	146,2	45,2	30,9%
Manfaat (beban) pajak penghasilan	(37,6)	(28,6)	9,0	31,3%
Laba bersih	153,8	117,6	36,2	30,8%
Penghasilan (rugi) komprehensif lain	(2,1)	(27,5)	(25,3)	(92,2%)
Laba komprehensif	151,7	90,1	61,6	68,3%
Laba per saham (dalam Rupiah penuh)	68,2	52,1	16,1	30,8%

Pendapatan Pengelolaan Dana sebagai *Mudharib*

Pada tahun 2023, BCAS mencatatkan pendapatan dari pengelolaan dana sebagai *mudharib* sebesar Rp933,5 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp183,7 miliar atau 24,5% jika dibandingkan pada tahun 2022 yang sebesar Rp749,7 miliar. Kenaikan tersebut terutama berasal dari pendapatan pembiayaan dan pendapatan usaha utama lainnya seiring dengan meningkatnya aktivitas penyaluran pembiayaan serta penempatan pada surat berharga yang kami lakukan pada tahun 2023.

Pendapatan Pembiayaan

Pendapatan pembiayaan yang kami catat pada tahun 2023 adalah Rp634,7 miliar. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp553,7 miliar, terjadi peningkatan sebesar Rp80,9 miliar atau tumbuh 14,6%. Pendapatan dari akad bagi hasil *musyarakah* memberikan kontribusi terbesar, yaitu mencapai proporsi 64,5%. Hal ini disebabkan sejalan dengan penyaluran pembiayaan BCAS pada tahun 2023 yang didominasi oleh akad *musyarakah*. Pada tahun 2023, pendapatan dari akad bagi hasil *musyarakah* mencapai Rp409,3 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp54,0 miliar atau 15,2% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp355,3 miliar.

Sementara itu, pendapatan marjin *murabahah* tercatat sebesar Rp129,6 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp4,3 miliar atau 3,4% apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp125,3 miliar. Pendapatan bersih dari *ijarah* per akhir 2023 sebesar Rp45,0 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp15,8 miliar atau 54,2% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp29,1 miliar. Per akhir 2023, pendapatan bagi hasil *mudharabah* mencapai Rp50,8 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp6,9 miliar atau 15,7% dibandingkan dengan pendapatan sebelumnya yang mencapai Rp43,9 miliar pada tahun 2022.

Dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain

Uraian	2023		2022		Pertumbuhan	
	Nominal	Komposisi*	Nominal	Komposisi*	Nominal	%
Pendapatan margin *murabahah*	129,6	20,4%	125,3	22,6%	4,3	3,4%
Pendapatan bersih *ijarah*	45,0	7,1%	29,1	5,3%	15,8	54,2%
Pendapatan bagi hasil *mudharabah*	50,8	8,0%	43,9	7,9%	6,9	15,7%
Pendapatan bagi hasil *musyarakah*	409,3	64,5%	355,3	64,2%	54,0	15,2%
Total pendapatan pembiayaan	**634,7**	**100,0%**	**553,7**	**100,0%**	**80,9**	**14,6%**

*) Persentase terhadap total pendapatan pembiayaan

Pendapatan Usaha Utama Lainnya

Sepanjang tahun 2023, BCAS memperoleh pendapatan usaha utama lainnya bersumber dari bonus FASBIS, pendapatan dari penempatan pada bank syariah lain dan pendapatan bagi hasil investasi pada surat berharga serta pendapatan reksadana.

Dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain

Uraian	2023		2022		Pertumbuhan	
	Nominal	Komposisi*	Nominal	Komposisi*	Nominal	%
Pendapatan bagi hasil surat berharga	164,4	55,0%	122,5	62,5%	41,8%	34,1%
Pendapatan bonus Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah	111,1	37,2%	56,4	28,7%	54,8	97,2%
Pendapatan reksadana	22,1	7,4%	17,1	8,7%	5,0%	29,2%
Pendapatan bagi hasil dari penempatan di bank lain	-	-	-	-	-	-
Pendapatan bagi hasil sertifikat investasi *mudharabah* antar bank	1,2	0,4%	0,0	0,0%	1,2	3.810,1%
Total pendapatan usaha utama lainnya	**298,8**	**100,0%**	**196,0**	**100,0%**	**102,8**	**52,4%**

*) Persentase terhadap total pendapatan usaha utama lainnya

Pendapatan dari usaha utama lainnya per akhir 2023 mencapai Rp298,8 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp102,8 miliar atau sebesar 52,4% dari tahun 2022 yang sebesar Rp196,0 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan bagi hasil surat berharga syariah yang tercatat sebesar Rp164,4 miliar, meningkat Rp42,8 miliar atau 35,2% serta pendapatan bonus Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (Fasbis) yang tercatat sebesar Rp111,1 miliar, meningkat 54,8 miliar atau 97,2% dibandingkan tahun sebelumnya.

Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer

Kami mencatat Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer per akhir 2023 sebesar Rp275,2 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp113,9 miliar atau sebesar Rp70,6% apabila dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp161,4 miliar. Hal ini terjadi seiring dengan pertumbuhan simpanan nasabah di BCAS dalam bentuk deposito *mudharabah mutlaqah* yang pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp6.776,8 mengalami peningkatan 16,4% dibandingkan tahun sebelumnya.

Hak Bagi Hasil Milik Bank

BCAS mencatat Hak Bagi Hasil Milik Bank/Pendapatan Operasional sebesar Rp658,3 miliar selama tahun 2023, mengalami peningkatan sebesar Rp69,9 miliar atau 11,9% apabila dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp588,4 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan portofolio investasi kami pada berbagai instrumen keuangan dan penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil.

Beban Usaha

Pada tahun 2023, BCAS mencatat beban usaha sebesar Rp410,6 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp156,3 miliar atau 61,5% apabila dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp254,2 miliar. Beban usaha di dalamnya terdiri dari beban kepegawaian, beban umum dan administrasi, beban penjaminan pemerintah, dan beban investasi TI. Peningkatan pada tahun 2023 masih berada pada level wajar dan ideal untuk menjalankan proses bisnis dan operasional kami tetap optimal seiring dengan pertumbuhan organisasi BCAS.

Laba Operasional/Laba Usaha

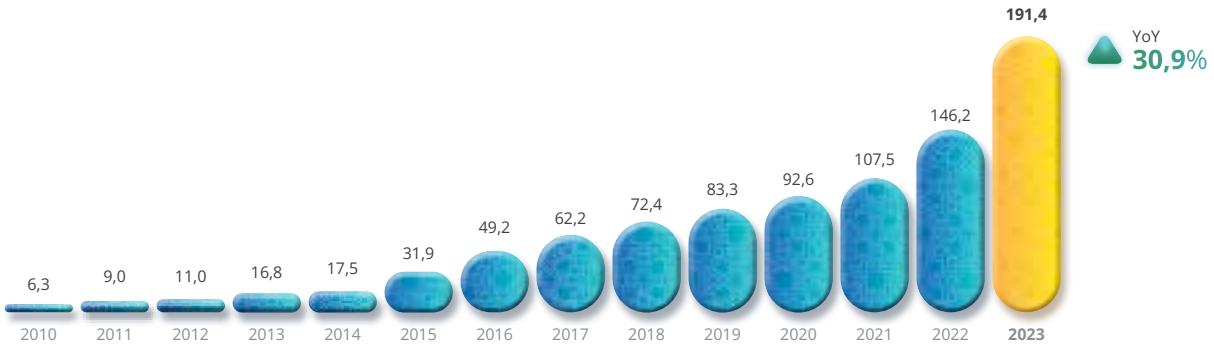
Pada tahun 2023, laba operasional/laba usaha yang kami bukukan tercatat sebesar Rp216,0 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp64,6 atau 42,6% apabila dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp151,4 miliar.

Laba Sebelum Pajak

Dengan melakukan pengelolaan aset dan liabilitas yang berimbang dan optimal, BCAS dapat mencatat pertumbuhan laba sebelum pajak dari tahun ke tahun. Berdasarkan laporan per akhir 2023, kami berhasil mencapai laba sebelum pajak sebesar Rp191,1 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp45,2 miliar atau 30,9% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp146,2 miliar. Jika dilihat dari tahun 2010, BCAS menunjukkan pertumbuhan laba sebelum pajak rata-rata tahunan (CAGR) sebesar 30,1%.

Laba Sebelum Pajak

dalam miliar Rupiah



Laba Bersih

Seiring dengan pertumbuhan laba sebelum pajak, laba bersih BCAS pada tahun 2023 juga mengalami peningkatan. Laba bersih mencapai Rp153,8 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp36,2 miliar atau 30,8% dari tahun 2022 yang sebesar Rp117,6 miliar.

Laba Bersih per Saham

Per 31 Desember 2023, jumlah saham BCAS adalah sebanyak 2,255,183,207 lembar. Pada tahun 2023, setiap lembar saham mendapatkan laba bersih sebanyak Rp68,2, meningkat 30,8% dari tahun sebelumnya yang mendapatkan pendapatan bersih Rp52,1 per lembar saham.

Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas BCAS pada akhir 2023 mencapai Rp3.082,5 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp151,7 miliar atau 5,2% dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp2.930,9 miliar. Kenaikan tersebut disebabkan oleh perolehan laba. Total laba yang dicatat oleh Bank selama tahun berjalan mencapai Rp153,8 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp36,2 miliar atau 30,8% apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp117,6 miliar.

Dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain

Uraian	2023		2022		Pertumbuhan	
	Nominal	Komposisi*	Nominal	Komposisi*	Nominal	%
Modal disetor	2.255,2	73,2%	2.255,2	76,9%	-	-
Tambahan modal disetor	70,6	2,3%	70,6	2,4%	-	-
Pendapatan (kerugian) komprehensif lain	46,6	1,5%	48,8	1,7%	(2,1)	(4,4%)
Cadangan	16,0	0,5%	14,0	0,5%	2,0	14,3%
Laba (rugi)	694,2	22,5%	542,4	18,5%	151,8	28,0%
Laba (rugi) tahun-tahun lalu	540,4	17,5%	424,8	14,5%	115,6	27,2%
Laba (rugi) tahun berjalan	153,8	5,0%	117,6	4,0%	36,2	30,8%
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik	153,8	5,0%	**117,6**	**4,0%**	**36,2**	**30,8%**
Total ekuitas	**3.082,5**	**100%**	**2.930,9**	**100,0%**	**151,7**	**5,2%**

*) Persentase terhadap total ekuitas

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung, dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Dalam konteks laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas, giro pada Bank Indonesia dan bank lain, serta penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan sejak tanggal perolehan.

Posisi kas dan setara kas BCAS per 31 Desember 2023 mencapai Rp1.165,5 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp135,9 miliar atau 13% apabila dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp1.029,6 miliar. Komponen-komponen utama dari arus kas dijelaskan dalam ringkasan berikut ini:

Uraian	2023	2022
Arus kas dari aktivitas operasi	372,5	936,3
Arus kas dari aktivitas investasi	(236,7)	(1.063,8)
Arus kas dari aktivitas pendanaan	-	-
Kenaikan/(penurunan) kas dan setara kas	135,9	(127,5)
Kas dan setara kas awal tahun	1.029,6	1.157,2
Kas dan setara kas akhir tahun	**1.165,5**	**1.029,6**

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Pada tahun 2023, BCAS mencatat arus kas bersih sebesar Rp372,5 miliar sebagai arus kas masuk. Arus kas masuk dari aktivitas operasi di tahun 2023 diantaranya berasal dari penerimaan pendapatan sebagai *mudharib* sebesar Rp908,9 miliar dan dana simpanan nasabah sebesar Rp1.528,3 miliar. Sementara arus kas keluar dari aktivitas operasi digunakan untuk penyaluran pembiayaan sebesar Rp1.576,0 miliar, pembayaran beban operasional sebesar Rp412,1 miliar serta pembayaran bagi hasil sebesar Rp259,0 miliar. Secara keseluruhan, BCAS menghasilkan arus kas aktivitas operasi yang memiliki nilai positif disebabkan oleh meningkatnya dana simpanan nasabah secara signifikan dan pendapatan yang kami terima dari penyaluran pembiayaan.

Uraian	2023	2022
Arus kas masuk penerimaan pendapatan sebagai *mudharib*	908,9	745,0
Arus kas masuk dari dana simpanan nasabah	1.528,3	1.803,6
Arus kas keluar untuk penyaluran pembiayaan	(1.576,0)	(1.418,2)
Arus kas keluar untuk beban operasional	(412,1)	(264,4)
Arus kas keluar untuk pembayaran bagi hasil	(259,0)	(179,4)

Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Selama tahun 2023, arus kas bersih yang digunakan pada aktivitas investasi tercatat sebagai arus kas keluar sebesar Rp236,7 miliar, sedangkan pada tahun 2022 arus kas untuk investasi tercatat sebagai arus kas keluar sebesar Rp1.063,8 miliar.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
Sepanjang tahun 2023, tidak terdapat aktivitas pendanaan.

Laporan Rasio Keuangan

Pada tahun 2023, Bank mengukur kinerja keuangannya menggunakan rasio-rasio keuangan utama yang ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan
Permodalan			
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR)	34,8	36,7%	(1,9%)
Aktiva Tetap Terhadap Modal	9,3%	7,7%	1,6%
Kualitas Aset			
Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	1,8%	1,7%	0,1%
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	0,7%	0,9%	(0,2%)
CKPN aset keuangan terhadap aset produktif	3,3%	3,9%	(0,7%)
NPF *Gross*	1,04%	1,42%	(0,38%)
NPF *Net*	0,0%	0,01%	(0,01%)
Profitabilitas			
Return On Asset (ROA)	1,5%	1,3%	0,2%
Return On Equity (ROE)	5,2%	4,1%	1,0%
Net Imbalan (NI)	4,7%	5,1%	(0,4%)
Net Operating Margin (NOM)	1,7%	1,4%	0,3%
Rasio Efisiensi Biaya (BOPO)	78,6%	81,6%	(3,0%)
Cost To Income Ratio (CIR)	60,0%	41,2%	18,9%
Laba/rugi terhadap pendapatan	20,5%	19,5%	1,0%
Likuiditas			
Pembiayaan bagi hasil terhadap total pembiayaan	74,9%	76,5%	(1,7%)
Rasio Pembiayaan terhadap DPK (FDR)	82,3%	80,0%	2,4%
Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM)	87,7%	95,0%	(7,3%)
Rasio aset lancar terhadap kewajiban lancar	32,7%	62,9%	(30,2%)
Rasio liabilitas terhadap ekuitas	369,5%	332,3%	37,2%
Rasio liabilitas terhadap aset	78,7%	76,9%	1,8%
Kepatuhan			
Persentasi Pelanggaran BMPD			
Pihak Terkait	0,0%	0,0%	0,0%
Pihak Tidak Terkait	0,0%	0,0%	0,0%
Persentase Pelampauan BMPD			
Pihak Terkait	0,0%	0,0%	0,0%
Pihak Tidak Terkait	0,0%	0,0%	0,0%
GWM			
GWM Rupiah	4,0%	6,5%	(2,6%)
GWM Valuta Asing	0,0%	0,0%	0,0%
Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan	0,0%	0,0%	0,0%

Kemampuan Membayar Utang dan Kolektibilitas Piutang

Kemampuan Membayar Piutang

BCAS mengevaluasi kapasitas pembayaran utang dengan memperhatikan tingkat solvabilitas, likuiditas, dan rentabilitas.

Solvabilitas

Kami menggunakan rasio kecukupan modal sebagai indikator untuk mengukur solvabilitas. Kami berkomitmen untuk memelihara modal yang kuat serta memadai sebagai langkah antisipatif terhadap risiko kredit, pasar dan operasional. **Pada tahun 2023, rasio kecukupan modal (CAR) BCAS mencapai 34,8%** atau mengalami penurunan dari posisi tahun sebelumnya yang mencapai 36,7%. Meskipun mengalami perubahan, rasio CAR BCAS tetap melampaui persyaratan minimum sesuai dengan profil risiko yang ditetapkan oleh regulator, yakni 8%. Rasio CAR BCAS mencerminkan bahwa kami mempunyai fleksibilitas yang memadai untuk menanggapi risiko pasar, risiko kredit, dan risiko operasional yang dihadapi. Selain itu, rasio CAR yang tinggi juga menunjukkan bahwa BCAS masih sangat mendukung BCAS dalam melakukan inisiatif strategis untuk mengembangkan portofolio serta melakukan ekspansi bisnis.

Likuiditas

Dalam mengevaluasi tingkat likuiditas, kami memperhatikan rasio FDR, RIM, dan penyediaan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM). BCAS mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk struktur pendanaan, aset likuid, komitmen pemberian pembiayaan kepada debitur, dan kewajiban segera dalam menjaga likuiditasnya. **Pada 2023, rasio FDR BCAS mencapai angka yaitu 82,3%** atau mengalami peningkatan dari tahun 2022 yang sebesar 80,0%. Peningkatan ini terjadi seiring dengan penyaluran pembiayaan yang meningkat di sepanjang tahun 2023. Rasio ini juga menggambarkan keseimbangan antara penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan yang kami lakukan.

BCAS mengelola penyaluran dana melalui pembiayaan dan surat berharga, selaras dengan kebijakan Rasio Intermediasi Makroprudensial yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pada 2023, **RIM BCAS mencapai 87,7%**, mengalami penurunan sebesar 7,3% dari tahun 2022 yang sebesar 95,0%. Tingkat RIM BCAS masih berada dalam batas yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Upaya lain yang kami lakukan dalam mengelola risiko likuiditas adalah dengan menyediakan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM), yakni cadangan likuiditas minimum berupa Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), serta Sukuk Bank Indonesia (SukBI) yang wajib dipelihara oleh Bank di mana besarannya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank.

*) Persentase terhadap total ekuitas

Uraian	2023		2022		Pertumbuhan	
	Nominal	Komposisi*	Nominal	Komposisi*	Nominal	%
SBIS	-	-	-	-	-	-
SBSN	1.627,5	55,4%	1.040,4	41,8%	587,1	56,4%
Sukuk BI	1.311,5	44,6%	1.450,0	58,2%	(138,5)	(9,6%)
Jumlah PLM	**2.939,0**	**100,0%**	**2.490,4**	**100,0%**	**448,6**	**18,0%**

*) Persentase terhadap jumlah PLM

Di 2023, BCAS mencatat **PLM sebesar Rp2.939,0 miliar**, mengalami peningkatan sebesar Rp448,6 miliar atau 18,0% dari tahun 2022 yang sebesar Rp2.490,4 miliar. BCAS menempatkan PLM paling banyak pada SBSN dengan proporsi 55,4% terhadap keseluruhan PLM atau Rp1.627,5 miliar. Penempatan PLM SBSN mengalami peningkatan signifikan sebesar Rp587,1 miliar atau 56,4% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada 31 Desember 2023, BCAS tidak memiliki penempatan pada SBIS.

Rentabilitas

BCAS menggunakan rasio rentabilitas sebagai alat untuk menilai kemampuan membayar utang, dengan memperhatikan indikator *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), *Net Interest Margin* (NIM), dan Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).

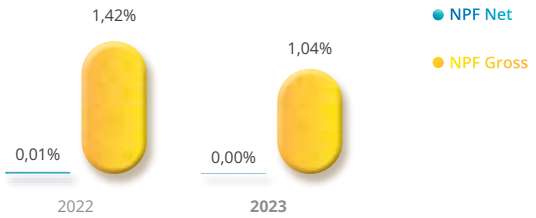
Return on Assets (ROA) adalah rasio rentabilitas yang mengukur sejauh mana BCAS dapat mengelola aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba. Pada 2023, **ROA BCAS sebesar 1,5%**, mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar 0,2%. *Return on Equity* (RoE) merupakan rasio rentabilitas yang mengukur kemampuan BCAS dalam mengelola modal sendiri yang berasal dari investasi pemegang saham untuk menghasilkan laba. Pada tahun 2023, **ROE BCAS mencapai 5,2%**, menunjukkan peningkatan sebesar 1,0% dari tahun 2022 yang sebesar 4,1%.

Pada tahun 2023, **Net Imbalan (NI) BCAS mengalami koreksi menjadi 4,7%**, jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 5,1%. Sementara itu, rasio **Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) BCAS pada tahun 2023 sebesar 78,6%**, menunjukkan penurunan dari tahun 2022 yang sebesar 81,6%. Hal ini mencerminkan bahwa BCAS dapat meningkatkan efisisensi operasional dari tahun ke tahun dibandingkan tahun sebelumnya.

Tingkat Kolektibilitas Piutang

Resiliensi perekonomian nasional di sepanjang 2023 turut berpengaruh pada stabilitas dunia usaha serta kelancaran dan kualitas pembiayaan di sektor perbankan. Kami senantiasa menjaga kualitas portofolio pembiayaan pada tingkat yang sehat agar BCAS dapat beroperasi dengan optimal dan mempertahankan kepercayaan *stakeholder*. Berbagai upaya kami lakukan untuk menjaga kualitas portofolio pembiayaan, di antaranya dengan melakukan pengelolaan risiko, menerapkan prinsip kehati-hatian sejak awal akuisisi pembiayaan, pemantauan pembiayaan yang selalu mengedepankan kualitas kemitraan, hingga menerapkan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang cepat dan efektif. Dengan menerapkan upaya-upaya tersebut, NPF kami terjaga pada tingkat yang sehat, dimana rasio NPF *gross* dan net sebesar 1,04% dan 0,00%.

Non-Performing Financing



Kepatuhan

Kepatuhan dan pemenuhan terhadap ketentuan regulator dan peraturan perundang-undangan senantiasa menjadi komitmen kami. Komitmen kami tercermin melalui beberapa indikator seperti Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD), Giro Wajib Minimum (GWM), dan Posisi Devisa Netto (PDN). Dengan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, kami dapat menjaga pada tahun 2023 tidak terjadi pelanggaran maupun pelampauan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD). Pada akhir tahun 2023, posisi giro BCAS di Bank Indonesia berada pada angka 4%, sesuai dengan kewajiban giro wajib minimum serta memanfaatkan insentif dari Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM)

Sedangkan, untuk indikator Posisi Devisa Netto (PDN), selama tahun 2023, Bank belum melakukan kegiatan usaha perbankan dengan valuta asing sehingga tidak tersedia informasi terkait PDN.

Laporan Komitmen dan Kontinjensi

Dalam jutaan Rupiah

Pos - Pos		Individual	
		2023	2022
I	**Tagihan Komitmen**		
	1. Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik		
	• Rupiah	-	-
	• Valuta asing	-	-
	2. Posisi pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	-	-
	3. Lainnya	-	-
II	**Kewajiban Komitmen**	**1.685.987**	**1.729.991**
	1. Fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik		
	a. *Committed*		
	• Rupiah	534.906	572.008
	• Valuta asing	-	-
	b. *Uncommitted*		
	• Rupiah	1.151.081	1.157.982
	• Valuta asing	_	-
	2. Fasilitas pembiayaan kepada bank lain yang belum ditarik		
	a. *Committed*		

Pos - Pos	Individual	
	2023	2022
• Rupiah	-	-
• Valuta asing	-	-
b. *Uncommitted*		
• Rupiah	-	-
• Valuta asing	-	-
3. 3. *Irrevocable* L/C yang masih berjalan		
a. L/C luar negeri	-	-
b. L/C dalam negeri	-	-
4. Posisi penjualan *spot* dan *forward* yang masih berjalan	-	-
5. Lainnya	-	-
III Tagihan Kontijensi	**47.200**	**66.796**
1. Garansi yang diterima		
• Rupiah	-	-
• Valuta asing	-	-
2. Pendapatan dalam penyelesaian		
a. *Murabahah*	7.926	7.796
b. *Istishna'*	-	-
c. Sewa	2.820	2.856
d. Bagi Hasil	-	-
e. Lainnya	36.454	56.144
2. 3. Lainnya	-	-
IV Kewajiban Kontijensi	**75.733**	**46.848**
1. Garansi yang diberikan		
• Rupiah	75.733	46.848
• Valuta asing	-	-
2. Lainnya	-	-

Informasi Kinerja Keuangan Lain

Kewajiban Penyedia Modal Minimum (KPMM)

Dalam jutaan Rupiah

Pos - Pos	Individual	
	2023	2022
I Modal Inti (*Tier* 1)	**3.022.480**	**2.884.560**
1. Modal Inti Utama (CET 1)	3.022.480	2.884.560
1.1. Modal disetor (setelah dikurangi saham *treasury*)	2.255.183	2.255.183
1.2. Cadangan Tambahan Modal	833.304	668.603
1.2.1. Faktor Penambah	837.323	684.084
1.2.1.1. Penghasilan Komprehensif Lain	56.570	57.133
1.2.1.1.1. Selisih lebih penjabaran laporan keuangan	-	-
1.2.1.1.2. Potensi keuntungan dari peningkatan nilai wajar aset Keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	1.541	2.104

Pos - Pos	Individual	
	2023	2022
1.2.1.1.3. Saldo surplus revaluasi aset tetap	55.029	55.029
1.2.1.2. Cadangan Tambahan Modal Lainnya (*other disclosed reserves*)	780.753	626.951
1.2.1.2.1. Agio saham biasa	-	-
1.2.1.2.2. Cadangan Umum	16.000	14.000
1.2.1.2.3. Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak	540.394	424.811
1.2.1.2.4. Laba tahun berjalan setelah diperhitungkan pajak	153.802	117.583
1.2.1.2.5. Dana setoran modal	70.557	70.557
1.2.1.2.6. Modal sumbangan	-	-
1.2.1.2.7. Waran yang diterbitkan	-	-
1.2.1.2.8. Opsi saham yang diterbitkan dalam rangka program Kompensasi berbasis saham	-	-
1.2.2. Faktor Pengurang	4.019	15.481
1.2.2.2. Penghasilan Komprehensif Lain	-	-
1.2.2.2.1. Selisih kurnag penjabaran laporan keuangan	-	-
1.2.2.2.2. Potensi kerugian dari penurunan nilai wajar aset Keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	-	-
1.2.2.3. Cadangan Tambahan Modal Lainnya (*other disclosed reserves*)	4.019	15.481
1.2.2.3.1. Disagio saham biasa	-	-
1.2.2.3.2. Laba tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan	-	-
1.2.2.3.3. Rugi tahun berjalan yang dapat diperhitungkan	-	-
1.2.2.3.4. Selisih Kurang antara Penyisihan penghapusan aset (PPA) dan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN)	-	-
1.2.2.3.5. Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam Trading Book	-	-
1.2.2.3.6. PPA atas aset non produktif yang wajib dibentuk	4.019	15.481
1.3. Kepentingan non pengendali yang dapat diperhitungkan		-
1.4. Faktor pengurang modal utama	66.007	39.226
1.4.1. Perhitungan pajak tangguhan	58.502	35.550
1.4.2. *Goodwill*	-	-
1.4.3. Seluruh aset tidak berwujud lainnya	7.505	3.676
1.4.4. Penyertaan yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang	-	-
1.4.5. Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi		-
1.4.6. Eksposur sekuritisasi	-	-
1.4.7. Faktor pengurang modal inti utama lainnya	-	-
1.4.7.2. Penempatan dana pada *instrument* AT 1 dan/atau *Tier* 2 pada Bank lain	-	-
2. Modal Inti Tambahan / *Additional Tier* (AT-1)	-	-
2.1. Instrumen yang memenuhi persyaratan AT-1		-
2.2. Agio (disagio) (+/-)	-	-
2.3. Faktor pengurang modal inti tambahan	-	-
2.3.1. Penempatan dana pada instrumen AT 1 dan/atau *Tier* 2 pada bank lain	-	-
II Modal Pelengkap (*Tier* 2)	**89.899**	**79.324**
1. Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang memenuhi persyaratan *Tier* 2	-	-
2. Aigo (disagio) (+/-)	-	-

Pos - Pos	Individual	
	2023	2022
3. Cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dibentuk (paling tinggi 1.25% ATMR resiko kredit)	89.899	79.324
4. Cadangan tujuan	-	-
5. Faktor pengurang modal pelengkap	-	-
5.1. *Sinking Fund*	-	-
5.2. Penempatan dana pada *instrument Tier* 2 pada bank lain	-	-
Total Modal	**3.112.379**	**2.963.884**
Aset Tertimbang Menurut Risiko		
ATMR risiko kredit	7.986.555	7.292.927
ATMR risiko pasar	-	-
ATMR risiko operasional	949.422	777.900
Total ATMR	8.935.978	8.070.827
Rasio KPMM sesuai profil risiko (%)	**9,00%**	**9,00%**
Alokasi pemenuhan KPMM sesuai profil risiko		
Dari CET 1 (%)	4,50%	4,50%
Dari AT1 (%)	0,00%	0,00%
Tambahan CET1 yang dialokasikan untuk memenuhi minimal 6% *Tier* 1	1,50%	1,50%
Dari *Tier* 2 (%)	1,01%	0,98%
Tambahan Rasio CET1 yang dialokasikan untuk memenuhi KPMM Profil Risiko	1,99%	2,02%
Rasio KPMM		
Rasio CET1 (%)	33,82%	35,74%
Rasio *Tier* 1 (%)	33,82%	35,74%
Rasio *Tier* 2 (%)	1,01%	0,98%
Rasio KPMM (%)	34,83%	36,72%
CET 1 untuk *buffer* (%)	**25,83%**	**27,72%**
Persentase *buffer* yang wajib dipenuhi oleh bank (%)	**0,00%**	**0,00%**
Capital conservation buffer (%)	0,00%	0,00%
Countercyclical buffer (%)	0,00%	0,00%
Capital surcharge untuk bank sistemik (%)	0,00%	0,00%

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dan Penyisihan Kerugian

BCAS membentuk cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) dengan mempertimbangkan kondisi kualitas aset keuangan sebagai bagian dari upaya manajemen risiko. Upaya ini dilakukan guna mengantisipasi potensi risiko kredit akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada BCAS.

Untuk dapat menghadapi ketidakpastian kondisi ekonomi serta risiko kredit yang masih relatif tinggi, BCAS mengambil kebijakan pencadangan CKPN dengan *prudent*. Kami melakukan pembentukan CKPN sebesar Rp472,8 miliar dengan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) Wajib dibentuk sebesar Rp180,6 miliar. Jumlah CKPN yang dibentuk oleh Bank melebihi ketentuan yang berlaku dan memadai untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas pembiayaan yang telah disalurkan.

Pos-Pos	CKPN		PPAP Wajib Dibentuk	
	Individual	Kolektif	Khusus	Umum
Penempatan pada bank lain	-	288,0	-	288,0
Tagihan *spot* dan *forward*	-	-	-	-
Surat berharga dimiliki	35.525,0	13.280,0	35.525,0	13.280,0
Tagihan akseptasi	-	-	–	-
Piutang *murabahah*	-	11.531,0	2.986,0	15.824,0
Piutang *istishna'*	-	-	-	-
Piutang *qardh*	-	135,0	-	135,0
Piutang Sewa	15,0	-	1,0	-
Pembiayaan *mudharabah*	-	7.469,0	-	7.469,0
Pembiayaan *musyarakah*	298.675,0	105.109,0	52.144,0	52.143,0
Pembiayaan Lainnya	-	-	-	-
Penyertaan	-	-	-	-
Penyertaan modal sementara	-	-	-	-
Komitmen dan Kontinjensi	-	760,0	-	760,0

Transaksi *Spot* dan *Forward*

Hingga akhir tahun 2023, BCAS belum melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing sehingga tidak terdapat informasi terkait transaksi *spot and forward*.

Laporan Distribusi Bagi Hasil

Dalam jutaan Rupiah

Jenis Penghimpunan Dana	Saldo Rata-rata	Pendapatan yang akan dibagihasilkan	Porsi Pemilik Dana		
			Nisbah (%)	Jumlah Bagi Hasil	Indikasi *Rate of Return* (%)
Liabilitas kepada Bank Lain	-	-	-	-	-
Giro *Mudharabah*	-	-	-	-	-
Tabungan *Mudharabah*	917.294,0	10.700,9	3,6	385,2	0,5
Deposito *Mudharabah*					
a. 1 Bulan	5.835.705,6	68.077,9	18,0	12.254,0	2,5%
b. 3 Bulan	611.889,6	7.138,1	18,0	1.284,9	2,5%
c. 6 Bulan	169.526,7	1.977,7	18,0	356,0	2,5%
d. 12 Bulan	378.244,3	4.412,5	18,0	794,3	2,5%
Surat Berharga yang diterbitkan	-	-	-	-	-
Pembiayaan yang Diterima	-	-	-	-	-
Jumlah	**7.912.660,1**	**92.307,1**	**-**	**15.074,3**	**-**

Dalam jutaan Rupiah

Jenis Penyaluran Dana	Saldo Rata-rata	Pendapatan yang Diterima
Penempatan pada Bank Lain	70,0	-
Surat Berharga yang dimiliki	2.630.915,0	16.251,0
Piutang *Murabahah*	1.654.006,0	12.618,0
Piutang *Istishna*	-	-
Piutang Multijasa	-	-
Pembiayaan Gadai	-	-
Pembiayaan *Mudharabah*	774.414,0	4.446,0
Pembiayaan *Musyarakah*	5.357.895,0	34.511,0
Pembiayaan Sewa	602.081,0	34.608,0
Pembiayaan Lainnya	-	-
Jumlah	**11.019.381,0**	**102.434,0**

Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat

Dalam jutaan Rupiah

Uraian	2023	2022
Saldo awal dana zakat	49,1	70,0
Dana zakat yang berasal dari		
a. Internal BUS		-
b. Eksternal BUS	44,8	49,2
Penyaluran dana zakat kepada entitas pengelola zakat		
a. Lembaga Amil Zakat	49,2	70,1
b. Badan Amil Zakat		-
Kenaikan (penurunan) dana zakat	(4,4)	(20,9)
Saldo akhir dana zakat	44,7	49,1

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Dalam jutaan Rupiah

Uraian	2023	2022
Sumber dana kebajikan pada awal periode	745,7	758,0
Penerimaan dana kebajikan		
a. Infak	-	-
b. Sedekah	32,9	1,9
c. Pengembalian dana kebijakan produktif	-	-
d. Denda	687,8	362,0
e. Penerimaan non halal	354,7	139,3
f. Lainnya	-	-
Total Penerimaan	**1.075,4**	**503,1**
Penggunaan dana kebajikan		
a. Dana kebijakan produktif	-	-
b. Sumbangan	943,8	515,4
c. Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	-	-

Uraian	2023	2022
Total Penggunaan	**943,8**	**515,4**
Kenaikan (penurunan) sumber dana kebajikan	131,6	(12,3)
Sumber dana kebajikan pada akhir periode	877,3	745,7

Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat

Hingga akhir tahun 2023, BCAS tidak memiliki dana investasi terikat, sehingga terdapat informasi mengenai laporan perubahan dana investasi terikat.

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023 serta Proyeksi Tahun 2024

BCAS telah merumuskan Rencana Bisnis Bank (RBB) yang mencakup rencana strategis perusahaan beserta target pencapaiannya. RBB senantiasa dilakukan evaluasi agar strategi yang dilakukan perusahaan dapat sejalan dengan perkembangan kondisi ekonomi serta mengikuti ketentuan yang berlaku. Selain itu, RBB juga senantiasa dimonitor pencapaiannya untuk memastikan bahwa target yang ditetapkan telah selaras dengan arah bisnis BCAS. Dalam mengimplementasikan strategi bisnis, RBB menjadi pedoman kami untuk dapat mencapai kinerja sesuai dengan yang diharapkan pada tahun pelaporan.

Strategi Pengembangan Bisnis dan Realisasi Target 2023

Manajemen BCAS setiap tahunnya mengevaluasi dan menyesuaikan strategi bisnis bank agar dapat melalui tantangan-tantangan selama periode pelaporan serta mencapai target-target yang ditetapkan dalam RBB. Beberapa strategi yang kami jalankan sepanjang 2023 di antaranya:

Akselerasi penyaluran pembiayaan

BCAS dapat membukukan kinerja positif dalam penyaluran pembiayaan. Pertumbuhan ini adalah hasil dari pemasaran aktif yang dilakukan oleh fungsi pemasaran di seluruh jaringan cabang serta *customer deepening* sehingga kami dapat melayani nasabah-nasabah baru yang berasal dari ekosistem usaha nasabah *existing*, baik dari rantai pasok maupun grup usaha nasabah. Selain itu, dalam menyalurkan pembiayaan kami juga berkolaborasi dengan BCA sebagai induk usaha serta memanfaatkan ekosistem Grup BCA untuk menangkap peluang kebutuhan pembiayaan syariah dari nasabah Grup BCA.

Pembiayaan segmen konsumer menjadi salah satu fokus untuk mendorong pertumbuhan pembiayaan. Pembiayaan konsumer tumbuh signifikan mencapai Rp821,9 miliar, tumbuh 95,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian ini adalah hasil dari pemasaran aktif yang dilakukan oleh seluruh cabang didukung dengan kerjasama dengan developer dan broker properti serta program-program menarik yang ditawarkan selama tahun 2024 baik untuk pembelian rumah hunian, *take over* maupun kebutuhan *refinancing*.

Sebagai bentuk komitmen BCAS untuk pembiayaan yang inklusif, penyaluran pembiayaan kepada segmen UMKM juga selalu menjadi perhatian kami. Pembiayaan UMKM mencapai Rp1.817,9 miliar dengan kontribusi 20,2% terhadap total portofolio pembiayaan BCAS.

Satu hal lagi yang menjadi kunci sukses penyaluran pembiayaan adalah kualitas layanan dan *engagement* dengan nasabah. Kami memahami bahwa kerjasama pembiayaan harus didasari adanya kepercayaan dari nasabah bahwa BCAS senantiasa dapat diandalkan untuk mendampingi nasabah dalam mencapai pertumbuhan bisnisnya.

Akselerasi peningkatan *customer base*

Customer base yang besar menjadi kekuatan sebuah Bank dan mendukung keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Dengan pemahaman ini, maka upaya-upaya untuk meningkatkan jumlah nasabah khususnya nasabah produk-produk CASA menjadi fokus kami di sepanjang tahun 2023. Upaya ini diantaranya dilakukan dengan meluncurkan pembukaan rekening *online* pada *mobile banking* BCA Syariah *Mobile* dan kolaborasi dengan berbagai institusi seperti pendidikan, keagamaan maupun perkumpulan untuk pembukaan rekening secara kolektif. Upaya ini juga didukung dengan pemasaran aktif baik melalui jaringan cabang maupun media digital serta program-program promosi.

Untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan transaksi nasabah, BCAS senantiasa mencermati perkembangan kebutuhan nasabah dengan melakukan *benchmark* fitur-fitur pada layanan lembaga jasa keuangan lain dan juga memantau keluhan dan saran yang diberikan nasabah melalui berbagai *channel*. Diluncurkannya fitur pembukaan rekening online ini merupakan salah satu wujud nyata dari upaya kami dalam mendengar kebutuhan nasabah dan memberikan solusinya.

Touch point antara BCAS dengan nasabah terjadi melalui berbagai *channel* baik *channel* fisik maupun digital. Kami memandang, kepuasan nasabah menjadi salah satu faktor kunci dalam meningkatkan *customer base* karena suara nasabah yang mendapatkan layanan prima dari BCAS menjadi aset bagi kami untuk mempertahankan nasabah *existing* maupun mengakuisisi nasabah baru. Untuk itu, kualitas layanan yang prima baik melalui *channel* fisik maupun digital senantiasa menjadi perhatian kami. *Alhamdulillah*, BCAS dapat

meningkatkan kualitas layanan dari waktu ke waktu tercermin dari berbagai indikator kepuasan pelanggan yang diriset oleh berbagai institusi seperti pencapaian BCAS sebagai 3rd Rank Sharia Bank in Satisfaction, Loyalty & Engagement 2023 dari Infobank Satisfaction Loyalty Engagement 2023, 2nd Best Mobile Banking Sharia (KBMI 1) dari Infobank Digital Brand Awards 2023 dan Golden Recognition 5 Consecutive Years in Service Excellence dari Infobank Banking Service Excellence 2023.

Akselerasi adopsi Teknologi Informasi

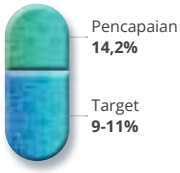
Strategi akselerasi penyaluran pembiayaan dan peningkatan *customer base* harus didukung dengan kapasitas dan kapabilitas infrastruktur TI. Di sepanjang tahun 2023, BCAS melakukan berbagai inisiatif untuk melakukan modernisasi TI diantaranya meningkatkan kapasitas sistem dan jaringan yang kami miliki agar kecepatan transaksi nasabah tetap terjaga.

Untuk mendukung peningkatan penyaluran pembiayaan, BCAS juga melakukan akselerasi dengan melakukan berbagai inisiatif simplifikasi proses dan memanfaatkan teknologi untuk mencapai proses pembiayaan yang lebih efisien dan akurat. Salah satunya dengan mengimplementasikan *Financing Origination System*, yang memungkinkan proses pembiayaan dilakukan melalui aplikasi secara *end to end*. Solusi ini memberikan keuntungan baik dalam hal efisiensi proses, mengurangi penggunaan kertas (*paperless*) dan juga memberikan kemudahan dalam memantau jalannya pemrosesan pembiayaan.

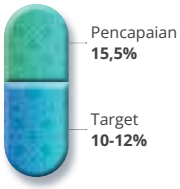
Selain efisiensi proses, efisiensi aktivitas *monitoring* juga menjadi perhatian kami sehingga kami mengembangkan digital *dashboard*. Solusi ini memudahkan proses *monitoring performance* dengan menyajikan data secara cepat dan akurat sehingga bisa menjadi dasar pengambilan keputusan strategis yang tepat.

Dengan menerapkan strategi yang telah dirumuskan, BCAS dapat mencapai kinerja yang membanggakan dan memenuhi seluruh target yang ditetapkan pada RBB. Per Desember 2023, total aset mencapai Rp14,5 triliun tumbuh 19,3% berada di atas target yang ditetapkan yaitu 9-11%. BCAS mencatatkan pertumbuhan DPK mencapai Rp10,9 triliun tumbuh 15,5% berada di atas target yang ditetapkan yaitu 10-12%. Sementara, pembiayaan mencapai Rp9,0 triliun, tumbuh 18,8% berada di atas target yang ditetapkan yaitu 10-12%. BCAS juga berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp153,8 miliar, tumbuh 30,8% berada di atas target yang ditetapkan yaitu 17-19%.

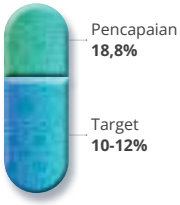
Pertumbuhan Aset



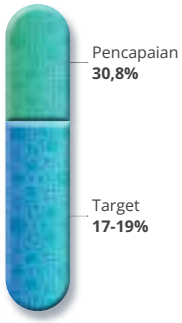
Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga



Pertumbuhan Pembiayaan



Pertumbuhan Laba Bersih Setelah Pajak



Strategi Pengembangan Bisnis dan Penetapan Target 2024

Dalam menghadapi tahun 2024, kami telah merumuskan strategi yang akan dilakukan dalam pengembangan bisnis, menentukan asumsi pertumbuhan, serta menetapkan target pada tahun 2024. Hal ini kami lakukan dengan optimisme bahwa perekonomian dan industri perbankan syariah ke depan masih prospektif namun dengan tetap menjunjung asas kehati-hatian.

Adapun langkah-langkah strategis yang ditempuh BCAS untuk mencapai pertumbuhan bisnis pada tahun 2024 antara lain:

1. **Pengembangan infrastruktur untuk mendukung pengembangan bisnis dan layanan**
   Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan ekspektasi nasabah atau calon nasabah, kami melakukan pengembangan *delivery channel* dengan melengkapi fitur-fitur pada *mobile* banking, *internet banking* dan *channel* lainnya sebagai bentuk dari layanan digital yang dilakukan secara bertahap seperti pembukaan rekening *online* melalui *mobile banking*. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan *customer base* sehingga CASA BCAS meningkat dan *cost of fund* dapat terjaga pada level yang diharapkan.

2. **Penyaluran pembiayaan yang terukur dan *prudent***
   Meskipun suku bunga acuan bank sentral selama tahun 2023 berada pada level yang tinggi, namun demikian nasabah mengharapkan *pricing* pembiayaan yang kompetitif. Kami tetap berkomitmen menjalankan fungsi intermediasi melalui penerapan *prudent banking practice*. Kami menerapkan penyaluran pembiayaan secara *prudent* kepada calon nasabah dengan menggunakan beberapa pertimbangan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

3. **Perluasan kerjasama strategis**
   BCAS melakukan kerjasama *business to business* dengan pihak ketiga, antara lain developer, *property agent*, *dealer*, *showroom*, perusahaan asuransi, Perusahaan sekuritas serta kerjasama dengan perusahaan lainnya untuk mengembangkan bisnis.

4. **Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia**
   BCAS melakukan sinergi dengan induk perusahaan dalam rangka optimalisasi sumber daya manusia dalam hal perekrutan, pelatihan, dan penggunaan SDM dalam satu lingkup Grup BCA, serta berbagai inisiatif sinergi lainnya yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak (*mutual benefit*). Selain itu, kami menerapkan budaya inovasi dan *continuous improvement* untuk mendukung pertumbuhan bisnis berkelanjutan.

Dengan mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan kredit dan DPK yang diberikan oleh regulator, prospek ekonomi ke depan serta strategi bisnis yang akan diterapkan, kami telah merumuskan target pertumbuhan untuk tahun mendatang. Beberapa indikator pertumbuhan yang ditetapkan BCAS di tahun 2024 di antaranya:



Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Struktur modal yang solid akan menjadi landasan bagi BCAS untuk dapat mengantisipasi risiko yang dihadapi dan melakukan ekspansi bisnis. BCAS merencanakan struktur modal dengan mempertimbangkan kebutuhan permodalan yang memadai, yang dipertimbangkan berdasarkan perkembangan ekonomi terkini, pertumbuhan bisnis BCAS saat ini, serta proyeksi pertumbuhan bisnis di masa depan. Kami juga memastikan bahwa struktur modal yang dimiliki telah optimal dan berada pada tingkat yang sehat sesuai ketentuan regulator.

Rencana permodalan dirancang oleh Direksi sebagai bagian dari RBB dan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Kami juga memastikan bahwa tingkat penyediaan modal minimun telah sesuai dengan profil risiko dan dihitung menggunakan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Rincian Struktur Modal

Pada akhir tahun 2023, struktur permodalan BCAS mencapai jumlah sebesar Rp3.082,5 miliar. Komposisi tersebut meliputi modal yang telah disetor sebesar Rp2.255,5 miliar, penambahan modal disetor sebesar Rp70,6 miliar, pendapatan komprehensif lainnya mencapai Rp46,6 miliar, laba ditahan sebesar Rp694,2 miliar, dan cadangan lainnya sebesar Rp16,0 miliar. Terdapat peningkatan modal sebesar Rp151,7 miliar atau 5,2% apabila dibandingkan dengan tahun 2022. Per 31 Desember 2023, rasio kecukupan modal Bank mencapai 34,8% melebihi ketentuan regulator yang sebesar 8,0%.

Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal

Selama tahun 2023, BCAS tidak terlibat dalam ikatan apapun yang bersifat material untuk investasi barang modal. Sehingga tidak terdapat data mengenai informasi berikut itu:
1. Nama pihak yang melakukan ikatan;
2. Tujuan dari ikatan;
3. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut;
4. Mata uang yang denominasi; dan
5. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.

Investasi Barang Modal

Selama tahun 2023, belanja modal yang dilakukan oleh BCA dipaparkan dalam tabel berikut:

Dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Tanah	23,0	-	23,0	-
Bangunan	14,4	2,2	12,2	547,4%
Inventaris	15,9	13,3	2,7	19,9%
Kendaraan bermotor	0,0	0,0	0,0	95,5%
Jumlah investasi	**53,4**	**15,5**	**37,8**	**243,5%**

Sepanjang tahun pelaporan, terdapat penambahan nilai aset sebesar Rp53,4 miliar yang terdiri atas inventasi atas tanah, bangunan, dan barang inventaris. Apabila dibandingkan dengan tahun 2022, terdapat penambahan nilai aset yang signifikan pada tanah dan bangunan serta inventaris. Investasi pada tanah dan bangunan dilakukan untuk kebutuhan renovasi dan relokasi beberapa bangunan BCAS agar dapat beroperasi dan melayani nasabah dengan lebih nyaman. Sementara peningkatan pada inventaris disebabkan aktivitas lanjutan dari tahun sebelumnya untuk penambahan dan peremajaan inventaris kantor untuk proses operasional perusahaan yang lebih optimal.

Informasi dan Fakta Material setelah Tanggal Laporan Akuntan

Tidak terdapat informasi ataupun fakta yang bersifat material terjadi setelah tanggal laporan akuntan, selain sebagaimana yang diungkapkan pada Laporan Keuangan terlampir.

Kebijakan Dividen

Kebijakan BCAS dalam menetapkan pembagian dividen kepada pemegang saham mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa aspek dalam kebijakan tersebut melibatkan:

- Pembagian dividen tunai dapat dilakukan apabila Bank membukukan laba bersih, dengan memperhatikan kondisi dan rencana pengembangan Bank;
- Keputusan mengenai besaran dan pelaksanaan dividen ditentukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan rekomendasi Direksi yang disampaikan kepada Dewan Komisaris; dan
- Dalam kebijakannya, Direksi dapat memutuskan untuk tidak melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham dan menyisihkan laba yang diperoleh untuk tahun buku sebagai dana cadangan maupun laba ditahan.

Pada tahun 2023, RUPS tahunan yang diadakan pada 22 Februari 2023 menetapkan bahwa dari laba bersih sebesar Rp117,5 miliar yang diperoleh pada tahun buku 2022, disisihkan sebanyak Rp2,0 miliar sebagai dana cadangan, sementara sisa dari laba bersih tersebut yang tidak ditentukan penggunaannya akan ditetapkan sebagai laba ditahan.

Untuk periode buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, BCAS tidak melakukan pembagian dividen. Sehingga tidak terdapat informasi mengenai: (i) Total dividen yang dibagikan; (ii) Jumlah dividen kas per saham; (iii) *Payout ratio*; (iv) Tanggal pengumuman dan pembayaran dividen kas.

Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen

Hingga akhir tahun 2023, BCAS tidak memiliki program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen (ESOP/MSOP) sehingga tidak terdapat informasi mengenai: jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya; jangka waktu; persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; serta harga *exercise*.

Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Per 31 Desember 2023, BCAS tidak melakukan penawaran umum atas sahamnya. Sehingga tidak terdapat formasi mengenai:

1. Total perolehan dana;
2. Rencana pengggunaan dana;
3. Rincian penggunaan dana;
4. Saldo dana; dan
5. Tanggal persetujuan RUPS atas perubahan penggunaan dana.

Informasi Material

Sepanjang tahun 2023, tidak terdapat informasi yang bersifat material berkenaan dengan investasi, ekspansi, akuisisi, restrukturisasi utang/modal yang dilakukan oleh BCAS.

Informasi Material Lainnya

BCAS melakukan pemeringkatan atas perusahaan oleh Lembaga pemeringkat PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) dan memberikan hasil yang baik

Rating
idAA+ / Stable (Double A Plus; Stable *Outlook*)

Periode
5 Oktober 2023 – 1 Oktober 2024

Rating diberikan kepada BCAS untuk periode 5 Oktober 2023 – 1 Oktober 2024. Peringkat tersebut diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan Pefindo pada Laporan Keuangan Tidak Diaudit per 30 Juni 2023 dan Laporan Keuangan Audit per 31 Desember 2022.

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Transaksi Afiliasi

Dalam menjalankan operasinya, BCAS terlibat dalam transaksi dengan pihak-pihak berelasi sesuai dengan definisi yang dijelaskan dalam PSAK No.7 (revisi 2015) mengenai "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Semua transaksi dan saldo yang memiliki dampak signifikan dengan pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan syarat normal seperti yang dilakukan dengan pihak yang tidak berelasi, maupun yang tidak, telah dijelaskan secara rinci pada catatan-catatan yang terlampir dalam laporan keuangan. BCAS pun telah memiliki kebijakan transaksi afiliasi dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Surat Keputusan Nomor 057/SK/DIR/2023 tanggal 29 Desember 2023 perihal Kebijakan Tata Kelola PT Bank BCA Syariah.

Pihak terafiliasi BCAS adalah:
- Karyawan, Direktur, Komisaris BCAS.
- Pemegang Saham Utama BCAS, yaitu orang atau perusahaan, baik yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara, yang dikeluarkan oleh BCAS atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.
- Perusahaan yang memiliki satu atau lebih Direktur atau Komisaris yang menjabat/merangkap jabatan sebagai Direktur atau Komisaris BCAS.
- Perusahaan yang dikendalikan oleh Pemegang Saham Utama BCAS.
- Seseorang yang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan maupun keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan anggota Direksi BCAS, anggota Dewan Komisaris BCAS, dan/atau Pemegang Saham Utama BCAS.

Selaku Pemegang Saham Utama BCAS, BCA memiliki 9 (sembilan) Perusahaan Anak yang bukan merupakan Perusahaan Terbuka dan laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan BCA. Adapun Perusahaan Anak BCA, yaitu PT Bank Digital BCA, PT Bank BCA Syariah, PT BCA *Finance*, PT BCA Multi *Finance*, BCA *Finance* Limited, PT Asuransi Umum BCA, PT Asuransi Jiwa BCA, PT BCA Sekuritas, dan PT Central *Capital* Ventura.

Transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Beberapa ketentuan tersebut mungkin berbeda dengan yang diterapkan dalam transaksi dengan pihak yang tidak berelasi. Semua transaksi dan saldo yang melibatkan pihak-pihak berelasi dijelaskan secara rinci dalam catatan-catatan yang terlampir pada laporan keuangan.

Transaksi afiliasi yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan 2023 ini adalah transaksi afiliasi antara BCAS dengan Perusahaan Anak BCA. Sepanjang tahun 2023, transaksi afiliasi berupa penempatan dan/atau simpanan dengan nilai posisi per 31 Desember 2023, yaitu sebagai berikut:

Jenis Transaksi	Pihak Afiliasi	Nilai Transaksi	Sifat Hubungan
Simpanan Dana (berupa giro deposito dan sejenisnya)	PT BCA *Finance*	Rp2.296.438	Pemegang Saham
	PT BCA Sekuritas	Rp30.281.581.537	Dimiliki oleh pemegang saham yang sama
	PT Central *Capital* Ventura	Rp2.259.154.406	Dimiliki oleh pemegang saham yang sama
	PT Asuransi Jiwa BCA	Rp1.065.039.421	Dimiliki oleh pemegang saham yang sama

Prinsip dan Kewajaran Transaksi dengan Pihak Terafiliasi

BCAS selalu mengedepankan prinsip-prinsip berikut dalam menjalankan transaksi dengan pihak terafiliasi:

- Memperhatikan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik yaitu Keterbukaan (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Independensi (Independency), serta Kewajaran (*Fairness*).
- Memastikan kelayakan, kewajaran nilai, dan persyaratan dari transaksi yang bersangkutan (*arm's length transaction*)

Transaksi afiliasi yang telah dilaksanakan oleh BCAS selama tahun 2023 merupakan transaksi yang wajar (*fair and at arm's length transaction*).

Kesesuaian Transaksi Afiliasi dengan Prosedur yang Berlaku

Transaksi dilakukan dengan pihak-pihak terafiliasi dengan pertimbangan, terutama untuk memberikan manfaat optimal bagi BCAS. Dalam pelaksanaannya, seluruh transaksi afiliasi yang terjadi di tahun 2023 telah melalui prosedur yang sesuai dengan kebijakan terkait transaksi afiliasi yang telah ditetapkan BCAS.

Transaksi dan Kebijakan terkait Benturan Kepentingan

Sesuai dengan kode etik BCAS, bahwa proses pengambilan keputusan tidak dipengaruhi pihak lain dan benturan kepentingan apapun. Hasil pengambilan keputusan dan benturan kepentingan yang ada, wajib dicatat dan didokumentasikan sebagai bukti.

Kebijakan BCAS terkait benturan kepentingan yang tercantum dalam Surat Keputusan Direksi Surat Keputusan Nomor 057/SK/DIR/2023 tanggal 29 Desember 2023 perihal Kebijakan Tata Kelola PT Bank BCA Syariah, telah mengatur bahwa seluruh jajaran BCAS harus mengetahui dan menyadari kegiatan-kegiatan yang memungkinkan timbulnya atau terjadinya benturan kepentingan serta wajib menghindarinya. Sebagai salah satu bentuk pengelolaan terhadap potensi benturan kepentingan, BCAS mewajibkan seluruh karyawan golongan 5 ke atas menandatangani *Annual Disclosure*.

a. Kebijakan Benturan Kepentingan bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Ketentuan terkait benturan kepentingan bagi Dewan Komisaris dan Direksi diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan, antara lain mengatur hal-hal berikut:

- Anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang memiliki benturan kepentingan dilarang mengambil keputusan dan/atau tindakan dan/atau terlibat dalam proses pelaksanaan transaksi yang dapat merugikan BCAS atau mengurangi keuntungan BCAS dan wajib mengungkapkan kondisi benturan kepentingan dimaksud dalam tiap keputusan.
- Anggota Direksi tidak berwenang mewakili BCAS dalam hal atau transaksi di mana anggota Direksi yang bersangkutan memiliki benturan kepentingan dengan BCAS.

Kesesuaian Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan dengan Kebijakan yang Berlaku.

Sepanjang tahun 2023, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi BCAS telah melakukan pengelolaan atas potensi terjadinya benturan kepentingan sebagaimana yang telah diatur pada ketentuan yang berlaku, antara lain jika anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi memiliki benturan kepentingan maka anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut tidak ikut dalam pengambilan keputusan.

b. Pihak Independen dalam Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah dituangkan dalam kebijakan internal BCAS, Dalam hal terdapat transaksi yang dilakukan BCAS dengan pihak ketiga yang mengandung perbedaan antara kepentingan ekonomis BCAS dengan kepentingan ekonomis anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama atau Pengendali yang dapat merugikan BCAS, BCAS akan menggunakan nilai wajar dari objek transaksi dan/atau kewajaran transaksi tersebut serta mendapatkan persetujuan terlebih dahulu.

c. Transaksi afiliasi mengandung benturan kepentingan

Tidak ada transaksi afiliasi material yang berpotensi mengandung benturan kepentingan selama tahun 2023.

Perubahan Peraturan dan/atau Perundang-Undangan

Sepanjang tahun 2023, terdapat beberapa peraturan dan/atau perundang-undangan yang dikeluarkan dan/atau mulai diberlakukan pada tahun 2023, yang berkaitan dengan bidang usaha Bank, sehingga memerlukan perhatian Bank sebagai berikut ini:

Nomor Peraturan	Perihal	Dampak Bagi Bank
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/SEOJK.03/2022	Ketahanan dan Keamanan Siber Bagi Bank Umum	Dalam rangka meminimalisir risiko yang timbul oleh ancaman dan insiden siber, Bank menerapkan tata kelola serta manajemen risiko yang baik untuk tetap dapat beroperasi dengan memanfaatkan TI sebagaimana mestinya dengan menjaga ketahanan dan keamanan siber yang dilakukan dengan: melakukan penilaian risiko inheren terkait keamanan siber; 1. melakukan penilaian risiko inheren terkait keamanan siber; 2. melakukan penilaian tingkat maturitas keamanan siber; 3. menetapkan tingkat risiko terkait keamanan siber; 4. melakukan pengujian keamanan siber secara berkala atas keamanan jaringan, sistem, dan data; dan 5. membentuk unit atau fungsi yang bertugas menangani ketahanan dan keamanan siber Bank.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 3 Tahun 2023	Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat	Bank wajib memiliki fungsi atau unit yang melaksanakan literasi dan inklusi keuangan bagi konsumen dan masyarakat. Di BCAS, fungsi Literasi dan Inklusi Keuangan melekat pada Departemen Komunikasi dan Kesekretariatan Perusahaan.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 8 Tahun 2023	Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.	Bank melakukan penyesuaian dan pengkinian terhadap penerapan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan menerapkan program Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. BCAS telah memiliki kebijakan internal berupa Surat Keputusan Perihal Kebijakan Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal PT. Bank BCA Syariah
Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023	Pelindungan Konsumen Bank Indonesia	Bank melakukan penyesuaian terhadap penerapan ketentuan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. BCAS telah melakukan pengkinian terhadap ketentuan internal terkait Perlindungan Konsumen.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2023	Pasar Uang Dan Pasar Valuta Asing	Bank melakukan penyesuaian ketentuan terhadap kegiatan dan transaksi pada Pasar uang berupa: 1. penyesuaian ketentuan internal terkait kode etik pasar, kepemilikan sertifikat tresuri dan tresuri dealer; 2. pendaftaran tresuri dealer ke Bank Indonesia; dan 3. pendaftaran tresuri dealer sebagai anggota pada Asosiasi Profesi di bidang Tresuri dan dan *Self Regulatory Organization* (SRO) di Bidang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023	Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik	Bank melakukan penyesuaian terhadap ketentuan penggunaan jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik berupa pengkinian ketentuan internal terkait Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.

Nomor Peraturan	Perihal	Dampak Bagi Bank
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023	Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum	Bank melakukan penyesuaian terhadap mekanisme, kebijakan dan prosedur Tata Kelola sesuai dengan ketentuan ini.
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/SEOJK.03/2023	Penilaian Tingkat Maturitas Digital Bank Umum.	Dalam rangka meningkatkan kematangan dan mengukur kualitas penyelenggaraan Teknologi Informasi, Bank melakukan Penilaian Tingkat Maturitas Digital secara berkala.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023	Layanan Digital Oleh Bank Umum	Dalam pelaksanaan layanan berbasis Digital, Bank melakukan penyesuaian ketentuan terhadap penerapan Layanan Digital berupa: 1. Melakukan penyesuaian kebijakan, standar, dan prosedur terkait penyelenggaraan Layanan Digital; 2. Bank membentuk unit atau fungsi yang bertugas menangani penyelenggaraan Layanan Digital; dan 3. Bank membentuk fungsi dan memiliki mekanisme penanganan yang mampu merespon pertanyaan dan/ atau menindaklanjuti pengaduan nasabah.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Selama tahun 2023, tidak terdapat standar keuangan, perubahan, atau interpretasi standar akuntansi keuangan yang mengakibatkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Bank dan tidak berdampak secara material pada laporan keuangan baik pada periode berjalan maupun periode sebelumnya.

Pendukung Bisnis

Teknologi Informasi

Indonesia telah dihadapi pada fase kehidupan baru, atau sering disebut dengan pasca COVID-19 semenjak dicabutnya status pandemi di Indonesia. Salah satu perubahan yang signifikan yaitu pola dan gaya hidup masyarakat yang pada saat ini cenderung lebih mengandalkan aspek digital. Hal tersebut berlanjut sebagai dampak dari pandemi yang berlangsung cukup lama. Menghadapi kondisi terkini, BCAS berkomitmen untuk memperkuat infrastruktur Teknologi Informasi (TI) dan bekerja sama dengan BCA guna mendukung transaksi perbankan nasabah secara digital. Pengembangan perbankan digital dilakukan dengan memperkaya fitur transaksi perbankan elektronik dan memastikan kecukupan serta keandalan sistem, sehingga nasabah dapat bertransaksi secara digital dengan aman dan dapat menggunakan seluruh layanan perbankan elektronik yang disediakan oleh BCAS.

Dalam rangka menciptakan nilai tambah dan kontribusi yang signifikan bagi keberlangsungan usaha, BCAS memperkuat strategi pengelolaan TI dengan 3 fokus utama, yaitu:

People

Sepanjang tahun 2023, BCAS melakukan berbagai inisiatif pengembangan TI untuk mengakselerasi pertumbuhan bisnis. Seiring dengan hal tersebut, kami memandang sangat perlu memperkuat kapasitas dan kapabilitas SDM yang mengelola bidang-bidang terkait TI. Berbagai kompetensi SDM sangat diperlukan, mulai dari *programmer*, jaringan, *cyber security*, *monitoring and reporting*, hingga pengujian aplikasi. Melalui BCA Syariah Information Technology Program (BSIT), kami memenuhi kebutuhan profesional di bidang TI dengan tingkat partisipasi yang terus ditingkatkan disesuaikan dengan kebutuhan bisnis BCAS.

BCAS mendorong seluruh karyawan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap teknologi, memanfaatkan solusi digital, dan mengadopsi produk digital dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Sebagai langkah konkret, kami telah menetapkan *Key Performance Indicator* (KPI) *digital experience* yang akan diterapkan secara bertahap kepada setiap karyawan. Karyawan juga didorong untuk menggunakan berbagai *tools* yang telah disediakan untuk membantu fungsi kolaborasi, *monitoring*, hingga *reporting* lebih efisien.

Process

Dari segi proses, kami fokus pada dua aspek utama, yakni simplifikasi proses dan modernisasi/otomasi. Simplifikasi proses dilakukan pada tugas-tugas krusial seperti pembukaan rekening, sementara otomasi diterapkan pada tugas-tugas yang membutuhkan kecepatan dan bersifat repetitif.

Mendukung akselerasi pertumbuhan *customer base*, pada pertengahan tahun 2023 BCAS telah meluncurkan layanan pembukaan rekening *online* melalui BCA Syariah *Mobile* yang memungkinkan proses pembukaan rekening lebih efisien. Pembukaan rekening *online* memanfaatkan teknologi untuk melakukan verifikasi nasabah seperti *face recognition* dan *e-Know Your Customer* (e-KYC).

Sementara untuk mendukung akselerasi penyaluran pembiayaan, BCAS telah mengembangkan dan memiliki *Financing Origination System* yaitu sebuah aplikasi yang memungkinkan pemrosesan pembiayaan berbasis data digital secara *end to end*. Dengan demikian, proses pembiayaan bisa menjadi lebih efisien, meningkat akurasinya, memiliki rekam jejak yang baik, dan memudahkan *reporting* untuk pembuatan keputusan yang lebih tepat.

Technology

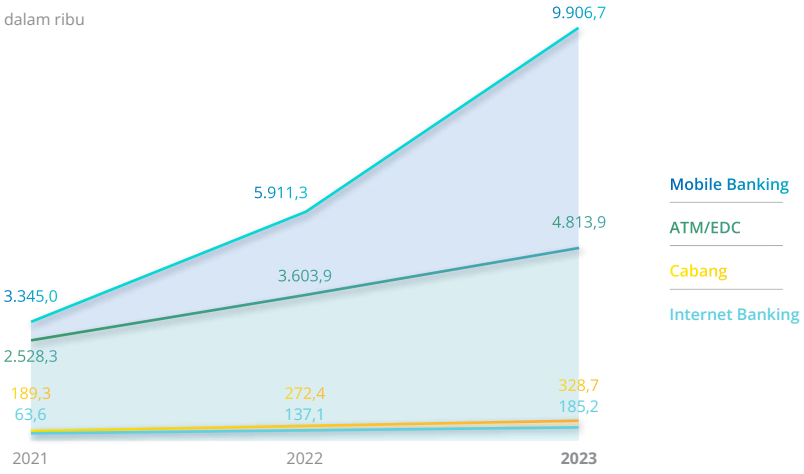
BCAS terus melakukan pengembangan *e-channel* untuk mendukung kemudahan bertransaksi nasabah. Menjawab kebutuhan nasabah, pada BCA Syariah *Mobile* telah diimplementasikan fitur pembukaan rekening *online* sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya. Fitur ini terbukti mampu mendorong pertumbuhan jumlah *new customer* dan *new user* BCA Syariah *Mobile*. Jumlah pengguna BCA Syariah *Mobile* pada tahun 2023 mencapai 373,7 ribu pengguna, mengalami peningkatan sebesar 267,6% apabila dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebanyak 101,7 ribu pengguna.

Jumlah Pengguna *Mobile Banking*



Pertumbuhan transaksi melalui *e-channel* BCAS juga mengalami peningkatan. *mobile banking* mendominasi jumlah transaksi dengan menyumbang sebanyak 65,0% dari total transaksi, mengungguli ATM/EDC, *branch banking*, dan *internet banking* yang masing-masing memiliki proporsi sebesar 31,6%, 2,2%, 1,2% dari total transaksi nasabah di BCAS. Jumlah transaksi melalui *Mobile Banking* sepanjang tahun 2023 adalah sebanyak 9,9 juta, berarti mengalami peningkatan sebesar 67,6% apabila dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebanyak 5,9 juta transaksi.

Jumlah Transaksi Berdasarkan *Channel*



Sejalan dengan upaya regulator dalam mendorong percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional, kami secara aktif terlibat dalam kegiatan untuk memajukan solusi transaksi melalui BI Fast menggunakan BCA Syariah *Mobile*. Kami menyelenggarakan berbagai promo biaya transfer BI Fast dengan pendekatan tematik sepanjang tahun 2023, bertujuan untuk mendorong para nasabah agar lebih mengenal dan meningkatkan penggunaan layanan BI Fast untuk transfer antar bank yang cepat, mudah, ekonomis, dan aman.



BCAS menyadari bahwa dengan meningkatnya transaksi digital maka risiko siber juga akan meningkat. Oleh karenanya, kami berupaya untuk memperkuat sistem keamanan data dan menjalankan manajemen risiko siber TI. Sistem keamanan untuk melindungi basis data BCAS selalu diperbarui secara berkala. Tujuan dari pembaruan ini adalah untuk memastikan bahwa sistem tidak rentan terhadap gangguan dan untuk mengantisipasi potensi ancaman serangan, baik dari pihak eksternal maupun internal. Proses pengujian keamanan data dilakukan melalui *penetration test*, di mana hasilnya dievaluasi untuk memastikan bahwa sistem proteksi yang telah diterapkan dapat terus ditingkatkan. BCAS secara konsisten melakukan *penetration test* setiap kali terdapat pengembangan produk atau fitur baru, dan juga secara rutin dilakukan setiap satu tahun sekali. Komitmen BCAS terhadap keamanan informasi dibuktikan dengan diperolehnya sertifikat ISO 27001:2013. Sertifikat ISO yang diperoleh oleh BCA Syariah meliputi ruang lingkup penyediaan aplikasi program infrastruktur API (*Application Programming Interface*) dan *Host to Host Network*. Dengan diterimanya sertifikasi ISO ini, menandakan komitmen yang kuat oleh BCA Syariah untuk menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) yang sesuai dengan standar SNI ISO/IEC 27001:2013.

Sumber Daya Manusia

Pengelolaan sumber daya manusia sangat penting bagi BCAS mengingat SDM yang berkualitas dan profesional merupakan penggerak agar BCAS dapat mewujudukan kinerja yang diharapkan. BCAS memberikan perhatian tinggi terhadap proses pengelolaan dan pengembangan kompetensi SDM sebagai suatu siklus proses yang menyeluruh, terorganisir, dan berkelanjutan. Proses ini melibatkan langkah-langkah seperti rekrutmen, pengembangan kapasitas, menciptakan iklim kerja yang mendukung, dan manajemen pengakhiran hubungan kerja.

Recruitment Management

Untuk menciptakan individu yang profesional dan kompeten dalam industri perbankan syariah, diperlukan orang-orang yang memiliki nilai pribadi sejalan dengan nilai perusahaan. Oleh karena itu, salah satu fokus kami dalam proses rekrutmen adalah mencari individu dengan nilai-nilai kerja sama, tanggung jawab, integritas, dan profesionalisme yang kuat.

Akselerasi pengembangan bisnis BCAS menekankan pentingnya memiliki sumber daya manusia yang memadai, baik dari segi kapasitas maupun kapabilitas, sehingga diperlukan sistem rekrutmen yang lebih efisien dan akurat. BCAS terus melakukan pengembangan mutu, sistem, dan peningkatan *service level* pada setiap tahap proses rekrutmen seperti penggunaan standar kompetensi, pelaksanaan seleksi (psikotes dan wawancara) secara *online* maupun *offline*, serta kolaborasi dengan pihak ketiga sebagai sumber alternatif.

Standar kompetensi telah diidentifikasi pada setiap jenjang jabatan sehingga kami dapat dengan segera mengidentifikasi kesenjangan/gap kompetensi. Gap ini akan menjadi salah satu pertimbangan dalam keputusan rekrutmen dan bisa menjadi area pengembangan apabila calon karyawan telah bergabung dengan BCAS.

Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, BCAS menyelenggarakan beberapa program di antaranya BCA Syariah Information Technology Program (BSIT) untuk memenuhi kebutuhan tenaga profesional yang kompeten di bidang Teknologi Informasi, serta BCA Syariah Development Program (BDP) untuk memberikan pendidikan dan memenuhi kebutuhan di fungsi pemasaran dan analisis pembiayaan.

BCAS memberikan peluang yang setara kepada setiap individu untuk bergabung dengan BCAS melalui proses perekrutan yang terbuka, adil, dan setara, tanpa membatasi latar belakang *gender*, suku, agama, golongan, atau ras. Penempatan karyawan dalam lingkungan kami didasarkan pada kualitas dan kompetensi individu, serta kebutuhan yang ada di BCAS.

Pengembangan Kompetensi

Dalam upaya meningkatkan kompetensi karyawan, BCAS memastikan 100% karyawan telah mendapatkan pelatihan setiap tahunnya. Pelatihan dapat diperoleh dari berbagai sumber baik internal maupun eksternal. Kami memahami, dengan semakin tingginya adopsi teknologi di berbagai bidang termasuk pelatihan, akses untuk mendapatkan pembelajaran semakin terbuka. Untuk itu, kami memperkenankan karyawan untuk mencari sumber-sumber pelatihan secara mandiri dan kemudian hasilnya dapat didaftarkan oleh karyawan dalam data pelatihannya masing-masing.

BCAS telah memiliki *platform* pelatihan daring yang disebut Syariah Mobile Learning iB (SMILE iB). *Platform* ini memungkinkan karyawan untuk mengakses materi pelatihan dimana pun mereka berada. Selama tahun 2023, jumlah peserta yang melakukan pelatihan pada aplikasi SMILE iB mencapai 2.316 orang, dengan 24 modul materi yang tersedia.

Demi mendorong kinerja setiap karyawan dan meningkatkan kualitas mereka, baik dari aspek keahlian teknis maupun keterampilan interpersonal, BCAS secara kontinu meningkatkan peran atasan untuk memberikan bimbingan kinerja dalam bentuk *coaching, mentoring*. BCAS juga telah menerapkan target jam pengajaran kepada karyawan pada jenjang manajemen menengah hingga atas untuk mendorong budaya mengajar dan *transfer knowledge*.

Penilaian kinerja yang transparan dan adil memegang peranan penting dalam proses pengembangan karyawan. Mekanisme penilaian kinerja disesuaikan dengan jabatan masing-masing karyawan, dan hasilnya digunakan sebagai bahan evaluasi serta panduan untuk membantu karyawan dalam pengembangan karier di BCAS. Kami menjalin sinergi dengan BCA untuk melaksanakan program pengembangan karier melalui pelatihan-pelatihan, sehingga karyawan siap untuk menapaki jenjang karier selanjutnya di lingkungan BCAS.

BCA secara konsisten menerapkan inisiatif transformasi digital melalui berbagai aplikasi digital yang dapat diakses untuk memudahkan proses manajemen kinerja karyawan. BCAS telah memiliki aplikasi *Coaching* yang berguna untuk menyimpan histori pelaksanaan *coaching*. BCAS juga memiliki aplikasi Penilaian Kinerja yang memungkinkan atasan dan karyawan untuk melakukan dan menyimpan histori penilaian kinerja secara digital.

Iklim Kerja yang Kondusif

Kepuasan dan kesejahteraan karyawan merupakan aspek yang sangat penting agar produktivitas karyawan dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Demikian pula, mencapai keseimbangan antara karyawan dan kehidupan pribadi (*work-life balance*) menjadi salah satu kunci utama menciptakan atmosfer kerja yang kondusif, memastikan rasa aman, kenyamanan dan kebahagiaan dalam lingkungan kerja. Untuk memastikan hal tersebut, perlu diciptakannya sebuah iklim kerja yang mendukung.

Upaya yang dilakukan kami untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif mencakup:

- Pemberian remunerasi dan benefit karyawan senantiasa dievaluasi dan ditingkatkan dengan mempertimbangkan prestasi kerja karyawan, kinerja perusahaan, dan daya saing di pasar meliputi penyediaan bonus, tunjangan, fasilitas kesehatan, dan manfaat lainnya.
- Pemberian pembiayaan bagi karyawan dengan margin yang lebih ringan untuk membantu karyawan dalam memenuhi kebutuhan primer berupa hunian maupun kendaraan maupun pemberian pinjaman tanpa margin untuk memenuhi kebutuhan insidentil jangka pendek.
- Penyediaan fasilitas kerja yang memberikan keamanan dan kenyamanan. Selama tahun 2023, BCAS telah melakukan revitalisasi pada di lingkungan Kantor Pusat untuk bisa mengakomodir pertumbuhan jumlah karyawan serta meningkatkan kenyamanan dalam bekerja.
- Penyediaan sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar karyawan seperti sarana ibadah, fasilitas olahraga, ruang laktasi yang memadai untuk digunakan oleh seluruh karyawan.
- Penyediaan dukungan untuk tumbuhnya kegiatan rohani dan berbagai aktivitas ibadah, termasuk sholat berjamaah, kajian baik secara *online* maupun *offline*, serta buka puasa bersama.
- Penyediaan dukungan untuk tumbuhnya berbagai komunitas seni, olahraga, dan hobi yang dinaungi melalui wadah yang disebut Badan Koordinasi Olah Raga dan Seni (Bakorseni).

BCAS sangat mendorong budaya inovasi dan *continuous improvement*. Hal ini diwujudkan dengan pelaksanaan program *Community of Practice* (CoP), Kaizen dan *Quality Meeting* (QM). CoP merupakan sebuah wadah dimana setiap karyawan dari seluruh jenjang jabatan dapat berbagi pengetahuan atau informasi positif yang dapat membantu pelaksanaan tugas sehari-hari. Kaizen adalah suatu program untuk mendorong semua insan BCAS mengkritisi proses kerja yang ada dan menemukan inovasi-inovasi untuk membuat proses kerja lebih efisien. Sementara QM mendorong setiap manajemen tingkat menengah hingga atas untuk secara konsisten melakukan pembahasan isu-isu penting secara komprehensif dan mencari solusi bersama. CoP, Kaizen dan QM dikemas dan dikompetisikan di tingkat nasional dalam sebuah program bertajuk Beberes dimana setiap tahunnya akan ditentukan pemenang dari tingkat cabang maupun Kantor Pusat. Selain itu, kami juga memiliki program BCA Syariah Innovation Award (BIA) dimana dalam BIA seluruh insan BCAS bebas mengusulkan ide-ide inovasi yang dapat diterapkan dalam produk atau layanan BCAS maupun untuk efisiensi proses operasional. BIA dikompetisikan setiap tahunnya dan pemenangnya akan diikutsertakan dalam kompetisi tingkat nasional Grup BCA.

Termination Management

BCAS meyakini bahwa menjaga hubungan yang terbuka dan penuh kepercayaan antara manajemen dan karyawan merupakan suatu keharusan, termasuk bagi karyawan yang telah menyelesaikan masa tugas di BCAS. Maka dari itu, BCAS memastikan bahwa telah memberikan hak sesuai dengan peraturan yang berlaku kepada karyawan yang mengakhiri hubungan kerja, baik karena pensiun maupun pengunduran diri. Untuk karyawan yang akan memasuki masa pensiun, kami menyelenggarakan program pelatihan persiapan pensiun melalui kerja sama dengan BCA dan beberapa lembaga pelatihan.

Praktik Manajemen Risiko

Pemaparan informasi risiko dilakukan dengan merujuk pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2020, yang diterbitkan pada tanggal 1 Juli 2020, yang mengatur mengenai Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Risiko Kredit

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah

Dalam jutaan Rupiah

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2023			
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah			
		Sumatra	Jawa	Indonesia Bagian Timur	Total
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	4.060.419	-	4.060.419
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	670.837	-	670.837
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	52.689	-	52.689
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	23.189	634.370	12.167	669.726
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	4.959	183.634	1.471	190.064
7	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan	-	254.391	-	254.391
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro. Usaha Kecil dan PortoFolio Ritel	20.953	281.490	4.580	307.023
9	Tagihan Kepada Korporasi	388.178	7.792.137	4.612	8.184.927
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-
11	Aset Lainnya	-	365.907	-	365.907
Total		**437.279**	**14.295.874**	**22.829**	**14.755.982**

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak

Dalam jutaan Rupiah

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2023				
		Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak				
		< 1 Thn	>1 Thn sd 3 Thn	>3 Thn sd 5 Thn	> 5 Thn	Non Kontraktual
1	Tagihan Kepada Pemerintah	2.502.105	709.028	321.149	528.136	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	137.702	35.710	45.433	451.991	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	29.773	-	22.916	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	3.387	22.570	85.970	557.798	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	48.886	5.417	66.209	69.551	-

	31 Desember 2022			
	Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah			
	Sumatra	Jawa	Indonesia Bagian Timur	Total
	-	3.430.809	-	3.430.809
	-	655.990	-	655.990
	-	-	-	-
	-	244.396	-	244.396
	8.661	283.914	1.281	293.855
	3.063	241.353	1.533	245.949
	-	234.276	-	234.276
	8.009	179.554	2.829	190.393
	189.610	6.907.051	165.744	7.262.405
	-	50.063	-	50.063
	-	410.488	-	410.488
	209.343	**12.637.896**	**171.386**	**13.018.625**

Keterangan:
- Wilayah I: Jabodetabek
- Wilayah II: Non Jabodetabek (Pulau Jawa)
- Wilayah III: Sumatra

		31 Desember 2022					
		Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak					
	Total	< 1 Thn	>1 Thn sd 3 Thn	>3 Thn sd 5 Thn	> 5 Thn	Non Kontraktual	Total
	4.060.419	3.430.809	-	-	-	-	3.430.809
	670.837	286.368	39.103	4.868	325.652	-	655.990
	-	-	-	-	-	-	-
	52.689	244.396	-	-	-	-	244.396
	669.726	4.425	20.427	42.889	226.114	-	293.855
	190.064	51.655	10.864	53.503	129.927	-	245.949

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2023					
		Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak					
		< 1 Thn	>1 Thn sd 3 Thn	>3 Thn sd 5 Thn	> 5 Thn	Non Kontraktual	
7	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan	5.766	41.073	61.384	146.168	-	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan PortoFolio Ritel	210.140	36.619	39.839	20.425	-	
9	Tagihan Kepada Korporasi	4.080.512	1.829.151	1.182.504	1.092.761	-	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-		-	-	
11	Aset Lainnya	365.907	-	-	-	-	
	Total	**7.384.178**	**2.679.568**	**1.825.404**	**2.866.831**	**-**	

Pengungkapan Tagihan Bersih berdasarkan Sektor Ekonomi

Dalam jutaan Rupiah

No	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank	
31 Desember 2023						
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-	-	-	-	
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	
3	Industri Pengolahan	-	-	-	-	
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	-	425.000	-	-	
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	-	-	-	-	
6	Konstruksi	-	26.991	-	-	
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	-	-	-	1.011	
8	Pengangkutan dan Pergudangan	-	-	-	-	
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	-	-	-	
10	Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	4.060.419	188.910	-	51.678	
12	Real Estat	-	-	-	-	
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	-	--	-	-	
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	-	175	-	-	
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	
16	Pendidikan	-	29.760	-	-	
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	-	-	-	-	

	31 Desember 2022					
	Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak					
Total	< 1 Thn	>1 Thn sd 3 Thn	>3 Thn sd 5 Thn	> 5 Thn	Non Kontraktual	Total
254.391	7.622	43.025	53.679	129.950	-	234.276
307.023	114.244	45.471	19.046	11.631	-	190.393
8.184.927	4.442.546	553.631	942.601	1.323.627	-	7.262.405
-	50.063	-	-	-	-	50.063
365.907	410.488	-	-	-	-	410.488
14.755.982	**9.042.617**	**712.521**	**1.116.587**	**2.146.901**	**-**	**13.018.625**

Kredit Beragun Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pegawai / Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro. Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan Kepada Korporasi	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
-	-	241.489	40.171	1.158.440	-	-
-	-	-	35.175	366.663	-	-
-	19.560	-	23.337	1.753.769	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	9	1.513	-	-
-	46.000	-	3.718	311.641	-	-
-	-	-	59.886	1.094.274	-	-
-	63.953	-	58.002	1.143.688	-	-
380	-	-	2.277	215.628	-	-
-	-	-	4.920	67	-	-
-	-	-	8.949	640.700	-	-
-	43.552	-	-	328.906	-	-
-	-	-	586	7.458	-	-
-	-	-	3.111	660.433	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	60.140	-	-
366	-	-	12	9.638	-	-

No	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank	
18	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	-	-	-	-	
19	Aktivitas Jasa Lainnya	-	-	-	-	
20	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	-	-	-	-	
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	
22	Rumah Tangga	-	-	-	-	
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	-	-	-	-	
24	Lainnya	-	-	-	-	
	Total	**4.060.419**	**670.837**	**-**	**52.689**	
31 Desember 2022						
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-	-	-	-	
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	
3	Industri Pengolahan	-	-	-	-	
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	-	289.286	-	-	
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	-	-	-	-	
6	Konstruksi	-	9.779	-	-	
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	-	-	-	-	
8	Pengangkutan dan Pergudangan	-	-	-	-	
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	-	-	-	
10	Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	3.430.809	325.471	-	244.396	
12	Real Estat	-	-	-	-	
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	-	-	-	-	
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	-	-	-	-	
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	
16	Pendidikan	-	-	-	-	
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	-	31.455	-	-	
18	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	-	-	-	-	
19	Aktivitas Jasa Lainnya	-	-	-	-	

	Kredit Beragun Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pegawai / Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro. Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan Kepada Korporasi	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	363	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	668.980	12.902	12.902	13.381	250.471	-	-
	-	-	-	53.128	181.496	-	-
	-	-	-	-	-	-	365.907
	669.726	**254.391**	**254.391**	**307.023**	**8.184.927**	**-**	**365.907**
	-	-	218.867	54.528	1.314.249	-	-
	-	-	-	83	48.057	-	-
	-	9.446	-	15.282	1.386.393	50.063	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	34	-	-	-
	-	46.951	-	5.998	246.968	-	-
	4.198	-	-	41.232	1.169.349	-	-
	-	16.098	-	2.052	362.406	-	-
	25	-	-	1.903	19.324	-	-
	-	-	-	1,004	36.117	-	-
	-	-	-	8.847	1.717.744		
	-	158.618	-	-	147.808	-	-
	-	-	-	1.231	2.679	-	-
	-	-	-	2.678	736.785	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	343	22.149	-	-
	342	-	-	41	10.946	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	841	-	-	-

No	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank
20	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	-	-	-	-
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-
22	Rumah Tangga	-	-	-	-
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	-	-	-	-
24	Lainnya	-	-	-	-
	Total	**3.430.809**	**655.990**	**-**	**244.396**

Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah

Dalam jutaan Rupiah

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2023			
		Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah			
		Sumatra	Jawa	Indonesia Bagian Timur	Total
1	Tagihan	437.582	15.813.154	22.829	16.273.565
2	Tagihan Yang Mengalami Penurunan Nilai (*impaired*)	7.745	635.160	-	642.905
	a. Belum jatuh tempo	7.745	584.543	-	592.288
	b. Telah jatuh tempo	-	50.617	-	50.617
3	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) – Individual	3.690	336.620	-	340.310
4	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) – Kolektif	3.812	128.496	29	132.337
5	Tagihan Yang Dihapus Buku	60.766	28.413	-	89.179

Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi

Dalam jutaan Rupiah

No	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan Yang Mengalami Penurunan Nilai	
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo
31 Desember 2023				
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.487.401	1.441	-
2	Pertambangan dan Penggalian	259.906	4	-
3	Industri Pengolahan	3.556.995	360.073	50.617
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	533.434	-	-

	Kredit Beragun Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pegawai / Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro. Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan Kepada Korporasi	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	289.291	14.836	15.409	12.661	51.394	-	-
	-	-	-	41.636	37	-	-
	-	-	-	-	-	-	410.488
	293.855	**245.949**	**234.276**	**190.393**	**7.262.405**	**50.063**	**410.488**

	31 Desember 2023			
	Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah			
	Wilayah 1	Wilayah 2	Wilayah 3	Total
	5.144.747	1.302.408	6.207	6.453.362
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	2.926	30.975	59	33.960
	3.220	77.081	-	80.301

Keterangan
Wilayah I : Jabodetabek
Wilayah II : Non Jabodetabek (pulau jawa)
Wilayah III : Sumatra

	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif	Tagihan Yang dihapus Buku
	67	12.271	-
	0	1.521	-
	153.543	8.666	-
	-	5.321	-

No	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan Yang Mengalami Penurunan Nilai	
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	1.522	9	-
6	Konstruksi	1.936.879	70.328	-
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	385.274	3.408	-
8	Pengangkutan dan Pergudangan	596.028	89.452	-
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	78.765	-	-
10	Informasi dan Komunikasi	35.823	-	-
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	4.340.169	-	-
12	Real Estat	443.814	49.925	-
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	8.017	-	-
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	557.665	641	-
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.093.935	-	-
16	Pendidikan	61.166	-	-
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	10.010	12	-
18	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	-	-	-
19	Aktivitas Jasa Lainnya	62.147	-	-
20	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan Bar	-	-	-
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-
22	Rumah Tangga	770.644	16.996	-
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	53.970	-	-
24	Lainnya	-	-	-
Total		**16.273.565**	**592.288**	**50.617**
31 Desember 2022				
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	501.668	-	-
2	Pertambangan dan Penggalian	177.144	-	-
3	Industri Pengolahan	399.804	-	-
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	41.436	-	-
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	34	-	-
6	Konstruksi	83.506	-	-
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	70.877	-	-
8	Pengangkutan dan Pergudangan	191.871	-	-
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	6.303	-	-
10	Informasi dan Komunikasi	32.824	-	-
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	2.347.386	-	-
12	Real Estat	97.880	-	-

	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif	Tagihan Yang dihapus Buku
	1	5	-
	1.180	39.815	-
	69.632	14.052	14.573
	60.978	3.140	6.104
	-	602	-
	-	344	-
	-	13.232	-
	48.494	21.275	-
	-	76	–
	629	6.538	17.440
	-	-	-
	-	460	-
	1	16	-
	-	-	-
	-	611	51.063
	-	-	-
	-	-	-
	5.785	4.346	-
	-	185	-
	-	-	-
	340.310	**132.476**	**89.179**
	-	4.887	-
	-	1.761	-
	-	4.010	-
	-	411	-
	-	4	-
	-	819	-
	-	749	26.000
	-	1.891	1.628
	-	177	6.117
	-	323	-
	-	8.957	44.468
	-	946	2.088

No	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan Yang Mengalami Penurunan Nilai	
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	1.896	-	-
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	139.897	-	-
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.980.580	-	-
16	Pendidikan	24.327	-	-
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	6.322	-	-
18	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	-	-	-
19	Aktivitas Jasa Lainnya	39	-	-
20	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan Bar	-	-	-
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-
22	Rumah Tangga	309.116	-	-
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	40.453	-	-
24	Lainnya	•	-	-
Total		**6.453.362**		**-**

Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Dalam jutaan Rupiah

No	Keterangan	31 Desember 2023	
		CKPN Individual	CKPN Kolektif
1	Saldo Awal CKPN	4.602	29.214
2	Pembentukan (Pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net)	41.744	(14.664)
	a. Pembentukan CKPN pada periode berjalan	57.948	31.523
	b. Pemulihan CKPN pada periode berjalan	(16.205)	(46.187)
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode berjalan	(561)	-
4	Pembentukan (Pemulihan) Lainnya pada periode berjalan	-	-
Saldo akhir CKPN		**45.785**	**14.550**

	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif	Tagihan Yang dihapus Buku
	-	559	-
	-	2.196	-
	-	-	-
	-	231	-
	-	66	-
	-	-	-
	-	6	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	5.583	-
	-	385	-
	-	-	-
	-	**33.960**	**80.301**

	31 Desember 2022	
	CKPN Individual	CKPN Kolektif
	-	16.602
	11.445	21.878
	11.445	21.878
	-	-
	(856)	-
	-	-
	10.589	**38.481**

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat

Dalam jutaan Rupiah

No	Kategori Portofolio	Lembaga Pemeringkat	Tagihan Bersih			
			Peringkat Jangka Panjang			
		Standard and Poo	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d. BBB-
		Fitch Rating	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3
		PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+ (idn) s.d AA- (idn)	A+(idn) s.d A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB- (idn)
		PT. Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d idA-	idBBB+ s.d idBB-
31 Desember 2023						
1	Tagihan Kepada Pemerintah		-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik		-	589.350	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional		-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank		-	28.762	–	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal		-	-	-	-
6	Pembiayaan Berangun Rumah Tinggal		-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan		-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel		-	-	-	-
9	Tagihan Kepada Korporasi		-	664.359	907.618	65.428
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo		-	-	-	-
11	Aset Lainnya		-	-	-	-
Total						

	Peringkat Jangka Panjang								
	BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3	Tanpa Peringkat	Total
	BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-	F1+ s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3		
	Ba1 s.d Ba3	B1 s.d B3	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3		
	BB+(idn) s.d BB-(idn)	B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)		
	Id BB+ s.d idBB-	Id B+ s.d idB-	Kurang dari idB-	idA1	idA2	idA4	Kurang dari idA4		
	-	-	-	-	-	-	-	4.060.419	4.060.419
	-	-	35.525	-	-	-	-	45.962	670.837
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	23.926	52.689
	-	-	-	-	-	-	-	669.726	669.726
	-	-	-	-	-	-	-	190.064	190.064
	-	-	-	-	-	-	-	254.391	254.391
	-	-	-	-	-	-	-	307.023	307.023
	-	-	-	-	-	-	-	6.547.522	8.184.927
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	365.907	365.907
									14.755.982

No	Kategori Portofolio	Lembaga Pemeringkat	Tagihan Bersih				
			Peringkat Jangka Panjang				
		Standard and Poo	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d. BBB-	
		Fitch Rating	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3	
		PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+ (idn) s.d AA- (idn)	A+(idn) s.d A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB- (idn)	
		PT. Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d idA-	idBBB+ s.d idBB-	
31 Desember 2022							
1	Tagihan Kepada Pemerintah		-	-	-	-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik		-	507.770	106.986	-	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional		-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank		-	14.396	-	-	
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal		-	-	-	-	
6	Pembiayaan Berangun Rumah Tinggal		-	-	-	-	
7	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan		-	-	-	-	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel		-	-	-	-	
9	Tagihan Kepada Korporasi		-	264.139	935.892	425	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo		-	-	-	-	
11	Aset Lainnya		-	-	-	-	
Total							

				Peringkat Jangka Panjang					
	BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3	Tanpa Peringkat	Total
	BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-	F1+ s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3		
	Ba1 s.d Ba3	B1 s.d B3	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3		
	BB+(idn) s.d BB-(idn)	B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)		
	Id BB+ s.d idBB-	Id B+ s.d idB-	Kurang dari idB-	idA1	idA2	idA4	Kurang dari idA4		
	-	-	-	-	-	-	-	3.430.809	3.430.809
	-	-	-	-	-	-	-	41.234	655.990
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	230.000	244.396
	-	-	-	-	-	-	-	293.855	293.855
	-	-	-	-	-	-	-	245.949	245.949
	-	-	-	-	-	-	-	234.276	234.276
	-	-	-	-	-	-	-	190.393	190.393
	-	-	-	-	-	-	-	6.061.949	7.262.405
	-	-	-	-	-	-	-	50.063	50.063
	-	-	-	-	-	-	-	410.488	410.488
									13.018.625

Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)

Transaksi Lindung Nilai Syariah *Over the Counter*

Dalam jutaan Rupiah

No	Variabel yang Mendasari	31 Desember 2023						
		Nilai Notional			Tagihan Lindung Nilai Syariah	Kewajiban Lindung Nilai Syariah	Tagihan Bersih sebelum MRK	
		≤ 1 Tahun	> 1 Tahun - ≤ 5 Tahun	> 5 Tahun				
1	*Shariah Compliant Profit Rate Swap*	-	-	-	-	-	-	
2	*Shariah Compliant Foreign Currency Swap*	-	-	-	-	-	-	
3	Lainnya	-	-	-	-	-	-	
Total		-	-	-	-	-	-	

Transaksi *Repo*

Dalam jutaan Rupiah

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2023				
		Tagihan Bersih	Nilai MRK	Tagihan Bersih Setelah MRK	ATMR	
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	
Total		-	-	-	-	

	31 Desember 2022									
	MRK	Tagihan Bersih setelah MRK	Nilai Notional			Tagihan Lindung Nilai Syariah	Kewajiban Lindung Nilai Syariah	Tagihan Bersih sebelum MRK	MRK	Tagihan Bersih setelah MRK
			≤ 1 Tahun	> 1 Tahun - ≤ 5 Tahun	> 5 Tahun					
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	31 Desember 2022			
	Tagihan Bersih	Nilai MRK	Tagihan Bersih Setelah MRK	ATMR
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
		-	-	-

Transaksi *Reverse Repo*

Dalam jutaan Rupiah

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2023			
		Tagihan Bersih	Nilai MRK	Tagihan Bersih Setelah MRK	ATMR Setelah MRK
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-
Total		**-**	**-**	**-**	**-**

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit

Dalam jutaan Rupiah

No	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit					
		0%	20%	25%	35%	40%	45%
31 Desember 2023							
A	**Eksposur Neraca**						
1	Tagihan Kepada Pemerintah	4.060.419	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	589.350	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	28.762	-	-	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	106.642	244.217	318.668	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan PortoFolio Ritel	-	-	-	-	-	-
9	Tagihan Kepada Korporasi	-	664.359	-	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
11	Aset Lainnya	365.907	-	-	-	-	-
Total Eksposur Neraca		-	-	-	-	-	-
B	**Eskposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif**						
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	142.716	-	-	-	-	-

	31 Desember 2022			
	Tagihan Bersih	Nilai MRK	Tagihan Bersih Setelah MRK	ATMR Setelah MRK
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

						ATMR	Beban Modal
	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
	-	-	-	-	-	-	-
	45.962	-	-	35.525	-	194.139	-
	-	-	-	-	-	-	-
	23.926	-	-	-	-	17.716	-
	-	-	-	-	-	193.916	-
	-	-	190.064	-	-	190.064	-
	254.391	-	-	-	-	127.195	-
	-	193.551	-	-	-	145.163	-
	907.618	-	6.001.577	45.000	-	6.655.757	-
	-	-	-	-		-	-
	-	-	323.096	-	-	323.095	-
	-	-	-	-	-		-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-

No	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit					
		0%	20%	25%	35%	40%	45%
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	414	1.000	-	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan PortoFolio Ritel	10.000	9 .075	-	-	-	-
9	Tagihan Kepada Korporasi	996.701	524.831	-	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
Total Eksposur TRA		-	-	-	-	-	-
C	**Eksposur Akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)**						
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan PortoFolio Ritel	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
Total Eksposur *Counterparty Credit Risk*		5.576.156	1.924.019	244.217	318.668	-	-
31 Desember 2022							
A	**Eksposur Neraca**						
1	Tagihan Kepada Pemerintah	3.430.809	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	507.770	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	244.396	-	-	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	53.740	79.767	160.347	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan PortoFolio Ritel	-	-	-	-	-	-
9	Tagihan Kepada Korporasi	-	264.139	-	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
11	Aset Lainnya	410.488	-	-	-	-	-

	50%	75%	100%	150%	Lainnya	ATMR	Beban Modal
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	40	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	50	-	-	1 .399	-
	-	-	75.683	-	-	180.649	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	1.231.898	193.551	6.590.469	80.525	-	8.029.133	-
	-	-	-	-	-	-	-
	148.220	-	-	-	-	175.664	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	48.879.25	-
	-	-	-	-	-	85.641	-
	-	-	245.949	-	-	245.949	-
	234.286	-	-	-	-	117.138	--
	-	189.062	-	-	-	92.750	-
	935.892	-	5.902.456	-	-	6.049.981	-
	-	-	50.063	-	-	50.063	-
	-	-	-	-	-	341.267	-

No	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit					
		0%	20%	25%	35%	40%	45%
Total Eksposur Neraca		-	-	-	-	-	-
B	**Eskposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif**						
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasiona	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	1	-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan PortoFolio Ritel	-	-	-	-	-	-
9	Tagihan Kepada Korporasi	28.500	6.576	-	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	842.726	565.426	-	-	-	-
Total Eksposur TRA		-	-	-	-	-	-
C	**Eksposur Akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)**						
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan PortoFolio Ritel	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
Total Eksposur *Counterparty Credit Risk*		**4.712.523**	**1.642.047**	**79.767**	**160.347**	**-**	**-**

	50%	75%	100%	150%	Lainnya	ATMR	Beban Modal
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	0	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	16	-	-	998	-
	-	-	46.833	-	-	159.918	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
****	**1.318.389**	**189.062**	**6.245.317**	**-**	**-**	**7.368.248**	**-**

Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit

Dalam jutaan Rupiah

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2023					
		Tagihan Bersih	Bagian Yang Dijamin Dengan				Bagian Yang Tidak Dijamin
			Agunan	Garansi	Asuransi Pembiayaan	Lainnya	
A	**Eksposur Neraca**						
1	Tagihan Kepada Pemerintah	4.060.419	-	-	-	-	4.060.419
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	670.837	-	-	-	-	670.837
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	52.689	-	-	-	-	52.689
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	669.526	-	-	-	-	669.526
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	190.064	-	-	-	-	190.064
7	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan	254.391	-	-	-	-	254.391
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan PortoFolio Ritel	305.158	111.606,68	-	-	-	193.551
9	Tagihan Kepada Korporasi	8.004.278	385.724,47	-	-	-	7.618.554
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
11	Aset Lainnya	365.907	-	-	-	-	365.907
Total Eksposur Neraca		**14.573.268**	**4 97.331**	**-**	**-**	**-**	**14.075.937**
B	**Eskposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif**						
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	200	-	-	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan PortoFolio Ritel	1.865	-	-	-	-	-
9	Tagihan Kepada Korporasi	180.649	-	-	-	-	-

	31 Desember 2022					
	Tagihan Bersih	Tagihan Bersih				Bagian Yang Tidak Dijamin
		Agunan	Garansi	Asuransi Permbiayaan	Lainnya	
	3.430.809	-	-	-	-	-
	655.990	-	-	-	-	387.976
	-	-	-	-	-	-
	244.396	-	-	-	-	-
	293.854	4.000.00	-	-	-	290.170
	245.949	-	-	-	-	245.949
	234.276	-	-	-	-	234.276
	189.062	104.898.54	-	-	-	123.515
	7.102.487	628.941.74	-	-	-	5.573.773
	50.063	-	-	-	-	50.063
	410.488	-	-	-	-	-
	12.857.375	**737.840.27**	**-**	**-**	**-**	**6.905.722**
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	1.331	-	-	-	-	-
	159.918	-	-	-	-	-

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2023					
		Tagihan Bersih	Bagian Yang Dijamin Dengan				Bagian Yang Tidak Dijamin
			Agunan	Garansi	Asuransi Pembiayaan	Lainnya	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
Total Eskposur TRA		**182.714**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C	**Eksposur Akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)**						
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan PortoFolio Ritel	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
Total Eksposur *Counterparty Credit Risk*		-	-	-	-	-	-

Pengungkapan Transaksi Sekuritasi Aset

No	Eksposur Sekuritasi	31 Desember 2023					
		Nilai Aset Yang Disekuritasi	Nilai Aset yang Disekuritasi yang Mengalami Penurunan Nilai		Laba/ Rugi dari Aktivitas Sekuritasi	ATMR	Pengurangan Modal
			Telah Jatuh Tempo	Belum Jatuh Tempo			
1	Bank bertindak sebagai Kreditur Asal - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-	-	-
2	Bank bertindak sebagai Penyedia Kredit pendukung a. Fasilitas Penanggung risiko pertama - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-	-	-
	b. Fasilitas Penanggung risiko kedua - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-	-	-

	31 Desember 2022					
	Tagihan Bersih	Tagihan Bersih				Bagian Yang Tidak Dijamin
		Agunan	Garansi	Asuransi Permbiayaan	Lainnya	
	-	-	-	-	-	-
	161.250	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Keterangan:
Bagian Yang Tidak Dijamin = Tagihan Bersih - (Agunan + Garansi + Asuransi Pembiayaan + Lainnya)

	31 Desember 2022					
	Nilai Aset Yang Disekuritasi	Nilai Aset yang Disekuritasi yang Mengalami Penurunan Nilai		Laba/ Rugi dari Aktivitas Sekuritasi	ATMR	Pengurangan Modal
		Telah Jatuh Tempo	Belum Jatuh Tempo			
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

No	Eksposur Sekuritasi	31 Desember 2023					
		Nilai Aset Yang Disekuritasi	Nilai Aset yang Disekuritasi yang Mengalami Penurunan Nilai		Laba/ Rugi dari Aktivitas Sekuritasi	ATMR	Pengurangan Modal
			Telah Jatuh Tempo	Belum Jatuh Tempo			
3	Bank bertindak sebagai Penyedia Fasilitas Fasilitas - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-	-	-
4	Bank bertindak sebagai Penyedia Fasilitas Jasa - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-	-	-
5	Bank bertindak sebagai Penyedia Bank Kustodian - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-	-	-
6	Bank bertindak sebagai Pemodal						
	a. Senior trache - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-	-	-
	b. Senior trache - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-	-	-

Pengungkapan Ringkasan Aktivitas Transaksi Sekuritisasi Aset dalam hal BUS Bertindak sebagai Kreditur Asal

No	Underlying Asset	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
		Nilai Aset Yang Disekuritisasi	Keuntungan (kerugian) Penjualan	Nilai Aset Yang Disekuritisasi	Keuntungan (kerugian) Penjualan
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan PortoFolio Ritel	-	-	-	-
9	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-
Total		**-**	**-**	**-**	**-**

	31 Desember 2022					
	Nilai Aset Yang Disekuritasi	Nilai Aset yang Disekuritasi yang Mengalami Penurunan Nilai		Laba/ Rugi dari Aktivitas Sekuritasi	ATMR	Pengurangan Modal
		Telah Jatuh Tempo	Belum Jatuh Tempo			
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Pengungkapan Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar

Eksposur Aset di Neraca

Dalam jutaan Rupiah

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2023			31 Desember 2022		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
1	Tagihan Kepada Pemerintah	4.060.419	-	-	3.430.809	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	670.837	194.138	194.138	655.990	175.664	175.664
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	52.689	17.716	17.716	244.396	48.879	48.879
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	669.526	193.916	193.916	293.855	86.811	85.641
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	190.064	190.064	190.064	245.949	245.949	245.949

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2023			31 Desember 2022		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
7	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan	254.391	127.195	127.195	234.276	117.138	117.138
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan PortoFolio Ritel	305.158	228.868	145.163	190.393	141.796	92.750
9	Tagihan Kepada Korporasi	8.004.278	7.041.482	6.655.757	7.262.405	6.423.230	6.049.981
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	50.063	50.063	50.063
11	Aset Lainnya	365.907	-	323.096	410.488	-	341.267
Total		**14.573.267**	**7.993.379**	**7.847.045**	**13.018.625**	**7.289.625**	**7.207.332**

Eksposur Kewajiban Komitmen/ Kontijensi pada Transaksi Rekening Administratif

Dalam jutaan Rupiah

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2023			31 Desember 2022		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	200	40	40	1	0	0
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan PortoFolio Ritel	1.865	1.399	1.399	1.331	998	998
9	Tagihan Kepada Korporasi	180.649	180.649	180.649	159.918	159.918	159,918
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
Total		**182.714**	**182.088**	**182.088**	**161.250**	**160.916**	**160.916**

Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2023			31 Desember 2022		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
Total		-	-	-	-	-	-

Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Setelmen (Settlement Risk)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2023			31 Desember 2022		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
1	*Delivery versus payment*	-	-	-	-	-	-
	a. Beban Modal 8% (5-15 hari)	-	-	-	-	-	-
	b. Beban Modal 50% (16-30 hari)	-	-	-	-	-	-
	c. Beban Modal 75% (31-45 hari)	-	-	-	-	-	-
	d. Beban Modal 100% (lebih dari 45 hari)	-	-	-	-	-	-
2	*Non – Delivery versus payment*	-	-	-	-	-	-

Eksposur Sekuritisasi

No	Jenis Transaksi	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
		Faktor Pengurang Modal	ATMR Setelah MRK	Faktor Pengurang Modal	ATMR Setelah MRK
1	Fasilitas Pembiayaan Pendukung yang memenuhi persyaratan	-	-	-	-
2	Fasilitas Pembiayaan Pendukung yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
3	Fasilitas Pembiayaan yang memenuhi persyaratan	-	-	-	-
4	Fasilitas Pembiayaan yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
5	Pembelian Efek Beragun Aset yang memenuhi persyaratan	-	-	-	-
6	Pembelian Efek Beragun Aset yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
7	Eksposur Sekuritisasi yang tidak mencakup dalam ketentuan yang mengatur mengenai prinsip - prinsip kehati - hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum	-	-	-	-
Total		**-**	**-**	**-**	**-**

Total Pengukuran Risiko Kredit

Dalam jutaan Rupiah

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Total ATMR Risiko Kredit	8.029.133	6.337.115
2	Total Faktor Pengurang Modal	-	-

Risiko Pasar

Pengungkapan Risiko Pasar Menggunakan Metode Standar

No	Jenis Risiko	31 Desember 2023				31 Desember 2022			
		Bank		Konsolidasian		Bank		Konsolidasian	
		Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR
1	Risiko *benchmark* Suku Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-
	a. Risiko Spesifik	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Risiko Umum	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Risiko Nilai Tukar	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Risiko Ekuitas *)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Risiko Komoditas *)	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Risiko Likuiditas

Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah dan Valuta Asing

Profil Maturitas Rupiah

Dalam jutaan Rupiah

No	Pos - Pos	31 Desember 2023					
		Saldo	Jatuh Tempo*)				
			≤ 1 bulan	> 1 bulan s.d. 3 bulan	> 3 bulan s.d. 6 bulan	6 bulan s.d. 12 bulan	> 12 bulan
NERACA							
A	**Aset**	**14.471.734**	**2.782.159**	**716.042**	**1.764.590**	**1.623.751**	**7.585.192**
1	Kas	42.811	42.811	-	-	-	-
2	Penempatan pada Bank Indonesia	1.093.935	1.093.935	-	-	-	-
3	Penempatan pada Bank Lain	28.762	28.762	-	-	-	-
4	Surat berharga dimiliki	4.288.943	1.410.434	231.523	212.508	353.885	2.080.593
5	Piutang *Murabahah* (*gross*)	1.654.583	909	3.755	13.042	45.599	1.591.278
6	Piutang Saham	-	-	-	-	-	-
7	Piutang *Istishna'*	-	-	-	-	-	-
8	Piutang *qardh*	13.486	8.465	2.366	90	485	2.080
9	Pembiayaan *Mudharabah*	760.307	151	20.010	31.131	162.979	546.036
10	Pembiayaan *Musyarakah*	5.988.631	196.178	453.189	1.500.797	1.044.610	2.793.857
11	*Ijarah*	596.546	27	5.167	4.847	16.018	570.487
12	Aset Lainnya	3.730	487	32	2.175	175	861
B	**Liabilitas**	**14.471.734**	**10.241.002**	**448.100**	**153.369**	**335.058**	**3.294.205**
1	Dana Pihak Ketiga	10.949.450	9.984.595	448.100	153.369	335.058	28.328
	a. Giro *Wadiah*	2.076.138	2.076.138	-	-	-	-
	b. Deposito *Mudharabah*	6.776.761	5.840.974	448.030	153.369	334.388	-
	c. Tabungan *Wadiah*	1.159.440	1.159.440	-	-	-	-
	d. Tabungan *Mudharabah*	937.111	908.043	70	-	670	28.328
	e. Lainnya	-	-	-	-	-	-
2	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-
3	Liabilitas kepada Bank lain	66.407	66.407	-	-	-	-
4	Surat Berharga yang Diterbitkan	190.000	190.000	-	-	-	-
5	Pembiayaan yang Diterima	-	-	-	-	-	-
6	Liabilitas Lainnya	3.265.877	-	-	-	-	3.265.877

	31 Desember 2022					
	Saldo	Jatuh Tempo*)				
		≤ 1 bulan	> 1 bulan s.d. 3 bulan	> 3 bulan s.d. 6 bulan	6 bulan s.d. 12 bulan	> 12 bulan
	12.671.669	**3.474.518**	**479.916**	**1.290.367**	**1.534.557**	**5.892.311**
	69.221	69.221	-	-	-	-
	946.012	946.012	-	-	-	-
	14.396	14.396	-	-	-	-
	4.110.855	2.105.911	-	100.311	88.264	1.816.369
	1.348.575	473	2.952	9.136	41.397	1.294.617
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	30.846	1.326	15.711	12.715	241	853
	508.124	1.325	48.088	6.030	40.997	401.684
	5.297.352	335.666	413.134	1.148.640	1.363.333	2.036.579
	391.921	151	24	3.333	248	388.164
	(45.633)	36	7	202	77	(45.955)
	12.671.669	**8.964.066**	**348.368**	**58.945**	**106.059**	**3.194.231**
	9.481.633	8.958.178	348.368	58.945	106.059	10.083
	2.103.955	2.103.955	-	-	-	-
	5.821.627	5.319.184	345.364	55.169	101.910	-
	760.343	760.343	-	-	-	-
	795.708	774.696	3.004	3.776	4.149	10.083
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	5.888	5.888	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	3.184.148	-	-	-	-	3.184.148

No	Pos - Pos	31 Desember 2023					
		Saldo	Jatuh Tempo*)				
			≤ 1 bulan	> 1 bulan s.d. 3 bulan	> 3 bulan s.d. 6 bulan	6 bulan s.d. 12 bulan	> 12 bulan
C	**Rekening Administratif**	**76.033**	**17.513**	**27.304**	**15.728**	**14.488**	**1.000**
1	Kewajiban Komitmen						
2	Kewajiban Kontijensi	76.033	17.513	27.304	15.728	14.488	1.000
D	**Selisih (A-B)**	**-**	**(7.458.843)**	**267.942**	**1.611.221**	**1.288.693**	**4.290.987**

Profil Maturitas Valuta Asing

No	Pos - Pos	31 Desember 2023					
		Saldo	Jatuh Tempo*)				
			≤ 1 bulan	> 1 bulan s.d. 3 bulan	> 3 bulan s.d. 6 bulan	6 bulan s.d. 12 bulan	> 12 bulan
NERACA							
A	**Aset**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1	Kas	-	-	-	-	-	-
2	Penempatan pada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-
3	Penempatan pada Bank Lain	-	-	-	-	-	-
4	Surat berharga dimiliki	-	-	-	-	-	-
5	Piutang *Murabahah* (*gross*)	-	-	-	-	-	-
6	Piutang Saham	-	-	-	-	-	-
7	Piutang *Istishna'*	-	-	-	-	-	-
8	Piutang *qardh*	-	-	-	-	-	-
9	Pembiayaan *Mudharabah*	-	-	-	-	-	-
10	Pembiayaan *Musyarakah*	-	-	-	-	-	-
11	*Ijarah*	-	-	-	-	-	-
12	Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-
B	**Liabilitas**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1	Dana Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-
	a. Giro *Wadiah*	-	-	-	-	-	-
	b. ÒDeposito *Mudharabah*	-	-	-	-	-	-
	c. Tabungan *Wadiah*	-	-	-	-	-	-
	d. Tabungan *Mudharabah*	-	-	-	-	-	-
	e. Lainnya	-	-	-	-	-	-
2	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-
3	Liabilitas kepada Bank lain	-	-	-	-	-	-

	31 Desember 2022					
	Saldo	Jatuh Tempo*)				
		≤ 1 bulan	> 1 bulan s.d. 3 bulan	> 3 bulan s.d. 6 bulan	6 bulan s.d. 12 bulan	> 12 bulan
	46.849	**23.615**	**4.758**	**11.605**	**6.871**	**-**
	46.849	23.615	4.758	11.605	6.871	-
	-	**(5.489.548)**	**131.548**	**1.231.422**	**1.428.498**	**2.698.080**

	31 Desember 2022					
	Saldo	Jatuh Tempo*)				
		≤ 1 bulan	> 1 bulan s.d. 3 bulan	> 3 bulan s.d. 6 bulan	6 bulan s.d. 12 bulan	> 12 bulan
	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

No	Pos - Pos	31 Desember 2023					
		Saldo	Jatuh Tempo*)				
			≤ 1 bulan	> 1 bulan s.d. 3 bulan	> 3 bulan s.d. 6 bulan	6 bulan s.d. 12 bulan	> 12 bulan
4	Surat Berharga yang Diterbitkan	-	-	-	-	-	-
5	Pembiayaan yang Diterima	-	-	-	-	-	-
6	Liabilitas Lainnya	-	-	-	-	-	-
C	**Rekening Administratif**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1	Kewajiban Komitmen	-	-	-	-	-	-
2	Kewajiban Kontijensi	-	-	-	-	-	-
D	**Selisih (A-B)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Risiko Operasional

Dalam jutaan Rupiah

No	Pendekatan Yang Digunakan	31 Desember 2023		
		Pendekatan Bruto (rata-rata 3 tahun terakhir)	Beban Modal	ATMR
1	Pendekatan Indikator Standar	506.359	75.954	949.422
Total		**506.359**	**75.954**	**949.422**

	31 Desember 2022					
	Saldo	Jatuh Tempo*)				
		≤ 1 bulan	> 1 bulan s.d. 3 bulan	> 3 bulan s.d. 6 bulan	6 bulan s.d. 12 bulan	> 12 bulan
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

	31 Desember 2022		
	Pendekatan Bruto (rata-rata 3 tahun terakhir)	Beban Modal	ATMR
	414.880	62.232	777.900
	414.880	**62.232**	**777.900**

Aspek Pemasaran & Pangsa Pasar

Aspek Pemasaran

Pemasaran merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan di tengah persaingan yang semakin kompetitif. Sepanjang tahun 2023, kegiatan pemasaran BCAS dilakukan secara *hybrid* melalui kombinasi pemanfaatan *digital platform* dan interaksi langsung dengan nasabah untuk mempromosikan berbagai produk dan layanan ke nasabah. BCAS mengoptimalkan penggunaan *digital media* dan *social media* dalam kegiatan pemasaran dan edukasi nasabah agar BCAS bisa menjadi semakin dekat dengan nasabah dan semakin cepat dalam memberikan informasi maupun merespon kebutuhan nasabah.

Tahun 2023 ditandai dengan diluncurkannya layanan pembukaan rekening *online* melalui BCA Syariah *Mobile*. Berbagai program akuisisi dan *loyalty* kami jalankan di sepanjang tahun 2023 dengan tujuan menarik *new customer* melalui layanan pembukaan rekening *online* dan juga memberikan *experience* yang menarik bagi *customer existing* dengan menawarkan program-program transaksi di *merchant-merchant* kerja sama kami.





Meskipun pemasaran digital tumbuh secara pesat, pemasaran *offline* tetap berperan signifikan. Kegiatan pemasaran *offline* di antaranya dilakukan dengan pemasaran *below the line*. Selama tahun 2023, BCAS aktif berpartisipasi dalam berbagai *event below the line* yang diselenggarakan oleh Grup BCA, regulator, serta *event* yang diinisiasi oleh seluruh cabang BCAS bekerja sama dengan instansi atau komunitas di sekitar wilayah cabang.





Pemasaran yang bertanggung jawab juga menjadi perhatian kami. Untuk meningkatkan kenyamanan nasabah dalam menggunakan produk dan layanan BCAS, kami senantiasa memberikan informasi atas produk dan layanan secara lengkap dan mudah dipahami. Sosialisasi atas informasi produk dan layanan dilakukan melalui petugas BCAS secara langsung, brosur, *website*, maupun media sosial. Kami terus menyempurnakan *corporate website* di bcasyariah.co.id sebagai salah satu sumber informasi utama untuk produk, layanan, dan aktivitas korporasi.

Isu terkait keamanan siber menjadi semakin marak seiring dengan tingginya aktivitas digital masyarakat baik untuk kebutuhan komunikasi maupun transaksi. Untuk itu informasi dan edukasi mengenai juga menjadi salah satu fokus kami. Secara berkala kami mengedukasi masyarakat mengenai kemananan data pribadi dan keamanan transaksi baik melalui *social media*, *website* maupun webinar-webinar. Kami berharap, masyarakat semakin bijak dalam memanfaatkan berbagai solusi digital dan semakin memahami pentingnya menjaga keamanan data pribadi agar bisa menggunakan solusi transaksi digital kami dengan optimal, nyaman dan aman.

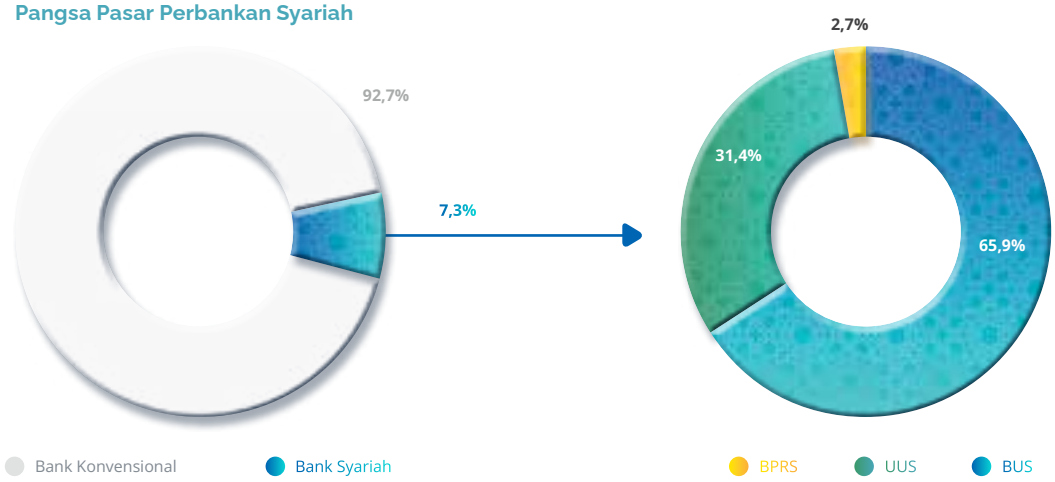




Pangsa Pasar

Per 30 November 2023, pangsa pasar perbankan syariah sebesar 7,3% terhadap perbankan nasional. Angka ini menunjukkan pertumbuhan dibandingkan akhir tahun 2022 yang sebesar 6,8%. Bank Umum Syariah (BUS) memberikan kontribusi dominan yaitu sebesar 65,9% dari total keseluruhan aset perbankan syariah.

Pangsa Pasar Perbankan Syariah



Pangsa Pasar Berdasarkan Aset

Hingga akhir tahun 2023, BCAS memiliki total aset sebesar Rp14.471,7 miliar dengan pangsa pasar sebesar 2,6% dari total aset BUS*.

Pangsa Pasar Berdasarkan Dana Pihak Ketiga (DPK)

Sepanjang tahun 2023, BCAS membukukan DPK pada angka Rp10.949,5 miliar dengan pangsa pasar sebesar 2,5% terhadap total DPK BUS.*

Pangsa Pasar Berdasarkan Pembiayaan

Apabila dilihat dari segi pembiayaan, BCAS mencatat pembiayaan sebesar Rp9.013,6 miliar pada akhir tahun 2023 dengan pangsa pasar sebesar 2,5% terhadap total pembiayaan BUS*.

Posisi Bank dalam Industri Perbankan Syariah

BCAS berhasil memperoleh kinerja secara umum yang cukup baik apabila dibandingkan dengan kinerja perbankan Syariah nasional, khususnya BUS. Berikut merupakan tabel perbandingan antara kinerja BCAS dengan kinerja BUS:

Uraian	BCAS	BUS*
Pertumbuhan aset	14,2%	10,1%
Pertumbuhan pembiayaan	18,8%	13,8%
Pertumbuhan DPK	15,5%	5,6%
CAR	34,8%	25,6%
ROA	1,5%	2,0%
BOPO	78,6%	77,1%
FDR	82,3%	83,2%
NPF Gross	1,04%	2,20%
NPF Net	0,00%	0,72&

*Data BUS per 30 November 2023

Prospek Usaha Tahun 2024

Berdasarkan paparan International Monetary Fund (IMF) pada Oktober 2023, terdapat pandangan baru dalam perbankan global yang menekankan mengenai risiko yang muncul akibat suku bunga yang lebih tinggi dan berlangsung lebih lama. Disampaikan bahwa terdapat sinyal awal kenaikan suku bunga telah mengungkap kerentanan di beberapa bank dan banyak lainnya yang akan terpapar dampak negatif oleh periode kebijakan moneter yang ketat dan berkepanjangan. Bank-bank sentral diprediksi akan mempertahankan suku bunga yang lebih tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama sebagai upaya untuk mengendalikan inflasi yang tetap tinggi di berbagai negara.

Dalam dua tahun terakhir dan berpotensi berlanjut di tahun 2024, sejumlah risiko diperkirakan akan menyertai sektor perbankan global, termasuk perbankan Indonesia. Risiko tersebut mencakup potensi kenaikan suku bunga acuan, risiko dari ketegangan geopolitik, risiko lonjakan harga minyak, risiko krisis biaya hidup, dan risiko fragmentasi atau divergensi ekonomi global. Hasil dari akumulasi dan kombinasi krisis-krisis tersebut dapat mengakibatkan pelemahan ekonomi yang berdampak pada sektor keuangan, termasuk perbankan. Selain itu, kemungkinan akan terjadi peningkatan rasio pinjaman bermasalah (*non-performing loan*/NPL) karena para pengusaha menghadapi kesulitan likuiditas dan profitabilitas. Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi pelaku perbankan untuk secara disiplin dan berkala meningkatkan alat pengujian stres (*tools of stress test*), dengan fokus khusus pada dampak risiko-risiko yang telah disebutkan sebelumnya, terutama risiko kenaikan suku bunga acuan dan risiko stagflasi ekonomi. Di sisi lain, kehadiran agenda politik pada tahun 2024 yaitu salah satunya pemilihan umum di Indonesia, juga perlu menjadi pertimbangan utama dalam merumuskan prospek usaha. Hal tersebut perlu dipertimbangkan karena hasil dari pemilihan presiden mungkin akan mengubah dinamika perekonomian ke depan.

Menghadapi periode suku bunga global yang terus tinggi dan diprediksi akan berlanjut, sektor perbankan Indonesia tetap solid. Kekuatan ini didukung oleh tingkat permodalan (*Capital Adequacy Ratio*/CAR) yang tinggi, mencapai 27,41%, jauh di atas rata-rata CAR negara lain yang umumnya berada di bawah 20%. Tingginya tingkat CAR ini mencerminkan kebijakan prudensial yang konservatif, yang secara signifikan membantu mengatasi ketidakpastian dalam situasi global yang masih tidak stabil. Industri perbankan nasional tetap menunjukkan ketahanan dan kemampuan untuk menanggulangi berbagai potensi risiko di tengah dinamika perekonomian global. Meski demikian, para pelaku industri perbankan perlu tetap hati-hati agar industri perbankan Indonesia dapat tetap berjalan dengan baik. BCAS optimis perekonomian Indonesia dan perbankan nasional masih prospektif dalam jangka panjang.

Perbankan syariah masih menghadapi tantangan tingkat literasi perbankan syariah yang rendah. Naum kami percaya, dimana ada tantangan tentunya selalu ada peluang. Optimisme ini didukung oleh pangsa pasar perbankan syariah yang terus menunjukkan tren pertumbuhan. Faktor-faktor seperti demografi Indonesia yang memiliki populasi umat Muslim terbesar di dunia, potensi pertumbuhan industri halal baik secara global maupun lokal, keseriusan pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat pasar halal global dunia serta peran signifikan UMKM dalam perekonomian Indonesia menjadi peluang bagi dunia usaha dan sektor perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah juga memiliki layanan dan produk yang menjadi ciri khas perbankan syariah yang jika didukung dengan adopsi teknologi akan menjadi kekuatan bagi perbankan syariah untuk tumbuh dan memenuhi kebutuhan nasabah yang makin kompleks dan spesifik. Pengembangan produk baik dana dan pembiayaan serta memaksimalkan

pengembangan infrastruktur digital akan memudahkan akses masyarakat menjangkau layanan dan produk syariah. Kondisi ini semakin memperkuat optimisme kami bahwa prospek usaha perbankan syariah ke depan sangat terbuka.

BCAS akan memanfaatkan momentum pertumbuhan untuk terus mencatatkan kinerja yang berkualitas dan berkesinambungan. Untuk itu, BCAS telah merumuskan strategi tahun 2024 dan akan menerapkannya secara konsiten. Secara umum strategi kami akan fokus kepada 4 (empat) area pengembangan yaitu *solid performance* & *sustainable growth*, *operational excellence*, *human capital development*, serta *good corporate governance implementation*.

Informasi Kelangsungan Usaha

Dalam rangka menjaga kelangsungan usaha, BCAS telah memiliki Rencana Korporasi (*Corporate* Plan) sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan regulator. Rencana Korporasi menjadi panduan agar BCAS beroperasi sesuai dengan arah strategis jangka panjang. Rencana Korporasi diterjemahkan dalam RBB dan strategi-strategi jangka pendek yang menjadi panduan bagi seluruh lini organisasi untuk bekerja bersama mencapai kinerja yang diharapkan. Strategi bisnis terus disesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan sektor perbankan, mempertimbangkan kebijakan dan peraturan yang berlaku, serta mempertimbangkan arah strategi BCA sebagai perusahaan induk. Selain itu, BCAS didukung posisi permodalan dan likuiditas yang solid, yang menjadi dasar untuk kelangsungan usaha jangka panjang.

BCAS menjamin keandalan sistem perbankannya, termasuk kecukupan kapasitas dan kapabilitas TI serta sumber daya manusia terkait TI. Pemanfaatan teknologi informasi dalam aktivitas bisnis dan operasional BCAS terus menjadi fokus manajemen ke depan, sehingga BCAS dapat menjadi lebih responsif dalam menyediakan produk dan layanan kepada nasabah dan di saat yang sama dapat menjalankan proses operasional dengan lebih efisien. Cepatnya perkembangan teknologi juga membawa ancaman khususnya terkait keamanan informasi. Untuk itu, BCAS senantiasa mengevaluasi dan memperbarui sistem keamanan yang dimiliki untuk mengantisipasi kejahatan siber dan memastikan nasabah dapat bertransaksi dengan aman. Kami juga berupaya untuk terus mengembangkan sistem TI yang kami miliki dan menyesuaikannya dengan standar global, di antaranya dengan memperoleh ISO certificate untuk Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI).

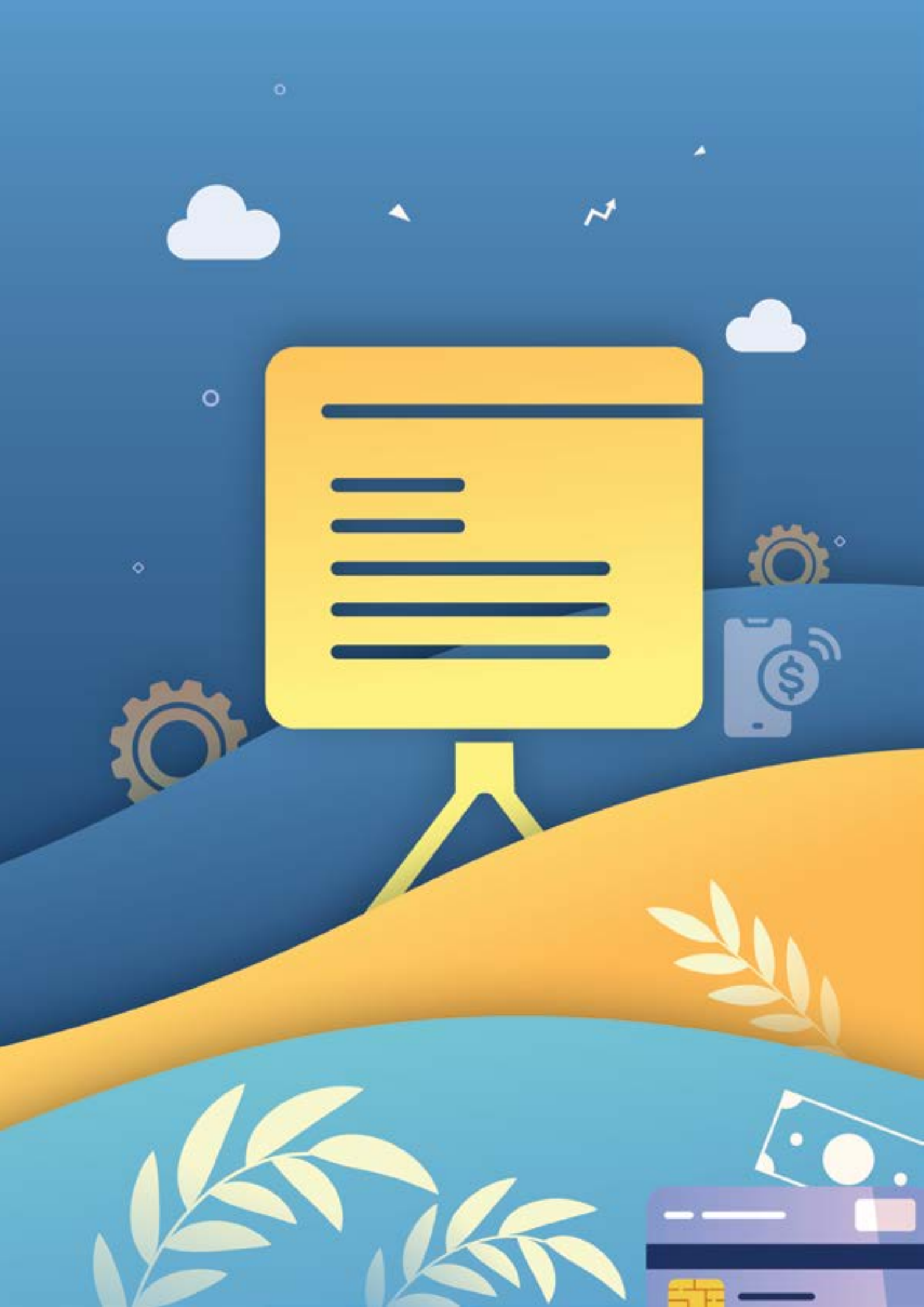
Kami juga mengimplementasikan *Business Continuity Plan* (BCP) yang dirancang untuk mengantisipasi gangguan yang dapat mempengaruhi proses operasional perbankan. Rencana ini didukung oleh infrastruktur yang memadai dan SDM yang berkualitas tinggi. Evaluasi terhadap kecukupan dan keandalan *hardware*, *software*, infrastruktur jaringan, dan fasilitas pendukung lainnya secara rutin dilakukan oleh BCAS. Kami juga secara terus menerus mengevaluasi dan memperbaharui pedoman serta prosedur untuk menghadapi situasi darurat untuk memastikan fungsi utama bisnis tetap berjalan. Secara berkala, BCAS mengadakan pelatihan dan simulasi untuk memastikan kesiapan BCAS serta segenap manajemen dan karyawan dalam menghadapi bencana khususnya gempa dan kebakaran dan kemungkinan munculnya kejadian-kejadian lain yang dapat mengganggu kegiatan usaha.

Mempertimbangkan beberapa faktor sebagai berikut:
- Potensi pasar halal nasional yang luas;
- Perekonomian nasional dan industri perbankan nasional yang menunjukkan resiliensi dan penguatan di tengah kondisi ketidakpastian perekonomian global;
- *Market share* industri perbankan syariah terhadap perbankan nasional menunjukkan tren meningkat;
- Posisi BCAS dalam industri perbankan syariah, khususnya BUS;
- Kondisi keuangan BCAS saat ini yang sehat serta peningkatan kinerja keuangan yang berkualitas dan berkesinambungan dari tahun ke tahun;
- Tingkat Kesehatan Bank;
- Kecukupan rencana kelangsungan usaha (*Business Continuity Plan*) BCAS.

Kami menilai BCAS mampu untuk melanjutkan kelangsungan usaha di masa yang akan datang, tidak ada hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha BCAS. BCAS akan tetap berhati-hati dan waspada dalam menjalankan operasional bisnisnya serta senantiasa mencermati perkembangan prekonomian baik global maupun nasional. Kami optimis bahwa BCAS dapat terus menunjukkan pertumbuhan yang berkualitas dan berkesinambungan.

Tata Kelola Perusahaan





Daftar Isi

165	Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
168	Rapat Umum Pemegang Saham
171	Dewan Komisaris
178	Komisaris Independen
179	Direksi
186	Dewan Pengawas Syariah
192	Rapat Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, dan Rapat Gabungan
196	Hubungan Afiliasi
196	Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi
198	Kebijakan Remunerasi
202	Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris
216	Komite–Komite Eksekutif Direksi
227	Sekretaris Perusahaan
233	Fungsi Audit Internal
238	Akuntan Publik (Audit Eksternal)
239	Konsultan dan/atau Penasihat
240	Fungsi Kepatuhan
243	Penerapan Manajemen Risiko
247	Sistem Pengendalian Internal
249	Penerapan Strategi *Anti-fraud*
251	*Whistleblowing System*
254	Kebijakan Antikorupsi dan Pengendalian Gratifikasi
255	Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan
256	Permasalahan Hukum
256	Perkara Penting dan Sanksi Administratif
257	Kode Etik
258	Budaya Perusahaan
259	Aksi Korporasi
259	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyedia Dana Besar (*Large Exposure*)
260	Rencana Strategis
261	Transparansi Kondisi Keuangan dan Nonkeuangan yang Belum Diungkapkan di Laporan Lainnya
262	Pendapatan Non-halal dan Penggunaannya
262	Penerapan Tata Kelola Terintegrasi
264	Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Penilaian Tata Kelola
274	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
282	Indeks Pemenuhan Rekomendasi Tata Kelola

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Dalam rangka membangun industri perbankan syariah yang sehat dan tangguh, diperlukan pelaksanaan *good corporate governance* (GCG) bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah secara efektif yang memenuhi prinsip syariah (sharia compliance). Pelaksanaan GCG merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan *stakeholder*s dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah.

Penerapan GCG menjadi kunci kebangkitan Perusahaan pasca pandemi COVID-19, seiring dengan kondisi ekonomi global yang berangsur pulih dari pandemi, perusahaan-perusahaan di Indonesia perlu memastikan prinsip tata kelola yang baik dalam kegiatan bisnisnya. Hal tersebut diharapkan dapat membangun sumber pertumbuhan ekonomi baru sehingga mempercepat pemulihan ekonomi dan memitigasi risiko yang muncul. BCAS berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG sesuai dengan peraturan yang berlaku dan praktik terbaik skala internasional.

Dasar dan Tujuan Penerapan GCG

Penerapan prinsip-prinsip GCG bertujuan untuk mendukung kelangsungan usaha hingga mencapai visi dan misi Perusahaan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Pelaksanaan GCG di BCAS mengacu pada ketentuan regulator di antaranya dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), undang-undang, ketentuan internal, serta *best practice*s yang berlaku dan diteladani dalam skala nasional maupun internasional seperti ASEAN *Corporate Governance* Scorecard (ACGS).

Struktur dan Implementasi GCG di BCAS

Implementasi GCG di BCAS dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan utama (*governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*), berlandaskan prinsip-prinsip GCG serta berpedoman pada komitmen perusahaan.

Penerapan Prinsip GCG Di BCA Syariah	
GCG *Principles*	• Transparansi • Akuntabilitas • Responsibilitas/tanggung jawab • Independensi • Kewajaran
BCA Syariah *Commitment*	• Visi • Misi • Tata Nilai • Pedoman/*Charter* • Kode Etik
Governance Structure	• Organ utama (RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, DPS) • Organ Pendukung (Komite Dewan Komisaris, Komite Eksekutif, Sekretaris Perusahaan, Departemen Manajemen Resiko, Departemen Kepatuhan, Satuan Kerja Audit Internal)
Governance Process	• Komunikasi dengan pemangku kepentingan • Perumusan kebijakan & pengambilan keputusan • Penilaian & evaluasi
Governance Outcome	• Kinerja perusahaan bertumbuh positif • Tingkat Kesehatan Bank • Penilaian lembaga pemeringkat kredibel untuk kinerja perusahaan dan/atau praktik GCG BCAS • Penghargaan dari berbagai *reputable organization*

a. *Governance structure*
BCAS telah memiliki struktur GCG yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga mencerminkan prinsip GCG yang efektif, memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas, serta tercipta *control*, *check*, and *balance*. Struktur GCG BCAS adalah sebagai berikut:

Struktur *Good Corporate Governance* BCAS



b. *Governance process*
Komitmen BCAS dalam menerapkan GCG diwujudkan antara lain melalui kebijakan internal yang ada terkait GCG sebagai sarana pemenuhan kepatuhan BCAS terhadap regulasi serta sarana pendukung infrastruktur dan implementasi penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Beberapa kebijakan internal BCAS terkait penerapan GCG antara lain:

- Anggaran Dasar Perusahaan.
- Kode Etik Perusahaan.
- Surat Keputusan Direksi No. 026/SK/ DIR/2020 tanggal 28 Agustus 2020 perihal Penerapan *Whistleblowing System* di PT Bank BCA Syariah tahun 2020.
- Surat Keputusan Direksi No. 057/SK/DIR/2023 tanggal 29 Desember 2023 perihal Kebijakan Tata Kelola PT. Bank BCA Syariah
- Surat Keputusan Direksi No. 011/SK/ DIR/2020 perihal Pedoman Penerapan Strategi *Anti Fraud* PT Bank BCA Syariah Tahun 2020.
- Surat Keputusan Direksi No. 070/SK/ DIR/2019 tanggal 25 November 2019 perihal Kebijakan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme PT Bank BCA Syariah Tahun 2019.
- Surat Keputusan Direksi No. 043/SK/ DIR/2019 tanggal 28 Mei 2019 perihal Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*).
- Surat Keputusan Direksi No. 002/SK/ DIR/2018 tanggal 4 Januari 2018 perihal Revisi Pedoman Umum Fungsi Kepatuhan.
- Tata nilai BCA Syariah berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 11/SK/DIR/2017 perihal Kebijakan Visi, Misi dan Tata Nilai BCAS dan Surat Keputusan Direksi No. 051/SK/ DIR/2017 perihal Pengembangan Kebijakan Visi, Misi dan Tata Nilai BCA Syariah.

c. *Governance outcome*
Hasil proses penerapan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola BCAS dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap kepengurusan perusahaan, pengendalian internal, pengelolaan risiko, hingga berkontribusi positif dalam meningkatkan kinerja operasional dan keuangan guna menjaga kelangsungan usaha.

Self-Assessment Pelaksanaan GCG

BCAS melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) atas pelaksanaan GCG sesuai dengan SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Departemen Kepatuhan melakukan pengumpulan data dan informasi yang relevan untuk keperluan *self-assessment* terkait kecukupan dan efektivitas penerapan GCG. Penilaian dilakukan secara komprehensif meliputi 3 aspek tata kelola BCAS yakni Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*), Proses Tata Kelola (*Governance Process*), dan Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*). Penilaian diukur dari 11 faktor sebagai berikut:



1. Pelaksanaan tugas & tanggung jawab Dewan Komisaris
2. Pelaksanaan tugas & tanggung jawab Direksi
3. Kelengkapan & pelaksanaan tugas Komite
4. Pelaksanaan tugas & tanggung jawab DPS
5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana & penyaluran pembiayaan, serta pelayanan jasa
6. Penanganan benturan kepentingan
7. Penerapan fungsi kepatuhan bank
8. Penerapan fungsi audit internal
9. Penerapan fungsi audit eksternal
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG, dan pelaporan internal

Hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) tahun 2023 pada semester I dan II adalah sebagai berikut:

Periode	Peringkat	Definisi Peringkat
Semester I	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
Semester II	1	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang sangat memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.

Rapat Umum Pemegang Saham

Dalam struktur GCG BCAS, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menjadi organ tertinggi yang berfungsi sebagai sarana bagi para pemegang saham untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. RUPS memiliki wewenang tersendiri, yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau Anggaran Dasar BCAS. RUPS merupakan sarana bagi pemegang saham untuk mengetahui dan mengevaluasi kegiatan dan pengelolaan BCAS. RUPS terdiri dari RUPS Tahunan (RUPS Tahunan) dan RUPS Luar Biasa (RUPSLB), kecuali dengan tegas ditentukan lain.

Hak Pemegang Saham

Hak-hak Pemegang Saham BCAS antara lain:
a. Mengusulkan mata acara RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Memperoleh publikasi materi RUPS selambat-lambatnya dalam 28 hari sebelum RUPS dilaksanakan.
c. Memperoleh kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat di tiap pembahasan mata acara RUPS.
d. Mengubah isi Anggaran Dasar.
e. Memberikan suara dalam RUPS.
f. Mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah.
g. Menetapkan tugas dan kewenangan anggota Direksi, Dewan Komisaris.
h. Memberikan persetujuan atau menolak terkait pengalihan aset BCAS sesuai dengan tata cara dan ketentuan berdasarkan Anggaran Dasar BCAS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
i. Memberikan persetujuan atau menolak penambahan modal BCAS.
j. Melaksanakan hak dan/atau kewenangan lainnya berdasarkan Anggaran Dasar BCAS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RUPS Tahunan Tahun Buku 2022

Di 2023, BCAS telah menyelenggarakan RUPS Tahunan (RUPST) tahun buku 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Hari/Tanggal	22 Februari 2023	
Waktu	10.50 WIB	
Tempat	Wilayah Republik Indonesia melalui media video konferensi	
Kuorum	100% pemegang saham hadir	
Kehadiran: Dewan Komisaris	**Nama**	**Jabatan**
	Tantri Indrawati	Presiden Komisaris Independen
	Ratna Yanti	Komisaris Independen
	Ina Widjaja	Komisaris
Kehadiran: Direksi	**Nama**	**Jabatan**
	Yuli Melati Suryaningrum	Presiden Direktur
	Rickyadi Widjaja	Direktur
	Houda Muljanti	Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
	Pranata	Direktur
	Lukman Hadiwijaya	Direktur
Kehadiran: Komite Audit	**Nama**	**Jabatan**
	Tantri Indrawati	Ketua Komite Audit
Kehadiran Pemegang Saham: BCA	**Nama**	**Jabatan**
	Subur Tan	Direktur
	John Kosasih	Direktur
Kehadiran Pemegang Saham: BCA Finance	**Nama**	**Jabatan**
	Roni Haslim	Presiden Direktur
	Lim Handoyo	Direktur

Penyelenggaraan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022

a. Diadakan di tempat kedudukan Perseroan melalui media *video conference*.
b. Dalam Rapat hadir dan diwakili sebanyak 2.255.183.207 saham yang merupakan seluruh saham yang dikeluarkan oleh BCAS, sehingga ketentuan kuorum kehadiran Rapat telah dipenuhi dan pengambilan suara atas keputusan agenda RUPS dilakukan dengan suara bulat oleh para Pemegang Saham.
c. Rapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
d. RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 dipimpin oleh Nyonya Tantri Indrawati selaku Presiden Komisaris Independen.
e. Pimpinan Rapat akan memimpin rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam tata tertib Rapat, dan berhak meminta yang hadir dalam Rapat ini untuk membuktikan haknya untuk hadir dan untuk mengeluarkan suara.

Keputusan RUPST Tahun 2022 dan Realisasinya

RUPST Tahun 2022 diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 dengan mata acara dan keputusan RUPST sebagai berikut:

Mata Acara	Keputusan RUPST Tahun 2022	Realisasi
1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Direksi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan serta kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.	Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris Perseroan termasuk Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diperiksa dan diaudit; Laporan Direksi Perseroan; Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan; dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Perseroan; serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta kepada Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.	Terealisasi
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.	Menetapkan bahwa laba bersih yang diperoleh Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp117.582.548.930, dengan penggunaan Laba Bersih 2022 sebagai berikut: a. Menyisihkan Laba Bersih 2022 sejumlah Rp2.000.000.000 sebagai dana cadangan Perseroan. Dengan demikian dana cadangan Perseroan akan meningkat menjadi Rp16.000.000.000; dan b. Sisa dari Laba Bersih 2022 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan.	Terealisasi

Mata Acara	Keputusan RUPST Tahun 2022	Realisasi
3. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.	Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut : a. Memberhentikan dengan hormat Ibu Tantri Indrawati dari jabatannya sebagai Presiden Komisaris Independen Perseroan; b. Memberhentikan dengan hormat Ibu Ratna Yanti dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan; c. Memberhentikan dengan hormat Ibu Ina Widjaja dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan; d. Memberhentikan dengan hormat Bapak Rickyadi Widjaja dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan; e. Mengangkat Ibu Ratna Yanti sebagai Presiden Komisaris Independen Perseroan; f. Mengangkat Ibu Inge Setiawati sebagai Komisaris Independen Perseroan; g. Mengangkat Bapak Rickyadi Widjaja sebagai Komisaris Perseroan; h. Mengangkat Ibu Ina Widjaja sebagai Direktur Perseroan; i. Menegaskan bahwa sejak ditutupnya Rapat ini maka susunan anggota Direksi Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut: **Direksi** Presiden Direktur : Ibu Yuli Melati Suryaningrum Direktur : Ibu Ina Widjaja Direktur : Bapak Pranata Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan : Ibu Houda Muljanti Direktur : Bapak Lukman Hadiwijaya **Dewan Komisaris** Presiden Komisaris Independen : Ibu Ratna Yanti Komisaris Independen : Ibu Inge Setiawati Komisaris : Bapak Rickyadi Widjaja **Dewan Pengawas Syariah** Ketua : Bapak Fathurrahman Djamil Anggota : Bapak Sutedjo Prihatono dengan masa jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan di atas berlaku sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk sewaktu-waktu memberhentikan masing-masing anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut di atas; j. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang di antara anggota Direksi Perseroan, sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan.	Terealisasi
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2023 serta bonus untuk tahun buku 2022 yang akan dibagikan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan	Memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada PT Bank Central Asia Tbk selaku pemegang saham mayoritas Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya yang akan diberikan oleh Perseroan kepada para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan, serta menetapkan besarnya bonus yang akan dibagikan kepada para anggota Direksi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Besarnya gaji atau honorarium, tunjangan, serta bonus akan dimuat dalam Laporan Keuangan untuk tahun buku 2023.	Terealisasi

Mata Acara	Keputusan RUPST Tahun 2022	Realisasi
Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) untuk memeriksa/mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023	Agar Perseroan mendapatkan pilihan Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang terbaik dari sisi kualitas, syarat dan harga yang kompetitif bagi Perseroan, maka Rapat memutuskan untuk memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk: a. Menyeleksi dan menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan memeriksa atau mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk menunjuk penggantinya; dan b. Menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya berkaitan dengan penunjukan tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Terealisasi

Pernyataan Terkait Keputusan RUPS yang Belum Terealisasi

BCA Syariah telah melaksanakan seluruh rekomendasi dari Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022, sehingga dalam Laporan ini tidak ada informasi mengenai alasan dalam hal terdapat keputusan yang belum direalisasikan.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar, memberi nasihat kepada Direksi, serta memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola terselenggara dalam setiap kegiatan usaha di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris (Piagam Dewan Komisaris)

Piagam Dewan Komisaris dituangkan dalam Surat Keputusan No. 057/SK/DIR/2023 tanggal 29 Desember 2023 perihal Kebijakan Tata Kelola PT Bank BCA Syariah. Piagam tersebut menjadi pedoman bagi Dewan Komisaris BCAS dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan independen. Piagam ini dievaluasi dan diperbaharui secara berkala dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Piagam Dewan Komisaris dapat diakses melalui situs web BCAS: https://www.bcasyariah.co.id/dewan-komisaris-gcg.

Secara umum, Piagam Dewan Komisaris BCAS mengatur tentang:
1. Komposisi
2. Kriteria dan/atau persyaratan
3. Independensi
4. Masa jabatan
5. Rangkap jabatan
6. Peralihan jabatan
7. Kewajiban, tugas, tanggung jawab, dan wewenang
8. Rapat

Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan Dewan Komisaris

Dalam penerapan Tata Kelola, maka tidak diperkenankan adanya intervensi pemilik terhadap kewajiban, tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris yang dapat menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya aset Bank dan/atau berkurangnya keuntungan Bank untuk itu maka:
1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan untuk kepentingan BCAS atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut agar sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan keputusan RUPS.
2. Dewan Komiaris wajib melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.
3. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen sesuai dengan prinsip–prinsip tata kelola, dengan melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan tata kelola dalam setiap kegiatan usaha BCAS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
4. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta kebijakan strategis BCAS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
5. Dewan Komisaris menerima dan melaksanakan kewenangan yang diserahkan dan/atau diberikan kepada Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
6. Dewan Komisaris dapat melaksanakan tugas dan kewenangan pengawasan lain.

7. Dewan Komisaris menyetujui dan mengawasi Rencana Bisnis Bank dan rencana korporasi. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:
   - penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi BCAS.
   - hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar Bank atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pengambilan keputusan kegiatan operasional BCAS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada point 7 merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
9. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan Audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit intern, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain.
10. Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 hari kerja sejak ditemukannya:
    - pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, perbankan, dan yang terkait dengan kegiatan usaha BCAS; dan/atau
    - keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BCAS.
11. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
12. Dewan Komisaris wajib menjaga segala data dan informasi terkait BCAS yang disampaikan oleh Direksi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Dewan Komisaris wajib membentuk komite yang paling sedikit terdiri atas:
    - Komite Audit
    - Komite Pemantau Risiko
    - Komite Remunerasi dan Nominasi
14. Dewan Komisaris dapat membentuk komite lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kompleksitas Bank dan/atau memperluas cakupan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan Dewan Komisaris.
15. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite-komite yang telah dibentuk oleh Dewan Komisaris menjalankan tugasnya secara efektif.
16. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun buku.

Independensi

Berikut independensi Dewan Komisaris.

1. Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan BUS, sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bertindak independen.
2. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
3. Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
4. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS.
5. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain sebagaimana dimaksud pada point 4 sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum syariah.

Kriteria dan Masa Jabatan Anggota Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi kriteria dan/atau persyaratan sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris merupakan orang perseorangan yang memenuhi persyaratan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Seluruh anggota Dewan Komisaris yang telah memenuhi persyaratan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
3. Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan telah lulus Fit and Proper Test sesuai dengan ketentuan Regulator dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
4. Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
5. Calon Komisaris Independen harus memiliki:
   - Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatan sebagai Komisaris Independen, dan
   - Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
6. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau pihak yang mempunyai hubungan dengan BCAS yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu paling singkat 1 tahun sebelum menjadi Komisaris Independen pada BCAS.
7. Masa tunggu sebagaimana dimaksud pada point 6 bagi:
   - Mantan Presiden Direktur pada Bank yang bersangkutan; dan
   - Mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank yang bersangkutan, paling singkat 6 bulan sebelum menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan.
8. Dalam hal terdapat benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan dari calon Komisaris Independen atau calon Komisaris Non Independen yang terkait dengan Bank sehubungan dengan pencalonan yang bersangkutan pada Bank, calon yang bersangkutan mengungkapkan benturan kepentingan dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan.
9. Dalam hal berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan dari calon Komisaris Independen atau calon Komisaris Non Independen yang terkait dengan Bank sehubungan dengan pencalonan yang bersangkutan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan tindakan pengawasan yang diperlukan.

10. Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS wajib memperhatikan rekomendasi Komite yang menjalankan fungsi nominasi. Dalam hal anggota Komite yang menjalankan fungsi nominasi memiliki benturan kepentingan dengan usulan yang direkomendasikan wajib mengungkapkan dalam usulan yang direkomendasikan
11. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris mengedepankan komposisi secara profesional, independensi, kesesuaian kompetensi, dan memperhatikan keberagaman, yang dibutuhkan secara tepat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Sesuai Anggaran Dasar BCAS, masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 3 tahun sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris untuk periode ini akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan BCAS tahun 2025. RUPS tetap memiliki kewenangan untuk memberhentikan seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris setiap waktu sebelum jabatannya berakhir.

Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Komisaris

BCAS telah menetapkan jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan yang berlaku. Per 31 Desember 2023, BCAS memiliki 3 anggota Dewan Komisaris, yang terdiri dari 1 Presiden Komisaris Independen, 1 Komisaris, dan 1 Komisaris Independen.

Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melebihi jumlah anggota Direksi. Jumlah Komisaris Independen BCAS adalah 66,67% dari jumlah anggota Dewan Komisaris BCAS. Seluruh anggota Dewan Komisaris BCAS berdomisili di Indonesia.

Sepanjang tahun 2023 BCAS mengalami perubahan susunan Dewan Komisaris, berdasarkan Keputusan RUPST Tahun 2023. Perubahan susunan Dewan Komisaris dapat dilihat pada bagian Rapat Umum Pemegang Saham di Laporan Tahunan ini. Susunan Keanggotaan Dewan Komisaris BCAS tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Susunan Dewan Komisaris BCAS Periode Januari-Februari 2023

Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Periode Jabatan
Tantri Indrawati	Perempuan	Presiden Komisaris Independen	Masa jabatan berakhir pada 22 Februari 2023
Ratna Yanti	Perempuan	Komisaris Independen	Masa jabatan berakhir pada 22 Februari 2023
Ina Widjaja	Perempuan	Komisaris	Masa jabatan berakhir pada 22 Februari 2023

Susunan Anggota Dewan Komisaris BCAS Periode Februari-Desember 2023

Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Periode Jabatan
Ratna Yanti	Perempuan	Presiden Komisaris Independen	22 Februari 2023 s/d RUPST tahun 2025
Inge Setiawati	Perempuan	Komisaris Independen	22 Februari 2023 s/d RUPST tahun 2025
Rickyadi Widjaja	Laki-laki	Komisaris	22 Februari 2023 s/d RUPST tahun 2025

Seluruh anggota Dewan Komisaris BCA Syariah telah memperoleh persetujuan serta lulus uji kemampuan dan kepatutan dari OJK sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya.

Program Orientasi bagi Anggota Dewan Komisaris Baru

Untuk anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi baru, pengenalan budaya diberikan melalui program orientasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Metode orientasi berupa:
- Pemaparan oleh Unit Kerja Kantor Pusat (UKKP) *online* dan/atau *offline*.
- Kunjungan ke berbagai lokasi kegiatan BCAS.
- Pertemuan dan diskusi *online* maupun *offline* dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi lain untuk mendiskusikan berbagai masalah BCAS atau informasi lain yang dibutuhkan.
- Mempelajari berbagai informasi BCAS yang tersedia secara elektronik (*online base*).

Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris

BCAS mewajibkan anggota Dewan Komisaris untuk mengikuti program pelatihan paling sedikit 1 kali dalam setahun guna menunjang pelaksanaan tugas dan kewajibannya. Daftar program pelatihan yang diikuti oleh anggota Dewan Komisaris sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Program Pelatihan yang Diikuti Anggota Dewan Komisaris Tahun 2023

Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
Ratna Yanti	*Annual Kick-Off Meeting* Profesi Manajemen Risiko Sektor Jasa Keuangan Tahun 2023 "Tantangan dan Peluang Profesi Manajemen Risiko Dalam Pencapaian Tujuan Keuangan Berkelanjutan"	IRMAPA	03 Maret 2023
	Webinar "Meningkatkan Kolaborasi Perbankan Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Yang Berintegritas dan Akuntabel	FKDKP	17 Mei 2023
	Webinar "Dampak Penerapan *Cloud Computing* Di Industri Jasa Keuangan"	OJK INSTITUTE	08 Juni 2023
	Webinar *Batch* 3/2023 Dengan Tema "Efektifitas *Digital Maturity Assessment* Dalam Mengukur Kematangan Transformasi Digital Perbankan"	FKDKP	28 Agustus 2023
	ESG in House Workshop & Discussion, (Sosialisasi BCA Syariah *Sustainable Finance* Policy, & ESRA)	TRISAKTI SUSTAINABILITY CENTER	27 September 2023
	Program *Refreshment* "Mengembangkan Sistem Pengendalian Manajemen Risiko Jenjang 7"	LSPKS	27 September 2023
	The Cooler Earth Sustainability Summit 2023 Jakarta	CIMB NIAGA	13 September 2023
	Indonesian Knowledge Forum (IKF) 2023	BCA Learning Service	10 Oktober 2023
	Tata Kelola Perusahaan Mengacu Pada International Standard Principles On GCG Implementation Practices Dari OECD (Organization For Economic And Cooperation Development)	PT Cita Negeri Amanah	13 November 2023
	Rakernas 2024 Tema "Energized You! BCA Syariah Berani Berubah"	PT. Bank BCA Syariah	21-24 November 2023
	Lindungi Hutan dan *Save Your Life*	Lindungi Hutan dan Siaga Satu	22 November 2023
	Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah dan Peluncuran *Road Map* Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023-2027	OJK INSTITUTE	27 November 2023
	Capacity Building ESG "Introduction To Business and Human Rights"	BCA	30 November 2023
Inge Setiawati	Webinar *Batch* 3/2023 Dengan Tema "Efektifitas *Digital Maturity Assessment* Dalam Mengukur Kematangan Transformasi Digital Perbankan"	FKDKP	28 Agustus 2023
	The Cooler Earth Sustainability Summit 2023 Jakarta	CIMB Niaga	13 September 2023
	ESG in House Workshop & Discussion, (Sosialisasi BCA Syariah *Sustainable Finance* Policy, & ESRA)	Trisakti Sustainability Center	27 September 2023
	Indonesian Knowledge Forum (IKF) 2023	BCA Learning Service	10 – 11 Oktober 2023
	Tata Kelola Perusahaan mengacu pada International Standard Principles on GCG Implementation Practices dari OECD (Organization for Economic and Cooperation Development)	PT Cita Negeri Amanah	13 November 2023
	Rakernas 2024 Tema "Energized You! BCA Syariah Berani Berubah	PT. Bank BCA Syariah	21-24 November 2023
	Lindungi Hutan dan *Save Your Life*	Lindungi Hutan dan Siaga Satu	22 November 2023
	Capacity Building ESG "Introduction To Business And Human Rights"	BCA	30 November 2023

Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
Rickyadi Widjaja	*Annual Kick-Off Meeting* Profesi Manajemen Risiko Sektor Jasa Keuangan Tahun 2023 "Tantangan dan Peluang Profesi Manajemen Risiko Dalam Pencapaian Tujuan Keuangan Berkelanjutan"	IRMAPA	03 Maret 2023
	Webinar *Launching* Laporan Survei Manajemen Risiko: Konteks Korporasi Indonesia Tahun 2023	IRMAPA	07 Juni 2023
	Webinar *Batch* 3/2023 Dengan Tema "Efektifitas *Digital Maturity Assesment* Dalam Mengukur Kematangan Transformasi Digital Perbankan	FKDKP	28 Agustus 2023
	The Cooler Earth Sustainability Summit 2023 Jakarta	CIMB NIAGA	13 September 2023
	Program *Refreshment* "Mengembangkan Sistem Pengendalian Manajemen Risiko Jenjang 7	LSPKS	27 September 2023
	ESG in House Workshop & Discussion, (Sosialisasi BCA Syariah *Sustainable Finace Policy*, & ESRA)	Trisakti Sustainability Center	27 September 2023
	Indonesian Knowledge Forum (IKF) 2023	BCA Learning Service	10-11 Oktober 2023
	Tata Kelola Perusahaan mengacu pada International Standard Principles On GCG Implementation Practices Dari OECD (Organization For Economic and Cooperation Development	PT Cita Negeri Amanah	13 November 2023
	Rakernas 2024 Tema "Energized You! BCA Syariah Berani Berubah	PT. Bank BCA Syariah	21 November 2023
	Lindungi Hutan dan *Save Your Life*	Lindungi Hutan dan Siaga Satu	22 November 2023
	Capacity Building ESG "Introduction To Business and Human Rights"	BCA	30 November 2023
Tantri Indrawati*)	NA	NA	NA
Ina Widjaja*)	NA	NA	NA

Keterangan: *) Tantri Indrawati dan Ina Widjaja tidak mengikuti pelatihan karena menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya sampai dengan 22 Februari 2023.

Kewajiban Sertifikasi bagi Dewan Komisaris Tahun 2023

Nama	Sertifikasi	Tanggal Pelaksanaan	Penyelenggara
Tantri Indrawati*)	NA		
Ratna Yanti	Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 Tema "Mengembangkan Sistem Pengendalian Manajemen Risiko"	27 September 2023	LSPKS
Ina Widjaja*)	NA		
Inge Setiawati	NA		
Rickyadi Widjaja	Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 Tema "Mengembangkan Sistem Pengendalian Manajemen Risiko"	27 September 2023	LSPKS

Keterangan: *) Menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris sampai dengan 22 Februari 2023.

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris yang Jumlahnya 5% (lima persen) atau Lebih dari Modal Disetor

Kebijakan BCAS dalam hal pelaporan kepemilikan saham Dewan Komisaris mengacu pada Pasal 57 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Penerapan Kebijakan Pelaporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham

Piagam Dewan Komisaris, telah mengatur antara lain:
Kewajiban pengungkapan Dewan Komisaris atas kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada BCAS, bank lain, lembaga keuangan bukan bank dan perseroan lainnya, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

Tabel Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris yang Jumlahnya 5% (lima persen) atau Lebih per 31 Desember 2023

Nama	Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris yang Jumlahnya 5% atau lebih pada:			
	BCA	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan lain
Ratna Yanti	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Inge Setiawati	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Rickyadi Widjaja	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Tabel Jumlah Kepemilikan Saham BCAS oleh Dewan Komisaris Tahun 2023

Nama	Jumlah Kepemilikan Awal Tahun (per 1 Januari 2023)	Jumlah Kepemilikan Akhir Tahun (per 31 Desember 2023)
Ratna Yanti	-	-
Inge Setiawati	-	-
Rickyadi Widjaja	-	-

Tabel Jumlah Kepemilikan Saham BCAS oleh Dewan Komisaris Tahun 2022

Nama	Jumlah Kepemilikan Awal Tahun (per 1 Januari 2022)	Jumlah Kepemilikan Akhir Tahun (per 31 Desember 2022)
Ratna Yanti	-	-
Inge Setiawati	-	-
Rickyadi Widjaja	-	-

Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2023, BCAS telah memastikan bahwa anggota Dewan Komisaris mematuhi ketentuan terkait rangkap jabatan Dewan Komisaris sesuai peraturan yang berlaku. Seluruh Anggota Dewan Komisaris BCAS tidak melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif, pada lembaga keuangan atau Perusahaan keuangan, baik bank maupun bukan bank dan pada lebih dari 1 lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun luar negeri.

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Komisaris dalam Komite di BCAS Tahun 2023

Nama	Jabatan di BCAS	Periode RUPST	Posisi di Komite
Ratna Yanti	Presiden Komisaris Independen	2023-2025	Ketua Komite Pemantau Risiko Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Inge Setiawati	Komisaris Independen	2023-2025	Ketua Komite Audit Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi Anggota Komite Pemantau Risiko
Rickyadi Widjaja	Komisaris	2023-2025	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Anggota Komite Pemantau Risiko

Kebijakan Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat sebagai berikut.

1. Rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 2 bulan.
2. Rapat bersama Direksi secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 4 bulan.
3. Rapat Dewan Komisaris pada *point* 1 dan 2 diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota Dewan Komisaris.
4. Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara *offline* paling sedikit 2 kali dalam 1tahun.
5. Komisaris Non Independen yang tidak dapat menghadiri rapat secara *offline*, maka dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris melalui tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi (*online*).
6. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, maka pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
7. Segala keputusan Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.
8. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Komisaris beserta alasan perbedaan pendapat.
9. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Salinan risalah rapat Dewan Komisaris wajib didistribusikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.

Kebijakan mengenai Suksesi Dewan Komisaris

Kebijakan mengenai suksesi Dewan Komisaris di BCA Syariah telah diatur dalam kebijakan BCA Syariah. Pokok-pokok isi Kebijakan Suksesi Dewan Komisaris BCA Syariah adalah sebagai berikut:

- Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- Dalam rangka mempersiapkan jajaran eksekutif BCA Syariah agar mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang utuh sebagai pejabat di kantor pusat atau kantor cabang, maka beberapa jajaran eksekutif yang dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan lebih jauh akan mendapatkan rotasi.
- Proses mengidentifikasi dan menyeleksi calon anggota Dewan Komisaris dapat dilakukan dari internal Perusahaan maupun calon eksternal yang memenuhi persyaratan. Apabila diperlukan Komite Remunerasi dan Nominasi Perusahaan dapat memanfaatkan jasa Perusahaan pencari yang independen dan bereputasi baik dalam proses pemilihan anggota Dewan Komisaris.

Laporan Pelaksanaan Tugas dan Penilaian Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris

Komite-komite di bawah Dewan Komisaris yang telah dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yaitu:

- Komite Audit (KA)
- Komite Pemantau Risiko (KPR)
- Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN)

Dewan Komisaris melaksanakan penilaian terhadap komite-komite tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kriteria
   Kriteria penilaian komite-komite di bawah Dewan Komisaris didasarkan pada kepatuhan terhadap piagam serta realisasi kerja/pelaksanaan tugas masing-masing komite.
2. Proses
   Penilaian dilakukan oleh Dewan Komisaris sebanyak 1 kali dalam 1 tahun.
3. Hasil
   Dewan Komisaris menilai bahwa sepanjang tahun 2023 seluruh komite di bawah Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan efektif serta bekerja dengan menjunjung standar kompetensi dan kualitas yang baik.

Dewan Komisaris menilai komite-komite tersebut telah melaksanakan tugas dengan baik sepanjang tahun 2023 dan dapat mendukung Dewan Komisaris dalam menerapkan standar tata kelola di BCAS. Laporan pelaksanaan tugas dan penilaian kinerja komite di bawah Dewan Komisaris dapat dilihat pada bagian Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini.

Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris selengkapnya disajikan di bagian Laporan Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini. Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris, termasuk rapat bersama Direksi dan DPS serta tingkat kehadiran rapat masing-masing anggota Dewan Komisaris selengkapnya disajikan di bagian Rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan Rapat Gabungan pada Laporan Tahunan ini.

Komisaris Independen

Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih obyektif dan menempatkan kewajaran dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan Pemangku Kepentingan. Per 31 Desember 2023, Komisaris Independen BCAS berjumlah 2 orang dari keseluruhan anggota Dewan Komisaris atau 66,67% dari total anggota Dewan Komisaris. Dalam hal ini, komposisi anggota Dewan Komisaris BCAS telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Kriteria Komisaris Independen

Kriteria yang perlu dipenuhi oleh seluruh Komisaris Independen BCAS antara lain:
1. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan;
2. Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan;
3. Mengedepankan komposisi secara profesional, independensi, kesesuaian kompetensi, dan memperhatikan keberagaman, yang dibutuhkan secara tepat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
4. Dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat publik;
5. Tidak memiliki saham pada BCAS, baik langsung maupun tidak langsung;
6. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan BCAS, anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, maupun Pemegang Saham Utama BCAS;
7. Tidak memiliki hubungan usaha yang berkaitan dengan kegiatan usaha BCAS, baik langsung maupun tidak langsung;
8. Memenuhi persyaratan lain atas Komisaris Independen sesuai peraturan yang berlaku.

Selain kriteria yang telah disebutkan di atas, Komisaris Independen juga harus memenuhi persyaratan calon anggota Dewan Komisaris secara umum. Pada tahun 2023 terdapat pengangkatan Komisaris Independen, yaitu Sdri. Inge Setiawati, berdasarkan hasil RUPST tahun 2023 tanggal 22 Februari 2023 dan Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I OJK Nomor KEP-12/PB.1/2023 tanggal 7 Februari 2023.

Masa Jabatan dan Masa Tunggu Komisaris Independen

Masa jabatan Komisaris Independen mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris secara umum. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 periode masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen dengan mempertimbangkan:
1. hasil penilaian kinerja Komisaris Independen;
2. hasil penilaian rapat Dewan Komisaris yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen;
3. hasil penilaian oleh kepala satuan kerja audit intern dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen; dan
4. pernyataan Komisaris Independen dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan.

Masa tunggu atau *cooling off* adalah tenggang waktu antara saat berakhirnya secara efektif jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau hubungan lain dengan Bank, dengan pengangkatan yang bersangkutan secara efektif sebagai Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan. Dengan demikian, masa tunggu dilaksanakan di luar Bank yang bersangkutan. Kriteria Masa tunggu atau *cooling off* adalah Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank wajib menjalani masa tunggu paling singkat 1 tahun sebelum menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan. Masa tunggu untuk:

- Mantan direktur utama pada Bank yang bersangkutan; dan
- Mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank yang bersangkutan.

Paling singkat 6 bulan sebelum menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan.

Pada tahun 2023 tidak terdapat Komisaris Independen yang telah diangkat lebih dari 2 periode dan tidak terdapat pengangkatan Komisaris Independen yang merupakan mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank di BCAS.

Benturan Kepentingan dan Peralihan Komisaris Non Independen menjadi Komisaris Independen

Dalam hal terdapat benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan dari calon Komisaris Independen atau calon Komisaris Non Independen yang terkait dengan Bank, calon yang bersangkutan mengungkapkan benturan kepentingan dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan.

Komisaris Non Independen dapat beralih menjadi Komisaris Independen pada Bank atau kelompok usaha bank yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen dan wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan melalui penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Per 31 Desember 2023, seluruh Komisaris Independen tidak memiliki benturan kepentingan di BCAS dan tidak terdapat Peralihan Komisaris Non Independen menjadi Komisaris Independen.

Direksi

Direksi merupakan organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan untuk kepentingan perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (Piagam Direksi/*Board of Directors Charter*)

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi BCAS berpedoman pada Piagam Direksi yang disusun berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Pedoman ini dievaluasi dan diperbaharui secara berkala dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Piagam Direksi dicantumkan pada Pedoman Tata Kelola BCA Syariah dan dapat diakses oleh publik melalui situs web BCA Syariah bagian Tata Kelola Perusahaan (https://www.bcasyariah.co.id/direksi-gcg).

Secara umum, Piagam Direksi mengatur tentang:
- Komposisi
- Kriteria dan/atau persyaratan
- Independensi
- Masa jabatan
- Rangkap jabatan
- Peralihan jabatan
- Kewajiban, tugas, tanggung jawab, dan wewenang
- Rapat

Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan Direksi

Dalam penerapan Tata Kelola, tidak diperkenankan adanya intervensi pemilik terhadap kewajiban, tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris yang dapat menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya aset Bank dan/atau berkurangnya keuntungan Bank untuk itu maka:
1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan BCAS untuk kepentingan BCAS sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
2. Direksi wajib melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan prinsip syariah.
3. Direksi berwenang mewakili BCAS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
4. Direksi menerapkan Tata Kelola yang Baik pada BCAS, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang disesuaikan dengan perkembangan ekosistem perbankan terkini serta didukung dengan digitalisasi dan inovasi teknologi.
5. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, Dewan Pengawas Syariah, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain.
6. Direksi telah membentuk sedikitnya Satuan Kerja Audit Intern, Departemen Manajemen Risiko dan Departemen Kepatuhan.
7. Selain membentuk satuan kerja, Direksi membentuk satuan kerja lain yang diwajibkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
8. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan BCAS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian, antara lain kebijakan mengenai sistim *recruitment*, sistim promosi, sistem remunerasi serta rencana BCAS untuk melakukan efisiensi melalui pengurangan pegawai. Pengungkapan tersebut harus dilakukan melalui sarana yang diketahui atau diakses dengan mudah oleh pegawai.
9. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
10. Mengangkat anggota Komite-komite Penunjang Dewan Komisaris berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
11. Direksi menyampaikan pertanggungjawaban atas pengurusan BCA Syariah kepada pemegang saham dan pemegang saham menerima pertanggungjawaban Direksi melalui RUPS.
12. Kewajiban Direksi Terkait dengan Rencana Bisnis Bank, maka:
    - Rencana Bisnis Bank telah disusun secara realistis, komprehensif, terukur (*achievable*) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal serta menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan.
    - Rencana Bisnis Bank disusun berdasarkan kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Bank serta mengidentifikasikan kelemahan dan ancaman (SWOT *analysis*).
    - Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada pemegang saham Bank dan seluruh jenjang organisasi Bank.
13. Direksi wajib mengkomunikasikan kepada pegawai arah bisnis BCAS dalam rangka pencapaian visi dan misi Bank.
14. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi sesuai dengan Tata Kelola yang baik pada Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Independensi

Berikut ini adalah independensi Direksi.
1. Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen terhadap pemegang saham.
2. Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.
3. Presiden Direktur wajib berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali, yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga.

Kriteria dan Masa Jabatan Anggota Direksi

Berikut ini adalah kriteria dan/atau persyaratan Direksi:
1. Mayoritas anggota Direksi wajib memiliki pengalaman paling kurang 5 tahun di bidang operasional sebagai pejabat eksekutif Bank.
2. Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan telah lulus *Fit and Proper Test* sesuai dengan ketentuan Regulator dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
3. Anggota Direksi memiliki integritas, reputasi yang baik, kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
4. Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS wajib memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi.
5. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi mengedepankan komposisi secara profesional, independensi, kesesuaian kompetensi, dan memperhatikan keberagaman, yang dibutuhkan secara tepat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
6. Anggota Direksi wajib menumbuhkan budaya pembelajaran dimana hasil dari peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dalam pengelolaan Bank akan ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi *stakeholder*s.

Masa jabatan Direksi BCAS akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 sejak penyelenggaraan RUPS yang mengangkat anggota Direksi yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi kewenangan RUPS untuk memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi pada setiap waktu sebelum jabatannya berakhir. Anggaran Dasar BCAS menyatakan bahwa anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

Jumlah dan Komposisi Anggota Direksi

BCAS telah memenuhi ketentuan jumlah dan komposisi anggota Direksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Per 31 Desember 2023, jumlah anggota Direksi BCAS adalah 5 orang yang terdiri dari:
- 1 Presiden Direktur;
- 1 Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan; dan
- 3 Direktur lainnya.

Pada tahun 2023, BCAS mengalami perubahan susunan anggota Direksi berdasarkan Keputusan RUPST Tahun 2023 terdapat Perubahan susunan anggota Direksi dapat dilihat pada bagian Rapat Umum Pemegang Saham di Laporan Tahunan ini. Susunan Keanggotaan Direksi BCAS tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Direksi BCAS Periode Januari-Februari 2023

Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Periode Jabatan
Yuli Melati Suryaningrum	Perempuan	Presiden Direktur	Sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2025
Houda Muljanti	Perempuan	Direktur*)	Sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2025
Pranata	Laki-laki	Direktur	Sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2025
Rickyadi Widjaja	Laki-laki	Direktur	Sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2023
Lukman Hadiwijaya	Laki-laki	Direktur	Sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2025

Keterangan: *) Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan

Susunan Anggota Direksi BCAS Periode Februari-Desember 2023

Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Periode Jabatan
Yuli Melati Suryaningrum	Perempuan	Presiden Direktur	Sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2025
Houda Muljanti	Perempuan	Direktur*)	Sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2025
Pranata	Laki-laki	Direktur	Sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2025
Lukman Hadiwijaya	Laki-laki	Direktur	Sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2025
Ina Widjaja	Perempuan	Direktur	Sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2025

Keterangan: *) Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan

Seluruh anggota Direksi BCAS telah memperoleh persetujuan dari OJK serta lulus uji kemampuan dan kepatutan dari OJK sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya.

Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Pembagian tugas dan wewenang di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi dengan persetujuan berdasarkan pada Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/SK/KOM/2023 tanggal 22 Februari 2023 tentang Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi serta Kerangka Induk Organisasi PT Bank BCA Syariah dan dilengkapi dengan HSD No 039/MO/HSD/2023 tgl 22 Feb 23 perihal Pemberitahuan Susunan Pengurus, Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi serta Kerangka Induk Organisasi BCAS. Pembidangan tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Bidang Tugas & Tanggung Jawab
Yuli Melati Suryaningrum	Presiden Direktur	Satuan Kerja Audit Internal Satuan Kerja Bisnis dan Komunikasi
Ina Widjaja	Direktur	Satuan Kerja Analisa Risiko Pembiayaan Divisi Operasi
Houda Muljanti	Direktur *)	Satuan Kerja Hukum dan Sumber Daya Manusia Departemen Manajemen Risiko Departemen Kepatuhan
Pranata	Direktur	Satuan Kerja Keuangan dan Perencanaan Perusahaan Satuan Kerja Bisnis Ritel dan Konsumer
Lukman Hadiwijaya	Direktur	Satuan Kerja Teknologi Informasi dan Logistik

Keterangan: *) Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan

Program Orientasi bagi Anggota Direksi Baru

Untuk anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi baru, pengenalan budaya diberikan melalui program orientasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Metode orientasi berupa:

- Pemaparan oleh Unit Kerja Kantor Pusat (UKKP) *online* dan/atau *offline*.
- Kunjungan ke berbagai lokasi kegiatan BCAS.
- Pertemuan dan diskusi *online* maupun *offline* dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi lain untuk mendiskusikan berbagai masalah BCAS atau informasi lain yang dibutuhkan.
- Mempelajari berbagai informasi BCAS yang tersedia secara elektronik (*online base*).

Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Direksi

BCAS mewajibkan anggota Direksi mengikuti program pelatihan paling sedikit 1 kali dalam setahun guna meningkatkan kompetensi dan menunjang pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota Direksi. Daftar program pelatihan yang diikuti oleh anggota Direksi sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Program Pelatihan yang Diikuti Anggota Direksi Tahun 2023

Nama	Topik Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
Yuli Melati Suryaningrum	*Mid-Year Forecast & Strategy* Review 2023	PT. Bank BCA Syariah	26 Juli 2023
	Budget Kick Off 2024 dengan Tema "BCA Syariah Business Strategy & Macroeconomic Outlook"	PT. Bank BCA Syariah	16 Agustus 2023
	Strategic Discussion 2024	PT. Bank BCA Syariah	01 September 2023
	Program *Refreshment* "Mengembangkan Sistem Pengendalian Manajemen Risiko Jenjang 7	LSPKS	27 September 2023
	ESG In House Workshop & Discussion, (Sosialisasi BCA Syariah *Sustainable Finance* Policy & ESRA)	Trisakti Sustainability Center	27 September 2023
	Indonesia Knowledge Forum (IKF) 2023	BCA Learning Service	10- 11 Oktober 2023
	Tata Kelola Perusahaan Mengacu Pada International Standard Principles On GCG Implementation Practices Dari OECD (Organization For Economic And Cooperation Development)	PT Cita Negeri Amanah	13 November 2023

Nama	Topik Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
	Energized You! BCA Syariah Berani Berubah	PT. Bank BCA Syariah	21 - 24 November 2023
	Lindungi Hutan dan *Save Your Life*	Lindungi Hutan dan Siaga Satu	22 November 2023
	BCA Syariah Sustainability Talk Vol.1 "Keuangan Berkelanjutan: Tantangan dan Peluang Pelaku Industri dan Perbankan"	PT. Bank BCA Syariah	14 Desember 2023
Houda Muljanti	Program 2023 Human Capital Masterclass : *Rewards Series*	PT. Towers Watson Indonesia (WTW)	7-9 Maret 2023
	Webinar Strategi Adaptasi Di Tengah Disrupsi *Blockchain* Industri Keuangan	CRMS dan ICOPI	21 Juni 2023
	Mid-Year Forecast & Strategy Review 2023	PT. Bank BCA Syariah	26 Juli 2023
	Budget Kick Off 2024 Dengan Tema "BCA Syariah Business Strategy & Macroeconomic Outlook"	PT. Bank BCA Syariah	16 Agustus 2023
	Special Batch Corporate Governance Leadership Program: *Sustainability For Long Term Value Creation And Asean CG Scorecard*	Indonesian Institute Corporate Directorship (IICD)	22 -24 Agustus 2023
	Webinar *Batch* 3/2023 dengan tema "Efektifitas *Digital Maturity Assessment* Dalam Mengukur Kematangan Transformasi Digital Perbankan"	FKDKP	28 Agustus 2023
	Strategic Discussion 2024	PT. Bank BCA Syariah	1 September 2023
	Webinar How To Manage Stress It's Okay Not To Be Okay	PT. Bank BCA Syariah	13 September 2023
	Program *Refreshment* "Mengembangkan Sistem Pengendalian Manajemen Risiko Jenjang 7"	LSPKS	27 September 2023
	ESG in house Workshop & Discussion-Sosialisasi BCA Syariah *Sustainable Finace Policy* & ESRA)	Trisakti Sustainability Center	27 September 2023
	Tata Kelola Perusahaan Mengacu Pada International Standard Principles On GCG Implementation Practices Dari OECD (Organization For Economic And Cooperation Development)	PT Cita Negeri Amanah	13 November 2023
	Energized You! BCA Syariah Berani Berubah	PT. Bank BCA Syariah	21 -24 November 2023
	Lindungi Hutan dan *Save Your Life*	Lindungi Hutan dan Siaga Satu	22 November 2023
	Workshop RCSA 2023	PT. Bank BCA Syariah	1 Desember 2023
	Annual Conference FHCPI Tahun 2023 Dengan Tema "*Future Business Challenges And Opportunities : Determine Future Talent Readiness*"	Forum Human Capital Indonesia	1-2 Desember 2023
	Workshop Technical Competency	PT. Bank BCA Syariah	4 - 5 Desember 2023
	BCA Syariah Sustainability Talk Vol.1 "Keuangan Berkelanjutan: Tantangan dan Peluang Pelaku Industri dan Perbankan"	PT. Bank BCA Syariah	14 Desember 2023
Pranata	*Mid-Year Forecast & Strategy Review* 2023	PT. Bank BCA Syariah	26 Juli 2023
	Budget Kick Off 2024 dengan tema "*BCA Syariah Business Strategy & Macroeconomic Outlook*"	PT. Bank BCA Syariah	16 Agustus 2023
	Strategic Discussion 2024	PT. Bank BCA Syariah	1 September 2023

Nama	Topik Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
	Program *Refreshment* "Mengembangkan Sistem Pengendalian Manajemen Risiko Jenjang 7	LSPKS	27 September 2023
	ESG in house Workshop & Discussion, (Sosialisasi BCA Syariah *Sustainable Finance* Policy & ESRA)	Trisakti Sustainability Center	27 September 2023
	Indonesia Knowledge Forum (IKF) 2023	BCA Learning Service	10- 11 Oktober 2023
	Tata Kelola Perusahaan Mengacu Pada International Standard Principles on GCG Implementation Practices Dari OECD (Organization For Economic And Cooperation Development)	PT Cita Negeri Amanah	13 November 2023
	Energized You! BCA Syariah Berani Berubah	PT. Bank BCA Syariah	21 - 24 November 2023
	Lindungi Hutan dan *Save Your Life*	Lindungi Hutan dan Siaga Satu	22 November 2023
	BCA Syariah Sustainability Talk Vol.1 "Keuangan Berkelanjutan: Tantangan dan Peluang Pelaku Industri dan Perbankan"	PT. Bank BCA Syariah	14 Desember 2023
Rickyadi Widjaja*)	NA	NA	NA
Lukman Hadiwijaya	Webinar "Meningkatkan Kolaborasi Perbankan Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Yang Berintegritas dan Akuntabel"	FKDKP	17 Mei 2023
	Mid-Year Forecast & Strategy Review 2023	PT. Bank BCA Syariah	26 Juli 2023
	Budget Kick Off 2024 dengan tema "*BCA Syariah Business Strategy & Macroeconomic Outlook*"	PPT. Bank BCA Syariah	16 Agustus 2023
	Webinar *Batch* 3/2023 Dengan Tema "Efektifitas *Digital Maturity Assessment* Dalam Mengukur Kematangan Transformasi Digital Perbankan	FKDKP	28 Agustus 2023
	Strategic Discussion 2024	PT. Bank BCA Syariah	1 September 2023
	Program *Refreshment* "Mengembangkan Sistem Pengendalian Manajemen Risiko Jenjang 7	LSPKS	27 September 2023
	ESG in House Workshop & Discussion, (Sosialisasi BCA Syariah *Sustainable Finance* Policy & ESRA)	TRISAKTI SUSTAINABILITY CENTER	27 September 2023
	Indonesia Knowledge Forum (IKF) 2023	BCA Learning Service	10- 11 Oktober 2023
	Tata Kelola Perusahaan Mengacu Pada International Standard Principles on GCG Implementation Practices Dari OECD (Organization For Economic And Cooperation Development)	PT Cita Negeri Amanah	13 November 2023
	Energized You! BCA Syariah Berani Berubah	PT. Bank BCA Syariah	21 - 24 November 2023
	Lindungi Hutan & *Save Your Life*	Lindungi Hutan Dan Siaga Satu	22 November 2023
	BCA Syariah Sustainability Talk Vol.1 "Keuangan Berkelanjutan: Tantangan dan Peluang Pelaku Industri dan Perbankan"	PT. Bank BCA Syariah	14 Desember 2023
Ina Widjaja	*Mid-Year Forecast & Strategy Review* 2023	PT. Bank BCA Syariah	26 Juli 2023
	Budget Kick Off 2024 dengan Tema "*BCA Syariah Business Strategy & Macroeconomic Outlook*"	PT. Bank BCA Syariah	16 Agustus 2023
	Strategic Discussion 2024	PT. Bank BCA Syariah	1 September 2023

Nama	Topik Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
	Program *Refreshment* "Mengembangkan Sistem Pengendalian Manajemen Risiko Jenjang 7	LSPKS	27 September 2023
	ESG in house Workshop & Discussion, (Sosialisasi BCA Syariah *Sustainable Finance* Policy & ESRA)	Trisakti Sustainability Center	27 September 2023
	Program *Building Healthy Lifestyles* Tahun 2023 "Siapa Bilang Komitmen Pola Hidup Sehat Itu Susah?"	PT. Bank BCA Syariah	10 November 2023
	Tata Kelola Perusahaan Mengacu Pada International Standard Principles on GCG Implementation Practices Dari OECD (Organization For Economic And Cooperation Development)	PT Cita Negeri Amanah	13 November 2023
	Energized You! BCA Syariah Berani Berubah	PT. Bank BCA Syariah	21 - 24 November 2023
	Lindungi Hutan & *Save Your Life*	Lindungi Hutan dan Siaga Satu	22 November 2023
	BCA Syariah Sustainability Talk Vol.1 "Keuangan Berkelanjutan: Tantangan dan Peluang Pelaku Industri dan Perbankan"	PT. Bank BCA Syariah	14 Desember 2023

Keterangan: *) Rickydadi Widjaja tidak mengikuti pelatihan karena masa jabatan berakhir pada 22 Februari 2023.

Kewajiban Sertifikasi bagi Anggota Direksi Tahun 2023

Nama	Program Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Penyelenggara
Yuli Melati Suryaningrum	Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 Tema "Mengembangkan Sistem Pengendalian Manajemen Risiko"	27 September 2023	LSPKS
Houda Muljanti	Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 Tema "Mengembangkan Sistem Pengendalian Manajemen Risiko"	27 September 2023	LSPKS
Pranata	Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 Tema "Mengembangkan Sistem Pengendalian Manajemen Risiko"	27 September 2023	LSPKS
Lukman Hadiwijaya	Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 Tema "Mengembangkan Sistem Pengendalian Manajemen Risiko"	27 September 2023	LSPKS
Rickyadi Widjaja *)	NA	NA	NA
Ina Widjaja	Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 Tema "Mengembangkan Sistem Pengendalian Manajemen Risiko"	27 September 2023	LSPKS

Keterangan: *) Rickyadi Widjaja tidak diwajibkan mengikuti sertifikasi karena masa jabatan berakhir pada 22 Februari 2023.

Kepemilikan Saham Anggota Direksi yang Jumlahnya 5% atau Lebih dari Modal Disetor

Kebijakan BCA Syariah dalam hal pelaporan kepemilikan saham anggota Direksi mengacu pada Pasal 32 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Penerapan Kebijakan Pelaporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham

Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi telah mengatur antara lain kewajiban pengungkapan Direksi atas kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada BCA Syariah, bank lain, lembaga keuangan bukan bank dan perseroan lainnya, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

Tabel Kepemilikan Saham Anggota Direksi yang jumlahnya 5% atau lebih per 31 Desember 2023

Nama	Kepemilikan saham anggota Direksi yang Jumlahnya 5% atau lebih pada:			
	BCA	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan lain
Yuli Melati Suryaningrum	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Houda Muljanti	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Pranata	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Lukman Hadiwijaya	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Ina Widjaja	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Jumlah Kepemilikan Saham BCAS oleh Direksi Tahun 2023

Nama	Jumlah Kepemilikan Awal Tahun (per 1 Januari 2023)	Jumlah Kepemilikan Akhir Tahun (per 31 Desember 2023)
Yuli Melati Suryaningrum	-	-
Houda Muljanti	-	-
Pranata	-	-
Lukman Hadiwijaya	-	-
Ina Widjaja	-	-

Tabel Jumlah Kepemilikan Saham BCA Syariah oleh Direksi Tahun 2022

Nama	Jumlah Kepemilikan Awal Tahun (per 1 Januari 2022)	Jumlah Kepemilikan Akhir Tahun (per 31 Desember 2022)
Yuli Melati Suryaningrum	-	-
Houda Muljanti	-	-
Pranata	-	-
Lukman Hadiwijaya	-	-
Ina Widjaja	-	-

Rangkap Jabatan Anggota Direksi

Sepanjang tahun 2023, BCAS telah memastikan bahwa anggota Direksi mematuhi ketentuan terkait rangkap jabatan Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seluruh anggota Direksi BCA Syariah tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.

Kebijakan Rapat Direksi

Berikut adalah ketentuan tentang Rapat Direksi.

a. Direksi wajib menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 kali dalam setiap bulan.
b. Direksi wajib menyelenggarakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 4 bulan.
c. Rapat Direksi diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota Direksi.
d. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
e. Pengambilan keputusan Direksi melalui rapat Direksi wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
f. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
g. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi beserta alasan perbedaan pendapat.
h. Direksi wajib membuat risalah rapat Direksi dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
i. Salinan risalah rapat anggota Direksi yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, harus didistribusikan kepada seluruh anggota Direksi.

Kebijakan mengenai Suksesi Direksi

Kebijakan mengenai suksesi Direksi di BCAS telah diatur dalam kebijakan BCAS. Pokok-pokok isi Kebijakan Suksesi Direksi BCAS adalah sebagai berikut:

- Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- Dalam rangka mempersiapkan jajaran eksekutif BCAS agar mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang utuh sebagai pejabat di kantor pusat atau kantor cabang, maka beberapa jajaran eksekutif yang dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan lebih jauh akan mendapatkan rotasi.
- Proses mengidentifikasi dan menyeleksi calon anggota Direksi dapat dilakukan dari internal Perusahaan maupun calon eksternal yang memenuhi persyaratan. Apabila diperlukan Komite Remunerasi dan Nominasi Perusahaan dapat memanfaatkan jasa Perusahaan pencari yang independen dan bereputasi baik dalam proses pemilihan anggota Direksi.

Laporan Pelaksanaan Tugas dan Penilaian Komite Eksekutif Direksi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengelola BCAS, Direksi didukung oleh para Komite yaitu:

a. Komite Manajemen Risiko (KMR);
b. Komite Pengarah Teknologi Informasi;
c. Komite Kebijakan Pembiayaan (KKP);
d. Komite Pembiayaan (KP);
e. Komite Aset dan Liabilitas/*Asset* Liability Commintee (ALCO);
f. Komite Sumber Daya Manusia; dan
g. Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian (KPKK).

Sepanjang tahun 2023, Direksi menilai bahwa komite-komite tersebut telah memberikan kontribusi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dan memberikan rekomendasi yang bermanfaat dalam mendukung pelaksanaan tugas Direksi. Para Komite secara periodik melaksanakan rapat dan secara aktif berdiskusi mengenai topik-topik yang relevan dengan perkembangan usaha BCAS, perekonomian maupun regulasi.

Penilaian kinerja komite di bawah Direksi dapat dilihat di bagian Laporan Direksi pada Laporan Tahunan ini.

Laporan Pelaksanaan Tugas dan Penilaian Kinerja Anggota Direksi

Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi selengkapnya disajikan pada bagian Laporan Direksi pada Laporan Tahunan ini. Pelaksanaan rapat Direksi, termasuk rapat bersama Dewan Komisaris dan DPS, termasuk tingkat kehadiran rapat masing-masing anggota Direksi selengkapnya disajikan pada bagian Rapat Dewan Komisaris, Direksi, DPS, dan Rapat Gabungan pada Laporan Tahunan ini. Adapun penilaian dan dasar penilaian kinerja Direksi dapat dilihat di bagian Laporan Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini.

Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan PBI No. 11/33/PBI/2009 mengenai Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS

DPS BCAS mempunyai pedoman tata tertib kerja yang tertuang dalam Piagam DPS berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 057/SK/DIR/2023 tanggal 29 Desember 2023. Secara umum Piagam DPS mengatur mengenai:

- Komposisi, kriteria dan independensi DPS;
- Kriteria DPS;
- Masa jabatan;
- Rangkap jabatan;
- Tugas dan tanggung jawab DPS;
- Perangkat tugas DPS;
- Efektivitas rapat;
- Transparansi;
- Sanksi;
- Pelaporan;
- Mekanisme pengangkatan/penggantian, masa jabatan, dan rangkap jabatan DPS;
- Waktu kerja, mekanisme kerja, dan rapat DPS;
- Transparansi, larangan, dan perangkat tugas DPS;
- Kewenangan dan sanksi DPS; serta
- Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Jumlah dan Komposisi DPS

Sebagaimana ketentuan yang berlaku saat ini, jumlah anggota DPS paling kurang 2 orang atau paling banyak 50% dari jumlah anggota Direksi dan salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai Ketua.

Per 31 Desember 2023 jumlah DPS BCAS telah sesuai dengan ketentuan yaitu sebanyak 2 orang, yaitu:

Nama	Jabatan
Fathurrahman Djamil	Ketua DPS
Sutedjo Prihatono	Anggota DPS

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

DPS memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah dan prinsip–prinsip GCG. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS meliputi antara lain:

a. Ruang lingkup umum
   - Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
   - Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI;
   - Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;
   - Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank; dan
   - Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

b. Ruang lingkup pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank
   - Meminta penjelasan dari pejabat Bank yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan;
   - Memeriksa apakah terhadap akad yang digunakan dalam produk baru telah terdapat fatwa DSN-MUI;
     a. Dalam hal telah terdapat fatwa, maka DPS melakukan analisa atas kesesuaian akad produk baru dengan fatwa DSN-MUI.
     b. Dalam hal belum terdapat fatwa untuk produk baru, maka DPS meminta fatwa kepada DSN-MUI.
   - Mereview sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan prinsip syariah; dan
   - Memberikan pendapat/opini syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan, termasuk prosedur, akad-akad dan hal-hal lain yang terkait dengan produk baru tersebut berdasarkan Fatwa DSN-MUI.

c. Ruang Lingkup Pengawasan Terhadap Kegiatan Bank
   - Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari Direksi, pelaksana fungsi audit intern dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank;
   - Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah dari masingmasing kegiatan;
   - Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik (sampel) untuk mengetahui pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dipersyaratkan dalam prosedur, antara lain:
     a. ada tidaknya bukti pembelian barang, untuk akad *murabahah* sebagai bukti terpenuhinya syarat jual-beli *murabahah*;
     b. ada tidaknya laporan usaha nasabah, untuk akad *mudharabah*/*musyarakah*, sebagai dasar melakukan perhitungan distribusi bagi hasil;
   - Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai Bank dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada dokumen transaksi yang diuji petik, apabila diperlukan;
   - Melakukan *review* terhadap SOP terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan dimaksud;
   - Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan bank; dan
   - Melaporkan hasil pengawasan DPS kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

d. Ruang Lingkup Manajemen Risiko
   - Melakukan evaluasi (*review*) atas kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah; dan
   - Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.

Kriteria Anggota Dewan Pengawas Syariah

Anggota DPS wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
- Integritas, paling kurang mencakup:
  a. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
  b. Memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat dan tangguh (*sustainable*);
  c. Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang ditetapkan oleh OJK.
- Kompetensi, paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu'amalah, pengetahuan di bidang perbankan, tresuri, akuntansi, dan/atau keuangan secara umum;
- Reputasi keuangan, paling kurang mencakup dalam waktu 5 tahun terakhir sebelum dicalonkan:
  a. Tidak termasuk dalam daftar hitam (*black list*) dan daftar kredit macet; dan
  b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi dan/atau anggota pengurus suatu badan usaha yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dan/ atau badan usaha dinyatakan pailit.
- Anggota DPS wajib menumbuhkan budaya pembelajaran dimana hasil dari peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan Bank dengan prinsip syariah akan ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank melalui penurunan pelanggaran terhadap prinsip syariah dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap prinsip syariah.

Mekanisme Pengangkatan dan Pengunduran Diri DPS

Mekanisme pengangkatan calon anggota DPS adalah sebagai berikut:
- Komite Remunerasi dan Nominasi memberikan rekomendasi calon anggota DPS kepada Dewan Komisaris;
- Berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi tersebut, Dewan Komisaris mengusulkan calon anggota DPS kepada Direksi;

- Berdasarkan pertimbangan tertentu dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris, rapat Direksi menetapkan calon anggota DPS untuk dimintakan rekomendasi kepada Majelis Ulama Indonesia;
- Majelis Ulama Indonesia memberikan atau tidak memberikan rekomendasi calon anggota DPS yang disampaikan oleh Direksi;
- Bank mengajukan permohonan persetujuan kepada OJK atas calon anggota DPS yang Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab DPS telah mendapatkan rekomendasi Majelis Ulama Indonesia;
- OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas calon anggota DPS dimaksud; dan
- RUPS mengangkat anggota DPS yang telah mendapat rekomendasi Majelis Ulama Indonesia dan persetujuan OJK. Dalam hal pengangkatan anggota DPS oleh RUPS tersebut dilakukan sebelum adanya persetujuan OJK, maka pengangkatan tersebut baru akan efektif jika anggota DPS tersebut telah disetujui oleh OJK.

Mekanisme pengunduran diri anggota DPS diatur sebagai berikut:
- Seorang anggota DPS berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Bank 3 bulan sebelumnya.
- Bank wajib menyelenggarakan RUPS paling lambat 60 hari sejak pengunduran diri, jika pengunduran ini menyebabkan jumlah anggota DPS menjadi di bawah jumlah minimum yang ditetapkan regulator.
- Anggota DPS tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya tentang pelaksanaan tugasnya untuk masa jabatan sejak pengangkatan oleh RUPS sampai dengan pengunduran diri.

Waktu Kerja, Mekanisme Kerja, dan Rapat DPS

Waktu kerja
- Anggota DPS wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
- Dalam hal seorang anggota DPS tidak dapat menjalankan tugasnya dalam waktu tertentu (lebih dari satu bulan berturut-turut), maka hal tersebut harus disampaikan secara tertulis untuk selanjutnya dibicarakan dalam rapat Dewan Komisaris qq Komite Remunerasi dan Nominasi untuk mendapatkan keputusan tindak lanjut, termasuk di dalamnya melaporkan hal tersebut kepada DSN dan OJK.
- Jika karena suatu hal diketahui anggota DPS berada dalam status hukum sebagai tersangka atau terdakwa, maka hal tersebut harus dilaporkan kepada Dewan Komisaris Bank dengan tembusan kepada Direksi. Selanjutnya melalui rapat Dewan Komisaris akan ditetapkan apakah anggota DPS tersebut akan di non aktifkan atau diberhentikan sementara.
- Anggota DPS wajib menghadiri rapat-rapat non rutin (*on call basis*) berdasarkan kebutuhan BCAS.
- Anggota DPS dapat menghadiri undangan pertemuan atau event eksternal sebagai representatif anggota DPS BCAS sesuai undangan/pemberitahuan yang disampaikan oleh BCAS

Mekanisme Kerja
- Melakukan rapat rutin;
- Melakukan kunjungan ke kantor atau cabang Bank;
- Melakukan akses ke dalam informasi, kebijakan dan prosedur yang ada pada Bank apabila dipandang perlu, termasuk melalui mekanisme wawancara;
- Menghadiri rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas undangan Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- Berkoordinasi dengan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan Unit Kerja Kepatuhan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah; dan
- Meminta laporan kepada Audit Internal atas hasil audit internal terkait pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah.

Rapat DPS
- Rapat DPS wajib diselenggarakan paling kurang 1 kali dalam 1 bulan.
- Undangan rapat DPS disampaikan secara tertulis sebelum pelaksanaan rapat dengan mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat.
- Rapat dipimpin oleh Ketua DPS atau dalam hal Ketua DPS berhalangan maka anggota DPS yang lain dapat ditunjuk sebagai ketua rapat.
- Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Apabila dalam proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, maka perbedaan pendapat tersebut dapat dicantumkan dalam risalah rapat beserta alasannya.
- Dalam rangka pengambilan keputusan, DPS dapat meminta pertimbangan dari DSN-MUI bila diperlukan.
- Dalam hal rapat DPS diselenggarakan menggunakan teknologi telekonferensi, maka Bank mendokumentasikan bukti rekaman audio visual penyelenggaraan rapat secara memadai dan ditindaklanjuti dengan pembuatan risalah rapat yang ditandatangani oleh anggota DPS.
- Seluruh keputusan DPS yang dituangkan dalam risalah rapat merupakan keputusan.
- Hasil rapat DPS wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan dissenting opinion secara jelas.
- Pada kondisi dimana tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan rapat, maka keputusan DPS dapat disampaikan secara tertulis dengan cara sirkulasi.

Transparansi, Larangan, dan Perangkat Tugas DPS

Transparansi
Anggota DPS wajib mengungkapkan rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain dan remunerasi serta fasilitas lain dalam laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Larangan
- Anggota DPS dilarang memanfaatkan BCAS untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi reputasi, aset, atau keuntungan Bank.
- Anggota DPS dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

Perangkat Tugas

Untuk dapat melaksanakan tugas DPS, maka:
- DPS mendapatkan fasilitas yang layak antara lain ruang kerja, telepon, dan lemari arsip.
- Bank menugaskan paling kurang 1 orang pegawai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.

Program Orientasi bagi Anggota DPS Baru

Agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota DPS dengan baik, maka anggota DPS baru wajib mengikuti program orientasi.
Program orientasi meliputi antara lain:
- Pengetahuan mengenai Visi, Misi, Tata Nilai, Strategi BCAS;
- Rencana jangka menengah dan jangka Panjang BCAS (RBB tahun berjalan);
- Kinerja dan keuangan BCAS; dan
- Hal-hal yang relevan dengan dunia perbankan.

Orientasi dapat dilakukan dengan cara:
- Pemaparan oleh Unit Kerja Kantor Pusat.
- Pertemuan dan diskusi dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain untuk mendiskusikan berbagai masalah BCAS atau informasi lain yang dibutuhkan.
- Mempelajari berbagai informasi BCAS yang tersedia secara elektronik (*online base*). Pada tahun 2023, tidak terdapat pelaksanaan program orientasi bagi anggota DPS.

Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Dewan Pengawas Syariah

BCAS memiliki kebijakan program pelatihan DPS yang tercantum dalam Manual GCG BCAS.
Program pelatihan DPS secara umum meliputi:

Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
Fathurrahman Djamil	Sertifikasi Kompetensi Pengawas Syariah	LSP MUI Bidang Ekonomi Syariah	18 Juli 2023
	Workshop Pra-Ijtima' Sanawi (*Annual Meeting*) DPS VIII Tahun 2023 Bidang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	DSN-MUI	4 September 2023
	ESG in House Workshop & Discussion, (Sosialisasi BCA Syariah *Sustainable Finance* Policy, & ESRA)	Trisakti Sustainability Center	27 September 2023
	Indonesian Knowledge Forum BCA 2023	BCA Learning Service	10 Oktober 2023
	Ijtima' Sanawi (*Annual Meeting*) Dps Xix Tahun 2023	DSN-MUI	13 Oktober 2023
	Tata Kelola Perusahaan Mengacu Pada International Standard Principles On Gcg Implementation Practices Dari OECD (Organization For Economic And Cooperation Development)	PT Cita Negeri Amanah	13 November 2023
	Rakernas 2024 Tema "Energized You! BCA Syariah Berani Berubah	PT. Bank BCA Syariah	21 November 2023
Sutedjo Prihatono	*Workshop Pra-Ijtima' Sanawi* (*Annual Meeting*) Dps Viii Tahun 2023 Bidang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	DSN-MUI	4 September 2023
	ESG in House Workshop & Discussion, (Sosialisasi BCA Syariah *Sustainable Finance* Policy, & ESRA)	Trisakti Sustainability Center	27 September 2023
	Indonesian Knowledge Forum BCA 2023	BCA Learning Service	10 Oktober 2023
	Ijtima' Sanawi (*Annual Meeting*) DPS XIX Tahun 2023	DSN-MUI	13 Oktober 2023
	Tata Kelola Perusahaan Mengacu Pada International Standard Principles On GCG Implementation Practices Dari OECD (Organization For Economic And Cooperation Development	PT Cita Negeri Amanah	13 November 2023
	Rakernas 2024 Tema "Energized You! BCA Syariah Berani Berubah	PT. Bank BCA Syariah	21 - 24 November 2023
	Lindungi Hutan dan *Save Your Life*	Lindungi Hutan dan Siaga Satu	22 November 2023

Rangkap Jabatan Anggota DPS

Sebagaimana ketentuan yang berlaku, DPS hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 lembaga keuangan syariah lain dan anggota DPS dilarang merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh BUS dan/atau UUS. Per 31 Desember 2023, seluruh anggota DPS telah mengungkapkan rangkap jabatan sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Rangkap Jabatan
Fathurrahman Djamil	Ketua DPS	PT AIA Financial (Ketua DPS) PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Ketua DPS) PT Sun Life Financial Indonesia (Ketua DPS) PT Bank CIMB Niaga Tbk (Anggota DPS)
Sutedjo Prihatono	Anggota DPS	BPRS HIK Ciledug (Anggota DPS)

Rapat Dewan Pengawas Syariah

Selama tahun 2023 DPS telah menyelenggarakan 29 kali rapat yang terdiri dari rapat gabungan DPS dengan Dewan Komisaris dan Direksi, dan rapat DPS dengan unit kerja/pihak eksternal. Rapat DPS membahas pokok-pokok pembahasan antara lain:

1. *Financial highlight*
2. Laporan hasil pengawasan DPS
3. Pemenuhan prinsip syariah dalam kegiatan Bank
4. Pembahasan *review* atas pengajuan produk
5. Pembahasan *review* atas SOP produk
6. Pembahasan temuan audit internal (Laporan Hasil Audit/LHA)
7. Realisasi penggunaan dana Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bank (Dana TBDSP)/dana sosial dan persetujuan penggunaan dana TBDSP
8. Permohonan opini dari unit kerja serta penyampaian hasil Opini DPS perihal pengembangan produk/fitur baru, pengajuan pembiayaan, penggunaan asuransi, akad pembiayaan, serta program promosi
9. Draft kebijakan pelaksanaan uji petik oleh DPS
10. Pertemuan dengan Kantor Akuntan Publik (KAP)
11. Review Ketentuan Biaya Administrasi Pembiayaan *Murabahah* Emas
12. Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan OJK

Laporan Pelaksanaan Tugas DPS

Sebagaimana ketentuan yang berlaku, pelaksanaan tugas pengawasan DPS telah dilaporkan:

1. Secara semesteran kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Disampaikan oleh Bank kepada OJK dalam 2 bulan setelah periode semester berakhir.
3. Memuat hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS selama 1 semester, yang meliputi antara lain:
   - Kertas kerja pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank; dan
   - Kertas kerja pengawasan terhadap kegiatan Bank.
4. Laporan tersebut disampaikan dengan menggunakan format laporan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

DPS juga menerbitkan 33 opini DPS, berupa opini terkait produk, kebijakan, maupun kegiatan operasional dan bisnis Bank.

No.	Tanggal	No. Opini	Topik
1.	17/01/2023	001/OP/DPS/2023	Pembukaan Rekening Secara *Online*
2.	30/01/2023	002/OP/DPS/2023	Skema Program Promosi Tabungan
3.	03/02/2023	003/OP/DPS/2023	Pengajuan Pembiayaan Nasabah
4.	21/02/2023	004/OP/DPS/2023	Tanggapan terhadap *Review* OJK terkait pengajuan Produk *Murabahah* Emas
5.	05/04/2023	005/OP/DPS/2023	BCA Syariah *Mobile*
6.	05/04/2023	006/OP/DPS/2023	Pengembangan Aplikasi *new mobile banking* BCA Syariah
7.	06/04/2023	007/OP/DPS/2023	Perubahan dan Kalimat Perubahan Nisbah Bagi Hasil (*equivalen rate*) atas Pembiayaan *Syirkah* (*Musyarakah* & *Mudharabah*) dan MMQ pada Surat Pemberitahuan Pemberian Fasilitas Pembiayaan (SPPP) dan akad pembiayaan
8.	03/05/2023	008/OP/DPS/2023	Perjanjian Perdamaian Nasabah
9.	05/05/2023	009/OP/DPS/2023	Pemanfaatan *Host to Host* untuk Memfasilitasi Transaksi Perbankan Nasabah BCA Syariah dan Nasabah BCA
10.	19/05/2023	010/OP/DPS/2023	Penggunaan Asuransi Non Syariah Nasabah
11.	22/05/2023	011/OP/DPS/2023	Produk Bancassurance (Model Bisnis Integrasi)
12.	26/05/2023	012/OP/DPS/2023	Pengembangan Fitur Verifikasi Nasabah di *Counter*

No.	Tanggal	No. Opini	Topik
13.	20/06/2023	013/OP/DPS/2023	Penggunaan Asuransi Non Syariah Nasabah
14.	23/06/2023	014/OP/DPS/2023	Penggunaan Asuransi Non Syariah Grup Nasabah
15.	27/06/2023	015/OP/DPS/2023	Pengembangan Aplikasi *new mobile banking* BCA Syariah
16.	27/06/2023	016/OP/DPS/2023	Program Loyalty: *Cashback* dan Diskon
17.	17/07/2023	017/OP/DPS/2023	Penggunaan Asuransi Non Syariah Nasabah
18.	14/08/2023	018/OP/DPS/2023	Program Lelang Pembiayaan *Murabahah* Emas iB
19.	21/09/2023	019/OP/DPS/2023	Penyelenggaraan Fasilitas *Internet Banking* Individu BCA Syariah
20.	21/09/2023	020/OP/DPS/2023	Penyelenggaraan Fasilitas *Internet Banking* Bisnis BCA Syariah
21.	20/10/2023	021/OP/DPS/2023	Penggunan Asuransi non Syariah Nasabah
22.	20/10/2023	022/OP/DPS/2023	Penggunan Asuransi non Syariah Nasabah
23.	20/10/2023	023/OP/DPS/2023	Agunan Piutang Pembiayaan Nasabah
24.	27/10/2023	024/OP/DPS/2023	Pembiayaan Bersama dan/atau Penawaran Pengalihan Pembiayaan (*Sell Down/Club Deal*) antara BCA dan BCA Syariah dengan mekanisme Hawalah wal Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS)
25.	09/11/2023	025/OP/DPS/2023	*Template* Akad Pembiayaan *Murabahah* Emas BCA Syariah
26.	09/11/2023	026/OP/DPS/2023	Penggunaan Asuransi Non Syariah Nasabah
27.	14/11/2023	027/OP/DPS/2023	Pencairan Fasilitas IMBT-3 dan Pengalihan Hak atas Aset Objek IMBT Nasabah
28.	15/11/2023	028/OP/DPS/2023	Penggunaan Asuransi Non Syariah Nasabah
29.	30/11/2023	029/OP/DPS/2023	Transaksi Setor Tunai Tanpa Kartu (*Cardless*)
30.	30/11/2023	030/OP/DPS/2023	Pengembangan *New Internet Banking* Bisnis
31.	13/12/2023	031/OP/DPS/2023	Penggunaan *Line Facility* Untuk Pembiayaan Nasabah Dengan Pencairan Sekaligus
32.	13/12/2023	032/OP/DPS/2023	Pembiayaan Kepada Nasabah
33.	27/12/2023	033/OP/DPS/2023	Penggunaan Asuransi Non Syariah untuk Asuransi Kerugian Aset BCA Syariah

Rapat Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, dan Rapat Gabungan

Kebijakan Rapat Dewan Komisaris

BCA Syariah merujuk pada beberapa aturan berikut dalam menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris:

a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Pasal 55 ayat 1 menyatakan bahwa Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
b. Pasal 13 (Direksi), Pasal 16 (Komisaris) Anggaran Dasar BCA Syariah.
c. Piagam Dewan Komisaris.

Kebijakan Rapat Dewan Komisaris dalam Piagam Dewan Komisaris dan/atau Anggaran Dasar telah mengatur antara lain:

a. Mekanisme Rapat
   - Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana:
   - Dipandang perlu 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris
   - Atas permintaan tertulis Direksi, atau
   - Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang saham yang dikeluarkan Perseroan.
   - Rapat Dewan Komisaris dapat diselenggarakan secara fisik atau secara elektronik melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik sejenisnya.
b. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris
   - Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan oleh Komisaris Utama atau 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris
   - Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan secara langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan tanda terima yang memadai paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat.
   - Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan.
   - Panggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat. Rapat dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.
c. Pelaksanaan Rapat
   - Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Komisaris
d. Frekuensi Rapat:
   - Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.
   - Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
e. Kuorum dan Keputusan Rapat:
   - Pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
   - Segala keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.
   - Bahan materi rapat Dewan Komisaris akan disiapkan dan dibagikan kepada Dewan Komisaris paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum Rapat Dewan Komisaris diadakan.
f. Risalah Rapat Dewan Komisaris:
   - Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir.
   - Risalah Rapat wajib didokumentasikan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
   - Dalam hal terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) maka hal tersebut wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Komisaris beserta alasan perbedaan pendapat.

Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris telah melaksanakan 44 kali rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan secara fisik dan melalui telekonferensi serta telah memenuhi ketentuan OJK mengenai frekuensi minimal pelaksanaan rapat Dewan Komisaris.

Frekuensi Kehadiran, Jadwal dan Agenda Rapat Dewan Komisaris

Frekuensi rapat Dewan Komisaris dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Ratna Yanti *	Presiden Komisaris Independen	44	43	98%
Inge Setiawati *	Komisaris Independen	38	37	97%
Rickyadi Widjaja *	Komisaris	38	34	89%
Tantri Indrawati **	Presiden Komisaris Independen	6	6	100%
Ina Widjaja **	Komisaris	6	6	100%

Keterangan:
*) Menjabat sejak tanggal 22 Februari 2023.
**) Masa jabatan berakhir pada 22 Februari 2023.

Adapun agenda rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan sepanjang tahun 2023 di antaranya adalah:
1. Realisasi Kerja Tahun 2022 & Rencana Kerja Tahun 2023 Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
2. Proses Pemilihan KAP untuk Audit Laporan Keuangan BCAS Tahun 2023.
3. Pembahasan *Self Assessment* GCG
4. Update Penyelesaian NPF dan AYDA.
5. Pelaksanaan APU-PPT Triwulan IV-2022 dan Laporan Kepatuhan Semester II Tahun 2022.
6. Persetujuan atas rekomendasi KRN.
7. Perubahan Komposisi Keanggotaan Komite di bawah Dewan Komisaris BCA Syariah dan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi BCA.
8. Presentasi Strategi dan Rencana Bisnis Unit Kerja.
9. Laporan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan BCAS Tahun 2022 oleh AP/KAP.
10. Perubahan Kebijakan Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM).

Rencana Rapat Dewan Komisaris Tahun 2024

Berikut adalah jadwal rapat Dewan Komisaris BCAS yang telah ditetapkan untuk tahun 2024:

Bulan	Tanggal
Januari	2, 9, 16, 30
Februari	6, 13, 15, 20
Maret	5, 14, 19
April	2, 30
Mei	7, 14, 28
Juni	4, 11
Juli	2, 9, 16, 30
Agustus	6, 13, 27
September	3, 10, 17
Oktober	1, 15, 29
November	5, 26
Desember	3, 10, 24, 31

Jadwal rapat Dewan Komisaris tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Kebijakan Rapat Direksi

Penyelenggaraan rapat Direksi BCAS dilaksanakan berdasarkan peraturan-peraturan berikut:
a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
b. Pasal 13 Anggaran Dasar BCAS.

Kebijakan Rapat Direksi dalam Piagam Direksi dan/ atau Anggaran Dasar telah mengatur antara lain:
a. Mekanisme Rapat
   Rapat Direksi dapat diselenggarakan secara fisik atau secara elektronik melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik sejenisnya.
b. Frekuensi Rapat:
   - Rapat Direksi wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan atau paling kurang 12 (dua belas) kali dalam setahun.
c. Kuorum dan Keputusan Rapat:
   - Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
   - Pengambilan keputusan rapat Direksi wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
   - Segala keputusan yang diambil oleh Direksi bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab bagi seluruh anggota Direksi.
   - Bahan materi rapat Direksi akan disiapkan dan dibagikan kepada Direksi paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum Rapat Direksi diadakan.
d. Risalah Rapat:
   - Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
   - Risalah rapat Direksi wajib didokumentasikan dengan baik sesuai dengan ketentuan regulasi terkait.
   - Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam Rapat Direksi, wajib dicantumkan secara tertulis dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Pelaksanaan Rapat Direksi

Sepanjang tahun 2023, Direksi telah menyelenggarakan 43 kali rapat Direksi yang diselenggarakan secara fisik dan melalui telekonferensi serta telah memenuhi ketentuan OJK mengenai frekuensi minimal pelaksanaan rapat Direksi.

Frekuensi Kehadiran, Jadwal dan Agenda Rapat Direksi

Frekuensi rapat Direksi dan tingkat kehadiran anggota Direksi sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Yuli Melati Suryaningrum	Presiden Direktur	43	39	91%
Ina Widjaja*	Direktur	36	31	86%
Houda Muljanti	Direktur	43	39	91%
Pranata	Direktur	43	36	84%
Lukman Hadiwijaya	Direktur	43	41	95%
Rickyadi Widjaja**	Direktur	7	5	71%

Keterangan:
*) Menjabat sejak tanggal 22 Februari 2023.
**) Masa jabatan berakhir pada 22 Februari 2023.

Adapun agenda rapat Direksi yang diselenggarakan sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:
1. Pemaparan Laporan Pengukuran Standar Layanan Kantor Pusat dan Kantor Cabang dengan MRI.
2. *Stress Testing* Terintegrasi.
3. Perubahan Rencana Bisnis Bank 2023-2025 & Perubahan Penyelenggaraan Produk Bank.
4. Kebijakan Keuangan Berkelanjutan.
5. *Self Assessment* GCG.
6. *Scoring* ABIYA.
7. *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* BCA Syariah.
8. *Monitoring* Tindak Lanjut Hasil Audit Internal dan Eksternal.
9. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2024.
10. Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2024-2026 dan *Corporate* Planning Tahun 2024-2028.

Rencana Rapat Direksi Tahun 2024

Berikut adalah jadwal rapat Direksi BCAS yang telah ditetapkan untuk tahun 2024:

Bulan	Tanggal
Januari	10, 17, 18, 24, 31
Februari	7, 21, 28
Maret	6, 13, 20, 27
April	3, 24
Mei	8, 15, 22, 29
Juni	5, 12, 19, 26
Juli	3, 10, 17, 24, 31
Agustus	7, 14, 21, 28
September	11, 18, 25
Oktober	2, 9, 16, 23, 30
November	6, 13, 20, 27
Desember	4, 11, 18

Jadwal rapat Direksi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Kebijakan Rapat Gabungan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum:
a. Pasal 30 ayat 2 menyatakan bahwa Direksi wajib menyelenggarakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
b. Pasal 55 ayat 2 menyatakan bahwa Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Rapat gabungan telah tercakup dalam Piagam Direksi dan Piagam Dewan Komisaris serta Anggaran Dasar.
Kebijakan tersebut mengatur antara lain:
a. Mekanisme Rapat:
   Rapat gabungan dapat diselenggarakan secara fisik atau secara elektronik melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik sejenisnya.
b. Frekuensi Rapat:
   Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat Bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
c. Kuorum dan Keputusan Rapat:
   - Pengambilan keputusan Rapat Gabungan terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
   - Segala keputusan yang diambil dalam rapat gabungan bersifat mengikat.
d. Risalah Rapat:
   - Hasil rapat wajib dituangkan dalam Risalah Rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
   - Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat beserta alasannya wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat.

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Selama tahun 2023, Dewan Komisaris dan Direksi telah menyelenggarakan rapat gabungan sebanyak 11 kali yang diselenggarakan secara fisik dan melalui telekonferensi. Frekuensi Kehadiran dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi Sepanjang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Dewan Komisaris					Direksi					
	TI**	RY	IS*	RW*	IW**	YM	IW*	HM	PN	LH	RW**
Total Rapat	1	11	10	10	1	11	10	11	11	11	1
Kehadiran	1	9	9	9	1	10	9	10	7	10	1
% Kehadiran	100%	82%	90%	90%	100%	91%	90%	91%	64%	91%	100%

Keterangan:
*) Menjabat sejak tanggal 22 Februari 2023.
**) Masa jabatan berakhir pada 22 Februari 2023.

RY : Ratna Yanti
RW : Rickyadi Widjaja
IS : Inge Setiawati
TI : Tantri Indrawati
LH : Lukman Hadiwijaya
YM : Yuli Melati Suryaningrum
IW : Ina Widjaja
PN : Pranata
HM : Houda Muljanti

Rapat Gabungan Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS

Selama tahun 2023, Dewan Komisaris, Direksi dan DPS telah menyelenggarakan rapat gabungan sebanyak 12 kali yang diselenggarakan secara fisik dan melalui telekonferensi. Frekuensi Kehadiran dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris, DPS dan Direksi Sepanjang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	DPS		Dewan Komisaris					Direksi					
	FD	SP	TI**	RY	IS*	RW*	IW**	YM	IW*	HM	PN	LH	RW**
Total Rapat	12	12	2	12	10	10	2	12	10	12	12	12	2
Kehadiran	12	12	2	10	9	9	2	11	9	11	8	11	2
% Kehadiran	100%	100%	100%	83%	90%	90%	100%	92%	90%	92%	67%	92%	100%

Keterangan:
*) Menjabat sejak tanggal 22 Februari 2023.
**) Masa jabatan berakhir pada 22 Februari 2023.

RY : Ratna Yanti
RW : Rickyadi Widjaja
IS : Inge Setiawati
TI : Tantri Indrawati
LH : Lukman Hadiwijaya
YM : Yuli Melati Suryaningrum
IW : Ina Widjaja
PN : Pranata
HM : Houda Muljanti
FD : Fathurrahman Djamil
SP : Sutedjo Prihatono

Hubungan Afiliasi

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pemegang Saham Pengendali berupa hubungan keuangan dan ataupun hubungan keluarga, baik langsung maupun tidak langsung adalah sebagai berikut:

Nama	Dewan Komisaris			Direksi					DPS		Pemegang Saham Utama/ Pengendali
	RY	RW	IS	YM	HM	IW	PN	LH	FD	SP	
Ratna Yanti	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rickyadi Widjaja	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Inge Setiawati	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X
Yuli Melati Suryaningrum	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X
Houda Muljanti	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X
Ina Widjaja	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X
Pranata	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X
Lukman Hadiwijaya	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X
Fathurrahman Djamil	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X
Sutedjo Prihantono	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X

Keterangan:

RY : Ratna Yanti
HM : Houda Muljanti
FD : Fathurrahman Djamil
RW : Rickyadi Widjaja
IW : Ina Widjaja
SP : Sutedjo Prihatono
IS : Inge Setiawati
PN : Pranata
YM : Yuli Melati Suryaningrum
LH : Lukman Hadiwijaya

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam upaya mendukung kepengurusan, pengelolaan, pembidangan, dan pelaksanaan tugas anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta mendukung peningkatan kinerja, BCAS memiliki komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang beragam.

Kebijakan Keberagaman

BCAS berkomitmen untuk tidak membedakan gender, suku, agama, dan ras dengan memberikan kesempatan bagi perempuan maupun laki-laki, pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, keahlian, dan independensi yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi anggota Dewan Komisaris ataupun anggota Direksi. Dalam proses nominasi, KRN mempertimbangkan antara lain kualifikasi kandidat anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi serta memperhatikan kondisi eksternal dan internal sesuai arahan strategi BCAS dan Pemegang Saham Pengendali. Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi BCAS telah memenuhi ketentuan Prinsip dan Rekomendasi OJK.

Keberagaman Komposisi Anggota Dewan Komisaris

Aspek Keberagaman	Realisasi
Keahlian	Anggota Dewan Komisaris memiliki keahlian yang beragam mulai dari ahli *banking* & *financial strategy*, *corporate secretary*, CSR, *banking supervision*, *banking operation* & *services*, *banking* & *finance*, *branch banking*, *corporate banking*, *sharia/islamic banking strategy*, dan *risk management*.
Pendidikan	Anggota Dewan Komisaris memiliki pendidikan yang beragam mulai dari sarjana dan magister di bidang manajemen, teknik, ekonomi, psikologi, dan bidang lainnya.
Pengalaman Kerja	Anggota Dewan Komisaris saat ini seluruhnya memiliki pengalaman kerja yang berasal dari profesional pada perbankan.
Usia	Anggota Dewan Komisaris memiliki usia yang beragam mulai dari 56 tahun sampai dengan 60 tahun.
Jenis Kelamin	Dewan Komisaris BCAS memiliki jenis kelamin yang beragam yaitu 2 orang berjenis kelamin perempuan (salah satunya merupakan Presiden Komisaris Independen) dan 1 orang berjenis kelamin Laki-laki.
Independensi	• Seluruh anggota Dewan Komisaris, independen terhadap pemegang saham pengendali BCA Syariah. • Mayoritas (lebih dari 60%) anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Dari 3 anggota Dewan Komisaris, BCAS memiliki 2 orang Komisaris Independen.

Keberagaman Komposisi Anggota Direksi

Aspek Keberagaman	Realisasi
Keahlian	Anggota Direksi memiliki keahlian yang beragam mulai dari *accounting* & *financial management*, *banking strategy*, *branch banking management*, *banking operation* & *service excellence*, *banking compliance*, *corporate banking business*, *commercial* & SME *banking*, *consumer banking*, *corporate culture*, *corporate strategy*, *employee training* & *development*, ESG, *human capital management*, *Information Technology*, *loan restructuring*, *marketing strategy*, *network distribution* & *delivery channel management*, *risk management*, *sharia/islamic banking strategy*, *strategic planning* & *transformation*, *syndication loan*, *transaction banking*, dan *treasury*.
Pendidikan	Anggota Direksi memiliki pendidikan yang beragam mulai dari sarjana dan magister di bidang manajemen, ekonomi, hukum ekonomi, teknologi informasi, teknik, dan bidang lainnya.
Pengalaman Kerja	Anggota Direksi memiliki pengalaman kerja yang beragam antara lain berasal dari professional pada perbankan dan perusahaan multinasional.
Usia	Anggota Direksi memiliki usia yang beragam mulai dari 47 tahun sampai dengan 56 tahun.
Jenis Kelamin	Dari 5 anggota Direksi, 3 anggota Direksi berjenis kelamin perempuan (salah satunya Presiden Direktur) dan 2 anggota Direksi berjenis kelamin laki-laki.
Independensi	• Presiden Direktur merupakan pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali BCAS. • Seluruh Direksi merupakan pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali BCAS.

Kebijakan Remunerasi

Kebijakan remunerasi merupakan salah satu strategi BCAS dalam memberikan imbalan kepada Pegawai, anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan anggota Direksi, yang disesuaikan dengan kemampuan BCAS agar dapat mengakomodir perkembangan kualitas pegawai dan jajaran manajemen dengan tetap memperhatikan ketahanan dan kelangsungan usaha BCAS.

Secara umum, strategi remunerasi BCAS berpedoman pada:
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum:
   - Pasal 33 ayat (2) Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank, selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
   - Pasal 33 ayat (3) Anggota Direksi wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
   - Pasal 58 ayat (2) Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS.
   - Pasal 58 ayat (3) Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Pasal 28 Bank wajib mengungkapkan informasi kebijakan remunerasi dalam laporan tahunan pelaksanaan tata kelola sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum.
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum. Bank wajib memiliki kebijakan tertulis Remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai dengan tetap memperhatikan kepentingan pegawai, Bank, dan pemangku kepentingan.
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
   - Pasal 51 ayat (2) Anggota Dewan Pengawas Syariah dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BUS selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham.
   - Pasal 51 ayat (3) Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada laporan pelaksanaan GCG sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN)

Dewan Komisaris BCAS telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) yang salah satu fungsinya adalah membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengembangan kebijakan serta penerapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah di BCAS.

Komposisi, struktur keanggotaan, tugas dan tanggung jawab, pelaksanaan rapat, dan remunerasi selengkapnya disajikan pada bagian Komite Remunerasi dan Nominasi pada Laporan Tahunan ini.

Cakupan Kebijakan Remunerasi dan Implementasinya

Kebijakan remunerasi yang telah ditetapkan oleh BCAS mencakup pengaturan terkait remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan berlaku untuk Pegawai baik di unit bisnis maupun operasional. Kebijakan remunerasi tersebut mencakup remunerasi yang bersifat tetap dan remunerasi yang bersifat variabel.

Remunerasi yang Dikaitkan dengan Risiko dan Kinerja

Remunerasi yang Dikaitkan dengan Risiko

Risiko Utama dalam Menerapkan Remunerasi

Dalam menetapkan strategi remunerasi, khususnya kebijakan remunerasi yang bersifat variabel, BCAS mempertimbangkan risiko utama (*key* risk), yaitu risiko kredit dan risiko operasional. Risiko kredit dan risiko operasional telah menjadi risiko utama BCAS pada tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini karena risiko kredit dan risiko operasional melekat pada jenis transaksi dan bisnis yang memiliki dampak risiko besar dalam menjalankan bisnis BCAS serta menghasilkan pendapatan yang signifikan bagi BCAS.

Dampak Risiko Utama terhadap Remunerasi

Dengan adanya penetapan jenis risiko utama tersebut akan berdampak ke penentuan *Key Performance Indicator* (KPI) dan berdampak pada pemberian remunerasi yang bersifat variabel.

Remunerasi yang Dikaitkan dengan Kinerja

Indikator Pengukuran Kinerja dalam Penetapan Remunerasi anggota Direksi

Indikator penetapan remunerasi anggota Direksi antara lain sebagai berikut:
- Prestasi kerja masing-masing individual anggota Direksi;
- Kinerja keuangan BCAS dan pemenuhan cadangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Kesetaraan jabatan pada internal BCAS dan pada beberapa bank sejenis antara lain dari sisi aset dan karakteristik;
- Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang BCAS;
- Risiko yang mungkin timbul di kemudian hari sehingga menyebabkan kerugian bagi BCAS.

Indikator Pengukuran Kinerja dalam Penetapan Remunerasi anggota Dewan Komisaris

Indikator penetapan remunerasi anggota Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut:
- Pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi terkait:
  - Strategi dan rencana penting.
  - Integritas laporan keuangan.
  - Sistem pengendalian internal dan manajemen risiko.
  - Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- Pemberian persetujuan atas keputusan Direksi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan/Anggaran Dasar BCA Syariah.

Indikator Pengukuran Kinerja dalam Penetapan Remunerasi Dewan Pengawas Syariah

Indikator penetapan remunerasi anggota Dewan Pengawas Syariah antara lain sebagai berikut:
- Pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi terkait:
  - Pemberian opini terkait produk dan aktivitas yang diterbitkan;
  - Pemberian opini terhadap proses pembiayaan yang akan berjalan dan sudah berjalan;
  - Pelaksanaan prinsip syariah di BCA Syariah;
  - Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Indikator Pengukuran Kinerja dalam Penetapan Remunerasi Pegawai

Sistem penilaian kinerja BCAS dilakukan secara objektif dan berorientasi pada pengembangan Pegawai:
- Penilaian prestasi diarahkan pada prestasi kerja dan demonstrasi atas perilaku budaya perusahaan dalam diri pegawai di mana:
  - Prestasi kerja adalah hasil kerja dan pencapaian pegawai terhadap sasaran/target kerja.
  - Perilaku budaya adalah demonstrasi perilaku yang ditunjukkan pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yang mencerminkan nilai-nilai utama perusahaan.
- Hasil penilaian prestasi dikombinasikan dengan penilaian kompetensi pegawai menjadi acuan untuk menentukan arah pengembangan pegawai.

Dampak Kinerja BCAS, Kinerja Unit Kerja, dan Kinerja Individu terhadap Remunerasi

Penentuan besarnya remunerasi khususnya yang bersifat variabel, dan kinerja individu dilakukan reviu setiap 1 (satu) tahun sekali. Hasil penilaian kinerja individu tersebut menjadi dasar bagi apresiasi perusahaan dalam bentuk bonus, promosi, peninjauan pangkat, kenaikan upah/gaji.

Pengukuran kinerja didasarkan pada sasaran yang disepakati di awal tahun. Pemberian bonus berdasarkan penilaian kinerja individu telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan dan Surat Edaran. Untuk penilaian pencapaian sasaran bisnis/kerja yang sifatnya kuantitatif digunakan pedoman penilaian seperti melebihi sasaran (>110%), mencapai sasaran (100-110%) dan mencapai sebagian sasaran (<100%).

Pihak yang Menjadi *Material Risk Takers* (MRT)

Penetapan *Material Risk Takers* di BCAS menggunakan pendekatan kualitatif:
- Presiden Direktur dan seluruh Direksi, beserta
- Presiden Komisaris dan seluruh Komisaris

Berdasarkan kriteria tersebut, BCAS menetapkan pihak yang menjadi MRT adalah seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi di BCA Syariah yang berjumlah 8 (delapan) orang sesuai dengan jumlah yang menjabat per 31 Desember 2023.

Penyesuaian Remunerasi Dikaitkan dengan Risiko dan Kinerja

- **Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan**
  Bagi *Material Risk Takers* (MRT), bonus ditangguhkan dan dibayarkan secara proporsional dalam bentuk tunai, sebagai berikut:
  - 90% dalam bentuk tunai;
  - 10% ditangguhkan selama 3 tahun dengan membayar secara tunai dan disimpan dalam bentuk deposito yang diblokir dengan komposisi per tahun 30%, 30%, 40% dan dapat dicairkan secara bertahap selama 3 tahun.

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remunerasi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah BCAS ditetapkan berdasarkan prosedur, struktur, serta indikator yang telah diatur dalam Anggaran Dasar BCA Syariah serta berpedoman pada ketentuan:
a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
b. Surat Edaran No. 12/13/DPbS perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
d. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.

Skema prosedur pengusulan dan penetapan remunerasi:



Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan BCAS pada tahun 2023, telah diberikan kuasa dan wewenang kepada:

a. Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya kepada anggota Direksi, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN).
b. Pemegang Saham Mayoritas BCAS untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya yang akan dibayar kepada anggota Dewan Komisaris.
c. Pemegang Saham Mayoritas BCAS untuk menetapkan pembagian tantiem anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah BCAS.

Penerapan Remunerasi di BCAS

Paket remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS diberikan dalam bentuk gaji, tunjangan hari raya, bonus, tunjangan rutin, dan fasilitas lainnya dalam bentuk natura maupun nonnatura. Selama tahun 2023, BCAS memberikan remunerasi kepada Dewan Komisaris, Direksi dan DPS dengan total mencapai Rp 34.485.910.000. Pemberian remunerasi ini mempertimbangkan kinerja BCAS secara keseluruhan dan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS.

Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS mencakup jumlah anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota DPS serta jumlah keseluruhan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

a. Struktur Remunerasi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya	Jumlah Diterima dalam 1 tahun					
	Direksi		Dewan Komisaris		DPS	
	Orang	Jutaan (Rp)	Orang	Jutaan (Rp)	Orang	Jutaan (Rp)
Gaji, bonus, tunjangan rutin, bonus, dan fasilitas lainnya dalam bentuk nonnatura	6	28.311,14	5	3.103,80	2	1.384,46
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang:						
1. Dapat dimiliki	6	1.393,99	5	188,74	2	103,78
2. Tidak dapat dimiliki						
Total	**6**	**29.705,13**	**5**	**3.292,54**	**2**	**1.488,24**

b. Paket Remunerasi yang Dikelompokkan dalam Tingkat Penghasilan yang Diterima oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS dalam 1 Tahun

Jumlah Remunerasi per Orang Dalam 1 Tahun	Jumlah Direksi*	Jumlah Dewan Komisaris**	Jumlah Dewan Pengawas Syariah
Di atas Rp2 miliar	6	-	-
Di atas Rp1 miliar s.d. Rp2 miliar	-	1	-
Di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	-	3	2
Rp500 juta ke bawah	-	1	-

Keterangan:
*) Ada penggantian satu anggota Direksi dan dua anggota Dewan Komisaris periode Februari 2023

Remunerasi yang Bersifat Variabel bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Pegawai

Remunerasi yang bersifat variabel terdiri dari tunai dan saham. BCA Syariah belum menjadi Perusahaan Terbuka (Tbk) sehingga tidak memberikan saham dalam bentuk ekstra bonus.

a. Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pegawai yang Menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel Selama 1 Tahun dan Total Nominal Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Diterima

Remunerasi yang Bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 (Satu) Tahun	
	Orang	Jutaan (Rp)
Dewan Komisaris	5	1.042
Direksi	6	11.742
Dewan Pengawas Syariah	2	193
Pegawai	935	26.922

***b. Shares Option* yang diterima Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah**

Tidak ada *shares option* yang diterima Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2023.

Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan bagi MRT (untuk seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris)

Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan telah diterapkan untuk pembayaran tahun 2023 sebesar Rp1.002.000.000.

Penerapan Remunerasi bagi MRT (untuk seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris)

Rincian jumlah remunerasi yang diberikan dalam 1 tahun, meliputi:

a. Remunerasi yang Bersifat Tetap wajib paling sedikit memperhatikan skala usaha, kompleksitas usaha, peer group, tingkat inflasi, kondisi, dan kemampuan keuangan, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Remunerasi yang Bersifat Tetap	2023 Jutaan (Rp)
1. Tunai	16.326

b. Remunerasi yang Bersifat Variabel selain memperhatikan Remunerasi yang Bersifat Tetap, juga wajib mendorong dilakukannya prudent risk taking dan berkoordinasi dengan Departemen Manajemen Risiko.

Remunerasi yang Bersifat Varibel	2023 Jutaan (Rp)	
	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan
1. Tunai 2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	13.776	1.002

Data Rasio Gaji dan Pesangon yang Dibayarkan

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Keterangan	Rasio Gaji
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	23,76 x
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,59 x
Rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,58 x
Rasio gaji DPS yang tertinggi dan terendah	1,11 x
Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	3,01 x
Rasio kompensasi tahunan Direktur Utama dan median/mean dari kompensasi tahunan seluruh Pegawai (kecuali Direktur Utama)	59,54 x

Jumlah Pegawai yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan Total Nominal Pesangon yang Dibayarkan

Jumlah Nominal Pesangon yang Dibayarkan per Orang dalam 1 Tahun	Jumlah Pegawai
Di atas Rp1 miliar	1
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	2
Rp500 juta ke bawah	10

Komite–Komite di Bawah Dewan Komisaris

Di bawah Dewan Komisaris, terdapat komite-komite yang bertugas untuk membantu menjalankan fungsi pengawasan serta merumuskan kebijakan Dewan Komisaris dalam bidang-bidang tertentu. Namun demikian, keputusan akhir tetap di tangan Dewan Komisaris atau dapat diwakilkan ke komite-komite tersebut melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris. Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris, terdiri dari Komite Audit; Komite Pemantau Risiko; serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

Komite Audit

Komite Audit dibentuk untuk bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan terhadap jalannya BCAS dan memberikan nasihat kepada Direksi. Tanggung jawab utama Komite Audit, termasuk memantau dan mengevaluasi rencana dan proses audit, serta mengawasi upaya tindak lanjut temuan audit untuk mengukur pelaksanaan pengendalian internal dan memastikan bahwa laporan keuangan BCAS disampaikan secara akurat dan tepat waktu.

1. Dasar Hukum

Pembentukan Komite Audit BCAS didasarkan kepada Surat Keputusan Direksi No. 057/SK/DIR/2023 tanggal 29 Desember 2023 perihal Kebijakan Tata Kelola PT Bank BCA Syariah.

2. Piagam Komite

Audit Dalam menjalankan fungsinya di BCAS, Komite telah memiliki Piagam Komite berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 057/SK/DIR/2023 tanggal 29 Desember 2023 perihal Kebijakan Tata Kelola PT Bank BCA Syariah. Di dalamnya berisi antara lain mengenai tugas dan tanggung jawab Komite, struktur, uraian mengenai aktivitas dan kewenangan. Manual GCG disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa ditinjau secara berkala.

Piagam Komite Audit telah diunggah dalam *website* BCA Syariah pada bagian Tata Kelola Perusahaan dan dapat diakses melalui link https://www.bcasyariah.co.id/komite-audit.

3. Struktur dan Keanggotaan

Berikut merupakan struktur dan keanggotaan Komite Audit:

1. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
2. Keanggotaan Komite Audit paling kurang terdiri dari:
   - Seorang Komisaris Independen yang merangkap Ketua Komite Audit.
   - Seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang akuntansi keuangan dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang perbankan syariah.

3. Anggota Komite Audit bukanlah merupakan anggota Direksi BCAS.
4. Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite Audit harus merupakan Komisaris Independen.
5. Pengangkatan anggota Komite Audit dilakukan oleh Direksi berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris.

Susunan Komite Audit per 31 Desember 2023

Nama	Jabatan	Jabatan di BCAS	Periode Jabatan
Inge Setiawati	Ketua	Komisaris Independen	Sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun 2025.
J. Sindu Adisuwono	Anggota	Pihak Independen	Sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun 2025.
Senjaya Komala	Anggota	Pihak Independen	Sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun 2025.

4. Profil dan Kualifikasi



Inge Setiawati
Ketua Komite Audit

Warga Negara Indonesia, berusia 56 tahun, dan berdomisili di Jakarta.

Dasar pengangkatan terakhir keanggotaan Komite di Bawah Dewan Komisaris: Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite Nomor 002/SKP/DIR/2023 tanggal 15 Desember 2023.

Profil Inge Setiawati dapat ditemukan pada profil Dewan Komisaris, di bab Profil Perusahaan Laporan Tahunan BCAS 2023.



J. Sindu Adisuwono
Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, 61 tahun, berdomisili di Jakarta.

Dasar pengangkatan terakhir keanggotaan Komite di Bawah Dewan Komisaris: Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite Nomor 002/SKP/DIR/2023 tanggal 15 Desember 2023.

Berkarier di PT BCA Tbk mulai tahun 1987 dan telah menempati jabatan manajerial di antaranya Wakil Kepala Divisi Audit Internal (1999-2008) dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Divisi Audit Internal (2008-2017). Beliau pernah menjabat sebagai Presiden Komisaris PT BCA *Finance* (2018 – Juli 2021). Saat ini menjabat sebagai Komisaris di PT Asuransi Umum BCA (sejak Agustus 2021), Anggota Komite Audit pada PT Bank Ina Perdana, Tbk (sejak Maret 2021 dan Anggota Komite Audit PT Bank KB Bukopin (Januari 2022). Memiliki pengalaman sebagai Ketua Dewan Pengawas Yayasan Bhakti PT BCA Tbk; Ketua Dewan Pengawas Dana Pensiun PT BCA Tbk; Audit *Committee* Chairman the Institute of Internal Auditors Indonesia; Sekjen, Ketua Umum dan Anggota Dewan Pengawas Ikatan Auditor Intern Bank.

Beliau meraih gelar Doktorandus di bidang Ekonomi Akuntansi dari Universitas Katolik Parahyangan.



Senjaya Komala
Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, 60 tahun, berdomisili di Jakarta

Dasar pengangkatan keanggotaan komite: Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite Nomor 002/SKP/DIR/2023 tanggal 15 Desember 2023.

Berkarier di PT BCA Tbk mulai tahun 1990 - 2008 dan telah memegang beberapa jabatan strategis diantaranya, sebagai Kepala Urusan Kredit BCA Kanwil IX (2003), Kepala BCA KCU Bogor (2006) dan Chief Representative BCA Hong Kong (2008). Beliau juga pernah menduduki jabatan eksekutif di PT Central Sentosa *Finance* sebagai Credit & *Finance* Accounting Deputy Direktur (2011) dan Direktur Keuangan (2013).

Beliau meraih gelar Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen PPM.

5. Persyaratan Keanggotaan Komite

Persyaratan Umum

- Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 komite lainnya di BCAS.
- Anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota komite lain di BCAS, Bank lain, dan/atau perusahaan lain.

Persyaratan Kompetensi

- Anggota Komite Audit wajib memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- Anggota Komite Audit wajib memahami laporan keuangan, bisnis BCAS, proses audit, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan terkait lainnya.
- Anggota Komite Audit bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus.
- Komite Audit wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan.

Persyaratan Independensi

- Anggota Komite Audit bukan merupakan orang dalam KAP, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *nonassurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada BCAS dalam waktu 6 bulan terakhir.
- Anggota Komite Audit bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan BCAS dalam waktu 1 tahun terakhir kecuali Komisaris Independen paling singkat 6 bulan.
- Anggota Komite Audit dilarang berasal dari anggota Direksi pada bank lain.
- Anggota Komite Audit tidak mempunyai saham BCAS baik langsung maupun tidak langsung.
- Anggota Komite Audit tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama BCAS.
- Anggota Komite Audit tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha BCAS.
- Anggota yang berasal dari Pihak Independen wajib direkomedasikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.

6. Pendidikan atau Pelatihan

Informasi mengenai Ketua Komite Audit yang juga merupakan Komisaris Independen telah disampaikan di Bab Dewan Komisaris. Sementara itu, kedua anggota komite telah mengikuti pelatihan dengan topik Pelatihan Dasar Perbankan Syariah dan Tata Kelola Perusahaan mengacu pada *International Standard Principles on GCG Implementation Practice*s dari OECD.

7. Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Audit berakhir karena masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir, maka pengangkatan anggota Komite Audit yang baru wajib dilakukan maksimal dalam jangka waktu 3 (bulan terhitung sejak pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang baru atau sejak anggota Dewan Komisaris yang baru dinyatakan lulus *fit and proper test* oleh OJK. Masa jabatan anggota Komite Audit pada periode ini akan berakhir pada saat penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun 2025.

8. Independensi

Seluruh anggota Komite Audit adalah pihak independen, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan usaha dengan BCAS yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Aspek Independensi Komite Audit dapat dilihat pada tabel berikut:

Aspek Independensi	Inge Setiawati	J. Sindu Adisuwono	Senjaya Komala
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi.	v	v	v
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi.	v	v	v
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan.	v	v	v
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit.	v	v	v

9. Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

Berkaitan dengan laporan keuangan
- Menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan BCAS kepada publik dan/atau pihak otoritas, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan BCAS.
- Menelaah dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan BCAS.

Berkaitan dengan audit internal
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran Satuan Kerja Audit Internal (SAI).
- Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit internal BCAS.
- Mengevaluasi kinerja SAI dalam aspek kecukupan dan efektivitas fungsi audit internal di BCAS serta memastikan SAI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas; serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan SAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja.
- Memastikan SAI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Auditor Eksternal, dan OJK, BI, serta pihak-pihak terkait lainnya.
- Memastikan SAI bekerja secara independen.

Berkaitan dengan audit eksternal
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris berdasarkan hasil evaluasi mengenai penunjukan, penunjukan kembali, dan pemberhentian atau penggantian KAP dan/atau AP yang akan mengaudit laporan keuangan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, serta imbalan jasa.
- Melakukan *monitoring* atas pelaksanaan audit KAP, terhadap aspek kesesuaian dengan Standar Audit yang berlaku dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), serta memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan KAP.

Berkaitan dengan proses/sistem pengendalian internal
- Memastikan Direksi mengambil tindakan yang diperlukan secara cepat atas hasil temuan SAI, AP dan hasil pengawasan OJK serta BI.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk pengendali mutu independen dari pihak eksternal dengan tujuan melakukan kaji ulang terhadap SAI.

Berkaitan dengan tata kelola dan kepatuhan
- Memantau implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) yang efektif dan berkelanjutan.
- Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan BCAS.
- Menelaah kepatuhan BCAS terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha BCAS.
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi BCAS.
- Menghadiri RUPS Tahunan BCAS.
- Menjalankan tugas-tugas lain yang relevan dengan fungsi Komite Audit atas permintaan Dewan Komisaris.

10. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat

Kebijakan rapat Komite Audit diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan BCA Syariah, sekurang-kurangnya 4 kali dalam setahun. Di 2023, Komite Audit menyelenggarakan rapat sebanyak 17 kali.

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Inge Setiawati*	13	13	100%
J. Sindu Adisuwono	17	16	94%
Senjaya Komala**	1	1	100%
Tantri Indrawati***	4	4	100%
Riyo S Wisaksono****	13	13	100%

Keterangan:
*) Menjabat sejak tanggal 22 Februari 2023.
**) Menjabat sejak tanggal 15 Desember 2023.
***) Masa jabatan berakhir pada 22 Februari 2023.
****) Masa jabatan berakhir pada 16 September 2023.

Agenda rapat di antaranya membahas:
- Realisasi kerja tahun 2022 dan program kerja tahun 2023
- Proses Pemilihan KAP untuk Audit Laporan Keuangan tahun 2023
- Realisasi kerja SKAI tahun 2022 dan rencana kerja SKAI tahun 2023
- Rekomendasi KAP untuk audit Laporan Keuangan tahun buku 2023
- Pembahasan Laporan Hasil Audit
- Rekomendasi penunjukan jasa eksternal review
- Finalisasi Laporan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan BCAS Tahun 2022 oleh AP/KAP
- Pembahasan hasil pemeriksaan OJK tahun 2023
- Rencana kerja SKAI tahun 2024
- Realisasi kerja tahun 2023 dan program kerja tahun 2024

11. Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan selama Tahun 2023

Rencana Kerja	Realisasi
Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi dan Unit Kerja kepada Dewan Komisaris dan mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris,	• Menghadiri Rapat Dewan Komisaris dengan DPS dan Direksi, sebanyak 12 kali. • Melakukan diskusi dengan unit kerja dan Memberikan masukan dan menyampaikan hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris berdasarkan hasil pertemuan/ rapat dengan unit kerja. Masukan-masukan dari Komite Audit kepada Dewan Komisaris disampaikan melalui rapat-rapat dan telah dituangkan dalam risalah rapat. • Melakukan pertemuan dengan Dewan Komisaris, sebanyak 15 kali
Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit intern serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan,	• Menelaah rencana audit tahun 2023 dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. • Pertemuan dengan Satuan Kerja Audit Internal terlaksana 7 kali yang membahas mengenai rencana kerja, realisasi rencana kerja SKAI dan pokok-pokok hasil audit, serta *monitoring* tindak lanjut hasil audit, serta rencana pelaksanaan kaji ulang terhadap SKAI. • Menghadiri *exit meeting* audit internal pada 10 entitas audit (kantor cabang, unit kerja dan *application review*. • Menelaah 25 Laporan Hasil Audit (LHA) dari SKAI, dan hasil pemeriksaan OJK. • Menyampaikan masukan dan hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris dari hasil pertemuan dengan SKAI dan penelaahan LHA melalui rapat-rapat dengan Dewan Komisaris yang telah dituangkan dalam risalah rapat.
Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan kepada Dewan Komisaris; melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit ekstern; dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan pemberian jasa audit oleh Kantor Akuntan Publik tersebut	• Pada tanggal 11 April 2023, telah dilakukan pertemuan dengan KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan (Crowe) yang membahas evaluasi terhadap kinerja KAP Crowe dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BCAS 2022 • Pada tanggal 24 Januari 2023 dan 23 Mei 2023, telah dilakukan *interview* calon KAP untuk Audit Laporan Keuangan BCA Syariah Tahun Buku 2023. • Pada tanggal 13 Juni 2023, telah disampaikan rekomendasi penunjukan AP Yasir dan KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja (Ernst & Young) untuk melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan BCA Syariah Periode 31 Desember 2023. • Telah dilakukan pertemuan komunikasi dan koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro dan Surja (Ernst & Young) pada tanggal 8 Agustus 2023 dan 28 Desember 2023.
Menyusun dan/atau memperbaharui Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit (jika diperlukan).	Surat Keputusan nomor 057/SK/DIR/2023 tanggal 29 Desember 2023 perihal Kebijakan Tata Kelola PT Bank BCA Syariah.

Komite Pemantau Risiko (KPR)

Komite Pemantau Risiko dibentuk untuk meningkatkan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik melalui penguatan fungsi Dewan Komisaris. Komite Pemantau Risiko mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan penilaian terhadap berbagai jenis risiko yang dihadapi BCAS.

1. Dasar Hukum

Pembentukan Komite Pemantau Risiko BCAS didasarkan kepada Surat Keputusan Direksi No. 057/SK/DIR/2023 tanggal 29 Desember 2023 perihal Kebijakan Tata Kelola PT Bank BCA Syariah dengan mengacu pada peraturan yang berlaku.

2. Piagam KPR

KPR memiliki pedoman kerja yang ditetapkan dalam Piagam KPR, yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan 057/SK/DIR/2023 tanggal 29 Desember 2023 perihal Kebijakan Tata Kelola PT Bank BCA Syariah. Di dalamnya berisi antara lain mengenai tugas dan tanggung jawab Komite, struktur, uraian mengenai aktivitas dan kewenangan.

Manual GCG disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa ditinjau secara berkala. Sebagai dasar pedoman, BCAS telah memiliki aturan internal terkait GCG yang dituangkan dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Surat Keputusan Direksi No. 057/SK/DIR/2023 tanggal 29 Desember 2023 perihal Kebijakan Tata Kelola PT Bank BCA Syariah.

Piagam KPR telah diunggah dalam situs web BCAS pada bagian Tata Kelola Perusahaan dan dapat diakses melalui link https://www.bcasyariah.co.id/komite-pemantau-risiko.

3. Struktur dan Keanggotaan

Dalam penerapan *Good Corporate Governance* tidak diperkenankan adanya intervensi pemilik yang dapat membuat komposisi Komite tidak memenuhi ketentuan.
Berikut merupakan struktur dan keanggotaan Komite Pemantau Risiko:

1. Anggota Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
2. Keanggotaan Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari:
   - 1 orang Komisaris Independen;
   - 1 orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko;
   - 1 orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.
3. Bagi Bank Syariah, 1 orang anggota Dewan Pengawas Syariah dapat menjadi anggota Komite Pemantau Risiko.
4. Keahlian Pihak Independen dibuktikan dengan wajib memiliki sertifikat manajemen risiko sebagaimana yang berlaku bagi Direksi; dan memiliki sertifikat kompetensi yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab komite.
5. Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen merangkap sebagai anggota.
6. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota komite pemantau risiko
7. Mayoritas anggota Komite Pemantau Risiko terdiri atas Komisaris Independen dan Pihak Independen.

Susunan Anggota KPR per 31 Desember 2023

Nama	Jabatan	Jabatan di BCAS	Periode Jabatan
Ratna Yanti	Ketua	Presiden Komisaris Independen	Sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2025
Inge Setiawati	Anggota	Komisaris Independen	Sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2025
Rickyadi Widjaja	Anggota	Komisaris	Sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2025
Iwan Wiwoho	Anggota	Pihak Independen	Sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2025
Senjaya Komola	Anggota	Pihak Independen	Sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2025

4. Profil dan Kualifikasi



Ratna Yanti
Ketua Komite Pemantau Risiko

Warga Negara Indonesia, usia 60 tahun, berdomisili di Surabaya.

Dasar pengangkatan terakhir keanggotaan Komite di Bawah Dewan Komisaris: Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite Nomor 002/SKP/DIR/2023 tanggal 15 Desember 2023.

Profil Ratna Yanti dapat ditemukan pada profil Dewan Komisaris, di bab Profil Perusahaan Laporan Tahunan BCAS 2023.



Inge Setiawati
Anggota Komite Pemantau Risiko

Warga Negara Indonesia, berusia 56 tahun, dan berdomisili di Jakarta.

Dasar pengangkatan terakhir keanggotaan Komite di Bawah Dewan Komisaris: Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite Nomor 002/SKP/DIR/2023 tanggal 15 Desember 2023.

Profil Inge Setiawati dapat ditemukan pada profil Dewan Komisaris, di bab Profil Perusahaan Laporan Tahunan BCAS 2023.



Rickyadi Widjaja
Anggota Komite Komite Pemantau Risiko

Warga Negara Indonesia, berusia 60 tahun, dan berdomisili di Jakarta.

Dasar pengangkatan terakhir keanggotaan Komite di Bawah Dewan Komisaris: Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite Nomor 002/SKP/DIR/2023 tanggal 15 Desember 2023.

Profil Rickyadi Widjaja dapat ditemukan pada profil Dewan Komisaris, di bab Profil Perusahaan Laporan Tahunan BCAS 2023.



Iwan Wiwoho B.
Anggota Komite Pemantau Risiko

Warga Negara Indonesia, 68 tahun, berdomisili di Tangerang.

Dasar pengangkatan terakhir keanggotaan Komite di Bawah Dewan Komisaris: Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite Nomor 002/SKP/DIR/2023 tanggal 15 Desember 2023.

Sebelumnya menjabat sebagai Anggota Komite Audit BCAS (2015-2017). Berkarier di PT BCA Tbk (1987-2011) dan menempati berbagai jabatan manajerial di antaranya Kepala Operasi Cabang Wisma Asia, Kepala Operasi Wilayah XII, Kepala KCU Batam dan KCU Margonda dan terakhir sebagai Kepala Operasi Cabang Korporasi. Beliau juga berkarier di Industri Pesawat Terbang Nusantara - IPTN (1983-1987) dan Construcciones Aeronauticas SA(CASA).

Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Complutense Madrid, Spain (1979) dan gelar Master of Business Administration dari Instituto de Empresa, Madrid, Spain (1981-1983).



Senjaya Komola
Anggota Komite Pemantau Risiko

Dasar pengangkatan keanggotaan Komite di Bawah Dewan Komisaris: Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite Nomor 002/SKP/DIR/2023 tanggal 15 Desember 2023.

Informasi profil Senjaya Komola juga telah disampaikan dalam bagian Komite Audit.

5. Persyaratan Keanggotaan KPR

Persyaratan keanggotaan KPR adalah sebagai berikut:

a. Anggota KPR wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.
b. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota KPR.
c. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif BCAS atau pihak yang mempunyai hubungan dengan BCAS yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen dilarang menjadi Pihak Independen sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 1 tahun. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang tugasnya melakukan fungsi pengawasan pada BCAS paling singkat 6 bulan.
d. Pihak Independen anggota KPR harus berasal dari pihak di luar BCAS yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan BCAS yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak tidak independen, antara lain hubungan dalam bentuk kepemilikan saham BCAS dengan jumlah kepemilikan lebih dari 5% dari modal disetor BCAS.
e. Anggota yang berasal dari Pihak Independen wajib direkomendasikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.

6. Pendidikan atau Pelatihan

Informasi mengenai pelatihan yang diikuti oleh ketua dan anggota komite yang juga merupakan anggota Dewan Komisaris telah disampaikan pada bab Dewan Komisaris. Sementara itu, anggota merupakan pihak independen telah mengikuti pelatihan- pelatihan dengan topik:

- *Indonesia Knowledge Forum* (IKF) 2023
- Tata Kelola Perusahaan mengacu pada *International Standard Principles on GCG Implementation Practices* dari OECD
- Rakernas 2024 Tema "Energized You! BCA Syariah Berani Berubah
- Lindungi Hutan dan *Save Your Life*

7. Masa Jabatan

Masa jabatan anggota KPR berakhir karena masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir maka pengangkatan anggota KPR wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan terhitung sejak pengangkatan anggota Dewan Komisaris atau sejak dinyatakan lulus *fit and proper test* oleh OJK. Masa jabatan anggota KPR pada periode ini akan berakhir pada saat penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun 2025.

8. Independensi

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko adalah pihak independen, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan usaha dengan BCAS yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Aspek independensi Komite Pemantau Risiko dapat dilihat pada tabel berikut:

Aspek Independensi	Ratna Yanti	Inge Setiawati	Rickyadi Widjaja	Iwan Wiwoho B.	Senjaya Komala
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi.	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, perusahaan anak maupun perusahaan afiliasi.	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan.	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota KPR.	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintah	√	√	√	√	√

9. Tugas dan Tanggung Jawab KPR

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko adalah membantu dan memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko dan memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko dilaksanakan dengan baik antara lain dengan melakukan:

a. Evaluasi atas konsistensi antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
c. Komite Pemantau Risiko wajib menyusun dan/atau memperbarui pedoman dan tata tertib kerja Komite Pemantau Risiko.
d. Mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam penerapan manajemen risiko.
e. Membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam memelihara dan memantau Tingkat Kesehatan Bank serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank.
f. Membantu Dewan Komisaris dalam pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi Rencana Aksi (*Recovery Plan*).
g. Menyusun pedoman dan tata tertib kerja (Piagam) KPR dan melakukan *review* sesuai kebutuhan.
h. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu.

10. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat

Rapat KPR diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan BCA Syariah, dan paling sedikit 1 kali setiap triwulan atau 4 kali dalam setahun. Sepanjang tahun 2023, Komite Pemantau Risiko mengadakan 12 kali rapat.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Ratna Yanti	12	12	100%
Inge Setiawati *	10	10	100%
Rickyadi Widjaja *	10	10	100%
Iwan Wiwoho	12	12	100%
Senjaya Komala **	1	1	100%
Tantri Indrawati ***	2	2	100%
Ina Widjaja ***	2	2	100%
Riyo S. Wisaksono ****	8	6	75%

Keterangan:
*) Menjabat sejak tanggal 22 Februari 2023.
**) Menjabat sejak tanggal 15 Desember 2023.
***) Masa jabatan berakhir pada 22 Februari 2023.
****) Masa jabatan berakhir pada 16 September 2023.

Agenda rapat di antaranya membahas:
- Realisasi kerja tahun 2022 dan program kerja tahun 2023
- Tingkat kesehatan bank
- Profil risiko dan *stress test*
- Perubahan program kerja tahun 2023
- *Update* nasabah restruktur
- *Update* penyelesaian NPF dan AYDA
- Evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Departemen Manajemen Risiko
- Penelaahan terhadap Risalah Rapat Komite Manajemen Risiko
- Realisasi kerja tahun 2023 dan rencana kerja tahun 2024

11. Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan Selama Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023, KPR telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
- Mengkaji ulang dan menyesuaikan Piagam Komite Manajemen Risiko.
- Memantau pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko, tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- Melakukan pemantauan analisis profil risiko BCA Syariah dan secara khusus mendalami risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko reputasi, risiko imbal hasil dan risiko investasi.
- Melakukan analisis terhadap hasil stress test risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas.
- Memastikan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dilakukan dengan tepat dan baik serta sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Memantau realisasi pelaksanaan Manajemen Risiko, khususnya pengendalian dan limit risiko kredit, likuiditas dan pasar, serta risiko operasional setiap bulan.
- Melakukan pemantauan terhadap perkembangan, dampak, dan mitigasi risiko secara umum terkait pandemi COVID-19 dan penurunan ekonomi global.
- Perubahan profil risiko strategis akibat perubahan pola kegiatan bisnis dan perekonomian karena dampak pandemic dan penanggulangannya serta terbitnya beberapa regulasi baru terkait perbankan dan sistem pembayaran.
- Memantau dan mendalami peraturan-peraturan baru yang terkait dengan manajemen risiko.

Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN)

Komite Remunerasi dan Nominasi adalah komite yang dibentuk Dewan Komisaris dengan fungsi untuk membantu pelaksanaan dan pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi sesuai dengan Anggaran Dasar BCAS dan peraturan yang berlaku.

1. Dasar Hukum

Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi BCAS didasarkan kepada Surat Keputusan Direksi No. 057/SK/DIR/2023 tanggal 29 Desember 2023 perihal Kebijakan Tata Kelola PT Bank BCA Syariah.

2. Piagam KRN

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, KRN telah memiliki Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana tercantum Surat Keputusan 057/SK/DIR/2023 tanggal 29 Desember 2023 perihal Kebijakan Tata Kelola PT. Bank BCA Syariah. Di dalamnya berisi antara lain mengenai Struktur dan Komposisi Keanggotaan, Syarat Keanggotaan, Masa Jabatan, Rangkap Jabatan, Tugas dan Tanggung Jawab, Mekanisme Kerja, Etika dan Waktu Kerja. Manual GCG disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa ditinjau secara berkala.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja KRN telah diunggah dalam situs web BCA Syariah pada bagian Tata Kelola Perusahaan dan dapat diakses melalui link https://www.bcasyariah.co.id/komite-remunerasi-nominasi.

3. Struktur dan Keanggotaan KRN

Dalam penerapan *Good Corporate Governance* tidak diperkenankan adanya intervensi pemilik yang dapat membuat komposisi Komite tidak memenuhi ketentuan. Berikut ketentuan struktur keanggotaan KRN:

1. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari:
   - 1 orang Komisaris Independen;
   - 1 orang Komisaris Non Independen;
   - 1 orang Pejabat Eksekutif yang membawahi unit kerja Sumber Daya Manusia atau 1 orang perwakilan pegawai Bank.

2. Bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara syariah 1 orang anggota Dewan Pengawas Syariah dapat menjadi anggota komite remunerasi dan nominasi.
3. Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen merangkap sebagai anggota.
4. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
5. Dalam hal anggota komite remunerasi dan nominasi ditetapkan lebih dari 3 orang, Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 2 orang.

Susunan anggota KRN per 31 Desember 2023

Nama	Jabatan	Jabatan di BCAS	Periode Jabatan
Inge Setiawati	Ketua (merangkap anggota)	Komisaris Independen	Sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2025
Ratna Yanti	Anggota	Presiden Komisaris Independen	Sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2025
Rickyadi Widjaja	Anggota	Komisaris	Sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2025
Retno Wulandari	Anggota (merangkap Sekretaris)	Kepala Satuan Kerja Hukum dan SDM	Sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2025

4. Profil dan Kualifikasi



Inge Setiawati
Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi

Dasar pengangkatan terakhir keanggotaan Komite di Bawah Dewan Komisaris: Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite Nomor 002/SKP/DIR/2023 tanggal 15 Desember 2023.

Profil Inge Setiawati dapat ditemukan pada profil Dewan Komisaris, di bab Profil Perusahaan Laporan Tahunan BCAS 2023.



Ratna Yanti
Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Dasar pengangkatan terakhir keanggotaan Komite di Bawah Dewan Komisaris: Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite Nomor 002/SKP/DIR/2023 tanggal 15 Desember 2023.

Profil Ratna Yanti dapat ditemukan pada profil Dewan Komisaris, di bab Profil Perusahaan Laporan Tahunan BCAS 2023.



Rickyadi Widjaja
Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Dasar pengangkatan terakhir keanggotaan Komite di Bawah Dewan Komisaris: Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite Nomor 002/SKP/DIR/2023 tanggal 15 Desember 2023.

Profil Rickyadi Widjaja dapat ditemukan pada profil Dewan Komisaris, di bab Profil Perusahaan Laporan Tahunan BCAS 2023.



Retno Wulandari
Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Warga Negara Indonesia, berusia 55 tahun, dan berdomisili di Tangerang.

Dasar pengangkatan terakhir keanggotaan Komite di Bawah Dewan Komisaris: Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite Nomor 002/SKP/DIR/2023 tanggal 15 Desember 2023.

Beliau menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja Hukum dan SDM sejak 1 Oktober 2021. Sebelum bergabung di BCAS, beliau berkarier di PT BCA Tbk (1992-2021) dan menempati berbagai posisi bidang human *capital* management.

Beliau meraih gelar Sarjana Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (1992). Beliau telah mengikuti berbagai *executive training* baik di dalam dan luar negeri seperti Global Benefit Forum; Asia Organization Development Network Summit; *Digital Currency*; *Knowledge Update*; serta pelatihan-pelatihan lain di bidang kepemimpinan, manajemen, perbankan umum dan syariah, serta *risk management*.

5. Persyaratan Keanggotaan KRN

Persyaratan umum dan kompetensi

- Ketua KRN hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 komite lainnya di BCAS.
- Dalam hal anggota KRN ditetapkan lebih dari 3 orang maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 orang.
- Anggota KRN yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota Komite lainnya di BCAS.
- Anggota KRN wajib mematuhi Kode Etik BCAS.
- Pejabat Eksekutif yang membawahkan sumber daya manusia atau perwakilan pegawai yang menjadi anggota komite harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi dan/atau nominasi serta rencana suksesi (*succession plan*) BCAS.

Persyaratan Independensi

- Anggota KRN dilarang berasal dari anggota Direksi, baik pada bank yang sama maupun pada bank yang lain.
- Anggota KRN dari Pihak Independen harus berasal dari pihak di luar BCAS yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dengan pemegang saham pengendali dan/atau hubungan dengan BCAS yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

6. Pendidikan atau Pelatihan

Informasi mengenai pelatihan yang diikuti oleh ketua dan anggota komite yang juga merupakan anggota Dewan Komisaris telah disampaikan pada bab Dewan Komisaris. Sementara itu, anggota merupakan pihak independen telah mengikuti pelatihan- pelatihan dengan topik, di antaranya:

- Webinar Memperkuat Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah

- Program 2023 *Human Capital Masterclass: Rewards Series*
- *Dry Run Workshop & Group Discussion "Giving & Receiving Empowering Feedback*
- *Workshop* Kamus Kompetensi
- Program *Train for Trainer* Kamus Kompetensi
- *Strategic Discussion* 2024
- Seminar HR *Green Forum*
- *ESG in House Workshop & Discussion* (Sosialisasi BCA Syariah *Sustainable Finace Policy* & ESRA)

7. Masa Jabatan

Masa jabatan anggota KRN berakhir pada saat berakhirnya masa jabatan Ketua KRN yang juga merupakan Komisaris Independen BCAS, serta dapat dipilih kembali untuk menjabat pada periode berikutnya. Masa jabatan anggota KRN pada periode ini akan berakhir pada saat penutupan RUPS Tahunan Tahun 2025.

8. Independensi

Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah pihak independen, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan usaha dengan BCAS yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Aspek Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Aspek Independensi	Inge Setiwati	Ratna Yanti	Rickyadi Widjaja	Retno Wulandari
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi.	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, perusahaan anak maupun perusahaan afiliasi.	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan.	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota KRN.	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintah	√	√	√	√

9. Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam menjalankan fungsinya, KRN memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

Terkait dengan fungsi remunerasi:
Mengevaluasi dan memastikan bahwa kebijakan remunerasi BCAS telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran dan strategi jangka panjang, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan, dan potensi pendapatan BCAS di masa yang akan datang.

a. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai:
   - Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
   - Struktur dan besaran remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
   - Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk kemudian disampaikan kepada Direksi oleh Dewan Komisaris.
b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
c. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi.

Terkait dengan fungsi nominasi:

a. Menyusun dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
b. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai:
   - kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi.
   - calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
   - komposisi jabatan anggota Direksi dan/ atau anggota Dewa Komisaris.
   - program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
   - kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.
c. Merekomendasikan pihak-pihak independen calon anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.
d. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
   - Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
   - Melaporkan hasil pengkajian dan rekomendasi sehubungan dengan tugastugas KRN kepada Dewan Komisaris apabila diperlukan.
e. Jika diperlukan Komite Remunerasi dan Nominasi Perusahaan dapat memanfaatkan jasa Perusahaan pencari yang independen dan bereputasi baik dalam proses pemilihan anggota Dewan Komisaris atau Direksi.

10. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat KRN

KRN mengadakan rapat sesuai dengan kebutuhan BCA Syariah, sedikitnya 1 kali dalam 4 bulan. Sampai dengan Desember 2023, KRN telah mengadakan rapat sebanyak 4 kali.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat KRN

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Inge Setiawati *	2	2	100%
Ratna Yanti	4	4	100%
Rickyadi Widjaja *	2	2	100%
Retno Wulandari	4	4	100%
Tantri Indrawati **	2	2	100%
Ina Widjaja **	2	2	100%

Keterangan:
*) Menjabat sejak tanggal 22 Februari 2023.
**) Masa jabatan berakhir pada 22 Februari 2023.

Agenda rapat Komite Remunerasi dan Nominasi membahas:
- Rekomendasi Gaji Pengurus
- Rekomendasi Pembagian Bonus Tahun Buku 2022 Kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah
- Rekomendasi Tunjangan dan Benefit Pengurus
- Pembayaran Bonus *Material Risk Taker* BCAS yang ditangguhkan
- *Update* terkait Internalisasi Tata Nilai BCAS serta Pemenuhan dan pengembangan SDM di BCA Syariah
- Pembahasan Calon Pihak Independen Pada Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit

11. Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan Selama Tahun 2023
- Menyusun rekomendasi atas nominasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2023.
- Menyusun rekomendasi terkait remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi baru untuk tahun 2023.
- Menyusun rekomendasi terkait usulan pemberian bonus kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk kinerja BCA Syariah tahun 2023.

Komite–Komite Eksekutif Direksi

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, BCAS membentuk komite-komite di bawah Direksi. Terdapat 7 komite yang berfungsi membantu Direksi dalam mengelola BCAS, yaitu sebagai berikut:
a. Komite Aset dan Liabilitas (*Asset and Liability Committee* / ALCO)
b. Komite Manajemen Risiko
c. Komite Kebijakan Pembiayaan
d. Komite Pembiayaan
e. Komite Pengarah Teknologi Informasi
f. Komite Sumber Daya Manusia
g. Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian

Keberadaan komite-komite Direksi tersebut juga bertujuan untuk penyempurnaan implementasi prinsip tata kelola perusahaan dalam kegiatan operasional BCAS yaitu:
a. Pencapaian tingkat profitabilitas BCAS yang optimum dan risiko likuiditas melalui penetapan kebijakan dan strategi aktiva dan pasiva BCA Syariah (*asset and liabilities management*).
b. Mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan pembiayaan sesuai batas wewenang yang ditetapkan Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar perusahaan dengan memperhatikan pengembangan bisnis tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian (*prudent*).
c. Perumusan kebijakan pemberian pembiayaan dalam rangka pencapaian target pembiayaan yang *prudent*.
d. Memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko BCAS.
e. Memastikan keunggulan bersaing melalui pemanfaatan teknologi informasi.
f. Memastikan bahwa penerapan kebijakan sumber daya manusia dilaksanakan secara optimal serta sesuai dengan arah dan strategi perusahaan.

Asset and Liabilities Committee (ALCO) / Komite Aset and Liabilitas

Asset and Liability *Committee* (ALCO) merupakan komite tetap di bawah Direksi yang memiliki misi mencapai tingkat profitabilitas BCAS secara optimal, serta memastikan risiko likuiditas, risiko pasar, risiko investasi dan risiko imbal hasil melalui penetapan kebijakan dan strategi aset dan liabilitas (*assets and liabilities management*) BCAS. Pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ALCO tercantum dalam Surat Keputusan Direksi No. 028/SK/DIR/2010 tanggal 29/Maret/2010 perihal Struktur Komite Dibawah Direksi.

1. Struktur, Keanggotaan dan Status Hak Suara
Struktur dan keanggotaan ALCO terdiri dari:
1. Personalia Komite, meliputi Direksi dan beberapa kepala unit kerja yang bidang kerjanya berkaitan dengan pengelolaan aktiva dan pasiva BCAS (*asset and liabilities management).*

2. Kelompok Kerja (Pokja), dibentuk untuk mendukung komite dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya sehubungan dengan rapat ALCO.
3. Narasumber, untuk memberikan masukan mengenai beberapa masalah komite dapat mengundang narasumber dan berasal dari unit kerja lain di Kantor Pusat dan Kantor Cabang, maupun pihak dari luar BCAS.

Struktur, keanggotaan, dan status hak suara ALCO adalah sebagai berikut:

Jabatan di Komite	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua	Presiden Direktur	Mempunyai Hak Suara
Sekretaris	Kepala Bidang Treasuri	
Anggota	Direktur	
Anggota	Direktur	
Anggota	Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan	
Anggota	Kepala SKBK	
Anggota	Kepala SKKPP	
Anggota	Kepala SKARP	
Anggota	Kepala Departemen MRK	

2. Fungsi Pokok dan Tanggung Jawab

Fungsi pokok ALCO yaitu:

a. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan likuiditas untuk mencukupi kebutuhan likuiditas BCAS dan menghindari adanya dana yang tak terkelola (*idle funds*).
b. Menetapkan kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan risiko pasar.
c. Menetapkan kebijakan dan strategi harga (*pricing policy*) untuk produk-produk dana, jasa, pembiayaan dan rekening antar kantor.
d. Menetapkan kebijakan dan strategi dalam penataan portofolio investasi.
e. Menetapkan kebijakan dan strategi penataan struktur neraca melalui antisipasi perubahan nisbah bagi hasil atau margin untuk mencapai *net income margin* yang optimal.

Tugas dan Tanggung Jawab ALCO
Anggota ALCO yang memiliki hak suara, memiliki tugas pokok, antara lain:

a. Memberikan masukan kepada sekretaris ALCO dalam penyusunan agenda dan bahan rapat.
b. Memberikan masukan berupa informasi dan analisis pada rapat ALCO, mengenai:
   - Metodologi penentuan harga produk dana dan pembiayaan.
   - Metodologi pengukuran risiko likuiditas, risiko pasar, risiko investasi, dan risiko imbal hasil.
   - Penentuan harga produk dana dan pinjaman.
   - Daya saing suku bagi hasil dana dan pembiayaan.
   - Strategi bank pesaing.
   - Kendala penerapan hasil Keputusan ALCO.
   - Perilaku nasabah dan perubahannya.

3. Kebijakan, Frekuensi Kehadiran, dan Agenda Rapat

Ketentuan rapat ALCO adalah sebagai berikut:

1. Rapat ALCO dilaksanakan sesuai kebutuhan, yakni paling sedikit 1 kali dalam 1 bulan.
2. Rapat ALCO adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 dari jumlah anggota ALCO ditambah 1 anggota, termasuk ketua atau ketua pengganti.

Sepanjang tahun 2023, ALCO telah mengadakan rapat sebanyak 12 kali. Agenda rapat ALCO yaitu membahas rapat ALCO dan distribusi bagi hasil untuk masing-masing rapat di bulan Januari hingga Desember 2023.

Rincian Kehadiran Anggota KMR dalam Rapat

Jabatan di Perusahaan	Nama	Keanggotaan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Presiden Direktur	Yuli Melati Suryaningrum	Ketua merangkap Anggota	12	11	92%
Kepala Bidang Treasuri	Hasbyallah Chairuddin	Sekertaris merangkap Anggota	12	12	100%
Direktur	Pranata	Anggota	12	10	83%
Direktur	Ina Widjaja	Anggota	12	9	75%
Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan	Houda Muljanti	Anggota	12	10	83%
Kepala SKBK	Yanto Tanaya	Anggota	12	11	92%

Jabatan di Perusahaan	Nama	Keanggotaan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Kepala SKARP	Adetyas Wendiana	Anggota	12	9	75%
Kepala SKKPP	• Ammy Hosea Susanto, sd. Juni 2024 • Jap Wirianto Setiawan, sejak Juli 2024	Anggota	12	11	92%
Kepala Departemen MRK	• Gandhi Ahmad Solihin, sd. April 2024) • Edy Hartono, sejak Mei 2024	Anggota	12	8	67%

Kehadiran Nonanggota

Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Direktur - Lukman Hadiwijaya	12	10	83%
Dwiki Hadyan Setiawan	12	5	42%
Yastrin Budiartina	12	9	75%
Yanuar Nurussabet	12	10	83%
Linda Carolina	12	2	17%
Andreanne Soetarman	12	7	58%
Indarahardjo	12	7	58%
Malky Malindo	12	1	8%
Dwidadi Sugito	12	9	75%
Priyo Subiyakto	12	1	8%
Taufik Marzal	12	2	17%
Helena Effendie	12	1	8%
Aditya Rini	12	1	8%

4. Pelaporan Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dan realisasi kerja ALCO dilaporkan melalui risalah rapat rutin.

5. Realisasi Program Kerja Tahun 2023

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya selama tahun 2023, ALCO telah telah mengadakan rapat sebanyak 12 kali. Selain itu, ALCO telah membantu Direksi untuk mengelola aktiva dan pasiva BCAS.

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko (KMR) dibentuk untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko BCAS. KMR berpedoman SEOJK 25/SEOJK.03/2023 tanggal 21 Desember 2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Keputusan No. 028/SK/DIR/2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Struktur Komite di Bawah Direksi.

1. Struktur, Keanggotaan dan Status Hak Suara

Struktur dan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko terdiri atas:

1. Personalia Komite, meliputi anggota Direksi dan Kepala Unit Kerja Kantor Pusat yang terkait dengan bidang manajemen risiko.
2. Narasumber, yaitu pihak lain yang dapat diundang untuk memberikan masukan atas beberapa permasalahan. Narasumber dapat ditunjuk baik dari pihak internal (unit kerja di kantor pusat dan kantor cabang) maupun pihak eksternal BCAS.

Struktur, keanggotaan, dan status hak suara pada KMR adalah sebagai berikut:

Jabatan di Komite	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua	Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan	Mempunyai hak suara
Sekretaris Komite dan Anggota Tetap	Kepala Departemen MRK	
Anggota Tetap	Presiden Direktur	
Anggota Tetap	Direktur	
Anggota Tetap	Direktur	

Jabatan di Komite	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Anggota Tetap	Direktur	Mempunyai hak suara
Anggota Tetap	Kepala SKARP	
Anggota Tetap	Kepala Satuan Hukum dan SDM	
Anggota Tidak Tetap	Kepala SKBK	
Anggota Tidak Tetap	Kepala Divisi Operasi	

2. Wewenang dan Tanggung Jawab KMR

Komite Manajemen Risiko berwenang dan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama, yang paling sedikit meliputi:

a. Penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman Manajemen Risiko.
b. Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko.
c. Penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, termasuk dalam keputusan bisnis yang tidak sesuai dengan prosedur normal antara lain pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan rencana bisnis Bank dan pengambilan posisi atau eksposur Risiko yang tidak sesuai dengan limit yang telah ditetapkan.

3. Kebijakan, Frekuensi Kehadiran, dan Agenda Rapat

Kebijakan rapat Komite Manajemen dilaksanakan sesuai kebutuhan dan sedikitnya sekali dalam 3 bulan. Selama tahun 2023, Komite Manajemen Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 4 kali. Agenda rapat KMR di antaranya membahas tingkat kesehatan bank, pengajuan penetapan *risk appetite* dan *risk tolerance*, serta profil risiko.

Rincian Kehadiran Anggota KMR dalam Rapat

Jabatan	Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan	Houda Muljanti	4	4	100%
Kepala Departemen MRK	• Gandhi A Solihin (Januari – April 2023) • Edy Hartono (Mei – Desember 2023)	Gandhi A Solihin : 2 Edy Hartono : 2	Gandhi A Solihin : 2 Edy Hartono : 2	Gandhi A Solihin : 100% Edy Hartono : 100%
Presiden Direktur	Yuli Melati Suryaningrum	4	3	75%
Direktur	• Rickyadi Widjaja (Januari 2023) • Ina Widjaja (April – Desember 2023)	Rickyadi Widjaja : 1 Ina Widjaja : 3	Rickyadi Widjaja : 1 Ina Widjaja : 2	Rickyadi Widjaja : 100% Ina Widjaja : 67%
Direktur	Pranata	4	4	100%
Direktur	Lukman Hadiwijaya	4	4	100%
Kepala SKARP	Adetyas Wendiana	4	2	50%
Kepala Satuan Hukum dan SDM	Retno Wulandari	4	3	75%
Kepala SKBK	Yanto Tanaya	4	4	100%
Kepala Divisi Operasi	Fatmah	4	1	25%

4. Pelaporan Pertanggungjawaban dan Realisasi Program Kerja Tahun 2023

Pertanggungjawaban dan realisasi kerja Komite Manajemen Risiko dilaporkan melalui:

1) Laporan tertulis secara berkala sedikitnya sekali dalam 3 bulan kepada Direksi mengenai hasil pertemuan rutin dalam rapat Komite Manajemen Risiko.
2) Laporan tertulis kepada Direksi mengenai hasil pertemuan khusus yang diadakan untuk membahas hal tertentu.
3) Laporan khusus atau laporan kegiatan (jika diperlukan).

5. Realisasi Program Kerja Tahun 2023

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya selama tahun 2023, KMR telah mengadakan rapat sebanyak 4 kali. Selain itu, KMR telah membantu Direksi dalam mengelola tingkat kesehatan bank, *risk appetite, risk tolerance*, serta profil risiko.

Komite Sumber Daya Manusia

Komite Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan komite tetap di bawah Direksi yang memiliki misi memastikan bahwa penerapan kebijakan sumber daya manusia dilaksanakan secara optimal serta sesuai dengan arah dan strategi Perusahaan. Pedoman yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite SDM, yakni yang tercantum dalam Surat Keputusan Direksi No. 028/SK/DIR/2010 tanggal 28 Maret 2010 perihal Struktur Komite SDM (SK Struktur Komite SDM).

1. Struktur, Keanggotaan dan Status Hak Suara

Struktur dan Keanggotaan Komite Sumber Daya Manusia terdiri dari:

a. Personalia Komite, meliputi beberapa anggota Direksi dan Kepala Divisi/Satuan Kerja
b. Narasumber, yaitu pihak lain yang dapat diundang untuk memberikan masukan atas beberapa permasalahan. Narasumber dapat ditunjuk baik dari pihak internal BCAS (unit kerja di Kantor Pusat dan Kantor Cabang) maupun pihak eksternal.

Struktur, keanggotaan, dan status hak suara Komite SDM adalah sebagai berikut:

Jabatan di Komite	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua	Presiden Direktur	Mempunyai hak suara
Sekretaris merangkap anggota	Kepala Satuan Kerja Hukum dan SDM	
Anggota	Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan	
Anggota	Direktur	

2. Fungsi Pokok dan Tanggung Jawab

Fungsi pokok dari Komite Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:

a. Membantu Direksi dalam menyusun kebijakan dan strategi SDM, terutama yang terkait dengan pengembangan dan penghargaan terhadap karyawan.
b. Memantau dan memastikan bahwa penerapan kebijakan dan strategi SDM dilaksanakan secara konsisten.
c. Memastikan bahwa Direksi mengetahui sepenuhnya perkembangan penerapan kebijakan SDM.
d. Mengkaji dan memutuskan permasalahan yang timbul dalam penerapan kebijakan SDM secara kasus per kasus, tidak termasuk kasus pelanggaran.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite SDM

Anggota Komite SDM yang memiliki hak suara, memiliki tugas pokok, antara lain:

a. Memberikan masukan kepada sekretaris komite dalam penyusunan agenda dan bahan rapat
b. Memberikan masukan berupa informasi dan analisis pada rapat.
c. Memantau penerapan strategi dan kebijakan sumber daya manusia

3. Kebijakan, Frekuensi Kehadiran, dan Agenda Rapat

Kebijakan rapat komite dilaksanakan sesuai kebutuhan dan sedikitnya sekali dalam 6 bulan. Sepanjang tahun 2023, KSDM telah mengadakan rapat sebanyak 3 kali. Agenda rapat Komite SDM sepanjang 2023, di antaranya membahas pengenaan pajak atas benefit, *performance appraisal* karyawan, serta kenaikan gaji dan bonus.

Rincian Kehadiran Anggota Komite SDM dalam Rapat

Jabatan	Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Presiden Direktur	Yuli Melati Suryaningrum	3	3	100%
Kepala Satuan Kerja Hukum dan SDM	Retno Wulandari	3	3	100%
Direktur	Pranata	3	3	100%
Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan	Houda Muljanti	3	3	100%
Direktur	Ina Widjaja	3	3	100%
Direktur	Lukman Hadiwijaya	3	3	100%

4. Pelaporan Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dan realisasi kerja Komite SDM dilaporkan melalui:

a. Risalah rapat rutin.
b. Risalah rapat khusus yang diadakan untuk membahas hal tertentu.
c. Data dan informasi yang terkait dengan bidang yang dibahas.
d. Catatan dan pendapat Komite SDM mengenai risalah rapat serta data dan informasi yang terkait.

5. Realisasi Program Kerja Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023, Komite SDM telah memerealisasikan program kerja sebagai berikut:

a. Implementasi pengenaan pajak atas benefit di BCAS sesuai dengan PP 55 Tahun 2022.
b. Pelaksanaan *Review* Penilaian Kinerja 2022.
c. Pelaksanaan kenaikan gaji berkala 2023 dan Pembagian Bonus 2022.

Komite Kebijakan Pembiayaan

Komite Kebijakan Pembiayaan (KKP) dibentuk untuk mengarahkan pemberian pembiayaan melalui perumusan kebijakan pembiayaan dalam rangka pencapaian target pembiayaan yang prudent. Pedoman KPP dalam menjalankan tugasnya yaitu Surat Keputusan Direksi No. 056/SK/DIR/2022 tanggal 14/10/2022 perihal Struktur Komite Kebijakan Pembiayaan.

1. Struktur, Keanggotaan, dan Status Hak Suara

Struktur dan Keanggotaan Komite Kebijakan Pembiayaan terdiri atas:

1. Personalia Komite, meliputi anggota Direksi dan Kepala Unit Kerja Kantor Pusat yang terkait dengan bidang pembiayaan.
2. Narasumber, yaitu pihak lain yang dipandang perlu hadir dalam rapat komite untuk membahas suatu permasalahan. Narasumber dapat ditunjuk baik dari pihak internal (anggota Direksi lain, unit kerja di kantor pusat dan kantor cabang) maupun pihak eksternal BCAS.

Struktur, keanggotaan, dan status hak suara KKP adalah sebagai berikut:

Jabatan di Komite	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua merangkap anggota	Presiden Direktur	Mempunyai hak suara
Sekretaris Komite merangkap anggota	Kepala SKARP	
Anggota	Direktur yang membidangi ARP	
Anggota	Direktur yang membidangi SBK	
Anggota	Direktur yang membidangi BRK	
Anggota	Direktur yang membidangi STL	
Anggota	Direktur yang membidangi Kepatuhan & Manajemen Risiko	
Anggota	Kepala Satuan Kerja SBK	
Anggota	Kepala Satuan Kerja BRK	
Anggota	Kepala Satuan Kerja SAI	
Anggota	Kepala Departemen Manajemen Risiko	
Anggota	Kepala Departemen Kepatuhan	
Anggota	Kepala Satuan Kerja STL	
Anggota	Kepala Departemen Sistem Prosedur dan Pendukung Operasi	

2. Fungsi Pokok, Wewenang, dan Tanggung Jawab

Fungsi pokok Komite Kebijakan Pembiayaan adalah:

a. Membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan pembiayaan, terutama yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan dan prinsip syariah dalam pembiayaan.
b. Memantau dan mengevaluasi penerapan kebijakan pembiayaan agar dapat dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.
c. Melakukan kajian berkala terhadap Kebijakan Dasar Pembiayaan Bank (KDPB) BCAS.
d. Memantau perkembangan dan kondisi portofolio pembiayaan.
e. Memberikan saran dan langkah perbaikan atas hasil pemantauan kepada Direksi dan berlaku sebagai komite penasihat untuk Direksi.

Tugas dan Tanggung Jawab KKP

Tugas pokok ketua yaitu memimpin rapat komite. Jika Presiden Direktur tidak hadir pada rapat/berhalangan, posisi Ketua diisi oleh Direktur yang membidangi Satuan Kerja Analisa Risiko Pembiayaan (ARP). Anggota KKP memiliki tugas pokok yang mencakup:

a. Memberikan masukan kepada sekretaris KKP dalam penyusunan agenda dan bahan rapat.
b. Memberikan masukan berupa informasi dan analisis pada rapat KKP untuk membuat keputusan mengenai:
   - Pengembangan kebijakan pembiayaan sesuai dengan misi dan rencana bisnis BCAS.
   - Ketaatan terhadap ketentuan perundangan dalam pemberian pembiayaan.
   - Perkembangan dan kualitas portofolio pembiayaan secara keseluruhan.
   - Kebenaran pelaksanaan kewenangan pemutusan pembiayaan.
   - Kebenaran proses pemberian, perkembangan, dan kualitas pembiayaan yang diberikan kepada pihak terkait dan nasabah besar tertentu.
   - Kebenaran pelaksanaan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD).
   - Penyelesaian Pembiayaan bermasalah sesuai ketentuan kebijakan pembiayaan.
   - Pemenuhan BCAS atas kecukupan jumlah Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA).
   - Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Dasar Pembiayaan Bank (KDPB).

3. Kebijakan, Frekuensi Kehadiran, dan Agenda Rapat

Ketentuan pelaksanaan rapat Komite Kebijakan Pembiayaan yakni dilaksanakan sesuai kebutuhan dan sedikitnya 1 kali dalam 1 tahun. Sampai dengan 31 Desember 2023, KKP telah mengadakan rapat sebanyak 2 kali. Adapun agenda rapat KKP utamanya adalah membahas mengenai kebijakan pembiayaan yang berlaku di BCAS.

Rincian kehadiran anggota KKP sebagai berikut:

Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Presiden Direktur (Ketua merangkap anggota)	2	2	100%
Kepala SKARP (Sekretaris merangkap anggota)	2	2	100%
Direktur yang membidangi ARP	2	2	100%
Direktur yang membidangi SBK	2	2	100%
Direktur yang membidangi STL	2	2	100%
Direktur yang membidangi Kepatuhan & Manajemen Risiko	2	2	100%
Kepala Satuan Kerja SBK	2	2	100%
Kepala Satuan Kerja BRK	2	2	100%
Kepala Satuan Kerja SAI	2	2	100%
Kepala Departemen Manajemen Risiko	2	2	100%
Kepala Departemen Kepatuhan	2	2	100%
Kepala Satuan Kerja STL	2	2	100%
Kepala Departemen Prosedur dan Pendukung Operasi	2	2	100%

4. Pelaporan Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dan realisasi kerja Komite Kebijakan Pembiayaan dilaporkan melalui:

a. Laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hasil pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Dasar Pembiayaan Bank (KDPB), serta saran perbaikan yang diperlukan.
b. Data dan informasi lain yang berkaitan dengan hasil pengawasan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan.

5. Realisasi Program Kerja Tahun 2023

Sepanjang pelaksanaan tugas kepengurusannya di tahun 2023, KKP telah melaksanakan program kerja, yakni memberikan rekomendasi terkait:

a. Perubahan Limit Kewenangan Direksi.
b. Ketentuan RPIM di BCAS.
c. Penambahan pengaturan pejabat pengganti dalam wewenang memutus pembiayaan.
d. Proses Pembiayaan Konsumtif.
e. Aturan pelimpahan wewenang memutus pembiayaan untuk perpanjangan fasilitas
f. Perubahan penandatanganan Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan pada lembar keputusan/memo pengolahan pembiayaan, menjadi menggunakan laporan bulanan yang disampaikan setiap awal bulan ke Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan.
g. Penyampaian persetujuan memorandum CKPN Individual Impairment (apabila bernilai nihil).
h. Skema selldown.
i. Pencantuman Nisbah.
j. Perhitungan Imbal Hasil.
k. Wewenang Memutus Pembiayaan Konsumer.
l. Proses Review Analisa Developer *Tier* 1 dan *Tier* 2 BCA.

Komite Pembiayaan

Komite Pembiayaan (KP) dibentuk untuk memastikan penerapan pembiayaan sejalan dengan rencana strategis bank serta meningkatkan keunggulan bersaing perusahaan melalui pemanfaatan teknologi yang tepat guna. Pedoman KP dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yaitu Surat Keputusan Direksi No. 057/SK/DIR/2022 tanggal 14/10/2022 tentang Struktur Komite Pembiayaan.

1. Struktur, Keanggotaan, dan Status Hak Suara

Dalam struktur keanggotaan KP, terdapat:

a. Pemantau, yaitu Direktur yang membidangi Kepatuhan, Kepala Departemen Kepatuhan atau yang mewakili.
b. Ketua, yaitu Pejabat tertinggi dari sisi bisnis.
c. Sekretaris, yaitu Pejabat dari sisi risiko (ARP).
d. Narasumber, yaitu pihak lain yang dapat diundang untuk memberikan masukan kepada KP dalam mengambil keputusan. Narasumber dapat ditunjuk baik dari pihak internal maupun pihak eksternal BCAS.

Susunan Komite Pembiayaan terdiri dari minimal 1 pejabat sisi bisnis dan 1 pejabat sisi risiko. Hak suara anggota komite sesuai dengan limit wewenang berdasarkan tingkat Komite Pembiayaan yang diatur terpisah melalui ketentuan Wewenang Pemutus Pembiayaan. Berikut susunan Komite Pembiayaan:

Sisi Bisnis	Sisi Risiko
Presiden Direktur *) Direktur yang membidangi BRK Direktur yang membidangi SBK Direktur yang membidangi Tresuri Kepala Satuan Kerja Bisnis & Komunikasi (SBK) Kepala Satuan Kerja Bisnis Ritel & Konsumer (BRK) Kepala Satuan Kerja Keuangan, Tresuri dan Perencanaan Perusahaan (SKA) Senior Officer BRK Kepala Cabang Syariah	Presiden Direktur *) Direktur yang membidangi ARP Kepala Satuan Kerja Analisa Risiko Pembiayaan (ARP) Senior Officer ARP

Keterangan: *) Presiden Direktur dapat berada di salah satu antara sisi bisnis atau sisi risiko, namun tidak secara bersamaan di kedua sisi

2. Fungsi Pokok, Tugas, dan Tanggung Jawab

Fungsi pokok Komite Pembiayaan yaitu:

a. Memberikan pengarahan apabila perlu dilakukan analisis pembiayaan yang lebih mendalam dan komprehensif.
b. Memberikan keputusan atau rekomendasi atas rancangan keputusan pembiayaan yang diajukan oleh pemberi rekomendasi/pengusul.
c. Melakukan koordinasi dengan *Asset and Liabilities Committee* (ALCO) dalam hal aspek pemberian pembiayaan dan penyesuaian bagi hasil pembiayaan.

Kewenangan Komite Pembiayaan dalam memberikan keputusan atau merekomendasikan rancangan keputusan Pembiayaan mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang Wewenang Memutus Pembiayaan yang tertuangan dalam Manual Ketentuan Pembiayaan, sesuai dengan limit yang ditentukan.

Tugas dan Tanggung Jawab

Masing-masing anggota Kemite Pembiayaan memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai perannya yaitu:

a. Ketua memiliki tugas pokok memimpin rapat.
b. Tugas pokok anggota komite di antaranya memberikan masukan/rekomendasi berkaitan dengan pembiayaan, memutuskan pembiayaan berdasarkan kemahiran profesional secara jujur, obyektif, cermat, dan seksama, serta memberikan masukan kepada sekretaris mengenai kebutuhan rapat.
c. Tugas pokok pemantau yaitu mengawasi pelaksanaan proses pengambilan keputusan komite sesuai tugas dan tanggung jawab dalam bidang kepatuhan, menghadiri setiap rapat komite, serta menindaklanjuti masalah atau pertanyaan yang berkaitan dengan ketentuan/peraturan perbankan syariah.
d. Sekretaris bertanggung jawab untuk mendukung kelancaran rapat dan menyusun laporan bulanan.
e. Tugas pokok nara sumber yaitu memberikan penjelasan mengenai suatu hal atau permasalahan sesuai permintaan Komite Pembiayaan.

3. Kebijakan Rapat, Frekuensi Kehadiran, dan Agenda Rapat

Ketentuan tentang penyelenggaraan rapat Komite Pembiayaan dilaksanakan sesuai kebutuhan. Pada setiap rapat dapat dilaksanakan dan dinyatakan sah apabila dihadiri seluruh Anggota Tetap. Sepanjang tahun 2023, Komite Pembiayaan telah mengadakan rapat sebanyak 9 kali dengan agenda rapat membahas berbagai hal terkait pembiayaan nasabah. Agenda rapat membahas, di antaranya mengenai:

- Permohonan tambahan fasilitas nasabah pembiayaan.
- Permohonan perpanjangan dan tambahan nasabah pembiayaan.
- Permohonan baru nasabah pembiayaan.
- Permohonan baru nasabah pembiayaan.
- Permohonan tambahan nasabah pembiayaan.

Rincian kehadiran anggota KP sebagai berikut:

Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Ketua (pejabat tertinggi dari sisi bisnis)	9	9	100%
Sekretaris (pejabat dari sisi risiko)	9	9	100%
Pemantau	9	1	11%
Narasumber	9	9	100%

4. Pelaporan Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban Komite Pembiayaan dapat disampaikan melalui risalah rapat, memorandum keputusan yang diedarkan atau laporan berkala.

5. Realisasi Program Kerja Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023, Komite Pembiayaan telah melaksanakan program kerja, yakni memberikan keputusan atau rekomendasi atas pemberian pembiayaan (baru, tambahan, penurunan dan/atau perpanjangan, restrukturisasi).

Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) dibentuk untuk memastikan penerapan system teknologi informasi (TI) sejalan dengan rencana strategis BCAS serta meningkatkan keunggulan bersaing BCAS melalui pemanfaatan teknologi informasi yang tepat guna. Pedoman KPTI dalam menjalankan tugasnya yaitu Surat Keputusan Direksi No. 040/SK/DIR/2011 tanggal 26 Agustus 2011 perihal Piagam Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Pengunaan Teknologi Informasi.

1. Struktur, Keanggotaan, dan Status Hak Suara

Struktur dan Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi terdiri dari:

a. Personalia Komite, meliputi anggota Direksi dan Kepala Unit Kerja Kantor Pusat yang memiliki Fungsi memantau Rencana Strategi TI, serta Kepala Unit Kerja Pengguna Utama TI.
b. Dalam satuan waktu KPTI dapat mengundang Narasumber untuk memberikan masukan mengenai beberapa masalah yang terkait TI. Narasumber dapat berasal dari anggota Direksi, Unit Kerja lain di Kantor Pusat, maupun dari pihak luar BCAS.

Struktur, keanggotaan, dan status hak suara KPTI adalah sebagai berikut:

Jabatan di Komite	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua (merangkap anggota)	Direktur yang membidangi Teknologi Informasi	Memiliki hak suara
Sekretaris (merangkap anggota)	Kepala Departeman Teknologi Informasi	
Anggota	Presiden Direktur	
Anggota	Direktur Kepatuhan	
Anggota	Direktur lain Pengguna Utama IT	
Anggota	Kepala Satuan Kerja TI & Logistik	
Anggota	Kepala Satuan Kerja Audit Internal	
Anggota	Kepala Departemen Operasional TI	
Anggota	Kepala Departemen Sisdur & PPO	
Anggota	Kepala Departemen MRK	
Anggota	Kepala Departemen Kepatuhan	
Anggota	Kepala Unit Kerja Pengguna Utama IT*	

Keterangan: *Keikut-sertaan dalam rapat tergantung pada topik rapat yang relevan dengan unit kerja yang bersangkutan

2. Fungsi Pokok, Tugas dan Tanggung Jawab

Fungsi pokok Komite Pengarah Teknologi Informasi yaitu:

a. Membantu Dewan Komisaris dan Direksi untuk mengawasi kegiatan terkait teknologi informasi.
b. Melakukan peninjauan kembali dan merekomendasikan rencana strategis TI agar sejalan dengan rencana bisnis BCAS.
c. Melakukan evaluasi secara berkala atas dukungan TI pada kegiatan usaha BCAS.
d. Memastikan investasi TI memberikan nilai tambah kepada BCAS.

Tugas dan Tanggung Jawab

KPTI memiliki beberapa tanggung jawab sebagai berikut:

a. Mereview rencana strategis TI agar searah dengan rencana strategis kegiatan usaha bank.
b. Mereview Langkah-langkah strategis untuk meminimalkan risiko atas investasi bank pada sektor TI.
c. Mereview perumusan kebijakan dan prosedur TI yang utama
d. Memantau dan memastikan kesesuaian proyek-proyek TI yang disetujui dengan rencana strategis TI.
e. Memantau dan memastikan kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek TI dengan rencana proyek yang disepakati.
f. Memantau dan memastikan kesesuaian TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha bank.
g. Memantau kinerja TI, dan Upaya peningkatannya.
h. Memantau Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait IT, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan satuan kerja penyelenggara.
i. Memastikan kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki bank.

Misi Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah memastikan BCAS memiliki keunggulan yang kompetitif melalui pemanfaatan Teknologi Informasi.

3. Kebijakan, Frekuensi Kehadiran, dan Agenda Rapat

Kebijakan rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi dilaksanakan sesuai kebutuhan BCAS, atau paling sedikit 2 kali dalam 1 tahun. Sampai dengan 31 Desember 2023, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah mengadakan rapat sebanyak 2 kali. Agenda rapat membahas tentang pengamanan jaringan dan pengamanan server, *mini company*, *new digital sign*, dan revitalisasi *Data Center* Wisma 2.

Rincian kehadiran anggota komite dalam rapat sebagai berikut:

Jabatan	Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Presiden Direktur	Yuli Melati S	2	2	100%
Direktur	Lukman Hadiwijaya	2	2	100%
Direktur	Houda Muljanti	2	2	100%
Direktur	Ina Widjaja	2	2	100%
Kepala STL	Theresia Andita Lim	2	2	100%
Kepala SBK	Yanto Tanaya	2	2	100%
Kepala SKA	Ammy Susanto	2	1	50%
Kepala SKA	Jap Wirianto S	2	1	50%
Kepala SKAI	Indarahardjo	2	1	50%
Kepala ARP	Adetyas Wendiana	2	2	100%
Kepala DOP	Fatmah	2	2	100%
Kepala BRK	Dwidadi Sugito	2	1	50%
Kepala HSD	Retno Wulandari	2	1	50%
Kepala Departemen MRK	Edi Hartono	2	1	50%
Kepala Departemen Kepatuhan	Maman H	2	1	50%
Kepala Departemen Audit TI	Adrianus AS	2	1	50%
Kepala Departemen Operasional TI	Suhaman	2	2	100%
Kepala Departemen Pengembangan TI	Yudiarto	2	2	100%
Kepala Departemen Sisdur & PPO	Jacqueline H	2	2	100%
Kepala Departemen MRK Logistik	Budiari A	2	1	50%
Kepala Unit Kerja Pengguna Utama TI	Linda Carolina W	2	1	50%
Kepala Unit Kerja Pengguna Utama TI	Andreanne S	2	2	100%
Kepala Unit Kerja Pengguna Utama TI	Andru Santoso	2	1	50%
Kepala Unit Kerja Pengguna Utama TI	Nana Nasehudin	2	1	50%
Kepala Unit kKerja Pengguna Utama TI	Helena Effendie	2	1	50%
Unit Kerja Pengguna Utama TI	Zanaky Rachmat	2	1	50%
Unit Kerja Pengguna Utama TI	Dian Risdiana	2	1	50%
Unit Kerja Pengguna Utama TI	Priyo Subiyakto	2	2	100%
Unit Kerja Pengguna Utama TI	Hafizh Furqon	2	1	50%

4. Pelaporan Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban/realisasi kerja Komite Pengarah Teknologi Informasi dapat disampaikan melalui risalah rapat Komite dengan ketentuan sebagai berikut:

- Kehadiran anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi dalam rapat sudah memenuhi kuorum.
- Hasil rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
- Risalah rapat dibuat oleh Sekretaris dan ditandatangani oleh Ketua komite.

5. Realisasi Program Kerja Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah merealisasikan program kerja antara lain:

- Penambahan pengamanan jaringan.
- Penambahan pengamanan server.
- Implementasi *Digital Sign*.
- Pilot *New Mobile Banking* BCA Syariah.
- Pilot *New Core Banking System*.

Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian (KPKK)

Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian (KPKK) dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direksi. Pembentukan KPKK memiliki misi untuk memberikan rekomendasi yang independen kepada Direksi mengenai penyelesaian kasus yang memenuhi prinsip keadilan dan kesetaraan melalui penelaahan kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan karyawan. Pedoman komite ini dalam menjalankan tugasnya yaitu Surat Keputusan No. 052/SK/DIR/2023 tanggal 11 Desember 2023 perihal Struktur Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian (KPKK) Tahun 2023.

1. Struktur, Keanggotaan dan Status Hak Suara

Struktur dan Keanggotaan Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian (KPKK) adalah sebagai berikut:

1. Personalia Komite, meliputi beberapa Kepala Unit Kerja Kantor Pusat yang bidang kerjanya berkaitan dengan penanganan kasus pelanggaran dan/atau kejahatan.
2. Narasumber, yang dapat diundang untuk memberikan penjelasan atas suatu masalah. Narasumber dapat ditunjuk dari pihak internal maupun eksternal BCAS.

Struktur, keanggotaan, serta status hak suara KPKK yaitu sebagai berikut:

Jabatan di Komite	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua (merangkap anggota tetap)	Kepala Satuan Kerja Hukum dan SDM	Memiliki hak suara
Anggota tetap	Kepala SKAI	Memiliki hak suara
Anggota tetap	Kepala Satuan Kerja TI dan Logistik	Memiliki hak suara
Sekretaris (merangkap anggota tetap)	Kepala Departemen Audit Kantor Pusat dan Anti Fraud	Tanpa hak suara
Anggota tidak tetap	Kepala Unit Kerja Kantor Pusat/Kepala Cabang yang membawahi Karyawan yang melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan	Memiliki hak suara

2. Fungsi Pokok, Tugas, dan Tanggung Jawab KPKK

Fungsi pokok komite yaitu:

a. Menelaah kasus tindak pelanggaran dan/atau kejahatan oleh Karyawan yang memerlukan keputusan Direksi untuk tindak lanjut penyelesaiannya.
b. Memberikan pertimbangan kepada Direksi dalam menentukan tindak lanjut penyelesaian atas kasus pelanggaran dan/ atau kejahatan tersebut, yang meliputi pengenaan sanksi, pembenahan sistem dan prosedur operasional serta pemrosesan kasus secara hukum jika diperlukan.
c. Menelaah penyelesaian kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang diputuskan oleh Kepala Kantor Cabang Utama dan Kepala Unit Kerja Kantor Pusat.
d. Memberikan saran dan pengarahan (jika diperlukan) kepada Kantor Cabang dan Unit Kerja dalam menangani kasus pelanggaran dan/atau kejahatan.

Komite mempunyai wewenang untuk memberikan usulan/ rekomendasi kepada Direksi tentang penyelesaian kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan oleh karyawan.

Tugas dan Tanggung Jawab KPKK

Tugas pokok anggota KPKK yang memiliki hak suara adalah memberikan masukan berupa informasi, analisis, dan pertimbangan pada rapat untuk membuat usulan/ rekomendasi KPKK mengenai:

- Pengenaan sanksi.
- Pembenahan sistem dan prosedur operasional.
- Pemrosesan kasus secara hukum.

Jika anggota komite berhalangan, kehadirannya dapat diwakili oleh pejabat 1 level di bawah anggota komite yang tidak hadir (minimal setingkat Kepala Departemen) yang ditunjuk oleh anggota yang bersangkutan.

3. Kebijakan, Frekuensi Kehadiran, dan Agenda Rapat

Rapat Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian diadakan sesuai keperluan apabila terjadi kasus pelanggaran dan/ atau kejahatan yang menyangkut karyawan. Sepanjang tahun 2023, Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian telah mengadakan rapat sebanyak 2 kali. Agenda rapat membahas kaji ulang SK 047/SK/DIR/2018 perihal Struktur Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian (KPKK) dan pelanggaran prosedur oleh Kantor Cabang.

Rincian tanggal dan kehadiran anggota tetap KPKK sebagai berikut:

Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Kepala Satuan Kerja Hukum dan SDM (Retno Wulandari)	2	1	50%
Kepala SKAI (Indarahardjo)	2	1	50%
Kepala Satuan Kerja TI dan Logistik (Theresia Andita)	2	1	50%
Kepala Departemen Audit Kantor Pusat dan Anti Fraud (Desy Dewi Christiani Gunawan)	2	2	100%

4. Pelaporan Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban realisasi kerja Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian dapat disampaikan melalui:

- Risalah rapat khusus KPKK yang diadakan untuk membahas kasus atau hal tertentu.
- Laporan kepada Direksi dilakukan 1 kali dalam setahun.

5. Realisasi Program Kerja Tahun 2023

Sepanjang melaksanakan tugas kepengurusannya di tahun 2023, KPKK telah mengadakan rapat sebanyak 2 kali. Realiasi kegiatan KPKK yaitu melakukan kaji ulang terhadap struktur komite dan menyelesaikan pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh Kantor Cabang BCAS.

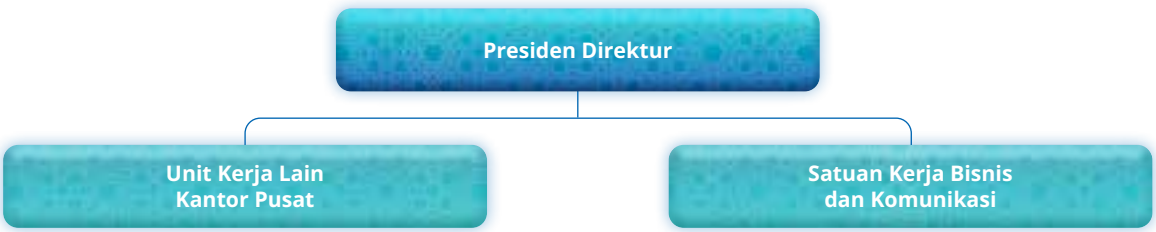
Sekretaris Perusahaan

Dalam rangka meningkatkan keterbukaan, layanan, dan komunikasi kepada para pemangku kepentingan sebagai penerapan prinsip tata Kelola perusahaan yang baik. Departemen Komunikasi & Kesekretarian Perusahaan dituntut untuk memiliki kualifikasi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, serta untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk mendukung dalam pelaksanaan tugasnya. Keberadaan Departemen Komunikasi & Kesekretarian Perusahaan memberikan nilai positif dalam membantu Direksi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham, serta pemangku kepentingan lainnya. Departemen Komunikasi & Kesekretarian Perusahaan juga memelihara citra dan melindungi kepentingan Perusahaan melalui terbentuknya komunikasi dan hubungan yang baik dengan segenap *stakeholder*.

Struktur dan Kedudukan Sekretaris Perusahaan

Pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 024/SK/DIR/2021 perihal Struktur Organisasi Satuan Kerja Bisnis dan Komunikasi (SBK). SBK membawahi Departemen Komunikasi dan Kesekretariatan Perusahaan yang tugasnya mencakup Pengelolaan Pengurus, Pengelolaan Administrasi Pengurus, Komunikasi Pemasaran, Hubungan Korporasi, dan CSR.

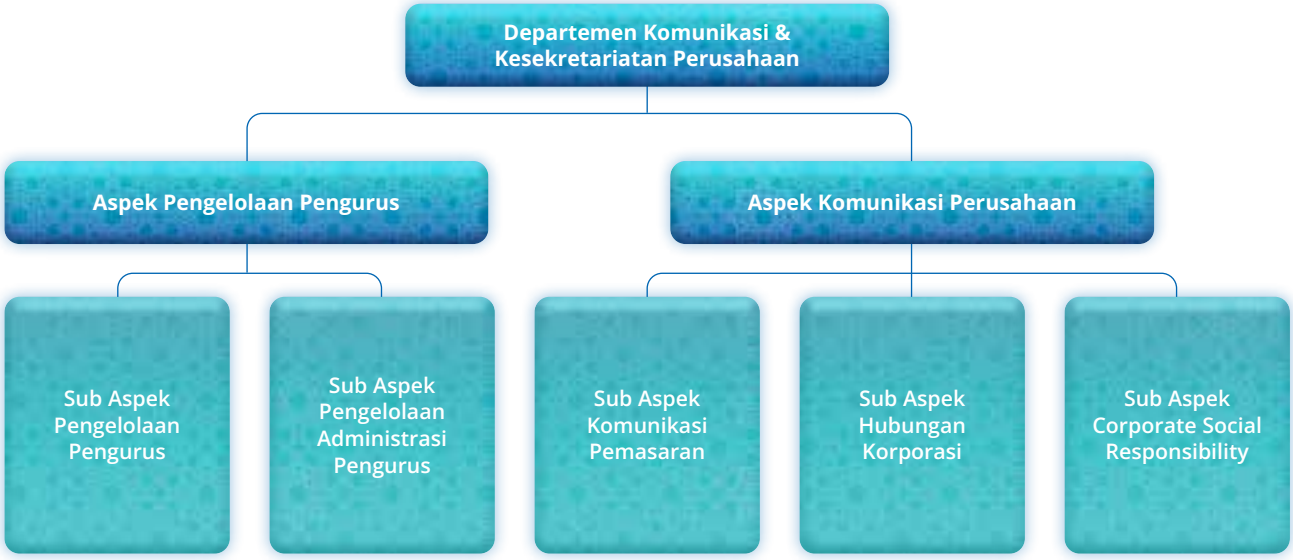
Posisi Satuan Kerja Bisnis dan Komunikasi pada struktur organisasi BCA Syariah:



Bagan organisasi Satuan Kerja Bisnis dan Komunikasi:



Bagan organisasi Departemen Komunikasi dan Kesekretariatan Perusahaan



Profil Sekretaris Perusahaan

Saat ini, fungsi Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Nadia Amalia Sekarsari. Berikut merupakan profil dari Sekretaris Perusahaan di tahun 2023:



Nadia Amalia Sekarsari
Sekretaris Perusahaan

Warga Negara Indonesia, 41 tahun, berdomisili di Bekasi.

Dasar Hukum Penunjukan:
Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan sejak 2016 sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatan No. 017/SKP/HSD/2016.

Perjalanan Karier:
Bergabung di BCAS sejak 1 November 2010. Sebelumnya berkarier di PT Bank Central Asia Tbk sebagai Associate Officer Unit Bisnis Kredit Konsumer (2005-2010).

Pendidikan dan Pelatihan:
Meraih gelar Sarjana Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (2004).

Mengikuti berbagai pelatihan di bidang Perbankan Umum, Perbankan Syariah, Manajemen Risiko, *Corporate Culture*, Tata Kelola Perusahaan, Kepemimpinan, dan Keuangan Berkelanjutan yang diantaranya diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan, PT BCA Tbk, BCAS, LSPP, KNKG, dll.

Program Pengembangan Kompetensi dan Pelatihan

Sepanjang tahun 2023, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti berbagai program pengembangan kompetensi dan pelatihan, seperti yang dapat dilihat di tabel berikut ini:

No.	Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
1	Sosialisasi Klasifikasi Taksonomi Hijau Indonesia	PT Bank BCA Syariah	03 Maret 2023
2	Pelatihan Pendekatan CSR Strategik Dalam Membangun Keungggulan Berkelanjutan Berbasis ISO 26000 SR	MSI Institute	11-12 Maret 2023
3	*Dry Run Workshop & Group Discussion* "Giving & Receiving Empowering Feedback"	PT Bank BCA Syariah	14 April 2023
4	*Workshop* Kamus Kompetensi	PT Bank BCA Syariah	5 Juni 2023
5	*How to Manage Climate Related Risk in Banking Industry*	OJK Institute	15 Juni 2023
6	*Mid Year Forecast & Strategy Review* 2023	PT Bank BCA Syariah	26 Juli 2023
7	*Budget Kickoff* 2024 "*Business Strategy & Macroeconomic Outlook*"	PT Bank BCA Syariah	16 Agustus 2023
8	*"ESG in House Workshop & Discussion"*	PT Bank BCA Syariah	28 Agustus 2023
9	*Strategic Discussion* 2024	PT Bank BCA Syariah	1 September 2023
10	HR Green Forum	Intipesan Conference	14 September 2023
11	*E-L Sustainable Finance Policy and Strategy* BCA Syariah	PT Bank BCA Syariah	22 September 2023
12	*ESG In House Workshop & Discussion*, (Sosialisasi BCA Syariah *Sustainable Finance Policy*, & ESRA)	PT Bank BCA Syariah & TSC	27 September 2023

No.	Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
13	FGD BCA Syariah *Sustainable Finance Policy*, & ESRA	PT Bank BCA Syariah & TSC	5 Oktober 2023
14	Asean Corporate Governance Scorecard	PT Bank BCA Syariah & TSC	13 November 2023
15	Rakernas 2024 "Energized You!	PT Bank BCA Syariah	21-24 November 2023
16	Lindungi Hutan & Save Your Life	PT Bank BCA Syariah	22 November 2023
17	Non-Certification First Aid Training Awareness	PT Bank BCA Syariah	22 November 2023
18	BCA Syariah Sustainability Talk Vol.1 "Keuangan Berkelanjutan: Tantangan daan Peluang Pelaku Industri dan Perbankan"	PT Bank BCA Syariah	14 Desember 2023
19	Workshop RCSA 2023	PT Bank BCA Syariah	15 Desember 2023

Fungsi Sekretaris Perusahaan

Secara umum, tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan di BCAS adalah sebagai berikut:
a. Mendukung Dewan Komisaris dan Direksi dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan.
b. Menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan Pengurus dan melaksanakan berbagai kegiatan kesekretariatan.
c. Mengikuti perkembangan industri dan peraturan perundang-undangan terkait.
d. Melaksanakan kegiatan komunikasi baik internal dan eksternal serta menjaga hubungan baik dengan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka menjaga citra positif perusahaan dan memastikan transparansi dan keterbukaan informasi kepada publik.
e. Perantara antara BCAS dengan para pemangku kepentingan termasuk pemegang saham dan regulator.

Tugas dan Tanggung Jawab

Secara umum, tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan di BCAS adalah sebagai berikut:
a. Mendukung Pengurus (Dewan Komisaris, DPS, dan Direksi) dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan.
b. Menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan Pengurus dan melaksanakan berbagai kegiatan kesekretariatan.
c. Mengikuti perkembangan industri dan peraturan perundang-undangan terkait.
d. Melaksanakan kegiatan komunikasi baik internal dan eksternal serta menjaga hubungan baik dengan seluruh *stakeholder* dalam rangka menjaga citra positif perusahaan dan memastikan transparansi dan keterbukaan informasi kepada publik.
e. Mengkoordinasikan aktivitas penerapan Keuangan Berkelanjutan di bank.
f. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan sosial sebagai bagian dari Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*, CSR) untuk menjaga hubungan baik dan memberikan manfaat bagi komunitas

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan pada Tahun 2023

Sekretaris Perusahaan telah menyampaikan laporan kegiatan Sekretaris Perusahaan di tahun 2023 kepada Kepala Satuan Kerja Bisnis dan Komunikasi. Adapun kegiatan yang dilakukan Sekretaris Perusahaan selama tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

1. Mendukung penyelenggaraan perusahaan yang diadakan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan agar sesuai dengan anggaran dasar, prinsip-prinsip syariah dan peraturan lainnya.

No.	Perihal	Keterangan
1	Mengelola rapat Dewan Komisaris, Direksi dan DPS serta menindaklanjuti hasilnya.	• Sebagai notulen dalam rapat Direksi, Dewan Komisaris dan DPS BCAS. • Mendokumentasikan rapat, mensirkulasikan risalah rapat dan menindaklanjuti hasil keputusan rapat. Selama tahun 2023 telah dilaksanakan 44 kali Rapat Dewan Komisaris, 43 kali Rapat Direksi, 29 kali Rapat DPS, 11 kali rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, dan 12 kali rapat gabungan Dewan Komisaris, Direksi dan DPS.
2	Mengelola rapat Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit sebagai perangkat Dewan Komisaris.	• Sebagai notulen dalam rapat Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit. • Mendokumentasikan rapat dan mensirkulasikan risalah rapat. Selama tahun 2023 telah dilaksanakan 12 kali Rapat Komite Pemantau Risiko dan 17 kali rapat Komite Audit.

No.	Perihal	Keterangan
3	Mengkoordinasikan kegiatan korespondensi dan pengarsipan dokumen yang terkait dengan Pengurus.	• Melakukan proses administrasi surat, memo dan/atau surat keputusan • Mengkoordinasikan pengisian Daftar Pernyataan Tahunan (*Annual Disclosure*) oleh Pengurus.
4	Bersama dengan unit kerja terkait, melakukan *self-assessment* atas pelaksanaan tata kelola perusahaan.	Melakukan *self-assessment* pelaksanaan tata kelola perusahaan semester I dan semester II tahun 2023.
5	Melakukan pengaturan kegiatan korporat dan pengaturan protokoler bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS.	Kegiatan telah dilaksanakan secara rutin sepanjang tahun 2023.
6	Mempersiapkan kegiatan kunjungan jajaran manajemen ke jaringan cabang Bank atau nasabah.	Kegiatan telah dilaksanakan secara rutin sepanjang tahun 2023.
7	Mengkoordinasikan penyampaian informasi dan atau laporan dari dan ke eksternal maupun internal.	Kegiatan telah dilaksanakan secara rutin sepanjang tahun 2023.
8	Mengkoordinasikan penyampaian keputusan yang terkait dengan pengurus kepada unit kerja terkait.	Kegiatan telah dilaksanakan secara rutin sepanjang tahun 2023.

2. Sebagai penghubung antara BCA Syariah dengan pemegang saham BCA Syariah, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya:

No.	Perihal	Keterangan
1	Memastikan keterbukaan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan.	• 2 kali pemaparan kinerja kepada media yaitu pada tanggal 9 Maret 2023 atas kinerja perusahaan semester 2 – 2022 dan pada tanggal 4 Agustus 2023 atas kinerja perusahaan semester 1 – 2023. • 20 kali siaran pers yang dapat diakses pada https://www.bcasyariah.co.id/siaran-pers • 1 kali penerbitan fakta material yang dapat diakses pada https://www.bcasyariah.co.id/keterbukaan-informasi • Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada OJK secara tepat waktu serta melakukan publikasi melalui *website* perusahaan yang dapat diakses pada https://www.bcasyariah.co.id/laporan-tahunan • Melakukan *review* dan menyempurnakan situs *web* BCAS. • Mengelola dan melakukan pengkinian informasi dalam situs web BCAS.
2	Melakukan pemantauan berita seputar industri perbankan dan melakukan penanganan atas berita negatif.	Selama tahun 2023 tidak terdapat pemberitaan negatif di media mengenai BCAS.
3	Menjaga hubungan baik dengan *stakeholder*.	Melakukan *review* dan mengimplementasikan kegiatan *sponsorship* BCAS seiring dengan kebijakan BCAS.

3. Melaksanakan kegiatan pemasaran serta komunikasi baik internal dan eksternal.

No.	Perihal	Keterangan
1	Komunikasi pemasaran	• Mengembangkan, mengimplementasikan kegiatan *marketing event*. • Mengembangkan, mengimplementasikan dan mengkomunikasikan berbagai program promosi bagi nasabah. • Mengelola dan melakukan pengkinian informasi dalam sosial media resmi BCA Syariah.
2	Materi komunikasi BCAS	• Menyusun *corporate guideline* dan memantau penerapannya. • Menjadi *coordinating point* untuk materi komunikasi di BCA Syariah. • Menyusun materi komunikasi korporasi BCA Syariah melalui media massa, iklan hari besar, dan lain-lain.

4. Mengkoordinasikan aktivitas penerapan Keuangan Berkelanjutan di bank.

No.	Perihal	Keterangan
1	Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB).	Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB). RAKB disampaikan kepada OJK secara tepat waktu.
2	Mengkoordinasikan aktivitas penerapan Keuangan Berkelanjutan di bank.	• Mengkoordinasikan dan memantau penerapan aktivitas sesuai RAKB. • Menyusun dan menyampaikan Sustainability Report kepada OJK secara tepat waktu serta melakukan publikasi melalui *website* perusahaan yang dapat diakses pada https://www.bcasyariah.co.id/laporan-keberlanjutan

5. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan sosial sebagai bagian dari Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (*Corporate Social Responsibility*, CSR) untuk menjaga hubungan baik dan memberikan manfaat bagi komunitas.

No.	Perihal	Keterangan
1	Melaporkan rencana dan realisasi kegiatan literasi dan inklusi keuangan.	• Menyusun rencana literasi dan inklusi keuangan serta melaporkan kepada Regulator secara tepat waktu. • Menyusun dan melaporkan laporan realisasi literasi dan inklusi keuangan setiap triwulan.
2	Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan sosial.	• Selama tahun 2023 telah tersalurkan dana sosial untuk kegiatan sosial dan lingkungan sebesar Rp943.821.270. • Peserta edukasi keuangan tercatat tidak kurang dari 11.000 peserta. • Terlaksana penanaman 1.000 bibit mangrove di pesisir Tambakrejo, Semarang dan 1.000 bibit durian di hulu sungan Ciliwung, Bogor. • Penyaluran zakat terhadap 30 orang mustahik dalam bentuk program pemberdayaan pengusaha mikro bersama BAZNAS.

Laporan Keterbukaan Informasi

Sebagai bentuk tanggung jawab BCA Syariah kepada seluruh *stakeholder*, berikut disampaikan keterbukaan dan transparansi informasi bagi masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan:

No.	Keterangan
1	Menyediakan laporan fakta materia perihal Penambahan Anggota Direksi PT Bank BCA Syariah https://www.bcasyariah.co.id/keterbukaan-informasi
2	Menyediakan laporan BCAS a. Laporan Tahunan https://www.bcasyariah.co.id/laporan-tahunan b. Laporan Keuangan Bulanan https://www.bcasyariah.co.id/laporan-keuangan-bulanan c. Laporan Keuangan Triwulan https://www.bcasyariah.co.id/laporan-keuangan-triwulan d. Laporan Tata Kelola Perusahaan https://www.bcasyariah.co.id/laporan-gcg e. Laporan Keberlanjutan Laporan keberlanjutan BCAS tahun 2022 menjadi satu bagian dalam Laporan Tahunan https://www.bcasyariah.co.id/laporan-tahunan

Fungsi Audit Internal

Penerapan tata kelola yang baik memerlukan fungsi audit intern yang independen serta memiliki kewenangan, sumber daya yang kompeten, dan akses informasi yang memadai agar fungsi audit intern dapat dilaksanakan secara efektif. Pelaksanaan audit intern yang efektif memberikan jaminan kepada bank terkait kualitas dan efektivitas sistem pengendalian intern, manajemen risiko, serta proses dan sistem tata kelola untuk melindungi organisasi dan reputasi bank. Pelaksanaan fungsi SKAI berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2019 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum.

Kedudukan Satuan Kerja Audit Internal

SKAI merupakan bagian integral dari struktur organisasi BCAS dan dipimpin oleh Kepala SKAI, yang memiliki tanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur. Kepala SKAI juga memiliki kewenangan untuk berkomunikasi secara langsung dengan Dewan Komisaris, Komite Audit, dan/atau Dewan Pengawas Syariah (DPS) guna memberikan informasi terkait prinsip syariah.

Proses pengangkatan dan pemberhentian Kepala SKAI dilakukan oleh Presiden Direktur dengan persetujuan Dewan Komisaris yang mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. Setiap perubahan dalam posisi Kepala SKAI, baik itu pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian, harus diumumkan dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Posisi Satuan Kerja Audit Internal pada Struktur Organisasi BCAS

Struktur organisasi Satuan Kerja Audit Internal diatur melalui Surat Keputusan nomor 002/SK/DIR/2021 tanggal 28 Januari 2021 perihal Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Internal.



garis pengawasan

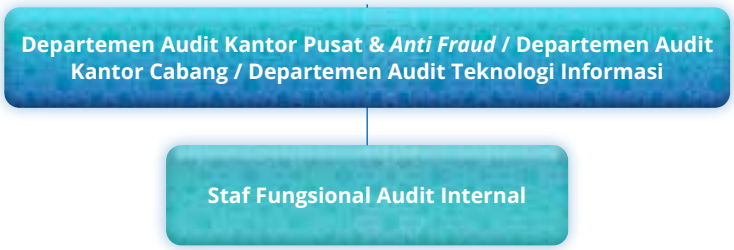
garis komunikasi dan penyampaian informasi

Dalam menjalankan fungsinya, SKAI membawahi fungsi audit yang melakukan pemeriksaan berbasis risiko serta fungsi pengendalian internal (internal *control*) yang melakukan pemeriksaan secara berkesinambungan. Pegawai SKAI bertanggung jawab kepada Kepala SKAI sesuai dengan struktur organisasi, dengan bagan sebagai berikut:

Bagan Organisasi Satuan Kerja Audit Internal



Bagan Organisasi Departemen Audit Kantor Pusat & *Anti Fraud* / Departemen Audit Kantor Cabang / Departemen Audit Teknologi Informasi



Pengangkatan/Pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Internal

Kepala Satuan Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur dengan persetujuan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.

Profil Kepala Satuan Kerja Audit Internal



Indarahardjo
Kepala Satuan Kerja Audit Internal

Warga Negara Indonesia, 59 tahun, berdomisili di Tangerang Selatan.

Dasar Hukum Penunjukan:
Surat Tugas BCAS No.001/SPKK/HSD/2020 tanggal 1 Juli 2020. Pengangkatan tersebut telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat No.169/DIR/2020.

Perjalanan Karier:
Bapak Indarahardjo sudah berkarier di PT Bank Central Asia Tbk sejak tahun 1988-1991 sebagai Staf Bidang Credit Policy Monitoring, tahun 1991- 1996 sebagai Auditor Bidang Credit Inspection Area I, tahun 1996- 1997 sebagai Audit Officer, tahun 1997-2003 sebagai Kepala Bidang Kredit, tahun 2003-2004 sebagai Senior Officer, 2004 sebagai Senior Credit Analyst Subdiv Kredit Komersial dan Ritel, tahun 2004-2007 sebagai Kepala Sentra Kredit Wilayah Palembang, tahun 2007 sebagai Adviser Credit Subdiv Kredit, tahun 2007-2009 sebagai Kepala Biro Penyelamatan Kredit, tahun 2009-2012 sebagai Adviser Credit GARK Komersial, tahun 2017-2019 sebagai Adviser Credit GARK Korporasi, tahun 2019- 2020 sebagai Anggota Tim persiapan Akuisisi Bank Royal dan Rabo Bank oleh PT Bank Central Asia Tbk. Tahun 2020 sampai dengan sekarang ditugaskan ke BCAS sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Internal.

Pendidikan dan Pelatihan:
Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman (1987). Memperoleh Sertifikasi Pendidikan Dasar Perbankan Syariah (2020), Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 (2022), Sertifikasi *Anti Fraud* dan Sertifikasi Certified Practitioner of Internal Audit (CPIA) (2021). Beliau juga telah mengikuti sejumlah pelatihan dan seminar dari Institute of Internal Auditors (IIA), dan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI).

Program Pengembangan Kompetensi dan Pelatihan

Program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia SKAI yang dilakukan tahun 2023 baik eksternal maupun internal, antara lain:

1. *Sustainable Finance Policy* dan Strategy BCA Syariah
2. COSO *Internal Control in Auditing*
3. *Critical Thinking Concept*
4. *Engagement Planning*
5. *General Control* dan *Application Control* dalam Audit TI
6. *Report Writing Quality of Reporting*
7. *Root Cause Analysis*
8. *Risk Concept, Risk Based Audit*, dan Proses Audit
9. Pendidikan Dasar Perbankan Syariah
10. Pendidikan Lanjutan Perbankan Syariah
11. Pengenalan Produk Dana dan Jasa BCAS
12. Pengetahuan Produk UMKM dan Konsumer
13. Peran Audit Intern Masa Depan dalam Industri Jasa Keuangan
14. *Workshop* & *Group Discussion* "*Giving & Receiving Empowering Feedback*"
15. *Workshop "Creating an Innovation Proposal"*

Piagam Audit Internal

Dalam menjalankan fungsinya, Internal Audit berpedoman pada Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*). Secara umum, hal-hal yang termuat dalam Piagam Audit Internal yaitu misi, kewenangan, independensi, dan cakupan aktivitas audit internal untuk mewujudkan sistem pengendalian internal yang efektif di BCAS.

Pembaharuan terakhir atas piagam audit internal dilakukan pada bulan Januari 2021 yang disahkan dalam Surat Keputusan No. 001/SK/DIR/2021 tanggal 27 Januari 2021 Perihal Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) Tahun 2021. Pembuatan piagam audit intern berpedoman kepada POJK No.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal serta telah disesuaikan dengan POJK No.1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum dan standar profesional yang berlaku.

Independensi dan Objektivitas

Untuk mendukung independensi dan objektivitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi, menjamin kelancaran audit dan wewenang dalam memantau tindak lanjut hasil audit, Kepala SAI dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit. Terkait hal-hal berkenaan dengan prinsip syariah, maka Kepala SAI dapat berkomunikasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Atas hal tersebut, Kepala SAI harus melaporkan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan. Laporan pelaksanaan tugas SAI disampaikan kepada Presiden Direktur atau Dewan Komisaris (Jika komunikasi dengan Presiden Direktur dianggap tidak tepat, misalnya temuan SAI terkait dengan integritas Presiden Direktur), dengan salinannya kepada Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.

Setiap auditor wajib membuat pernyataan tidak memiliki hubungan keluarga/finansial/ kepentingan lain terhadap obyek audit dan/atau pihak yang akan diperiksa (*auditee*) yang dapat mempengaruhi objektivitas pemeriksaan. Sepanjang 2023, SAI telah melaksanakan kegiatan audit secara independen. Tidak terdapat benturan kepentingan, pembatasan cakupan dan akses terhadap data, personel atau properti, serta pembatasan sumber daya yang dapat mempengaruhi independensi dan objektivitas pelaksanaan audit.

Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Audit Internal

Tugas pokok SKAI sedikitnya mencakup:
1. Membantu tugas Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit.
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit.
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
5. Dalam menjalankan tugasnya, SKAI dapat bekerja sama dengan unit kerja pengendalian lain, seperti Departemen Kepatuhan dan Departemen Manajemen Risiko, tidak menyebabkan pengalihan tanggung jawab masing-masing unit kerja dalam fungsi pengendalian.

Tanggung Jawab Kepala Satuan Kerja Audit Internal, antara lain:
1. Mengimplementasikan Kode Etik Audit Internal.
2. Mematuhi pedoman dan metodologi yang ditetapkan dalam Manual Audit Internal.
3. Menggunakan kemahirannya dengan seksama dalam melaksanakan tugasnya.
4. Memelihara integritas dan objektivitas atau sikap mental yang independen.
5. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab SKAI kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan atau penetapan/putusan pengadilan.

Standar Pelaksanaan Audit dan Pengendalian Mutu

Standar pelaksanaan audit internal mengacu antara lain pada:
- POJK No.1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum
- *Mandatory Guidance* yang ditetapkan The Institute of Internal Auditors (IIA)
- Standar Information System Audit and Control Association (ISACA) sebagai acuan ke arah global *best practice*s.

Metodologi yang digunakan di dalam penerapan fungsi audit adalah audit berbasis risiko (*risk based audit*), mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut. Sejalan dengan perkembangan teknologi, SAI terus melakukan pengembangan dalam pemanfaatan data, *tools* dan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan audit serta meningkatkan nilai tambah dan deteksi dini (*early warning systems*) potensi terjadinya kelemahan pengendalian/*fraud*, antara lain dengan penerapan *whistleblowing system*.

Pengkajian ulang oleh pihak eksternal yang merupakan bagian dari pengendalian mutu yang independen dilakukan setiap 3 tahun sekali, terakhir dilaksanakan pada bulan Agustus 2023 dengan kesimpulan "secara umum sesuai" (*generally conform*) dan telah dilaporkan kepada OJK pada bulan Agustus 2023.

Standar kode etik auditor mengacu kepada International Professional Practices Framework (IPPF)-The Institute of Internal Auditors (IIA), yang terdiri dari Integritas, Objektivitas, Kerahasiaan dan Kompetensi. Setiap tahun auditor membuat surat pernyataan patuh terhadap kode etik auditor sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan komitmen bersama dan kepercayaan dari *stakeholder*s.

Komposisi Auditor dan Pengembangan Kompetensi

Dalam menjalankan fungsinya, Intenal Audit didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki kualifikasi yang memadai. Berikut komposisi Auditor Internal BCAS per 31 Desember 2023:

Jabatan	Jumlah Auditor
Kepala SKAI	1
Kepala Departemen Audit IT	1
Kepala Departemen Audit KC	1
Kepala Departemen Audit KP & *Anti Fraud*	1
Officer	3
Associate Officer	3
Assistant Officer	10
Staf	1

Auditor telah ikut serta dalam berbagai program sertifikasi profesi dengan jumlah sertifikasi yang dimiliki hingga per 31 Desember 2023:

Sertifikasi	Jumlah*
Manajemen Risiko Level 1	2
Manajemen Risiko Level 2	4
Manajemen Risiko Level 3	2
Manajemen Risiko Level 4	1
Anti Fraud Manager	1
Practitioner of Internal Audit	1
Information Security Auditor	1

Keterangan: *) 1 auditor dapat memiliki lebih dari 1 sertifikasi.

Setiap tahun, SAI melakukan *skill assessment* untuk mengidentifikasi serta memetakan kompetensi yang diperlukan oleh auditor dan hasilnya digunakan sebagai dasar dalam melakukan pengembangan kompetensi auditor secara berkelanjutan (termasuk memenuhi kebutuhan auditor spesialis). Pengembangan kompetensi dilakukan secara berkesinambungan baik dengan cara memberikan pelatihan internal maupun eksternal. Auditor juga diberikan kesempatan mengikuti seminar untuk menambah wawasan mengenai perkembangan bisnis, teknologi informasi, dan teknik audit. SAI juga mengikutsertakan auditor dalam berbagai perhimpunan profesi terkait audit, antara lain Institute of Internal Auditor (IIA) – Indonesia, Information Systems Audit and Control Association (ISACA), dan Ikatan Auditor Internal Bank (IAIB).

Pelaksanaan Kegiatan Satuan Kerja Audit Internal Selama Tahun 2023

Pada tahun 2023, SAI telah melaksanakan audit terhadap Kantor Cabang dan Unit Kerja Kantor Pusat, sesuai dengan Rencana Audit Tahunan yang ditetapkan berdasarkan hasil risk *assessment* yang dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan berbagai faktor risiko terkini. Fokus pemeriksaan audit tahun 2023, antara lain:

1. Departemen Operasi Teknologi Informasi, Departemen Pengembangan Teknologi Informasi dan Fungsi Sekuriti Teknologi Informasi.
2. Departemen Logistik.
3. Departemen Administrasi Pembiayaan & Fungsi Penyelamatan Pembiayaan.
4. Satuan Kerja Analisa Risiko Pembiayaan.
5. KC Palembang, KC Jatinegara, KC Surabaya, KC Solo, KC Sunter, KC Samanhudi, dan KC Mangga Dua.

Fokus Rencana Audit 2023

SKAI telah melaksanakan program kerja sesuai dengan Rencana Kerja SKAI pada tahun 2023, sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan.
2. *Security* Audit Sistem Pembayaran Bank Indonesia dan BI-ETP.
3. Kaji Ulang *Internal Capital Adequacy Assessment* Process.
4. *Single Customer View*.

Akuntan Publik (Audit Eksternal)

Berdasarkan POJK No. 37/ POJK.03/2019 dan SEOJK No. 10/ SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan. POJK Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, Laporan Keuangan BCAS telah diaudit oleh Akuntan Publik (AP) yang independen, kompeten, profesional, dan objektif sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik menurut perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang ditetapkan. Audit Eksternal yang dalam hal ini merupakan Akuntan Publik memiliki fungsi untuk mengaudit Laporan Keuangan agar kualitas dan akurasi penyajian kondisi keuangan tetap terjaga dan dapat ditingkatkan.

Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik

Penugasan audit kepada AP dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sekurang-kurangnya harus memenuhi aspek-aspek:
a. Kapasitas KAP yang ditunjuk.
b. Legalitas perjanjian kerja.
c. Ruang lingkup audit.
d. Standar profesional AP.
e. Komunikasi OJK dengan KAP dimaksud.

AP dan KAP yang ditunjuk, mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan. AP telah melakukan komunikasi dengan OJK mengenai kondisi BCAS yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit. AP wajib melaporkan hasil audit dan *management letter* kepada OJK.

Hasil audit dan *management letter* telah menggambarkan permasalahan BCAS yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada OJK oleh KAP yang ditunjuk.

Efektifitas Pelaksanaan Audit Eksternal

Dalam rangka memenuhi Fungsi Audit Eksternal, maka:
a. BCAS wajib menunjuk KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
b. Penunjukan AP dan/atau KAP tersebut di atas wajib memperoleh persetujuan RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris, usulan yang diajukan oleh Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit.
c. Penunjukan AP dan KAP yang sama oleh BCAS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d. Penunjukan AP dan KAP dalam rangka audit Laporan Keuangan Tahunan BCAS harus didasarkan pada perjanjian kerja.
e. AP yang melakukan audit terhadap BCAS, memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman serta kompetensi audit di bidang perbankan dan/atau keuangan syariah dan mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang operasional perbankan dan/atau keuangan syariah.
f. AP telah memperoleh pendapat dari DPS mengenai ketaatan BCAS terhadap pelaksanaan prinsip syariah sebelum menerbitkan Laporan Audit atas Laporan Keuangan BCAS.
g. AP dan KAP yang ditunjuk, telah:
   1. Menyampaikan hasil audit dan management letter kepada OJK tepat waktu.
   2. Mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.

Penunjukkan Kantor Akuntan Publik

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 22 Februari 2023 telah memutuskan untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang Terdaftar di OJK dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku untuk mengaudit/memeriksa buku dan catatan BCAS untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Pada tanggal 20 Juni 2023, Dewan Komisaris telah memutuskan untuk menunjuk:

Akuntan Publik	**Nama Kantor Akuntan Publik**	**Periode Penugasan**
Nama : Yasir No Reg AP : AP 0703	KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja Ernst & Young Global Limited Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 Lantai 7 Jalan Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190 Tel. (62-21) 52895000 Fax. (62-21) 52894100	1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

Biaya Audit Tahun 2023

KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja (Ernst & Young Global Limited), ditunjuk sebagai auditor BCA Syariah untuk melakukan audit atas laporan keuangan BCA Syariah untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023, dengan imbalan jasa sebesar Rp800.000.000 belum termasuk PPN.

Informasi-informasi mengenai KAP dan AP yang melakukan audit BCA Syariah selama 5 tahun terakhir sebagai berikut:

Tahun	KAP	Akuntan Publik
2023	KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja	Yasir
2022	KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan	Riva Utama Winata
2021		Drs. Nunu Nurdiyaman
2020		Drs. Nunu Nurdiyaman
2019		Drs. Ruchjat Kosasih

Jasa Selain Audit yang Diberikan oleh KAP/AP

Pada periode 2023, Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (Ernst & Young Global Limited) tidak memberikan jasa lain selain jasa Audit Laporan Keuangan untuk tahun buku 2023.

Konsultan dan/atau Penasihat

Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan usahanya, BCAS menggunakan beberapa konsultan, penasihat, atau yang dapat dipersamakan dengan itu. Kriteria penggunaan konsultan dan/atau penasihat tersebut adalah:

a. Proyek bersifat khusus yang sangat diperlukan untuk kegiatan usaha BCAS;
b. Didasari oleh kontrak yang jelas; dan
c. Konsultan merupakan pihak independen yang berprofesi dan memiliki kualifikasi yang cukup untuk melaksanakan proyek secara efektif dan efisien.

Daftar konsultan dan/atau penasihat yang digunakan oleh BCAS pada tahun 2023 adalah:

Konsultan, Penasihat (atau yang dipersamakan dengan itu)	Ruang Lingkup Kerja
Megawaty Iskandar	Jasa Pembinaan dan Penyusunan Materi di Fungsi Penyelamatan Pembiayaan
1. Sidabukke & Partners 2. Siregar Setiawan Manulu Partnership (SSMP) 3. Rumah Hukum 4. Sidabukke Clan & Associates 5. Abdul Hamid & Rekan	Kuasa hukum BCA Syariah
Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan	Kaji Ulang Kinerja Satuan Kerja Audit Intern PT Bank BCA Syariah (kewajiban regulator periodik 3 tahunan
Trisakti Sustainability Center	Jasa Pendampingan Implementasi Keuangan Berkelanjutan
Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan	Kaji Ulang Keandalan Sistem SCV tahun 2023
Kantor Konsultan Aktuaria Steven M & Mourits	Jasa Konsultasi Aktuaria

Konsultan, Penasihat (atau yang dipersamakan dengan itu)	Ruang Lingkup Kerja
Karim Consulting	Kajian Pengembangan Produk PT Bank BCA Syariah yang mencakup: 1. Mapping Produk Bank Syariah 2. Survei Kebutuhan Nasabah BCAS, Nasabah Bank Syariah Non-BCAS, dan Nasabah non-Bank Syariah 3. Melakukan GAP Analysis Produk Pendanaan, Pembiayaan dan Layanan Bank BCA Syariah berdasarkan Hasil Survei dan Mapping 4. Menyusun rekomendasi Pengembangan Produk Pendanaan, Pembiayaan dan Layanan Bank BCA Syariah

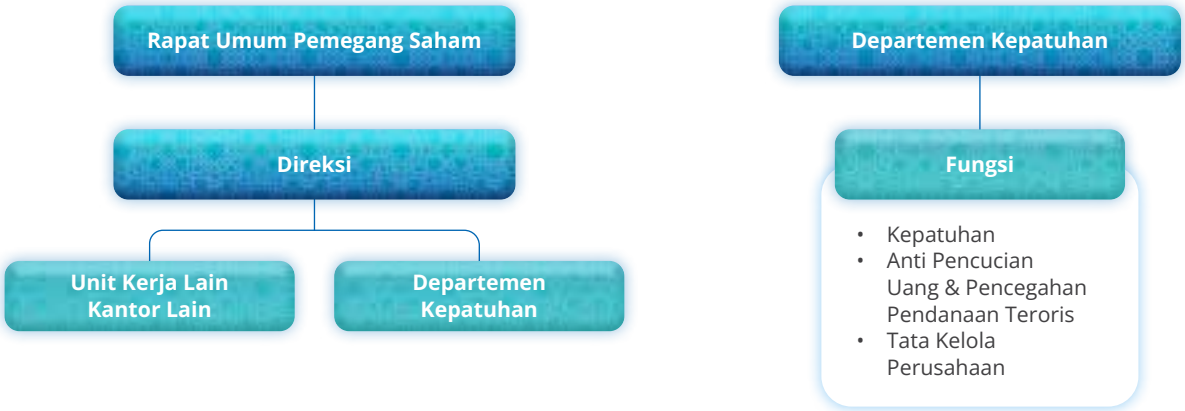
Fungsi Kepatuhan

Kompleksitas kegiatan usaha bank semakin meningkat sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, globalisasi, dan integrasi pasar keuangan. Untuk memitigasi risiko kegiatan usaha bank diperlukan berbagai upaya baik yang bersifat preventif (*ex-ante*) maupun kuratif (*ex-post*). Oleh karenanya, BCAS menjalankan fungsi kepatuhan untuk memastikan bahwa pengelolaan bisnis bank tetap dalam koridor kepatuhan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku. Dalam menjalankan fungsi kepatuhan sesuai dengan POJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, BCA Syariah telah membentuk Departemen Kepatuhan (KEP) sebagai departemen yang independen dan bebas pengaruh dari satuan kerja lainnya.

Struktur Organisasi Unit Kerja Fungsi Kepatuhan

Struktur organisasi KEP diatur berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 022/SK/DIR/2023 tanggal 15 Mei 2023. KEP dipimpin oleh Kepala Departemen Kepatuhan yang pengangkatannya telah dilaporkan kepada OJK. KEP bertanggung jawab langsung kepada Direktur (yang juga merupakan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan). Penunjukan dan pengangkatan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dilaksanakan melalui proses sebagaimana ditentukan oleh OJK.

Struktur Organisasi Departemen Kepatuhan



Tanggung Jawab Unit Kerja Fungsi Kepatuhan

Tanggung jawab KEP adalah sebagai berikut:

1. Memantau tingkat kepatuhan BCAS dalam memenuhi ketentuan OJK), BI, maupun regulator lainnya. Hal ini juga termasuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha BCAS telah sesuai dengan ketentuan regulator.
2. Mengoordinasi Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, termasuk di dalamnya bertanggung jawab untuk melakukan penilaian risiko penerapan program APU dan PPT sesuai ketentuan dari regulator.

Profil Kepala Departemen Kepatuhan



Maman Hermansyah, CPM
Kepala Departemen Kepatuhan

Warga Negara Indonesia, berusia 41 tahun, berdomisili di Bogor.

Dasar Hukum Penunjukan:
Menjabat sebagai Kepala Departemen Kepatuhan sejak 2015 sesuai dengan Surat Keputusan Promosi No. 135/SKP/HSD/2015.

Perjalanan Karier:
Bergabung di BCAS sejak 2013. Sebelumnya berkarier di PT Bank Bukopin Tbk (2017-2012) dan PT Panin Bank Syariah (2012-2013).

Pendidikan dan Pelatihan:
Meraih gelar Sarjana Sains dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjajaran (2007). Mengikuti berbagai pelatihan di bidang Perbankan Umum, Perbankan Syariah, Manajemen Risiko, *Corporate* Culture dan Kepemimpinan yang diantaranya diselenggarakan oleh PT BCA Tbk, BCAS, LSPP, dan institusi lainnya antara lain Brainstorming MER FATP, Akad-Akad Restrukturisasi Utang Dan Pembiayaan Bank Syariah, Implementing Operational Risk Management For Operation Excellence In Digital Era, The Macroeconomic Factors Impact On Liquidity Risk, Indonesia Strehgths Festival In Collaboration With Gallup, Pelatihan *Sustainable Finance*.

Pelaksanaan Kerja Fungsi Kepatuhan Selama Tahun 2023

BCAS sebagai perusahaan anak dari PT Bank BCA Tbk dalam Konglomerasi Keuangan mempunyai Fungsi Kepatuhan Terintegrasi dalam rangka penerapan tata kelola terintegrasi sesuai dengan POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan. Selama tahun 2023, KEP telah menjalankan fungsinya sebagai berikut:

1. Mendorong terciptanya budaya kepatuhan
   - Melakukan sosialisasi/menginformasikan ketentuan baru dari regulator kepada Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan unit kerja.
   - Memberikan informasi peraturan OJK, BI, dan peraturan perundangan lainnya kepada unit kerja terkait.
   - Mengikutsertakan sumber daya manusia di KEP dalam berbagai pelatihan, seminar sosialisasi peraturan dari regulator, serta sertifikasi kepatuhan yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) dalam rangka meningkatkan kualitas.
   - Melaksanakan fungsi konsultatif terkait dengan penerapan peraturan yang berlaku melalui pemberian saran/tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari unit kerja atau cabang.
2. Memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BCAS telah sesuai dengan ketentuan:
   - Mengidentifikasi sumber-sumber risiko kepatuhan.
   - Melakukan *gap analysis*, menganalisis dampak ketentuan baru terhadap operasional BCAS, dan mengusulkan penyesuaian manual, kebijakan, dan prosedur internal.
   - Melakukan pemutakhiran *database* ketentuan regulator yang berlaku.
   - Menyusun *Compliance Matrix Diary* sebagai sarana pemantauan untuk menjaga komitmen terhadap kewajiban pelaporan kepada regulator.
   - Melakukan *review* dan memberikan pendapat untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan regulator yang berlaku atas: rencana produk dan aktivitas baru; rancangan ketentuan internal yang akan diterbitkan; kepatuhan terhadap pelepasan pembiayaan; dokumen dalam rangka memastikan kesiapan operasional pembukaan, pemindahan alamat, serta penutupan jaringan kantor.
   - Melakukan uji kepatuhan terhadap pelaksanaan ketentuan di Kantor Cabang, bekerja sama dengan Departemen Sumber Daya Manusia.
   - Melakukan pemantauan terhadap Tingkat kepatuhan atas ketentuan regulator yang berlaku terkait prinsip *prudential banking*, yaitu: Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM); Giro Wajib Minimum (GWM); Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM); Batas Maksimum Penyediaan Dana(BMPD); *Non Performing Financing* (NPF); Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM); Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM).
   - Melakukan pemantauan terhadap pengenaan sanksi/denda dari regulator.
   - Melakukan penilaian risiko kepatuhan dan menyusun Laporan Profil Risiko Kepatuhan setiap triwulan, dalam rangka mengelola risiko kepatuhan.
   - Menyusun Laporan Triwulanan Pemantauan Kepatuhan yang disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
   - Melakukan koordinasi dengan unit kerja dalam rangka penilaian Tingkat Kesehatan Bank berbasis risiko.
   - Ikut serta aktif bersama Sekretaris Perusahaan dalam penerapan Tata Kelola BCAS.

3. Memastikan kepatuhan BCAS terhadap komitmen yang dibuat kepada regulator, antara lain:
   - Memantau komitmen BCAS kepada OJK, BI, dan regulator lainnya bersama dengan SKAI.
   - Memantau dan menindaklanjuti permintaan informasi/ data oleh OJK, BI, dan regulator lainnya dalam rangka pengawasan Bank.

Indikator Kepatuhan Tahun 2023

Indikator kepatuhan tahun 2023 sebagai bentuk komitmen dan tingkat kepatuhan BCAS terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah sebagai berikut:

Indikator Kepatuhan	Ketentuan yang Berlaku	Pencapaian BCAS
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).	Min. sesuai ketentuan	35,12%
Non-Performing Financing (NPF) Net	Maks. 5%	0,00%
Batas Maksimum Penyediaan Dana (BMPD) pihak terkait	Maks. 10% of Equity	8,93%
Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah	Min. sesuai ketentuan	4,59%
Rasio Intermediasi Makrorudensial (RIM)	Min. sesuai ketentuan	90,02%
Giro RIM	Min. sesuai ketentuan	00,00%
Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM)	Min. sesuai ketentuan	28,72%

Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan (APU, PPT dan P3SPM)

BCA Syariah berkomitmen untuk melaksanakan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan (APU, PPT dan P3SPM). Aktivitas terkait Penerapan Program APU, PPT dan P3SPM selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Melaporkan secara berkala pelaksanaan APU dan PPT kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Memantau transaksi keuangan mencurigakan dengan menggunakan aplikasi ESTR (*Electronic Suspicious Transaction Report*) serta melakukan pengembangan dan penyempurnaan *system* atas aplikasi.
3. Mengoordinasikan pelaksanaan pengkinian data nasabah melalui penyusunan target dan pemantauan realisasi terhadap target.
4. Melakukan *review* atas rencana produk dan aktivitas baru untuk memastikan telah memperhatikan ketentuan APU dan PPT.
5. Melakukan penyaringan data nasabah dan transaksi terhadap *watchlist* yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang antara lain Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT), Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPPSP), pada saat pembukaan rekening, dan pada saat terjadi perubahan daftar *watchlist* tersebut.
6. Melakukan identifikasi dan penilaian risiko atas penerapan APU dan PPT pada BCAS dengan pendekatan berbasis risiko (*Risk Based Approach*) dengan memperhatikan faktor-faktor terkait nasabah, negara atau area geografis, produk dan jasa serta jaringan distribusi.
7. Melakukan uji kepatuhan atas penerapan APU dan PPT di Kantor Cabang bekerja sama dengan SDM.
8. Melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai, dan transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri, serta penyampaian data melalui Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT) dan Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme (SIPENDAR) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
9. Meningkatkan pemahaman terkait APU dan PPT secara berkesinambungan dengan mengadakan pelatihan dan sosialisasi melalui *classroom training*, *online training*, *e-learning*, dan *virtual event* maupun dalam forum internal.
10. Melakukan pengembangan materi pelatihan Penerapan APU dan PPT.
11. Melakukan *review* dan memberikan pendapat atas rencana produk dan aktivitas baru serta rancangan ketentuan internal yang akan diterbitkan, untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan APU dan PPT yang berlaku.
12. Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan regulator, antara lain:
    - Pelaksanaan *Financial Integrity Rating* (FIR) PPATK.
    - Pelaksanaan *Mutual Evaluation Review* (MER) – *Financial Action Task Force* (FATF).

Penerapan Manajemen Risiko

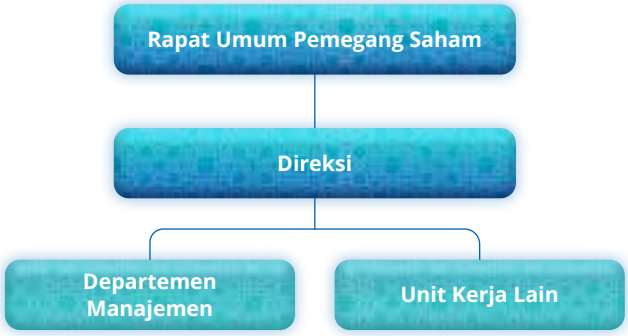
Kegiatan usaha perbankan syariah tidak terlepas dari risiko yang dapat mengganggu kelangsungan bank, untuk mengelola risiko tersebut bank wajib menerapkan manajemen risiko secara individu dan secara konsolidasi. Karakteristik produk dan jasa perbankan syariah memerlukan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang sesuai dengan kegiatan usaha perbankan syariah. Langkah-langkah yang dilakukan bank syariah dalam memitigasi risiko harus mempertimbangkan kesesuaian dengan Prinsip Syariah. Pelaksanaan Manajemen Risiko berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.03/2023 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

Struktur Organisasi Manajemen Risiko

Struktur organisasi Departemen Manajemen Risiko diatur melalui Surat Keputusan nomor 071/SK/DIR/2017 tanggal 22 Desember 2017 perihal Struktur Organisasi Departemen Manajemen Risiko.

Bagan posisi Departemen Manajemen Risiko pada struktur Organisasi BCAS

Bagan posisi Departemen Manajemen Risiko pada struktur Organisasi BCAS



Bagan struktur organisasi Departemen Manajemen Risiko



Profil Kepala Departemen Manajemen Risiko



Edy Hartono
Kepala Departemen Manajemen Risiko

Warga Negara Indonesia, berusia 58 tahun, berdomisili di Tangerang.

Dasar Hukum Penunjukan:
Menjabat sebagai Kepala Departemen Manajemen Risiko mulai 2023 sesuai dengan Surat Tugas No. 023A/SPKK/HSD/2023 .

Riwayat Pekerjaan
Beliau pernah bekerja di PT Bank Central Asia, Tbk sebagai Adviser Manajemen Risiko Korporasi dan FI di tahun 2020. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Departemen Manajemen Risiko di BCAS sejak 17 Mei 2023.

Latar belakang Pendidikan
Meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari Univestias Atma Jaya Yogyakarta (1989).

Sertifikasi dan pelatihan
Sertifikasi yang dimiliki:
- Manajemen Risiko level 1, 2 (2007) dan level 3 (2017).
- Qualified Auditor Internal, Tahun 2001.
- MWS, Essential Trainer, Tahun 2014.

Pelatihan yang diikuti:
ToT Materi Kualifikasi 4 Bidang Manajemen Risiko Perbankan tahun 2023.

Gambaran Umum Sistem Manajemen Risiko Bank

Dalam rangka pengelolaan risiko, BCAS telah mengimplementasikan Kerangka Penerapan Manajemen Risiko (*Risk Management Framework*) secara terpadu. Berikut adalah cakupan kerangka kerja manajemen risiko BCAS yaitu:
- Strategi
- Struktur organisasi
- Kebijakan dan pedoman, dan
- Infrastruktur

Kerangka tersebut digunakan sebagai sarana dalam penetapan strategi, organisasi, kebijakan dan prosedur, serta infrastruktur manajemen risiko untuk memastikan seluruh risiko yang dihadapi BCAS dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan, dan dilaporkan dengan benar.

Standar Penerapan manajemen risiko BCAS mencakup:
- pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah;
- kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko;
- kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
- sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Penerapan Manajemen Risiko tersebut wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank.

Risiko–risiko yang Dihadapi dan Dikelola

Jenis Risiko	Mitigasi/Pengelolaan
Risiko Kredit, yaitu risiko yang disebabkan oleh kegagalan pemenuhan kewajiban kepada Bank oleh nasabah atau pihak lain sebagaimana tercantum dalam kesepakatan.	Pengelolaan risiko kredit dilakukan melalui pengawasan cermat dari tahap permohonan pembiayaan dari nasabah, proses analisis pembiayaan hingga proses pemantauan pembiayaan. BCAS membentuk unit kerja khusus untuk menangani risiko, yaitu: 1. Satuan Kerja Analisis Risiko Pembiayaan untuk melakukan fungsi analisis kelayakan pembiayaan. Unit ini bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Direktur. 2. Departemen Manajemen Risiko yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan pelaporan realisasi penyaluran pembiayaan berdasarkan limit portofolio yang telah ditentukan. Salah satu kegiatan Departemen Manajemen Risiko ialah melakukan stress testing untuk kondisi normal dan krisis untuk mengawasi posisi risiko pembiayaan dan dampak yang ditimbulkan terhadap posisi kecukupan penyediaan modal minimum (*Capital Adequacy Ratio*).
Risiko Pasar, yaitu risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko atas perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.	Seluruh penerapan strategi pengendalian risiko dipastikan telah merefleksikan tingkat risiko yang dapat diterima (*Risk Tolerance/Risk Appetite*). Pengelolaan risiko pasar dilakukan melalui strategi berikut: 1. Analisis eksposur *Benchmark Rate in Banking Book* (BRBB) berdasarkan *Gap Report* dari perspektif pendapatan dan perspektif nilai ekonomis. 2. Pemantauan potensi kerugian yang timbul dari eksposur surat berharga kategori *Available for Sale* (AFS) Bank dan dampaknya terhadap modal.
Risiko Likuiditas, yaitu risiko yang disebabkan ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu kegiatan dan kondisi keuangan Bank.	Pengelolaan risiko likuiditas dilakukan dengan strategi sebagai berikut: 1. Analisis arus kas. 2. Pemantauan *maturity gap* antara posisi aktiva dan pasiva. 3. Analisis deposan inti. *4. Stress testing*. 5. Strategi tersebut bertujuan untuk menjamin ketersediaan aset likuid berkualitas tinggi serta menjamin bahwa dana yang ada cukup untuk memenuhi kewajiban secara tepat waktu
Risiko Operasional, yaitu risiko yang timbul karena tidak cukupnya dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.	Pengelolaan risiko operasional dilakukan dengan strategi sebagai berikut: 1. Penerapan metode *Risk and Control Self Assessment* (RCSA) yang aktif melibatkan Kantor Pusat dan Kantor Cabang dalam proses identifikasi dan pengukuran risiko operasional di unit kerja serta penentuan strategi untuk menetapkan langkah mitigasi risiko yang tepat. 2. Pelaporan kerugian dan potensi kerugian di masing-masing unit kerja dengan tujuan membangun *Loss Even Database* (LED). 3. Pelatihan manajemen risiko operasional, program penyegaran (*refreshment*) dan *Risk and Compliance Awareness* kepada karyawan.
Risiko Hukum, yaitu risiko yang timbul karena adanya tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.	Pengelolaan risiko hukum dilakukan dengan strategi sebagai berikut: 1. Satuan Kerja Hukum dan SDM menaungi Departemen Hukum yang bertugas mengembangkan serta memantau standarisasi dokumen-dokumen terkait hukum dari kegiatan Bank. 2. Memastikan seluruh aktivitas usaha dan hubungan dengan pihak ketiga berlandaskan aturan dan persyaratan hukum yang berlaku.
Risiko Stratejik, adalah risiko yang timbul jika Bank tidak cermat dalam mengambil keputusan dan/atau gagal mengantisipasi perubahan bisnis.	Pengelolaan risiko stratejik dilakukan dengan strategi sebagai berikut: 1. Mengevaluasi keputusan strategis yang tidak efektif. 2. Memantau pencapaian anggaran serta membandingkan pencapaian tersebut dengan target jangka pendek, menengah maupun panjang yang telah ditentukan dalam Rencana Bisnis Bank melalui pengawasan *Key Performance Indicator* (KPI) Unit Bisnis dan unit lain yang terkait. 3. Mengkaji ulang target yang telah ditentukan dan menyesuaikan kembali dengan pertimbangan perubahan faktor eksternal.

Jenis Risiko	Mitigasi/Pengelolaan
Risiko Kepatuhan, yaitu risiko yang timbul karena adanya ketidakpatuhan Bank terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku dan prinsip syariah.	Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan dengan berlandaskan Peraturan OJK nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Memastikan seluruh jenjang organisasi melakukan aktivitas usahanya berpedoman pada peraturan perundangan dan ketentuan lain oleh Bank dan lembaga keuangan pemerintahan yang berlaku. 2. Mengembangkan program-program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) untuk mencegah kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme melalui BCAS. Tujuan program ini untuk mendukung penerapan perbankan yang hati-hati serta melindungi Bank dari risiko lain yang mungkin timbul dari aktivitas demikian, seperti risiko hukum, risiko reputasi dan risiko operasional.
Risiko Reputasi, yaitu risiko yang ditandai dengan menurunnya kepercayaan pemangku kepentingan akibat adanya citra negatif Bank.	Pengelolaan risiko reputasi dilakukan dengan strategi sebagai berikut: 1. Memantau pemberitaan BCAS di media-media massa. 2. Kerja sama dengan BCA dalam menangani keluhan atas produk dan layanan Bank melalui Call Center Halo BCA. Sarana ini dapat membantu BCAS menangani keluhan nasabah secara profesional dan efektif.
Risiko Imbal Hasil ***(Rate of Return Risk)***, yaitu risiko yang timbul karena adanya perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang berpengaruh pada tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah sehingga berpengaruh pada perilaku nasabah DPK.	Pengelolaan risiko imbal hasil dilakukan dengan strategi sebagai berikut: 1. Pengawasan indikator *core* deposit. 2. Pemantauan komposisi pembiayaan berbasis utang piutang. 3. Penilaian rasio pembiayaan bermasalah dan perilaku nasabah DPK. 4. Pengukuran Risiko Imbal Hasil dari pendekatan sederhana hingga kompleks sesuai kompleksitas eksposur Risiko Imbal Hasil Bank, antara lain dengan penggunaan metode *Profit Equalization Reserve* (PER) untuk memitigasi *displaced commercial risk*.
Risiko Investasi ***(Equity Investment Risk)***, yaitu risiko yang timbul karena usaha nasabah yang dibiayai menggunakan metode *nett revenue sharing* dan *profit and loss sharing* merugi sehingga Bank juga harus menanggung kerugian.	Pengelolaan risiko investasi dilakukan dengan strategi sebagai berikut: 1. Memantau indikator komposisi dan tingkat konsentrasi pembiayaan berbasis bagi hasil. 2. Memantau kualitas pembiayaan berbasis bagi hasil. 3. Mengantisipasi faktor eksternal.

Tinjauan Pelaksanaan Sistem Manajemen Risiko dan Penilaian Profil Risiko 2023

Berdasarkan hasil *self-assessment* BCAS, peringkat komposit untuk profil risiko BCAS per 31 Desember 2023 berada pada peringkat komposit 2 dan tergolong stabil sepanjang penilaian profil risiko pada tahun 2023 dibandingkan dengan profil risiko triwulan III - 2023.

Berikut hasil penilaian profil risiko di tahun 2023:

Profil Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat KPMR	Peringkat Tingkat Risiko (Net Risk)
Risiko Kredit	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	2
Risiko Pasar	*Low*	*Satisfactory*	1
Risiko Likuiditas	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	2
Risiko Operasional	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	2
Risiko Hukum	*Low*	*Strong*	1
Risiko Reputasi	*Low*	*Strong*	1
Risiko Stratejik	*Low*	*Strong*	1
Risiko Kepatuhan	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	2
Risiko Imbal Hasil	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	2
Risiko Investasi	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	2
Peringkat Faktor	***Low to Moderate***	***Satisfactory***	**2**

BCAS telah melakukan penilaian tingkat kesehatan BCAS dengan menggunakan pendekatan risiko yang mencakup 4 faktor, yaitu: Profil Risiko, GCG, Rentabilitas, dan Permodalan yang mencerminkan bahwa kondisi kesehatan BCAS secara umum dinilai baik.

Faktor – Faktor Penilaian	Peringkat Individu
Profil Risiko	2
Good Corporate Governance	1
Rentabilitas	2
Permodalan	1
Peringkat TKB Berdasarkan Risiko	**2**

Pernyataan Atas Kecukupan dan Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko berperan aktif dalam melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap penerapan sistem manajemen risiko yang telah dilakukan oleh Direksi. Direksi senantiasa melakukan evaluasi atas efektivitas sistem manajemen risiko di BCAS melalui peninjauan secara berkala atas kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berlaku, kecukupan sistem informasi manajemen risiko, serta laporan eksposur risiko dan penilaian profil risiko BCAS. Berdasarkan hasil evaluasi yang disampaikan oleh manajemen, Dewan Komisaris menilai bahwa sistem manajemen risiko di BCAS telah memadai dan berjalan efektif.

Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen Bank dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional Bank yang sehat dan aman. SPI yang efektif dapat membantu Direksi dan Dewan Komisaris menjaga aset Bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan, peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Penerapan sistem pengendalian internal BCA Syariah berpedoman kepada SE OJK No.35/SEOJK.03/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.

Tujuan penerapan sistem pengendalian internal yang efektif yaitu untuk memastikan:
1. Kepatuhan terhadap ketentuan, peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah atau tujuan kepatuhan.
2. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu atau tujuan informasi.
3. Efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha Bank atau tujuan operasional.
4. Meningkatkan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi Bank secara menyeluruh atau tujuan budaya risiko.

Kerangka Sistem Pengendalian Internal

BCAS menerapkan kerangka *three lines model* untuk mendukung terciptanya manajemen risiko dan tata kelola yang handal. Penerapan prinsip *three lines model* pada BCA Syariah adalah sebagai berikut:

1. Organ Pengurus
   Tanggung jawab Dewan Komisaris dan komite di bawah koordinasinya, antara lain memastikan:
   - Struktur dan proses yang ada memadai dan telah tersedia untuk pelaksanaan tata kelola yang efektif.
   - Tujuan dan aktivitas organisasi telah selaras dengan kepentingan utama para pemangku kepentingan.
2. Lini Pertama dan Kedua
   - Lini pertama bertanggung jawab dalam penyediaan produk dan jasa kepada *customer* termasuk pengelolaan risiko terkait.
   - Lini kedua berperan memberikan dukungan terkait pengelolaan risiko termasuk tanggung jawab atas *enterprise risk management*. Peran lini kedua dilakukan oleh Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan, Departemen Manajemen Risiko (MRK), dan Departemen Kepatuhan (KEP).
3. Lini Ketiga
   Peran lini ketiga adalah memberikan asurans dan advis yang berbasis risiko, independen, dan objektif mengenai kecukupan dan efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal. Peran lini ketiga dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SAI) yang akan mengomunikasikan hasil audit kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit.

Dalam menjalankan perannya, semua lini melakukan komunikasi dan kolaborasi secara rutin serta berkontribusi dalam menciptakan dan menjaga *value* yang selaras dengan kepentingan *stakeholder*s.

Komponen Utama Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal BCAS terdiri dari 5 komponen utama sejalan dengan Internal *Control* Integrated Framework yang dikembangkan oleh *The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission* (COSO), meliputi:

1. Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian (*Management Oversight and Control Culture*).
2. Identifikasi dan Penilaian Risiko (*Risk Recognition and Assessment*).
3. Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi (*Control Activities and Segregation of Duties*).
4. Sistem Akuntansi, Informasi, dan Komunikasi (*Accountancy, Information and Communication*).
5. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan atau Kelemahan (*Monitoring Activities and Correcting Deficiencies*).

Pelaksanaan pengendalian internal antara lain meliputi:

1. Pengendalian Keuangan
   Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan rencana strategis yang mendukung perkembangan BCAS, BCAS telah menerapkan hal-hal berikut:
   - Direksi telah menyusun dan mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris atas rencana stratejik dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang dituangkan ke dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) sebagai *blueprint* strategi bisnis 3 tahunan dan telah didistribusikan kepada pejabat BCAS yang terkait dalam rangka implementasi.
   - Penetapan strategi telah memperhitungkan dampak risiko stratejik terhadap permodalan BCAS, antara lain proyeksi permodalan dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).
   - Direksi secara aktif melakukan diskusi/memberikan masukan serta memantau kondisi internal dan perkembangan faktor eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi strategi bisnis BCAS.
   - BCAS telah melaksanakan proses pengendalian keuangan, guna memantau pencapaian kinerja secara berkala BCAS melalui Fungsi Perencanaan Perusahaan di bawah Satuan Kerja Keuangan dan Perencanaan Perusahaan (SKKPP) untuk meningkatkan pertumbuhan dan kinerja BCAS.
   - BCAS telah memastikan seluruh kebijakan dan standar akuntansi diperbaharui secara berkala sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

2. Pengendalian Operasional
   Untuk dapat mendukung pengendalian risiko operasional secara menyeluruh, BCAS telah menerapkan hal-hal berikut:
   - Membentuk struktur organisasi BCAS antara lain:
     - Pemisahan fungsi sehingga tidak menimbulkan *conflict of interest*.
     - *Supervisor* berfungsi mengawasi jalannya kontrol internal di Kantor Cabang dan Kantor Pusat setiap hari.
     - SAI yang independen terhadap *risk taking* unit untuk mengevaluasi serta menilai kecukupan dan efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal BCAS.
     - MRK dan KEP yang independen terhadap *risk taking unit*.
     - Departemen Kantor Pusat dan *Anti Fraud* untuk meningkatkan efektivitas penerapan strategi anti *fraud* atas seluruh kegiatan perusahaan.
   - Transaksi operasional perbankan yang dilakukan di BCAS telah mempunyai prosedur kerja yang dituangkan dalam manual kerja, walaupun demikian masih terdapat prosedur yang masih harus dibuat untuk memastikan bahwa risiko operasional yang mungkin ada pada aktivitas tersebut telah dimitigasi dengan baik.
   - Memiliki kebijakan rotasi karyawan.
   - Penetapan limit dan wewenang petugas dalam melakukan suatu transaksi.
   - Memiliki kebijakan pengamanan informasi, antara lain: ketentuan penggunaan *User ID* dan *password*, pedoman pengamanan informasi, dan lain-lain.

3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
   Untuk memastikan kepatuhan BCAS terhadap peraturan, perundang-undangan yang berlaku dan prinsip syariah, BCAS telah menerapkan hal-hal berikut:
   - BCAS memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kelemahan risiko ini, apabila terjadi.
   - BCAS telah:
     - Melakukan pemantauan kepatuhan pelaporan kepada BI/OJK/regulator lainnya.
     - Melakukan Laporan Kepatuhan BCAS termasuk Laporan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme kepada OJK setiap 6 bulan.
     - Menyampaikan Laporan Pemantauan Kepatuhan terhadap Ketentuan Kehati-hatian BCAS termasuk Laporan Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal kepada Dewan Komisaris, dan Presiden Direktur setiap 3 bulan.
   - Strategi Manajemen Risiko Kepatuhan adalah mempunyai kebijakan untuk senantiasa mematuhi ketentuan yang berlaku, yaitu secara proaktif melakukan pencegahan (*ex-ante*) dalam rangka meminimalkan terjadinya pelanggaran dan melakukan tindakan kuratif (*ex-post*) dalam rangka perbaikan.

Evaluasi Sistem Pengendalian Internal

Direksi bertanggung jawab untuk memastikan penerapan sistem pengendalian internal yang baik untuk mencapai tujuan BCAS. Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit juga bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas penyelenggaraan sistem pengendalian internal di BCAS.

Untuk mengevaluasi kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal BCAS tersebut, sepanjang tahun 2023 telah dilakukan kegiatan pemantauan dan koreksi penyimpangan antara lain:

1. BCAS melakukan evaluasi dan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian internal, termasuk jika terjadi perubahan kondisi internal dan eksternal yang dapat memengaruhi BCAS dalam mencapai sasarannya.
2. Pemantauan diprioritaskan terhadap risiko utama BCAS dan berfungsi sebagai bagian dari kegiatan sehari-hari, termasuk evaluasi secara berkala untuk mendeteksi dan mencegah munculnya risiko baru, baik oleh unit kerja operasional, unit kerja pemantau risiko, maupun oleh SAI.

3. SAI melakukan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal secara independen melalui pelaksanaan kegiatan audit yang berbasis risiko. Hasil evaluasi dan tindak lanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direksi.

Pernyataan atas Kecukupan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan Dewan Komisaris dengan Komite Audit atas laporan evaluasi yang disampaikan oleh Manajemen, Dewan Komisaris menilai bahwa Sistem Pengendalian Internal BCAS telah memadai dan berjalan secara efektif.

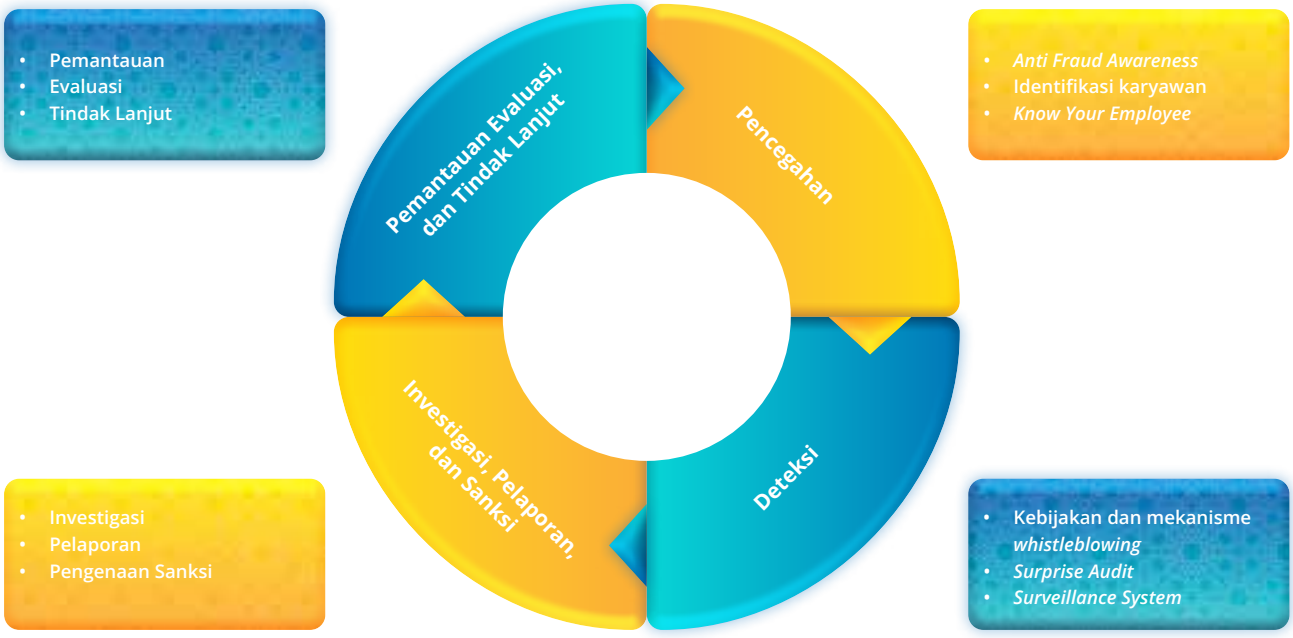
Penerapan Strategi *Anti-fraud*

Dalam rangka mencegah terjadinya kasus penyimpangan khususnya *fraud* pada operasional Bank dan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang dapat menimbulkan kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung bagi Bank, nasabah dan/atau pihak lain, maka diperlukan peningkatan efektivitas pengendalian intern. BCAS telah menyusun pedoman strategi *anti-fraud* yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi No. 011/ SK/DIR/2020 perihal Pedoman Penerapan Strategi *Anti fraud* BCAS. Pedoman tersebut merupakan wujud komitmen manajemen BCAS dalam mencegah terjadinya *fraud* dengan menerapkan strategi anti *fraud* yang dijalankan secara efektif dan berkesinambungan.

Tujuan

Pedoman Penerapan Strategi *Anti Fraud* disusun agar segenap jajaran dalam lingkungan organisasi BCAS dapat:
- Memahami dan melaksanakan Pedoman Penerapan Strategi *Anti Fraud* dan menjadi bagian dari tanggung jawabnya dalam mengelola Bank.
- Memahami fungsi, peranan dan tanggung jawab masing-masing, guna terciptanya anti *fraud awareness* yang akan berujung pada budaya *anti fraud* (anti *fraud culture*).

Pelaksanaan Strategi *Anti Fraud*



Strategi *Anti-fraud* yang disusun secara komprehensif-integralistik dan diimplementasikan dalam bentuk sistem pengendalian *fraud* diterapkan dengan menggunakan perangkat yang merupakan penjabaran dari 4 pilar yang saling berkaitan.

Pilar	Pelaksanaan Strategi
I	Pencegahan, memuat langkah yang ditujukan untuk mengurangi potensi risiko terjadinya *fraud*, yang paling sedikit mencakup: • *Anti fraud awareness*; • Identifikasi kerawanan; • Kebijakan mengenal pekerja (*know your employee*).

Pilar	Pelaksanaan Strategi
II	Deteksi, memuat langkah yang dapat mengidentifikasi dan menemukan *fraud* dalam kegiatan usaha Bank, yang paling sedikit mencakup: • Kebijakan dan mekanisme penanganan *whistleblowing*; • Pemeriksaan dadakan (*surprise audit*); • Sistem pengawasan (*surveillance system*).
III	Investigasi, Pelaporan dan Sanksi, memuat langkah yang paling sedikit mencakup: • Penyelidikan atau investigasi • Sistem pelaporan • Pengenaan sanksi
IV	Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut, memuat langkah yang paling sedikit mencakup: • Pemantauan • Evaluasi • Tindak Lanjut

Deklarasi *Anti-fraud*

Dalam rangka memperkuat sistem pengendalian internal, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut POJK No.39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi *Anti-fraud* bagi Bank Umum, BCAS menyatakan berkomitmen untuk:
- Menjalankan bisnis secara adil, jujur, dan terbuka atau transparan.
- Menghindari berbisnis dengan pihak ketiga yang tidak berkomitmen sesuai dengan kebijakan perusahaan.
- Memberikan konsekuensi pelanggaran terhadap kebijakan dan komitmen.

Sosialisasi/*Refreshment* terkait *Anti-fraud*

BCAS terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan karyawan BCAS terhadap tindakan fraud. Upaya tersebut dilakukan melalui program *anti fraud awareness* antara lain berupa sosialisasi/*refreshment anti fraud* baik dalam bentuk in *class training*, *online training*, poster *whistleblowing system*, dan pelatihan sistem pengendalian internal cabang untuk untuk pejabat baru level supervisor.

Seluruh karyawan BCAS juga diwajibkan untuk mengikuti *e-Learning Anti Fraud Awareness* yang dapat diakses melalui jaringan intranet BCAS maupun *website* Smile-IB. Komitmen BCAS dalam penerapan budaya *anti fraud* dituangkan dalam Deklarasi *Anti Fraud* yang dapat diakses oleh seluruh *stakeholder* melalui *website* BCAS.

Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) dan Upaya Penyelesaiannya

Pengungkapan *internal fraud* disampaikan melalui Laporan Hasil Investigasi, dimana laporan tersebut terdiri atas bentuk penyimpangan (*internal fraud*), yaitu *fraud* yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan/atau tenaga kerja alih daya (*outsourcing*).

Internal *Fraud* dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Dewan Komisaris/ Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya
Total *Fraud*	-	-	1	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-
Dalam progress penyelesaian di internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	1	-	-	-

Sebagai wujud pemantauan atas penerapan Strategi *Anti Fraud*, BCAS menyampaikan Laporan Penerapan Strategi *Anti Fraud* kepada OJK setiap semester dan secara insidentil dalam hal terdapat kejadian *fraud* berdampak signifikan yang dapat mengganggu kegiatan operasional BCAS.

Whistleblowing System

Sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan melakukan deteksi dini risiko terjadinya pelanggaran, termasuk *fraud*, diperlukan adanya sarana dan mekanisme untuk memudahkan karyawan BCAS dan *stake holder* dalam menyampaikan informasi/indikasi terjadinya pelanggaran. *Whistleblowing System* (WBS) adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindakan pelanggaran yang telah terjadi atau akan terjadi di lingkungan Bank. Pengaduan harus didasarkan pada itikad baik dan bukan merupakan suatu sentimen pribadi ataupun didasari kehendak buruk/fitnah.

Kebijakan *Whistleblowing System* BCAS mengacu pada POJK No.39/POJK.03/2019 dan dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No.019/SK/DIR/2023 tanggal 28 April 2023 serta telah diungkapkan pada situs web BCA Syariah bagian *Good Corporate Governance* (GCG) (https://www.bcasyariah.co.id).

Tujuan *Whistleblowing System*

Whistleblowing System bertujuan untuk membantu mendeteksi adanya pelanggaran, termasuk pelanggaran terhadap hukum yang merugikan perusahaan, fraud maupun pelanggaran lainnya, antara lain namun tidak terbatas pada kode etik, kebijakan/ketentuan internal dan/atau benturan kepentingan. Apabila diimplementasikan dengan baik, WBS juga dapat berfungsi sebagai salah satu alat kontrol dan monitoring untuk membantu meningkatkan perilaku etika dalam organisasi, serta mendorong perubahan budaya organisasi ke arah yang lebih baik. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada Bank.

Prinsip Dasar

Prinsip dasar *Whistleblowing System* adalah sebagai berikut:

1. Kerahasiaan
   Karyawan yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan penanganan pengaduan wajib menjaga kerahasiaan identitas pelapor, informasi pengaduan, dan laporan yang berkaitan dengan penanganan pengaduan.
2. Kemudahan
   Mekanisme pengelolaan WBS harus dirancang untuk memberikan kemudahan bagi karyawan dan *stakeholder* dalam menyampaikan pengaduan, serta memudahkan pengelola WBS dalam menangani pengaduan dan memberikan layanan yang baik kepada *whistleblower*.
3. Fokus Pada Substansi
   Penanganan difokuskan pada kebenaran substansi pelanggaran dan tidak diarahkan pada kepentingan untuk mencari identitas *whistleblower*.
4. Perlindungan
   Whistleblower berhak atas perlindungan dan rasa aman, baik keamanan pribadi dan keluarganya, serta bebas dari ancaman dan pembalasan yang berkenaan dengan pelaporan yang akan, sedang atau telah diberikan.
5. Independen
   Dalam penanganan pengaduan, karyawan yang terlibat dalam penanganan pengaduan bertindak profesional dan bebas dari pengaruh pihak manapun.

Penanggung jawab *Whistleblowing System*

Penanggung jawab pengelolaan *whistleblowing system* tidak disampaikan secara terbuka (rahasia), penetapannya disetujui oleh Direksi.

Cara Penyampaian Laporan

Jika pelapor ingin melakukan pelaporan *Whistleblowing*, dapat dengan menghubungi tim penanggung jawab *Whistleblowing System* melalui:

Sumber	Keterangan
E-mail	bcas.bersih@bcasyariah.co.id
Lainnya	PIC unit kerja yang mengelola sarana pengaduan (misal pengaduan yang diterima dari Cabang/ Halo BCA) akan meneruskan pengaduan dari *whistleblower* terkait dengan pelanggaran ke pengelola *whistleblowing system.*

Untuk mempermudah dan mempercepat proses tindak lanjut, berikut adalah hal-hal yang harus dipenuhi oleh pelapor dalam menyampaikan pengaduannya:

1. *Whistleblower* harus memberikan informasi identitas diri untuk memudahkan komunikasi, sekurang-kurangnya:
   - Nama *whistleblower* (diperbolehkan menggunakan anonim).
   - Nomor telepon/alamat email yang dapat dihubungi.
2. Pengaduan/laporan yang disampaikan minimal memberikan gambaran/penjelasan mengenai hal-hal sebagai berikut:
   - Indikasi/fakta pelanggaran yang terjadi (*what*).
   - Pihak yang diindikasikan sebagai pelaku dan/ atau pihak yang terlibat (*who*).
   - Kapan dan di mana terjadinya (*when*).
   - Modus/cara yang digunakan (*how*).
   - Keterangan/informasi lain yang dianggap perlu, seperti:
     - Dampak kerugian yang akan/telah diderita oleh BCAS.
     - Adanya perubahan sikap/perilaku/gaya hidup maupun tingkat konsumsi yang diduga atau patut diduga menunjukkan ketidakwajaran sesuai dengan kemampuan pegawai tersebut.

Alur Penanganan Pengaduan

Berikut ini merupakan alur tindak lanjut penanganan pengaduan yang diterima melalui *Whistleblowing System*:



Keterangan: *) Termasuk penerusan pengaduan dari PIC Unit Kerja yang mengelola sarana pengaduan lainnya..

Tahap	Pelaku	Tindakan
1	*Whistleblower*/ PIC Unit Kerja Pengelola Sarana Pengaduan	Mengirimkan pengaduan melalui sarana yang disediakan.
2	Pengelola *Whistleblowing System*	• Menerima pengaduan dari *whistleblower*/PIC Unit Kerja pengelola sarana pengaduan. • Melakukan verifikasi data dan analisis awal. Jika data belum lengkap, meminta *whistleblower* untuk melengkapi data. Apabila dalam 3 (tiga) hari kerja *whistleblower* tidak memberikan data yang diminta dan hasil analisis awal tidak ada indikasi pelanggaran, maka pengaduan dapat dianggap tidak valid. • Tetapi jika berdasarkan hasil analisis awal terdapat indikasi terjadi pelanggaran, meskipun data belum lengkap, maka pengelola *whistleblowing system* akan tetap menindaklanjuti pengaduan. • Meminta bantuan investigasi kepada unit kerja yang terkait.
3	Unit Kerja yang Melakukan Tindak Lanjut	• Menerima permohonan bantuan dari pengelola *whistleblowing system* dan melakukan investigasi atas pengaduan. • Meminta pengelola *whistleblowing system* menghubungi *whistleblower* untuk melengkapi data, apabila pengaduan yang diterima memerlukan data tambahan. • Melaporkan hasil investigasi kepada pengelola *whistleblowing system*.
4	Pengelola *Whistleblowing System*	• Menerima hasil investigasi, menentukan pengaduan perlu diteruskan ke KPKK atau tidak sesuai ketentuan yang berlaku. • Membuat laporan akhir disertai dengan rekomendasi dari investigator (dan KPKK). • Mengirimkan laporan akhir kepada Direksi untuk menentukan status akhir pengaduan.
5	Direksi	• Menerima laporan akhir dan rekomendasi dari pengelola *whistleblowing system*. • Memutuskan status akhir pengaduan dan mengirimkan kembali kepada pengelola *whistleblowing system*.
6	Pengelola *Whistleblowing System*	• Menerima keputusan status akhir pengaduan. • Meneruskan keputusan kepada unit kerja terkait (jika ada). • Menginformasikan status hasil pengaduan kepada *whistleblower*. • Melaporkan rekapitulasi perkembangan pengaduan yang masuk melalui *whistleblowing system* kepada Direksi secara periodik.
7	*Whistleblower*	Menerima informasi status hasil pengaduan.

Perlindungan bagi Pelapor

Atas laporan yang terbukti kebenarannya, BCAS akan memberikan perlindungan terhadap pelapor. Perlindungan bagi pelapor meliputi:
1. Jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan yang disampaikan.
2. Jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang merugikan pelapor.
3. Jaminan perlindungan kemungkinan adanya tindakan ancaman, intimidasi, hukuman ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak terlapor.

Pemberian Sanksi

Apabila berdasarkan hasil investigasi terbukti terlapor melakukan pelanggaran, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama dan/atau ketentuan yang berlaku di BCAS.

Jumlah Pengaduan melalui *Whistleblowing System* pada Tahun 2023

Sampai dengan 31 Desember 2023 terdapat 4 pengaduan yang masuk ke *whistleblowing system* sebagai berikut:

Status	Jumlah	Keterangan
Closed	4	• 2 pengaduan ditutup karena *whistleblower* tidak memberikan data/respon. • 2 pengaduan tidak terdapat indikasi *fraud* dan sudah ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait.

Sosialisasi/*Refreshment*

Dalam rangka meningkatkan *awareness* mengenai *whistleblowing system*, pengelola *whistleblowing system* akan mengadakan sosialisasi/*refreshment* terkait *whistleblowing system* secara konsisten dan berkala. *Whistleblowing system* juga menjadi salah satu materi dalam *e-Learning Anti Fraud* yang wajib diikuti oleh seluruh karyawan BCAS. Pada tahun 2023, BCAS telah melaksanakan sosialisasi sebanyak 8 kali dan *refreshment* sebanyak 9 kali.

Kebijakan Antikorupsi dan Pengendalian Gratifikasi

Kebijakan dan Penerapan

BCAS berupaya menjaga kepercayaan seluruh pemangku kepentingan sehingga menghindari segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam menjalankan usahanya, BCAS tidak mentolerir adanya tindak *fraud*, korupsi, kolusi, nepotisme, maupun gratifikasi. Kebijakan ini mengacu kepada penerapan Anti Gratifikasi di BCA sebagai perusahaan induk BCAS.

BCAS harus dapat mengambil langkah tegas untuk tidak memberikan/menerima gratifikasi kepada/dari nasabah, calon nasabah maupun mitra. Untuk memastikan pelaksanaannya maka BCAS menetapkan kebijakan terkait pengendalian gratifikasi yang di antaranya mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh karyawan dilarang meminta atau menerima, mengijinkan atau menyetujui untuk menerima suatu hadiah atau imbalan dari pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha mendapatkan fasilitas dari BCAS dalam bentuk fasilitas pembiayaan atau fasilitas lainnya yang berkaitan dengan kegiatan operasional BCAS dan dari pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha mendapatkan pekerjaan atau pesanan yang berkaitan dengan pengadaan barang maupun jasa dari BCAS;
2. Dalam hal terdapat pihak yang memberikan bingkisan, apabila akibat penerimaan bingkisan tersebut diyakini menimbulkan dampak negatif dan mempengaruhi keputusan BCAS, dan nilai bingkisan tersebut di luar batas yang wajar, maka karyawan yang menerima bingkisan tersebut harus segera mengembalikan bingkisan tersebut disertai penjelasan secara sopan bahwa seluruh karyawan tidak diperkenankan menerima bingkisan;
3. Dalam hal pemberian bingkisan karena satu dan lain hal sulit dikembalikan, karyawan yang menerima bingkisan tersebut harus segera membuat laporan tertulis kepada atasannya untuk mengambil tindak lanjut yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Komitmen Bersama

Berkenaan komitmen BCAS dalam melaksanakan *Good Corporate Governance*, maka diwajibkan:

1. Seluruh jajaran BCAS harus mengetahui, memahami dan melaksanakan Ketentuan mengenai Benturan Kepentingan dengan penuh tanggung jawab dan tanpa pengecualian.
2. Mendukung pelaksanaan ketentuan tersebut, dan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat Golongan 5 sampai dengan Golongan 7 diwajibkan untuk membuat pernyataan tahunan (*annual disclosure*) yang memuat semua keadaan atau situasi yang memungkinkan timbulnya benturan kepentingan. Pembuatan pernyataan tahunan (*annual disclosure*) ini bersifat *selfassessment*, sehingga kebenaran dari setiap pernyataan merupakan tanggung jawab masing- masing karyawan. Namun demikian, BCAS berhak mengadakan pengujian terhadap kebenaran pernyataan.

Pernyataan tahunan (*annual disclosure*) dibuat setiap akhir tahun dan disampaikan kepada atasan langsung. Pernyataan ini bersifat rahasia, dan pejabat penerima harus menjaga kerahasiaannya. Setiap benturan kepentingan atau pelanggaran dievaluasi oleh atasan langsung atau eskalasi ke level lebih tinggi jika diperlukan, dilaporkan kepada Satuan Kerja Hukum dan SDM. Pemimpin unit kerja bertanggung jawab mengkoordinasikan pembuatan pernyataan tahunan dan memantau pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap kebijakan ini.

Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan

Transaksi Afiliasi

Informasi mengenai transaksi afiliasi dapat ditemukan pada bagian Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Afiliasi, di bab Analisis dan Pembahasan Manajemen Laporan Tahunan BCAS 2023.

Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan adalah suatu kondisi dimana anggota jajaran Bank dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dilarang mempunyai kepentingan di luar kepentingan dinas, baik yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga maupun kepentingan pihak-pihak lain sehingga anggota jajaran Bank tersebut dimungknkan kehilangan obyektifitasnya dalam mengambil keputusan dan kebijakan sesuai kewenangan yang telah diberikan Bank kepadanya.

Bentuk Benturan Kepentingan

a. Hadiah atau imbalan.
b. Bingkisan.
c. Barang promosi.

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

BCAS berupaya untuk mencegah benturan kepentingan, sehingga memberlakukan ketentuan internal yang mengatur tentang benturan kepentingan dalam Surat Keputusan Direksi No. 057/SK/DIR/2023 tanggal 29 Desember 2023 perihal Kebijakan Tata Kelola PT Bank BCA Syariah. Benturan kepentingan adalah suatu kondisi di mana anggota jajaran BCAS dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dilarang mempunyai kepentingan di luar kepentingan dinas, baik yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga maupun kepentingan pihak-pihak lain sehingga anggota jajaran BCAS tersebut dimungkinkan kehilangan objektivitasnya dalam mengambil keputusan dan kebijakan sesuai kewenangan yang telah diberikan BCAS kepadanya.

BCAS memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai:
a. Benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BCAS.
b. Benturan kepentingan telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah didokumentasikan dengan baik.

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, maka anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan BCAS. Pada setiap pengungkapan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, BCAS akan mengungkapkannya sesuai peraturan yang berlaku. Di 2023, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Permasalahan Hukum

BCAS memiliki Risiko Hukum akibat adanya tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis permasalahan hukum, meliputi perkara pidana dan perkara perdata yang dihadapi oleh BCAS selama tahun 2023, 2022 dan 2021, dijabarkan sebagai berikut:

Perkara Hukum Pidana

Perkara Hukum Pidana	2023	2022	2021
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap	0	0	0
Dalam proses	0	0	0
Jumlah	**0**	**0**	**0**

Selama tahun 2023, perkara pidana di Pengadilan atas laporan BCAS terhadap nasabah, karyawan, atau pihak ketiga lainnya, meliputi perkara tentang dugaan tindak pidana pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan surat, pemalsuan uang, pencucian uang, dan perusakan, di mana tidak ada perkara dengan nilai kerugian materiil di atas Rp1 miliar. Sementara itu, perkara pidana di Pengadilan atas laporan nasabah, karyawan, atau pihak ketiga lainnya terhadap BCAS tidak ada/nihil.

Perkara Hukum Perdata

Perkara Hukum Perdata	2023	2022	2021
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap	0	8	3
Dalam proses	17	11	16
Jumlah	**17**	**19**	**19**

Perkara Perdata yang dihadapi oleh BCAS antara lain terjadi karena:
- Gugatan/perlawanan nasabah terkait pembiayaan
- Gugatan nasabah/pihak ketiga lainnya terkait jaminan
- Gugatan pihak ketiga terkait sengketa jaminan
- Gugatan/perlawanan BCAS terkait penyelesaian kredit macet dan penyelamatan agunan.

Selama tahun 2023, tidak ada Perkara Perdata BCAS dengan nominal tuntutan di atas Rp50 milliar, nilai perkara tidak material atau tidak berpengaruh terhadap kelangsungan usaha BCAS. BCAS di tahun 2023 tidak menghadapi risiko yang signifikan terhadap permasalahan hukum yang ada karena berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*), tingkat risiko hukum BCAS berada di posisi "*low*".

Perkara Penting dan Sanksi Administratif

Perkara Penting

Sepanjang tahun 2023, seluruh anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat tidak pernah terlibat atau tersangkut dalam perkara penting apapun, baik perkara pidana dan/atau perkara perdata. Demikian pula, seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat tidak pernah terlibat dalam perkara penting apapun, baik pidana maupun perdata.

Sanksi Administratif dari Otoritas Terkait

Sepanjang tahun 2023, BCAS, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak pernah mendapatkan sanksi administratif baik yang bersifat materiil maupun non-materiil dari OJK atau regulator lainnya, yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BCAS.

Kode Etik

BCAS senantiasa menegakkan nilai-nilai positif di dalam diri seluruh insan BCAS. Berkaitan dengan hal tersebut, BCAS telah memiliki dan menerapkan Kode Etik BCAS yang mengatur standar etika, nilai-nilai, serta prinsip yang harus diterapkan oleh insan BCAS sebagai penjabaran dari budaya BCAS dalam menerapkan *Good Corporate Governance* dan mencapai Visi, Misi, dan Tata Nilai BCAS yang telah ditetapkan.

Kode Etik BCAS disusun sebagai acuan bagi insan BCAS dalam bertindak dan mengambil keputusan agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sehari-hari secara profesional. Kode Etik BCAS menjadi pedoman tentang apa yang diharapkan dari insan BCAS di dalam hubungannya dengan nasabah, pemegang saham, pemasok/rekanan, pemerintah serta masyarakat di tempat kita berada.

Pokok-Pokok Kode Etik Bank

a. Menjaga nama baik dan harta kekayaan Bank
b. Menjaga kerahasiaan data nasabah dan Bank
c. Menjaga agar kepentingan pribadi tidak bertentangan dengan kepentingan Bank atau nasabah
d. Mencatat secara benar semua transaksi agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku
e. Menjaga dan membina keharmonisan lingkungan kerja dan persaingan yang sehat di antara sesama karyawan
f. Tidak menyalahgunakan wewenang dan jabatan untuk kepentingan pribadi maupun keluarganya
g. Tidak melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan tujuan Bank dan dapat merugikan citra profesi sebagai bankir maupun citra BCAS secara keseluruhan
h. Mematuhi dan taat terhadap perundang-undangan serta peraturan yang berlaku
i. Menjauhkan diri terhadap segala bentuk perjudian dan tindakan spekulatif
j. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan dengan cara mengikuti perkembangan industri perbankan syariah khususnya dan dunia usaha pada umumnya.

Butir-butir Kode Etik selengkapnya dapat diakses dalam situs web BCAS di: https://www.bcasyariah.co.id/kode-etik.

Pemberlakuan Kode Etik

Kode Etik BCAS memberikan kerangka nilai-nilai dan standar etika yang wajib dipenuhi dan merupakan tanggung jawab pribadi setiap insan BCAS. Kode Etik BCAS berlaku bagi seluruh jenjang organisasi, meliputi Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan seluruh karyawan.

Ketentuan Kode Etik

BCAS telah mengeluarkan ketentuan yang berkaitan yang kode etik, yaitu:
1. Surat Keputusan Direksi No. 062/SK/DIR/2010 perihal Kode Etik Bankir BCA Syariah.
2. Surat Keputusan Direksi No. 013/SK/DIR/2020 perihal Pedoman Sertifikasi Tresuri dan Penerapan Kode Etik Pasar di BCA Syariah Versi 2020.
3. Surat Keputusan Direksi No. 011/SK/DIR/2020 perihal Pedoman Penerapan Strategi *Anti Fraud* PT Bank BCA Syariah Tahun 2020.
4. Surat Keputusan Direksi No. 001/SK/DIR/2021 perihal Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) Tahun 2021.
5. Surat Keputusan Direksi No. 019/SK/DIR/2023 perihal Penerapan *Whistleblowing System* di PT Bank BCA Syariah.
6. Surat Edaran No. 105/SE/STL/2023 perihal Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa Logistik oleh Pihak Ketiga (Vendor).

Sosialisasi

BCAS melakukan upaya untuk memastikan bahwa Kode Etik BCAS dikomunikasikan dan disebarluaskan kepada seluruh insan BCAS. Sarana yang digunakan untuk melakukan sosialisasi Kode Etik BCAS, antara lain:
1. Dibuat dalam bentuk Buku Saku dan telah dibagikan kepada setiap karyawan.
2. Dibuat dalam bentuk *e-learning* yang dapat diakses oleh setiap karyawan, termasuk karyawan *first jobber* maupun *pro hire* yang baru bergabung dengan BCAS.
3. Dimuat dalam portal internal (MyBCA Syariah) dan situs web.
4. Disosialisasikan melalui *sharing session* atau COP (*Community of Practice*) di tiap-tiap divisi/satuan kerja, antara lain terkait ketentuan rahasia, rahasia jabatan, *fraud*, dan sebagainya.

Upaya Penegakan dan Sanksi Pelanggaran Kode Etik

1. Kode Etik BCAS bersifat mengikat dan harus dipahami serta dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh seluruh insan BCAS dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
2. Seluruh karyawan BCAS, termasuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi serta DPS, melakukan deklarasi atas pemahaman dan kepatuhan atas Kode Etik BCAS dalam bentuk penandatanganan Pakta Integritas yang ditandatangani setiap tahun.
3. Pelanggaran Kode Etik BCAS termasuk dalam tindakan yang dapat dilaporkan melalui sarana *whistleblowing* berdasarkan kebijakan penerapan *Whistleblowing System* BCAS yang dimuat dalam Surat Keputusan Direksi No. 019/SK/DIR /2023.

4. Apabila terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap Kode Etik BCAS, maka pelanggarnya dapat dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Sanksi dimaksud sebagaimana telah disebutkan dalam Perjanjian Kerja Bersama antara lain berupa:
   - Sanksi pokok dalam bentuk peringatan lisan, surat teguran, surat peringatan, demosi maupun pemutusan hubungan kerja.
   - Sanksi tambahan dalam bentuk pemindahan jabatan (rotasi), penundaan kenaikan pangkat, penundaan kenaikan upah/gaji, pencabutan fasilitas-fasilitas yang melekat pada jabatan yang bersangkutan, pelepasan jabatan, maupun sanksi lainnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Keputusan yang diambil oleh BCAS sehubungan dengan hal ini, akan disesuaikan dengan jenis pelanggaran, dampak risiko serta evaluasi menyeluruh atas individu yang melakukan pelanggaran.

Kasus Pelanggaran Kode Etik di Tahun 2023

Selama tahun 2023, terdapat kasus pelanggaran Kode Etik BCAS sebanyak 5 (lima), rekapitulasinya sebagai berikut:

Jumlah Penyelesaian Kasus Pelanggaran Kode Etik pada Tahun 2023

Jenis Sanksi	Jumlah	Status Penyelesaian
SP 1	4	Telah selesai
SP 2	1	Telah selesai
SP 3	0	Telah selesai

Budaya Perusahaan

Budaya yang diterapkan di dalam BCAS meliputi Visi, Misi dan Tata Nilai BCAS. Visi dan Misi BCAS ditetapkan untuk memberikan landasan, arah dan panduan bagi segenap insan BCAS dalam menjalankan kegiatan usaha BCAS. Kemudian Tata Nilai BCAS dijadikan sebagai panduan moral bagi segenap insan BCAS dalam mengemban Misi dan mencapai Visi BCAS.

Tata Nilai Bank

a. ***Teamwork***, dengan perilaku utama yaitu:
   - ***Understand* (memahami)**
     Memahami kekuatan dan kelemahan diri sendiri dan orang lain serta menyelaraskan tindakan atas pemahaman tersebut.
   - ***Interact* (berinteraksi)**
     Menciptakan dan memelihara hubungan yang kuat dan berkualitas secara terus menerus.
   - ***Synergy* (Sinergi)**
     Memberikan masukan dan/atau tindakan yang bermanfaat untuk mencapai tujuan bersama.

b. ***Responsibility***, dengan perilaku utama yaitu:
   - ***Act* (bertindak)**
     Melaksanakan tugas dengan baik, ikhlas dan menyeluruh.
   - ***Aware* (peduli)**
     Memiliki kepekaan, pengertian dan perhatian atas situasi dan/atau nasabah
   - ***Serve Sincerely* (melayani dengan tulus)**
     Melayani dengan cara menggali, memahami dan memenuhi kebutuhan nasabah dengan empati serta memberikan solusi yang tepat sesuai dengan karakter nasabah.

c. ***Integrity***, dengan perilaku utama yaitu:
   - ***Honest* (jujur)**
     Menyampaikan fakta secara bijaksana dengan tetap memperhatikan kepentingan Perusahaan dan Nasabah.
   - ***Commit* (berkomitmen)**
     Mematuhi semua peraturan, ketentuan, kode etik dan norma-norma yang berlaku, loyal dan bangga menjadi bagian dari BCAS.
   - ***Transparent* (terbuka)**
     Bersikap terbuka dengan tetap menjalankan prinsip kehatian-hatian dan memperhatikan kepentingan Perusahaan dan Nasabah.

d. ***Professional***
   - ***Appearance* (citra positif)**
     Berpenampilan, bersikap dan berkomunikasi secara profesional.
   - ***Competence* (kompetensi)**
     Memiliki kompetensi teknis dan non teknis untuk menunjang pelaksanaan tugas.
   - ***Continuous Improvement* (perbaikan yang berkelanjutan)**
     Memiliki kemauan dan kemampuan untuk memperbaiki kinerja secara terus menerus agar mencapai hasil yang lebih baik.

Sosialisasi Visi, Misi, dan Tata Nilai

Selama tahun 2023, program sosialisasi Visi, Misi dan Tata Nilai dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Sosialisasi yang melibatkan seluruh unit kerja dan seluruh karyawan BCAS, seperti dalam *Community of Practice* (COP), *sharing session* tim, rapat koordinasi atau *quality team*.

2. Memanfaatkan berbagai media dan kanal komunikasi perusahaan, antara lain video pada portal/sosial media internal, *e-learning, e- Magazine* Info BCA Syariah, *training* internal, internal *culture* video clip, email, webinar.
3. Melalui program pelatihan/pengembangan kapasitas internal, antara lain program pengembangan manajer, forum-forum khusus seperti forum *account officer*.

Pengenalan Budaya bagi Karyawan Baru

Untuk seluruh karyawan baru di BCA Syariah, pengenalan budaya diberikan melalui program induction yang meliputi pengenalan Visi, Misi, dan Tata Nilai BCA Syariah. Metode berupa pelatihan internal *e-learning* dan pendalaman secara tatap muka merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengenalkan Visi, Misi, dan Tata Nilai BCA Syariah kepada para karyawan baru yang merupakan generasi Y dan Z.

Aksi Korporasi

Pada tahun 2023 BCAS tidak melakukan aksi korporasi lainnya, seperti Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, *buyback shares*, *buyback* obligasi, dan/atau pemecahan saham (*stock split*).

Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyedia Dana Besar (*Large Exposure*)

Pengungkapan penyediaan dana kepada pihak terkait (individu atau kelompok, termasuk Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif Bank, serta pihak terkait lainnya) dan penyediaan dana besar (*large exposure*) mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 / POJK.03/2021 Tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana Dan Penyaluran Dana Besar Bagi Bank Umum Syariah.

Kebijakan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan kepada debitur dalam jumlah besar senantiasa dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, melalui proses *review* dan mekanisme yang sesuai dengan kebijakan BCAS serta telah memenuhi ketentuan OJK maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain menyangkut aspek Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD).

Kebijakan Penyediaan Dana Besar

Penyediaan dana besar adalah nominal penyediaan dana kepada 1 (satu) peminjam atau 1 (satu) kelompok peminjam selain Pihak Terkait sebesar 10% atau lebih dari modal inti (*Tier* 1) Bank. Penyediaan dana besar harus dianalisa kelayakannya minimum sama atau lebih berhati-hati (*prudent*) daripada penyediaan dana kepada debitur umum. Syarat dan ketentuan penyediaan dana diterapkan adalah sesuai dengan ketentuan dan prosedur perkreditan yang berlaku di BCAS.

Kebijakan Pemberian Pinjaman kepada Direksi dan Dewan Komisaris

BCAS telah memiliki kebijakan terkait dengan pemberian pinjaman Direksi dan Dewan Komisaris yang diatur dalam:
1. Pedoman Pembiayaan Produktif dan Pedoman Pembiayaan Konsumen;
2. Kebijakan mengenai Mekanisme Persetujuan Kredit Kepada Pihak Terkait; dan
3. Kebijakan Dasar Perkreditan Bank (KDPB) BCA Syariah Surat Keputusan Direksi nomor 009/SK/DIR/2022 tanggal 25 Februari 2022 (selanjutnya disebut, "Kebijakan Dasar Pembiayaan Bank tahun 2022").

Dalam Kebijakan Pemberian Pinjaman Kredit Direksi dan Dewan Komisaris diatur bahwa pinjaman kredit kepada Direksi dan Dewan Komisaris diberikan atas dasar prinsip kewajaran atau *arm's length* basis dan sesuai dengan prinsip syariah.

Implementasi Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait Tahun 2023

Selama tahun 2023, BCAS telah menjalankan kebijakan penyediaan dana kepada pihak terkait, kebijakan penyediaan dana besar, dan kebijakan pemberian pinjaman kepada Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang harus memenuhi ketentuan antara lain:

1. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan rencana pemberian pembiayaan nasabah besar tertentu harus diputuskan oleh pejabat pemutus pembiayaan dan wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris BCAS.
2. Penyediaan dana kepada pihak terkait tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dan prosedur umum pemberian pembiayaan yang berlaku dan wajib tetap memberikan keuntungan yang wajar bagi BCAS serta prinsip syariah.
3. Kebijakan penetapan persyaratan pembiayaan kepada pihak terkait, khususnya mengenai penetapan margin, ujroh dan bagi hasil serta bentuk dan jenis agunan tetap mengikuti ketentuan perkreditan yang berlaku umum pada BCAS.

Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan kepada Debitur Inti Individu dan Grup (*Large Exposure*) di BCAS selama tahun 2023:

Penyediaan Dana	Jumlah	
	Nasabah/Grup	Outstanding (Rp Juta)
Kepada Pihak Terkait	Grup Djarum	277.496
	Grup BCA	7.011
	Grup BCA Syariah	2.510
	Total	287.017
Kepada Debitur Inti • Individu • Grup	PLN	429.999
	Grup Martias	636.929
	Grup Alphen Internasional Corporindo	395.421
	Grup APP	370.728
	Total	1.828.077

Rencana Strategis

Rencana strategis BCAS di tahun 2024 dapat ditemukan pada bagian Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023 serta Proyeksi Tahun 2024, di bab Analisis dan Pembahasan Manajemen Laporan Tahunan BCAS 2023.

Transparansi Kondisi Keuangan dan Nonkeuangan yang Belum Diungkapkan di Laporan Lainnya

BCAS telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan di antaranya mengacu pada POJK No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.

Transparansi Kondisi Keuangan

1. **Laporan Tahunan**
   BCAS setiap tahun selalu menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada OJK, pemegang saham, dan lembaga-lembaga lainnya yang dipersyaratkan ataupun yang dipandang perlu mendapatkannya. Laporan Tahunan berisi informasi antara lain:
   a. Ikhtisar data keuangan penting termasuk ikhtisar saham, laporan Dewan Komisaris, laporan Direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen mengenai kinerja bisnis dan keuangan, tata kelola perusahaan, tanggung jawab sosial perusahaan dan keuangan berkelanjutan.
   b. Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, yang dibuat untuk 1 tahun buku dan disajikan dengan perbandingan 1 tahun buku sebelumnya, serta permulaan dari tahun komparatif terdahulu.
   c. Pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi Laporan Tahunan. Pernyataan tersebut dituangkan dalam lembar pernyataan yang dibubuhi tanda tangan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi. Laporan Tahunan telah termuat pada situs web BCAS (www.bcasyariah.co.id).

   Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit telah termuat pada situs web BCAS (www.bcasyariah.co.id).

2. **Laporan Publikasi Triwulanan**
   BCAS telah mengumumkan Laporan Publikasi Triwulanan pada media cetak (Semester I dan Semester II) dan situs web BCAS (www. bcasyariah.co.id), termasuk melaporkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan kepada OJK atau pemangku kepentingan sesuai dengan POJK yang berlaku.

   Pengumuman Laporan Publikasi Triwulanan pada situs web BCAS berupa Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan maupun laporan lainnya dipelihara paling kurang untuk 5 tahun buku terakhir.

3. **Laporan Publikasi Bulanan**
   BCAS telah mengumumkan Laporan Publikasi Bulanan pada situs web BCAS (www.bcasyariah. co.id), termasuk melaporkan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan kepada OJK sesuai dengan POJK yang berlaku.

   Pengumuman Laporan Publikasi Bulanan pada situs web BCAS berupa Laporan Keuangan Publikasi Bulanan dipelihara paling kurang untuk 5 tahun buku terakhir.

Transparansi Kondisi Nonkeuangan

BCAS telah menyusun dan menyajikan laporan yang terkait dengan transparansi kondisi non-keuangan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan POJK yang berlaku serta menyediakan dan mempublikasikan informasi lainnya terkait kondisi non-keuangan, antara lain sebagai berikut:

a. Mempublikasikan secara transparan kondisi non-keuangan kepada *stakeholder*, antara lain Pelaporan Rutin BMPD kepada OJK, informasi GCG melalui Laporan Pelaksanaan GCG BCAS maupun yang dimuat pada situs web BCAS, serta informasi kondisi nonkeuangan lainnya yang juga ditransparansikan dalam situs web BCAS.
b. Mengungkapkan transparansi Struktur Kepemilikan pada Laporan Tahunan dan situs web BCAS.
c. Mengungkapkan informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat memengaruhi pihak-pihak yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. BCAS senantiasa menyampaikan laporan informasi atau fakta material melalui situs web BCAS.
d. BCAS telah mempublikasikan informasi mengenai produk dan/atau layanan BCAS secara jelas, akurat dan terkini sesuai ketentuan. Informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah, antara lain dalam *e-brosur* atau bentuk tertulis lainnya di setiap kantor cabang BCAS pada lokasi-lokasi yang mudah diakses, dan/ atau dalam bentuk informasi secara elektronis yang disediakan melalui *hotline service/call center*, situs web BCAS, dan akun sosial resmi perusahaan.
e. BCAS menyediakan dan menginformasikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa bagi nasabah sesuai ketentuan OJK yang mengatur mengenai Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan, antara lain melalui situs web BCAS (www.bcasyariah.co.id). Selain itu, mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah BCAS dilaksanakan melalui sarana pengaduan antara lain melalui Kantor Cabang BCAS atau Halo BCA di 1500888, aplikasi Halo BCA, atau e-mail halobca@bca.co.id dan aplikasi Halo BCA.
f. Menyusun pelaporan internal yang telah dilakukan dengan lengkap, akurat, dan tepat waktu dengan didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai. BCAS memiliki sistem informasi manajemen BCAS yang handal dan didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten serta *IT security system* yang memadai dan mampu memberikan informasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu kepada Direksi untuk digunakan dalam mendukung proses pengambilan keputusan bisnis BCAS.
g. Informasi lainnya yang bertujuan untuk mendukung keterbukaan informasi, edukasi keuangan dan layanan kepada masyarakat.

Pendapatan Non-halal dan Penggunaannya

Pelaporan terkait dengan pendapatan nonhalal dan penggunaannya dalam bank syariah mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPBS, tanggal 30 April 2010, perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha syariah. Pendapatan non halal BCA Syariah berasal dari bunga atas penempatan dana pada Bank konvensional. Berikut laporan sumber pendapatan non-halal, nilai, dan penggunaannya pada tahun 2023.

Rekapitulasi Laporan Sumber Pendapatan Non-halal dan Penggunaannya (Rp)

Uraian	2023	2022	Perubahan	
			Nilai	%
Saldo Awal Titipan Dana Non-halal	351.008.825,2	212.770.570,7	138.238.254,5	65,0%
Penerimaan Non-halal	354.743.538,6	139.263.254,5	215.480.284,1	154,7%
Penggunaan Titipan Dana Non-halal	230.971.278,0	1.025.000,0	229.946.278,0	22.433,8%
Kenaikan (Penurunan) Titipan Dana Non-halal	123.772.260,6	138.238.254,5	(14.465.993,9)	(10,5%)
Saldo Akhir Titipan Dana Non-halal	474.781.085,8	351.008.825,2	123.772.260,6	35,3%

Penerapan Tata Kelola Terintegrasi

Dalam rangka meningkatkan kinerja Konglomerasi Keuangan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku pada industri jasa keuangan, Konglomerasi Keuangan wajib melaksanakan kegiatan usaha dengan berpedoman pada prinsip Tata Kelola Terintegrasi yang baik. Penerapan tata Kelola terintegrasi diperlukan karena BCAS memiliki hubungan kepemilikan dan/atau pengendalian sehingga terjadi transaksi dan interaksi antar Perusahaan keuangan dalam konglomerasi keuangan.

Mengacu pada POJK No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 dan SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, BCAS sebagai anak usaha dari BCA (Entitas Utama) serta Perusahaan Anak lainnya dan/atau Perusahaan Terelasi dalam Konglomerasi Keuangan BCA telah menerapkan Tata Kelola Terintegrasi (TKT) secara komprehensif dan efektif.

BCA sebagai Entitas Utama, telah menyusun Pedoman TKT, membentuk Komite TKT, serta menambahkan fungsi kepatuhan terintegrasi, fungsi audit internal terintegrasi, dan fungsi manajemen risiko terintegrasi dalam organ tata kelola BCA. Sesuai dengan POJK No. 45/POJK.03/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Konglomerasi Keuangan, BCA juga telah menyusun dan menyampaikan Piagam Korporasi kepada OJK.

BCA selaku Entitas Utama menyusun Laporan Tahunan Pelaksanaan TKT untuk tahun 2023 dan menyampaikannya kepada OJK. Laporan Tahunan Pelaksanaan TKT tersebut disusun dengan mengacu pada SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi serta memuat pula cakupan Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku bagi bank umum.

Informasi lebih lengkap mengenai Tata Kelola Terintegrasi, terdapat pada Laporan Tata Kelola BCA tahun 2023.

Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola Terintegrasi

Penilaian pelaksanaan TKT dilakukan setiap semester (dua kali dalam setahun). Pada tahun 2023, BCA selaku Entitas Utama telah melakukan penilaian sendiri pelaksanaan TKT periode Semester I dan Semester II. Penilaian tersebut mencakup penilaian terhadap 3 aspek TKT, yaitu Struktur, Proses, dan Hasil TKT. Penilaian pelaksanaan TKT meliputi paling sedikit 7 faktor, yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama.

3. Tugas dan tanggung jawab Komite TKT.
4. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.
5. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi.
6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
7. Penyusunan dan pelaksanaan Pedoman TKT.

Hasil penilaian sendiri pelaksanaan TKT pada Semester I dan Semester II tahun 2023 dapat di lihat pada Laporan Tata Kelola BCA tahun 2023.

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 037/SK/KOM/2015 tentang Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi tanggal 26 Februari 2015, BCA telah membentuk Komite TKT yang beranggotakan perwakilan Komisaris Independen BCA, Pihak Independen, dan seluruh perwakilan Komisaris Independen dan/atau Anggota Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Anak. Komite TKT bertugas untuk membantu Dewan Komisaris BCA sebagai Entitas Utama dalam melakukan pengawasan atas penerapan TKT di Konglomerasi Keuangan BCA.

BCAS mengirimkan perwakilan sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi, antara lain:

Nama	Jabatan
Ratna Yanti	Presiden Komisaris Independen
Sutedjo Prihatono	Anggota DPS

Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

BCA sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan BCA telah menambahkan fungsi kepatuhan terintegrasi dalam organisasi Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA melalui koordinasi dengan fungsi kepatuhan di masing-masing Perusahaan Anak.
SKK Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:
1. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing Perusahaan Anak.
2. Mengembangkan metode dan proses yang diperlukan dalam rangka penerapan manajamen risiko kepatuhan terintegrasi.
3. Menilai dan menyusun profil risiko kepatuhan terintegrasi dalam rangka penerapan manajemen risiko terintegrasi.
4. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepatuhan terintegrasi kepada Direktur Kepatuhan Entitas Utama. Selanjutnya Direktur Kepatuhan Entitas Utama menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepatuhan terintegrasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama.

Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi

BCA sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan BCA telah menambahkan fungsi audit internal terintegrasi dalam organisasi Divisi Audit Internal (DAI) untuk memantau penerapan fungsi audit internal pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA dan memberikan rekomendasi yang meningkatkan nilai tambah. Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:
1. Menilai kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian internal dan tata kelola Perusahaan Anak, serta memberikan rekomendasi perbaikan.
2. Memantau pelaksanaan audit internal pada masing-masing Perusahaan Anak.
3. Memantau dan mengevaluasi kecukupan tindak lanjut perbaikan atas hasil audit Perusahaan Anak, serta melaporkannya kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit Entitas Utama.
4. Menyampaikan laporan audit internal terintegrasi kepada Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap Perusahaan Anak, Dewan Komisaris Entitas Utama serta Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Entitas Utama.
5. Memberikan dukungan kepada Perusahaan Anak dalam mengembangkan fungsi audit internal.

Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi

Sesuai dengan POJK No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, BCA dan Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan BCA telah menerapkan manajemen risiko terintegrasi secara komprehensif dan efektif sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan.

Dalam rangka penerapan manajemen risiko terintegrasi, BCA selaku Entitas Utama telah membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) dan menambahkan fungsi manajemen risiko terintegrasi dalam Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) sehingga berperan juga sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT).
1. KMRT beranggotakan Direktur BCA yang membawahkan fungsi manajemen risiko terintegrasi, seluruh anggota Direksi BCA, beberapa manajemen senior BCA lainnya yang terkait, serta Direktur Perusahaan Anak sebagai perwakilan dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA.
2. Dalam melaksanakan fungsinya, KMRT juga didukung oleh SKMR yang juga berperan sebagai SKMRT untuk memastikan bahwa risiko yang dihadapi Entitas Utama dan Perusahaan Anak secara terintegrasi dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan dan dilaporkan dengan benar melalui penerapan kerangka kerja manajemen risiko yang sesuai. Tugas dan tanggung jawab SKMRT antara lain adalah:
   - Memberikan masukan kepada Direksi Entitas Utama dan KMRT, antara lain dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.

- Memantau pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi termasuk mengembangkan dan melaksanakan kaji ulang secara berkala atas prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.
- Melakukan pemantauan risiko pada Konglomerasi Keuangan BCA.
- Melakukan *stress testing*.
- Mengkaji usulan lini bisnis baru yang bersifat strategis dan berpengaruh signifikan terhadap eksposur risiko Konglomerasi Keuangan.
- Memberikan informasi kepada KMRT terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait hasil evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko terintegrasi.
- Menyusun dan menyampaikan Laporan Profil Risiko Terintegrasi secara berkala.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Penilaian Tata Kelola

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola

BCA Syariah telah menyusun laporan pelaksanaan tata kelola pada setiap akhir tahun buku. Untuk laporan pelaksanaan tata kelola tahun 2023 telah disusun dan dikirimkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang saham pengendali serta dipublikasikan pada situs web BCAS sesuai dengan ketentuan yang berlaku (paling lama 4 bulan setelah tahun buku berakhir).

Penilaian Sendiri (*self-assessment*)

BCA Syariah melakukan penilaian sendiri atas penerapan GCG pada paling sedikit 2 kali dalam setahun. Hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) tahun 2023 pada semester I adalah peringkat 2, dengan rincian sebagai berikut:

	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	Dua	Baik
Konsolidasi	---	----
Analisis		
Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.		

Hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) tahun 2023 pada semester II adalah peringkat 1, dengan rincian sebagai berikut:

	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	Satu	Sangat baik
Konsolidasi	---	----
Analisis		
Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang sangat memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.		

Prinsip Tata Kelola Perusahaan sesuai *Guidelines of Corporate Governance Principles for Banks*

BCA Syariah menerapkan 12 prinsip tata kelola perusahaan sesuai pedoman yang dikeluarkan oleh *Basel Committee in Banking Supervision*. Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang disusun oleh *Basel Committee* menjadi acuan dalam penerapan tata kelola perusahaan di perbankan.

Prinsip	Penerapan BCA Syariah
Prinsip 1 **Tanggung Jawab Dewan Komisaris.** Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab yang antara lain: persetujuan dan pengawasan terhadap penerapan strategi bisnis, struktur dan mekanisme *governance* dan budaya perusahaan	Dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang menjadi satu kesatuan dengan Pedoman Tata Kelola Perusahaan, telah diatur mengenai tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain melakukan pengawasan untuk kepentingan BCAS atas: • kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi, • memberikan nasihat kepada Direksi, dan • bertanggung jawab atas pengawasan tersebut Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dapat diunduh di bagian Struktur Organisasi pada situs *web* BCAS.
Prinsip 2 **Kualifikasi dan Komposisi Dewan Komisaris.** Anggota Dewan Komisaris harus memiliki kualitas sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, baik secara individu maupun secara kolegial. Dewan Komisaris harus memahami perannya dalam pengawasan dan penerapan *corporate governance*, serta mampu melaksanakan pengambilan keputusan secara sehat dan objektif.	BCAS telah memiliki kualifikasi dan komposisi Dewan Komisaris sesuai tugas dan tanggung jawabnya berupa: • memenuhi persyaratan persetujuan OJK berupa lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) • memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan • memiliki kompetensi yang memadai dan relevan Komposisi Dewan Komisaris memenuhi ketentuan, berupa: • Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, 1 (satu) diantaranya menjabat sebagai Presiden Komisaris. • Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia. • Anggota Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen dan Komisaris Non Independen. • Jumlah Komisaris independen paling sedikit 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang dapat diunduh di bagian Struktur Organisasi pada situs *web* BCAS.
Prinsip 3 **Struktur dan Mekanisme Dewan Komisaris.** Dewan Komisaris harus menetapkan struktur dan praktik *governance* yang tepat dalam melaksanakan tugasnya dan secara *periodic* melakukan telaah atas efektivitasnya.	BCAS telah memiliki struktur dan mekanisme Dewan Komisaris Tanggung Jawab Dewan Direksi. Struktur dan mekanisme Dewan Komisaris dapat dilihat di Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang dapat diunduh di bagian Struktur Organisasi pada situs *web* BCAS
Prinsip 4 **Direksi.** Di bawah arahan dan pengawasan Dewan Komisaris, Direksi mampu mengelola kegiatan Bank sesuai dengan strategi bisnis, selera risiko, kebijakan remunerasi dan kebijakan lainnya yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.	Direksi BCAS menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan strategi bisnis, selera risiko, kebijakan remunerasi dan kebijakan lainnya yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Tugas dan tanggung jawab Direksi dapat dilihat di Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang dapat diunduh di bagian Struktur Organisasi pada situs *web* BCAS
Prinsip 5 **Struktur Governance Kelompok Usaha.** Dalam suatu kelompok usaha, Dewan Komisaris perusahaan induk memiliki tanggungjawab menyeluruh terhadap kelompok usaha tersebut dan untuk memastikan penetapan dan pelaksanaan praktik *governance* yang bersih terkait dengan struktur, bisnis, dan risiko kelompok usaha dan entitas. Dewan Komisaris dan Direksi harus memahami struktur organisasi kelompok usaha dan risiko yang dihadapi.	BCAS memiliki Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang menjadi satu kesatuan dengan Pedoman Tata Kelola Perusahaan. BCAS juga telah mengirimkan 2 (dua) orang sebagai perwakilan dari BCAS untuk menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Prinsip	Penerapan BCA Syariah
Prinsip 6 **Fungsi Manajemen Risiko.** Bank harus memiliki fungsi manajemen risiko yang berkualitas, independen, memiliki sumber daya yang berkualitas dan memiiki akses dengan Dewan Komisaris.	Fungsi manajemen risiko di BCAS dilakukan oleh Departemen Manajemen Risiko yang dipimpin oleh Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan. BCAS juga telah memiliki Komite Manajemen Risiko dan tergabung dalam Komite Manajemen Risiko Terintegrasi di BCA yang bertugas untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi atas pelaksanaan manajemen risiko di BCAS. Penerapan manajemen risiko di BCAS dikomunikasikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko. Pokok-pokok Kebijakan Manajemen Risiko dapat diunduh pada bagian Kebijakan GCG situs web BCAS.
Prinsip 7 **Identifikasi Pemonitoran dan Pengendalian Risiko.** Risiko harus diidentifikasi, dimonitor dan dikendalikan untuk seluruh kegiatan aktivitas Bank. Kualitas dari infrastruktur manajemen risiko dan pengendalian internal harus mampu mengikuti perubahan profil risiko Bank, kondisi risiko eksternal dan praktik *industry*.	BCAS telah melakukan mitigasi risiko melalui identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko sesuai kerangka kerja manajemen risiko yang berlaku serta menyusun profil risiko secara berkala. Pokok-pokok Kebijakan Manajemen Risiko dapat diunduh pada bagian Kebijakan GCG situs *web* BCA Syariah.
Prinsip 8 **Komunikasi Risiko.** Implementasi *risk governance* yang efektif membutuhkan komunikasi risiko yang akurat dalam lingkungan Bank baik antar organisasi maupun melalui pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.	BCAS senantiasa menyampaikan Laporan Profil Risiko BCA Syariah secara semesteran kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan OJK. Laporan Profil Risiko Terintegrasi setiap semester kepada BCA. Pokok-pokok Kebijakan Manajemen Risiko dapat diunduh pada bagian Kebijakan GCG situs *web* BCAS.
Prinsip 9 **Kepatuhan.** Dewan Komisaris bertanggungjawab dalam mengawasi manajemen terkait dengan risiko kepatuhan Bank. Dewan Komisaris harus menetapkan fungsi kepatuhan dan memberikan persetujuan terhadap kebijakan dan proses identifikasi, penilaian, pemonitoran dan pelaporan, dan pemberian nasihat kepada risiko kepatuhan.	Fungsi kepatuhan di BCAS dilakukan oleh Departemen Kepatuhan (KEP) yang dipimpin oleh Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. KEP menjalankan fungsi kepatuhan di BCAS serta memantau pelaksanaan fungsi kepatuhan Direksi, Dewan Komisaris, dan OJK dan tingkat kepatuhan Perusahaan Anak secara terintegrasi kepada BCA. Dewan Komisaris juga telah melakukan pengawasan secara aktif antara lain persetujuan atas kebijakan dan prosedur, Laporan Hasil Audit, pelaporan secara periodik, permintaan penjelasan, dan melalui presentasi.
Prinsip 10 **Audit Internal.** Fungsi audit internal harus melaporkan kegiatan independen *assurance* kepada Dewan Komisaris dan harus mendukung Dewan Komisaris dan Direksi dalam mendorong penerapan proses *governance* yang efektif serta kesehatan Bank dalam jangka panjang.	Fungsi Audit Internal dijalankan oleh SKAI yang bertugas melakukan kegiatan *assurance* dan konsultasi secara independen dan obyektif untuk meningkatkan efektivitas dan memberikan nilai tambah terhadap proses manajemen risiko, pengendalian internal dan tata kelola kegiatan perusahaan. SKAI bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden Direktur dan berkomunikasi dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Fungsi audit internal dapat dilihat pada Piagam Audit Internal yang dapat diunduh pada bagian Kebijakan GCG situs web BCAS.
Prinsip 11 **Kompensasi.** Struktur remunerasi Bank harus mendukung penerapan *corporate governance* dan *risk management*.	BCAS telah memiliki struktur remunerasi yang sesuai dengan POJK No. 45/POJK.03/2015 Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum dan SE OJK No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum. Evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi dilakukan oleh KRN. Terkait dengan fungsi remunerasi KRN dapat diunduh pada bagian Struktur Organisasi situs web BCAS.
Prinsip 12 **Pengungkapan dan Transparansi.** Penerapan *governance* dari Bank harus dilaksanakan secara transparan kepada Pemegang Saham, Depositor, *Stakeholder* relevan lainnya, dan Partisipan Pasar.	BCAS telah melaksanakan pengungkapan dan transparansi sebagai penerapan *governance* kepada Pemegang Saham, Depositor, *Stakeholder* relevan lainnya. Kebijakan pengungkapan dan transparansi dapat dilihat pada Pedoman Tata Kelola yang dapat diunduh pada bagian Kebijakan GCG situs *web* BCAS.

Prinsip Governansi Korporat Indonesia

Pada tahun 2023, Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) telah memutakhirkan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI). Selaras dengan komitmen BCA Syariah untuk mewujudkan 4 (empat) pilar governansi korporat yaitu perilaku beretika, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan, maka BCA Syariah juga terus berupaya menjalankan 8 (delapan) prinsip governansi korporat Indonesia, antara lain sebagai berikut:

Prinsip 1 Peran dan tanggung jawab Direksi dan dewan Komisaris	
Prinsip	**Penerapan BCA Syariah**
1.1. Peran dan tanggung jawab Direksi	Peran dan tanggung jawab Direksi telah dijabarkan dalam: • Anggaran Dasar pasal 12 • Piagam Kerja Direksi yang dapat diakses melalui situs web BCAS.
1.2. Penilaian Kinerja – Direksi dan Anggotanya	Penilaian Kinerja – Direksi dan Anggotanya akan dilakukan untuk periode laporan berikutnya
1.3. Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	Peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dijabarkan dalam: • Anggaran Dasar pasal 15 • Piagam Kerja Dewan Komisaris yang dapat diakses melalui situs web BCAS.
1.4. Pembentukan Komite	Untuk membantu fungsi dan tugasnya, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki Komite-komite. Uraian lebih detail dapat dilihat pada bagian Komite Dewan Komisaris dan Direksi pada laporan ini.
1.5. Penilaian Kinerja – Dewan Komisaris dan Anggotanya	Penilaian Kinerja – Dewan Komisaris dan Anggotanya akan dilakukan untuk periode laporan berikutnya.
1.6. Benturan kepentingan	Benturan kepentingan di BCAS telah diatur dalam kebijakan internal dan dapat dilihat pada transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan pada laporan ini.
1.7. Peningkatan kompetensi anggota Direksi dan Dewan Komisaris	Departemen Sumber Daya Manusia melakukan pemantauan peningkatan kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi dengan pemberian *training* dan *workshop* baik yang dilaksanakan oleh eksternal bank dan internal. Pelaksanaan *Training* Direksi dan Dewan Komisaris dapat dilihat pada Bagian Direksi dan Dewan Komisaris pada laporan ini.

Prinsip 2 Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris	
Prinsip	**Penerapan BCA Syariah**
2.1. Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris	Penentuan jumlah dan komposisi anggota Direksi dilakukan melalui Komite Remunerasi dan Nominasi BCAS yang bertugas memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk kemudian dimintakan persetujuan kepada RUPS. BCAS juga telah mempertimbangkan kondisi, kapasitas, pencapaian tujuan, dan pemenuhan kebutuhan BCAS dalam menentukan jumlah anggota Direksi. Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris dapat dilihat pada bagian Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi pada laporan ini.
2.2. Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris	BCAS telah memiliki struktur remunerasi yang sesuai dengan POJK No. 45/POJK.03/2015 Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum dan SE OJK No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum. Jumlah dan komposisi anggota Direksi dapat dilihat pada Kebijakan Remunerasi pada laporan ini.

Prinsip 3 Hubungan Kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris	
Prinsip	**Penerapan BCA Syariah**
3.1. Sifat Hubungan Kerja	Dewan Komisaris dan Direksi menjalin komunikasi secara efektif dalam rapat gabungan yang diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Dewan Komisaris maupun Direksi memiliki akses informasi yang memadai sehingga dalam rapat gabungan dapat dirumuskan atau diputuskan beberapa kebijakan maupun strategi korporasi. Rapat gabungan dewan komisaris dan direksi dapat dapat dilihat pada Rapat Dewan Komisaris, Direksi Dan Rapat Gabungan pada laporan ini.
3.2. Akses informasi Dewan Komisaris	
3.3. Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris atas Dampak Struktur Kepemilikan terhadap Korporasi	Dewan Komisaris dan Direksi, secara terbuka memberikan informasi kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada BCAS, bank lain, lembaga keuangan bukan bank dan perseroan lainnya. Informasi Detai dapat dilihat pada bagian Direksi dan Dewan Komisaris laporan ini.

Prinsip 4 Perilaku etis dan bertanggung jawab	
Prinsip	**Penerapan BCA Syariah**
4.1. Pedoman Etika dan perilaku	Pedoman etika dan perilaku BCAS dituangkan dalam kode etik dan tata nilai yang dikomunikasikan secara efektif kepada seluruh insan BCAS.
4.2. Nilai–nilai dan Budaya Organisasi	
4.3. Komunikasi dan penegakan pedoman etika, nilai-nilai dan budaya	BCAS senantiasa menumbuhkan budaya korporasi melalui kode etik dan tata nilai kepada seluruh insan BCAS. Uraian lebih detail dapat dilihat pada bagian Kode Etik dan Budaya Perusahaan pada laporan ini.

Prinsip 5 Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan	
Prinsip	**Penerapan BCA Syariah**
5.1. Pengendalian internal dan Kepatuhan	Fungsi Kepatuhan BCAS dijalankan oleh Departemen Kepatuhan yang disupervisi oleh Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan. Uraian lebih detail dapat dilihat pada bagian Fungsi Kepatuhan pada laporan ini. Pengendalian internal BCAS sejalan dengan *Internal Control Integrated Framework*. Uraian lebih detail dapat dilihat pada bagian Sistem Pengendalian Internal pada laporan ini.
5.2. Manajemen Risiko	BCAS telah memiliki Kebijakan Dasar Manajemen Risiko BCAS (KDMR) sebagai pedoman agar penerapan manajemen risiko berjalan efektif. Uraian lebih detail dapat dilihat pada bagian Penerapan Manajemen Risiko pada laporan ini.
5.3. Integrasi Governansi, Manajemen Risiko dan Kepatuhan	BCAS telah membangun sistem governansi, manajemen risiko dan kepatuhan baik.
5.4. Audit Internal	Fungsi Audit Internal dijalankan oleh Satuan Kerja Audit Internal yang bertugas melakukan kegiatan assurance dan konsultasi secara independen dan obyektif untuk meningkatkan efektivitas dan memberikan nilai tambah terhadap proses manajemen risiko, pengendalian internal dan tata Kelola kegiatan perusahaan. BCAS juga memiliki Komite Audit yang membantu Dewan Komisaris untuk memantau dan memastikan fungsi audit internal berjalan efektif. Detail informasi mengenai hal ini ada pada bagian Satuan Kerja Audit dan Komite-komite Dewan Komisaris pada laporan ini.

Prinsip 6 Pengungkapan dan transparansi	
Prinsip	**Penerapan BCA Syariah**
6.1. Kebijakan Pengungkapan	BCAS memiliki kebijakan pengungkapan informasi yang diatur dalam Pedoman Tata Kelola. Detail informasi mengenai hal ini dapat dilihat pada bagian Integritas Pelaporan dan Sistem Informasi pada laporan ini.
6.2. Laporan Keuangan dan Keberlanjutan	Laporan Keuangan dan Keberlanjutan BCAS disusun secara akurat, lengkap, bertanggung jawab dan informatif. Laporan Keuangan dapat dilihat pada Laporan Tahunan 2023. Laporan Keberlanjutan disusun terpisah dengan Laporan Tahunan ini dan dapat diakses melalui situs web BCAS
6.3. Diseminasi Informasi	BCAS menyediakan akses informasi kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat luas dengan mudah, murah dan efektif. Uraian lebih detail mengenai hal ini dapat dilihat pada bagian Akses Informasi dan Data Perusahaan pada laporan ini.

Prinsip 7 Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham	
Prinsip	**Penerapan BCA Syariah**
7.1. Hak Pemegang Saham	BCAS belum melakukan IPO di bursa efek (EFEK) dan Pemegang saham saat ini adalah PT. Bank Central Asia, Tbk dan PT. BCA *Finance*. Uraian lebih detail dapat dilihat pada bagian Informasi Pemegang Saham pada laporan ini.
7.2. Perlakuan adil terhadap pemegang Saham	Pemegang saham memiliki hak suara yang sama dan mendapatkan perlakuan yang sama dari BCAS. Uraian lebih detail dapat dilihat pada: • Informasi Pemegang Saham Utama • Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) • Pasal 10 AD/ART PT. Bank BCA Syariah pada laporan ini dan situs web BCAS
7.3. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	RUPS telah diselenggarakan sesuai dengan ketentuan OJK dan Pasal 8 AD/ART PT. Bank BCA Syariah Uraian lebih detail dapat dilihat pada Informasi Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada laporan ini serta situs web BCAS

Prinsip 8 Pemangku kepentingan lainnya	
Prinsip	**Penerapan BCA Syariah**
8.1. Keterlibatan Pemangku Kepentingan Kunci	Melalui Sekretaris Perusahaan, BCAS melaksanakan komunikasi yang transparan dan efektif dengan pemangku kepentingan. Uraian lebih detail dapat dilihat pada bagian tentang Sekretaris Perusahaan pada laporan ini.
8.2. Integrasi Keberlanjutan dalam Model Bisnis	Dewan Komisaris bersama dengan Direksi menetapkan strategi, prioritas dan target keberlanjutan korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris memasukkan pertimbangan keberlanjutan ketika menjalankan perannya.
8.3. Perlindungan terhadap Pemangku Kepentingan	BCAS menjalankan dan mengungkapkan tanggung jawab korporasi kepada para pemangku kepentingan antara lain namun tidak terbatas pada pelanggan, pemasok, sosial, lingkungan, kreditur, karyawan, regulator. Pengungkapan tersebut dapat dilihat pada Laporan Keberlanjutan BCAS yang disusun terpisah dengan Laporan Tahunan ini dan dapat diakses melalui situs web BCAS.

ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)

A. Hak-Hak Pemegang Saham	
Prinsip & Rekomendasi	**Pemenuhan**
A.1. Hak-Hak Dasar Pemegang Saham	Tercantum pada Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 21 Penggunaan Laba dan Pembagian Deviden Interim dan Pembagian Deviden yang dapat diakses melalui situs web BCAS.
A.2. Hak untuk Berpartisipasi dalam Keputusan-Keputusan mengenai Perubahan Mendasar perusahaan	Tercantum pada bagian RUPS.
A.3. Hak untuk Berpartisipasi secara Efektif dan Memberikan Suara dalam RUPS serta Mendapat Informasi mengenai Tata Tertib RUPS, termasuk Prosedur Pemungutan Suara	Tercantum pada Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 10 Kuorom, Hak Suara dan Keputusan RUPS yang dapat diakses melalui situs web BCAS.
A.4. Pasar harus Diizinkan untuk Mengawasi Perusahaan secara Efisien dan Transparan	N/A
A.5. Pelaksanaan Hak Kepemilikan oleh Pemegang Saham, termasuk Investor Institusi, harus Difasilitasi	Tercantum pada bagian Akses Informasi dan Data Perusahaan.

B. Perlakukan yang Adil terhadap Pemegang Saham	
Prinsip & Rekomendasi	**Pemenuhan**
B.1. Saham dan Hak Voting	Tercantum pada Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 10 Kuorom, Hak Suara dan Keputusan RUPS yang dapat diakses melalui situs web BCAS.
B.2. Panggilan RUPST	Tercantum pada Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 9 Tempat dan Pemanggilan dan Pimpinan RUPS yang dapat diakses melalui situs web BCAS.
B.3. Perdagangan oleh Orang Dalam dan yang tidak sesuai peraturan harus dilarang	N/A
B.4. Transaksi dengan pihak terkait oleh Direksi dan Senior Manajemen	Tercantum pada: • Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan • Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) Dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*)
B.5. Melindungi pemegang saham minoritas dari tindakan yang tidak sesuai peraturan	Tercantum pada: • Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan • Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) Dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*)

C. Peran Pemangku Kepentingan	
Prinsip & Rekomendasi	**Pemenuhan**
C.1. Menghormati hak-hak pemangku kepentingan berdasarkan perundang-undangan atau berdasarkan kesepakatan	Tercantum pada: • Akses Informasi Dan Data Perusahaan • Kode Etik • Penerapan Keuangan Berkelanjutan
C.2. Dalam hal kepentingan para pemangku kepentingan dilindungi oleh hukum, maka pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk mendapat ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka	Tercantum pada: • Akses Informasi Dan Data Perusahaan • Integritas Pelaporan Dan Sistem Teknologi Informasi

C. Peran Pemangku Kepentingan	
Prinsip & Rekomendasi	**Pemenuhan**
C.3. Mekanisme agar pekerja dapat berpartisipasi harus dapat dikembangkan	Tercantum pada: • Penerapan Keuangan Berkelanjutan • Kebijakan Remunerasi • Laporan Keuangan Tahunan 2023 untuk Pengelolaan Sumber Daya Manusia
C.4. Para pemangku kepentingan termasuk pekerja secara individu maupun perwakilan mereka, harus dapat dengan bebas mengkomunikasikan kekhawatiran mengenai praktik-praktik illegal atau tidak etis kepada Direksi dan hak-hak mereka tidak dikompromikan karena melakukan hal tersebut	Tercantum pada: • *Whistleblowing System* • Penerapan Strategi *Anti Fraud*

D. Pengungkapan dan Transparansi	
Prinsip & Rekomendasi	**Pemenuhan**
D.1. Transparansi Struktur Kepemilikan	Tercantum pada: • Direksi • Dewan Komisaris • Dewan Pengawas Syariah • Informasi Pemegang Saham Utama/Pengendali • Tata Kelola Dalam Kelompok Usaha Bank
D.2. Kualitas Laporan Tahunan	Tercantum pada: • Laporan Keuangan Tahunan 2023 • Budaya Perusahaan • Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 21 Penggunaan Laba Dan Pembagian Deviden Interim Dan Pembagian Deviden • Rapat Dewan Komisaris, Direksi Dan Rapat Gabungan • Kebijakan Remunerasi • Penerapan Prinsip Tata Kelola Di BCAS • Permasalahan Hukum • Perkara Penting & Sanksi Administratif
D.3. Pengungkapan Transaksi dengan Pihak Terkait	Tercantum pada: • Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) Dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) • Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan
D.4. Direktur dan Komisaris melakukan transaksi saham perusahaan	N/A
D.5. Eksternal Auditor dan Laporan Auditor	Tercantum pada: • Akuntan Publik (Audit Eksternal)
D.6. Media Komunikasi	Tercantum pada: • Integritas Pelaporan Dan Sistem Teknologi Informasi • Akses Informasi Dan Data Perusahaan
D.7. Jadwal Pengeluaran Laporan Tahunan/Keuangan	Tercantum pada: • Laporan Keuangan Tahunan 2023
D.8. Situs Web perusahaan	Tercantum pada: • Integritas Pelaporan Dan Sistem Teknologi Informasi • Akses Informasi Dan Data Perusahaan
D.9. Hubungan Investor	Tercantum pada: • Integritas Pelaporan Dan Sistem Teknologi Informasi • Akses Informasi Dan Data Perusahaan

E. Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris	
Prinsip & Rekomendasi	**Pemenuhan**
E.1. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris	Tercantum pada: • Direksi • Dewan Komisaris • Budaya Perusahaan
E.2. Struktur Direksi dan Dewan Komisaris	Tercantum pada: • Kode Etik • Direksi • Dewan Komisaris • Kode Etik • Budaya Perusahaan
E.3. Proses Direksi/Dewan Komisaris	Tercantum pada: • Direksi • Dewan Komisaris • Rapat Dewan Komisaris, Direksi Dan Rapat Gabungan • Sekretaris Perusahaan • Kebijakan Remunerasi • Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) • Penerapan Manajemen Risiko
E.4. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris	Tercantum pada • Direksi • Dewan Komisaris
E.5. Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris	Tercantum pada: • Direksi • Dewan Komisaris

Pernyataan *Bad Corporate Governance*

BCAS terus berupaya untuk menerapkan peraturan atau ketentuan terkait tata kelola perusahaan. Sepanjang tahun 2023, BCAS tidak melakukan praktik *bad corporate governance* yang dapat mengganggu penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Keterangan	Praktik
Adanya laporan sebagai perusahaan yang mencemari lingkungan	Nihil
Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat yang tidak diungkapkan dalam Laporan Tahunan	Nihil
Tidak terdapat pengungkapan segmen operasi pada perusahaan *listed*	N/A
Terdapat ketidaksesuaian antara Laporan Tahunan *hardcopy* dengan Laporan Tahunan *softcopy*.	Nihil
Ketidaksesuaian penyajian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan dengan peraturan yang berlaku dan SAK.	Nihil


Rp.
+1000
– 950

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Dalam menjalankan prinsip responsibilitas (*responsibility*) dalam GCG, BCAS berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practice*s) dan memastikan kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta praktik-praktik pengelolaan perusahaan yang etis dan bertanggung jawab. Selain itu, BCAS memiliki tanggung jawab dalam kepedulian lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial dengan program tanggung jawab sosial perusahaan kepada pemangku kepentingan.

Informasi lengkap mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta praktik keuangan keberlanjutan yang mengacu pada POJK No.51/POJK.03/2017 dan SEOJK No.16/POJK.04/2021, terdapat pada Laporan Keberlanjutan yang disusun sebagai buku terpisah dari Laporan Tahunan ini dan dapat diakses pada website https://www.bcasyariah.co.id/laporan-keberlanjutan.





Indeks Laporan Tahunan Berdasarkan SEOJK No.10/SEOJK.03/2020

Uraian	Halaman
Periode Tahunan	
Ruang Lingkup	
a. Laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan BUS tahunan meliputi:	
1) Informasi umum;	52-85
2) Informasi kinerja keuangan;	20-25, 88-161
3) Eksposur risiko dan permodalan;	120-157
4) Tata kelola;	161-272
5) Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan	290-384
6) Informasi terkait dengan kelompok usaha BUS.	81-83
b. Uraian masing-masing ruang lingkup sebagai berikut:	
1) Informasi Umum	
Informasi umum dalam laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan BUS paling sedikit meliputi:	
a) Ikhtisar Data Keuangan Penting	14-26
Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) Tahun Buku atau sejak BUS melakukan kegiatan usaha, bagi BUS yang melakukan kegiatan usaha kurang dari 2 (dua) tahun. Ikhtisar data keuangan penting paling sedikit meliputi:	
1. Net pendapatan setelah distribusi bagi hasil, imbalan, dan bonus;	22
2. Laba/rugi operasional;	22
3. Laba/rugi sebelum pajak;	22
4. Laba/rugi bersih;	22
5. Total laba/rugi komprehensif;	22
6. Laba bersih per saham;	22
7. Jumlah aset;	20
8. Jumlah liabilitas;	20
9. Jumlah ekuitas;	20
10. Aset produktif;	20
11. Dana pihak ketiga;	20
12. Pembiayaan yang diterima;	20
13. Rasio keuangan, paling sedikit meliputi:	23-24
i. Rasio KPMM;	v
ii. Rasio ROA;	v
iii. Rasio ROE;	v
iv. Rasio BOPO;	v
v. Rasio CIR;	v
vi. Persentase pelanggaran dan pelampauan BMPD;	v
vii. GWM;	v
viii. Rasio PDN;	v

Uraian	Halaman
ix. Rasio NPF *gross* dan net; dan	v
x. Rasio laba/rugi terhadap pendapatan; dan	v
14.Informasi lain yang relevan	26
b) Profil BUS	
Profil BUS paling sedikit meliputi:	
1. Nama BUS termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada Tahun Buku;	54
2. Informasi mengenai kantor pusat BUS yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai BUS meliputi:	54-55
i. Alamat;	v
ii. Nomor telepon;	v
iii. Nomor faksimile;	v
iv. Alamat surat elektronik; dan	v
v. Alamat situs web;	v
3. Riwayat singkat BUS;	56
4. Visi dan misi BUS;	56-57
5. Kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada Tahun Buku, serta jenis produk dan aktivitas;	60-61
6. Struktur organisasi BUS, paling sedikit sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah direksi yang disertai dengan nama dan jabatan;	64-65
7. Susunan dan komposisi pemegang saham, yaitu nama pemegang saham dan persentase kepemilikan saham, termasuk:	81-82
i. Pemegang saham yang memiliki paling sedikit 5% (lima persen) saham BUS;	v
ii. Anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang memiliki saham BUS;	v
iii. Kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham BUS (jika ada); dan	v
iv. Informasi mengenai pemegang saham pengendali BUS sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan;	v
8. Profil direksi, dewan komisaris, dan DPS, paling sedikit meliputi:	
i. Susunan direksi, dewan komisaris, dan DPS, serta jabatan dan ringkasan riwayat hidup.	66-76
Dalam hal terdapat perubahan susunan anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau anggota DPS yang terjadi setelah Tahun Buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan, susunan yang dicantumkan yaitu susunan direksi, dewan komisaris, dan/atau DPS sebelum dan setelah perubahan;	v
ii. Foto terbaru;	v
iii. Usia;	v
iv. Kewarganegaraan;	v
v. Riwayat pendidikan;	v
vi. Riwayat jabatan, meliputi informasi:	v
(i) Nomor dan tanggal akta pengesahan, persetujuan, dan/atau pencatatan dari instansi yang berwenang atas penunjukan sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS;	v
(ii) Rangkap jabatan anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS (jika ada); dan	v
(iii) Pengalaman dan periode kerja, baik di dalam maupun di luar BUS;	v
(iv) Pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS selama Tahun Buku (jika ada); dan	v

Uraian	Halaman
(v) Hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali (jika ada) dan nama anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali tersebut;	v
9. Profil singkat pejabat eksekutif, yang meliputi susunan, jabatan, dan ringkasan riwayat hidup;	77
10. Jumlah pegawai dan deskripsi sebaran tingkat pendidikan dan usia pegawai dalam Tahun Buku;	78-79
11. Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang.	83-84
Dalam hal terdapat lembaga dan/atau profesi penunjang yang memberikan jasa secara berkala kepada BUS, misalnya kantor akuntan publik dan notaris, diungkapkan informasi mengenai jasa yang diberikan, komisi (*fee*), dan periode penugasan; dan	v
12. Penghargaan dan/atau sertifikasi yang diterima BUS, baik yang berskala nasional maupun internasional dalam Tahun Buku terakhir (jika ada), yang meliputi:	8-11
i. Nama penghargaan dan/atau sertifikasi;	v
ii. Badan atau lembaga yang memberikan penghargaan dan/atau sertifikasi; dan	v
iii. Masa berlaku penghargaan dan/atau sertifikasi (jika ada).	v
c) Laporan direksi	40-46
Laporan direksi paling sedikit meliputi uraian singkat mengenai kinerja BUS yang terdiri atas:	
1. Strategi dan kebijakan yang ditetapkan;	42-43
2. Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan;	41-42
3. Kendala yang dihadapi BUS;	45
4. Gambaran tentang prospek usaha;	45
5. Penerapan tata kelola BUS;	44
6. Perubahan komposisi anggota direksi dan alasan perubahannya (jika ada);	45
7. Aktivitas utama;	41-43
8. Teknologi informasi;	43
9. Penyaluran pembiayaan kepada nasabah UMKM;	43-44
10. Persentase imbalan penghimpunan dan penyaluran dana;	44
11. Perkembangan perekonomian dan target pasar;	41
12. Jaringan kerja dan mitra usaha di dalam dan/atau di luar negeri;	42
13. Jumlah, jenis, dan lokasi jaringan kantor BUS;	42
14. Kepemilikan direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham dalam kelompok usaha BUS;	42
15. Perubahan penting yang terjadi pada BUS dan kelompok usaha BUS dalam tahun yang bersangkutan;	N/A
16. Hal penting yang diperkirakan terjadi pada masa mendatang; dan	45
17. Sumber daya manusia, meliputi jumlah, tingkat pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia.	44
d) Laporan dewan komisaris	30-34
Laporan dewan komisaris paling sedikit meliputi:	
1. Penilaian terhadap kinerja direksi mengenai pengelolaan BUS;	31
2. Hasil pengawasan terhadap implementasi strategi BUS;	32
3. Tanggapan atas prospek usaha BUS yang disusun oleh direksi;	33
4. Tanggapan atas penerapan tata kelola BUS;	32
5. Perubahan komposisi anggota dewan komisaris dan alasan perubahannya (jika ada); dan	33
6. Frekuensi dan mekanisme pemberian nasihat kepada anggota direksi.	32
2) Informasi Kinerja Keuangan	88-161

Uraian	Halaman
Informasi kinerja keuangan meliputi analisis dan pembahasan manajemen yang memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lain dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam Tahun Buku, yang paling sedikit meliputi:	
a) Tinjauan kinerja per segmen usaha antara lain segmen konsumer, segmen ritel, atau segmen korporasi paling sedikit mengenai:	89
1. Pendapatan; dan	97
2. Profitabilitas;	97
b) Tinjauan kinerja keuangan yang mencakup perbandingan kinerja keuangan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, penjelasan mengenai penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, yang paling sedikit meliputi:	
1. Penyaluran dana (investasi dan pembiayaan) dan total aset;	90-92
2. Dana pihak ketiga dan sumber pendanaan lain;	94
3. Ekuitas;	96
4. Pendapatan, beban, laba/rugi, penghasilan komprehensif lain, dan total laba/rugi komprehensif; dan	96-98
5. Arus kas;	99-100
c) Analisis kualitas aset produktif dan rasio keuangan;	100
d) Struktur permodalan;	110
e) Informasi atau fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan publik (jika ada);	111
f) Aspek pemasaran produk dan aktivitas BUS, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar;	158-160
g) Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) Tahun Buku terakhir (jika ada), paling sedikit:	112
1. Kebijakan dividen;	112
2. Tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen nonkas;	v
3. Jumlah dividen per saham, baik berupa kas maupun nonkas;	v
4. Jumlah pembayaran dividen per tahun;	v
5. Perubahan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berpengaruh signifikan terhadap BUS dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan	115-116
6. Perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada);	116
h) Laporan distribusi bagi hasil;	41-42
i) Laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf; dan	42
j) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.	42
3) Eksposur Risiko dan Permodalan	120-157
Ruang lingkup eksposur risiko dan permodalan mengacu pada Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.	v
4) Tata Kelola	162-272
a) Informasi tata kelola	162-272
Dalam hal BUS mengungkapkan informasi tata kelola sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan, ruang lingkup informasi tata kelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.	v
b) Laporan Keberlanjutan	Disajikan terpisah
1. Laporan keberlanjutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.	v

Uraian	Halaman
Dalam hal BUS menyusun laporan keberlanjutan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan, ruang lingkup laporan keberlanjutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.	v
2. Laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan BUS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas Informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan meliputi kebijakan, jenis program, dan biaya yang dikeluarkan, antara lain terkait aspek:	
i. Lingkungan hidup;	v
ii. Praktik ketenagakerjaan;	v
iii. Praktik kegiatan institusi yang sehat;	v
iv. Konsumen; dan	v
v. Pengembangan masyarakat.	v
Dalam hal BUS menyajikan informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan pada laporan tersendiri seperti laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau laporan keberlanjutan (*sustainability report*), BUS dikecualikan untuk mengungkapkan informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan.	v
5) Laporan Keuangan yang Telah Diaudit	290-384
a) Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi:	295-300
b) Laporan posisi keuangan;	301-303
c) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;	304-305
d) Laporan perubahan ekuitas;	306
e) Laporan arus kas; dan	307-308
f) Catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi mengenai komitmen dan kontinjensi.	312-384
6) Informasi terkait dengan Kelompok Usaha BUS	
Bagi BUS yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha dan/atau memiliki Entitas Anak, menambahkan laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan dengan:	
a) Struktur kelompok usaha BUS yang meliputi:	81-83
1. Struktur kelompok usaha BUS, yang antara lain terdiri dari BUS, Entitas Anak, perusahaan terelasi, Entitas Induk sampai dengan *ultimate shareholder*;	v
2. Struktur keterkaitan kepengurusan dalam kelompok usaha BUS; dan	v
3. Pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain (*shareholders acting in concert*).	v
Pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain adalah pemegang saham perorangan atau entitas yang memiliki tujuan bersama yaitu mengendalikan BUS, berdasarkan atau tidak berdasarkan suatu perjanjian;	v
b) Transaksi antara BUS dengan pihak berelasi dalam kelompok usaha BUS, dengan memperhatikan hal sebagai berikut:	113-114
1. Informasi transaksi dengan pihak berelasi, baik yang dilakukan BUS maupun yang dilakukan oleh setiap entitas di dalam kelompok usaha BUS di bidang keuangan;	v
2. Pihak berelasi adalah pihak-pihak sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan;	v
3. Jenis transaksi dengan pihak berelasi, antara lain:	v
i. Kepemilian silang (*cross shareholding*);	v
ii. Transaksi dari suatu kelompok usaha yang bertindak untuk kepentingan kelompok usaha lain;	v
iii. Pengelolaan likuiditas jangka pendek dalam kelompok usaha;	v
iv. Penyediaan dana yang diberikan atau diterima oleh entitas lain dalam satu kelompok usaha;	v

Uraian	Halaman
v. Eksposur kepada pemegang saham mayoritas antara lain dalam bentuk pinjaman, komitmen, dan kontinjensi; dan	v
vi. Pembelian, penjualan, dan/atau penyewaan aset dengan entitas lain dalam suatu kelompok usaha, termasuk yang dilakukan dengan *repurchase agreement* (*repo*);	v
c) Transaksi dengan pihak berelasi yang dilakukan oleh setiap entitas dalam kelompok usaha BUS di bidang keuangan;	113-114
d) Penyediaan dana, komitmen, atau fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan itu dari setiap entitas yang berada dalam satu kelompok usaha dengan BUS kepada nasabah dan/atau pihak yang telah memperoleh penyaluran dana dari BUS;	v
e) Adanya larangan, batasan, dan/atau hambatan signifikan lain untuk melakukan transfer dana atau untuk pemenuhan modal yang dipersyaratkan oleh otoritas (*regulatory capital*) antara BUS dengan entitas lain dalam satu kelompok usaha; dan	v
f) Nama dan alamat Entitas Anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana BUS memiliki pengendalian bersama entitas, beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi BUS tersebut (jika ada).	83
c. BUS yang merupakan Emiten dan/atau Perusahaan Publik menambahkan ruang lingkup informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan tahunan emiten atau perusahaan publik.	v

Indeks Pemenuhan Rekomendasi Tata Kelola

No	Referensi	Halaman
1	Kesimpulan umum dari hasil *self assessment*	264
2	Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris	81, 176
3	Kepemilikan saham anggota Direksi	81, 184-185
4	Hubungan keuangan anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi BUS	196
5	Hubungan keuangan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi lain	196
6	Hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi BUS	196
7	Hubungan keluarga anggota Direksi dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi lain	196
8	Rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris	176-177
9	Rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah	190
10	Struktur komite, keanggotaan komite, dan keahlian anggota komite	202-227
11	Daftar konsultan, penasihat atau yang dipersamakan dengan itu yang digunakan oleh BUS	83-84, 239-240
12	Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya (*remuneration package*) yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah	198-202
13	Frekuensi rapat Dewan Komisaris	192
14	Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah	190
15	Jumlah penyimpangan (internal *fraud*)	250
16	Jumlah permasalahan hukum	256
17	Transaksi yang mengandung benturan kepentingan	114, 255
18	*Buy back shares* dan/atau *buy back* obligasi	85, 259
19	Penyaluran dana untuk kegiatan sosial	Merujuk ke Laporan Keberlanjutan 2023
20	Pendapatan non halal	262

Alamat Jaringan Cabang

per 31 Desember 2023

Lokasi	Nama Cabang	Alamat Cabang	Nomor Telepon
JABODETABEK			
Jakarta	KC JATINEGARA	Jl. Jatinegara Timur No.72, Jakarta Timur 13310	(021) 8190072, 8505030, 8505035
Jakarta	KC MANGGA DUA	Ruko Agung Sedayu (Harco Mangga Dua), Blok E No.26 Jl. Mangga Dua Raya – Jakarta Pusat 10730	(021) 6123758-9, 6123761-2
Jakarta	KC SAMANHUDI	Komp.Perkantoran Mitra Krekot, Jl.K.H Samanhudi No.21 Jakarta Pusat 10710	(021) 3506706,3866457-9 3807770-71
Jakarta	KC SUNTER	Ruku Komplek Mitra Sunter No. B.11-12 Sunter Jakarta Utara	(021) 65837724, 65837725, 65837726
Jakarta	KCP KENARI	JL Sukarjo Wiryopranoto No 4 Jakarta Pusat	(021) 3914404-5
Jakarta	KCP KELAPA GADING	Gedung BCA KCP Kelapa Gading Raya Jl. Boulevard Raya Blok L No. 1 Kelapa Gading Jakarta Utara	(021) 45879429-30
Jakarta	KCP ULS TN ABANG	Gedung KCP BCA Tanah Abang Blok B, Gedung Pasar Tanah Abang Blok B lantai 5, kios No.3,5,6 Jl Fachrudin No. 78, 80, 82, Jakarta Pusat 10250	(021) 23573598
Jakarta	KCP ULS METRO PONDOK INDAH	Gedung BCA KCP Metro Pondok Indah Jln. Metro Pondok Indah UA 60 & 61 Jakarta Selatan 12310	(021) 7693823
Jakarta	KCP ULS PASAR MINGGU	Gedung BCA KCP Pasar Minggu Jln. Raya Pasar Minggu 6 Jakarta Selatan 12740	(021) 79188703
Jakarta	KCP ULS TANJUNG PRIOK	Gedung BCA KCU Tanjung Priok Jln. Enggano 22-23 Jakarta Utara 14310	(021) 43937937
Jakarta	KCP ULS MELAWAI	Gedung BCA KCP Blok M Jl. Melawai Raya 165 Blok C 1-3, Jakarta Selatan 12160	(021) 72780409
Jakarta	KCP ULS GUDANG PELURU	Gedung BCA KCP Gudang Peluru Komp. Gudang Peluru Blok A No. 23 - Jl. Kampung Melayu Besar - Jakarta Selatan 12830	(021) 83706303
Jakarta	KCP ULS KEMANG MANSION	Gedung BCA KCP Kemang Mansion Shopping Arcade The Mansion at Kemang, Jln. Kemang Raya No. 3-5 Jakarta Selatan 12730	(021) 29055560
Jakarta	KCP ULS PURI INDAH	Gedung BCA KCP Pasar Puri Indah Jl Raya Puri Indah Blok A/20-22, Kembangan Jakarta Barat 11610	(021) 58354757
Jakarta	KCP ULS PLUIT KENCANA	Gedung BCA KCP Pluit Kencana Jln. Taman Pluit Kencana Selatan No. 1-3 Jakarta Utara 14440	(021) 66678530
Jakarta	KCP ULS BINTARO UTAMA	Gedung BCA KCP Bintaro Utama Bintaro Jaya Blok E Kav. 3-5 Jl Bintaro Utama Rukan	(021) 22734410
Bekasi	KCP BEKASI	Komp. Pertokoan Pratama Plaza, Blok A 4/12, Jl Ir. H. Juanda No. 151, Bekasi 17111	()21) 8803011 – 2, 8811973
Bekasi	KCP PASAR KRANJI	JL. Raya Pemuda No. 7 Rt 005/Rw 004, Kecamatan Bekasi Barat	(021) 8866932, 88952463, 88953003
Bekasi	KCP ULS JUANDA BEKASI	Gedung BCA KCP Juanda Bekasi Jl. Ir H. Juanda No. 54 Bekasi 17113	(021) 88343599

Lokasi	Nama Cabang	Alamat Cabang	Nomor Telepon
Bekasi	KCP PONDOK GEDE	Pertokoan Jatimakmur Residence Jl Raya Jatimakmur No.A7 Jatimakmur, Pondok Gede, Bekasi	(021) 84903617, 84903618
Bekasi	KCP CIKARANG SELATAN	Pertokoan Metro Boulevard Blok A No. 14 Jl Niaga Raya Jababeka Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi	(021) 8971661, 8971684
Depok	KCP DEPOK	Komp. Ruko Kartini Jl Raya Citayem No B20 Rt 01 Rw 02 Kel. Depok Kec.Pancoran Mas, Depok	(021) 77200815, 77200827
Depok	KCP ULS MARGONDA DEPOK	Gedung BCA KCU Depok Jl. Margonda Raya No.182, Depok 16423	(021) 77218192
Bogor	KCP CILEUNGSI	Komp. Ruko Griya Kenari Mas A1 No. 13 Rt 16 Rw 10 Cileungsi Kidul, Bogor	(021) 82496628
Bogor	KCP ULS BOGOR	Gedung BCA KCU Bogor Jln. Ir Juanda 28, Bogor 16122	(0251) 8327255
Bogor	KCP ULS CIMANGGIS	Gedung BCA KCP Cimanggis Jln. Raya Bogor Km. 29, Cimanggis - Cibinong 16951	(021) 87714758
Tangerang	KCP ULS TANGERANG	Gedung BCA KCU Tangerang Jln. Kisamaun No. 57, Tangerang - Banten 15118	(021) 55770024
Tangerang	KCP CILEDUG	Ruko Dian Plaza Jl. Raden Patah No. 8A Ruko No. 12A, Kelurahan Sudimara, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang	(021) 73451916, 73451976
Tangerang	KCP PASAR ANYAR TANGERANG	Jl. KH Sholeh Ali No.3 Sukasari, Kota Tangerang	(021) 55732121, 55732123
Tangerang	KCP CIPUTAT (MCP)	Komp. Perkantoran Ciputat Lot Jl Dewi Sartika No. 22 Ciputat Tangerang Selatan	(021) 7425598, 7425631
Tangerang	KCP ULS BINTARO	Gedung BCA KCU Bintaro Bintaro Jaya Blok A-5 No.12 & 15 Sektor 7, Kel. Pondok Jaya, Kec. Pondok Aren	(021) 27622484
JAWA BARAT			
Bandung	KC BANDUNG	BCA KCU Dago Lt. 2 Jl. Ir. H. Juanda 118 Bandung	(022) 4267 425-27
Bandung	KCP ULS ASIA AFRIKA	BCA KCU Bandung Jl. Asia Afrika 122-124 Bandung 40261	(022) 253 2013
Bandung	KCP ULS KOTA BARU PARAHYANGAN	Gedung BCA KCP Kota Baru Parahyangan Jl.Panyawangan Kav.6 No.6 Kota Baru Parahyangan Bandung	(022) 87794368
Bandung	KCP ULS BUAH BATU BANDUNG	Gedung BCA KCP Buah Batu Jl. Buah Batu 192 Bandung	(022) 73517344
Cimahi	KCP ULS Cimahi	BCA KCP Cimahi Jl. Cimahi No. 533, Karangmekar, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat 40523	(022) 20685965
ACEH			
Banda Aceh	KC BANDA ACEH	Jl. Tgk. Daud Beureueh No. 44, Gampong Kuta Alam, Banda Aceh	(0651) 22484
Lhokseumawe	KCP LHOKSEUMAWE	JL Merdeka 13 - 14 Lhokseumawe	(0645) 43554
Bireuen	KCP ULS BIREUEN	JL Teuku Nyak Arief No. 205 (d/h Jl Mawar)	(0644) 21046
SUMATERA			
Medan	KC MEDAN	Jln. Asia No. 184 D Medan 20214	(061) 7365457, 7365401, 7365011

Lokasi	Nama Cabang	Alamat Cabang	Nomor Telepon
Medan	KCP ULS SETIABUDI MEDAN	Gedung BCA KCP Setiabudi Medan Jl. Setiabudi No. 150 A-B Medan	(061) 42405911
Palembang	KC PALEMBANG	Gedung BCA KCU Palembang JL Demang Lebar Daun No. 10 Palembang	(0711) 5560811, 5560966, 5560858
Palembang	KCP ULS A RIVAI PALEMBANG	Gedung BCA KCP A. Rivai Palembang Jl. Kapten Rivai 22 Palembang	(0711) 5735008
Palembang	KCP ULS SUDIRMAN PALEMBANG	Gedung BCA KCP Sudirman Palembang Jl. Jenderal Sudirman No.2936A, RT.015 RW.06, Kel. 20 Ilir III, Kec. Ilir Timur I, Palembang	(0711) 7445397
Bandar Lampung	KC BANDAR LAMPUNG	Gedung BCA KCP Teluk Betung Jl. Ikan Gurame No. 24-26, Bandar Lampung	(0721) 5609956
Metro Lampung	KCP METRO LAMPUNG	Jl. ZA Pagar Alam Ruko Sumur Bandung Blok C no.11 Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro Lampung	(0725) 2202019, 2202020, 2202021
JAWA TENGAH			
Semarang	KC SEMARANG	Jl. Kapten Pierre Tendean 13, Semarang	(024) 3557444, 3580530
Semarang	KCP ULS MAJAPAHIT	Gedung BCA KCP Majapahit Jl. Majapahit 112 Semarang 50161	(024) 76584661
Semarang	KCP ULS PEMUDA SEMARANG	Gedung BCA KCU Semarang Jl Pemuda No. 90-92 Semarang	(024) 3559779
Solo	KC SOLO	Jln Slamet Riyadi 488 Solo 57142	(0271) 724951, 726992, 735636,
Solo	KCP ULS SOLO SLAMET RIYADI	Gedung BCA KCU Solo Slamat Riyadi Jln. Brigjen Slamet Riyadi 3 Solo	(0271) 633775
Solo	KCP ULS SINGOSAREN SOLO	Gedung BCA KCP Singosaren Jl. Dr. Rajiman 197 Solo	(0271) 2935588
Yogyakarta	KC YOGYAKARTA	Gedung BCA KCP P. Mangkubumi Jln. P. Mangkubumi 5-7 Yogyakarta 55271	(0274) 2920549,2920550, 2920552
Yogyakarta	KCP ULS SUDIRMAN YOGYAKARTA	Gedung BCA KCU Yogyakarta Jl Jendral Sudirman No. 49-51 Yogyakarta	(0274) 5015302
Kudus	KCP ULS KUDUS	Gedung BCA KCU Kudus Jln. A Yani 91 Kudus	(0291) 2913130
Sragen	KCP ULS SRAGEN SOLO	Gedung BCA KCP Sragen Jl. Sukowati 185 Sragen	(0271) 8851245
JAWA TIMUR			
Surabaya	KC SURABAYA	Jl. Bratang Binangun RMI A-24 Bratajaya, Gubeng, Surabaya 60284	(031) 99453612-13
Surabaya	KCP ULS DARMO SURABAYA	Gedung BCA KCU Darmo Jl. Raya Darmo No.5 Surabaya 60265	(031) 5678137
Surabaya	KCP ULS VETERAN	Gedung BCA KCU Vetaran Jln. Veteran 18-24, Surabaya 60175	(031) 3572956
Surabaya	KCP ULS SIDOARJO	Gedung BCA KCU Sidoarjo Jln. Ahmad Yani 39 A, Sidoarjo 61212	(031) 8968805, 8962611
Surabaya	KCP ULS KAPAS KRAMPUNG	Gedung BCA KCP Kapas Krampung Jln. Kapas Krampung 126-126A-B, Surabaya 60136	(031) 5047946
Surabaya	KCP ULS PONDOK CHANDRA	Gedung BCA KCP Pondok Chandra Komp. Pertokoan Pondok Chandra, Jln. Palem TC 09, Surabaya 61151	(031) 8675613
Surabaya	KCP ULS PERAK BARAT/PUCANG ANOM	Gedung BCA KCP Pucang Anom Jln. Pucang Anom Timur 18 Surabaya	(031) 99022180

Lokasi	Nama Cabang	Alamat Cabang	Nomor Telepon
Surabaya	KCP ULS TAMAN PONDOK INDAH	Gedung BCA KCP Taman Pondok Indah Ruko Taman Pondok Indah blok A-16 Surabaya 61174	(031) 99423455
Surabaya	KCP Sungkono	Jl. Mayjend Sungkono Komp. Pertokoan Darmo Park 1 Blok 2-A/1 Surabaya 60256	(031) 568 0373-74
Sidoarjo	KCP ULS SEPANJANG	Gedung BCA KCP Sepanjang Jln. Raya Wonocolo 59, Taman Sepanjang - Sidoarjo 61257	(031) 7887183
Sidoarjo	KCP ULS GEDANGAN	Gedung BCA KCP Gedangan Jl Raya 18 Gedangan Sidoarjo 61254	(031) 855 6993
Gresik	KCP ULS GRESIK	Gedung BCA KCU Gresik Jl. R.A. Kartini 98B - 100 Gresik 61122	(031) 3976869
Malang	KCP MALANG	Gedng BCA KCP Kudusan Jl KH Zainul Arifin 78 Malang	(0341) 352671, 357146, 355980,357312
Pandaan	KCP ULS PANDAAN	Gedung BCA KCP Pandaan Jln. RA. Kartini 2, Jogosari - Pandaan	(0343) 6743611
Mojokerto	KCP ULS MOJOKERTO	Gedung BCA KCU Mojokerto Jl. H.O.S. Cokroaminoto 5 Mojokerto	(0321) 5285631
Kepanjen	KCP ULS KEPANJEN	Gedung BCA KCP Kepanjen Jl. Jend. Yani 99 (Jl.Pahlawan), Kepanjen	(0341) 3906144
Kediri	KCP KEDIRI	Gedung BCA KCU Kediri Jl. Brawijaya 8 Kediri 64123	(0354) 2891150
Pasuruan	KCP PASURUAN	Jl. Perwira 200 Pasuruan 67111 (Jl Soekarno Hatta, Bangilan Panggungrejo, Pasuruan)	(0343) 5631468, 5631460, 5631359,
Banyuwangi	KCP BANYUWANGI	Gedung BCA KK Sudirman Banyuwangi Jl Jendral Sudirman No 85 - 87 Banyuwangi 68415	(0333) 2890895
SULAWESI			
Makassar	KC PANAKKUKANG	Gedung BCA KCU Panakkukang Jl. Boulevard Blok F5 No. 5 Panakkukang, Makassar	(0411) 4763269, 4763281
LSBU			
Jawa Barat	LSBU BEKASI	Gedung BCA KCU Bekasi Jl. Jend. Ahmad Yani No. 9 RT.01 RW.05 Bekasi17141	(021) 29383900
Jawa Barat	LSBU CIBUBUR	Gedung BCA KCU Cibubur Jl. Alternatif Cibubur RT.005/09 Kel. Harjamukti, Cibubur 16454	(021) 29066982
Jawa Barat	LSBU KARAWANG	Jl. Panatayuda 1 No. 37, Karawang 41312	(0267) 403674
Jawa Timur	LSBU BANGKALAN	Jl. Trunojoyo 15 A, Bankalan 69112	(031) 3095648
Jawa Timur	LSBU TUBAN	Jl. Panglima Sudirman 35, Tuban 62314	(0356) 328611
Jawa Timur	LSBU BABAT	Jl. Raya No. 23 Banaran, Babat, 62271	(0322) 3391236
Jawa Timur	LSBU PAMEKASAN	Jl. Jokotole 4, Pamekasan 69313	(0324) 321090
Jawa Timur	LSBU SAMPANG	Jl. KH Wahid Hasyim No. 17, Sampang 69213	(0323) 321414
Jawa Barat	LSBU CIREBON	Jl. Yos Sudarso 27	(0231) 232701, 234348-9
Jawa Barat	LSBU GARUT	Jl. Ciledug 162	(0262) 231304 (hunting)
Jawa Barat	LBU SUKABUMI	Jl. A. Yani 33-35	(0266) 224455 (hunting)
Jawa Barat	LSBU TASIKMALAYA	Jl. HZ Mustofa 300	(0265) 332005 (hunting)
Jawa Barat	LSBU CIANJUR	Jl. Hos Cokroaminoto 56-58	(0263) 262182, 262158, 262067-9

Lokasi	Nama Cabang	Alamat Cabang	Nomor Telepon
Jawa Barat	LSBU SUBANG	Jl. Otto Iskandardinata 37	(0260) 411602, 411604, 411605
Jawa Barat	LSBU PURWAKARTA	Jl. Jend. Sudirman 85	(0264) 201311 (hunting)
Jawa Barat	LSBU INDRAMAYU	Jl. D.I. Panjaitan No. 69	(0234) 272802, 275031-3
Jawa Barat	LSBU JATIWANGI	Jl. Jend. A. Yani 224, Jatiwangi	(0233) 881164, 881394
Jawa Barat	LSBU CIAMIS	Jl. A. Yani 33	(0265) 771428, 771633-4
Jawa Barat	LSBU KUNINGAN CIREBON	Jl. Siliwangi 95	(0232) 875680-1, 871256
Jawa Barat	LSBU CIBADAK	Jl. Siliwangi No. 81 A & B Cibadak	(0266) 531380
Jawa Barat	LSBU SUMEDANG	Jl. Mayor Abdurahman 181-183	(0261) 201121, 201928
Jawa Timur	LSBU PROBOLINGGO	Jl. Suroyo 28	(0335) 421148-436-638, 422328-374-401
Jawa Timur	LSBU SITUBONDO	Jl. Diponegoro 68	(0338) 671155 (hunting), 672011, 672156, 672267
Jawa Timur	LSBU TULUNGAGUNG	Jl. Diponegoro 54	(0355) 323105-7, 327543, 325954
Jawa Timur	LSBU BLITAR	Jl. Cepaka No. 17	(0342) 807888
Jawa Timur	LSBU MADIUN	Jl. Jend. Sudirman 79-81	(0351) 463443 (hunting)
Jawa Timur	LSBU PASURUAN	Jl. Soekarno Hatta No. 33	"(0343) 426651,426652, 426653, 426654 "
Jawa Timur	LSBU KERTOSONO	Jl. A. Yani No. 114	(0358) 551248, 551577
Jawa Timur	LSBU BANYUWANGI	Jl. Ahmad Yani No. 24-26	(0333) 424250 (hunting)
Jawa Timur	LSBU BONDOWOSO	Jl. KH Wahid Hasyim 63	(0332) 421514
Jawa Timur	LSBU LUMAJANG	Jl. Panglima Sudirman 27	(0334) 881326, 882126
Jawa Timur	LSBU MAGETAN	Jl. A. Yani No. 25 B	(0351) 8198000
Jawa Timur	LSBU NGAWI	Jl. Sultan Agung No. 52	(0351) 747351
Jawa Tengah	LSBU PURWOKERTO	Jl. Jend. Sudirman 391 A	(0281) 632111 (hunting)
Jawa Tengah	LSBU CILACAP	Jl. A. Yani 118	(0282) 535120-1, 531281
Jawa Tengah	LSBU PURWODADI	Jl. MT. Haryono 2	(0292) 421401
Jawa Tengah	LSBU MAGELANG	Jl. A. Yani 1	(0293) 367777 (hunting)
Jawa Tengah	LSBU PEKALONGAN	Jl. Diponegoro 27	(0285) 424783 (hunting), 424476-7
Jawa Tengah	LSBU SALATIGA	Jl. Diponegoro 15	(0298) 326060-61
Jawa Tengah	LSBU TEGAL	Jl. AR. Hakim 2	(0283) 356889 (hunting)
Jawa Tengah	LSBU BANJARNEGARA	Jl. Pemuda 72	(0286) 591428, 591429, 595069, 592420
Jawa Tengah	LSBU WONOSOBO	Jl. A. Yani 3	(0286) 321118, 322457
Jawa Tengah	LSBU WONOGIRI	Jl. Jend. Sudirman No. 233	(0273) 321451-2
Jawa Tengah	LSBU PARAKAN	Jl. Kosasih No. 24, Parakan	(0293) 596604, 596667

Lokasi	Nama Cabang	Alamat Cabang	Nomor Telepon
Jawa Tengah	LSBU JEPARA	Jl. Pemuda 28-32	(0291) 592392-5 (hunting)
Jawa Tengah	LSBU KEDUNGWUNI	Jl. Raya Kedungwuni No. 131, Kel Kedungwuni Barat, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan	(0285) 785408-09; 785412
Jawa Tengah	LSBU KUTUARJO	Jl. Diponegoro No. 93, Kutoarjo	(0275) 641265
Jawa Tengah	LSBU BOYOLALI	Jl. Pandanaran 58 Rancah Wetan RT 01 / RWXI, Siswodipuran	(0273) 321739, 3286262
Jawa Tengah	LSBU PURBALINGGA	Jl. Jend. Sudirman No. 80	(0281) 891410, 891422, 891488
Jawa Tengah	LSBU GOMBONG	Jl. Yos Sudarso No. 406, Gombong	(0287) 471666
Jakarta Selatan	LSBU BLOK A CIPETE	Jl. RS Fatmawati 6 A	(021) 7658605 (hunting)
Jakarta Pusat	LSBU CITY TOWER	The City Tower, Ground Floor, Jl. MH. Thamrin No. 81	(021) 31996069
Jakarta Selatan	LSBU KEBAYORAN BARU	Jl. Melawai Raya Blok B No. III RT. 007 / RW. 005 Kebayoran Baru	(021) 7205082, 7207011, 7207648
Jakarta Selatan	LSBU KUNINGAN	Gedung Menara Karya Ground Floor, Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2	(021) 57944500
Jakarta Selatan	LSBU MENARA BIDAKARA	Menara Bidakara Lt. Lobby dan Lt. 1, Jl. Gatot Subroto Kav.71-73	(021) 83700809 (hunting)
Jakarta Selatan	LSBU PONDOK INDAH	Wisma BCA Pondok Indah, Jl. Metro Pondok Indah	(021) 29973555
Jakarta Selatan	LSBU SCBD	Equity Tower Ground Floor Unit D & Lantai 8 Unit E, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Lot 9	(021) 5153333
Jakarta Selatan	LSBU SUDIRMAN	Gedung Chase Plaza, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21	(021) 25989898
Jakarta Pusat	LSBU THAMRIN	Menara BCA, Grand Indonesia, Jl. MH Thamrin No. 1	(021) 23588000 (hunting)
Jakarta Selatan	LSBU FATMAWATI	Jl. RS Fatmawati 1	(021) 7500199, 7503675
Jakarta Pusat	LSBU SABANG	Jl. H. Agus Salim 57 B	(021) 31922488
Jakarta Pusat	LSBU MENTENG	Jl. HOS Cokroaminoto No. 83	(021) 3905401-2
Jakarta Selatan	LSBU PERMATA HIJAU	Pertokoan Permata Hijau Blok D No. C27-28 dan B22	(021) 5308692, 5308694, 5308698
Jakarta Selatan	LSBU KEMANG	Jl. Raya Kemang No. 60	(021) 7193323, 7193327, 7193329
Jakarta Selatan	LSBU WARUNG BUNCIT	Gedung Multika, Jl. Mampang Prapatan Raya 71-73	(021) 7975146, 7975149, 7975224
Jakarta Selatan	LSBU SANTA	Jl. Wolter Monginsidi 54	(021) 2702801
Jakarta Pusat	LSBU GUNSA 45	Jl. Gunung Sahari 45	(021) 6012123 (hunting), 6012129-30
Jakarta Timur	LSBU KALIMALANG	Jl. Tarum Barat Blok E No. 5	(021) 8643295 (hunting)
Jakarta Utara	LSBU KELAPA GADING	Menara Satu Sentra Kelapa Gading Lt. Dasar, 1, 9 dan 10	(021) 29385709, 29385710
Jakarta Timur	LSBU MATRAMAN	Jl. Matraman Raya 14-16	(021) 8581259 (hunting)
Jakarta Timur	LSBU RAWAMANGUN	Jl. Paus 81	(021) 4750073, 4750075, 4894602
Jakarta Utara	LSBU SUNTER	Jl. Danau Sunter Utara Blok A Kav. No. 3, Sunter Agung, Jakarta	(021) 6401850
Jakarta Selatan	LSBU WISMA MILLENIA	Jl. MT. Haryono Kav. 16	(021) 83709650

Lokasi	Nama Cabang	Alamat Cabang	Nomor Telepon
Jawa Barat	LSBU SILIWANGI	Jl. Siliwangi 101	(0251) 313737 (hunting)
Jakarta Pusat	LSBU CEMPAKA PUTIH RAYA	Jl. Cempaka Putih Raya No. 118 B,C,D	(021) 4266907
Jakarta Utara	LSBU SUNTER AGUNG	Jl. Agung Utara Raya Blok A 360 D No. 50-51, Sunter Agung	(021) 64716327, 6518755
Jakarta Timur	LSBU DEWI SARTIKA	Jl. Dewi Sartika 189	(021) 8093875, 8094425
Jakarta Barat	LSBU ASEMKA	Jl. Asemka 27-30	(021) 6901771 (hunting)
Jakarta Barat	LSBU GAJAH MADA	Jl. Gajah Mada 112 B-C-D	(021) 6302111 (hunting)
Jakarta Utara	LSBU MANGGA DUA RAYA	Jl.Mangga Dua Raya Blok C-5 Kav. No.1	(021) 6011410 (hunting)
Jakarta Utara	LSBU MUARA KARANG	Jl. Muara Karang Timur Blok B VIII No.116-117	(021) 6603032 (hunting), 6679790 (hunting)
Jakarta Pusat	LSBU PANGERAN JAYAKARTA	Jl. Pangeran Jayakarta No. 127	(021) 2601151, 2601152
Jakarta Utara	LSBU PANTAI INDAH KAPUK	Jl. Pantai Indah Kapuk Utara I Blok F, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan	(021) 22512068
Jakarta Pusat	LSBU PASAR BARU	Jl. KH Samanhudi 8	(021) 2310411 (hunting)
Jakarta Utara	LSBU PLUIT	Jl. Pluit Selatan Raya, Komp. Perkantoran Landmark Pluit Blok A No. 8	(021) 6601718
Jakarta Pusat	LSBU SURYOPRANOTO	Jl. Suryopranoto 40	(021) 6331742 (hunting), 6304171
Jakarta Barat	LSBU TAMAN DUTA MAS	Jl. Tubagus Angke No. 10 ABC dan 11 H	(021) 56941971 (hunting)
Jakarta Barat	LSBU KHM MANSYUR	Jl. KHM Mansyur 246 A & B	(021) 6254641 (hunting)
Jakarta Barat	LSBU GROGOL MUWARDI	Jl. Muwardi 1/44	(021) 5665417-9
Jakarta Barat	LSBU DAAN MOGOT	Jl. Daan Mogot No. 95	(021) 5663824-8
Jakarta Barat	LSBU GREEN GARDEN	Perum. Green Garden Blok A. 14 No. 32-34	(021) 5824488, 5817342
Jakarta Barat	LSBU KEDOYA PERMAI	Ruko Taman Kedoya Permai, Blok A 1A No.4-5	(021) 5310055 (hunting), 5344939 (hunting)
Jakarta Barat	LSBU PURI INDAH	Gedung C3 Lt. 1-3 Komplek Puri Indah Blok 02 No. 1-3, Kembangan	(021) 5802635 (Hunting)
Jakarta Pusat	LSBU WAHID HASYIM	Jl. KH. Wahid Hasyim No. 183 A-B	(021) 3150556, 31924456 (hunting)
Jakarta Barat	LSBU WISMA ASIA	Wisma Asia, Jl. S. Parman Kav. 79	(021) 5638888 (hunting)
Jakarta Barat	LSBU KEPA DURI	Jl. Mangga Raya 20	(021) 5663978 (hunting)
Jakarta Barat	LSBU KEBON JERUK	Komp. Taman Kebon Jeruk, Jl. Meruya Ilir Blok B 6-9	(021) 5846187 (hunting)
Jakarta Pusat	LSBU METRO TANAH ABANG	Pusat Grosir Metro Tanah Abang 2 Lt. 7 No. 10 Jl. KH Wahid Hasyim No. 189	(021) 30036841-3
Jakarta Barat	LSBU KS TUBUN	Gd.Graha Indramas Lt.dasar, Jl. AIP II KS Tubun Raya No. 77	(021) 53673301-3
Jakarta Barat	LSBU TOMANG RAYA	Jl. Tomang Raya 64	(021) 5669000 (hunting)

Laporan Keuangan





PT Bank BCA Syariah

Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2023
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/
Financial statements as of December 31, 2023 and
for the year then ended with independent auditors' report

BCA syariah

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 PT BANK BCA SYARIAH

BOARD OF DIRECTOR'S STATEMENT REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENT AS AT AND FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2023 PT BANK BCA SYARIAH

Kami yang bertanda tangan dibawah ini: / *We, the undersigned:*

1.	Nama / Alamat Kantor / Jabatan	:	**Yuli Melati Suryaningrum** Jl. Jatinegara Timur No. 72 Jakarta Timur 13310 Presiden Direktur/*President Director*	:	*Name* *Office address* *Title*
2	Nama / Alamat Kantor / Jabatan	:	**Pranata** Jl. Jatinegara Timur No. 72 Jakarta Timur 13310 Direktur/*Director*	:	*Name* *Office address* *Title*

Menyatakan bahwa: / *declare that:*

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Bank BCA Syariah ("Bank");
2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar.
   b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab penuh atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan.

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the financial statement of PT Bank BCA Syariah ("the Bank");*
2. *The Bank's financial statement have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. *a. All information in Bank's financial statements have been fully and correctly disclosed.*
   b. The Bank's financial statements do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit information or material fact.
4. *We are responsible for the Bank's internal control systems.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. / *The statement has been made truthfully.*

Jakarta, 19 Januari/*January* 2024
PT Bank BCA Syariah
Atas nama dan mewakili Dewan Direksi/*For and on behalf of Board of Directors*

BCA syariah

Yuli Melati Suryaningrum
Presiden Direktur/
President Director

Pranata
Direktur/
Director

BCA SYARIAH
Direktorat Jenderal Pajak
METERAI TEMPEL
190124 1647
Rp10000
60631 125262
PE1533

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT BANK BCA SYARIAH
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT BANK BCA SYARIAH
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Daftar Isi / ***Table of Contents***

Laporan Auditor Independen		*Independent Auditors' Report*
Laporan Posisi Keuangan	1-3	*Statement of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	4-5	*Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas	6	*Statement of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas	7-8	*Statement of Cash Flows*
Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil	9	*Statement of Reconciliation of Income and Profit Sharing*
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat	10	*Statement of Sources and Distribution of Zakat Funds*
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	11	*Statement of Sources and Uses of Qardhul Hasan Funds*
Catatan atas Laporan Keuangan	12-84	*Notes to the Financial Statements*

****

Purwantono, Sungkoro & Surja

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Tel : +62 21 5289 5000
Fax: +62 21 5289 4100
ey.com/id

The original report included herein is in Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00018/2.1032/AU.4/07/0703-1/1/I/2024

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Bank BCA Syariah

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank BCA Syariah ("Bank") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi basil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bank tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan tebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Bank berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Independent Auditors' Report

Report No. 00018/2.1032/AU.4/07/0703-1/1/I/2024

The Shareholders and the Boards of Commissioners and Directors
PT Bank BCA Syariah

Opinion

We have audited the financial statements PT Bank BCA Syariah ("Bank") is attached, which consists of statements of the financial position report dated December 31, 2023 and statements of profit and loss and other comprehensive income, statements of changes in equity, statement of cash flow, statements of reconciliation report on income and profit sharing, statements of sources and distribution of zakat funds, and statements of sources and use of qardhul hasan funds for the year ended on that date, and notes to financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Bank as of December 31, 2023, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants ("IICPA"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Bank in accordance with the ethical requirements relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with such requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

The original report included herein is in Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00018/2.1032/AU.4/07/0703-1/1/I/2024 (lanjutan)

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. 00018/2.1032/AU.4/07/0703-1/1/I/2024 (continued)

Hal lain

Laporan keuangan PT Bank BCA Syariah tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh auditor independen lain dengan laporan No. 00017/2.1051/AU.1/07/1692-1/1/I/2023 tanggal 20 Januari 2023 yang menyatakan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan tersebut.

Other matter

The financial statements of PT Bank BCA Syariah as of December 31, 2022 and for the year ended, were audited by other independent auditor's whose report No. 00017/2.1051/AU.1/07/1692-1/1/I/2023 dated January 20, 2023 expressesed an unmodified opinion on such financial statements.

Informasi lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam Laporan Tahunan 2023 ("Laporan Tahunan"). Laporan Tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor independen ini.

Other information

Management is responsible for the other information. Other information comprises the information included in the Annual Report 2023 (the "Annual Report"). The Annual Report is expected to be made available to us after the date of this independent auditor's report.

Opini audit kami atas laporan keuangan terlampir tidak mencakup Laporan Tahunan, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas Laporan Tahunan tersebut.

Our audit opinion on the accompanying financial statements does not cover the Annual Report, and accordingly, we do not express any form of assurance on the Annual Report.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan terlampir, tanggung jawab kami adalah untuk membaca Laporan Tahunan ketika tersedia dan, dalam melaksanaannya, mempertimbangkan apakah Laporan Tahunan mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan terlampir atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

In connection with our audit of the accompanying financial statements, our responsibility is to read the Annual Report when it becomes available and, in doing so, consider whether the Annual Report is materially inconsistent with the accompanying financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

Ketika kami membaca Laporan Tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan melakukan tindakan yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

When we read the Annual Report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions based on the applicable laws and regulations.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00018/2.1032/AU.4/07/0703-1/1/I/2024 (lanjutan)

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. 00018/2.1032/AU.4/07/0703-1/1/I/2024 (continued)

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan

Responsibilities of management and those charged with governance for the [consolidated] financial statements

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Bank dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Bank atau menghentikan operasinya atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, and using the going concern basis of accounting, unless management either intends to liquidate the Bank or to cease its operations or has no realistic alternative but to do so.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Bank.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00018/2.1032/AU.4/07/0703-1/1/I/2024 (lanjutan)

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. 00018/2.1032/AU.4/07/0703-1/1/I/2024 (continued)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan

Auditors' responsibilities for the audit of the financial statements

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor independen yang mencakup opini audit kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements taken as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an independent auditors' report that includes our audit opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of such financial statements.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini audit kami. Risiko tidak terdeteksinya suatu kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi daripada yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian atas pengendalian internal.

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to such risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or override of internal control.*

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00018/2.1032/AU.4/07/0703-1/1/I/2024 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan suatu opini audit atas keefektivitasan pengendalian internal Bank.

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Bank untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor independen kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, memodifikasi opini audit kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor independen kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Bank tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. 00018/2.1032/AU.4/07/0703-1/1/I/2024 (continued)

Auditors' responsibilities for the audit of the inancial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an audit opinion on the effectiveness of the Bank's internal control.*

- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our independent auditors' report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our audit opinion. Our conclusion is based on the audit evidence obtained up to the date of our independent auditors' report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.*

Building a better working world

The original report included herein is in Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00018/2.1032/AU.4/07/0703-1/1/I/2024 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. 00018/2.1032/AU.4/07/0703-1/1/I/2024 (continued)

Auditors' responsibilities for the audit of the inancial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including disclosures, and whether the financial statements reflect the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

KAP Purwantono, Sungkoro & Surja

Yasir
Registrasi Akuntan Publik No.AP.0703/*Public Accountant Registration No. AP.0703*

19 Januari 2024/*January 19, 2024*

PT BANK BCA SYARIAH
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BCA SYARIAH
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	Catatan/ *Notes*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
ASET				***ASSETS***
KAS	42.811.022.600	4	69.220.951.250	***CASH***
GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA	1.093.935.437.833	2d,5	946.011.909.343	***CURRENT ACCOUNT AND PLACEMENT WITH BANK INDONESIA***
GIRO PADA BANK LAIN		2b,2c,2e,6,35		***CURRENT ACCOUNT WITH OTHER BANKS***
Pihak ketiga	84.945.508		91.350.482	*Third parties*
Pihak berelasi	28.677.436.486		14.304.902.683	*Related parties*
Jumlah giro pada bank lain	28.762.381.994		14.396.253.165	*Total current accounts with other banks*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(287.623.820)		(143.962.532)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	28.474.758.174		14.252.290.633	*Net*
INVESTASI PADA SURAT BERHARGA		2c,2f,7		***INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES***
Pihak ketiga	4.288.942.295.479		4.110.854.607.761	*Third parties*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(48.804.049.489)		(16.458.473.952)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	4.240.138.245.990		4.094.396.133.809	*Net*
PIUTANG				***RECEIVABLES***
Murabahah		2c,2g,8,35		*Murabahah*
Pihak ketiga	1.648.124.308.399		1.346.510.104.010	*Third parties*
Pihak berelasi	6.458.652.399		278.589.032	*Related parties*
Ijarah				*Ijarah*
Pihak ketiga	22.226.272	2c,2g	289.006.781	*Third parties*
Jumlah piutang	1.654.605.187.070		1.347.077.699.823	*Total receivables*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(11.546.335.193)		(17.634.125.785)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	1.643.058.851.877		1.329.443.574.038	*Net*
PINJAMAN *QARDH*				***FUND OF QARDH***
Pihak ketiga	13.486.131.908	2c, 2h	30.845.763.785	*Third parties*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(134.681.953)		(308.457.638)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	13.351.449.955		30.537.306.147	*Net*
PEMBIAYAAN				***FINANCING***
Mudharabah		2c,2i,9		*Mudharabah*
Pihak ketiga	760.307.047.444		508.124.477.801	*Third parties*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(7.468.762.617)		(5.081.244.778)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	752.838.284.827		503.043.233.023	*Net*
Musyarakah		2c,2i,10		*Musyarakah*
Pihak ketiga	5.988.630.619.609		5.297.352.005.949	*Third parties*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(403.784.110.941)		(459.063.608.805)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	5.584.846.508.668		4.838.288.397.144	*Net*

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK BCA SYARIAH
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BCA SYARIAH
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember 2023/ ***December 31, 2023***	**Catatan/** ***Notes***	**31 Desember 2022/** ***December 31, 2022***	
ASET YANG DIPEROLEH UNTUK *IJARAH* - BERSIH	596.523.403.228	2j,11	402.543.041.381	***ASSETS ACQUIRED FOR IJARAH - NET***
ASET TETAP - BERSIH	198.013.412.014	2k,12	156.718.701.233	***FIXED ASSETS - NET***
ASET PAJAK TANGGUHAN	58.501.741.907	2u,13,16	35.550.403.234	***DEFERRED TAX ASSET***
ASET LAIN-LAIN - BERSIH	219.240.564.745	2l,13	249.876.396.741	***OTHER ASSETS - NET***
JUMLAH ASET	**14.471.733.681.818**		**12.669.882.337.976**	***TOTAL ASSETS***
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS				***LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
LIABILITAS SEGERA	64.193.473.718	2m,14	187.594.951.671	***OBLIGATIONS DUE IMMEDIATELY***
BAGI HASIL YANG BELUM DIBAGIKAN	16.200.203.758	2p	11.292.437.783	***UNDISTRIBUTED PROFIT SHARING***
SIMPANAN DARI BANK LAIN		2b,2n,15		***DEPOSITS FROM OTHER BANKS***
Pihak berelasi	52.697.586.098	35	100.920.882	*Related parties*
Pihak ketiga	13.709.035.199		5.786.819.887	*Third parties*
Jumlah simpanan dari bank lain	66.406.621.297		5.887.740.769	*Total deposits from other banks*
SIMPANAN WADIAH		2b,2n,15		***WADIAH DEPOSITS***
Pihak berelasi	33.717.468.749	35	38.470.831.039	*Related parties*
Pihak ketiga	3.201.864.182.971		2.825.827.369.496	*Third parties*
Jumlah simpanan dari nasabah	3.235.581.651.720		2.864.298.200.535	*Total customers deposits*
UTANG PAJAK	28.667.978.202	2u,16	12.395.258.726	***TAXES PAYABLE***
SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN	190.000.000.000	17	-	***SECURITIES ISSUED***
LIABILITAS LAIN-LAIN	74.263.101.065	2s,18,27,32	40.184.628.012	***OTHER LIABILITIES***
JUMLAH LIABILITAS	**3.675.313.029.760**		**3.121.653.217.496**	***TOTAL LIABILITIES***
DANA SYIRKAH TEMPORER		2b,2o,19,35		***TEMPORARY SYIRKAH FUNDS***
Tabungan *mudharabah*				*Mudharabah savings deposits*
Pihak berelasi	3.596.500.630		3.074.503.794	*Related parties*
Pihak ketiga	933.514.706.582		792.633.855.310	*Third parties*
Jumlah tabungan *mudharabah*	937.111.207.212		795.708.359.104	*Total mudharabah savings deposits*
Deposito *mudharabah*				*Mudharabah time deposits*
Pihak berelasi	81.800.626.526		217.171.101.268	*Related parties*
Pihak ketiga	6.694.960.334.461		5.604.456.085.119	*Third parties*
Jumlah deposito *mudharabah*	6.776.760.960.987		5.821.627.186.387	*Total mudharabah time deposits*
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER	**7.713.872.168.199**		**6.617.335.545.491**	***TOTAL TEMPORARY SYIRKAH FUNDS***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK BCA SYARIAH
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BCA SYARIAH
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	**Catatan/ *Notes***	**31 Desember 2022/ *December 31, 2022***	
EKUITAS				***EQUITY***
Modal saham - nilai nominal Rp1.000 per saham				*Share capital - nominal value Rp1,000 per share*
Modal dasar - 5.000.000.000 saham				*authorized capital - 5,000,000,000*
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 2.255.183.207 saham	2.255.183.207.000	20	2.255.183.207.000	*shares issued and fully paid capital – 2,255,183,207 shares*
Tambahan modal disetor	70.556.747.868	1c,22	70.556.747.868	*Additional paid-in capital*
Surplus revaluasi aset tetap	55.028.816.836	2k	55.028.816.836	*Surplus on fixed asset revaluation*
Keuntungan yang belum direalisasi atas investasi yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	1.541.185.441	7	2.104.403.311	*Unrealised gain on investments measured at fair value through other comprehensive income*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti - bersih	(9.956.911.165)		(8.373.296.869)	*Remeasurement of defined benefit liabilities - net*
Saldo laba				*Retained earnings*
Telah ditentukan penggunaannya	16.000.000.000	21	14.000.000.000	*Appropriated*
Belum ditentukan penggunaannya	694.195.437.879		542.393.696.843	*Unappropriated*
JUMLAH EKUITAS	**3.082.548.483.859**		**2.930.893.574.989**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	**14.471.733.681.818**		**12.669.882.337.976**	***TOTAL LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK BCA SYARIAH
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BCA SYARIAH
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended December 31, 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*			
	2023	**Catatan/ *Notes***	**2022**	
PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA SEBAGAI MUDHARIB		2p,23		***REVENUE FROM FUND MANAGEMENT AS MUDHARIB***
Pendapatan dari jual beli	129.641.706.564		125.347.539.116	*Income from sales and purchases*
Pendapatan dari *Ijarah* - bersih	44.952.758.471		29.143.543.937	*Income from Ijarah - net*
Pendapatan dari bagi hasil	460.079.818.220		399.239.243.531	*Income from profit sharing*
Pendapatan usaha utama lainnya	298.785.227.809	2q,23	196.016.826.293	*Other main operating income*
	933.459.511.064		749.747.152.877	
HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL	(275.206.946.082)	2r,24,35	(161.356.684.490)	***THIRD PARTIES' SHARE ON RETURN***
HAK BAGI HASIL MILIK BANK	658.252.564.982		588.390.468.387	***BANK'S SHARE IN PROFIT***
PENDAPATAN USAHA LAINNYA	70.672.849.021	2q,25,35	54.610.021.572	***OTHER OPERATING INCOME***
BEBAN USAHA				***OPERATING EXPENSES***
Beban kepegawaian	192.073.236.375	26	141.398.419.201	*Employee expenses*
Beban umum dan administrasi	169.958.557.760	28,35	96.412.764.288	*General and administrative expenses*
Beban usaha lainnya	93.034.720.360	29	41.518.651.359	*Other operating expenses*
	455.066.514.495		279.329.834.848	
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan non-produktif - bersih	(57.871.380.980)	27	(212.242.200.384)	*Provision for impairment losses on earning and non-earning assets - net*
LABA USAHA	**215.987.518.528**		**151.428.454.727**	***INCOME FROM OPERATION***
BEBAN NON USAHA - BERSIH	(24.588.720.683)	30	(5.219.144.742)	***NON OPERATING EXPENSES - NET***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK BCA SYARIAH
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BCA SYARIAH
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (continued)
For the Year Ended December 31, 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*			
	2023	**Catatan/ *Notes***	**2022**	
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**191.398.797.845**		**146.209.309.985**	***INCOME BEFORE TAX***
BEBAN PAJAK PENGHASILAN				***INCOME TAX EXPENSES***
Kini	(60.072.171.060)	2u,16b	(34.749.333.520)	*Current*
Tangguhan	22.475.114.251	2u,16b	6.122.572.465	*Deferred*
Beban pajak penghasilan	(37.597.056.809)		(28.626.761.055)	*Income tax expenses*
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	**153.801.741.036**		**117.582.548.930**	***NET INCOME FOR THE YEAR***
RUGI KOMPREHENSIF LAIN				***OTHER COMPREHENSIVE LOSS***
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				*Items that will not be reclassified to profit or loss:*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	(2.030.274.738)	32	(1.228.632.820)	*Remeasurement of defined benefits liabilities*
Pajak penghasilan	446.660.442	16	270.299.220	*Income tax*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti - setelah pajak penghasilan	(1.583.614.296)	32	(958.333.600)	*Remeasurement of defined benefits liabilities - net of income tax*
Surplus revaluasi aset tetap	-	12	7.075.800.000	*Surplus on revaluation of fixed assets*
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				*Items that will be reclassified to profit or loss:*
Kerugian yang belum direalisasi atas investasi yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(592.781.849)		(43.204.691.665)	*Unrealised loss on investments measured at fair value through other comprehensive income*
Pajak penghasilan	29.563.979	16	9.605.880.167	*Income tax*
Kerugian yang belum direalisasi atas investasi yang diukur pada nilai wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain - setelah pajak penghasilan	(563.217.870)		(33.598.811.498)	*Unrealised loss on investments measured at fair value through other comprehensive income - net of income tax*
RUGI KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK PENGHASILAN	(2.146.832.166)		(27.481.345.098)	***OTHER COMPREHENSIVE LOSS NET OF INCOME TAX***
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**151.654.908.870**		**90.101.203.832**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

Catatan/*Notes*	Modal saham ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully paid share capital*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Keuntungan (kerugian) bersih yang belum direalisasi atas Investasi yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - bersih/ *Unrealized net gain (loss) on investments measured at fair value through other comprehensive income - net*	Surplus revaluasi asset tetap/ *Surplus on revaluation of fixed assets*	Pengukuran liabilitas imbalan pasti/ *Measurement of defined benefit liabilities*	Saldo laba/*Retained earnings*		Jumlah ekuitas/ *Total equity*
						Belum ditentukan penggunaannya/ *Unappriopriated*	Telah ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*	
	2.255.183.207.000	**70.556.747.868**	**35.703.214.809**	**47.953.016.836**	**(7.414.963.269)**	**426.811.147.913**	**12.000.000.000**	**2.840.792.371.157**
21	-	-	-	-	-	(2.000.000.000)	2.000.000.000	-
	-	-	-	-	-	117.582.548.930	-	117.582.548.930
	-	-	(33.598.811.498)	-	(958.333.600)	-	-	(34.557.145.098)
12	-	-	-	7.075.800.000	-	-	-	7.075.800.000
	2.255.183.207.000	**70.556.747.868**	**2.104.403.311**	**55.028.816.836**	**(8.373.296.869)**	**542.393.696.843**	**14.000.000.000**	**2.930.893.574.989**
21	-	-	-	-	-	(2.000.000.000)	2.000.000.000	-
	-	-	-	-	-	153.801.741.036	-	153.801.741.036
	-	-	(563.217.870)	-	(1.583.614.296)	-	-	(2.146.832.166)
	2.255.183.207.000	**70.556.747.868**	**1.541.185.441**	**55.028.816.836**	**(9.956.911.165)**	**694.195.437.879**	**16.000.000.000**	**3.082.548.483.859**

PT BANK BCA SYARIAH
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BCA SYARIAH
STATEMENT OF CASH FLOWS
For the Year Ended December 31, 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*			
	2023	**Catatan/ *Notes***	**2022**	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan pendapatan bagi hasil, jual beli, sewa dan pendapatan usaha utama lainnya	908.909.106.797		745.026.374.074	*Proceeds of income from profit sharing, margin, leases and other main operating income*
Pembayaran bagi hasil dana syirkah temporer	(259.006.742.324)		(179.403.595.849)	*Payments of profit sharing for temporary syirkah funds*
Penerimaan pendapatan usaha lainnya	100.149.395.973		170.145.738.924	*Proceeds of other operating income*
Pembayaran beban karyawan	(186.254.894.959)		(152.869.137.607)	*Payments of employee expenses*
Pembayaran pajak penghasilan badan	(44.700.014.951)		(33.778.942.560)	*Payments of corporate income tax*
Pembayaran beban usaha selain beban karyawan	(225.803.538.241)		(111.547.040.787)	*Payment of operating expenses other employee expenses*
Pembayaran zakat	(49.176.209)		(20.898.079)	*Payment of zakat*
Penyaluran dana kebajikan	(943.821.269)		(12.300.366)	*Distribution of qardhul hasan funds*
Penerimaan pendapatan non-usaha - bersih	(1.993.925.210)		231.065.794	*Receipt from non-operating income-net*
Penurunan (kenaikan) aset operasi:				*Decrease (increase) in assets operating:*
Piutang *murabahah* dan *ijarah*	(307.527.487.247)		(96.009.975.939)	*Murabahah and ijarah receivables*
Pembiayaan *mudharabah*	(252.182.569.643)		57.717.234.574	*Mudharabah financing*
Pembiayaan *musyarakah*	(691.278.613.660)		(1.299.948.695.396)	*Musyarakah financing*
Aset yang diperoleh untuk *ijarah*	(342.359.159.666)		(66.389.183.694)	*Assets acquired for ijarah*
Pinjaman *qardh*	17.359.631.877		(13.565.906.032)	*Funds of qardh*
Aset lain-lain	75.263.416.175		(29.268.009.995)	*Oher assets*
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:				*Increase (decrease) liabilities operating:*
Liabilitas segera	(123.401.477.953)		128.507.377.372	*Obligations due immediately*
Simpanan	431.802.331.713		1.079.664.442.841	*Deposits*
Surat berharga yang diterbitkan	190.000.000.000		-	*Securities issued*
Liabilitas lain-lain	(11.981.717.189)		13.848.605.956	*Other liabilities*
Kenaikan dana *syirkah* temporer investasi tidak terikat	1.096.536.622.708		723.946.898.443	*Increase in temporary syirkah funds unrestricted investment*
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	**372.537.366.722**		**936.274.051.674**	***Net cash flows provided from operating activities***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK BCA SYARIAH
LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BCA SYARIAH
STATEMENT OF CASH FLOWS (continued)
For the Year Ended December 31, 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*			
	2023	**Catatan/ *Notes***	**2022**	
ARUS KAS DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS USED IN INVESTING ACTIVITIES***
Pembelian surat berharga yang diukur pada biaya perolehan	(12.000.000.000)		-	*Purchase of marketable securities measured at acquisition cost*
Pembelian surat berharga yang diukur pada nilai wajar melaiui penghasilan komprehensif lain	(2.440.857.293.195)		(38.148.532.007.690)	*Purchase of marketable securities measured at fair value through other comprehensive income*
Pencairan surat berharga yang diukur pada biaya perolehan	280.000.000.000		-	*Proceeds of marketable securities measured at acquisition cost*
Pencairan surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	1.998.000.000.000		37.105.152.000.000	*Proceeds from liquidation of marketable securities measured at fair value through other comprehensive income*
Pembelian aset tetap	(53.388.834.628)	12	(15.541.442.629)	*Purchase of fixed assets*
Penjualan aset tetap	70.017.769	12	481.026.119	*Proceeds from sale of fixed assets*
Pembelian aset tidak berwujud	(8.481.527.999)		(5.371.120.211)	*Purchase of intangible assets*
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	**(236.657.638.053)**		**(1.063.811.544.411)**	***Net cash flows used In investing activities***
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	**135.879.728.669**		**(127.537.492.737)**	***NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENT***
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	**1.029.629.113.758**		**1.157.166.606.495**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR***
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	**1.165.508.842.427**		**1.029.629.113.758**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF THE YEAR***
Kas dan setara kas terdiri dari:				*Cash and cash equivalents consist of:*
Kas	42.811.022.600		69.220.951.250	*Cash*
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	1.093.935.437.833	5	946.011.909.343	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	28.762.381.994	6	14.396.253.165	*Current accounts with other bank*
Jumlah	**1.165.508.842.427**		**1.029.629.113.758**	***Total***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK BCA SYARIAH
LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BCA SYARIAH
INCOME AND PROFIT SHARING RECONCILIATION REPORT
For the Year Ended December 31, 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember 2023/ ***December 31, 2023***	**Catatan/** ***Notes***	**31 Desember 2022/** ***December 31, 2022***	
PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA SEBAGAI MUDHARIB	933.459.511.064		749.747.152.877	***REVENUE FROM FUND MANAGEMENT AS MUDHARIB***
PENGURANGAN:				***DEDUCTION:***
Pendapatan tahun berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima:				*Current year income in which its cash and cash equivalents have not been received:*
Pendapatan margin *murabahah*	(6.571.748.851)		(5.713.350.356)	*Income from murabahah margin*
Pendapatan *ijarah*	(2.112.465.109)		(1.097.747.249)	*Income from ijarah*
Pendapatan bagi hasil	(27.964.216.694)		(28.119.970.501)	*Income from profit sharing*
Pendapatan surat berharga dan FASBIS	(50.004.484.142)		(27.171.442.423)	*Income from marketable securities and FASBIS*
Jumlah pengurangan	**(86.652.914.796)**		**(62.102.510.529)**	***Total deductions***
PENAMBAHAN:				***ADDITIONS:***
Pendapatan tahun sebelumnnya yang kasnya diterima pada tahun berjalan:				*Previous year income in which the cash were received during current year:*
Pendapatan margin *murabahah*	5.713.350.356		5.982.803.056	*Income from murabahah margin*
Pendapatan *ijarah*	1.097.747.249		1.109.341.411	*Income from ijarah*
Pendapatan bagi hasil	28.119.970.501		24.589.060.663	*Income from profit sharing*
Pendapatan surat berharga dan FASBIS	27.171.442.423		10.885.939.935	*Income from securities and FASBIS*
Jumtah penambahan	**62.102.510.529**		**42.567.145.065**	***Total additions***
Pendapatan yang tersedia untuk dibagi hasil	**908.909.106.797**		**730.211.787.413**	***Available income for profit sharing***
Bagi hasil yang menjadi hak bank	633.702.160.715		568.855.102.923	*Bank's share on revenue sharing*
Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana	275.206.946.082		161.356.684.490	*Fund owners' share on profit sharing*
Dirinci atas:				*Details of:*
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan	259.006.742.324		150.064.246.707	*Fund owners' share on distributed profit sharing*
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan	16.200.203.758		11.292.437.783	*Fund owners' share on undistributed profit sharing*

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK BCA SYARIAH
LAPORAN SUMBER
DAN PENYALURAN DANA ZAKAT
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BCA SYARIAH
STATEMENT OF SOURCES
AND DISTRIBUTION OF ZAKAT FUNDS
For the Year Ended December 31, 2023
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	Catatan/ *Notes*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
Sumber dana zakat				***Sources of zakat funds***
Zakat dari pihak luar	44.800.792	2r	49.176.208	*Zakat from other parties*
Jumlah sumber dana zakat	**44.800.792**		**49.176.208**	***Total sources of zakat funds***
Penyaluran dana zakat				***Distribution of zakat funds***
Disalurkan kepada Lembaga Amil Zakat	(49.176.209)		(70.074.287)	*Distributed to Amil Zakat Institution*
Jumlah penyaluran dana zakat	**(49.176.209)**		**(70.074.287)**	***Distribution of zakat funds***
Penurunan dana zakat	(4.375.417)		(20.898.079)	*Decrease of zakat funds*
Saldo awal dana zakat	49.176.209	18	70.074.288	*Beginning balance of zakat funds*
Saldo akhir dana zakat	**44.800.792**	18	**49.176.209**	***Ending balance of zakat funds***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK BCA SYARIAH
LAPORAN SUMBER
DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BCA SYARIAH
STATEMENT OF SOURCES AND USE OF QARDHUL HASAN FUNDS
For the Year Ended December 31, 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember 2023/ ***December 31, 2023***	**Catatan/** ***Notes***	**31 Desember 2022/** ***December 31, 2022***	
Sumber dana kebajikan				***Source of qardhul hasan funds***
Infak	-		27.500	*Infaq*
Sedekah	32.915.884		1.855.384	*Shadaqah*
Denda	687.773.235		361.950.326	*Penalty*
Pendapatan non-halal	354.743.539		139.263.254	*Non-halal income*
Jumlah sumber dana kebajikan	**1.075.432.658**		**503.096.464**	***Total source of qardhul hasan funds***
Penggunaan dana kebajikan				*Uses of qardhul hasan funds*
sumbangan	(943.821.269)		(515.396.830)	*donation*
Jumlah penggunaan dana kebajikan	**(943.821.269)**		**(515.396.830)**	***Total uses of qardhul hasan funds***
Kenaikan (penurunan) dana kebajikan	131.611.389	2v,18	(12.300.366)	*Increase (decrease) qardhul hasan funds*
Saldo awal dana kebajikan	745.898.383	2v,18	758.198.749	***Beginning balance of qardhul hasan funds***
Saldo akhir dana kebajikan	**877.509.772**		**745.898.383**	***Ending balance of qardhul hasan funds***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BCA SYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian Bank

PT Bank BCA Syariah ("Bank") didirikan dengan nama PT Utama International Bank berdasarkan Akta Pendirian No. 91 tanggal 21 Mei 1991 dari Notaris Buniarti Tjandra, S.H., notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2.-3446.HT.01.01.TH.91 tanggal 30 Juli 1991. Melalui akta perubahan No. 96 tanggal 22 Mei 1996 yang dibuat dihadapan Notaris Buniarti Tjandra, S.H., notaris di Jakarta telah dilakukan perubahan nama PT Utama International Bank menjadi PT Bank UIB. Akta perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-1497.HT.01.04.97 juncto Berita Negara No.61 tanggal 1 Agustus 1997.

Berdasarkan Akta Akuisisi No. 72 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., Msi., notaris di Jakarta telah dilakukan akuisisi oleh PT Bank BCA Tbk atas 42.500 lembar saham Bank UIB atau setara dengan kepemilikan 100%. Komposisi kepemilikan Bank setelah akuisisi telah mengalami beberapa perubahan, antara lain melalui Akta Jual Beli saham No. 74 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H.,Msi., notaris di Jakarta. Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Bank UIB No. 49 yang dibuat dihadapan Notaris Pudji Rezeki Irawati, S.H., tanggal 16 Desember 2009 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No.AHU-01929.AH.01.02 tanggal 14 Januari 2010. Perubahan terakhir komposisi kepemilikan Bank ini dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia melalui surat No. 223/DIR/UIB/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009.

PT Bank UIB berubah nama menjadi PT Bank BCA Syariah berdasarkan pada Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (”RUPSLB”) Perseroan Terbatas PT Bank UIB, sesuai dengan Akta Notaris No. 49 tanggal 16 Desember 2009 yang dibuat dihadapan notaris Pudji Redjeki Irawati, S.H., notaris di Jakarta dan memperoleh izin perubahan kegiatan usaha bank, dari konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia efektif sejak tanggal 5 April 2010.

1. GENERAL

a. Bank establishment

PT Bank BCA Syariah ("Bank") was established under the name PT Utama International Bank based on Deed of Establishment No. 91 dated May 21, 1991 of Notary Buniarti Tjandra, S.H., notary in Jakarta. The deed has been approved by the Minister of Justice Republic of Indonesia in Decree No. C2.-3446.HT.01.01.TH.91 dated July 30, 1991. Through amendment deed No. 96 dated May 22, 1996 of Buniarti Tjandra, S.H., notary in Jakarta, the name has been changed to PT Utama International Bank became PT Bank UIB. The deed has been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in its decision letter No. C2-1497.HT.01.04.97 and has been published in State Gazette of Republic of Indonesia No.61 dated August 1, 1997.

Based on Acquisition Deed No. 72 dated June 12, 2009 of Notary Dr. Irawan Soerodjo, S.H., Msi., notary in Jakarta, PT Bank BCA Tbk has acquired 42,500 shares of Bank UIB or equivalent with 100% ownership. The composition of the Bank's ownership after the acquisition has undergone several changes, including through the Share Sale and Purchase Deed No. 74 dated June 12, 2009 made before Notary Dr. Irawan Soerodjo, S.H., Msi., notary in Jakarta. Deed of Decision Statement Outside the PT Bank UIB Limited Liability Company Meeting No. 49 which was made before Notary Pudji Rezeki Irawati, S.H., dated December 16, 2009 and was ratified by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-01929.AH.01.02 dated January 14, 2010. The latest change in the composition of bank ownership was reported by the Bank to Bank Indonesia via letter No. 223/DIR/UIB/XII/2009 dated December 31, 2009.

PT Bank UIB change its name to PT Bank BCA Syariah is based on the Decision Statement of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) of PT Bank UIB, as stated in the Deed No. 49 dated December 16, 2009 of Pudji Redjeki Irawati, S.H., notary in Jakarta and obtained a license from Bank Indonesia to change its business activities, from a conventional Bank into a commercial bank based on sharia principles effective from April 5, 2010.

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Bank (lanjutan)

Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 93 tanggal 26 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Buena Brahmana, S.H.,M.Kn., notaris di Jakarta mengenai peningkatan modal dasar Bank menjadi Rp5.000.000.000.000, yang terbagi atas 5.000.000 saham. Akta perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-.AH.01.03-0322607 Tahun 2019 tertanggal 29 Agustus 2019.

Pada tanggal 10 Desember 2020, Bank melakukan penggabungan usaha dengan PT Bank Interim Indonesia. Keputusan merger ini dituangkan dalam Akta No. 65 Tanggal 16 November 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn., notaris di Jakarta.

Akta perubahan ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-0060610.AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 10 Desember 2020.

Berdasarkan akta No. 66 tanggal 16 November 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn., notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui pemecahan saham Bank sesuai dengan rencana merger, dimana 1 saham akan dipecah menjadi 1.000 saham sehingga nilai nominal saham Bank yang semula sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap saham menjadi sebesar Rp1.000 (seribu rupiah) untuk setiap saham. Pemegang saham juga menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor sehubungan dengan merger dengan menerbitkan saham baru sebanyak 258.883.207 sehingga keseluruhan saham yang beredar adalah sebanyak 2.255.183.207 saham. Saham baru tersebut akan dialokasikan kepada pemilik saham PT Bank Interim Indonesia dengan rincian PT Bank Central Asia Tbk akan mendapatkan 258.883.137 saham dan PT BCA Finance akan mendapatkan 70 saham.

1. GENERAL (continued)

a. Bank establishment (continued)

The Bank's Articles of Association have undergone several changes, most recently with Deed No. 93 dated August 26, 2019 made before Notary Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., notary in Jakarta regarding increasing the authorized capital of the Bank to Rp5,000,000,000,000, which is divided into 5,000,000 shares. The deed of amendment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-.AH.01.03-0322607 year 2019 dated August 29, 2019.

On December 10, 2020, there was a merger of PT Bank BCA Syariah with PT Bank Interim Indonesia. This merger decision is stated in Deed No. 65 Date November 16, 2020 made before Notary Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn., notary in Jakarta.

This deed of amendment has received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-0060610.AH.01.02 of 2020 dated December 10, 2020.

Based on deed No. 66 date November 16, 2020 made before Notary Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn., notary in Jakarta, shareholders agreed to stock split of the Bank's shares in accordance with the merger plan, where 1 share will be split into 1,000 shares so that the nominal value of the Bank's shares, which was originally Rp1,000,000 (one million rupiah) for each share, becomes Rp1,000 (one thousand rupiah) for each share. Shareholder also approved an increase in issued and paid-up capital in connection with the merger by issuing 258,883,207 new shares so that the total shares outstanding were 2,255,183,207 shares. The new shares will be allocated to PT Bank Interim Indonesia shareholders with details that PT Bank Central Asia Tbk will obtain 258,883,137 shares and PT BCA Finance will obtain 70 shares.

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Bank (lanjutan)

Akta perubahan ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-0207992.AH.01.11. Tahun 2020 tanggal 10 Desember 2020.

Kantor pusat Bank berlokasi di Jalan Raya Jatinegara Timur No.72, Jakarta Timur. Pada tahun 2023, Bank beroperasi melalui 14 Kantor Cabang Utama ("KCU"), 18 Kantor Cabang Pembantu ("KCP"), 44 Unit Layanan Syariah ("ULS") dan 100 Layanan Syariah Bank Umum ("LSBU").

b. Struktur dan manajemen

Susunan Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah ditetapkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank BCA Syariah No. 101 tanggal 22 Februari 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Toki Thomas, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank BCA Syariah No. 73 tanggal 11 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

a. Bank establishment (continued)

This deed of amendment has received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with a decree No. AHU-0207992.AH.01.11. Year 2020 dated December 10, 2020.

The Bank's head office is located on Jalan Raya Jatinegara Timur No. 72, East Jakarta. In 2023, the Bank operates through 14 Main Branch Offices ("KCU"), 18 Sub-Branch Offices ("KCP"), 44 Sharia Service Units ("ULS") and 100 Commercial Bank Sharia Services ("LSBU").

b. Structure and management

The composition of the Board of Commissioners, Board of Directors and Sharia Supervisory Board determined based on the Deed of Statement of General Meeting of Shareholders PT Bank BCA Syariah No. 101 dated February 22, 2023 made before the Notary Toki Thomas, S.H., M.Kn., notary in Jakarta and based on the Deed of Statement of General Meeting of Shareholders PT Bank BCA Syariah No. 73 dated March 11, 2022 made before the Notary Christina Dwi Utami, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, is as follows:

	2023	2022	
Dewan Komisaris:			***Boards of Commissioners:***
Presiden Komisaris Independen	Ratna Yanti[a]	Tantri Indrawati	*President Independent Commissioners*
Komisaris Independen	Inge Setiawati[b]	Ratna Yanti	*Independent Commissioners*
Komisaris	Rickyadi Widjaja[c]	Ina Widjaja	*Commissioners*

	2023	2022	
Dewan Direksi:			***Boards of Directors:***
Presiden Direktur	Yuli Melati Suryaningrum	Yuli Melati Suryaningrum	*President Director*
Direktur	Pranata	Pranata	*Director*
Direktur	Ina Widjaja[d]	Rickyadi Widjaja	*Director*
Direktur	Lukman Hadiwidjaja	Lukman Hadiwidjaja	*Director*
Direktur Kepatuhan	Houda Muljanti	Houda Muljanti	*Compliance Director*

	2023	2022	
Dewan Pengawas Syariah:			***Sharia Supervisory Board:***
Ketua	Prof. Dr. Fathurrahman Djamil	Prof. Dr. Fathurrahman Djamil	*Chairman*
Anggota	Sutedjo Prihatono	Sutedjo Prihatono	*Member*

(a) efektif sejak lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dari Surat OJK No. KEP-7/PB.1/2023 tanggal 7 Februari 2023.
(b) efektif sejak lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dari Surat OJK No. KEP-12/PB.1/2023 tanggal 7 Februari 2023.
(c) efektif sejak lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dari Surat OJK No. KEP-6/PB.1/2023 tanggal 13 Januari 2023.
(d) efektif sejak lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dari Surat OJK No. KEP-13/PB.1/2023 tanggal 7 Februari 2023.

(a) effective since passed fit and proper test from OJK No. KEP-7/PB.1/2023 dated February 7, 2023.
(b) effective since passed fit and proper test from OJK No. KEP-12/PB.1/2023 dated Feburary 7, 2023.
(c) effective since passed fit and proper test from OJK No. KEP-6/PB.1/2023 dated January 13, 2023.
(d) effective since passed fit and proper test from OJK No. KEP-13/PB.1/2023 dated February 7, 2023.

1. UMUM (lanjutan)

b. Struktur dan manajemen (lanjutan)

Susunan Komite Audit Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 002/SKP/DIR/2023 tanggal 12 Desember 2023, Surat Keputusan Direksi No. 001/SKP/DIR/2022 tanggal 11 Maret 2022 adalah sebagai berikut :

1. GENERAL (continued)

b. Structure and management (continued)

The composition of the Bank's Audit Committee as at December 31, 2023 and 2022 is determined based on Decree of the Board of Directors No. 002/SKP/DIR/2023 dated December 12, 2023, and Decree of the Board of Directors No. 001/SKP/DIR/2022 dated March 11, 2022, as follows:

	2023	2022	
Komite Audit			***Audit Committee***
Ketua	Inge Setiawati	Tantri Indrawati	*Chairman*
Anggota	J. Sindu Adisuwono	Riyo S. Wisaksono	*Member*
Anggota	Senjaya Komala	J. Sindu Adisuwono	*Member*

	2023	2022	
Komite Pemantau Risiko			***Risk Monitoring Committee***
Ketua	Ratna Yanti	Ratna Yanti	*Chairman*
Anggota	Inge Setiawati	Tantri Indrawati	*Member*
Anggota	Rickyadi Widjaja	Ina Widjaja	*Member*
Anggota	Iwan Wiwoho	Riyo S. Wisaksono	*Member*
Anggota	Senjaya Komala	Iwan Wiwoho	*Member*

	2023	2022	
Komite Remunerasi			***Remuneration Committee***
Ketua	Inge Setiawati	Ratna Yanti	*Chairman*
Anggota	Ratna Yanti	Tantri Indrawati	*Member*
Anggota	Rickyadi Widjaja	Ina Widjaja	*Member*
Anggota	Retno Wulandari	Retno Wulandari	*Member*

Gaji dan kompensasi lainnya yang dibayarkan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

Salaries and other compensation paid to the Board of Directors, Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board as at December 31, 2023 and 2022 are as follows (unaudited):

	2023	2022	
Direksi	29.705.133.983	23.726.448.866	*Board of Directors*
Dewan Komisaris	3.292.543.131	3.252.024.133	*Board of Commissioners*
Dewan Pengawas Syariah	1.488.245.833	1.351.088.511	*Sharia Supervisory Board*
	34.485.922.947	**28.329.561.510**	

Bank mempunyai 766 dan 662 karyawan tetap dan kontrak pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 (tidak diaudit).

The Bank had 766 and 662 permanent and contract employees in the year ended on December 31, 2023 and 2022 (unaudited).

1. UMUM (lanjutan)

c. Penggabungan usaha dengan PT Bank Interim Indonesia (dahulu PT Bank Rabobank International Indonesia)

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 16 November 2020 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 63 dan Akta Penggabungan No. 65 tertanggal 16 November 2020 yang keduanya dibuat oleh Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., notaris di Jakarta telah disetujui Rencana Penggabungan Usaha PT Bank Interim Indonesia (dahulu PT Bank Rabobank International Indonesia) ("BII") dengan Bank, dimana BII bertindak sebagai bank yang menggabungkan diri dan Bank bertindak sebagai bank penerima penggabungan, yang berlaku sejak seluruh persetujuan yang disyaratkan diperoleh ("Tanggal Efektif Penggabungan").

Penggabungan menjadi efektif pada tanggal 10 Desember 2020, setelah diperolehnya persetujuan dari (i) OJK melalui surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-182/D.03/2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang Pemberian Izin Penggabungan BII ke dalam Bank; dan (ii) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Nomor AHU-02.0208304.AH.01.11 Tahun 2020 tanggal 10 Desember 2020 mengenai Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan mengenai Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan dengan Nomor AHU-0060610.AH.01.02. Tahun 2020 tanggal 10 Desember 2020.

Sehubungan dengan penggabungan usaha antara PT Bank BCA Syariah ("BCAS") dan PT Bank Interim Indonesia ("BII"), penggabungan usaha dilakukan melalui penerbitan instrumen ekuitas BCAS kepada pemegang saham BCAS dan BII sebesar 258.883.207 lembar saham baru, disetor penuh dengan nilai nominal sebesar Rp1.000 (nilai penuh) per saham.

1. GENERAL (continued)

c. The merger with PT Bank Interim Indonesia (formerly PT Bank Rabobank International Indonesia)

Based on result of the Deed of Statement of Extraordinary General Meeting of Shareholders dated 16 November 2020, as stated in the notarial by Deed of Statement of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 63 and Deed of Merger No. 65 dated November 16, 2020, both of which were made by Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., notary in Jakarta, the Planned Merger of PT Bank Interim Indonesia (formerly PT Bank Rabobank International Indonesia) ("BII") was approved by the Bank, where BII acts as the merging bank and the Bank acts as the recipient bank of the merger, which takes effect from the time all required approvals are obtained ("Effective Date of the Merger").

The merger became effective on December 10, 2020, after obtaining approval from (i) OJK through the Decree of the OJK Board of Commissioners Number KEP-182/D.03/2020 dated December 8, 2020, concerning Granting Permit for the Merger of BII into the Bank; and (ii) the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Directorate General of General Legal Administration with Number AHU-02.0208304.AH.01.11 of 2020 dated December 10, 2020 regarding Receipt of Notification of Changes to Company Data and regarding Receipt of Notification of Company Merger with Number AHU-0060610.AH.01.02. Year 2020, dated December 10, 2020.

In connection with the business merger between PT Bank BCA Syariah ("BCAS") and PT Bank Interim Indonesia ("BII"), the business merger was carried out through the issuance of BCAS equity instruments to BCAS and BII shareholders amounting to 258,883,207 new shares, fully paid up with a nominal value of Rp1,000 (full value) per share.

1. UMUM (lanjutan)

c. Penggabungan Usaha dengan PT Bank Interim Indonesia (dahulu PT Bank Rabobank International Indonesia) (lanjutan)

Penggabungan usaha antara BCAS dan BII merupakan transaksi penggabungan usaha entitas sepengendali. Pada tanggal efektif merger, baik BCAS dan BII merupakan entitas sepengendalian dan hubungan sepengendalian tersebut tidak bersifat sementara. Transaksi kombinasi bisnis antara entitas sepengendali dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas-entitas yang berada dalam suatu kelompok yang sama dan bukan merupakan perubahan kepemilikan dalam arti substansi ekonomi. Oleh karena itu, transaksi ini diakui pada jumlah tercatat berdasarkan metode penyatuan kepemilikan (*pooling of interest*). Selisih nilai transfer entitas sepengendali di atas dicatat sebagai tambahan modal disetor. Atas transaksi ini, Bank mencatat tambahan modal disetor sebesar Rp70.556.747.868 (Catatan 22).

Akuisisi tersebut di atas memenuhi kategori kombinasi bisnis di antara entitas sepengendali sebagaimana diuraikan di dalam PSAK No. 38 tentang "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali", sehingga akuisisi bisnis tersebut diakui menggunakan metode penyatuan kepemilikan. Jumlah selisih yang timbul antara biaya perolehan dan bagian proporsional atas nilai tercatat aset bersih seluruhnya diakui sebagai "Selisih Nilai Transaksi Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali" dan disajikan sebagai bagian "Tambahan Modal Disetor" di bagian ekuitas pada laporan posisi keuangan.

1. GENERAL (continued)

c. The Merger with PT Bank Interim Indonesia (formerly PT Bank Rabobank International Indonesia) (continued)

The business merger between BCAS and BII is a business merger transaction of entities under common control. On the effective date of the merger, both BCAS and BII were entities under common control and the relationship under common control are not temporary. Business combination transactions between entities under common control are carried out in the context of reorganizing entities within the same group and do not constitute a change of ownership in terms of economic substance. Therefore, this transaction is recognized at the carrying amount based on the pooling of interest method. The difference in the transfer value of entities under common control above is recorded as additional paid-in capital. For this transaction, the Bank recorded additional paid-in capital amounting to Rp70,556,747,868 (Note 22).

The above acquisitions fulfil the category of business combination among entities under common control entities described in SFAS No. 38 on "Business Combinations of Entities Under Common Control", therefore such acquisitions were accounted for using the pooling of interest method. The amount of the difference between the cost of acquisition and the proportionate portion of the carrying amount of the net assets entirely recognised as "Difference in Value of Transactions of Business Combinations of Entities under Common Control" and recognised as part of "Additional paid-in capital" and presented in the equity section of the statement of financial position.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Dasar penyusunan laporan keuangan dan pernyataan kepatuhan

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini:

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION

a. Basis of preparation of financial statements and compliance statements

The principal accounting policies adopted in preparing the Bank's financial statements are set out below:

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan dan pernyataan kepatuhan (lanjutan)

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK"), yaitu PSAK No. 101 (Revisi 2019) tentang "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK No. 102 (Revisi 2019) tentang "Akuntansi *Murabahah*", PSAK No. 105 tentang "Akuntansi *Mudharabah*", PSAK No. 106 tentang "Akuntansi *Musyarakah*", PSAK No. 107 (Revisi 2022) tentang "Akuntansi Ijarah", PSAK No. 110 (Revisi 2015) tentang "Akuntansi Sukuk", Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI Revisi 2013).

Berdasarkan PSAK No. 101 (Revisi 2016), laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut;

i. Laporan Posisi Keuangan;
ii. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain;
iii. Laporan Perubahan Ekuitas;
iv. Laporan Arus Kas;
v. Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil;
vi. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat;
vii. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan; dan
viii. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas merupakan laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial Bank sesuai prinsip syariah.

Laporan keuangan disajikan berdasarkan nilai historis, kecuali disebutkan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masingmasing akun tersebut, dan disusun dengan dasar akrual, kecuali laporan arus kas dan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas, giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang jatuh tempo dalam 3 bulan dari tanggal perolehan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

a. Basis of preparation of financial statements and Compliance Statements (continued)

The financial statements have been prepared and presented in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards ("SFAS"), namely: SFAS No. 101 (Revised 2019), "Presentation of Sharia Financial Statements", SFAS No. 102 (Revised 2019), "Accounting for Murabahah", SFAS No. 105, "Accounting for Mudharabah", SFAS No. 106, "Accounting for Musyarakah", and SFAS No. 107 (Revised 2022), "Accounting for Ijarah", SFAS No. 110 (Revised 2015) "Accounting for Sukuk", Indonesia Sharia Banking Accounting Guidelines (PAPSI Revised 2013).

Based on SFAS No. 101 (Revised 2016), a complete sharia bank financial statements consists of the following components;

i. Statement of Financial Position;
ii. Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
iii. Statement of Changes in Equity;
iv. Statement of Cash Flows
v. Statement of Reconciliation of Income and Profit Sharing;
vi. Statement of Sources and Distribution of Zakat Funds;
vii. Statement of Sources and Uses of Qardhul Hasan Funds; and
viii. Notes to the Financial Statements.

The statement of financial position, statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of cash flow and statement of changes in equity are the financial statements reflecting the Bank's commercial activities in accordance with sharia principle.

The financial statements are presented on a historical cost basis, unless stated otherwise as described in the accounting policy for each account, and prepared on accrual basis, except statement of cash flow and statement of reconciliation of income and profit sharing.

The statement of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities. For the presentation of statement of cash flows, cash and cash equivalents consist of cash, current accounts and placements with Bank Indonesia, and current accounts with other banks with maturities of 3 months from the date of acquisition.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan dan pernyataan kepatuhan (lanjutan)

Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil merupakan rekonsiliasi antara pendapatan bank syariah yang menggunakan dasar akrual (*accrual basis*) dengan pendapatan yang dibagihasilkan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas (*cash basis*).

Laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan dana kebajikan merupakan laporan yang mencerminkan peran Bank sebagai pemegang amanah dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah.

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat merupakan laporan yang menunjukan sumber dana, penyaluran dalam waktu tertentu serta dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama jangka waktu tertentu dan saldo dana kebajikan pada tanggal tertentu.

Bank tidak secara langsung menjalankan fungsi pengelolaan dana zakat dan dana kebajikan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah penuh. Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan, kecuali bila dinyatakan secara khusus, adalah dalam Rupiah penuh.

b. Transaksi dengan pihak berelasi

Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK No. 7 (Revisi 2015) tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Suatu pihak dianggap pihak berelasi dengan Bank jika;

(1) langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak (i) mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Bank; (ii) memiliki kepentingan dalam Bank yang memberikan pengaruh signifikan atas Bank; atau (iii) memiliki pengendalian bersama atas Bank;

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

a. Basis of preparation of financial statements and Compliance Statements (continued)

The statement of reconciliation of income and profit sharing represents the reconciliation between income of sharia bank under accrual basis and income distributed to fund owners under cash basis.

The statement of sources and distribution of zakat funds and uses of qardhul hasan funds represent the financial statements reflecting the Bank's role as the mandate holder of social activity funds which are separately managed.

The statement of sources and distribution of zakat funds show the sources and distribution of zakat funds for a certain period, and the undistributed zakat funds on a particular date.

The statement of sources and distribution of qardhul hasan funds show the sources and distribution of qardhul hasan funds for a certain period, and the qardhul hasan funds balance on a particular date.

The Bank is not directly involved in the management of zakat and qardhul hasan funds.

The reporting currency used in the financial statements is full Rupiah. The figures presented in the financial statements, unless otherwise stated, are rounded in full Rupiah.

b. Transactions with related parties

The Bank enter into transactions with parties which are defined as related parties in accordance with SFAS No. 7 (Revised 2015) regarding "Related Party Disclosures".

A party is considered as a related party of the Bank if;

(1) directly or indirectly through one or more intermediaries, is party (i) controls, or is controlled by, or under common control with the Bank; (ii) has an interest in the Bank that provides significant influence to the Bank; or (iii) has joint control over the Bank;

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Suatu pihak dianggap pihak berelasi dengan Bank jika; (lanjutan)

(2) suatu pihak yang berada dalam kelompok usaha yang sama dengan Bank;
(3) suatu pihak adalah ventura bersama dimana Bank sebagai *venturer*;
(4) suatu pihak adalah anggota dari personil manajemen kunci Bank;
(5) suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (1) atau (4);
(6) suatu pihak adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh atau untuk pihak yang memiliki hak suara signifikan pada beberapa entitas, langsung maupun tidak langsung, yaitu individu seperti diuraikan dalam butir (4) atau (5); dan
(7) suatu pihak adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Bank atau entitas yang terkait dengan Bank.

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan syarat dan kondisi yang sama dengan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan dan rinciannya telah disajikan dalam Catatan 35 atas laporan keuangan.

c. Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan non-produktif

Aset produktif terdiri dari giro dan penempatan pada Bank Indonesia dalam bentuk Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah ("FASBIS"), giro pada bank lain, investasi pada surat berharga, piutang *murabahah*, pinjaman *qardh*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, aset yang diperoleh untuk *ijarah*, serta komitmen dan kontinjensi yang memiliki risiko pembiayaan seperti bank garansi.

Aset non-produktif adalah aset Bank selain aset produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk rekening antar kantor, agunan yang diambil alih dan rekening penampungan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

b. Transactions with related parties (continued)

A party is considered as a related party of the Bank if; (continued)

(2) it is a member of the same group as the Bank;
(3) it is a joint venture in which the Bank acts as a venturer;
(4) it is a member of the key management personnel of the Bank;
(5) it is a close family member of an individual as described in point (1) or (4);

(6) it is an entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by or for whom has significant voting rights in several entities, directly or indirectly, by the individuals described in point (4) or (5); and

(7) it is a post-employment benefit plan program for the employee benefit of either the Bank or entities related to the Bank.

Transactions with related parties are conducted under terms and conditions that are similar with third party transactions.

All material transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes to the financial statements and the details are presented in Note 35 of the financial statements.

c. Allowance for impairment losses on earning and non-earning assets

Earning assets consist of current accounts and placements with Bank Indonesia in the form of Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities ("FASBIS"), current accounts with other banks, investments in marketable securities, murabahah receivables, qardh receivables, mudharabah financing, musyarakah financing, assets acquired for ijarah, and commitments and contingencies which carry financing risk, such as bank guarantees.

Non-earning assets are the Bank's assets other than the earning assets which have potential loss, consisting of inter-office accounts, foreclosed collaterals and suspense accounts.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan non-produktif (lanjutan)

Sesuai dengan PSAK No. 102 "Akuntansi *Murabahah*" dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI Revisi 2013), Bank menghitung penurunan nilai individual untuk piutang *murabahah* sesuai dengan ketentuan di ISAK No. 102 "Penurunan Nilai Piutang *Murabahah*".

Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai pada setiap tanggal laporan posisi keuangan.

Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti objektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset produktif dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Kriteria yang digunakan oleh Bank untuk menentukan bukti objektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut;

(i) kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
(ii) pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau margin;
(iii) pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
(iv) terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
(v) hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau
(vi) data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk;

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

c. Allowance for impairment losses on earning and non-earning assets (continued)

In accordance with SFAS No. 102 "Accounting for Murabahah" and Indonesia Sharia Banking Accounting Guidelines (PAPSI Revised 2013), the Bank calculates individual impairment for for murabahah receivable in accordance with IFAS No. 102 "Impairment of Murabahah Receivables".

The Bank assesses whether there is any objective evidence that a financial assets is impaired at each statement of financial position date.

Financial assets are impaired when an objective evidence demonstrates that a loss event has occurred after the initial recognition of the asset and that the loss event has an impact on the future cash flows of the financial asset that can be estimated reliably.

The criteria used by the Bank to determine objective evidence of impairment are as follows;

(i) significant financial difficulty of the issuer or obligor;
(ii) a breach of contract, such as a default or arrears in margin or principal payments;
(iii) The lender, for economic or legal reasons relating to the debtor's financial difficulty, grants the debtor a concession that the lender would not otherwise consider;
(iv) it becomes probable that the debtor will enter into bankruptcy or other financial reorganisation;
(v) the disappearance of an active market of financial assets due to financial difficulties; or
(vi) observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a portfolio of financial assets since the initial recognition of those assets, although the decrease cannot yet be identified individually in the portfolio, includes;

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan non-produktif (lanjutan)

Kriteria yang digunakan oleh Bank untuk menentukan bukti objektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut; (lanjutan)

(vii) memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; dan

(viii) kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi. Pada umumnya, periode tersebut bervariasi antara 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, untuk kasus tertentu diperlukan periode yang lebih lama.

Bank pertama kali menentukan apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan, dan secara individual atau kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual.

Jika Bank menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Bank memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko pembiayaan yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset keuangan yang penurunan nilainya dilakukan secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai telah diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

c. Allowance for impairment losses on earning and non-earning assets (continued)

The criteria used by the Bank to determine objective evidence of impairment are as follows; (continued)

(vii) adverse changes in the payment status of debtors in the portfolio; and

(viii) national or local conditions that correlate with breach of contract of the assets in the portfolio.

The estimated period between the occurrence of an event and the identification of a loss is determined by management for each identified portfolio. In general, this period varies between 3 (three) to 12 (twelve) months; in certain cases, a longer period is required.

The Bank first assesses whether an objective evidence of impairment for financial assets that are individually significant and individually or collectively for financial assets that are not individually significant.

If the Bank determines that there is no objective evidence of impairment for an individually assessed financial asset, whether significant or not, it includes the asset in a group of financial assets with similar financing risk characteristics and collectively assesses them for impairment. Financial assets that are individually assessed for impairment, and for which an impairment loss is or continues to be recognised is excluded in the collective assessment of impairment.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan non-produktif (lanjutan)

Bank menetapkan piutang *murabahah* yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini;

(i) Piutang *murabahah* yang secara individual memiliki nilai signifikan dan memiliki bukti objektif penurunan nilai;
(ii) Terdapat tunggakan yang melebihi 90 hari;
(iii) Piutang *murabahah* yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai signifikan.

Berdasarkan kriteria di atas, Bank melakukan penilaian secara individual untuk; (a) piutang *murabahah* dengan plafond lebih besar dari Rp2 miliar dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet; atau (b) piutang *murabahah* yang diberikan dengan plafond lebih besar dari Rp2 miliar yang direstrukturisasi.

Bank menetapkan piutang *murabahah* yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini;

(i) Piutang *murabahah* yang secara individual memiliki nilai signifikan namun tidak memiliki bukti objektif penurunan nilai;
(ii) Piutang *murabahah* yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan;
(iii) Piutang *murabahah* yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset produktif yang dinilai secara kolektif dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko piutang yang sama dengan mempertimbangkan segmentasi piutang berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu (*probability of default*).

Bank menggunakan metode *migration analysis* yang merupakan suatu metode analisis statistik, untuk menilai cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang yang diberikan secara kolektif. Bank menggunakan data historis minimal 5 (lima) tahun dalam menghitung *Probability of Default* ("PD") dan *Loss of Given Default* ("LGD").

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

c. Allowance for impairment losses on earning and non-earning assets (continued)

The Bank determines murabahah receivables to be evaluated for impairment through individual evaluation if one of the following criteria is met;

(i) Murabahah receivables which individually have significant value and there is objective evidence of impairment;
(ii) There are arrears exceeding 90 days;
(iii) Restructured murabahah receivables which individually have insignificant value.

Based on the above criteria, the Bank assessed individual assessments for; (a) murabahah receivables with a ceiling greater than Rp2 billion with substandard, doubtful, and loss collectibility; or (b) murabahah receivables granted with a ceiling greater than Rp2 billion which are restructured.

The Bank determines murabahah receivables to be evaluated for impairment through collective evaluation if one of the following criteria is met;

(i) Murabahah receivables which individually have significant value but there is no objective evidence of impairment;
(ii) Murabahah receivables which individually have insignificant value; and
(iii) Restructured murabahah receivables which individually have insignificant value.

The calculation of allowance for impairment losses on earning assets which are evaluated collectively, is grouped based on similar receivable risk characteristics and taking into account the receivable segmentation on the basis of historical loss experience (probability of default).

The Bank uses the migration analysis method which is a statistical model analysis method to assess allowance for impairment losses on collective receivables. The Bank uses 5 (five) years historical data to compute for the Probability of Default ("PD") and Loss Given Default ("LGD").

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan non-produktif (lanjutan)

Bank menggunakan nilai wajar agunan sebagai dasar arus kas masa datang apabila memenuhi salah satu kondisi berikut;

(i) Piutang dan pembiayaan bersifat *collateral dependent*, yaitu jika pelunasan pembiayaan hanya bersumber dari agunan;
(ii) Pengambilalihan agunan kemungkinan besar terjadi dan didukung dengan perjanjian legal pengikatan agunan.

Kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diukur sebesar selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang yang didiskonto menggunakan tingkat margin efektif awal dari aset keuangan tersebut.

Kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan dicatat pada akun cadangan kerugian penurunan nilai sebagai pengurang terhadap aset produktif yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

Penerimaan kembali atas aset produktif yang diberikan yang telah dihapusbukukan, pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas aset produktif yang telah dihapusbukukan pada tahun-tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain pendapatan margin.

Aset produktif atas pinjaman *qardh*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, aset yang diperoleh untuk *ijarah*, serta komitmen dan kontinjensi yang memiliki risiko pembiayaan seperti bank garansi. Bank membentuk cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan estimasi kerugian aset produktif yang tidak dapat ditagih sebagaimana diatur dalam PSAK yang berlaku. Selain itu, Bank juga menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 02/POJK.03/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah" yang berlaku efektif tanggal 7 Februari 2022.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

c. Allowance for impairment losses on earning and non-earning assets (continued)

Bank uses the fair value of collateral as the basis for future cash flows if one of the following conditions is met;

(i) Receivables and financing are collateral dependent, that is, if repayment of financing only comes from collateral;

(ii) Collateral takeover is likely to occur and is supported by a legal agreement of collateral binding.

Impairment losses on financial assets recorded at amortized cost are measured as the difference between the carrying amount of the financial assets and present value of estimated future cash flows discounted at the financial assets original effective margin rate.

Impairment losses are recognised in statement of profit or loss and other comprehensive income and reflected in an allowance for impairment losses account against earning assets carried at amortised cost.

The recoveries of written-off earning assets in the current year are credited by adjusting the allowance for impairment losses accounts. Recoveries of written-off loans from previous years are recorded as operating income other than margin income.

Earning assets such as, funds of qardh, mudharabah financing, musyarakah financing, assets acquired for ijarah, and commitments and contingencies which carry financing risk, such as bank guarantees. The Bank provides the allowance for impairment losses based on the estimated losses from uncollectible amount earning assets as stipulated in the applicable SFAS. In addition, the Bank also implemented Regulation of the Financial Services Authority ("POJK") No. 02/POJK.03/2022 dated January 31, 2022 regarding "Asset Quality Ratings for Sharia Bank and Sharia Business Unit" which was effective as at February 7, 2022.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan non-produktif (lanjutan)

Cadangan kerugian minimum yang harus dibentuk sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") adalah sebagai berikut:

(i) Cadangan umum, ditetapkan paling rendah sebesar 1% dari aset produktif yang digolongkan lancar diluar giro dan penempatan pada Bank Indonesia, surat berharga yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah dan aset produktif yang dijamin dengan agunan tunai.

(ii) Cadangan khusus, sekurang-kurangnya sebesar:
(a) 5% dari aset produktif yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi nilai agunan;
(b) 15% dari aset produktif yang digolongkan Kurang Lancar setelah dikurangi nilai agunan;
(c) 50% dari aset produktif yang digolongkan Diragukan setelah dikurangi nilai agunan; dan
(d) 100% dari aset produktif yang digolongkan Macet setelah dikurangi nilai agunan.

Kriteria penilaian nilai agunan yang dapat dikurangkan dalam pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK").

Atas aset non-produktif, manajemen Bank menentukan cadangan kerugian penurunan nilai pada nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya pelepasan.

d. Giro dan penempatan pada Bank Indonesia

Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia terdiri dari giro *wadiah* pada Bank Indonesia dan penanaman dana pada Bank Indonesia berupa Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah ("FASBIS") dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah ("SBIS").

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

c. Allowance for impairment losses on earning and non-earning assets (continued)

The minimum allowance to be provided in accordance with Regulation of the Financial Services Authority ("POJK") is as follows:

(i) General reserve, shall be no less than 1% of total earning assets classified as current, excluding current accounts and placements with Bank Indonesia, securities issued by the government based on sharia principles and part of earning assets guaranteed cash collateral.

(ii) Special reserves, shall be at least:
(a) 5% of earning assets classified as Special Mention after deducting the collateral value;
(b) 15% of earning assets classified as Substandard after deducting the collateral value;
(c) 50% of earning assets classified as Doubtful after deducting the collateral value; and
(d) 100% of earning assets classified as Loss after deducting the collateral value.

The criteria for assessment of the value of collateral that can be deducted in the calculation of allowance for impairment losses are based on Regulation of the Financial Services Authority ("POJK").

For non-earning assets, bank management determines the allowance for impairment losses at the lower of the carrying value and the fair value after deducting disposal costs.

d. Current account and placement with Bank Indonesia

Current account and placements with Bank Indonesia consist of wadiah current accounts with Bank Indonesia and placements of funds with Bank Indonesia in the form of Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities ("FASBIS") and Bank Indonesia Sharia Certificates ("SBIS").

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Giro dan penempatan pada Bank Indonesia (lanjutan)

FASBIS merupakan sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip masing-masing adalah *wadiah* dan *jualah*. Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia disajikan sebesar saldo penempatan.

e. Giro pada bank lain

Giro pada bank lain dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Bonus yang diterima Bank dari bank umum syariah diakui sebagai pendapatan usaha lainnya. Penerimaan jasa giro dari bank non-syariah tidak diakui sebagai pendapatan Bank.

Dana penerimaan jasa giro yang berasal dari bank non-syariah dikategorikan sebagai dana non-halal, sehingga Bank Syariah menyalurkannya sebagai dana kebajikan. Sebelum dana kebajikan tersebut disalurkan, maka pencatatannya di sisi liabilitas.

f. Investasi pada surat berharga

Surat berharga syariah adalah surat bukti penanaman dalam surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang syariah dan/atau pasar modal syariah antara lain obligasi syariah (sukuk), sertifikat reksadana syariah dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.

Pada saat pengakuan awal, Bank menentukan klasifikasi investasi pada sukuk sebagai diukur pada biaya perolehan, diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

a. Diukur pada biaya perolehan

- Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan atau hasilnya;
- Biaya perolehan sukuk termasuk biaya transaksi;

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

d. Current account and placement with Bank Indonesia (continued)

FASBIS are certificates issued by Bank Indonesia as a proof of short-term fund deposits under wadiah and jualah principles, respectively. Current accounts and placements with Bank Indonesia are stated at their outstanding balances of placements.

e. Current account with other banks

Current accounts with other banks are stated at their outstanding balances net of allowance for impairment losses. Bonuses received by the Bank from commercial banks based on sharia principles are recognized as other operating income. Proceeds of interest on current accounts from non-sharia banks are not recognized as the Bank's income.

The received current account service funds that come from non-sharia Bank are categorized as non-halal funds, so Sharia Bank then distributed the funds as qardhul hasan funds. Before the qardhul hasan funds are distributed, it is recorded in liabilities.

f. Investments in marketable securities

Sharia marketable securities are proof of investments under sharia principles commonly traded in sharia money market and/or sharia stock exchange, such as sharia bonds (sukuk), sharia mutual fund certificates and other marketable securities based on Sharia principles.

At initial recognition, the Bank determines the classification of investments in sukuk either measured at cost, fair value through other comprehensive income or fair value through profit or loss.

a. Measured at amortized cost

- *The investment is held in a business model whereby the primary goal is to obtain contractual cash flows and has contractual terms in determining the specific date of principal payments and or the results;*
- *Sukuk acquisition cost includes transaction cost;*

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Investasi pada surat berharga (lanjutan)

a. Diukur pada biaya perolehan (lanjutan)

- Selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi.

b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

- Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan melakukan penjualan sukuk, terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan atau hasilnya;
- Biaya perolehan sukuk termasuk biaya transaksi;
- Selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi komprehensif;

- Keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain setelah memperhitungkan saldo selisih biaya perolehan dan nilai nominal yang belum diamortisasi dan saldo akumulasi keuntungan dan kerugian nilai wajar yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain sebelumnya. Ketika investasi sukuk dihentikan pengakuannya, akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

c. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

- Biaya perolehan sukuk tidak termasuk biaya transaksi;
- Selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

f. Investments in marketable securities (continued)

a. Measured at amortized cost (continued)

- *The difference between the acquisition cost and the nominal value is amortized on a straight-line basis over the period of the sukuk and recognized in profit or loss.*

b. Measured at fair value through other comprehensive income

- *The investment is held in a business model whereby the primary goal is to obtain contractual cash flows and to sell the sukuk, and has contractual terms in determining the specific date of principal payments and or the results;*

- *Sukuk acquisition cost includes transaction cost;*
- *The difference between acquisition cost and the nominal value is amortized on a straight-line basis over the period of the sukuk and is recognized in comprehensive income;*
- *Gain or loss from changes of fair value is recognized in other comprehensive income after considering unamortized difference of acquisition cost and nominal value and accumulated gain or loss of fair value which has been previously recognized in other comprehensive income. When sukuk is derecognized, the accumulated gain or loss which was been previously recognized in other comprehensive income is reclassified to profit or loss as reclassification adjustment.*

c. Measured at fair value through profit or loss

- *Sukuk acquisition cost excludes transaction cost;*
- *The difference between fair value and the carrying value is recognized in profit or loss.*

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Investasi pada Surat Berharga (lanjutan)

Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank ("SIMA") merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah ("UUS") yang digunakan sebagai sarana investasi jangka pendek di pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah*, SIMA disajikan sebesar saldonya dikurangi dengan penyisihan kerugian.

Cadangan kerugian penurunan nilai surat berharga disajikan sebagai pengurang dari surat berharga.

g. Piutang

Piutang terdiri dari piutang *murabahah* dan piutang *ijarah*.

Murabahah adalah akad jual beli antara nasabah dengan Bank, dimana Bank membiayai kebutuhan konsumsi, investasi dan modal kerja nasabah yang dijual dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama. Pembayaran atas pembiayaan ini dilakukan dengan cara mengangsur dalam jangka waktu yang ditentukan.

Piutang *murabahah* pada awalnya diukur pada nilai bersih ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode margin efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri.

Piutang *ijarah* adalah porsi pokok atas pendapatan sewa yang belum dibayar pada saat jatuh tempo. Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang *ijarah* disajikan sebagai pengurang dari piutang *ijarah*.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

f. Investments in marketable securities (continued)

Interbank Mudharabah Investment Certificate ("SIMA") is a certificate issued by a Sharia Bank or Sharia Business Units ("UUS") that is used as a short-term investment instrument in the interbank money market based on sharia principles. With a mudharabah contract, SIMA is presented at its balance less allowance for losses.

Allowance for impairment losses marketable securities are presented as a deduction from the marketable securities.

g. Receivables

Receivables consist of murabahah receivables, and ijarah receivables

Murabahah is a sale and purchase contract between the customer and the Bank, whereby the Bank finances the consumption, investment and working capital needs of the customer sold with a principle price plus a certain margin that is mutually informed and agreed. Repayment on this financing is made in installments within a specified period.

Murabahah receivables are initially measured at net realizable value plus directly attributable transaction costs which is an additional cost to obtain the respected financial assets and after the initial recognition, are measured at amortized cost using the effective margin method less any allowance for impairment losses value.

Ijarah is the contract of transferring the rights (benefits) of an asset within a certain period of time with the payment of rent (ujrah) without the transfer of ownership of the asset itself.

Ijarah receivables are stated at the principal portion of unpaid rent income at maturity. Allowance for impairment losses accounts on ijarah receivables is presented as a deduction from of Ijarah receivables.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

h. Pinjaman *qardh*

Pinjaman *qardh* adalah penyaluran dana dengan akad *qardh*.

Akad *qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

Pinjaman *qardh* meliputi pembiayaan dengan akad *hawalah* dan *rahn*. Akad *hawalah* adalah akad pengalihan utang dari pihak yang berutang (nasabah) kepada pihak lain (Bank) yang wajib menanggung atau membayar. Atas transaksi ini Bank mendapatkan imbalan (*ujrah*) dan diakui sebagai pendapatan pada saat diterima.

Pinjaman *qardh* diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan penerimaan dari pinjaman atas *qardh* yang dilunasi diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya.

Pada tanggal laporan posisi keuangan, pinjaman *qardh* dinyatakan sebesar saldo pinjaman dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil reviu oleh manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada.

i. Pembiayaan

Pembiayaan bagi hasil dapat dilakukan dengan akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan kerjasama antara Bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah sebagai pelaksana usaha (*mudharib*) selama jangka waktu tertentu. Pembagian hasil keuntungan dari proyek atau usaha tersebut ditentukan sesuai dengan nisbah (*predetermined ratio*) yang telah disepakati bersama. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pembiayaan *mudharabah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil reviu oleh manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

h. Funds of qardh

Funds of qardh represent a distribution of funds with qardh agreement.

Qardh contract is a borrowing agreement with the condition that the borrower should repay the loan at a specified period of time.

Funds of qardh includes hawalah and rahn financing contract. Hawalah is a transfer of debts from debtors to other party (Bank) which obligate to shoulder or pay. The Bank will obtain an fee (ujrah) from this transaction, which is recognised as income when received.

Qardh receivables are recognized at the same amount of funds lent when these occur. Any excess amount paid by the borrower in repaying a qardh is recognized as revenue when these are incurred.

On the statements of financial position date, funds of qardh is stated at the outstanding financing balance less allowance for impairment losses which is provided based on the management's review of the financing quality.

i. Financing

Financing with profit sharing scheme can be done in the form of mudharabah and musyarakah contract.

Mudharabah financing is a joint financing made between the Bank as the owner of the funds (shahibul maal) and the customer as a business executor (mudharib) during a certain period. The profit sharing from the project or the business is determined in accordance with the mutually agreed nisbah (predetermined ratio). On the statement of financial position date, mudharabah financing is stated at the outstanding financing balance less allowance for impairment losses which is provided based on the management's review of the financing quality.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

i. Pembiayaan (lanjutan)

Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra *musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pembiayaan *musyarakah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil reviu oleh manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada.

j. Aset yang diperoleh untuk *ijarah*

Aset yang diperoleh untuk *ijarah* merupakan aset yang menjadi objek transaksi sewa (*ijarah*) dan dicatat di laporan posisi keuangan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Objek sewa dalam transaksi *ijarah* disusutkan sesuai kebijakan penyusutan aset sejenis, sedangkan objek sewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* disusutkan sesuai masa sewa.

Ijarah muntahiyah bittamlik adalah sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (hibah) pada saat tertentu sesuai akad sewa.

Perpindahan hak milik objek sewa kepada penyewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* dapat dilakukan dengan cara;

(i) hibah;
(ii) penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding dengan sisa cicilan sewa;
(iii) penjualan pada akhir sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati pada awal akad; dan
(iv) penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad.

Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan jika nilai tercatat aset lebih besar dari estimasi jumlah yang dapat dipulihkan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

i. Financing (continued)

Musyarakah is a partnership contract among fund's owners (musyarakah partners) to contribute funds and conduct a business on a joint basis through partnership with the profit sharing based on a predetermined ratio, while the losses are borne proportionally based on the capital contribution. On the statement of financial position dates, musyarakah financing is stated at the outstanding financing balance less allowance for impairment losses which is provided based on the management's review on the financing quality.

j. Assets acquired for ijarah

Assets acquired for ijarah represent object of leased assets and are recorded in the statement of financial position at the acquisition cost, net of accumulated depreciation.

Leased object in ijarah transaction is depreciated based on the depreciation policy for similar assets, while leased object in ijarah muntahiyah bittamlik transaction is depreciated based on leased term.

Ijarah muntahiyah bittamlik is a lease transaction between the lessor and lessee to obtain fee from the object leased with the option of transferring the title through purchase or grant at a certain time in accordance with the lease contract.

The transfer of ownership right on the leased object to the lessee in ijarah muntahiyah bittamlik can be conducted through;

(i) a grant;
(ii) sale prior to the end of agreement for an amount equivalent to the remaining lease installments;
(iii) sale prior to the end of the agreement at a specified amount as agreed at the inception of the agreement; and
(iv) installment sales at a specific price as agreed in the agreement.

The carrying value of asset is immediately impaired to its recoverable amount if the asset's carrying amount is greater than the estimated recoverable amount.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

k. Aset tetap

Aset tetap dinilai sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, kecuali tanah dinilai dengan metode revaluasi. Harga perolehan termasuk pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset tersebut. Tanah disajikan sebesar nilai wajar, berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh penilai independen eksternal yang telah terdaftar di OJK. Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala setiap tiga tahun untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan jumlah tercatatnya. Aset tetap lainnya disajikan sebesar harga perolehan dikurangi dengan penyusutan. Harga perolehan termasuk pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset tersebut.

Aset tetap, kecuali tanah, disusutkan sejak bulan ketika aset tersebut digunakan dengan menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa manfaat aset sebagai berikut:

Jenis	Tahun/ *Year*
Bangunan	20
Inventaris kantor	4 - 8
Kendaraan bermotor	4

Nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan dievaluasi setiap akhir tahun dan disesuaikan secara prospektif jika diperlukan.

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi tanah dikreditkan pada “surplus revaluasi aset tetap” sebagai bagian dari pendapatan komprehensif lainnya

Penurunan yang menghapus nilai kenaikan yang sebelumnya atas aset yang sama dibebankan terhadap “surplus revaluasi aset tetap” sebagai bagian dari pendapatan komprehensif lainnya; penurunan lainnya dibebankan pada laporan laba rugi.

Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan jika nilai tercatat aset lebih besar dari estimasi jumlah yang dapat dipulihkan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

k. Fixed assets

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation, except for land which is valued with revaluation method. The acquisition cost includes directly attributable cost for the acquisition of the asset. The land is stated at fair value, based on the assessment performed by external independent appraisers which are registered with OJK. Valuation are performed regularly every three years to ensure that the fair value of the revalued assets does not differ materially from its carrying amount. All other property, plant and equipment are stated at historical cost less depreciation. Historical cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the items.

Fixed assets, except land, are depreciated from the month of the usage of assets and computed using the straight-line method based on the estimated useful life of the assets as follows:

Type	
Buildings	20
Office equipment	4 - 8
Vehicles	4

The asset residual values, useful life and depreciation method are evaluated at each year end and adjusted prospectively if necessary.

The increase in the carrying amount arising from revaluation of land is credited to "surplus on revaluation of fixed assets " as part of other comprehensive income.

The decrease in the carrying amount that offset previous increase of the same asset is charged to "surplus on revaluation of fixed assets" as part of other comprehensive income; other decrease is charged to the profit or loss.

The carrying value of asset is immediately impaired to its recoverable amount if the asset's carrying amount is greater than the estimated recoverable amount.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

k. Aset tetap (lanjutan)

Apabila aset tetap dilepas, maka nilai harga perolehan dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan posisi keuangan dan keuntungan atau kerugian bersih atas pelepasan aset tetap diakui pada "beban non-usaha - bersih" dalam laporan laba rugi. Jika aset yang direvaluasi dijual, jumlah yang dicatat di dalam ekuitas dipindahkan ke saldo laba.

Nilai tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) diakui dalam laporan laba rugi dan komprehensif lain pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

l. Aset lain-lain

Aset lain-lain antara lain terdiri dari biaya dibayar dimuka, pendapatan yang masih akan diterima dan Agunan Yang Diambil Alih ("AYDA").

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

Agunan yang diambil alih sehubungan dengan penyelesaian piutang dan pembiayaan syariah diakui sebesar nilai neto yang dapat direalisasi atau sebesar nilai tercatat dari piutang dan pembiayaan syariah, maksimal sebesar nilai kewajiban nasabah. Nilai neto yang dapat direalisasi adalah nilai wajar agunan setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan. Kelebihan saldo piutang dan pembiayaan syariah, yang belum dilunasi oleh debitur diatas nilai dari agunan yang diambil alih, dibebankan sebagai penyelesaian bermasalah piutang dan pembiayaan syariah pada tahun berjalan.

Manajemen mengevaluasi nilai agunan yang diambil alih secara berkala. Penyisihan kerugian agunan yang diambil alih dibentuk berdasarkan penurunan nilai agunan yang diambil alih.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

k. Fixed assets (continued)

The net gains or losses arising from disposal of the fixed assets are determined by comparing the proceeds received from disposal with the carrying amount of the assets and recognised in "non-operating expenses - net" in the income statement. When the revalued assets are sold, amounts recorded in equity are transferred to retained earnings.

The carrying value of fixed assets is determined when they are disposed of or when there are no future economic benefits expected from their use or disposal. Gain or loss arising from the derecognition of an asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income in the year the asset is derecognized.

l. Other assets

Other assets among other consist of prepaid expense and income receivables and foreclosed collaterals ("AYDA").

Prepaid expenses are amortised over the useful life using the straight-line method.

Foreclosed collaterals acquired in settlement of sharia receivables and financing are recognized at net realizable values or at sharia receivables and financing carrying amount, the maximum amount which is customer liabilities. Net realizable value is the fair value of the collateral after deducting the estimated costs of disposal. The excess in sharia receivables and financing balances which has not been paid by debtors over the value of foreclosed collaterals is charged to allowance for possible losses on sharia receivables and financing in the current year.

Management evaluates the value of foreclosed collaterals periodically. Allowance for losses of foreclosed collaterals is provided based on the impairment of foreclosed collaterals.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Liabilitas segera

Liabilitas segera merupakan liabilitas Bank kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai perintah pemberi amanat perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Liabilitas segera dinyatakan sebesar nilai liabilitas Bank kepada pemberi amanat.

n. Simpanan dari nasabah dan bank lain

Simpanan merupakan simpanan pihak lain dalam bentuk giro *wadiah*, dan tabungan *wadiah*. Simpanan dari bank lain dinyatakan sebesar nilai kewajiban Bank kepada bank lain.

Giro *wadiah* digunakan sebagai instrumen pembayaran dan dapat ditarik setiap saat melalui cek dan bilyet giro, serta mendapatkan bonus sesuai dengan kebijakan Bank. Giro *wadiah* dinyatakan sebesar titipan pemegang giro di Bank.

Tabungan *wadiah* adalah simpanan dana nasabah pada Bank, yang bersifat titipan dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Terhadap titipan tersebut, Bank tidak dipersyaratkan untuk memberikan imbalan kecuali dalam bentuk pemberian bonus secara sukarela. Tabungan *wadiah* dinyatakan sebesar liabilitas Bank.

o. Dana syirkah temporer

Dana *syirkah* temporer adalah investasi yang diterima oleh Bank. Bank mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana, baik sesuai dengan kebijakan Bank atau kebijakan pembatasan dari pemilik dana, dengan keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan. Dana *syirkah* temporer terdiri dari tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

Tabungan *mudharabah* merupakan simpanan dana pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya. Tabungan *mudharabah* dicatat sebesar nilai simpanan dari nasabah.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

m. Obligations due immediately

Obligations due immediately represent the Bank's obligations to other parties which should be settled immediately based on predetermined instructions by those having the authority. Obligations due immediately are stated at the amounts of the Bank's liabilities to the entrustee.

n. Deposits from customers and other banks

Deposits represent other parties' deposits in the form of wadiah demand deposits, and wadiah savings deposits. Deposits from other banks are stated at the amounts payable to other banks.

Wadiah demand deposits are used as payment instruments and available for withdrawal at any time through cheque and demand deposit drafts and receive bonuses according to the Bank's policies. Wadiah demand deposits are stated at the amount entrusted by depositors.

Wadiah savings deposits are customers' deposits in the Bank which can be withdrawn at any time. For these deposits, the Bank is not required to give any benefits except in terms of voluntary bonuses. Wadiah savings deposits are stated at the amount payable to customers.

o. Temporary syirkah funds

Temporary syirkah funds represent investment received by the Bank. The Bank has the rights to manage and invest the funds in accordance with either the Bank's policy or restriction set by the depositors with the agreed profit sharing. Temporary syirkah funds consist of mudharabah savings deposits and mudharabah time deposits.

Mudharabah savings deposits represent funds from other parties who receive predetermined and pre-agreed profit sharing (nisbah) based on income derived by the Bank from the use of such funds. Mudharabah savings deposits are stated based on the customer's savings deposit balance.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Dana syirkah temporer (lanjutan)

Deposito *mudharabah* merupakan simpanan pihak lain yang hanya bisa ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito *mudharabah* dengan Bank.

Deposito *mudharabah* dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito dengan Bank.

Dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai liabilitas. Hal ini karena Bank tidak berkewajiban untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi ketika mengalami kerugian.

Di sisi lain dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham, seperti hak *voting* dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non-investasi.

Dana *syirkah* temporer merupakan salah satu unsur laporan posisi keuangan, hal tersebut sesuai dengan prinsip syariah yang memberikan hak kepada Bank untuk mengelola dan menginvestasikan dana, termasuk untuk mencampur dana dimaksud dengan dana lainnya.

Pemilik dana *syirkah* temporer memperoleh bagian atas keuntungan sesuai kesepakatan dan menerima kerugian berdasarkan jumlah dana dari masing-masing pihak. Pembagian hasil dana *syirkah* temporer dapat dilakukan dengan konsep bagi hasil atau bagi keuntungan.

p. Pendapatan pengelolaan dana sebagai *mudharib*

Pendapatan pengelolaan dana sebagai *mudharib* terdiri dari pendapatan dari transaksi piutang *murabahah*, pendapatan dari *ijarah*, pendapatan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dan pendapatan usaha utama lainnya.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

o. Temporary syirkah funds (Continued)

Mudharabah time deposits represent third party funds that can be withdrawn only at a certain point in time based on the agreement between the mudharabah depositors and the Bank.

Mudharabah time deposits are stated at nominal amount based on the agreement between the depositors and the Bank.

Temporary syirkah funds cannot be classified as liability. This is because the Bank does not have any liability to return the fund to the owners, except for losses due to the management's negligence or misrepresentation.

On the other hand, temporary syirkah funds cannot also be classified as equity, because of the existence of maturity period and the absence of similar rights of depositors as with shareholders, such as voting rights and the rights to realise gain from current assets and other non-investment assets.

Temporary syirkah funds represent one of the statement of financial position accounts which is in accordance with sharia principles that provide rights to the Bank to manage and invest funds, including mixing of one fund with the other funds.

The owners of temporary syirkah funds receive parts of profit in accordance with the agreement and receive loss based on the proportion of fund from each parties. The profit distribution of temporary syirkah funds might be based on profit sharing or revenue sharing concept.

p. Revenue from fund management as mudharib

Revenue from fund management as mudharib consists of income from murabahah receivables transactions, income from ijarah, profit sharing from mudharabah and musyarakah financing and other main operating income.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

p. Pendapatan pengelolaan dana sebagai *mudharib* (lanjutan)

Pendapatan atas piutang *murabahah* menggunakan metode setara tingkat imbal hasil efektif (margin efektif). Margin efektif adalah margin yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari piutang *murabahah*.

Pada saat menghitung margin efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian piutang di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari margin efektif, biaya transaksi dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Pendapatan *ijarah* diakui selama masa akad secara merata.

Pendapatan usaha *musyarakah* yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan, sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan liabilitas.

Pendapatan usaha *mudharabah* diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati dan tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi *mudharabah*.

q. Pendapatan usaha utama lainnya

Pendapatan usaha utama lainnya terdiri dari pendapatan dari pinjaman *qardh*, pendapatan dari FASBIS, pendapatan dari penempatan pada bank syariah lain dan pendapatan bagi hasil investasi pada surat berharga.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

p. Revenue from fund management as mudharib (continued)

Income from murabahah receivables is recognised using the effective rate of return method (effective margin). Effective margin is the margin that precisely discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the murabahah receivables.

When calculating the effective margin, Bank estimates the future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument but does not consider the loss of receivables in the future. This calculation includes all commissions, provision fees and other forms accepted by the parties in the contract that are an inseparable part of the effective margin, transaction costs and all other premiums or discounts.

Income from ijarah is recognised proportionately over the contract period.

Musyarakah revenue which is distributed to active partners is recognized in accordance with the agreement, while musyarakah revenue which is distributed to passive partners is recognized as right of the passive partner to profit sharing and liability.

Revenue from mudharabah is recognized during the period of profit sharing in accordance with the agreed nisbah, while recognition based on projected income is not allowed. Loss incurred due to negligence on the part of fund manager is charged to the fund manager and shall not reduce the mudharabah investment.

q. Other main business income

Other main operating income consists of income derived from funds of qardh, FASBIS, placements with other sharia banks and profit sharing from investment in marketable securities.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah* temporer

Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah* temporer merupakan bagian bagi hasil milik pihak ketiga yang didasarkan pada prinsip *mudharabah mutlaqah* atas pengelolaan dana mereka oleh Bank. Pendapatan yang dibagikan adalah pendapatan yang telah diterima (*cash basis*).

Bagian laba yang dibagikan kepada pemilik dana dihitung dari pendapatan yang telah diterima.

Jumlah pendapatan margin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan dari aset produktif lainnya yang akan dibagikan kepada nasabah penyimpan dana. Bank menghitung secara proporsional sesuai dengan alokasi dana nasabah dan Bank yang dipakai dalam pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya yang disalurkan.

Dari jumlah pendapatan margin dan bagi hasil yang tersedia untuk nasabah tersebut kemudian dibagihasilkan kepada nasabah penabung dan deposan sebagai *shahibul maal* dan Bank sebagai *mudharib* sesuai dengan porsi nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya, sedangkan untuk nasabah giro dan tabungan dengan akad *wadiah* dapat diberikan bonus berdasarkan kebijakan Bank.

Pendapatan margin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya yang didapatkan melalui penggunaan dana Bank, seluruhnya menjadi milik Bank, termasuk pendapatan dari investasi Bank berbasis imbalan.

s. Pendapatan imbalan jasa perbankan

Pendapatan imbalan jasa perbankan diakui pada periode akuntansi dimana jasa diberikan, dengan mengacu pada tingkat penyelesaian dari suatu transaksi dan dinilai berdasarkan jasa aktual yang telah diberikan sebagai proporsi atas total jasa yang harus diberikan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

r. Third parties' share on return of temporary syirkah funds

Third parties' share on return of temporary syirkah funds represents third parties' share on the income of the Bank derived from managing of such funds by the Bank under mudharabah mutlaqah principles. The profit sharing is distributed on the cash basis.

The profit sharing distributed to fund owners is calculated based on the revenue of the Bank.

Margin income and profit sharing on financing facilities and other earning assets are distributed to fund owners. The Bank computes proportionately based on the allocation of funds from owners and the Bank which was used in financing and other earning assets granted.

The total available margin and profit sharing are distributed to customers and depositors as shahibul maal and to the Bank as mudharib in accordance with a predetermined nisbah, while for customers of demand deposits and savings deposits under wadiah agreement might be granted bonuses according to the Bank's policy.

Margin income and profit sharing from financing and other earning assets which are earned through the use of Bank's funds, are entirely entitled to the Bank, including income from the Bank's fee-based investments.

s. Fee based income from banking services

Fee based income from banking services is recognised in the accounting period in which the services are rendered, by reference to the stage of completion of the specific transaction and assessed on the basis of the actual service provided as a proportion of the total service to be provided.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

t. Imbalan kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek seperti upah, iuran jaminan sosial, cuti jangka pendek dan tunjangan hari raya diakui selama tahun berjalan jasa diberikan. Imbalan jangka pendek dihitung sebesar jumlah yang tidak didiskontokan.

Program imbalan pasti dan imbalan kerja jangka panjang lainnya

Imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya seperti cuti besar diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai yang memenuhi syarat. Imbalan kerja ditentukan berdasarkan peraturan Bank dan persyaratan minimum Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 tanggal 2 November 2021.

Imbalan pasca-kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya secara aktuaris ditentukan berdasarkan metode *Projected Unit Credit*.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain, terdiri atas:

(i) Keuntungan dan kerugian aktuarial.
(ii) Imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset).
(iii) Setiap perubahan dampak batas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset).

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti - neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Untuk imbalan kerja jangka panjang lain atas biaya jasa kini, biaya bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, dan pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto langsung diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

t. Employee benefits

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits such as salaries, social security contributions, short-term leaves and allowance of feast day are recognized during the period when services have been rendered. Short-term employee benefits are measured using undiscounted amounts.

Defined benefit plan and other long-term employee benefits

The post-employment benefits and other longterm employee benefits such as grand leaves are recognized as expense when services have been rendered by qualified employees. The benefits are determined based on Bank regulations and the minimum requirements of Job Creation Law No. 11 of 2020 dated November 2, 2021.

The post-employment benefits and other longterm employee benefits are actuarially determined using the Projected Unit Credit method.

Remeasurement of defined benefit liabilities (assets) net, which is recognized as other comprehensive income consist of:

(i) Actuarial gain and losses
(ii) Return on plan assets, excluding amounts that is included in net interest on liabilities (assets).
(iii) The effect of the asset ceiling, excluding amounts included in the net interest of liabilities (assets).

Remeasurement of defined benefit liabilities (assets) - net, which is recognized as other comprehensive income is not reclassified to profit or loss in the subsequent periods.

For other long-term employee benefits of current service cost, net interest expense of net defined benefit liabilities (assets), and re-measurement of liabilities (assets) is recognized immediately in the current year statements of profit or loss and other comprehensive income.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

t. Imbalan kerja (lanjutan)

Program imbalan pasti dan imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan)

Untuk imbalan kerja jangka panjang lain atas biaya jasa kini, biaya bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, dan pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto langsung diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Biaya jasa lalu diakui sebagai beban pada tanggal yang lebih awal antara ketika amandemen atau kurtailmen program terjadi, dan ketika biaya restrukturisasi atau pesangon diakui, sehingga biaya jasa lalu yang belum *vested* tidak lagi dapat ditangguhkan dan diakui selama periode *vesting* masa depan.

u. Perpajakan

Beban pajak tahun berjalan ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak tahun berjalan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer aset dan liabilitas antara pelaporan komersial dan pajak pada setiap tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan saldo rugi fiskal yang belum dikompensasikan, sepanjang perbedaan temporer dan rugi fiskal yang belum dikompensasikan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal posisi keuangan dan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila tidak lagi terdapat kemungkinan besar bahwa laba fiskal yang memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan.

Perubahan terhadap liabilitas pajak diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima, atau apabila diajukan keberatan dan atau banding oleh Bank, pada saat telah ada keputusan atas banding dan atau keberatan tersebut. Jika perlu, manajemen akan membentuk provisi berdasarkan jumlah yang diestimasikan akan dibayar kepada otoritas pajak.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

t. Employee benefits (continued)

Defined benefit plan and other long-term employee benefits (continued)

For other long-term employee benefits: current service cost, net interest expense of net defined benefit liabilities (assets), and re-measurement of liabilities (assets) is recognized immediately in the current year statements of profit or loss and other comprehensive income.

Past service costs are recognized as expense at the earlier date between the occurrence of the amendments or curtailment program occurs, and the recognition of the costs of restructuring or severance. Therefore, unvested past service cost can no longer be deferred and recognized over the future vesting period.

u. Taxation

Current tax expense is provided based on the estimated taxable income for the current year. Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between the financial and the tax bases of assets and liabilities at each reporting date.

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and carry forward of uncompensated tax losses to the extent that it is probable that those temporary differences and carry forward of unutilized tax losses will be utilized in deducting future taxable profit.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and is reduced when it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to compensate part or all of the benefit of the deferred tax assets.

Amendment to tax obligation is recorded when an assessment letter is received or, if objected to or appealed against by the Bank, when the result of such appeal or objection is determined. If needed, management will provide provisions based on the estimated amount which will be paid to tax authority.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

u. Perpajakan (lanjutan)

Aset dan liabilitas atas pajak tangguhan dan pajak kini dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajak yang akan berlaku pada tahun saat aset direalisasikan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang telah secara substantif diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan untuk dan/atau pembalikan seluruh perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, diakui sebagai "Manfaat/(Beban) Pajak Penghasilan" dan termasuk dalam laba atau rugi neto tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan ke laba komprehensif lainnya dan dilaporkan ke ekuitas.

v. Sumber dana kebajikan

Sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018, Sumber Dana Kebajikan yang didapat berasal dari Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (Dana TBDSP) apabila berasal dari:

1. Transaksi tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat dihindarkan termasuk pendapatan bunga (riba).
2. Transaksi syariah yang tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya (rukun dan/atau syaratnya).
3. Dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan.
4. Dana yang tidak diketahui pemiliknya, diketahui pemiliknya tetapi tidak ditemukan atau diketahui pemiliknya tetapi biaya pengembaliannya lebih besar dari jumlah dana tersebut.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

u. Taxation (continued)

Assets and liabilities on deferred tax and current tax can be offset if there is a legal enforceable right to offset.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized or the liability is settled based on tax laws that have been enacted or substantively enacted as at statements of financial position dates. The related tax effects of the provisions for and/or reversals of all temporary differences during the year, including the effect of change in tax rates, are recognized as "Income Tax Benefit/ (Expense)" and included in the net profit or loss for the year, except to the extent that they relate to items previously charged to other comprehensive income and reported to equity.

v. Source of qardhul hasan funds

Based on Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018, source of Qardhul Hasan Funds which acquired from Funds that are Prohibited to be Recognised as Revenue (TBDSP Funds), if the funds come from:

1. *The transaction that is not accordance with sharia principle and cannot be avoided include interest revenue (riba).*
2. *The sharia transaction that does not meet its term and conditions (principle and/or requirement).*
3. *Penalty funds (fines) because of not fulfilling the obligation on initial contract.*
4. *Unknown funds, the owner is known but was not found or the owner is known but return cost is higher than the stated amount.*

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI

Penyusunan laporan keuangan Bank mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dan pengungkapan yang terkait, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

a. Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Bank, manajemen telah membuat keputusan berikut, yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Penentuan kelompok investasi

Dalam mengklasifikasikan investasi pada surat berharga sebagai "diukur pada biaya perolehan" dan "diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain", Bank telah menetapkan bahwa investasi tersebut telah memenuhi persyaratan klasifikasi sebagaimana dijabarkan dalam Catatan 2f.

b. Estimasi dan asumsi

Asumsi utama masa depan dan ketidakpastian sumber estimasi utama yang lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Bank mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Bank. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Penyisihan kerugian aset produktif

Bank mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa debitur yang bersangkutan tidak dapat memenuhi liabilitas keuangannya. Dalam hal tersebut, Bank mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan debitur dan status pembiayaan dari debitur berdasarkan catatan.

3. USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Bank's financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts and related disclosures, at the end of the reporting period. Uncertainty regarding these assumptions and estimates may result in material adjustments to the carrying value of assets and liabilities in the next reporting period.

a. Judgment

In the process of implementing the Bank's accounting policies, management has made the following decisions, which have the most significant impact on the amounts recognized in the financial statements:

Determination of investment classification

In classifying investments in securities as "Measured at acquisition cost" and "measured at fair value through other comprehensive income", the Bank has determined that such investments has met the classification requirements as described in Note 2f.

b. Estimates and assumptions

The key future assumptions and uncertainties of other key estimates at the reporting date that pose a significant risk of material adjustments to the carrying amounts of assets and liabilities for the following year are disclosed below. The Bank bases its assumptions and estimates on parameters available at the time the financial statements were prepared. Assumptions and circumstances regarding future developments may change due to market changes or situations beyond the Bank's control. These changes are reflected in the related assumptions at the time they occur.

Allowance for impairment losses on earning assets

The Bank evaluates certain accounts if there is information that the debtor in question cannot fulfill his financial obligations. In such cases, the Bank considers, based on the available facts and situations, including but not limited to, the length of the relationship with the debtor and the financing status of the debtor based on the records.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI (lanjutan)

b. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Penyisihan kerugian aset produktif (lanjutan)

Pembiayaan dari pihak ketiga dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi yang spesifik atas nilai piutang debitur guna mengurangi nilai piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Bank. Provisi yang spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi nilai penyisihan kerugian aset produktif.

Imbalan pasti

Penentuan utang dan biaya pensiun dan liabilitas imbalan pasti Bank bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Bank diakui segera dalam laporan laba rugi dan pada saat terjadi. Sementara Bank berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Bank dapat mempengaruhi secara material liabilitas imbalan pasti dan beban imbalan pasti neto. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2t dan 32.

3. USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

b. Estimates and assumptions (continued)

Allowance for impairment losses on earning asset (continued)

Financing from third parties and known market factors, to record specific provisions for the value of debtors' receivables in order to reduce the value of receivables expected to be received by the Bank. These specific provisions are re-evaluated and adjusted if additional information received affects the value of the allowance for impairment losses on earning asset.

Defined benefits

The determination of debt and pension costs and employee benefit liabilities of the Bank's depends on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rate, annual salary increase rate, annual employee benefit rate, disability rate, retirement age and mortality rate. Actual results that differ from the assumptions set by the Bank are recognized immediately in the statement of profit or loss when they occur. The Bank believes that its assumptions are reasonable and appropriate and significant differences in the Bank's assumptions may materially affect the estimated defined benefit liabilities and the net defined benefit expense. A more detailed explanation is disclosed in Note 2t and 32.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI (lanjutan)

b. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Bank mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan total pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak serta strategi perencanaan pajak masa depan.

3. USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

b. Estimates and assumptions (continued)

Income tax

Significant considerations are made in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and calculations for which the final tax determination is uncertain in the normal course of business. The Bank recognizes a liability for corporate income tax based on its estimate of whether there will be additional corporate income tax.

Deferred tax is recognized on all deductible temporary differences, to the extent that it is probable that taxable income will be available so that the temporary differences can be used. Significant estimates by management are required in determining the total deferred tax that can be recognized, based on the timing of use and the level of taxable income as well as future tax planning strategies.

4. KAS

Kas merupakan jumlah kas yang berada di teller dan khasanah kantor cabang Bank serta kas dalam perjalanan.

4. CASH

Cash is the amount of cash held at the teller and in vault of the Bank's branch offices and cash in transit.

5. GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA

5. CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA

	2023	2022	
Giro			*Current accounts*
Giro *wadiah*	402.035.437.833	551.711.909.343	*Wadiah demand deposit*
Penempatan pada Bank Indonesia			*Placements with Bank Indonesia*
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah ("FASBIS")	691.900.000.000	394.300.000.000	*Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities ("FASBIS")*
Jumlah	**1.093.935.437.833**	**946.011.909.343**	***Total***

Rincian imbal hasil dan jangka waktu penempatan pada Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

Details of the yield and placement period with Bank Indonesia are as follows:

	2023		2022		
	Imbal hasil per tahun/ *Yield per annum*	Jangka waktu/ *Period*	Imbal hasil per tahun/ *Yield per annum*	Jangka waktu/ *Period*	
FASBIS	5,25%	3 Hari	4,75%	3 hari	*FASBIS*

5. GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

Persentase Giro Wajib Minimum ("GWM") dalam mata uang Rupiah pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar 4,59 % dan 6,53%. Bank memperoleh insentif GWM sebesar 3% dan 1,1% untuk periode Desember 2023 dan 2022 berdasarkan data insentif Bank Indonesia sehingga GWM rata-rata dalam Rupiah yang wajib dipenuhi pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah 4,5% dan 6,4%.

Rasio GWM pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dihitung berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ("PADG") No. 24/8/PADG/2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang "Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Dan Unit Usaha Syariah" yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2022 yang mana mewajibkan setiap Bank untuk memelihara GWM dalam Rupiah yang besarnya ditetapkan sebesar 6% dan tanggal 1 September 2022 besarnya ditetapkan sebesar 7,5%.

Bank memperoleh fasilitas insentif Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial ("RPIM") sesuai Peraturan Anggota Dewan Gubernur ("PADG") No. 24/12/PADG/2022 tanggal 20 Juli 2022 tentang "Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/4/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu dan Inklusif (Perubahan PADG Insentif, serta disinsentif RIM sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/12/PBI/2019 tanggal 25 November 2019 tentang "Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah".

Bank telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Giro Wajib Minimum ("GWM") per tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

5. CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA (continued)

The percentage of Minimum Statutory Reserve Requirements ("GWM") in Rupiah currency on December 31, 2023 and 2022 is 4.59% and 6.53%.The Bank received GWM incentive of 3% and 1.1% for the period of December 2023 and 2022 based on Bank Indonesia incentive data therefore GWM ratio in Rupiah that must be fulfilled by the Bank as of December 31, 2023 and 2022 is set at 4.5% and 6.4%.

The GWM ratio as of December 31, 2023 and 2022 is calculated based on Member of the Board of Governors Regulation ("PADG") No. 24/8/PADG/2022 dated June 30, 2022 concerning "Implementation Regulations for Fulfillment of Statutory Reserves in Rupiah and Foreign Currencies for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Units" which came into force on July 1, 2022, and regulates that each Bank is required to maintain a Statutory Reserves ("GWM") in Rupiah the amount of which is set at 6% and on September 1, 2022 the amount is set at 7.5%.

The Bank received a Macroprudential Inclusive Financing Ratio ("RPIM") incentive component which is in accordance with the Member of the Board of Governors Regulation ("PADG") No. 24/12/PADG/2022 dated July 20, 2022 concerning "Amendment to the Member of the Board of Governors Regulation Number 24/4/PADG/2022 concerning Regulations for Implementation of Incentives for Banks Providing Provision of Funds for Certain and Inclusive Economic Activities (Changes to PADG Incentives, as well as disincentives RIM according to Bank Indonesia Regulation Number 21/12/PBI/2019 dated November 25, 2019 concerning "Amendments to Bank Indonesia Regulation Number 20/4/PBI/2018 concerning Macroprudential Intermediation Ratio and Macroprudential Liquidity Buffer for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Unit".

As at December 31, 2023 and 2022, the Bank has complied with the Bank Indonesia regulations regarding the Minimum Statutory Reserve Requirements ("GWM").

6. GIRO PADA BANK LAIN / *6. CURRENT ACCOUNT WITH OTHER BANKS*

	2023	2022	
Pihak berelasi			*Related parties*
Bank non-syariah			*Non-sharia bank*
PT Bank Central Asia Tbk	28.677.436.486	14.304.902.683	*PT Bank Central Asia Tbk*
Pihak ketiga			*Third party*
PT Bank OCBC NISP Tbk (Unit usaha syariah)	84.945.508	91.350.482	*PT Bank OCBC NISP Tbk (Sharia business units)*
Jumlah	28.762.381.994	14.396.253.165	*Total*
Penyisihan kerugian	(287.623.820)	(143.962.532)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah giro pada bank lain - bersih	**28.474.758.174**	**14.252.290.633**	***Total current account with other banks - net***

Perubahan penyisihan kerugian giro pada bank lain adalah sebagai berikut:

Changes in the allowance for losses on current account with other banks are as follows:

	2023	2022	
Saldo awal tahun	143.962.532	140.461.981	*Beginning year balance*
Pembentukan penyisihan tahun berjalan	143.661.288	3.500.551	*Additional provision during the year*
Saldo akhir tahun	**287.623.820**	**143.962.532**	***End of year balance***

Berdasarkan hasil penelaahan dan evaluasi manajemen, kolektibilitas seluruh giro pada bank lain pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 digolongkan lancar. Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian giro pada bank lain adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya giro pada bank lain.

Based on the results of management's review and evaluation, the collectibility of all current accounts with other banks as of December 31, 2023 and 2022 is classified as current. Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover impairment losses from uncollectible current accounts with other banks.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat giro pada bank lain yang dijadikan jaminan.

As at December 31, 2023 and 2022, no current accounts with other bank are pledged as collaterals.

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA / *7. INVESTMENT IN SECURITIES*

a. Berdasarkan jenis, tujuan investasi dan kolektibilitas / *a. Based on type, investment objective and collectibility*

	2023	2022	
Diukur pada biaya perolehan			***Measured at acquisition cost***
Lancar			*Current*
Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank ("SIMA")	-	230.000.000.000	*Interbank mudharabah investment certificate ("SIMA")*
Reksadana	62.000.000.000	100.000.000.000	*Mutual funds*
Penyisihan kerugian	(620.000.000)	(3.300.000.000)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah surat berharga diukur pada biaya perolehan - bersih	**61.380.000.000**	**326.700.000.000**	***Total marketable securities measured at acquisition cost - net***

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (lanjutan) / *7. INVESTMENT IN SECURITIES (continued)*

a. Berdasarkan jenis, tujuan investasi dan kolektibilitas (lanjutan) / *a. Based on type, investment objective and collectibility (continued)*

Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain			***Measured at fair value through other comprehensive income***
Lancar			*Current*
Non-pemerintah			*Non-government*
Sukuk korporasi	801.000.000.000	799.000.000.000	*Corporate sukuk*
Reksadana	375.000.000.000	425.000.000.000	*Mutual funds*
Sukuk wakalah	75.000.000.000	75.000.000.000	*Wakalah sukuk*
Macet			*Loss*
Sukuk korporasi	35.000.000.000	-	*Corporate sukuk*
Kenaikan nilai yang belum direalisasi	15.479.448.897	16.847.395.161	*Unrealized increase in value*
Subjumlah	**1.301.479.448.897**	**1.315.847.395.161**	***Subtotal***
Penyisihan kerugian	(48.184.049.489)	(13.158.473.952)	*Allowance for impairment losses*
Subjumlah non-pemerintah - bersih	**1.253.295.399.408**	**1.302.688.921.209**	***Non-government subtotal - net***
Pemerintah			*Government*
Sukuk BI	1.311.470.000.000	1.450.000.000.000	*Sukuk BI*
Surat berharga syariah negara	1.627.496.416.708	1.029.285.947.141	*Government sharia securities*
Penurunan nilai yang belum direalisasi	(13.503.570.126)	(14.278.734.541)	*Decrease in unrealized value*
Subjumlah pemerintah	**2.925.462.846.582**	**2.465.007.212.600**	***Government subtotal***
Jumlah surat berharga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - bersih	**4.178.758.245.990**	**3.767.696.133.809**	***Total securities measured at fair value through other comprehensive income - net***
Jumlah investasi pada surat berharga - bersih	**4.240.138.245.990**	**4.094.396.133.809**	***Total investments in marketable securities - net***

b. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo / *b. By remaining period to maturity*

	2023	**2022**	
Diukur pada biaya perolehan kurang dari 1 bulan	62.000.000.000	330.000.000.000	*Measured at acquisition cost less than 1 month*
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain kurang dari 1 bulan	903.000.000.000	1.450.229.200.000	*Measured at fair value through other comprehensive income less than 1 month*
lebih dari 1 bulan dan kurang dari 1 tahun	427.194.682.720	425.681.225.501	*more than 1 month and less than 1 year*
lebih dari 1 tahun	2.896.747.612.759	1.904.944.182.260	*more than 1 year*
Subjumlah	4.288.942.295.479	4.110.854.607.761	*Subtotal*
Penyisihan kerugian	(48.804.049.489)	(16.458.473.952)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah investasi pada surat berharga - bersih	**4.240.138.245.990**	**4.094.396.133.809**	***Total investments in marketable securities - net***

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (lanjutan)

c. Berdasarkan penerbit dan peringkat surat berharga

7. *INVESTMENT IN SECURITIES (continued)*

c. *By issuer and securities rating*

	Peringkat/*Rating*		Jumlah/*Total*		
	2023	2022	2023	2022	
Diukur pada biaya perolehan					***Measured at acquisition cost***
SIMA	-	idA+(sy)	-	230.000.000,000	*SIMA*
Reksadana Syariah Pernyataan Terbatas PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri VI dan IX	-	-	62.000.000.000	100.000.000.000	Limited Participation of SOE *PNM Micro Financing Sharia Mutual Funds Series VI and IX*
Subjumlah			62.000.000.000	330.000.000.000	*Subtotal*
Diukur pada nilai wajar melalui panghasilan komprehensif lain					***Measured at fair value through other comprehensive income***
Sukuk BI	-(*)	-(*)	1.317.793.996.067	1.450.229.200.000	*Sukuk BI*
Surat Serharga Syariah Negara	-(*)	-(*)	1.607.668.850.515	1.014.778.012.600	*Government Sharia Securities*
Reksadana Syariah	-	-	375.431.170.497	425.681.225.501	*Sharia mutual fund*
Sukuk Ijarah Angkasa Pura	idAA+(sy)	idAA+(sy)	129.897.300.000	130.753.139.400	*Sukuk Ijarah Angkasa Pura*
Sukuk *Mudharabah* Mandala Multifinance	idA(sy)	idA(sy)	102.116.000.000	125.640.155.350	*Sukuk Mudharabah Mandala Multifinance*
Sukuk Ijarah Sampoerna Agro	idA(sy)	idA(sy)	100.810.000.000	101.810.699.000	*Sukuk Ijarah Sampoerna Agro*
Sukuk Ijarah SPINDO	idA(sy)	idA-(sy)	102.418.500.000	101.319.686.000	*Sukuk Ijarah SPINDO*
Sukuk Ijarah Elnusa	idAA(sy)	idAA-(sy)	98.896.900.000	98.670.062.800	*Sukuk Ijarah Elnusa*
Sukuk Wakalah Medco	idA(sy)	idA(sy)	76.981.750.000	76.564.068.000	*Sukuk Wakalah Medco*
Sukuk PT Jasa Marga	idAA-(sy)	idAA-(sy)	50.722.500.000	51.551.194.000	*Sukuk PT Jasa Marga*
Sukuk Mudharabah Oki Pulp & Paper Mills	idA+(sy)	idA+(sy)	50.837.500.000	51.361.170.500	*Sukuk Mudharabah Oki Pulp & Paper Mills*
Sukuk Mudharabah Wijaya Karya	idCCC(sy) (**)	idA(sy)	35.524.500.000	35.327.358.750	*Sukuk Mudharabah Wijaya Karya*
Sukuk Ijarah XL Axiata	AAAidn	AAAidn	30.357.600.000	31.174.160.100	*Sukuk Ijarah XL Axiata*
Sukuk Ijarah PLN	idAAA(sy)	idAAA(sy)	30.117.300.000	30.136.718.100	*Sukuk Ijarah PLN*
Sukuk Ijarah Bumi Serpong Damai	idAA-	idAA-(sy)	25.467.050.000	24.793.983.100	*Sukuk Ijarah Bumi Serpong Damai*
MTN Syariah PTPN	idBBB+(sy)	idBBB(sy)	20.002.608.400	20.107.491.200	*MTN Syariah PTPN*
Sukuk Ijarah Aneka Gas	idA(sy)	idA(sy)	11.002.970.000	10.956.283.360	*Sukuk Ijarah Aneka Gas*
Sukuk Ijarah Samudera Indonesia	idA+	-	60.895.800.000	-	*Sukuk Ijarah Samudera Indonesia*
Subjumlah			4.226.942.295.479	3.780.854.607.761	*Subtotal*
Jumlah investasi pada surat berharga			4.288.942.295.479	4.110.854.607.761	*Total Investments in market securities*
Penyisihan kerugian			(48.804.049.489)	(16.458.473.952)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah investasi pada surat berharga - bersih			**4.240.138.245.990**	**4.094.396.133.809**	***Total investments in marketable securities - net***

Informasi peringkat diperoleh dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo), lembaga pemeringkat yang diakui Bank Indonesia.

Rating information was obtained from PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo), a rating agency recognized by Bank Indonesia.

Informasi mengenai jatuh tempo atas investasi pada surat berharga, diungkapkan pada Catatan 33.

Information regarding the maturity of investments in marketable securities is disclosed in Note 33.

(*) Tidak terdapat peringkat dikarenakan Surat Berharga Pemerintah
(**) *Subsequently* per 10 Januari 2024, PT Pefindo telah menurunkan *rating* menjadi idD(sy)

(*) *There is no rating due to Government Securities*
(**) *Subsequently as of January 10, 2024 PT Pefindo has lowered the rating to id(D(sy)*

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (lanjutan) / *INVESTMENT IN SECURITIES (continued)*

d. Perubahan penyisihan kerugian investasi pada surat berharga / *Changes in the allowance for investment losses in securities*

	2023	2022	
Saldo awal tahun	16.458.473.952	12.496.883.331	*Beginning year balance*
Pembentukan penyisihan selama tahun berjalan	32.345.575.537	3.961.590.621	*Additional provision during the year*
Saldo akhir tahun	**48.804.049.489**	**16.458.473.952**	***End of year balance***

e. Berdasarkan kolektibilitas / *Based on collectibility*

	2023	2022	
Lancar	4.253.417.795.479	4.110.854.607.761	*Current*
Macet	35.524.500.000	-	*Loss*
Penyisihan kerugian	(48.804.049.489)	(16.458.473.952)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah	**4.240.138.245.990**	**4.094.396.133.809**	***Total***

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian investasi pada surat berharga yang dibentuk telah memadai.

Management believes that the allowance for impairment losses for investment on securities cover is adequate.

Seluruh investasi surat berharga dilakukan dengan pihak ketiga.

All securities investments are entered into with third parties.

8. PIUTANG *MURABAHAH* / *MURABAHAH RECEIVABLES*

a. Berdasarkan jenis / *By type*

2023

	Lancar/*Current*	DPK/ *Special mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/*Loss*	Jumlah/*Total*	
Pihak berelasi							*Related parties*
Konsumsi	6.458.652.399	-	-	-	-	6.458.652.399	*Consumption*
Pihak ketiga							*Third parties*
Modal kerja	433.110.775.146	632.110.326	-	-	-	433.742.885.472	*Working capital*
Investasi	688.715.913.433	1.424.862.049	-	627.753.899	967.183.010	631.735.712.391	*Investment*
Konsumsi	512.856.743.015	5.600.325.277	1.326.439.830	73.555.576	2.788.646.838	522.645.710.536	*Consumption*
Jumlah	1.641.142.083.993	7.657.297.652	1.326.439.830	701.309.475	3.755.829.848	1.654.582.960.798	*Total*
Penyisihan kerugian	(5.446.682.126)	(300.712.598)	(1.326.439.830)	(701.309.475)	(3.755.829.848)	(11.530.973.877)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**1.635.695.401.867**	**7.356.585.054**	**-**	**-**	**-**	**1.643.051.986.921**	***Total - net***

2022

	Lancar/*Current*	DPK/ *Special mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/*Loss*	Jumlah/*Total*	
Pihak berelasi							*Related parties*
Konsumsi	278.589.032	-	-	-	-	278.589.032	*Working capital*
Pihak ketiga							*Third parties*
Modal kerja	419.328.832.635	741.251.682	-	-	386.239.950	420.456.324.267	*Working capital*
Investasi	575.501.105.389	1.647.395.076	877.008.146	-	223.516.858	578.249.025.469	*Investment*
Konsumsi	335.386.130.573	11.313.769.512	152.885.926	123.098.147	828.870.116	347.804.754.274	*Consumption*
Jumlah	1.330.494.657.629	13.702.416.270	1.029.894.072	123.098.147	1.438.626.924	1.346.788.693.042	*Total*
Penyisihan kerugian	(12.755.824.398)	(2.062.294.269)	(1.012.631.955)	(88.680.871)	(1.438.626.924)	(17.358.058.417)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**1.317.738.833.231**	**11.640.122.001**	**17.262.117**	**34.417.276**	**-**	**1.329.430.634.625**	***Total - net***

8. PIUTANG *MURABAHAH* (lanjutan)

8. *MURABAHAH RECEIVABLES (continued)*

b. Berdasarkan sektor ekonomi

b. *Based on economic sector*

2023

	Lancar/*Current*	DPK/ *Special mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/*Loss*	Jumlah/*Total*	
Pertanian, perburuan perikanan dan kehutanan	369.831.932.592	306.237.928	-	-	-	370.138.170.520	*Agriculture, hunting fishery and forestry*
Industri pengolahan	195.066.370.539	9.058.055	-	-	-	195.075.428.594	*Processing industry*
Perdagangan besar dan eceran	99.276.975.838	681.832.764	-	-	967.183.010	100.925.991.612	*Wholesale and retail trade*
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	96.610.150.485	21.874.775	-	-	-	96.632.025.260	*Transportation Warehousing and communications*
Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	248.576.841.715	12.499.855	-	627.753.899	-	249.217.095.469	*Real Estate, rental business, and corporate services*
Pertambangan dan penggalian	39.131.596.477	4.417.907	-	-	-	39.136.014.384	*Mining and excavation*
Jasa pendidikan	22.145.430.950	-	-	-	-	22.145.430.950	*Education services*
Perantara keuangan	21.838.338.677	-	-	-	-	21.838.338.677	*Financial services*
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	14.162.592.994	-	-	-	-	14.162.592.994	*Accomodation and meals services*
Konstruksi	3.520.680.378	1.070.137.256	-	-	-	4.590.817.634	*Construction*
Jasa kemasyarakatan sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	530.981.173.348	5.551.239.112	1.326.439.830	73.555.576	2.788.646.838	540.721.054.704	*Socio-cultural community services, entertainment and other individuals*
Jumlah	1.641.142.083.993	7.657.297.652	1.326.439.830	701.309.475	3.755.829.848	1.654.582.960.798	*Total*
Penyisihan kerugian	(5.446.682.126)	(300.712.598)	(1.326.439.830)	(701.309.475)	(3.755.829.848)	(11.530.973.877)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**1.635.695.401.867**	**7.356.585.054**	**-**	**-**	**-**	**1.643.051.986.921**	***Total - net***

2022

	Lancar/*Current*	DPK/ *Special mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/*Loss*	Jumlah/*Total*	
Pertanian, perburuan dan kehutanan	377.120.938.737	227.366.265	-	-	-	377.348.305.002	*Agriculture, hunting and forestry*
Industri pengolahan	242.962.231.410	538.625.025	-	-	63.191.439	243.564.047.874	*Transportation processing industry*
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	199.717.931.033	96.683.391	877.008.146	-	-	200.691.622.570	*Warehousing and communications*
Perdagangan besar dan eceran	69.981.458.313	536.209.144	-	-	-	70.517.667.457	*Wholesale and retail trade*
Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	62.074.840.350	-	-	-	-	62.074.840.350	*Real estate, business corporate rentals and services*
Jasa pendidikan	25.451.705.598	7.524.449	-	-	546.565.369	26.005.795.416	*Education services*
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	5.437.915.627	828.974.665	-	-	-	6.266.890.292	*Accomodation and meals services*
Konstruksi	5.793.559.798	-	-	-	-	5.793.559.798	*Construction*
Pertambangan dan penggalian	28.905.922	53.047.718	-	-	-	81.953.640	*Mining and excavation*
Listrik, gas dan air	9.517.710	23.759.590	-	-	-	33.277.300	*Electricity, gas and water*
Jasa kemasyarakatan sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	341.915.653.131	11.390.226.023	152.885.926	123.098.147	828.870.116	354.410.733.343	*Socio-cultural community services, entertainment and other individuals*
Jumlah	1.330.494.657.629	13.702.416.270	1.029.894.072	123.098.147	1.438.626.924	1.346.788.693.042	*Total*
Penyisihan kerugian	(12.755.824.398)	(2.062.294.269)	(1.012.631.955)	(88.680.871)	(1.438.626.924)	(17.358.058.417)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**1.317.738.833.231**	**11.640.122.001**	**17.262.117**	**34.417.276**	**-**	**1.329.430.634.625**	***Total - net***

8. PIUTANG *MURABAHAH* (lanjutan) / *8. MURABAHAH RECEIVABLES (continued)*

c. Berdasarkan jangka waktu / *c. By period*

	2023	2022	
Berdasarkan periode perjanjian akad			*Based on the contract agreement period*
Kurang dari atau sama dengan 1 tahun	929.605.084	19.689.377.265	*Less than or equal to 1 year*
Lebih dari 1 sampai 2 tahun	31.242.717.199	39.362.552.002	*More than 1 to 5 years*
Lebih dari 2 sampai 5 tahun	445.699.991.479	646.654.532.309	*More than 2 to 5 years*
Lebih dari 5 tahun	1.176.710.647.036	641.082.231.466	*More than 5 years*
Jumlah	1.654.582.960.798	1.346.788.693.042	*Total*
Penyisihan kerugian	(11.530.973.877)	(17.358.058.417)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**1.643.051.986.921**	**1.329.430.634.625**	***Total - net***

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo / *d. By remaining period to maturity*

	2023	2022	
Kurang dari atau sama dengan 1 tahun	56.434.379.571	53.959.000.983	*Less than or equal to 1 year*
Lebih dari 1 sampai 2 tahun	130.466.716.776	105.449.688.106	*More than 1 to 5 years*
Lebih dari 2 sampai 5 tahun	829.707.343.762	708.651.655.296	*More than 2 to 5 years*
Lebih dari 5 tahun	637.974.520.689	478.728.348.657	*More than 5 years*
Jumlah	1.654.582.960.798	1.346.788.693.042	*Total*
Penyisihan kerugian	(11.530.973.877)	(17.358.058.417)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**1.643.051.986.921**	**1.329.430.634.625**	***Total - net***

e. Perubahan penyisihan kerugian *murabahah* / *e. Changes in the allowance for murabahah losses*

	2023	2022	
Saldo awal tahun	17.358.058.417	18.174.975.822	*Beginning year balance*
Pembentukan penyisihan selama tahun berjalan	(5.265.837.446)	(411.979.447)	*Additional provision during the year*
Penghapusbukuan	(561.247.094)	(404.937.958)	*Write-off*
Saldo akhir tahun	**11.530.973.877**	**17.358.058.417**	***End of year balance***

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian piutang *murabahah* adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya piutang *murabahah*.

Management believes that the allowance for impairment losses on murabahah receivables is sufficient to cover losses that may arise due to uncollectible murabahah receivables.

Jumlah piutang yang direstrukturisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp3.006.462.104 dan Rp7.323.365.159, termasuk piutang restrukturisasi terkait COVID-19 masing-masing sebesar Rp3.006.462.104 dan Rp7.260.173.720. Restrukturisasi piutang dilakukan dengan cara perpanjangan waktu dan penjadwalan kembali.

Total restructured receivables as at December 31, 2023 and 2022 each of them amounting to Rp3,006,462,104 and Rp7,323,365,159, respectively, including restructured receivables related to COVID-19 each amounting to Rp3,006,462,104 dan Rp7,260,173,720. Receivables were being restructured by extending the period and rescheduling.

8. PIUTANG *MURABAHAH* (lanjutan)

e. Perubahan penyisihan kerugian *murabahah* (lanjutan)

Efektif *yield* margin piutang *murabahah* berkisar masing-masing antara 3% sampai dengan 13% dan antara 4% sampai dengan 13% per tahun untuk tahun 2023 dan 2022.

Rasio *Non-Performing Financing* ("*NPF*") bruto dan neto atas jumlah piutang adalah sebagai berikut:

8. *MURABAHAH RECEIVABLES (continued)*

e. *Changes in the allowance for murabahah losses (continued)*

The effective yield margin on murabahah receivables ranges between 3% to 13% and between 4% to 13% per annum respectively for 2023 and 2022.

The ratio of total Non-Performing Financing ("NPF") gross and net on receivables are as follows:

	2023	2022	
Jumlah piutang	1.654.582.960.798	1.346.788.693.042	*Total receivables*
NPF - bruto	5.783.579.153	2.591.619.143	*NPF - gross*
Persentase NPF - bruto	0,35%	0,19%	*Percentage of NPF - gross*
NPF - neto	-	53.046.947	*NPF - net*
Persentase NPF - neto	0,00%	0,00%	*Percentage of NPF - net*

Piutang dijamin agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, deposito *mudharabah* (Catatan 19) atau jaminan lain yang umumnya dapat diterima oleh Bank.

Receivables are collateralised by registered mortgages or powers of attorneys to mortgage and sell, mudharabah time deposits (Note 19) or by other guarantees generally accepted by the Bank.

9. PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*

a. Berdasarkan jenis

9. *MUDHARABAH FINANCING*

a. *By type*

	2023	2022	
Pihak ketiga			*Third parties*
Modal kerja	760.307.047.444	508.124.477.801	*Working capital*
Jumlah	760.307.047.444	508.124.477.801	*Total*
Penyisihan kerugian	(7.468.762.617)	(5.081.244.778)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**752.838.284.827**	**503.043.233.023**	***Total - net***

9. PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* (lanjutan) / *9. MUDHARABAH FINANCING (continued)*

b. Berdasarkan sektor ekonomi / *b. Based on economic sector*

2023

	Lancar/*Current*	DPK/ *Special mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/*Loss*	Jumlah/*Total*	
Perantara keuangan	746.745.513.217	-	-	-	-	746.745.513.217	*Financial intermediaries*
Industri pengolahan	13.430.785.750	-	-	-	-	13.430.785.750	*Processing industry*
dan komunikasi	130.748.477	-	-	-	-	130.748.477	*and communication*
Jumlah	760.307.047.444	-	-	-	-	760.307.047.444	*Total*
Penyisihan kerugian	(7.468.762.617)	-	-	-	-	(7.468.762.617)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**752.838.284.827**	**-**	**-**	**-**	**-**	**752.838.284.827**	***Total - net***

2022

	Lancar/*Current*	DPK/ *Special mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/*Loss*	Jumlah/*Total*	
Perantara keuangan	508.124.477.801	-	-	-	-	508.124.477.801	*Financial Intermediaries*
Jumlah	508.124.477.801	-	-	-	-	508.124.477.801	*Total*
Penyisihan kerugian	(5.081.244.778)	-	-	-	-	(5.081.244.778)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**503.043.233.023**	**-**	**-**	**-**	**-**	**503.043.233.023**	***Total - net***

c. Berdasarkan jangka waktu / *c. By period*

	2023	2022	
Berdasarkan periode perjanjian akad			*Based on the contract agreement period*
Kurang dari atau sama dengan 1 tahun	36.382.618.834	53.010.722.068	*Less than or equal to 1 year*
Lebih dari 1 sampai 2 tahun	162.500.000.000	42.219.764.211	*More than 1 to 5 years*
Lebih dari 2 sampai 5 tahun	403.141.971.569	393.958.878.581	*More than 2 to 5 years*
Lebih dari 5 tahun	158.282.457.041	18.935.112.941	*More than 5 years*
Jumlah	760.307.047.444	508.124.477.801	*Total*
Penyisihan kerugian	(7.468.762.617)	(5.081.244.778)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**752.838.284.827**	**503.043.233.023**	***Total - net***

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo / *d. By remaining period to maturity*

	2023	2022	
Kurang dari atau sama dengan 1 tahun	214.272.298.505	106.440.123.214	*Less than or equal to 1 year*
Lebih dari 1 sampai 2 tahun	55.089.596.960	75.977.209.511	*More than 1 to 5 years*
Lebih dari 2 sampai 5 tahun	487.599.107.534	311.578.613.254	*More than 2 to 5 years*
Lebih dari 5 tahun	3.346.044.445	14.128.531.822	*More than 5 years*
Jumlah	760.307.047.444	508.124.477.801	*Total*
Penyisihan kerugian	(7.468.762.617)	(5.081.244.778)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**752.838.284.827**	**503.043.233.023**	***Total - net***

9. PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* (lanjutan)

e. Perubahan penyisihan kerugian *mudharabah*

	2023	2022	
Saldo awal tahun	5.081.244.778	5.658.417.124	*Beginning year balance*
Pembentukan penyisihan selama tahun berjalan	2.387.517.839	(577.172.346)	*Additional provision during the year*
Saldo akhir tahun	**7.468.762.617**	**5.081.244.778**	***End of year balance***

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian pembiayaan *mudharabah* adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya pembiayaan *mudharabah*.

Jumlah pembiayaan yang direstrukturisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp596.811.239 dan Rp2.550.176.861, termasuk pembiayaan restrukturisasi terkait COVID-19 masing-masing sebesar nihil dan Rp1.492.903.670. Restrukturisasi pembiayaan dilakukan dengan cara perpanjangan waktu, penjadwalan kembali dan penambahan fasilitas pembiayaan bagi debitur.

Efektif *yield* margin pembiayaan *mudharabah* berkisar masing-masing antara 6% sampai dengan 13% dan antara 6,5% sampai dengan 14% per tahun untuk tahun 2023 dan 2022.

Rasio *Non-Performing Financing* (*"NPF"*) bruto dan neto atas jumlah pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

9. *MUDHARABAH FINANCING (continued)*

e. *Changes in the allowance for mudharabah losses*

Management believes that the allowance for impairment losses on mudharabah financing is sufficient to cover losses that may arise due to uncollectible mudharabah financing.

Total restructured financing as at December 31, 2023 and 2022 amounting to Rp596,811,239 and Rp2,550,176,861, respectively, including restructured financing related to COVID-19 each amounting to nil and Rp1,492,903,670. Financing were being restructured by extending the period, rescheduling and additional financing facility for debtors.

The effective yield margin on mudharabah financing ranges between 6% to 13% and between 6.5% to 14% per annum respectively for 2023 and 2022.

The ratio of total Non-Performing Financing ("NPF") gross and net on mudharabah financing are as follows:

	2023	2022	
Jumlah pembiayaan *mudharabah*	760.307.047.444	508.124.477.801	*Total Mudharabah financing*
NPF - bruto	-	-	*NPF - gross*
Persentase NPF - bruto	0,00%	0,00%	*Percentage of NPF - gross*
NPF - neto	-	-	*NPF - net*
Persentase NPF - neto	0,00%	0,00%	*Percentage of NPF - net*

10. PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* / *MUSYARAKAH FINANCING*

a. Berdasarkan jenis / *By type*

	2023	2022	
Pihak ketiga			*Third parties*
Modal kerja	3.924.163.263.973	3.627.672.029.146	*Working capital*
Investasi	1.794.576.451.632	1.612.099.924.955	*Investment*
Konsumsi	269.890.904.004	57.580.051.848	*Consumption*
Jumlah	5.988.630.619.609	5.297.352.005.949	*Total*
Penyisihan kerugian	(403.784.110.941)	(459.063.608.805)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**5.584.846.508.668**	**4.838.288.397.144**	***Total - net***

b. Berdasarkan sektor ekonomi / *Based on economic sector*

2023

	Lancar/*Current*	DPK/ *Special mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/*Loss*	Jumlah/*Total*	
Perdagangan besar dan eceran	1.648.027.086.046	97.526.608	247.693.680	-	68.281.602.658	1.716.653.908.992	*Wholesale and retail trade*
Industri pengolahan	1.164.694.629.607	144.368.283.478	-	-	18.649.213.635	1.327.712.126.720	*Processing industry*
Pertanian, perburuan dan kehutanan	987.829.475.424	1.098.389.378	-	-	-	988.927.864.802	*Agriculture, hunting and forestry*
Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	417.570.381.811	48.493.549.743	-	-	-	466.063.931.554	*Real estate, rentals business and corporate services*
Listrik, gas dan air	424.999.999.996	-	-	-	-	424.999.999.996	*Electricity, gas and water*
Konstruksi	377.191.638.021	2.278.539.943	-	-	-	379.470.177.964	*Construction*
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	155.883.989.071	60.960.495.959	-	-	-	216.844.485.030	*Transportation warehousing and communications*
Pertambangan dan penggalian	64.264.209.765	-	-	-	-	64.264.209.765	*Mining and excavation*
Penyediaan akomodasi dan penyediaan Makan minum	55.462.334.890	-	-	-	-	55.462.334.890	*Accomodation and meals services*
Jasa pendidikan	38.719.055.892	-	-	-	-	38.719.055.892	*Education services*
Perantara keuangan	31.664.759.889	-	-	-	-	31.664.759.889	*Financial intermediaries*
Jasa kemasyarakatan sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	270.841.138.910	6.583.308.668	423.316.537	-	-	277.847.764.115	*Community services socio-cultural, Entertainment and other individuals*
Jumlah	5.637.148.699.322	263.880.093.777	671.010.217	-	86.930.816.293	5.988.630.619.609	*Total*
Penyisihan kerugian	(105.108.767.896)	(211.073.516.535)	(671.010.217)	-	(86.930.816.293)	(403.784.110.941)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**5.532.039.931.426**	**52.806.577.242**	**-**	**-**	**-**	**5.584.846.508.668**	***Total - net***

2022

	Lancar/*Current*	DPK/ *Special mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/*Loss*	Jumlah/*Total*	
Industri pengolahan	1.074.824.715.657	147.046.154.123	-	-	76.565.256.046	1.298.436.125.826	*Processing industry*
Perdagangan besar dan eceran	1.106.107.064.557	86.581.094.715	-	-	10.738.645.612	1.203.426.804.884	*Wholesale and retail trade*
Pertanian, perburuan dan kehutanan	1.042.284.237.298	-	-	-	-	1.042.284.237.298	*Agriculture, hunting and forestry*
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	754.802.597.021	67.795.680.459	-	-	16.072.896.416	838.671.173.896	*Transportation warehousing and communications*
Konstruksi	299.215.627.592	-	-	-	-	299.215.627.592	*Construction*
Listrik, gas dan air	289.285.714.281	-	-	-	-	289.285.714.281	*Electricity, gas and water*
Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	63.068.034.170	48.502.549.743	-	-	16.872.691	111.587.456.604	*Real estate, rentals business and corporate services*
Perantara keuangan	117.641.584.920	-	-	-	-	117.641.584.920	*Financial intermediaries*
Jasa pendidikan	31.515.906.998	-	-	-	-	31.515.906.998	*Education services*
Pertambangan dan penggalian	4.108.333.333	-	-	-	-	4.108.333.333	*Mining and excavation*
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	2.959.934.447	-	-	-	-	2.959.934.447	*Provision accommodation and provision eating and drinking*
Jasa kemasyarakatan sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	57.028.445.239	437.344.642	-	-	753.315.989	58.219.105.870	*Community services socio-cultural Entertainment and other individuals*
Jumlah	4.842.842.195.513	350.362.823.682	-	-	104.146.986.754	5.297.352.005.949	*Total*
Penyisihan kerugian	(119.897.562.304)	(235.019.059.747)	-	-	(104.146.986.754)	(459.063.608.805)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**4.722.944.633.209**	**115.343.763.935**	**-**	**-**	**-**	**4.838.288.397.144**	***Total - net***

10. PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* (lanjutan) / *10. MUSYARAKAH FINANCING (continued)*

c. Berdasarkan jangka waktu / *c. By period*

	2023	2022	
Berdasarkan periode perjanjian akad			*Based on the contract agreement period*
Kurang dari atau sama dengan 1 tahun	1.714.522.014.407	1.821.054.823.986	*Less than or equal to 1 year*
Lebih dari 1 sampai 2 tahun	1.363.100.769.176	675.041.897.261	*More than 1 to 5 years*
Lebih dari 2 sampai 5 tahun	750.298.497.302	1.051.573.434.626	*More than 2 to 5 years*
Lebih dari 5 tahun	2.160.709.338.724	1.749.681.850.076	*More than 5 years*
Jumlah	5.988.630.619.609	5.297.352.005.949	*Total*
Penyisihan kerugian	(403.784.110.941)	(459.063.608.805)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**5.584.846.508.668**	**4.838.288.397.144**	***Total - net***

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo / *d. By remaining period to maturity*

	2023	2022	
Kurang dari atau sama dengan 1 tahun	2.998.394.870.705	3.260.773.182.375	*Less than or equal to 1 year*
Lebih dari 1 sampai 2 tahun	348.160.733.832	44.244.111.337	*More than 1 to 5 years*
Lebih dari 2 sampai 5 tahun	696.166.480.275	340.182.001.456	*More than 1 to 5 years*
Lebih dari 5 tahun	1.945.908.534.797	1.652.152.710.781	*More than 5 years*
Jumlah	5.988.630.619.609	5.297.352.005.949	*Total*
Penyisihan kerugian	(403.784.110.941)	(459.063 608.805)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**5.584.846.508.668**	**4.838.288.397.144**	***Total - net***

e. Perubahan penyisihan kerugian *musyarakah* / *e. Changes in allowance for musyarakah losses*

	2023	2022	
Saldo awal tahun	459.063.608.805	230.453.833.942	*Beginning year balance*
Pembentukan penyisihan selama tahun berjalan	30.000.296.441	228.935.847.496	*Additional provision during the year*
Penghapusbukuan	(85.279.794.305)	(326.072.633)	*Write-off*
Saldo akhir tahun	**403.784.110.941**	**459.063.608.805**	***End of year balance***

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian pembiayaan *musyarakah* adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya pembiayaan *musyarakah*.

Management believes that the allowance for impairment losses on musyarakah financing is sufficient to cover losses that may arise due to uncollectible musyarakah financing.

Jumlah pembiayaan yang direstrukturisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp511.001.913.240 dan Rp918.534.827.456, termasuk pembiayaan restrukturisasi terkait COVID-19 masing-masing sebesar Rp440.052.841.077 dan Rp826.261.764.154. Restrukturisasi pembiayaan dilakukan dengan cara perpanjangan waktu, penjadwalan kembali dan penambahan fasilitas pembiayaan bagi debitur.

Total restructured financing as at December 31, 2023 and 2022 each of them amounting to Rp511,001,913,240 dan Rp918,534,827,456, including restructured financing related to COVID-19 each amounting to Rp440,052,841,077 dan Rp826,261,764,154. Financing were being restructured by extending the period, rescheduling and additional financing facility for debtors.

10. PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* (lanjutan) / *MUSYARAKAH FINANCING (continued)*

e. Perubahan penyisihan kerugian *musyarakah* (lanjutan) / *Changes in allowance for musyarakah losses (continued)*

Efektif *yield* margin pembiayaan *musyarakah* berkisar masing-masing antara 2% sampai dengan 13% dan 3% sampai dengan 13% per tahun untuk tahun 2023 dan 2022.

The effective yield margin on musyarakah financing ranges between 2% to 13% and between 3% to 13% per annum respectively for 2023 and 2022.

Rasio *Non-Performing Financing* (*"NPF"*) bruto dan neto atas jumlah pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

The ratio of total Non-Performing Financing ("NPF") gross and net on musyarakah financing are as follows:

	2023	2022	
Jumlah pembiayaan *musyarakah*	5.988.630.619.609	5.297.352.005.949	*Total musyarakah financing*
NPF - bruto	87.601.826.510	104.146.986.754	*NPF - gross*
Persentase NPF - bruto	1,46%	1,97%	*Percentage of NPF - gross*
NPF - neto	-	-	*NPF - net*
Persentase NPF - neto	0,00%	0,00%	*Percentage of NPF - net*

11. ASET YANG DIPEROLEH UNTUK *IJARAH* / *ASSETS ACQUIRED FOR IJARAH*

	2023	2022	
Tanah dan bangunan	416.444.694.156	340.113.703.900	*Land and buildings*
Kendaraan bermotor	234.820.338.289	198.115.767.039	*Vehicle*
Mesin	219.372.867.760	98.248.860.800	*Machine*
Alat transportasi air	106.586.658.273	55.220.658.273	*Water transportation*
Lain-lain	56.968.541.201	134.950.000	*Other*
Jumlah	1.034.193.099.679	691.833.940.012	*Total*
Akumulasi penyusutan	(437.669.696.451)	(289.290.898.631)	*Accumulated depreciation*
Jumlah - bersih	**596.523.403.228**	**402.543.041.381**	***Total - net***

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia ("PBI") No. 9/9/PBI/2007 pasal 39 ayat 3 dan 4, pembentukan penyisihan kerugian aset tidak berlaku untuk aset produktif dengan transaksi sewa berupa akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (*"IMBT"*).

Based on Bank Indonesia Regulation ("PBI") No. 9/9/PBI/2007 article 39 paragraph 3 and 4, establishment of allowance for losses does not apply to earning assets with leased transactions in the form of Ijarah Muntahiyah Bittamlik ("IMBT") contracts.

Jumlah pembiayaan yang direstrukturisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp34.537.487.415 dan Rp40.846.138.183, termasuk pembiayaan restrukturisasi terkait COVID-19 masing-masing sebesar Rp576.181.972 dan Rp1.157.475.641.

Total restructured financing as at December 31, 2023 and 2022 amounting to Rp34,537,487,415 and Rp40,846,138,183, respectively, including restructured financing related to COVID-19 each amounting to Rp576,181,972 and Rp1,157,475,641.

Beban penyusutan, amortisasi, dan penurunan nilai yang dibebankan pada laporan laba rugi masing-masing sebesar Rp191.257.386.220 dan Rp126.995.024.919 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Catatan 23).

Depreciation, amortisation expenses and impairment charged to the statement of profit or loss amounting to Rp191,257,386,220 and Rp126,995,024,919 respectively, for the years ended December 31, 2023 and 2022, respectively (Note 23).

12. ASET TETAP / *12. FIXED ASSETS*

2023

	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Addition*	Pengurangan/ *Deduction*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Revaluasi/ *Revaluation*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Harga perolehan/Nilai revaluasi							***Acquisition cost//Revalution amount***
Pemilikan langsung							*Direct owner*
Tanah	93.817.280.000	22.978.138.829	-	2.293.970.878	-	119.089.389.707	*Land*
Bangunan	56.757.237.459	14.428.572.752	-	(1.626.138.528)	-	69.559.671.683	*Buildings*
Inventaris kantor	65.545.116.118	15.947.495.047	522.449.736	-	-	80.970.161.429	*Office equipment*
Kendaraan bermotor	305.226.000	34.628.000	-	-	-	339.854.000	*Vehicles*
Jumlah	**216.424.859.577**	**53.388.834.628**	**522.449.736**	**667.832.350**	**-**	**269.959.076.819**	***Total***
Akumulasi penyusutan							***Accumulated depreciation***
Bangunan	16.804.111.559	3.262.505.177	-	46.541.974	-	20.113.158.710	*Buildings*
Inventaris kantor	42.677.182.385	9.352.905.359	457.549.247	-	-	51.572.538.497	*Office equipment*
Kendaraan bermotor	224.864.400	35.103.198	-	-	-	259.967.598	*Vehicles*
Jumlah	**59.706.158.344**	**12.650.513.734**	**457.549.247**	**46.541.974**	**-**	**71.945.664.805**	***Total***
Nilai buku	**156.718.701.233**					**198.013.412.014**	***Book value***

2022

	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Addition*	Pengurangan/ *Deduction*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Revaluasi/ *Revaluation*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Harga perolehan/Nilai revaluasi							***Acquisition cost/Revaluation amount***
Pemilikan langsung							*Direct owner*
Tanah	90.458.231.695	-	-	483.555.501	3.842.603.806	93.817.280.000	*Land*
Bangunan	58.801.195.088	2.228.577.494	-	4.272.535.123	-	56.757.237.459	*Buildings*
Inventaris kantor	55.275.165.135	13.295.154.135	2.801.203.537	223.999.615	-	65.545.116.118	*Office equipment*
Kendaraan bermotor	287.515.000	17.711.000	-	-	-	305.226.000	*Vehicles*
Jumlah	**204.822.106.918**	**15.541.442.629**	**2.801.203.537**	**4.980.090.239**	**3.842.603.806**	**216.424.859.577**	***Total***
Akumulasi penyusutan							***Accumulated depreciation***
Bangunan	18.218.323.125	2.676.298.046	-	4.090.509.612	-	16.804.111.559	*Buildings*
Inventaris kantor	38.447.101.474	6.623.343.983	2.393.263.072	-	-	42.677.182.385	*Office equipment*
Kendaraan bermotor	187.723.260	37.141.140	-	-	-	224.864.400	*Vehicles*
Jumlah	**56.853.147.859**	**9.336.783.169**	**2.393.263.072**	**4.090.509.612**	**-**	**59.706.158.344**	***Total***
Nilai buku	**147.968.959.059**					**156.718.701.233**	***Book value***

Jumlah beban penyusutan adalah sebesar Rp12.650.513.734 dan Rp9.336.783.169 masing-masing pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 dibebankan pada beban umum dan administrasi (Catatan 28).

The total depreciation expense was Rp12,650,513,734 and Rp9,336,783,169 respectively in the year ended December 31, 2023 and 2022 are charged to general and administrative expenses (Note 28).

Revaluasi aset tetap

Pada tahun 2022, Bank melakukan penilaian kembali atas golongan tanah, yang dilakukan oleh penilai independen eksternal, sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (“SPI”) Edisi VI 2015, penilaian kembali dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") Hari Utomo dan Rekan sesuai dengan laporannya tertanggal 20 Oktober 2022.

Fixed asset revaluation

In 2022, the Bank carried out a reappraisal of land classes, which was performed by an external independent appraiser, in accordance with the Indonesian Valuation Standards (“SPI”) VI Edition 2015, the revaluation was carried out by the Public Appraisal Service Office ("KJPP") Hari Utomo and Partners in accordance with its report dated October 20, 2022.

12. ASET TETAP (lanjutan)

Selisih penilaian kembali tanah tahun 2022 dicatat sebagai "surplus revaluasi aset tetap", dan disajikan pada penghasilan komprehensif lain sebesar Rp7.075.800.000. Penurunan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi tahun 2022 sebesar Rp3.233.196.194 (Catatan 30) dicatat sebagai beban operasional lainnya dan diakui dalam laba rugi.

Nilai wajar tanah ditentukan berdasarkan pendekatan pasar *(market approach)* dan pendekatan biaya *(cost approach)*. Pengukuran nilai wajar untuk tanah termasuk dalam hierarki nilai wajar level 2 berdasarkan input-input dalam teknik penilaian yang digunakan.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, nilai tercatat tanah seandainya tanah tersebut dicatat dengan model biaya adalah masing-masing sebesar Rp76.050.388.742 dan Rp50.778.279.035.

Rincian atas penjualan dan penghapusan aset tetap adalah sebagai berikut:

12. FIXED ASSETS (continued)

The difference in land revaluation in 2022 is recorded as "fixed asset revaluation surplus", and is presented in other comprehensive income amounting to Rp7,075,800,000. The decrease in carrying value arising from the 2022 revaluation amounting to Rp3,233,196,194 (Note 30) is recorded as other operating expenses and recognized in profit or loss.

The fair value of land is determined based on market approach and cost approach. The fair value measurement for land is included in the level 2 fair value hierarchy based on the inputs in the valuation technique used.

On December 31, 2023 and 2022, the carrying value of land if the land were recorded using the cost model would be Rp76,050,388,742 and Rp50,778,279,035, respectively.

The detail of sales and disposals for fixed assets are as follows:

	2023	2022	
Harga jual	70.017.769	481.026.119	*Selling price*
Nilai buku	64.900.489	407.940.465	*Book value*
Laba penjualan aset tetap (Catatan 30)	**5.117.280**	**73.085.654**	***Fixed asset sales profit (Note 30)***

Aset tetap kecuali tanah, pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, ledakan, petir, pesawat udara dan huru-hara serta bencana alam pada PT Asuransi Central Asia (pihak berelasi) dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar Rp227.187.435.402 dan Rp175.491.245.460. Manajemen berpendapat bahwa jumlah pertanggungan asuransi tersebut adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset tetap yang dipertanggungkan.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap.

Fixed assets except land, as of date December 31, 2023 and 2022 are insured against the risks of fire, explosion, lightning, aircraft and riots as well as natural disasters on PT Asuransi Central Asia (related party) with coverage amounts of Rp227,187,435,402 and Rp175,491,245,460 respectively. Management believes that the amount of insurance coverage is sufficient to cover possible losses on the fixed assets insured.

As of December 31, 2023 and 2022, Management believes that there are no events or changes in circumstances that indicate a decline in the value of fixed assets.

13. ASET LAIN-LAIN – BERSIH / *13. OTHER ASSETS - NET*

	2023	2022	
Pendapatan yang masih akan diterima	86.652.914.796	62.102.510.530	*Income receivables*
Uang muka	31.854.926.764	7.054.350.750	*Advances*
Tagihan terkait dengan transaksi ATM	30.173.236.080	50.314.932.637	*Receivables related to ATM transactions*
Biaya dibayar dimuka	29.816.781.644	9.681.304.744	*Prepaid expenses*
Agunan Yang Diambil Alih ("AYDA") - bersih	27.568.093.565	111.963.283.882	*Foreclosed collaterals ("AYDA") - net*
Aset tak berwujud - bersih	7.505.431.007	3.676.397.001	*Intangible assets - net*
Perlengkapan kantor	3.776.661.764	3.174.182.338	*Office supplies*
Properti terbengkalai - bersih	376.084.587	662.813.512	*Abandoned property - net*
Lain-lain	1.516.434.538	1.246.621.347	*Others*
Jumlah	**219.240.564.745**	**249.876.396.741**	***Total***

Jumlah beban amortisasi aset tak berwujud adalah sebesar Rp4.652.493.993 dan Rp2.140.682.019 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 (Catatan 28).

The total amortization expense for intangible assets was Rp4,652,443,993 and Rp2,140,682,019 respectively for the year ended December 31, 2023 and 2022 (Note 28).

Agunan Yang Diambil Alih merupakan tanah dan aset lainnya (jaminan piutang dan pembiayaan yang telah diambil alih oleh Bank).

Foreclosed Collateral represents land and other assets (collateral for receivables and financing that have been taken over by the Bank).

Pendapatan yang masih akan diterima merupakan margin pendapatan dan bagi hasil yang masih akan diterima atas piutang, pembiayaan dan surat berharga.

Income receivables are margin and profit sharing income that will still be received from receivables, financing and securities.

14. LIABILITAS SEGERA / *14. OBLIGATIONS DUE IMMEDIATELY*

	2023	2022	
Transaksi dalam penyelesaian	10.867.170.325	101.391.267.456	*Transactions in progress*
Titipan setoran	49.576.918.317	83.202.051.737	*Deposits*
Kliring *retail*	3.012.002.670	1.895.939.124	*Retail clearing*
Kewajiban kepada *supplier*	431.586.020	862.593.673	*Obligations to suppliers*
Asuransi kesehatan	305.796.386	243.099.681	*Health insurance*
Jumlah	**64.193.473.718**	**187.594.951.671**	***Total***

Transaksi Dalam Penyelesaian merupakan liabilitas yang timbul atas biaya operasional Bank dan biaya-biaya terkait proses pembiayaan seperti penilaian, notaris, asuransi dan lain-lain.

Transactions in progress are liabilities arising from Bank operational costs and costs related to the financing process such as appraisal, notary, insurance and others.

Titipan Setoran merupakan liabilitas yang timbul karena nasabah Bank melakukan transaksi transfer dana namun Bank belum mentransfer ke Bank yang dituju.

Deposits are a liability that arises because a Bank customer makes an ATM transaction but the Bank has not transferred it to the destination Bank.

15. SIMPANAN DARI NASABAH DAN BANK LAIN / *15. DEPOSITS FROM CUSTOMERS AND OTHER BANKERS*

a. Berdasarkan jenis / *a. By type*

	2023	2022	
Giro *wadiah*			***Wadiah demand deposits***
Dari bank lain			*From other banks*
Pihak berelasi	52.697.586.098	100.920.882	*Related parties*
Pihak ketiga	13.709.035.199	5.786.819.887	*Third parties*
Subjumlah	66.406.621.297	5.887.740.769	*Subtotal*
Dari bukan bank			*From non-bank*
Pihak berelasi	33.610.417.040	38.438.641.388	*Related parties*
Pihak ketiga	2.042.527.385.783	2.065.516.458.618	*Third parties*
Subjumlah	2.076.137.802.823	2.103.955.100.006	*Subtotal*
Jumlah giro *wadiah*	**2.142.544.424.120**	**2.109.842.840.775**	***Total wadiah demand deposits***
Tabungan *wadiah*			***Wadiah savings deposits***
Dari bukan bank			*From non-bank*
Pihak berelasi	107.051.709	32.189.651	*Related parties*
Pihak ketiga	1.159.336.797.188	760.310.910.878	*Third parties*
Jumlah tabungan *wadiah*	**1.159.443.848.897**	**760.343.100.529**	***Total wadiah savings deposits***

b. Tingkat bonus simpanan wadiah dan nisbah rata-rata per tahun / *b. Wadiah savings bonus level and average nisbah ratio per annum*

	2023	2022	
Giro *wadiah*	0,35%	0,50%	*Wadiah demand deposit*
Tabungan *wadiah*	0,34%	1,00%	*Wadiah savings deposit*

16. PERPAJAKAN / *16. TAXATION*

a. Utang pajak / *a. Tax payable*

	2023	2022	
Pasal 4 ayat (2)	6.023.883.231	3.656.352.776	*Article 4 (2)*
Pasal 21	2.093.433.144	840.623.280	*Article 21*
Pasal 23	288.639.842	249.920.295	*Article 23*
Pasal 25	2.239.183.351	3.882.633.480	*Article 25*
Pasal 26	-	110.480.409	*Article 26*
Pasal 29	17.964.388.169	2.592.232.060	*Article 29*
Pajak pertambahan nilai	58.450.465	1.063.016.426	*Value added tax*
Jumlah	**28.667.978.202**	**12.395.258.726**	***Total***

16. PERPAJAKAN (lanjutan) / *16. TAXATION (continued)*

b. Pajak penghasilan badan / *b. Corporate income tax*

	2023	2022	
Pajak kini	(60.072.171.060)	(34.749.333.520)	*Current tax*
Pajak tangguhan	22.475.114.251	6.122.572.465	*Deferred tax*
Jumlah beban pajak	**(37.597.056.809)**	**(28.626.761.055)**	***Total tax expenses***

c. Koreksi fiskal / *c. Fiscal correction*

	2023	2022	
Laba sebelum taksiran pajak penghasilan	191.398.797.845	146.209.309.985	*Profit before estimated income tax*
Beda waktu			*Timing difference*
Penyisihan kerugian pada pembiayaan	71.064.526.950	33.933.947.968	*Allowance for financing impairment losses*
Penyisihan kerugian non-pembiayaan	31.132.879.484	-	*Allowance for non-financing impairment losses*
Cadangan biaya aksi legal	1.244.281.440	(283.558.242)	*Provision for legal action costs*
Cadangan karyawan	(749.672.580)	1.372.707.311	*Provision for employee*
Cadangan pungutan OJK	(89.322.065)	89.322.065	*Provision for OJK fee*
Cadangan publikasi	(411.043.548)	670.609.213	*Provision for publication*
Cadangan jasa profesional	(1.811.367.024)	3.692.973.291	*Provision for professional services*
Cadangan pesangon/imbalan pasca kerja	(189.906.058)	(11.470.718.406)	*Provision for severance pay/post-employment benefits*
Cadangan premi LPS	1.800.000.000	-	*Provision for LPS premium*
Penyusutan aset tetap	169.233.634	20.549.164	*Depreciation of fixed assets*
Jumlah beda waktu	**102.159.610.233**	**28.025.832.364**	***Total timing differences***
Beda tetap			*Permanent difference*
Promosi	1.669.658.280	199.741.174	*Promotion*
Jamuan	398.742.351	323.528.936	*Reception*
Sumbangan	294.041.920	276.847.682	*Donation*
Pendapatan reksadana	(22.075.246.492)	(17.083.743.653)	*Mutual fund income*
Lainnya	(790.280.828)	-	*Other*
Jumlah beda tetap	**(20.503.084.769)**	**(16.283.625.861)**	***Total permanent differences***
Penghasilan kena pajak	**273.055.323.000**	**157.951.516.000**	***Taxable income***

16. PERPAJAKAN (lanjutan) / *16. TAXATION (continued)*

c. Koreksi fiskal (lanjutan) / *c. Fiscal correction (continued)*

	2023	2022	
Taksiran pajak penghasilan badan			***Estimated corporate income tax***
Pajak penghasilan badan	60.072.171.060	34.749.333.520	*Corporate income tax*
Pajak PPh 25 yang telah dibayarkan	(42.107.782.891)	(32.157.101.460)	*PPh 25 tax that has been paid*
Pajak penghasilan kurang bayar	**17.964.388.169**	**2.592.232.060**	***Underpayment of income tax***

d. Aset pajak tangguhan / *d. Deferred tax assets*

	2023					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Dikreditkan/ (dibebankan) ke laporan laba rugi/ *Credited/ (charged) to statement of profit or loss***	**Dikreditkan/ (dibebankan) ke ekuitas/ *Credited/ (charged) to equity***	**Penyesuaian/ *Adjustment***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Aset (kewajiban) pajak tangguhan						***Deferred tax assets (liabilities)***
Penyisihan kerugian pada pembiayaan	35.054.508.173	15.634.195.930	-	-	50.688.704.103	*Allowance for financing impairment losses*
Penyisihan kerugian non-pembiayaan	-	6.849.233.486	-	-	6.849.233.486	*Allowance for impairment non financing losses*
Cadangan pesangon/ imbalan pasca kerja	122.242.677	(41.779.333)	446.660.442	-	527.123.786	*Provision of severance pay for post-impact benefits*
Cadangan karyawan	548.576.883	(164.927.969)	-	-	383.648.914	*Provision for employee*
Penyusutan aset tetap	(899.142.021)	37.231.400	-	-	(861.910.621)	*Depreciation of fixed assets*
Cadangan biaya aksi legal	169.798.737	273.741.917	-	-	443.540.654	*Provision for legal action costs*
Cadangan premi LPS	-	396.000.000	-	-	396.000.000	*Provision for LPS premium*
Cadangan pungutan OJK	19.650.854	(19.650.854)	-	-	-	*Provision for OJK fee*
Cadangan publikasi	186.571.143	(90.429.581)	-	-	96.141.562	*Provision for publication*
Cadangan jasa profesional	812.454.124	(398.500.745)	-	-	413.953.379	*Provision for professional services*
Keuntungan belum direalisasi dari surat berharga	(464.257.336)	-	130.411.980	(100.848.000)	(434.693.356)	*Unrealized profits from securities issued*
Jumlah aset pajak tangguhan	**35.550.403.234**	**22.475.114.251**	**577.072.422**	**(100.848.000)**	**58.501.741.907**	***Total deferred tax assets***

16. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Aset pajak tangguhan (lanjutan)

16. TAXATION (continued)

d. Deferred tax assets (continued)

	2022					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laporan laba rugi/ *Credited/ (charged) to statement of profit or loss*	Dikreditkan/ (dibebankan) ke ekuitas/ *Credited/ (charged) to equity*	Penyesuaian/ *Adjustment*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Aset (kewajiban) pajak tangguhan						***Deferred tax assets (liabilities)***
Penyisihan kerugian pada pembiayaan	27.589.039.620	7.465.468.553	-	-	35.054.508.173	*Allowance for financing impairment losses*
Cadangan pesangon/ imbalan pasca kena	2.375.501.506	(2.523.558.049)	270.299.220	-	122.242.677	*Provision of severance pay for post-impact benefits*
Cadangan karyawan	246.581.275	301.995.608	-	-	548.576.883	*Provision for employee*
Penyusutan aset tetap	(860.552.182)	4.520.816	-	(43.110.655)	(899.142.021)	*Depreciation of fixed assets*
Cadangan biaya aksi legal	232.181.550	(62.382.813)	-	-	169.798.737	*Provision for legal action costs*
Cadangan pungutan OJK	-	19.650.854	-	-	19.650.854	*Provision for OJK fee*
Cadangan publikasi	39.037.116	147.534.027	-	-	186.571.143	*Provision for publication*
Cadangan jasa profesional	-	812.454.124	-	-	812.454.124	*Provision for professional services*
Keuntungan belum direalisasi dari surat berharga	(10.070.137.503)	-	9.605.880.167	-	(464.257.336)	*Unrealized profits from securities issued*
Jumlah aset pajak tangguhan	**19.551.651.382**	**6.165.683.120**	**9.876.179.387**	**(43.110.655)**	**35.550.403.234**	***Total deferred tax assets***

e. Rekonsiliasi atas beban pajak penghasilan Bank

Rekonsiliasi atas beban pajak penghasilan Bank dengan perkalian laba akuntansi Bank sebelum pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

e. Reconciliation of Bank income tax expenses

The reconciliation of Bank income tax expense by multiplying income the Bank accounting profit before income tax to the applicable tax rate are as follows:

	2023	2022	
Laba sebelum pajak penghasilan	191.398.797.845	146.209.309.985	*Income before tax*
Beban pajak penghasilan yang dihitung dan laba sebelum pajak penghasilan	(42.107.735.526)	(32.166.048.197)	*Income tax expense calculated from income before tax*
Pengaruh pajak atas beda tetap	4.510.678.649	3.582.397.689	*Tax impact of permanent differences*
Penyesuaian terkait pajak tangguhan tahun lalu	-	(43.110.655)	*Adjustments related to last year's deferred taxes*
Pembulatan	68	108	*Rounding*
Beban pajak - bersih	**(37.597.056.809)**	**(28.626.761.055)**	***Tax expense - net***

16. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Peraturan tarif pajak

Pada 29 Oktober 2021 Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, salah satu poinnya yaitu mengubah Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2020 atas tarif pajak yang berlaku mulai tahun pajak 2022 yang sebelumnya sebesar 20% menjadi 22%.

16. TAXATION (continued)

f. Tax law rate

On October 29, 2021, the Government has ratified Law No. 7 Year 2021 on the Harmonization of Tax Regulations, one of the points is to amend Government Regulation No. 1 of 2020 on the tax rate in effect from the 2022 tax year, which was previously 20% to 22%.

17. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN

Surat berharga yang diterbitkan terdiri dari Sertifikat Mudharabah Antar Bank ("SIMA"):

17. SECURITIES ISSUED

The securities issued consist of Certificate of Interbank Mudharabah Investment ("SIMA"):

Bank/ *Bank*	Nilai nominal/ *Nominal value*	Tingkat imbalan/ *Equivalent rate*	Tanggal penerbitan/ *Date of issuance*	Jatuh tempo/ *Due date*
PT Bank Aceh Syariah	100.000.000.000	6,3% per tahun/*year*	28 Desember/*December* 2023	4 Januari/*January* 2024
PT Bank BTPN Syariah Tbk	90.000.000.000	6,3% per tahun/*year*	27 Desember/*December* 2023	3 Januari/*January* 2024
Total	**190.000.000.000**			

Pada tanggal 3 Januari 2024 dan 4 Januari 2024, surat berharga yang diterbitkan telah jatuh tempo dan dilunasi.

As of January 3, 2024 and January 4, 2024, the securities issued have matured and paid off.

18. LIABILITAS LAIN-LAIN

18. OTHER LIABILITIES

	2023	2022	
Biaya yang masih harus dibayar	37.356.894.287	7.895.689.736	*Accrued expenses*
Pendapatan diterima dimuka	32.062.544.541	30.628.399.843	*Deferred income*
Imbalan pasca kerja (Catatan 32)	2.396.017.210	555.648.530	*Post-employment benefits (Note 32)*
Titipan dana sosial - dana kebajikan	877.509.772	745.898.383	*Social funds remittance - qardhul hasan funds*
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi (Catatan 27)	760.329.033	-	*Estimated losses on commitments and contingencies (Note 27)*
Setoran jaminan *safe deposit box*	277.500.000	260.750.000	*Guarantee deposits safe deposit box*
Titipan dana sosial - zakat	44.800.792	49.176.209	*Social funds remittance - zakat*
Lainnya	487.505.430	49.065.311	*Other*
Jumlah	**74.263.101.065**	**40.184.628.012**	***Total***

19. DANA SYIRKAH TEMPORER / *19. TEMPORARY SYIRKAH FUNDS*

a. Berdasarkan jenis / *a. By type*

	2023	2022	
Dana syirkah temporer dari bukan bank			***Temporary syirkah funds from non-bank***
Tabungan *mudharabah*			***Mudharabah savings deposits***
Pihak berelasi	3.596.500.630	3.074.503.794	*Related Parties*
Pihak ketiga	933.514.706.582	792.633.855.310	*Third Parties*
Subjumlah	937.111.207.212	795.708.359.104	*Subtotal*
Deposito *mudharabah*			***Mudharabah deposits***
Pihak berelasi	81.800.626.526	217.171.101.268	*Related parties*
Pihak ketiga	6.694.960.334.461	5.604.456.085.119	*Third parties*
Subjumlah	6.776.760.960.987	5.821.627.186.387	*Subtotal*
Jumlah dana syirkah temporer	**7.713.872.168.199**	**6.617.335.545.491**	***Total temporary syirkah funds***

Tabungan *mudharabah* tidak terikat merupakan simpanan dana pihak lain yang mendapatkan imbal hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

Unrestricted mudharabah savings are deposits of funds from other parties that receive returns from the Bank's income for the use of these funds at a predetermined and agreed ratio.

Deposito berjangka *mudharabah* merupakan simpanan dana pihak lain yang mendapatkan imbal hasil pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya dengan akad *mudharabah muthlaqah*.

Mudharabah term deposits are funds deposited by other parties who receive a return on the Bank's income for the use of these funds with a predetermined and agreed ratio in a mudharabah muthlaqah contract.

b. Investasi tidak terikat - deposito *mudharabah* berdasarkan jangka waktu dan sisa umur / *b. Unrestricted investment - mudharabah deposits by period and remaining contractual maturity*

	2023	2022	
Berdasarkan jangka waktu kontrak			*By contractual period*
Sampai dengan 1 bulan	5.653.339.804.274	5.168.375.966.436	*Until 1 month*
Jangka waktu 3 bulan	592.768.040.742	400.546.373.564	*Period of time 3 months*
Jangka waktu 6 bulan	164.228.948.879	101.879.688.750	*Period of time 6 months*
Jangka waktu 12 bulan	366.424.167.092	150.825.157.637	*Period of time 12 months*
Jumlah	**6.776.760.960.987**	**5.821.627.186.387**	***Total***

19. DANA SYIRKAH TEMPORER (lanjutan)

b. Investasi tidak terikat - deposito *mudharabah* berdasarkan jangka waktu dan sisa umur (lanjutan)

19. TEMPORARY SYIRKAH FUNDS (continued)

b. Unrestricted investment - mudharabah deposits by period and remaining maturity (continued)

	2023	2022	
Berdasarkan sisa umur jatuh tempo			*By remaining period to maturity*
Kurang dari atau sama dengan 1 bulan	5.840.974.453.123	5.319.184.472.121	*Less than or equal to 1 month*
Lebih dari 1 sampai dengan 3 bulan	448.028.242.380	345.363.308.598	*More than 1 month up to 3 months*
Lebih dari 3 sampai dengan 6 bulan	153.369.854.053	55.169.353.488	*More than 3 month up to 6 months*
Lebih dari 6 sampai dengan 12 bulan	334.388.411.431	101.910.052.180	*More than 6 month up to 12 months*
Jumlah	**6.776.760.960.987**	**5.821.627.186.387**	***Total***

Deposito berjangka *mudharabah* dengan akad *mudharabah muthlaqah* yang dijadikan sebagai jaminan atas piutang dan pembiayaan adalah masing-masing berjumlah Rp382.208.483.516 dan Rp127.868.328.752 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Mudharabah term deposits with mudharabah muthlaqah contracts which are used as collateral for receivables and financing amount to Rp382,208,483,516 and Rp127,868,328,752 respectively as of December 31, 2023 and 2022.

c. Nisbah dan pendanaan tingkat bagi hasil per tahun

c. Profit sharing rate ratio and funding per annum

	2023		
	Nasabah/ *Customers*	**Bank/ *Banks***	
Tabungan *mudharabah*	3,60%	96,40%	*Mudharabah savings deposits*
Deposito *mudharabah*	18,00%	82,00%	*Mudharabah time deposits*

	2022		
	Nasabah/ *Customers*	**Bank/ *Banks***	
Tabungan *mudharabah*	3,60%	96,40%	*Mudharabah savings deposits*
Deposito *mudharabah*	18,00%	82,00%	*Mudharabah time deposits*

20. MODAL SAHAM

20. SHARE CAPITAL

Susunan pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The composition of shareholders as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	Jumlah lembar/ *Total share*	**Persentase/ *Percentage***	**Jumlah/*Total***	
PT Bank Central Asia Tbk	2.255.182.137	99,99995%	2.255.182.137.000	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT BCA Finance	1.070	0,00005%	1.070.000	*PT BCA Finance*
Jumlah	**2.255.183.207**	**100%**	**2.255.183.207.000**	***Total***

21. CADANGAN UMUM

Melalui Akta Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan PT Bank UIB No. 28 yang dibuat dihadapan Notaris Pudji Rejeki Irawati, SH., notaris di Jakarta tanggal 20 April 2009, telah diputuskan untuk membentuk penyisihan cadangan umum sesuai dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, yang mengharuskan perusahaan-perusahaan untuk membuat penyisihan cadangan umum sebesar sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Undang-Undang tersebut tidak mengatur jangka waktu untuk pembentukan penyisihan tersebut.

Sesuai dengan Pernyataan Keputusan Rapat berdasarkan Akta Notaris No. 130 yang dibuat di hadapan Notaris Christina Dwi Utami, SH., M.Hum., M.Kn., notaris di Jakarta tanggal 17 Maret 2022, penyisihan saldo laba bersih untuk cadangan umum tahun 2021 sebesar Rp2.000.000.000, sehingga meningkat dari berjumlah Rp12.000.000.000 menjadi berjumlah Rp14.000.000.000.

Sesuai dengan Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham berdasarkan Akta Notaris No. 101 yang dibuat di hadapan Notaris Toki Thomas, SH., M.Kn., notaris di Jakarta tanggal 22 Februari 2023, penyisihan saldo laba bersih untuk cadangan umum tahun 2022 sebesar Rp2.000.000.000, sehingga meningkat dari berjumlah Rp14.000.000.000 menjadi berjumlah Rp16.000.000.000.

21. GENERAL RESERVES

Through the Deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank UIB No. 28 made before Notary Pudji Rejeki Irawati, SH., notary in Jakarta on April 20 2009, it was decided to establish a general reserve in accordance with Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, which requires companies to set aside general reserves of at least 20% of the total issued and fully paid capital. The law does not set a time period for establishing such reserves.

In accordance with the Meeting Decision Statement based on Notarial Deed No. 130 made before Notary Christina Dwi Utami, SH., M.Hum., M.Kn., notary in Jakarta on March 17 2022, the appropriation of net profit for 2021 is Rp2,000,000,000, increasing from Rp12,000,000,000 to amount to Rp14,000,000,000.

In accordance with the Meeting Decision Statement based on Notarial Deed No. 101 made before Notary Toki Thomas, SH., M.Kn., notary in Jakarta on February 22, 2023, the appropriation of net profit for 2022 is Rp2,000,000,000, increasing from Rp14,000,000,000 to amount to Rp16,000,000,000.

22. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Tambahan modal disetor sebesar Rp70.556.747.868 pada 31 Desember 2023 dan 2022, merupakan selisih nilai transaksi entitas sepengendali dari penggabungan usaha dengan PT Bank Interim Indonesia pada tanggal 10 Desember 2020 (Catatan 1).

22. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

Additional paid-in capital amounting to Rp70,556,747,868 on December 31, 2023 and 2022, represents the difference in transaction value of entities under common control from the business merger with PT Bank Interim Indonesia on December 10, 2020 (Note 1).

23. PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA OLEH BANK SEBAGAI MUDHARIB / *23. INCOME FROM MANAGEMENT OF FUNDS BY BANK AS MUDHARIB*

	2023	2022	
Pendapatan dari jual beli			*Income from sales and purchases*
Pendapatan dari margin *murabahah*	129.641.706.564	125.347.539.116	*Income from murabahah margin*
Pendapatan dari ijarah			*Income from ijarah*
Pendapatan *ijarah*	236.210.144.691	156.138.568.856	*Income from ijarah*
Beban penyusutan aset *ijarah*	(191.257.386.220)	(126.995.024.919)	*Depreciation expense of ijarah assets*
Subjumlah	44.952.758.471	29.143.543.937	*Subtotal*
Pendapatan bagi hasil			*Income from profit sharing*
Pendapatan bagi hasil *musyarakah*	409.276.465.243	355.318.952.793	*Profit sharing income from musyarakah*
Pendapatan bagi hasil *mudharabah*	50.803.352.977	43.920.290.738	*Profit sharing income from mudharabah*
Subjumlah	460.079.818.220	399.239.243.531	*Subtotal*
Pendapatan usaha utama lainnya			*Other main operating income*
Pendapatan bagi hasil surat berharga	164.394.065.362	122.548.448.404	*Profit sharing income from marketable securities*
Pendapatan bonus fasilitas simpanan Bank Indonesia Syariah	111.125.746.646	56.352.195.491	*Bonus income from Bank Indonesia Sharia savings facility*
Pendapatan reksadana	22.075.246.492	17.083.743.653	*Mutual fund income*
Pendapatan bagi hasil sertifikat Investasi *mudharabah* antar bank	1.188.770.832	30.402.778	*Profit sharing income from certificates interbank mudharabah investment*
Pendapatan *ujroh* dari bank lain	1.398.477	2.035.967	*Ujroh income from other banks*
Subjumlah	298.785.227.809	196.016.826.293	*Subtotal*
Jumlah	**933.459.511.064**	**749.747.152.877**	***Total***

24. HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL / *24. THIRD PARTIES' SHARE ON RETURN*

	2023	2022	
Dari investasi tidak terikat			***From non-restricted investments***
Bukan bank			***Non-bank***
Tabungan *mudharabah*			***Mudharabah savings deposits***
Pihak ketiga	5.650.087.120	6.786.150.970	*Third parties*
Deposito *mudharabah*			***Mudharabah time deposits***
Pihak berelasi	8.063.701.728	5.066.246.773	*Related parties*
Pihak ketiga	261.397.964.031	149.504.286.747	*Third parties*
Subjumlah	269.461.665.759	154.570.533.520	*Subtotal*
Bank			***Bank***
Deposito *mudharabah*			***Mudharabah time deposits***
Pihak ketiga	95.193.203	-	*Third parties*
Subjumlah	95.193.203	-	*Subtotal*
Jumlah	**275.206.946.082**	**161.356.684.490**	***Total***

25. PENDAPATAN USAHA LAINNYA / *25. OTHER BUSINESS INCOME*

	2023	2022	
Pendapatan komisi			***Revenue commission***
Pendapatan komisi pengiriman uang	3.431.278.250	4.366.497.750	*Remittance income*
Pendapatan komisi asuransi	2.206.611.064	1.307.800.993	*Insurance commission income*
Pendapatan komisi bank garansi	612.200.276	477.196.055	*Bank guarantee commission income*
Pendapatan komisi *safe deposit box*	201.950.000	193.650.000	*Safe deposit box commission income*
Pendapatan komisi kliring	113.938.690	129.859.890	*Clearing commission income*
Pendapatan komisi lainnya	58.725.764	53.152.896	*Other commission income*
Subjumlah	6.624.704.044	6.528.157.584	*Subtotal*
Pendapatan operasional lainnya			***Other operating income***
Pendapatan administrasi	32.514.061.329	23.939.341.773	*Administration income*
Pemulihan penghapusbukuan	30.408.139.552	12.137.128.702	*Write-off recovery*
Pendapatan *ta'widh*	341.584.618	146.530.823	*Ta'widh income*
Lainnya	784.359.478	11.858.862.690	*Other*
Subjumlah	64.048.144.977	48.081.863.988	*Subtotal*
Jumlah	**70.672.849.021**	**54.610.021.572**	***Total***

26. BEBAN KEPEGAWAIAN / *26. EMPLOYEE EXPENSES*

	2023	2022	
Gaji dan uang lembur	107.925.184.667	85.605.351.777	*Salaries and overtime pay*
Tunjangan karyawan	65.967.336.751	44.915.863.084	*Employee allowances*
Pendidikan karyawan	9.858.618.595	8.993.595.215	*Employee education*
Imbalan pasca kerja (Catatan 32)	4.702.254.316	-	*Post-employment benefits (Note 32)*
Lain-lain	3.619.842.046	1.883.609.125	*Other*
Jumlah	**192.073.236.375**	**141.398.419.201**	***Total***

27. BEBAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI ASET PRODUKTIF DAN NON PRODUKTIF / *27. PROVISION FOR IMPAIRMENT LOSSES ON EARNING AND NON-EARNING ASSETS*

	2023	2022	
Pembentukan (pembalikan) penyisihan Kerugian			***Addition (reversal of) provision for impairment losses***
Pembiayaan *musyarakah* (Catatan 10)	30.000.296.441	228.935.847.496	*Musyarakah financing (Note 10)*
Investasi surat berharga (Catatan 7)	32.345.575.537	3.961.590.621	*Investments in marketable securities (Note 7)*
Piutang *ijarah*	(260.706.052)	173.135.790	*Ijarah receivables*
Pinjaman *qardh*	(173.775.685)	151.740.952	*Funds of qardh*
Giro pada bank lain (Catatan 6)	143.661.288	3.500.551	*Current account with other banks (Note 6)*
Agunan yang diambil alih	(2.065.679.975)	(19.994.463.233)	*Foreclosed collaterals*
Pembiayaan *mudharabah* (Catatan 9)	2.387.517.839	(577.172.346)	*Mudharabah financing (Note 9)*
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi (Catatan 18)	760.329.033	-	*Estimated losses on commitments and contingencies (Note 18)*
Piutang *murarabah* (Catatan 8)	(5.265.837.446)	(411.979.447)	*Murabahah receivable (Note 8)*
Jumlah	**57.871.380.980**	**212.242.200.384**	***Total***

28. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI / *28. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES*

	2023	2022	
Biaya telekomunikasi	43.477.824.325	25.011.616.610	*Telecommunications costs*
Promosi	29.250.692.770	2.051.445.676	*Promotion*
Peralatan kantor	23.776.101.932	16.584.616.523	*Office supplies expenses*
Jasa *outsourcing*	13.735.414.127	12.119.479.871	*Outsourcing services*
Beban penyusutan (Catatan 12)	12.650.513.734	9.336.783.169	*Depreciation expense (Note 12)*
Biaya sewa ijarah, gedung dan kendaraan	12.359.902.776	11.734.972.239	*Ijarah, building and vehicle rental fees*
Pemeliharaan dan perbaikan	9.981.987.874	8.783.166.254	*Maintenance and repair*
Beban iuran Otoritas Jasa Keuangan	6.526.127.677	1.098.000.000	*Financial Services Authority levy*
Pajak bumi dan bangunan dan pajak lainnya	5.594.173.668	5.191.003.905	*Land and building tax and other taxes*
Jasa layanan (Catatan 35)	4.996.186.360	-	*Service expense (Note 35)*
Beban amortisasi (Catatan 13)	4.652.493.993	2.140.682.019	*Amortization expense (Note 13)*
Beban komisi	1.714.650.282	492.387.462	*Commission expense*
Beban premi asuransi	680.795.134	558.120.890	*Insurance premium expenses*
Beban publikasi	-	805.879.996	*Publication expenses*
Lainnya	561.693.108	504.609.674	*Others*
Jumlah	**169.958.557.760**	**96.412.764.288**	***Total***

29. BEBAN USAHA LAINNYA / *29. OTHER BUSINESS EXPENSES*

	2023	2022	
Beban bonus *(ujrah)*			*Bonus expenses (ujrah)*
Giro *wadiah*	44.009.118.058	24.408.587.290	*Wadiah demand deposits*
Tabungan *wadiah*	491.329.658	691.584.747	*Wadiah savings deposits*
Subjumlah	44.500.447.716	25.100.172.037	*Subtotal*
Beban lainnya			*Other expenses*
Beban penyisihan kerugian aset *ijarah*/IMBT	27.728.255.528	-	*Provision for impairment of ijarah assets/IMBT*
Premi asuransi penjaminan dana pihak ketiga	20.806.017.116	16.418.479.322	*Third parties fund guarantee insurance premiums*
Subjumlah	48.534.272.644	16.418.479.322	*Subtotal*
Jumlah	**93.034.720.360**	**41.518.651.359**	***Total***

30. PENDAPATAN (BEBAN) NON USAHA / *30. NON OPERATING INCOME (EXPENSES)*

	2023	2022	
Pendapatan non-usaha			***Non-Operating Income***
Laba penjualan aset tetap (Catatan 12)	5.117.280	73.085.654	*Gain on sale of fixed assets (Note 12)*
Klaim asuransi pembiayaan	-	1.157.337.341	*Financing insurance claims*
Lain-lain	426.897.644	12.275.458	*Others*
Jumlah	**432.014.924**	**1.242.698.453**	***Total***
Beban non-usaha			***Non-operating expenses***
Rugi penjualan AYDA	(22.392.163.532)	(2.161.268.529)	*Realized loss on AYDA*
Kerohanian dan olahraga	(264.596.920)	(50.425.000)	*Spirituality and sports*
Rugi revaluasi aset tetap (Catatan 12)	-	(3.233.196.194)	*Loss on fixed asset revaluation (Note 12)*
Lain-lain	(2.363.975.155)	(1.016.953.472)	*Others*
Jumlah	**(25.020.735.607)**	**(6.461.843.195)**	***Total***
Beban non usaha - bersih	**(24.588.720.683)**	**(5.219.144.742)**	***Non operating expenses - net***

31. KOMITMEN DAN KONTINJENSI / *31. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES*

	2023	2022	
Komitmen			*Commitments*
Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan			*Unused financing facilities*
Pembiayaan *mudharabah*	612.907.414.336	535.115.033 299	*Mudharabah financing*
Pembiayaan *musyarakah*	1.073.079.210.825	1.194.875.677.613	*Musyarakah financing*
Jumlah tagihan komitmen	**1.685.986.625.161**	**1.729.990.710.912**	***Total commitments receivables***
Kontinjensi			*Contingencies*
Tagihan kontinjensi			*Contingencies receivables*
Pembiayaan	10.745.432.473	10.652.234.295	*Financing*
Tunggakan bagi hasil terjadwal	36.454.195.583	56.143.677.510	*Arrears for scheduled profit sharing*
Subjumlah	**47.199.628.056**	**66.795.911.805**	***Subtotal***
Kewajiban kontinjensi			*Contingent liabilities*
Bank garansi yang diberikan kepada nasabah	(75.732.903.291)	(46.848.471.839)	*Bank guarantee given to customers*
Jumlah tagihan (kewajiban) kontinjensi - bersih	**(28.533.275.235)**	**19.947.439.966**	***Total contingencies receivables (liabilities) - net***

32. IMBALAN PASTI / *32. DEFINED BENEFITS*

Kewajiban diestimasi atas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh aktuaris independen Kantor Konsultan Aktuaria Steven & Mourits dan Kantor Konsultan Aktuaria Setya Widodo dengan laporannya masing-masing tanggal 21 November 2023 Nomor 2822/ST-FA-PSAK24-BCAS/XI/2023 dan 30 Desember 2022 Nomor 058/KKA-SW/LA/XII/2022, menggunakan metode "*Projected Unit Credit*".

The estimated liability for employee benefits on December 31, 2023 and 2022 based on the independent actuarial calculation carried out by an independent actuary - Kantor Konsultan Aktuaria Steven & Mourits and Kantor Konsultan Aktuaria Setya Widodo, whose report dated November 21, 2023 Number 2822/ST-FA-PSAK24-BCAS/XI/2023 and December 30, 2022 Number 058/KKA-SW/LA/XII/2022, respectively, applied the "Projected Unit Credit" method.

a. Beban imbalan pasti neto / *a. Net defined benefits expense*

	2023	2022	
Biaya jasa kini	3.132.790.748	3.223 255.312	*Current service cost*
Kerugian dari penyelesaian	1.180.657.073	-	*Loss from settlement*
Biaya bunga	1.844.897.583	2.019.246.789	*Interest cost*
Pendapatan bunga atas aset program	(1.598.251.462)	(1.308 931.157)	*Interest income on plan assets*
Dampak atas perubahan metode atribusi	-	(4.146.380.839)	*Impact of changing attribution methods*
Biaya jasa lalu yang diakui	142.160.374	-	*Recognized past service costs*
Jumlah	**4.702.254.316**	**(212.809.895)**	***Total***

b. Liabilitas imbalan pasti / *b. Defined benefits liabilities*

	2023	2022	
Nilai kini kewajiban	26.805.120.018	24.753.757.991	*Present value of liabilities*
Nilai wajar aset program	(24.409.102.808)	(24.198 109.461)	*Fair value of plan assets*
Jumlah	**2.396.017.210**	**555.648.530**	***Total***

32. IMBALAN PASTI (lanjutan) / 32. DEFINED BENEFITS (continued)

c. Mutasi nilai kini liabilitas adalah sebagai berikut: / c. Movements in the present value of liabilities are as follows:

	2023	2022	
Nilai kini liabilitas awal periode	24.753.757.991	28.360.207.713	Present value of liabilities at the beginning of the period
Biaya jasa kini	3.132.790.748	3.223.255.312	Current service cost
Pendapatan bunga atas aset program	(676.572.597)	(1.153.798.945)	Interest income on plan assets
Efek penyelesaikan pada NKKIP	1.180.657.073	-	Effect of settlement on PVDBO
Biaya bunga	1.844.897.583	2.019.246.789	Interest costs
Pembayaran manfaat	(5.460.685.518)	(4.777.404.860)	Benefit payments
Pengukuran kembali:			Remeasurement :
Dampak atas perubahan metode atribusi	-	(4.146.380.839)	Impact of changes in attribution methods
Dampak perubahan aset program	676.572.597	1.153.798.945	Impact of changes to plan assets
Dampak perubahan asumsi keuangan	752.057.103	(522.339.177)	Impact of changing financial assumptions
Dampak penyesuaian pengalaman	601.645.038	597.173.053	Impact of experience adjustment
Jumlah	**26.805.120.018**	**24.753.757.991**	***Total***

d. Perubahan nilai wajar aset program untuk program imbalan pasti / d. Changes in fair value of program assets for defined benefits programs

	2023	2022	
Saldo awal aset program	24.198.109.461	17.562.473 597	Beginning balance of plan assets
Harapan dari hasil investasi	1.598.251.462	1.308 931.157	Expectations of investment returns
Pembayaran manfaat	(5.460.685.518)	(4.569.496.348)	Benefit payments
Iuran perusahaan	4.750.000.000	11.050.000.000	Company contribution
Saldo akhir aset program - perkiraan	25.085.675.405	25.351 908.406	Ending balance of plan assets - estimated
Keuntungan aktuarial pada aset program	676.572.597	1.153.798.945	Actuarial gains on plan assets
Saldo akhir aset program - aktual	**24.409.102.808**	**24.198.109.461**	***Ending balance of plan assets - actual***

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 aset program diinvestasikan ke dalam instrumen pasar uang syariah masing-masing sebesar Rp24.409.102.808 dan Rp24.198.109.461.

As at December 31, 2023 and 2022, plan assets invested to sharia money market each amounting to Rp24,409,102,808 and Rp24,198,109,461.

Asumsi dasar yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan pasti pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The basic assumptions used in determining defined benefits liabilities on December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	2023	2022	
Tingkat diskonto awal periode	6,7%	7,14%	The discount rate at the beginning of the period
Tingkat diskonto akhir periode			End of period discount rate
UPN 35	7,14%	7,14%	UPN 35
UPN 55	7,45%	7,45%	UPN 55
Tingkat kenaikan gaji	6,0%	6,0%	Expected salary increase
Tingkat hasil investasi	7,5%	7,5%	Investment return rate
Tabel mortalita	Tabel TMI-IV (2019)	Tabel TMI-IV (2019)	Mortality table
Tingkat cacat dan sakit	5% Tabel TM-IV	5% Tabel TM-IV	Disability and illness
Usia pensiun	55 Tahun	55 Tahun	Retirement age

32. IMBALAN PASTI (lanjutan)

d. Perubahan nilai wajar aset program untuk program imbalan pasti (lanjutan)

Tabel berikut menunjukan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pasar dan tingkat kenaikan gaji, dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap liabilitas imbalan pasti dan beban jasa kini pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

32. DEFINED BENEFITS (continued)

d. Changes in fair value of program assets for defined benefits programs (continued)

The following table shows the sensitivity to possible changes in market interest rates and salary increase rate, with other variables held constant, to defined benefit liabilities and current service costs as of December 31, 2023 and 2022, as follows:

	2023		2022		
	Kenaikan 1%/ *1% Increase*	Penurunan 1%/ *1% Decrease*	Kenaikan 1%/ *1% Increase*	Penurunan 1%/ *1% Decrease*	
Tingkat diskonto	(1.066.124.886)	1.163.490.058	(1.492.296,274)	1.677.140.515	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	1.266.260.480	(1.180.527.596)	1.485.631.776	(1.351.754.275)	*Salary increase rate*

33. PENGELOLAAN RISIKO

Penerapan manajemen risiko bank secara terpadu dengan mengacu pada Kerangka Kerja Manajemen Risiko ini dilakukan guna mendukung pencapaian tujuan perusahaan, yang pada akhirnya akan meningkatkan *stakeholder value* sesuai dengan *risk appetite* dan Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah menurut Peraturan Bank Indonesia.

Risiko pembiayaan

Terkait dengan pengelolaan risiko pembiayaan, Bank telah memiliki kebijakan-kebijakan mengenai pembiayaan, antara lain yaitu:

a. Kebijakan Dasar Pembiayaan Bank (“KDPB”)
b. Kebijakan manajemen risiko pembiayaan
c. Manual pembiayaan konsumtif
d. Manual pembiayaan produktif
e. Kebijakan penilaian kualitas penyisihan penghapusan aset
f. Kebijakan penyelamatan dan penghapusan pembiayaan
g. Wewenang memutus pembiayaan

Dengan telah dimilikinya kebijakan Bank tersebut diatas, maka diharapkan Bank dapat mengoptimalkan kualitas pengelolaan risiko pembiayaan melalui proses yang memadai, kecukupan agunan yang telah ditetapkan dan penetapan *risk appetite* Bank sesuai dengan kompleksitas usaha Bank.

33. RISK MANAGEMENT

The implementation of integrated bank risk management by referring to the Risk Management Framework is carried out to support the achievement of company objectives, which will ultimately increase stakeholder value in accordance with risk appetite and the Standard Guidelines for the Implementation of Risk Management for Sharia Commercial Banks according to Bank Indonesia Regulations.

Financing risk

Regarding financing risk management, the Bank has policies regarding financing, including:

a. Basic Bank Financing Policy (“KDPB”)
b. Financing risk management policy
c. Consumer financing manual
d. Productive financing manual
e. Policy on quality assessment of allowance for asset losses
f. Funding rescue and elimination policy
g. Authority to decide on financing

By having the above Bank policy in place, it is hoped that the Bank can optimize the quality of financing risk management through adequate processes, determining collateral adequacy and determining the Bank's risk appetite in accordance with the complexity of the Bank's business.

33. PENGELOLAAN RISIKO (lanjutan)

33. *RISK MANAGEMENT (continued)*

Risiko pembiayaan (lanjutan)

Financing risk (continued)

Berikut ini adalah jumlah pembiayaan yang di restrukturisasi terkait COVID-19:

The following is the amount of financing that was restructured related to COVID-19:

	2023	2022	
Lancar	160.781.655.472	471 099.180.346	*Current*
Dalam perhatian khusus	195.371.942.952	284.740.463.364	*Special mention*
Kurang lancar	423.316.537	1.594.844.416	*Substandard*
Diragukan	627.753.899	-	*Doubtful*
Macet	86.430.816.293	78.737.829.059	*Loss*
Jumlah	**443.635.485.153**	**836.172.317.185**	***Total***

Tabel berikut menyajikan eksposur maksimum risiko pembiayaan Bank atas instrumen keuangan pada laporan posisi keuangan.

The following table presents the maximum exposure to Bank financing risk for financial instruments in the statement of financial position.

	2023	2022	
Posisi keuangan:			*Statement of financial position:*
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	1.093.935.437.833	946.011.909.343	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	28.762.381.994	14.396.253.165	*Current account with other banks*
Investasi pada surat berharga	4.288.942.295.479	4.110.854.607.761	*Investments in marketable securities*
Piutang *murabahah*	1.654.582.960.798	1.346.788.693.042	*Murabahah receivables*
Piutang *ijarah*	22.226.272	289.006.781	*Ijarah receivables*
Pinjaman *qardh*	13.486.131.908	30.845.763.785	*Fund of qardh*
Pembiayaan *mudharabah*	760.307.047.444	508.124.477.801	*Mudharabah financing*
Pembiayaan *musyarakah*	5.988.630.619.609	5.297.352.005.949	*Musyarakah financing*
Aset lain-lain*)	86.652.914.796	62.102.510.530	*Other assets*)*
Jumlah	**13.915.322.016.133**	**12.316.765.228.157**	***Total***

Risiko konsentrasi pembiayaan

Financing concentration risk

Berdasarkan pihak lawan

Based on the counter party

Tabel berikut menyajikan konsentrasi risiko pembiayaan Bank berdasarkan pihak lawan:

The following table presents the Bank's financing risk concentration based on counterparty:

	2023					
	Pemerintah dan Bank Indonesia/ *Government and Bank Indonesia*	**Lembaga keuangan/ *Financial institutions***	**Korporasi/ *Corporation***	**Perorangan/ *Individual***	**Jumlah/*Total***	
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	1.093.935.437.833	-	-	-	1.093.935.437.833	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	-	28.762.381.994	-	-	28.762.381.994	*Current account with other banks*
Investasi pada surat berharga	2.925.462.846.582	102.116.000.000	1.261.363.448.897	-	4.288.942.295.479	*Investments in marketable securities*
Piutang *murabahah*	-	-	820.106.357.015	834.476.603.783	1.654.582.960.798	*Murabahah receivables*
Piutang *ijarah*	-	-	15.000.000	7.226.272	22.226.272	*Ijarah receivables*
Pinjaman *qardh*	-	-	10.815.287.670	2.670.844.238	13.486.131.908	*Fund of qardh*
Pembiayaan *mudharabah*	-	711.506.698.618	48.800.348.826	-	760.307.047.444	*Mudharabah financing*
Pembiayaan *musyarakah*	-	20.671.465.658	5.253.460.455.225	714.498.698.726	5.988.630.619.609	*Musyarakah financing*
Aset lain-lain*)	41.020.561.920	3.514.386.777	36.155.351.954	5.962.614.145	86.652.914.796	*Other assets*)*
Jumlah	**4.060.418.846.335**	**866.570.933.047**	**7.430.716.249.587**	**1.557.615.987.164**	**13.915.322.016.133**	***Total***

*) Aset lain-lain terdiri atas pendapatan yang masih akan diterima

*) *Other assets consist of income receivables*

33. PENGELOLAAN RISIKO (lanjutan)

Risiko konsentrasi pembiayaan (lanjutan)

Berdasarkan pihak lawan (lanjutan)

Tabel berikut menyajikan konsentrasi risiko pembiayaan Bank berdasarkan pihak lawan: (lanjutan)

33. RISK MANAGEMENT (continued)

Financing concentration risk (continued)

Based on the counterparties (continued)

The following table presents the Bank's financing risk concentration based on counterparty: (continued)

	2022					
	Pemerintah dan Bank Indonesia/ *Government and Bank Indonesia*	**Lembaga Keuangan/ *Financial institutions***	**Korporasi/ *Corporation***	**Perorangan/ *Individual***	**Jumlah/*Total***	
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	946.011.909.343	-	-	-	946.011.909.343	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	-	14.396.253.165	-	-	14.396.253.165	*Current account with other banks*
Investasi pada surat berharga	2.465.007.212.600	125.640.155.350	1.520.207.239.811	-	4.110.854.607.761	*Investments in marketable securities*
Piutang *murabahah*	-	-	716.772.686.995	630.016.006.047	1.346.788.693.042	*Murabahah receivables*
Piutang *ijarah*	-	-	-	289.006.781	289.006.781	*Ijarah receivables*
Pinjaman *qardh*	-	-	29.662.503.970	1.183.259.815	30.845.763.785	*Fund of qardh*
Pembiayaan *mudharabah*	-	436.151.031.744	71.973.446.057	-	508.124.477.801	*Mudharabah financing*
Pembiayaan *musyarakah*	-	89.006.070.235	4.615.684.195.647	592.661.740.067	5.297.352.005.949	*Musyarakah financing*
Aset lain-lain*)	20.240.609.090	2.037.147.783	33.326.098.008	6.498.655.649	62.102.510.530	*Other assets*)*
Jumlah	**3.431.259.731.033**	**667.230.658.277**	**6.987.626.170.488**	**1.230.648.668.359**	**12.316.765.228.157**	***Total***

Analisis risiko pembiayaan

Informasi kualitas piutang yang mengalami penurunan nilai dan tidak mengalami penurunan nilai per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Financing risk analysis

Information on the quality of receivables that are impaired and that are not impaired as of December 31, 2023 and 2022 is as follows:

	2023				
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ *Neither past due and impaired*	**Jatuh tempo namun tidak mengalami penurunan nilai/ *Past due but not impaired***	**Mengalami penurunan nilai/ *Impaired***	**Jumlah/*Total***	
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	1.093.935.437.833	-	-	1.093.935.437.833	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	28.762.381.994	-	-	28.762.381.994	*Current account with other banks*
Investasi pada surat berharga	4.253.417.795.479	-	35.524.500.000	4.288.942.295.479	*Investments in marketable securities*
Piutang *murabahah*	1.641.142.083.993	7.657.297.652	5.783.579.153	1.654.582.960.798	*Murabahah receivables*
Piutang *ijarah*	-	22.226.272	-	22.226.272	*Ijarah receivables*
Pinjaman *qardh*	13.468.195.263	17.936.645	-	13.486.131.908	*Fund of qardh*
Pembiayaan *mudharabah*	760.307.047.444	-	-	760.307.047.444	*Mudharabah financing*
Pembiayaan *musyarakah*	5.637.148.699.322	263.880.093.777	87.601.826.510	5.988.630.619.609	*Musyarakah financing*
Aset lain-lain*)	83.062.666.781	3.590.248.015	-	86.652.914.796	*Other assets*)*
Jumlah	**13.511.244.308.109**	**275.167.802.361**	**128.909.905.663**	**13.915.322.016.133**	***Total***

	2022				
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ *Neither past due and impaired*	**Jatuh tempo namun tidak mengalami penurunan nilai/ *Past due but not impaired***	**Mengalami penurunan nilai/ *Impaired***	**Jumlah/*Total***	
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	946.011.909.343	-	-	946.011.909.343	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	14.396.253.165	-	-	14.396.253.165	*Current account with other banks*
Investasi pada surat berharga	4.110.854.607.761	-	-	4.110.854.607.761	*Investments in marketable securities*
Piutang *murabahah*	1.330.494.657.629	13.702.416.270	2.591.619.143	1.346.788.693.042	*Murabahah receivables*
Piutang *ijarah*	-	30.923.778	258.083.003	289.006.781	*Ijarah receivables*
Pinjaman *qardh*	30.845.763.785	-	-	30.845.763.785	*Fund of qardh*
Pembiayaan *mudharabah*	508.124.477.801	-	-	508.124.477.801	*Mudharabah financing*
Pembiayaan *musyarakah*	4.842.842.195.513	350.362.823.682	104.146.986.754	5.297.352.005.949	*Musyarakah financing*
Aset lain-lain*)	61.167.046.883	935.463.646	-	62.102.510.529	*Other assets*)*
Jumlah	**11.844.736.911.880**	**365.031.627.376**	**106.996.688.900**	**12.316.765.228.156**	***Total***

*) Aset lain-lain terdiri atas pendapatan yang masih akan diterima

**) Other assets consist of income receivables*

33. PENGELOLAAN RISIKO (lanjutan)

Risiko pasar

Risiko pasar adalah risiko pada laporan posisi keuangan dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Bank saat ini belum menjadi Bank Devisa, sehingga Bank belum secara langsung terkena dampak risiko kurs, namun Bank tidak terlepas dari risiko suku bunga baik dari sisi pendanaan maupun penyaluran pembiayaan.

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan. Likuiditas Bank dipengaruhi oleh struktur dana, likuiditas aset dan komitmen pembiayaan kepada debitur.

Untuk meminimalkan risiko likuiditas tersebut Bank telah memiliki:
a. Kebijakan manajemen risiko likuiditas
b. Metodologi dalam manajemen risiko likuiditas
c. Kebijakan tresuri

Tujuan dari manajemen likuiditas adalah memelihara posisi aset likuid secara optimal dan Bank dapat memenuhi seluruh kewajiban kontraktual dan ketentuan kewajiban keuangan, termasuk saat kondisi Bank sedang kritis. Untuk memenuhi kewajiban Bank kepada para nasabah dan lawan transaksi serta menyediakan kebutuhan likuiditas untuk transaksi operasionalnya, maka Bank saat ini sedang melakukan pemeliharaan dalam posisi *secondary reserves* pada Fasilitas Bank Indonesia Syariah.

33. RISK MANAGEMENT (continued)

Market risk

Market risk is the risk in the statement of financial position and administrative accounts due to changes in market prices, including risks in the form of changes in the value of assets that can be traded or rented. The Bank is not currently a foreign exchange bank, so the Bank is not directly affected by foreign currency, however the Bank is not free from interest rate risk both in terms of funding and distribution of financing.

Liquidity risk

Liquidity risk is the risk due to the Bank's inability to meet its maturing obligations from cash flow funding sources and/or high quality liquid assets that can be pledged as collateral. Bank liquidity is influenced by fund structure, asset liquidity and financing commitments to debtors.

To minimize liquidity risk, the Bank has:

a. Liquidity risk management policy
b. Methodology in liquidity risk management
c. Treasury policy

The aim of liquidity management is to maintain an optimal position of liquid assets so that the Bank can fulfill all contractual obligations and provisions on financial obligations, including when the Bank's condition is critical. To fulfill the Bank's obligations to its customers and counterparties as well as provide liquidity needs for its operational transactions, the Bank is currently maintaining a secondary reserves position in the Bank Indonesia Sharia Facility.

33. PENGELOLAAN RISIKO (lanjutan)

Risiko likuiditas (lanjutan)

Analisis jatuh tempo aset, liabilitas dan dana syirkah temporer menurut kelompok jatuh temponya berdasarkan periode yang tersisa, terhitung sejak tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sampai dengan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut:

33. RISK MANAGEMENT (continued)

Liquidity risk (continued)

Analysis of the maturity of assets, liabilities and temporary syirkah funds according to maturity groups based on the remaining period, starting from December 31, 2023 and 2022 until the maturity date is as follows:

2023
(dalam jutaan Rupiah/ *expressed in million Rupiah*)

	Nilai Tercatat/ *Carrying value*	Tidak Mempunyai Kontrak Jatuh Tempo/ *No maturity date*	Sampai dengan 1 bulan/ *Up to 1 month*	Sampai dengan 3 bulan/ *Up to 3 months*	Sampai dengan 6 bulan/ *Up to 6 months*	Sampai dengan 12 bulan/ *Up to 12 months*	Lebih dari 12 bulan/*More than 12 months*	
Aset								***Asset***
Kas	42.811	-	42.811	-	-	-	-	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	402.035	-	402.035	-	-	-	-	*Current accounts with Bank Indonesia*
Penempatan pada Bank Indonesia	691.900	-	691.900	-	-	-	-	*Placements with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	28.762	-	28.762	-	-	-	-	*Current accounts with other banks*
Investasi pada surat berharga	4.288.942	-	965.000	121.293	79.423	226.479	2.896.747	*Investments in marketable securities*
Piutang *Murabahah*	1.654.583	-	20	3.052	9.919	43.443	1.598.149	*Murabahah receivables*
Piutang *Ijarah*	22	-	22	-	-	-	-	*Ijarah receivables*
Pinhaman *Qardh*	13.486	-	8.465	2.366	90	485	2.080	*Qardh receivables*
Pembiayaan *Mudharabah*	760.307	-	-	6.440	44.136	163.696	546.035	*Mudharabah financing*
Pembiayaan *Musyarakah*	5.988.631	-	50.617	246.526	1.350.833	1.350.419	2.990.236	*Musyarakah financing*
Aset lain-lain*)	86.653	-	58.511	20.531	6.539	1.072	-	*Other assets*)*
Jumlah aset	**13.958.132**	**-**	**2.248.143**	**400.208**	**1.490.940**	**1.785.594**	**8.033.247**	***Total asset***
Liabilitas								***Liabilities***
Liabilitas segera	64.193	-	64.193	-	-	-	-	*Obligations due immediately*
Bagi hasil yang belum dibagikan	16.200	-	16.200	-	-	-	-	*Undistributed profit sharing*
Simpanan dari nasabah								*Deposits from customers*
Giro	2.076.138	-	2.076.138	-	-	-	-	*Current accounts*
Tabungan	1.159.444	-	1.159.444	-	-	-	-	*Savings deposit*
Simpanan dari bank lain	66.407	-	66.407	-	-	-	-	*Deposits from other banks*
Surat berharga yang diterbitkan	190.000	-	190.000	-	-	-	-	*Securities issued*
Liabilitas lain-lain	43.758	32.063	1.638	6.501	249	447	2.860	*Other liabilities*
Jumlah liabilitas	**3.616.140**	**32.063**	**3.574.020**	**6.501**	**249**	**447**	**2.860**	***Total liabilities***
Dana syirkah temporer								***Temporary syirkah funds***
Tabungan *mudharabah*	937.111	-	908.043	70	-	670	28.328	*Mudharabah savings deposits*
Deposito *mudharabah*	6.776.761	-	5.840.975	448.028	153.370	334.388	-	*Mudharabah time deposits*
Jumlah dana syirkah temporer	**7.713.872**	**-**	**6.749.018**	**448.098**	**153.370**	**335.058**	**28.328**	***Total temporary syirkah funds***
Perbedaan jatuh tempo	**2.628.120**	**(32.063)**	**(8.074.895)**	**(54.391)**	**1.337.321**	**1.450.089**	**8.002.059**	***Maturity differences***

*) Aset lain-lain terdiri atas pendapatan yang masih akan diterima

**) Other assets consist of income receivables*

33. PENGELOLAAN RISIKO (lanjutan)

Risiko likuiditas (lanjutan)

Analisis jatuh tempo aset, liabilitas dan dana syirkah temporer menurut kelompok jatuh temponya berdasarkan periode yang tersisa, terhitung sejak tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sampai dengan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut: (lanjutan)

33. *RISK MANAGEMENT (continued)*

Liquidity risk (continued)

Analysis of the maturity of assets, liabilities and temporary syirkah funds according to maturity groups based on the remaining period, starting from December 31, 2023 and 2022 until the maturity date is as follows: (continued)

2022
(dalam jutaan Rupiah/ *expressed in million Rupiah*)

	Nilai Tercatat/ *Carrying value*	Tidak Mempunyai Kontrak Jatuh Tempo/ *No maturity date*	Sampai dengan 1 bulan/ *Up to 1 month*	Sampai dengan 3 bulan/ *Up to 3 months*	Sampai dengan 6 bulan/ *Up to 6 months*	Sampai dengan 12 bulan/ *Up to 12 months*	Lebih dari 12 bulan/*More than 12 months*	
Aset								***Asset***
Kas	69.221	-	69.221	-	-	-	-	*Cash*
Giro pada bank								*Current accounts*
Indonesia	551.712	-	551.712	-	-	-	-	*with Bank Indonesia*
Penempatan pada bank								*Placements with Bank*
Indonesia	394.300	-	394.300	-	-	-	-	*Indonesia*
Giro pada bank lain	14.396	-	14.396	-	-	-	-	*Current account with other banks*
Investasi								*Investments in*
pada surat berharga	4.110.855	-	1.680.229	-	-	125.330	2.305.296	*marketable securities*
Piutang *murabahah*	1.346.789	-	473	2.952	9.136	41.398	1.292.830	*Murabahah receivables*
Piutang *ijarah*	289	-	289	-	-	-	-	*Ijarah receivables*
Piutang *qardh*	30.846	-	1.326	15.711	12.715	241	853	*Qardh receivables*
Pembiayaan *mudharabah*	508.124	-	1.325	48.088	16.030	40.997	401.684	*Mudharabah financing*
Pembiayaan *musyarakah*	5.297.352	-	335.666	413.134	1.148.640	1.363.333	2.036.579	*Musyarakah financing*
Aset lain-lain*)	62.103	-	47.262	11.166	3.675	-	-	*Other assets*)*
Jumlah aset	**12.385.987**	**-**	**3.096.199**	**491.051**	**1.190.196**	**1.571.299**	**6.037.242**	***Total assets***
Liabilitas								***Liabilities***
Liabilitas segera	187.595	-	187.595	-	-	-	-	*Obligations due immediately*
Bagi hasil yang belum dibagikan	11.292	-	11.292	-	-	-	-	*Undistributed profit sharing*
Simpanan dari nasabah								*Deposits from customers*
Giro	2.103.955	-	2.103.955	-	-	-	-	*Current accounts*
Tabungan	760.343	-	760.343	-	-	-	-	*Savings deposit*
Simpanan dari bank lain	5.888	-	5.888	-	-	-	-	*Deposits from other banks*
Liabilitas lain-lain	40.185	40.185	-	-	-	-	-	*Other liabilities*
Jumlah liabilitas	**3.099.701**	**30.628**	**3.069.073**	**-**	**-**	**-**	**-**	***Total liabilites***
Dana *syirkah* temporer								***Temporary syirkah funds***
Tabungan *mudharabah*	795.708	-	774.696	3.004	3.776	4.149	10.083	*Mudharabah savings deposits*
Deposito *mudharabah*	5.821.627	-	5.319.184	345.364	55.169	101.910	-	*Mudharabah time deposits*
Jumlah dana *syirkah* temporer	**6.617.335**	**-**	**6.093.880**	**348.368**	**58.945**	**106.059**	**10.083**	***Total temporary syirkah funds***
Perbedaan jatuh tempo	**2.668.951**	**(30.628)**	**(6.066.754)**	**142.683**	**1.131.251**	**1.465.240**	**6.027.159**	***Maturity differences***

*) Aset lain-lain terdiri atas pendapatan yang masih akan diterima

*) *Other assets consist of income receivables*

Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Operational Risk

Operational risk is the risk of loss resulting from inadequate internal processes, internal process failures, human error, system failures and/or external events that affect the Bank's operations.

33. PENGELOLAAN RISIKO (lanjutan)

Risiko operasional (lanjutan)

Untuk meminimalkan risiko operasionalnya Bank telah memiliki beberapa kebijakan, antara lain yaitu:

a. Kebijakan manajemen risiko operasional
b. Pedoman standarisasi wewenang kantor cabang dan sentra operasi
c. Ketentuan limit fiat bayar, *override* dan otorisasi transaksi di aplikasi pembiayaan

d. Manual produk dana
e. Manual kerja CSO
f. Manual kerja teller
g. Manual kerja lainnya

Mekanisme pengendalian dilakukan dengan memasukkan tahapan kontrol ke dalam setiap transaksi yang semuanya tercantum dalam manual kerja Bank. Bank juga memiliki Satuan Audit Internal ("SAI") untuk melakukan pemeriksaan secara periodik terhadap kepatuhan karyawannya atas prosedur kerja yang telah ditetapkan.

Risiko kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, termasuk prinsip-prinsip syariah. Dalam menjalankan kegiatan usaha pada industri perbankan, Bank diwajibkan untuk selalu tunduk kepada peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional-MUI. Ketidakmampuan Bank syariah untuk mengikuti dan mematuhi seluruh peraturan perundangan yang terkait dengan kegiatan usaha perbankan dapat berdampak terhadap kelangsungan usahanya.

Bank saat ini telah memiliki kebijakan mengenai pengelolaan risiko kepatuhan, yaitu:

a. Kebijakan kepatuhan
b. Pedoman penerapan program APU dan PPT

c. *Good Corporate Governance Manual*

Untuk lebih meningkatkan pengetahuan mengenai ketentuan yang berlaku, maka Bank telah melakukan beberapa sosialisasi kepada seluruh karyawan mengenai:

a. Penerapan Program APU dan PPT.
b. Pengelompokan nasabah berdasarkan *Risk Based Approach* ("RBA").
c. Pengkinian data nasabah.
d. Kewajiban pelaporan kepada pihak eksternal.
e. Database teroris yang diterima dari PBB setiap 6 (enam) bulan sekali.

33. RISK MANAGEMENT (continued)

Operational risk (continued)

To minimize operational risks, the Bank has several policies, including:

a. Operational risk management policy
b. Guidelines for standardizing the authority of branch offices and operations centers
c. Provisions for fiat payment limits, overrides and transaction authorization in financing applications
d. Funds product manual
e. CSO work manual
f. Teller work manual
g. Other work manuals

The control mechanism is carried out by including control stages in each transaction, all of which are listed in the Bank's work manual. The Bank also has an Internal Audit Unit ("SAI") to carry out periodic checks on employee compliance with established work procedures.

Compliance risk

The risk of occurrence is the risk resulting from the Bank not complying with and/or not implementing the applicable rules and regulations, including sharia principles. In carrying out business activities in the banking industry, Banks are required to always comply with regulations issued by the Government, Bank Indonesia, the Financial Services Authority and the National Sharia Council-MUI. The inability of Sharia banks to follow and comply with all laws and regulations related to banking business activities can have an impact on the continuity of their business.

The Bank currently has a policy regarding compliance risk management, namely:

a. Compliance policy
b. Guidelines for implementing APU and PPT programs
c. Good Corporate Governance Manual

To further increase knowledge regarding applicable regulations, the Bank has conducted several outreach activities to all employees regarding:

a. Implementation of APU and PPT Programs.
b. Customer grouping based on Risk Based Approach ("RBA").
c. Updating customer data.
d. Reporting obligations to external parties.
e. Terrorist database received from the UN every 6 (six) months.

33. PENGELOLAAN RISIKO (lanjutan)

Risiko Lainnya

Risiko lainnya yang dimaksud adalah risiko stratejik, risiko hukum dan risiko reputasi yang harus dikelola oleh Bank dan untuk saat ini ketiga risiko tersebut belum berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi Bank, namun demikian untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya ketiga risiko tersebut, Bank telah memiliki kebijakan mengenai pengelolaan risiko stratejik, risiko hukum dan risiko reputasi.

33. RISK MANAGEMENT (continued)

Other Risks

Other risks are referred to strategic risk, legal risk and reputation risk which must be managed by the Bank and currently these three risks have not had a significant impact on the Bank's condition, however, to anticipate the possibility of these three risks occurring, the Bank has a policy regarding management of strategic risk, legal risk and reputation risk.

34. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM SYARIAH

Beban premi penjaminan Pemerintah selama tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp20.806.017.116 dan Rp16.418.479.322 dicatat pada beban usaha lainnya. Berdasarkan Undang-Undang No.24 tanggal 22 September 2004 yang berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Republik Indonesia No. 3 tanggal 13 Oktober 2008, Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS") dibentuk untuk menjamin kewajiban tertentu bank-bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku, yang besaran nilai jaminannya dapat berubah jika memenuhi kriteria tertentu yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.66 tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 mengenai besarnya Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjaminan Simpanan, maka pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, jumlah simpanan yang dijamin LPS adalah simpanan sampai dengan Rp2.000.000.000 untuk per nasabah per bank.

34. GOVERNMENT GUARANTEE FOR SHARIA COMMERCIAL BANK PAYMENT OBLIGATIONS

Government guarantee premium expenses for 2023 and 2022 amounting to Rp20,806,017,116 and Rp16,418,479,322 respectively were recorded in other operating expenses. Based on Law No. 24 dated September 22, 2004 which became effective on September 22, 2005 as amended by Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia No. 3 dated October 13, 2008, the Deposit Insurance Agency ("LPS") was established to guarantee commercial bank's certain obligations based on the applicable guarantee program, the amount of the guarantee amount may change if certain applicable criteria are met. Based on Republic of Indonesia Government Regulation No. 66 of 2008 dated October 13, 2008 regarding the amount of deposit balance guaranteed by the Deposit Insurance Corporation, then on December 31, 2023 and 2022, the amount of deposits guaranteed by LPS is deposits of up to Rp2,000,000,000 per customer per bank.

35. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

35. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Pihak berelasi/ ***Related parties***	**Sifat dari hubungan/** ***The nature of the relationship***	**Sifat dari transaksi/** ***The nature of the transaction***
PT Anarawata Puspa Utama	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama/*Owned by same ultimate shareholders*	Simpanan nasabah/*Customer deposits*
PT Asuransi Umum BCA	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama/*Owned by same ultimate shareholders*	Simpanan nasabah/*Customer deposits*
PT Asuransi Jiwa BCA	Dimiliki oleh Pemegang Sahara Akhir yang sama/*Owned by same ultimate shareholders*	Simpanan nasabah/*Customer deposits*

35. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

35. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Pihak berelasi/ *Related parties*	Sifat dari hubungan/ *The nature of the relationship*	Sifat dari transaksi/ *The nature of the transaction*
PT Bank Central Asia Tbk	Pemegang saham/*Shareholders*	Pemegang saham, giro pada bank lain, simpanan dari bank lain, tunjangan karyawan, beban sewa, jasa layanan, biaya telekomunikasi, lainnya /*Shareholder, current account with other banks, deposit from other bank, employee allowances, rent expenses, services expenses, telecomunication costs, others*
PT BCA Finance	Pemegang saham/*Shareholders*	Pemegang saham, giro/*Shareholder, current accounts*
PT BCA Sekuritas	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama/*Owned by same ultimate shareholders*	Simpanan nasabah/*Customer deposits*
PT Central Sentosa Finance	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama/*Owned by same ultimate shareholders*	Simpanan nasabah/*Customer deposits*
PT Central Capital Ventura	Dimiliki pemegang saham akhir yang sama/*Owned by same ultimate shareholders*	Simpanan nasabah/*Customer deposits*
Dana Pensiun Bank Central Asia	Dana pensiun pemegang saham/ *Shareholder Official Pension Fund*	Simpanan nasabah/*Customer deposits*
Pejabat Eksekutif	Pejabat pembuat keputusan/*Decision maker*	Piutang, simpanan nasabah, margin *murabahah*/ *Receivables, customer deposits, murabahah margin*

Dalam menjalankan kegiatan normal usahanya, Bank melakukan transaksi-transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.

In carrying out its normal business activities, the Bank carries out transactions with related parties due to ownership and/or management relationships. All transactions with related parties have been carried out with mutually agreed policies and conditions.

Rincian saldo dan transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, adalah sebagai berikut:

Details of significant balances and transactions with related parties as of December 31, 2023 and 2022, are as follows:

	2023		2022		
	Jumlah/*Total*	Persentase dari Total aset/ *Percentage of total assets*	Jumlah/*Total*	Persentase dari Total aset/ *Percentage of total assets*	
Aset					***Assets***
Giro pada bank lain	28.677.436.486	0,20%	14.304.902.683	0,11%	*Current accounts with other banks*
Piutang murabahah	6.458.652.399	0,04%	278.589.032	0,00%	*Murabahah receivables*
Aset lain-lain	18.660.142.156	0,13%	38.633.873.761	0,30%	*Other assets*
Jumlah	**53.796.231.041**		**53.217.365.476**		***Total***

	Jumlah/*Total*	Persentase dari Total liabilitas/ *Percentage of total liabilities*	Jumlah/*Total*	Persentase dari Total liabilitas/ *Percentage of total liabilities*	
Liabiltas					***Liabilities***
Liabilitas segera	23.390.426.178	0,64%	69.385.977.693	2,22%	*Liabilites due immediately*
Simpanan dari bank lain	52.697.586.098	1,43%	100.920.882	0,00%	*Deposits from other banks*
Simpanan dari nasabah	33.717.468.749	0,92%	38.470.831.039	1,23%	*Deposits from customers*
Jumlah	**109.805.481.025**		**107.957.729.614**		***Total***

35. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

35. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

	Jumlah/*Total*	Persentase dari total dana syirkah temporer/ *Percentage of total temporary syirkah funds*	Jumlah/*Total*	Persentase dari total dana syirkah temporer/ *Percentage of total temporary syirkah funds*	
Dana syirkah temporer					***Temporary syirkah funds***
Tabungan *mudharabah*	3.596.500.630	0,05%	3.074.503.794	0,05%	*Mudharabah savings deposits*
Deposito *mudharabah*	81.800.626.526	1,06%	217.171.101.268	3,28%	*Mudharabah time deposits*
Jumlah	**85.397.127.156**		**220.245.605.062**		***Total***

	2023		2022		
	Jumlah/*Total*	Persentase dari total pendapatan/ *Percentage of total revenue*	Jumlah/*Total*	Persentase dari total pendapatan/ *Percentage of total revenue*	
Pendapatan dari jual beli					***Income from sales and purchases***
Margin murabahah	131.859.127	0,10%	28.108.470	0,02%	*Murabahah margin*
Pendapatan operasional lainnya					***Other operating income***
Pendapatan administrasi	1.890.000	0,00%	2.095.000	0,00%	*Administration income*
Jumlah	**133.749.127**		**30.203.470**		***Total***

	2023		2022		
	Jumlah/*Total*	Persentase dari total beban/ *Percentage of total expense*	Jumlah/*Total*	Persentase dari total beban/ *Percentage of total expense*	
Beban bagi hasil dan *ujroh*					***Profit Sharing Expenses and Ujroh***
Giro *wadiah*	310.781.925	0,33%	788.548.090	0,49%	*Wadiah demand deposit*
Deposito	8.063.701.728	2,93%	5.066.246.773	3,14%	*Deposit*
Beban kepegawaian					***Employee expenses***
Tunjangan karyawan	3.320.019.539	1,73%	3.452.905.974	2,44%	*Employee allowances*
Beban umum dan administrasi					***General and administrative expenses***
Jasa layanan	4.996.186.360	2,94%	-	0,00%	*Service expenses*
Beban sewa	2.324.906.674	1,37%	2.677.379.205	2,78%	*Rent expenses*
Lainnya	482.426.941	0,28%	460.976.409	0,48%	*Others*
Jumlah	**19.498.023.167**		**12.446.056.451**		***Total***

Pada tanggal 31 Agustus 2023, Bank menandatangani perjanjian pemanfaatan *host to host* dengan PT Bank Central Asia Tbk No. 027/PKS/SBK/2023 dan No. 028/PKS/SBK/2023. Pada tanggal 31 Desember 2023, transaksi ini dicatat pada beban umum dan administrasi sebesar Rp4.996.186.360 (Catatan 28).

On August 31, 2023, Bank entered into host to host utilization agreements with PT Bank Central Asia Tbk No. 027/PKS/SBK/2023 and No. 028/PKS/SBK/2023. As of December 31, 2023, this transactions are recorded on general and administrative expenses amounted to Rp4,996,186,360 (Note 28).

36. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Tabel di bawah ini adalah perbandingan nilai tercatat dan nilai wajar dari instrumen keuangan Bank yang dicatat di laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

36. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

The table below is a comparison of the carrying value and fair value of the Bank's financial instruments recorded in the financial statements on December 31, 2023 and 2022.

	31 Desember/*December* 2023		31 Desember/*December* 2022		
	Nilai tercatat/ *Carrying value*	Nilai wajar/ *Fair value*	Nilai tercatat/ *Carrying value*	Nilai wajar/ *Fair value*	
Investasi pada surat berharga	4.288.942.295.479	4.289.575.935.479	4.110.854.607.761	4.111.881.012.761	*Investment in marketable securities*
Piutang *murabahah*	1.654.582.960.798	1.829.880.950.439	1.346.788.693.042	1.412.054.035.243	*Murabahah receivables*
Jumlah	**5.943.525.256.277**	**6.119.456.885.918**	**5.457.643.300.803**	**5.523.935.048.004**	***Total***

Tabel diatas ini menganalisis intrumen keuangan yang dicatat pada nilai wajar berdasarkan tingkatan metode penilaian. Perbedaan pada setiap tingkatan metode penilaian dijelaskan sebagai berikut:

- Tingkat 1: Harga dikutip (tidak disesuaikan) dari pasar yang aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Tingkat 2: Input selain harga yang dikutip dari pasar yang disertakan pada Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung (yaitu sebagai sebuah harga) atau secara tidak langsung (yaitu sebagai turunan dari harga); dan
- Tingkat 3: Input untuk aset atau liabilitas yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi (informasi yang tidak dapat diobservasi).

The table above analyzes financial instruments recorded at fair value based on the level of valuation method. The differences at each level of assessment method are explained as follows:

- *Level 1: Prices quoted (unadjusted) from active markets for identical assets or liabilities;*
- *Level 2: Inputs other than market quoted prices included in Level 1 that are observable for assets and liabilities, either directly (namely as a price) or indirectly (that is, as a derivative of the price); and*
- *Level 3: Inputs for assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable information).*

37. INFORMASI PENTING LAINNYA

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum ("KPMM") Bank dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.21/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014. Rasio KPMM tersebut adalah sebagai berikut:

37. OTHER IMPORTANT INFORMATION

On December 31, 2023 and 2022, the Bank's Minimum Capital Requirement ("KPMM") ratio is calculated based on Financial Services Authority Regulation No.21/POJK.03/2014 dated November 19, 2014. The KPMM ratio is as follows.

	2023 (Dalam jutaan)/ *In millions*	**2022 (Dalam jutaan)/ *In millions***	
Modal inti	3.022.480	2.884.559	*Core capital*
Modal pelengkap	89.898	79.324	*Supplementary capital*
Jumlah modal	3.112.378	2.963.883	*Total capital*
Aktiva Tertimbang Menurut Risiko ("ATMR"):			*Risk Weighted Assets ("RWA")*
ATMR untuk risiko penyaluran dana	7.986.555	7 292.927	*RWA for fund distribution risks*
ATMR untuk risiko operasional	949.422	777.900	*RWA for operational risk*
Jumlah ATMR	8.935.977	8.070.827	*Total RWA*
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum ("KPMM")	34,83%	36,72%	*Capital Adequacy Ratio ("CAR")*
Rasio KPMM yang diwajibkan	9-10%	9-10%	*Minimum CAR*

Jumlah piutang, pembiayaan dan pinjaman yang diberikan yang telah direstrukturisasi oleh Bank sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan masing-masing adalah sebesar Rp549.142.673.998 dan Rp969.254.507.659.

The amount of receivables, financing and loans provided which have been restructured by the Bank as of December 31, 2023 and 2022 which were reported to the Financial Services Authority amounted to Rp549,142,673,998 and Rp969,254,507,659, respectively.

38. OPINI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Berdasarkan Surat Dewan Pengawas Syariah ("DPS") kepada Direktur Utama Bank No.003/MO/DPS/2024 tanggal 12 Januari 2024 Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Bank BCA Syariah menyatakan bahwa secara umum aspek syariah dalam operasional dan produk PT Bank BCA Syariah telah mengikuti fatwa dan ketentuan syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ("DSN-MUI").

38. OPINION OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD

Based on the Letter of the Sharia Supervisory Board (DPS) to the President Director of the Bank No.003/MO/DPS/2024 dated January 12, 2024, the Sharia Supervisory Board (DPS) of PT Bank BCA Syariah stated that in general the sharia aspects in PT Bank BCA Syariah's operations and products have been implemented and follow the fatwa and sharia provisions issued by the National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council ("DSN-MUI").

39. STANDAR AKUNTANSI BARU

Berikut ini adalah standar akuntansi keuangan, perubahan, dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2023.

Efektif 1 Januari 2023:

Amendemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan" tentang pengungkapan kebijakan akuntansi yang mengubah istilah "signifikan" menjadi "material" dan memberi penjelasan mengenai kebijakan akuntansi material";

Amendemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan" tentang klasifikasi liabilitas;

Amendemen PSAK 25: "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan" tentang definisi "estimasi akuntansi" dan penjelasannya";

Amendemen PSAK 16: "Aset Tetap" tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan;

Amendemen PSAK 46: "Pajak Penghasilan" tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal yang diadopsi dari Amendemen IAS 12 Income Taxes tentang Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction; dan

Amendemen PSAK 107: "Akuntansi Ijarah".

Implementasi dari standar tersebut tidak merubah secara substansial kebijakan akuntansi Bank dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan.

39. NEW ACCOUNTING STANDARDS

The following are financial accounting standards, changes and interpretations of financial accounting standards that are effective from January 1, 2023.

Effective January 1, 2023:

Amendment of SFAS 1: "Presentation of Financial Statements" regarding disclosure of accounting policies that change the term "significant" to "material" and provide explanations of material accounting policies";

Amendment of SFAS 1: Presentation of Financial Statements" regarding classification of liabilities;

Amendment of SFAS 25: "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors" regarding the definition of "accounting estimates" and their explanations;

Amendment of SFAS No. 16: "Fixed Assets" regarding proceeds before intended use;

Deferred tax Amendment of SFAS No. 46: "Income Tax" on Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction which adopted from Amended IAS No. 12 Income Taxes on Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction; and

Amendment of SFAS No. 107: "Accounting for Ijarah".

The implementation of the above standards did not result in substantial changes to the Bank's accounting policies and had no material impact to the financial statements.

40. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Bank bertanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan yang telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan kepada Direksi pada tanggal 19 Januari 2024.

40. COMPLETION OF FINANCIAL STATEMENTS

Bank management is responsible for preparing financial reports which have been completed and approved for publication to the Board of Directors on January 19, 2024.

2023
Laporan Tahunan

Kantor Pusat
Jl. Jatinegara Timur No.72
Jakarta Timur 13310

(021) 850 5030, 850 5035, 819 0072
halobcasyariah@bca.co.id
Halo BCA 1500888
www.bcasyariah.co.id